



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA**



**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan huruf D Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting, adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan dan terjadinya perubahan yang mendasar;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat penjenjangan kinerja instansi pemerintah yang belum sesuai, termasuk didalamnya penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja organisasi kepada unit organisasi serta penyesuaian target kinerja daerah, sehingga Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 273);

23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 5);
28. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48);
29. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 13) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ASEP SUKMANA

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 39

DAFTAR ISI

	Hal.
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 - 2026	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-4
1.4. Maksud dan Tujuan	I-6
1.5. Sistematika Penulisan.....	I-7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-14
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-39
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-131
2.2 Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	II-136
2.2.1 Evaluasi Kinerja Daerah	II-136
2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 – 2026	II-139
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III-2
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III-2
3.1.2 Neraca Daerah.....	III-11
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-17
3.2.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah	III-17
3.2.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah	III-19
3.2.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah	III-20
3.2.4 Proporsi Anggaran Pendapatan	III-20
3.2.5 Proporsi Penggunaan Anggaran	III-22
3.2.6 Analisa Pembiayaan Daerah	III-23
3.3 Kerangka Pendanaan	III-24
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III-24
3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan	III-30
3.3.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah ...	III-32
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI DAERAH	IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	IV-4
4.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	IV-4
4.1.3 Aspek Pelayanan Umum	IV-5
4.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	IV-9
4.2. Isu Strategis	IV-10
4.2.1 Isu Strategis Internasional	IV-10

	4.2.2	Isu Strategis Nasional	IV-12
	4.2.3	Isu Strategis Provinsi Jawa Barat	IV-15
	4.2.4	Isu Strategis Kabupaten/Kota Sekitar	IV-17
	4.2.5	Isu Strategis Kota Tasikmalaya	IV-20
BAB V		TUJUAN DAN SASARAN	V-1
	5.1.	Visi dan Misi RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025	V-1
	5.2.	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Tahap Keempat	V-2
	5.3.	Tujuan dan Sasaran	V-3
BAB VI		STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
	6.1	Strategi dan Arah Kebijakan	VI-1
	6.1.1	Strategi Pembangunan Daerah	VI-1
	6.1.2	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	VI-4
	6.2	Prioritas Pembangunan Daerah	VI-25
	6.3	Program Pembangunan Daerah	VI-27
	6.4	Penerapan Standar Pelayanan Minimal	VI-34
	6.5	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs)	VI-38
BAB VII		KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	VII-1
	7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah.....	VII-1
	7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan.....	VII-3
BAB VIII		KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.	VIII-1
BAB IX		PENUTUP.....	IX-1

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1. Kondisi Kemiringan Lahan Kota Tasikmalaya	II-3
Tabel 2.2. Penggunaan Lahan Kota Tasikmalaya	II-7
Tabel 2.3. Kepadatan Penduduk Kota Tasikmalaya	II-10
Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-11
Tabel 2.5. Rencana Pola Ruang Kota Tasikmalaya	II-13
Tabel 2.6. Indeks Pembangunan Manusia Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-15
Tabel 2.7. Data Kemiskinan Kota Tasikmalaya 2020 – 2024	II-16
Tabel 2.8. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa barat	II-17
Tabel 2.9. Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2023 (Milyar Rupiah)	II-19
Tabel 2.10. Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Konstan, Tahun 2020 -2023 (Milyar Rupiah)	II-19
Tabel 2.11. Peranan Kategorial dalam PDRB Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 - 2023 (Persen)	II-20
Tabel 2.12. PDRB menurut pengeluaran Tahun 2021 – 2023	II-23
Tabel 2.13. Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga Kota Tasikmalaya, 2019 – 2023	II-24
Tabel 2.14. Perkembangan Konsumsi Lembaga Non Profit (LNPR) Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-24
Tabel 2.15. Perkembangan Konsumsi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-25
Tabel 2.16. Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Tasikmalaya, 2019-2023	II-26
Tabel 2.17. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Tasikmalaya, 2019-2023	II-27
Tabel 2.18. Perbandingan Capaian HLS dan RLS Kota di Jawa Barat Tahun 2023	II-31
Tabel 2.19. Gambaran Umum Kesehatan Kota Tasikmalaya 2019-2023	II-31
Tabel 2.20. Fasilitas pelayanan Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2023	II-32
Tabel 2.21. Rasio Tiap Jenis Tenaga Kesehatan terhadap Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2023	II-34
Tabel 2.22. Fasilitas pelayanan Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2023	II-34
Tabel 2.23. Jumlah Grup dan Gedung Seni Budaya	II-36
Tabel 2.24. Jumlah Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya	II-37
Tabel 2.25. Jumlah Cagar Budaya Kota Tasikmalaya Tahun 2023	II-37
Tabel 2.26. Data Cagar Budaya Kota Tasikmalaya Tahun 2023	II-37
Tabel 2.27. Jumlah Sekolah di Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2023	II-42

Tabel 2.28.	Rasio Guru-Murid dan Rombel-Murid SD di Kota Tasikmalaya Tahun 2021 – 2023	II-44
Tabel 2.29.	Rasio Guru-Murid dan Rombel-Murid SMP di Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2023	II-44
Tabel 2.30.	Jumlah Murid Program Paket A, B dan C di Kota Tasikmalaya Tahun 2021 – 2023	II-45
Tabel 2.31.	Jumlah penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan di Kota Tasikmalaya Tahun 2021 sd 2023	II-45
Tabel 2.32.	Capaian Indikator Pelayanan Urusan Pendidikan Tahun 2021- 2023	II-46
Tabel 2.33.	Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kesehatan Tahun 2021-2023	II-47
Tabel 2.34.	Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2023	II-49
Tabel 2.35.	Jumlah Tenaga Medis Di Fasilitas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2023	II-50
Tabel 2.36.	Rasio Panjang Jalan dengan Luas Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-51
Tabel 2.37.	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	II-51
Tabel 2.38.	Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2019 – 2023	II-52
Tabel 2.39.	Kinerja Jaringan Irigasi dan Pengairan Lainnya Tahun 2021-2023	II-53
Tabel 2.40.	Capaian Kinerja Tata Ruang Tahun 2021-2023	II-54
Tabel 2.41.	Capaian Indikator Kinerja Tata Bangunan Tahun 2021 – 2023	II-54
Tabel 2.42.	Kondisi Bangunan Gedung Kantor Pemerintah Tahun 2023	II-55
Tabel 2.43.	Indikator Infrastruktur Permukiman Tahun 2021 – 2023	II-55
Tabel 2.44.	Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 – 2023	II-56
Tabel 2.45.	Kawasan Kumuh di Kota Tasikmalaya Berdasarkan SK Walikota Tahun 2021	II-57
Tabel 2.46.	Capaian Indikator Pelayanan Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Linmas Tahun 2021 – 2023	II-58
Tabel 2.47.	Kejadian Bencana Tahun 2021-2023	II-61
Tabel 2.48.	Capaian Indikator Pelayanan Urusan Sosial Tahun 2021 – 2023	II-61
Tabel 2.49.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kategori Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2023	II-62
Tabel 2.50.	Jumlah dan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja dan Pengangguran Terbuka di Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2023	II-63
Tabel 2.51.	Capaian Indikator Pelayanan Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2021 – 2023	II-63
Tabel 2.52.	Capaian Indikator Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 - 2023	II-64

Tabel 2.53.	Capaian Indikator Pelayanan Urusan Pangan Tahun 2021-2023	II-65
Tabel 2.54.	Pelayanan Umum Urusan Pertanahan Tahun 2021 – 2023	II-65
Tabel 2.55.	Capaian Indikator Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2023	II-66
Tabel 2.56.	Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023	II-67
Tabel 2.57.	Pembebasan Lahan untuk RTH	II-67
Tabel 2.58.	Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tahun 2023	II-67
Tabel 2.59.	Taman Kota Tasikmalaya Tahun 2023	II-68
Tabel 2.60.	Perhitungan Indeks Kualitas Air Berdasarkan Lokasi Sampel Tahun 2023	II-69
Tabel 2.61.	Indeks Kualitas Udara Berdasarkan Lokasi Sampel Tahun 2023	II-70
Tabel 2.62.	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Tasikmalaya Tahun 2021 – 2023	II-70
Tabel 2.63.	Penanganan Pengaduan Tahun 2021 – 2023	II-71
Tabel 2.64.	Sarana Pengangkutan Persampahan Tahun 2023	II-73
Tabel 2.65.	Sarana Alat Berat Persampahan Tahun 2023	II-73
Tabel 2.66.	Jumlah Bank Sampah di Kota Tasikmalaya Tahun 2021 – 2023	II-74
Tabel 2.67.	Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	II-74
Tabel 2.68.	Jumlah Penduduk yang memiliki KTP-Elektronik Tahun 2023	II-76
Tabel 2.69.	Pelayanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021 – 2023	II-76
Tabel 2.70.	Capaian Indikator Pelayanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021 – 2023	II-77
Tabel 2.71.	Pelayanan Umum Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 – 2023	II-77
Tabel 2.72.	Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perhubungan Tahun 2021 – 2023	II-78
Tabel 2.73.	Pembangunan Urusan Perhubungan Dari Tahun 2021-2023	II-79
Tabel 2.74.	Jumlah dan Kondisi Rambu-Rambu Lalu Lintas Tahun 2021-2023	II-79
Tabel 2.75.	Marka Jalan Menurut Kondisinya Tahun 2021- 2023 ...	II-80
Tabel 2.76.	Penerangan Jalan Umum (PJU) Menurut Kondisinya Tahun 2021-2023	II-80
Tabel 2.77.	Fasilitas Penyebrangan (Zebra Cross) Menurut Kondisinya Tahun 2021-2023	II-81
Tabel 2.78.	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Menurut Kondisinya Tahun 2021 – 2023	II-81
Tabel 2.79.	Panjang Guard Rail (Pagar Pengaman) Tahun 2021 – 2023	II-82
Tabel 2.80.	Cermin Tikungan Menurut Jumlahnya Tahun 2021 – 2023	II-82
Tabel 2.81.	Pita Pengaduh Menurut Kondisinya Tahun 2021 – 2023	II-82

Tabel 2.82.	Ruang Parkir Pada Badan Jalan Tahun 2021 – 2023 ...	II-83
Tabel 2.83.	Terminal Angkutan Penumpang Tahun 2023	II-83
Tabel 2.84.	Jumlah Trayek Angkutan Umum Tahun 2023	II-84
Tabel 2.85.	Data Trayek Angkutan Kota Tahun 2022 – 2023	II-84
Tabel 2.86.	Data Kendaraan Wajib Uji Tahun 2021 – 2023	II-85
Tabel 2.87.	Realiasi Kegiatan Ijin Trayek Aktif dan Jumlah Kendaraan Lulus uji Dinas Perhubungan 2021-2023 ...	II-86
Tabel 2.88.	Capaian Indikator Pelayanan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 – 2023	II-86
Tabel 2.89.	Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan dan Ditolak	II-89
Tabel 2.90.	Keragaman Koperasi di Kota Tasikmalaya tahun 2023	II-89
Tabel 2.91.	Sebaran Koperasi yang Berkualitas di Kota Tasikmalaya Tahun 2023	II-90
Tabel 2.92.	Data Koperasi Bersertifikat NIK Per-Kecamatan	II-91
Tabel 2.93.	Jumlah Usaha Mikro di Kota Tasikmalaya Berdasarkan Izin Usaha yang Dikeluarkan Tahun 2023	II-92
Tabel 2.94	Capaian Indikator Pelayanan Urusan Koperasi,Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2021-2023	II-92
Tabel 2.95	Capaian Indikator Pelayanan Urusan Penanaman Modal Tahun 2021 – 2023	II-93
Tabel 2.96	Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kepemudaan dan Olahraga	II-94
Tabel 2.97	Capaian Indikator Pelayanan Urusan Statistik	II-95
Tabel 2.98	Capaian Indikator Pelayanan Urusan Persandian	II-96
Tabel 2.99	Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kebudayaan Tahun 2018 – 2021	II-97
Tabel 2.100	Data Cagar Budaya dan Kelompok Seni Kota Tasikmalaya Tahun 2021	II-97
Tabel 2.101	Data Cagar Budaya Kota Tasikmalaya Tahun 2021	II-97
Tabel 2.102	Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perpustakaan Tahun 2018 – 2021	II-98
Tabel 2.103	Data Perpustakaan Kota Tasikmalaya Tahun 2021.....	II-99
Tabel 2.104	Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kearsipan Tahun 2018 – 2021	II-100
Tabel 2.105	Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan Tahun 2017-2021	II-101
Tabel 2.106	Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perikanan	II-101
Tabel 2.107	Data Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata di Kota Tasikmalaya	II-102
Tabel 2.108	Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Tasikmalaya Tahun 2018 – 2021	II-105
Tabel 2.109	Data Hotel di Kota Tasikmalaya	II-105
Tabel 2.110	Data Luas Sawah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 – 2023	II-107
Tabel 2.111	Kelompok Tani di Kota Tasikmalaya Tahun 2021 – 2023	II-107
Tabel 2.112	Perkembangan Populasi Ternak di Kota Tasikmalaya Tahun 2021 – 2023 (Ekor)	II-109
Tabel 2.113	Capaian Pelayanan Umum Urusan Pertanian Tahun 2021 – 2023	II-111
Tabel 2.114	Jumlah Pasar Rakyat Tahun 2023	II-112
Tabel 2.115	Sebaran Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan	II-112

Tabel 2.116	Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan	II-113
Tabel 2.117	Capaian Pelayanan Umum Urusan Perdagangan Tahun 2021 – 2023	II-114
Tabel 2.118	Perkembangan Jumlah Unit Industri Kota Tasikmalaya Tahun 2022 – 2023	II-115
Tabel 2.119	Penambahan Unit Industri Di Kota Tasikmalaya Tahun 2023 berdasarkan KBLI	II-115
Tabel 2.120	Perkembangan Potensi Komoditi Industri Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2022	II-117
Tabel 2.121	Capaian Indikator Pelayanan Urusan Industri Tahun 2021 – 2023	II-118
Tabel 2.122	Nilai SAKIP Kota Tasikmalaya Tahun 2021 – 2023	II-119
Tabel 2.123	Capaian LPPD Kota Tasikmalaya Tahun 2021 – 2023 ...	II-119
Tabel 2.124	Sumber Daya Manusia pada BPBJ Tahun 2023	II-120
Tabel 2.125	Capaian MCP Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Tasikmalaya	II-121
Tabel 2.126	Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Bidang Perencanaan Tahun 2021 – 2023	II-123
Tabel 2.127	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Tasikmalaya Tahun 2023	II-124
Tabel 2.128	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Tasikmalaya Tahun 2023	II-125
Tabel 2.129	Skala Nilai Peringkat Kinerja	II-125
Tabel 2.130	Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Bidang Keuangan Tahun 2021 – 2023	II-126
Tabel 2.131	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Bidang Kepegawaian Tahun 2021-2023	II=128
Tabel 2.132	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021 – 2023	II-129
Tabel 2.133	Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Bidang Pengawasan Tahun 2021 – 2023	II-130
Tabel 2.134	Angka Konsumsi Rumah Tangga di Kota Tasikmalaya Tahun 2021 – 2023	II-131
Tabel 2.135	Persentase Konsumsi Rumah Tangga di Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2023	II-132
Tabel 2.136	Jumlah Kasus Kriminalitas di Kota Tasikmalaya Tahun 2020 - 2022	II-133
Tabel 2.137	Jumlah Demonstrasi di Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2023	II-134
Tabel 2.138	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Kota Tasikmalaya	II-137
Tabel 2.139	Evaluasi Pelaksanaan Program Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Sampai dengan Tahun 2023	II-139
Tabel 3.1.	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2018-2022	III-8
Tabel 3.2.	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi APBD.....	III-9
Tabel 3.3.	Neraca Pemerintah Kota Tasikmalaya Per 31 Desember Tahun 2018-2022	III-12
Tabel 3.4.	Rasio Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2022	III-16

Tabel 3.5.	Surplus/Defisit dan Pembiayaan Daerah Tahun 2018-2022	III-23
Tabel 3.6.	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023-2026	III-25
Tabel 3.7.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026	III-31
Tabel 4.1.	Keselaran Isu Strategis Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya, RPD Provinsi Jawa Barat dan RPJMN	IV-33
Tabel 5.1.	Tujuan Dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 - 2026	V-7
Tabel 5.2.	Keselaran Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026	V-12
Tabel 5.3	Keselaran Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026	V-17
Tabel 6.1	Strategi Pembangunan dan Arah Kebijakan	VI-6
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan (Tema Pembangunan)...	VI-10
Tabel 6.3	Keselaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan	VI-11
Tabel 6.4.	Keselaran Prioritas Pembangunan Daerah RPD 2023-2026	VI-26
Tabel 6.5.	Program Pembangunan Daerah.....	VI-27
Tabel 6.6.	Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	VI-34
Tabel 6.7.	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs).....	VI-39
Tabel 7.1.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026	VII-2
Tabel 7.2.	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 – 2026	VII-4
Tabel 8.1.	Penetapan Target Indikator Makro Kota Tasikmalaya...	VIII-2
Tabel 8.2.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Tasikmalaya.....	VIII-3
Tabel 8.3.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026.....	VIII-8
Tabel 8.4.	Rencana Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026.....	VIII-49

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1. Hubungan RPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya	I-5
Gambar 1.2. Hubungan RPD dan Renstra	I-6
Gambar 2.1. Peta Orientasi dan Pembagian Wilayah Kota Tasikmalaya	II-2
Gambar 2.2. Peta Topografi Kota Tasikmalaya	II-2
Gambar 2.3. Peta Morfologi Kota Tasikmalaya	II-3
Gambar 2.4. Peta Geologi Kota Tasikmalaya	II-4
Gambar 2.5. Peta Hidrologi Kota Tasikmalaya	II-5
Gambar 2.6. Jumlah Curah Hujan (mm) dan Jumlah Hari Hujan (hari) di Kota Tasikmalaya Tahun 2023	II-6
Gambar 2.7. Rata-rata Suhu dan Kelembapan di Kota Tasikmalaya Tahun 2023	II-6
Gambar 2.8. Rata-rata Kecepatan Angin dan Tekanan Udara di Kota Tasikmalaya Tahun 2023	II-7
Gambar 2.9. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-10
Gambar 2.10. Peta Rencana Pola Ruang Kota Tasikmalaya	II-14
Gambar 2.11. Perkembangan IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2023	II-16
Gambar 2.12. Target & Realisasi Angka Kemiskinan Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2023 (Persen)	II-17
Gambar 2.13. Kemiskinan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dan Nasional	II-17
Gambar 2.14. Kemiskinan Jawa Barat Tahun 2023	II-18
Gambar 2.15. Empat Besar Peranan Kategori PDRB Kota Tasikmalaya, 2020-2023 (Persen)	II-21
Gambar 2.16. Target & Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya Tahun 2021 - 2023 (Persen)	II-22
Gambar 2.17. LPE Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2021 – 2023 (persen)	II-22
Gambar 2.18. LPE Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis Tahun 2021 - 2023	II-23
Gambar 2.19. PDRB per Kapita Kota Tasikmalaya Adh Konstan 2019-2023	II-27
Gambar 2.20. PDRB per Kapita Kota Tasikmalaya adh Berlaku 2019-2023	II-28
Gambar 2.21. Perkembangan Laju Inflasi Kota Tasikmalaya 2019-2023	II-28
Gambar 2.22. Koefisien Gini Kota Tasikmalaya 2019-2023	II-29
Gambar 2.23. Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah	II-30
Gambar 2.24. Capaian Harapan Lama Sekolah	II-31
Gambar 2.25. Jumlah Tenaga Kesehatan menurut Jenis Tenaga di Kota Tasikmalaya tahun 2023	II-33
Gambar 2.26. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tasikmalaya 2019 -2023	II-35

Gambar 2.27	Partisipasi Angkatan Kerja Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2023 (persen)	II-36
Gambar 2.28	Angka Partisipasi Kasar PAUD Tahun 2021-2023 ...	II-39
Gambar 2.29	Angka Partisipasi Kasar SD Tahun 2021-2023	II-39
Gambar 2.30	Angka Partisipasi Kasar SMP Tahun 2021-2023	II-40
Gambar 2.31	Angka Partisipasi Murni SD Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2023	II-40
Gambar 2.32	Angka Partisipasi Murni SMP Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2023	II-41
Gambar 2.33	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2023	II-41
Gambar 2.34	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2023	II-42
Gambar 2.35	Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan Tahun 2023	II-43
Gambar 2.36	Kondisi Ruang Kelas SD dan SMP Tahun 2023	II-43
Gambar 2.37	Persentase Capaian Pengelolaan Sampah Tahun 2021-2023	II-71
Gambar 2.38	Persentase Penanganan Sampah Tahun 2021-2023	II-72
Gambar 2.39	Persentase Pengurangan Sampah Tahun 2021-2023	II-72
Gambar 2.40.	Perolehan Medali Cabang Olahraga Beprestasi Kota Tasikmalaya Tahun 2021 - 2023	II-95
Gambar 2.41.	Produksi Tanaman Pangan di Kota Tasikmalaya Tahun 2021 - 2023	II-108
Gambar 2.42.	Perkembangan Produksi Daging di Kota Tasikmalaya Tahun 2021 - 2023	II-110
Gambar 2.43	Perkembangan Produksi Telur dan Susu di Kota Tasikmalaya Tahun 2021 - 2023	II-110
Gambar 2.44.	Jumlah UTTP Berdasarkan Jenis UTTP	II-113
Gambar 2.45.	Ringkasan APBD pada Website	II-127
Gambar 2.46.	Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio) Kota Tasikmalaya 2021-2023	II-136
Gambar 3.1.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022	III-3
Gambar 3.2.	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018-2022	III-3
Gambar 3.3.	Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2018-2022	III-4
Gambar 3.4.	Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2018-2022	III-4
Gambar 3.5.	Target dan Realisasi Belanja Tahun 2018-2022	III-5
Gambar 3.6.	Target dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2018-2022	III-6
Gambar 3.7.	Target dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2018-2022	III-6
Gambar 3.8.	Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2018-2022	III-7
Gambar 3.9.	Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022	III-21
Gambar 3.10.	Proporsi Agregat Realisasi Pendapatan Tahun 2018-2022	III-21

Gambar 3.11.	Proporsi Realisasi Belanja Tahun 2018-2022	III-22
Gambar 3.12.	Proporsi Agregat Realisasi Belanja Tahun 2018-2022	III-22
Gambar 4.1.	Visi misi, arah kebijakan dan agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024	IV-13
Gambar 5.1.	Cascading Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023 -2026	V-6
Gambar 6.1.	Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal Berdasarkan Analisis SWOT	VI-2

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN
2023-2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 268 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan daerah ditujukan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, penciptaan kesempatan kerja dan lapangan berusaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Oleh karena itu, pembangunan daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintah daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki.

Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa sesuai dengan kewenangannya, pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022, mengamanatkan bahwa kepala daerah yang jabatannya berakhir pada tahun 2022 harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 dan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026.

Dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022 tersebut, telah terjadi dinamika pembangunan yang mempengaruhi



keberlangsungan implementasinya. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya beberapa kebijakan nasional baru maupun perkembangan keadaan daerah yang memengaruhi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Memasuki tahun kedua pelaksanaan RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023–2026, telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD. Hasil evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPD, karena memenuhi ketentuan pada poin D Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, perubahan RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting.
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan.
3. Terjadinya perubahan mendasar.
4. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal ini terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perubahan RPD Tahun 2023-2026 Kota Tasikmalaya merupakan acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) setiap Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada tingkat daerah, RPJMD dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan pada tingkat Perangkat Daerah, Perubahan Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana tahunan yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rencana pembangunan tahunan inilah yang kemudian menterjemahkan pembangunan jangka menengah ke dalam program dan kegiatan.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Perubahan RPD Tahun 2023-2026 Kota Tasikmalaya mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana disajikan berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20154 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 170);
26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
28. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48);
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antara dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 dan Perubahannya dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

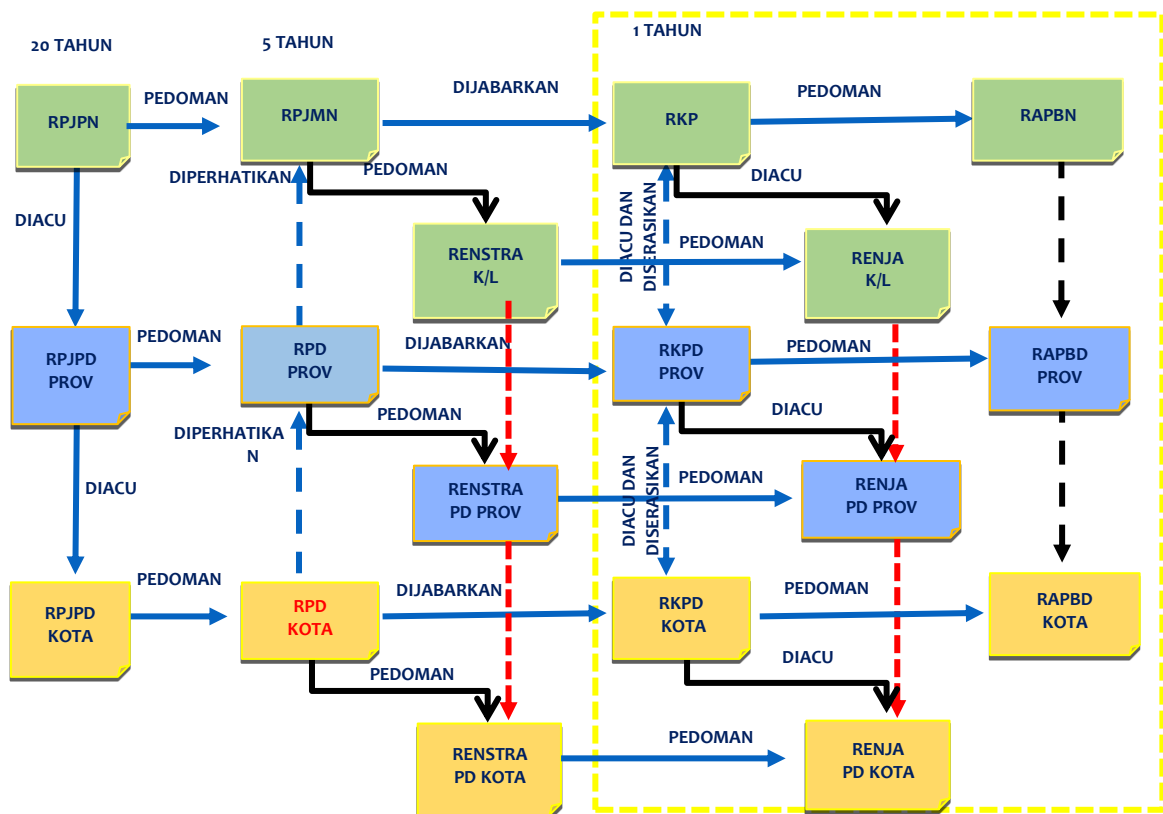
1. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 dan perubahannya memperhatikan dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024 karena pembangunan



- daerah adalah bagian pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional akan tercapai jika didukung oleh pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan nasional;
2. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 dan perubahannya sebagai dokumen perencanaan jangka menengah merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPD Tahun 2023-2026 dan perubahannya merupakan penjabaran RPJPD Kota Tasikmalaya 2005-2025;
 3. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 dan perubahannya menjadi pedoman/acuan para Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD Tahun 2023-2026 dan perubahannya. Renstra PD menjabarkan rencana teknis operasional setiap urusan atau fungsi pemerintahan selama 4 (empat) tahun;
 4. Pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan. Dokumen RKPD memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja PD;
 5. Berpedoman pada Renstra PD, setiap PD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) PD. Renja PD inilah yang menjadi acuan teknis pelaksanaan program/kegiatan tahunan PD untuk menjadi bagian RKPD;
 6. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026, diselaraskan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPD Tahun 2023-2026 guna memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Adapun hubungan antara Rencana Pembangunan Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1.
Hubungan RPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya



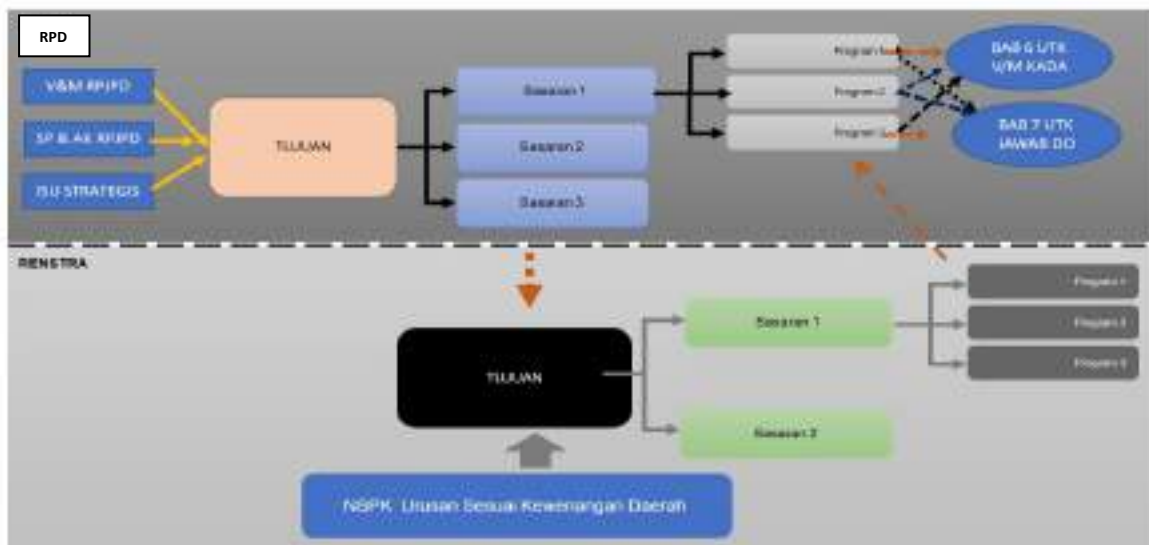
Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Tahun 2024



Berdasarkan gambar tersebut di atas, bahwa Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya berpedoman pada RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMN tahun 2019-2024.

Adapun hubungan antara Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.2.
Hubungan RPD dan Renstra



Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Tahun 2024

Selanjutnya, mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, dalam penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 harus memperhatikan:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2019-2024.
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Tasikmalaya sampai tahun 2025.
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPD Kota Tasikmalaya sampai dengan Tahun 2023.
4. RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.
5. Isu-isu strategis yang berkembang.
6. Kebijakan nasional
7. Regulasi yang berlaku.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026.

Tujuan dari perubahan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 adalah:

1. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) PD;
2. Sebagai pedoman penyusunan RKPD;
3. Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah;



4. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Tasikmalaya dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang RPD; dan
5. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kota Tasikmalaya secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang disajikan diantaranya aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas riil atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Bab ini menyajikan mengenai kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, kerangka pendanaan. Selain itu juga diuraikan mengenai kebijakan keuangan daerah Kota Tasikmalaya untuk jangka menengah.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan yang diuraikan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 4 (empat) tahun mendatang.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Bab ini juga menyajikan program pembangunan daerah yang dirumuskan dari masing-masing strategi untuk selanjutnya dijabarkan oleh program prioritas atau program operasional pada perangkat daerah.



BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, Perangkat Daerah pelaksana berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisikan penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB IX PENUTUP



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Letak Geografis dan Kondisi Administrasi Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya merupakan pemekaran dari Kabupaten Tasikmalaya, yang secara resmi dibentuk pada tanggal 17 Oktober 2001, melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun tentang Pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Secara administratif pada tahun 2022, Kota Tasikmalaya terbagi ke dalam 10 kecamatan dan memiliki kelurahan sebanyak 69 kelurahan, dengan jumlah RW sebanyak 864 dan jumlah RT sebanyak 3643.

Kota Tasikmalaya mempunyai batas-batas wilayah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cisayong dan Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Cihaurbeuti dan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jatiwaras dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Singaparna, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya.

Batas Daerah Kota Tasikmalaya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut, menjadi dasar untuk menghitung luas wilayah Kota Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021 yaitu seluas 183,94 Km² (dihitung menggunakan Sistem Proyeksi Cylindrical Equal Area/CEA) atau 184,22 Km² (dihitung menggunakan Sistem Proyeksi Unit Transverse Mecator/UTM).

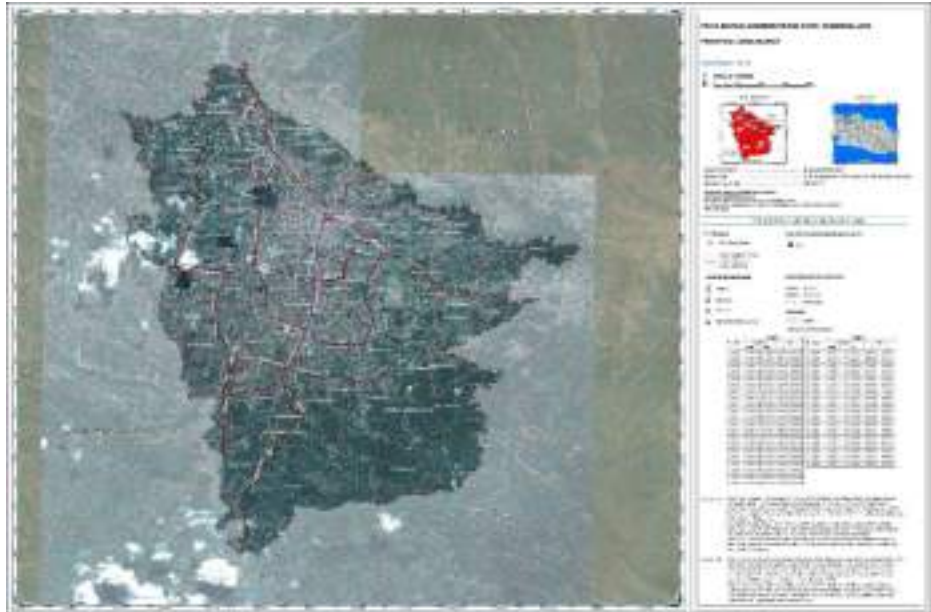
Saat ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat sedang dalam proses perubahan karena adanya Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 100/06/Pem.X/2021 dan Nomor : P/2251/PN.0309/Pem/2021 tanggal 25 Oktober 2021. Adapun hasil dari perhitungan luas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dan Berita Acara tersebut diatas, maka luas wilayah Kota Tasikmalaya adalah 182,96 Km² (dihitung menggunakan Sistem Proyeksi Cylindrical Equal Area/CEA).

Secara geografis, Kota Tasikmalaya memiliki posisi yang strategis, yaitu pada 108° 08' 38" – 108° 24' 02" BT dan 7° 10' – 7° 26' 32" LS, berada pada posisi bagian Tenggara wilayah Provinsi Jawa Barat, berjarak ± 105 km dari Kota



Bandung dan ± 255 km dari Kota Jakarta. Kondisi Kota Tasikmalaya secara geografis ditunjukkan dengan struktur geologis yang dihasilkan oleh bentukan material-material/breksi gunung berapi yang berasal dari pengaruh Gunung Galunggung, Gunung Sawal dan Gunung Cakrabuana. Untuk lebih jelasnya mengenai letak orientasi dan batas administrasi dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1.
Peta Orientasi dan Pembagian Wilayah Kota Tasikmalaya

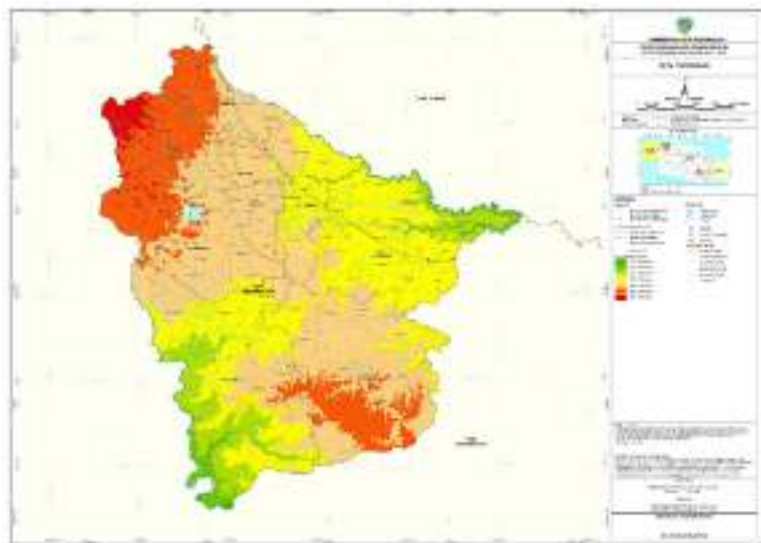


Sumber: Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya 2024

2.1.1.2 Topografi

Berdasarkan bentang alamnya, Kota Tasikmalaya berada pada ketinggian antara 201 sampai dengan 503 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan mempunyai dataran dengan kemiringan relatif kecil. Daerah tertinggi berada di Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari (kaki Gunung Galunggung) yaitu 503 mdpl sedangkan terendah berada di Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu yaitu 201 mdpl.

Gambar 2.2.
Peta Topografi Kota Tasikmalaya



Sumber: Data BIG (diolah), 2017



Ditinjau dari segi fisiografi wilayah, sebagian besar tempat tertinggi Kota Tasikmalaya terdapat di bagian barat dan selatan, kemudian menurun ke tengah di sekitar pusat kota menuju utara, serta sebagian kecil dari timur ke tengah dan utara Kota Tasikmalaya. Pada bagian selatan wilayah Kota Tasikmalaya, di sekitar Kecamatan Kawalu dan Tamansari, kondisinya cenderung berbukit-bukit dengan ciri hutan dan kebun campuran.

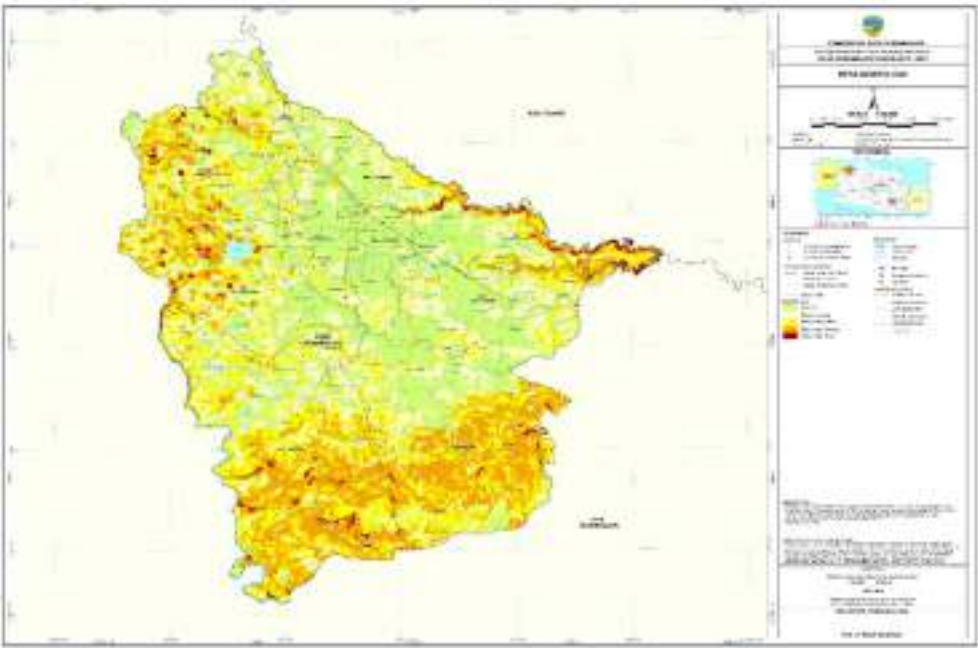
Kondisi Rupa Bumi (geomorfologi) seperti ini membagi dua wilayah Kota Tasikmalaya menjadi arah Barat Laut dan arah Selatan Kota Tasikmalaya. Kondisi fisik bentang alam ini sangat terkait dengan kondisi hidrologi, selain itu juga dipengaruhi oleh kondisi topografi dan kemiringan lerengnya. Dari kondisi ini Kota Tasikmalaya terbagi kedalam dua daerah aliran sungai (DAS), yaitu di sebelah Utara hingga Timur Laut merupakan DAS Citanduy dengan aliran air menuju kearah Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. Sedangkan di sebelah Barat hingga Barat Daya merupakan DAS Ciwulan dimana aliran air menuju kearah Kecamatan Sukaraja dan Tanjung Jaya di Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 2.1.
Kondisi Kemiringan Lahan Kota Tasikmalaya

Kelas Lereng	Luas (Hektar)	Luas (%)
0 – 2%	5.372,15	29,16
2 – 5%	4.574,18	24,83
5 – 15%	4.882,58	26,50
15 – 25%	1.543,24	8,38
25 -40%	1.799,53	9,77
>40%	250,36	1,36
Total	18.422,04	100,00

Sumber: Data BIG dan Hasil Pengolahan, 2017

Gambar 2.3.
Peta Morfologi Kota Tasikmalaya



Sumber : Data BIG (diolah), 2017



2.1.1.3 Geologi

Berdasarkan hasil kajian peta geologi lembar Tasikmalaya (T. Budhitrisna, 1982), struktur geologi Kota Tasikmalaya terbentuk dari material dasar berupa batuan induk vulkanik, yaitu susunan batuan yang terdiri dari breksi vulkanik termampat lemah dengan bongkah lava andesit yang dihasilkan pada tingkat gunung api tua. Batuan ini tersebar merata, menutupi hampir seluruh wilayah Kota Tasikmalaya. Pada tingkatan gunung api muda, susunan batuan yang dihasilkan mulai dari breksi gunung api, lahar, tufa berlapis, batuan andesit sampai basal yang tersebar secara terbatas di bagian tenggara. Sedangkan pada bagian utara, tengah dan selatan terdapat sesar normal, sesar naik, serta lipatan berupa antiklin dan siklin.

Pola struktur sesar normal akan menimbulkan pemotongan pada bagian tubuh batuan dan umumnya membentuk gawir, sedangkan sesar naik disamping dapat membentuk gawir juga perlapisan batuan menjadi berlipat-lipat dan hancur, bidang pemotongan ini merupakan bidang lemah yang biasanya membentuk gawir-gawir curam dan terjal dimana proses gerakan tanah ini dapat berkembang, hal ini sering terlihat pada bantaran sungai akibat pengikisan dan penyempitan.

Gambar 2.4.
Peta Geologi Kota Tasikmalaya



Sumber : Data BIG (diolah), 2017

2.1.1.4 Hidrologi dan Hidrogeologi

Potensi sumber daya air dari air permukaan di Kota Tasikmalaya meliputi sungai dan air dalam cekungan (danau/situ). Di wilayah Kota Tasikmalaya mengalir 51 Daerah Irigasi yang termasuk dalam 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Citanduy dan DAS Ciwulan. DAS Citanduy memiliki limpasan air sungai rata-rata bulanan sebesar 17 m³/detik atau rata-rata harian sekitar 5,5 m³/detik, sedangkan DAS Ciwulan memiliki limpasan air sungai rata-rata harian sebesar 13,7 m³/detik. Jumlah kedua limpasan adalah 1.658.880 m³/hari. Sedangkan waduk/situ di Kota Tasikmalaya mempunyai potensi menyediakan air sebesar 1.646.750 m³. Situ-situ tersebut adalah Situ Gede di Kecamatan

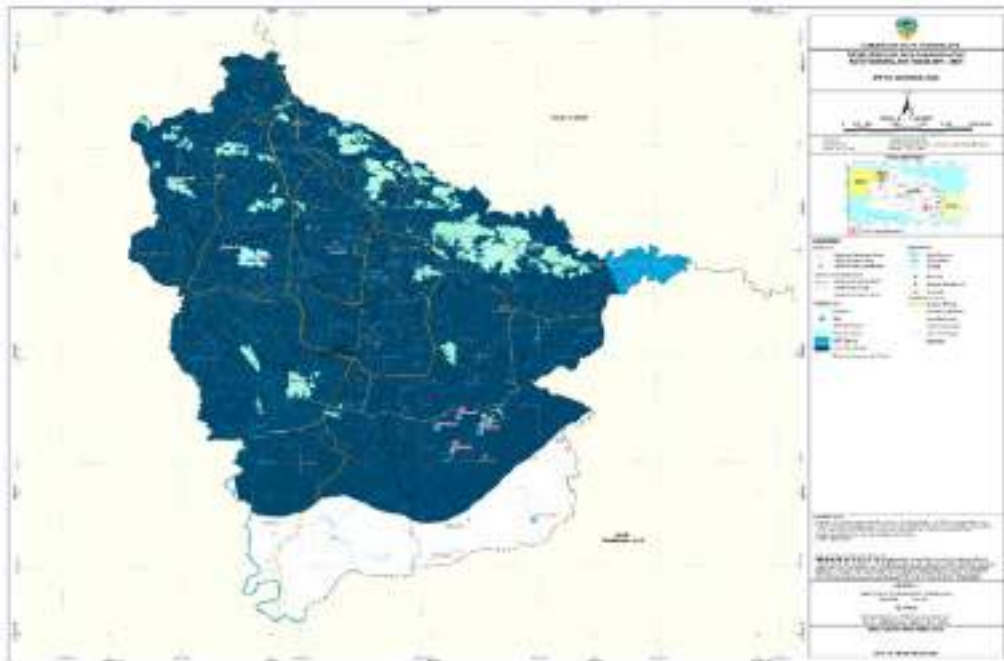


Mangkubumi (6.000 m³/detik), Situ Cibeureum, Situ Cibanjuran, Situ Malingping, Situ Bojong dan Situ Cicangri di Kecamatan Tamansari (6.000 m³/detik).

Selain potensi air permukaan, Kota Tasikmalaya memiliki potensi kandungan air tanah yang relatif dangkal, karena air tanah dapat diperoleh dari sumur dengan kedalaman antara 3,00-10,00 m. Kedalaman sumur gali untuk bisa keluar air cukup dangkal, antara 1,50-7,00 m. Sumber air tanah dalam bentuk mata air yang terdapat di Kecamatan Mangkubumi, Bungursari, Kawalu dan Tamansari.

Ditinjau dari kondisi hidrogeologi, Kota Tasikmalaya dikategorikan sebagai daerah akuifer, alirannya didasarkan melalui celahan dan ruang antara butir yang merupakan ciri dari lereng gunung api strato. Sistem akuifer di Kota Tasikmalaya yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan air dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu; sistem akuifer tunggal pada unit vulkanik, sistem akuifer pada celahan-celahan batuan sedimen tersier serta sistem akuifer rekahan-rekahan yang dibentuk oleh batu gamping.

Gambar 2.5.
Peta Hidrologi Kota Tasikmalaya



Sumber : Data BIG (diolah), 2017

2.1.1.5 Klimatologi

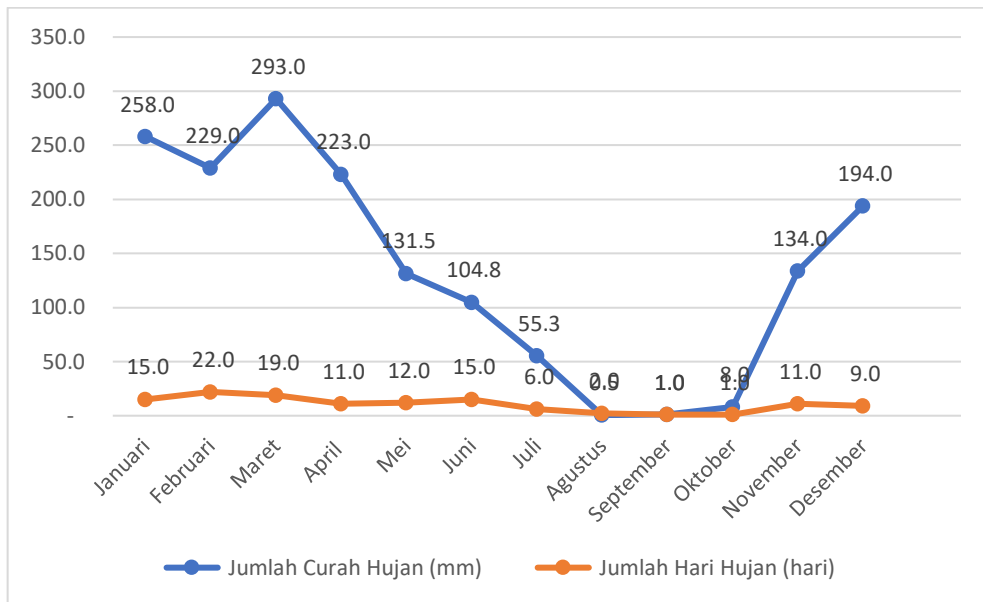
Secara geografis, Kota Tasikmalaya memiliki iklim tropis yang menyebabkan wilayah ini memiliki dua musim yaitu hujan dan kemarau. Dua musim ini berkaitan erat dengan suhu minimum dan maksimum yang terjadi setiap tahunnya. Iklim dan cuaca merupakan gambaran parameter dari kondisi atmosfer di suatu wilayah yang dibentuk dari unsur-unsur seperti kelembaban, suhu udara, tekanan udara dan kecepatan angin.

Curah hujan adalah jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar selama periode tertentu yang diukur dengan satuan tinggi milimeter (mm) di atas permukaan horizontal. Dalam penjelasan lain curah hujan juga dapat diartikan sebagai ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap dan tidak mengalir. Hari hujan merupakan jumlah hari



hujan yang terjadi dalam satu bulan dan diperoleh berdasarkan hasil pengukuran harian. Faktor iklim ini tidak memperhatikan berapa banyaknya hujan yang turun ke permukaan bumi, tetapi jumlah hari dimana hujan turun ke permukaan bumi dalam satu bulan.

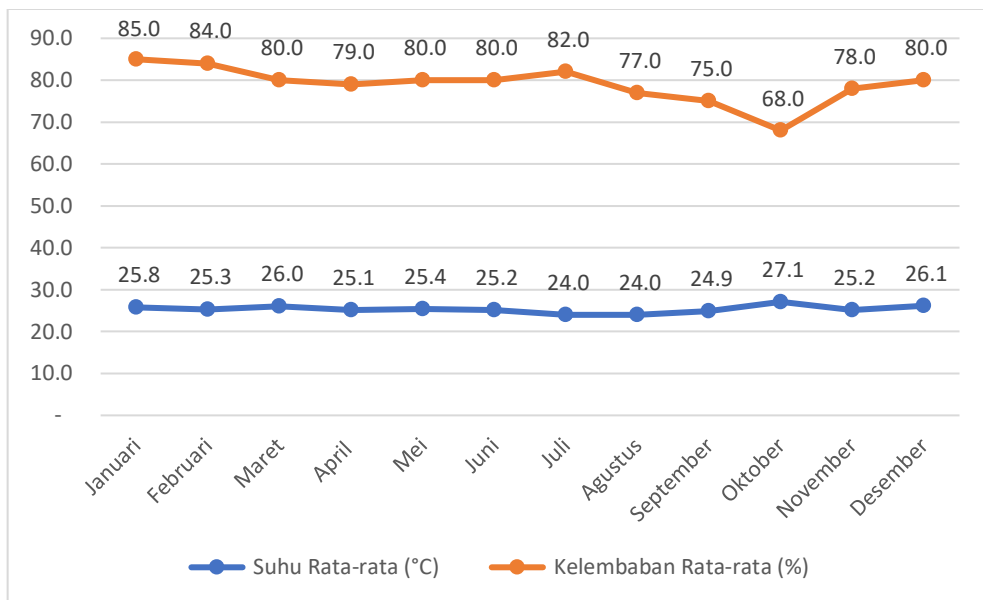
Gambar 2.6.
Jumlah Curah Hujan (mm) dan Jumlah Hari Hujan (hari) di Kota Tasikmalaya Tahun 2023



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2024

Jumlah curah hujan tertinggi di Kota Tasikmalaya selama tahun 2023 terjadi pada bulan Maret yaitu 293,0 mm dengan rata-rata curah hujan sebesar 136,0 mm. Sedangkan jumlah hari hujan di Kota Tasikmalaya sepanjang tahun 2023 adalah 124 hari dengan jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Februari yaitu selama 22 hari.

Gambar 2.7.
Rata-rata Suhu dan Kelembapan di Kota Tasikmalaya Tahun 2023

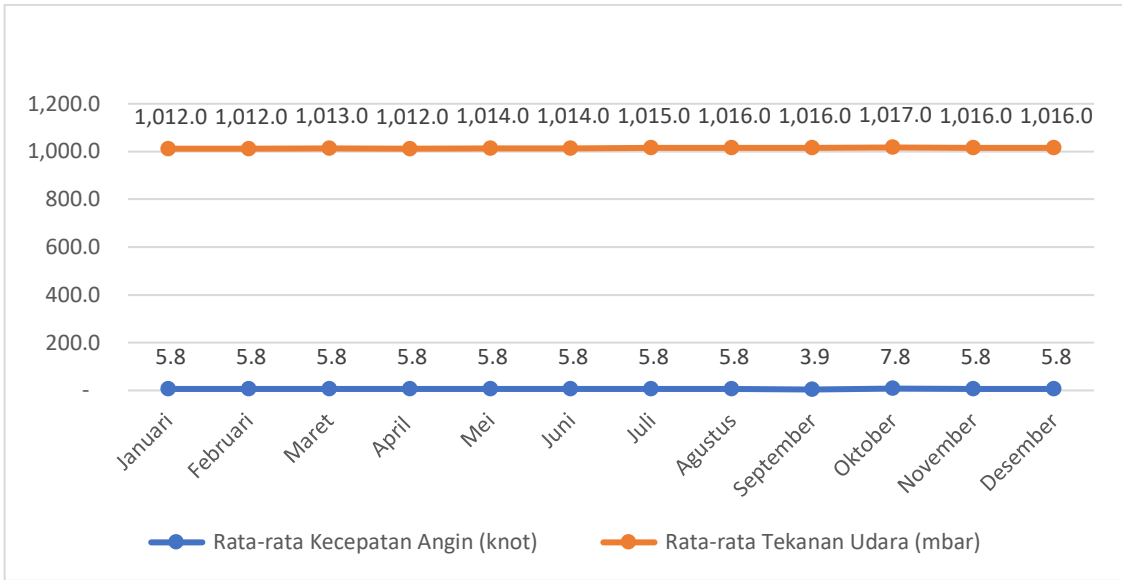


Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2024



Suhu minimum Kota Tasikmalaya sepanjang tahun mencapai 24,0 °C dengan suhu dan suhu maksimum sepanjang tahun mencapai 27,1 °C. Sedangkan untuk kelembaban minimum sepanjang tahun mencapai 68,0% dan kelembaban maksimum sepanjang tahun mencapai 85,0%.

Gambar 2.8.
Rata-rata Kecepatan Angin dan Tekanan Udara di Kota Tasikmalaya
Tahun 2023



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2024

Rata-rata tekanan udara minimum di Kota Tasikmalaya selama tahun 2023 adalah 1.012,0 mb dan rata-rata tekanan udara maksimum mencapai 1.016,0 mb. Sedangkan untuk rata-rata kecepatan angin maksimum Kota Tasikmalaya sepanjang tahun mencapai 7,8 knot yang terjadi pada bulan Oktober dan kecepatan angin minimum rata-rata 3,9 knot terjadi pada bulan September.

2.1.1.6 Penggunaan Lahan

Dari Citra Satelit Kota Tasikmalaya tahun 2018, penggunaan lahan Kota Tasikmalaya (berdasarkan SNI 7645:2010 mengenai klasifikasi penggunaan lahan skala 1:25.000) dengan persentase tertinggi pada penggunaan lahan sawah sebesar 35,246%, permukiman sebesar 28,646% dan hutan sebesar 19,382%.

Tabel 2.2
Penggunaan Lahan Kota Tasikmalaya

Penggunaan Lahan	Luas	
	Hektar	%
Bangunan Industri	58,57	0,31
Bangunan Pemerintahan	10,70	0,05
Danau/Situ	50,56	0,27
Empang	263,30	1,42
Fasilitas Peribadatan	0,87	0,01
Hutan	3570,56	19,38
Kawasan Pariwisata	4,78	0,02
Ladang	217,18	1,18
Lahan Tidak Terbangun	697,38	3,78



Penggunaan Lahan	Luas	
	Hektar	%
Lapangan	17,21	0,09
Pasar	14,30	0,08
Pemukaman	24,88	0,13
Permukiman	5277,20	28,64
Sawah	6493,10	35,24
Semak Belukar	141,22	0,76
Sungai	82,05	0,44
Terminal	7,69	0,04
Jumlah	18.422,04	100,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2023.

2.1.1.7 Wilayah Rawan Bencana

Di Kota Tasikmalaya terdapat beberapa potensi rawan bencana, diantaranya bencana gempa bumi dan ikutannya, bencana alam geologi aliran lahar dan rawan gerakan tanah skala menengah. Intensitas suatu guncangan gempa bumi pada suatu peristiwa gempa bumi pada suatu daerah atau wilayah tertentu tidak hanya tergantung pada kekuatan gempa bumi yang terjadi dan jarak daerah atau wilayah terhadap pusat gempa bumi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi setempat. Lapisan-lapisan sedimen lunak permukaan dapat memperkuat atau mengamplifikasi gelombang gempa bumi dan menjadi lebih kuat dibandingkan dengan daerah sekitarnya yang disusun oleh batuan keras.

Kajian tentang potensi bencana gempa bumi dan ikutannya di Kota Tasikmalaya yang telah dilaksanakan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2019, ada beberapa zona potensi bencana gempa bumi dan ikutannya di Kota Tasikmalaya, yaitu sebagai berikut:

1. **Zona Potensi Bencana Gempa bumi dan Ikutan I**, meliputi sebagian kecil wilayah Kecamatan Cibeureum, Tamansari, Kawalu dan Mangkubumi. Zona ini memiliki bentang alam terdiri dari Lereng Kipas Bawah Gunung Galunggung dan Kipas Lahar Gunungapi Tua berupa lembah alur sungai. Penggunaan lahan pada zona ini berupa sawah, kolam, semak belukar, perkebunan campuran, bangunan, pekarangan, jalan, jalur hijau, ladang, dan sebagian landasan pacu. Potensi bencana gempa bumi dengan percepatan dipermukaan tanah (PGA) adalah 0,68 g. Tingkat risiko yang dapat terjadi setara intensitas VIII-IX MMI;
2. **Zona Potensi Bencana Gempa bumi dan Ikutan II**, meliputi 50% wilayah Kecamatan Indihiang, 65% wilayah Kecamatan Cipedes, 60% wilayah Kecamatan Tawang, 75% wilayah Kecamatan Cihideung, 45% wilayah Kecamatan Cibeureum dan 50% wilayah Kecamatan Kawalu. Zona ini memiliki bentang alam terdiri dari Lereng Kipas Tengah G. Galunggung dan Lereng Kipas Bawah G. Galunggung serta Perbukitan Bergelombang berupa kaki gunung berlereng 10°-15° hingga landai. Penggunaan lahan pada zona ini berupa bangunan, danau, hutan, jalan, jalur hijau, kolam, ladang, makam, objek wisata, pekarangan, perkebunan campuran, perkebunan lain, pertambangan Galian C, rel kereta api, sawah, semak belukar, sungai, taman, tegalan dan sebagian landasan pacu (bagian selatan). Potensi bencana gempa bumi di zona ini berupa guncangan tanah relatif sedang dengan percepatan dipermukaan tanah (PGA) adalah 0,49 g;



3. **Zona Potensi Bencana Gempa bumi dan Ikutan III**, meliputi 50% wilayah Kecamatan Indihiang, 35% wilayah Kecamatan Cipedes, 40% wilayah Kecamatan Tawang, 25% wilayah Kecamatan Cihideung, 40% wilayah Kecamatan Cibeureum dan 25% wilayah Kecamatan Kawalu. Zona ini memiliki bentang alam terdiri dari lembah Gunung Cibeureum dan Kipas tengah G. Galunggung berupa lereng perbukitan dan lembah alur sungai. Penggunaan lahan pada zona ini berupa bangunan, jalan, jalur hijau, kolam, ladang, lahan terbuka, makam, objek wisata, pekarangan, perkebunan campuran, perkebunan lain, pertambangan golongan C, rel kereta api, sawah, semak belukar, sungai, taman dan tegalan. Potensi bencana gempa bumi di zona ini berupa guncangan tanah relatif rendah dengan percepatan dipermukaan tanah (PGA) adalah 0,35g.

Upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk ketiga zona tersebut adalah rekayasa lahan sebelum dilakukan pembangunan (pengerasan dan pengeringan lahan dll), menghindari lereng sungai dan tebing yang terjal berpotensi longsor (pembangunan di luar zona sepadan gawir sungai dan gawir tebing minimal 3-5 meter), pembuatan tanggul/terasering pada tebing dan tepi sungai yang terjal sebagai penahan longsor. Selain itu bangunan harus berkontruksi tahan gempa (anti seismik) dan di desain tata letaknya yang aman terhadap bencana gempa.

Potensi bencana gerakan tanah di Kota Tasikmalaya akan terjadi di sepanjang aliran sungai yang memiliki tebing sungai yang cukup terjal $>45^\circ$. Sungai-sungai yang terdapat di Kota Tasikmalaya dan sekitarnya, memiliki ciri lembah berbentuk V, menunjukkan bahwa sungai-sungai tersebut memiliki karakter erosi makan ke hulu dan ke dasar lembah. Potensi gerakan tanah yang dapat terjadi diantaranya runtuh tanah penutup, jatuhnya bongkah tanah dan bongkah batuan beku. Potensi gerakan tanah di kota ini dapat juga terjadi di bukit-bukit/ gunung-gunung yang telah ditambang atau digali, sehingga menyisakan bukit-bukit berlereng terjal. Mengingat batuan penyusun bukit-bukit ini yang terdiri dari campuran breksi, lava dan tufa yang bersifat lepas antara satu dengan lainnya dan tidak terkompaksi secara baik, sangat besar potensi terjadinya gerakan tanah jenis jatuhnya atau runtuh bongkah breksi dan lava.

Potensi bencana gunungapi sebagai potensi bencana ikutan yang mungkin dapat terjadi pada peristiwa gempa bumi kuat berdasarkan peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Galunggung, Jawa Barat berskala 1:50.000 (Direktorat Vulkanologi/PVMBG, 1983). Potensi bencana gunung api tersebut diantaranya berupa potensi lontaran batu pijar dan hujan abu lebat pada radius 1,5 km dari pusat erupsi. Potensi terlanda lontaran batu pijar terdapat pada radius 4 km dari pusat erupsi dan potensi terlanda hujan abu vulkanik dan terkena lontaran batu pijar pada radius 8 km dari pusat erupsi. Selain itu gunungapi ini juga mempunyai daerah yang selalu berpotensi terancam aliran awan panas, lava dan gas beracun (arsir kotak-kotak), zona potensi terlanda aliran awan panas (arsir tegak), lava dan lahar hujan serta daerah potensi terlanda aliran lahar hujan (arsir mendatar).

2.1.1.8 Kondisi Kependudukan

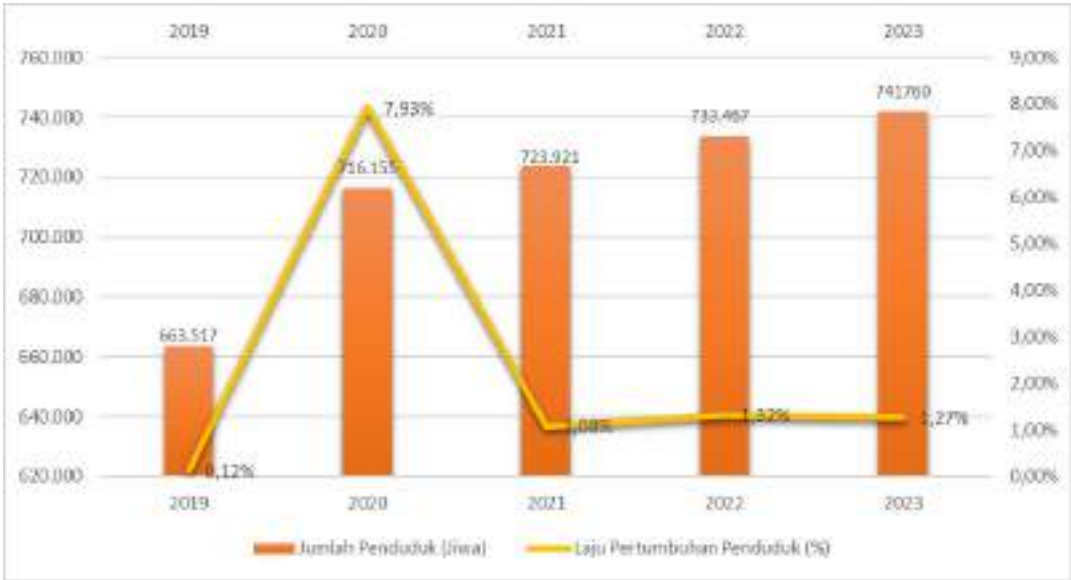
1. Jumlah Penduduk

Keberadaan penduduk sangat penting di dalam proses pembangunan, oleh karena itu penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya



Tahun 2023, Kota Tasikmalaya memiliki penduduk sebesar 741.760 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,27 persen dibanding penduduk tahun 2022.

Gambar 2.9.
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tasikmalaya
Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, 2019-2023

Perkembangan jumlah penduduk Kota Tasikmalaya dari tahun 2019 sampai dengan 2023 cenderung mengalami peningkatan, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,34 % dalam rentang tahun 2019 – 2023, peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2019 ke 2020 mengalami peningkatan jumlah yang tertinggi dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 7,93%.

Tabel 2.3
Kepadatan Penduduk Kota Tasikmalaya

Kecamatan	Penduduk (ribu jiwa)				Persentase Penduduk (%)				Kepadatan Penduduk (per km²)			
Tahun	2020	2021	2022	2023	2021	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Kawalu	96,78	97,59	98,64	99,51	13,51	13,48	13,45	13,42	2.286	2.305	2.372	2.393
Tamansari	77,07	78,25	79,62	80,87	10,76	10,81	10,86	10,90	2.083	2.115	2.166	2.200
Cibeureum	68,6	69,06	69,69	70,19	9,58	9,54	9,50	9,46	3.730	3.755	3.745	3.771
Purbaratu	44,38	44,85	45,42	45,92	6,2	6,2	6,19	6,19	3.514	3.551	3.735	3.776
Tawang	60,16	60,81	61,61	62,31	8,4	8,4	8,40	8,40	8.706	8.801	8.929	9,030
Cihideung	71,95	72,73	73,69	74,52	10,05	10,05	10,05	10,05	13.202	13.345	13.521	13.672
Mangkubumi	97,91	98,81	99,96	100,92	13,67	13,65	13,63	13,61	4.079	4.119	4.135	4.176
Indihiang	57,57	58,39	59,36	60,24	8,04	8,07	8,09	8,12	5.301	5.377	5.451	5.532
Bungursari	60,19	61,55	63,09	64,54	8,41	8,5	8,60	8,70	3.416	3.493	3.591	3.673
Cipedes	81,56	81,88	82,39	82,75	11,39	11,31	11,23	11,16	9.022	9.057	9.114	9.154
Kota Tasikmalaya	716,16	723,92	733,47	741,76	100	100	100	100	3.887	3.930	4.005	4.050

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2021-2024

Distribusi atau sebaran penduduk tertinggi pada tahun 2023 berada di Kecamatan Mangkubumi kemudian Kecamatan Kawalu. Jumlah penduduk tertinggi bukan berarti kepadatan penduduk di Kecamatan Mangkubumi dan



Kawalu juga tinggi. Kepadatan penduduk di Kota Tasikmalaya tahun 2023 mencapai 4.050 jiwa/km² dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Cihideung sebesar 13.61 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Tamansari sebesar 2.200 jiwa/km². Dari distribusi atau sebaran penduduknya di 10 kecamatan di Kota Tasikmalaya, kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Mangkubumi dengan penduduk sebanyak 100,92 jiwa pada tahun 2023 atau sekitar 13,48 persen dari total penduduk Kota Tasikmalaya, diikuti oleh Kecamatan Kawalu yang hampir setara yaitu sebanyak 97.590 jiwa 13,48 persen dan Kecamatan Cipedes 81.880 jiwa 11,31 persen. Sementara itu kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Purbaratu yaitu sebanyak 44.850 jiwa, atau 11,31 persen dari total penduduk Kota Tasikmalaya.

Kepadatan penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 adalah 4.050 jiwa/km² dengan Kecamatan Cihideung menjadi wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 13.672 jiwa/km², dan Kecamatan Tamansari merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah yaitu 2.166 jiwa/km². Namun, jika dilihat dari jumlah penduduk, Kecamatan Mangkubumi adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota Tasikmalaya yaitu 100.920 jiwa di tahun 2023 (13,67% dari total jumlah penduduk Kota Tasikmalaya).

2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Struktur Usia

Ditinjau dari jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat diketahui bahwa Kota Tasikmalaya memiliki jumlah penduduk dengan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan (sex ratio) relatif konstan setiap tahunnya, yaitu berkisar antara 101,05 sampai dengan 102,65 untuk kurun waktu tahun 2019-2023. Hal ini berarti dari 100 penduduk perempuan di Kota Tasikmalaya terdapat 102 penduduk laki-laki. Tabel berikut memperlihatkan jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya menurut jenis kelamin.

Tabel 2.4.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Tasikmalaya
Tahun 2019-2023

Tahun	Jenis Kelamin				Laki-laki +Perempuan	Sex Rasio
	Laki-laki		Perempuan			
	Jumlah	%	Jumlah	%		
2019	333.321	50,24	330.196	49,76	662.723	101,05
2020	363.740	50,79	352.415	49,21	716.155	103,21
2021	367.563	50,77	356.358	49,22	723.921	103,14
2022	372.285	50,76	361.182	49,24	733.467	103,07
2023	375.737	50,65	366.023	49,35	741.760	102,65

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, Data diolah 2024.

3. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah

Rencana pola ruang wilayah kota merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.



Rencana pola ruang wilayah kota berfungsi:

1. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota;
2. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
4. Sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kota.

Rencana pola ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota, daya dukung dan daya tampung wilayah kota, kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana pola ruang wilayah Kota Tasikmalaya dirumuskan dengan kriteria:

1. Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN beserta rencana rincinya;
2. Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Jawa Barat beserta rencana rincinya;
3. Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
4. Memperhatikan mitigasi bencana pada wilayah kota;
5. Memperhatikan kepentingan pertahanan dan keamanan dalam wilayah kota;
6. Menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30 % dari luas wilayah kota;
7. Menyediakan ruang untuk kegiatan sektor informal;
8. Menyediakan ruang terbuka non hijau (RTNH) untuk menampung kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kota;
9. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kota bersangkutan;
10. Merujuk pada rekomendasi hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya, dimana terdapat beberapa materi terkait rencana pola ruang yang harus diperhatikan secara daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah kota yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya, maka berdasarkan urutan prioritas pada masing-masing kawasan adalah sebagai berikut:

a) Kawasan lindung yang meliputi:

1. Badan Air
2. Kawasan Perlindungan Setempat
3. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

b) Kawasan budidaya yang meliputi:

1. Badan Jalan
2. Kawasan Hutan Produksi
3. Kawasan Perkebunan Rakyat
4. Kawasan Pertanian
5. Kawasan Peruntukan Industri
6. Kawasan Permukiman
7. Kawasan Perdagangan dan Jasa
8. Kawasan Perkantoran
9. Kawasan Transportasi
10. Kawasan Pertahanan dan Keamanan
11. Kawasan Ruang Terbuka Non-Hijau



Rencana pola ruang di Kota Tasikmalaya serta luasan masing-masing kegiatan yang akan dikembangkan hingga tahun 2031 dapat dilihat pada Tabel 2.5. dan Gambar 2.10. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2031 berdasarkan kajian daya dukung dan daya tampung pada KLHS Revisi RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.5.
Rencana Pola Ruang Kota Tasikmalaya

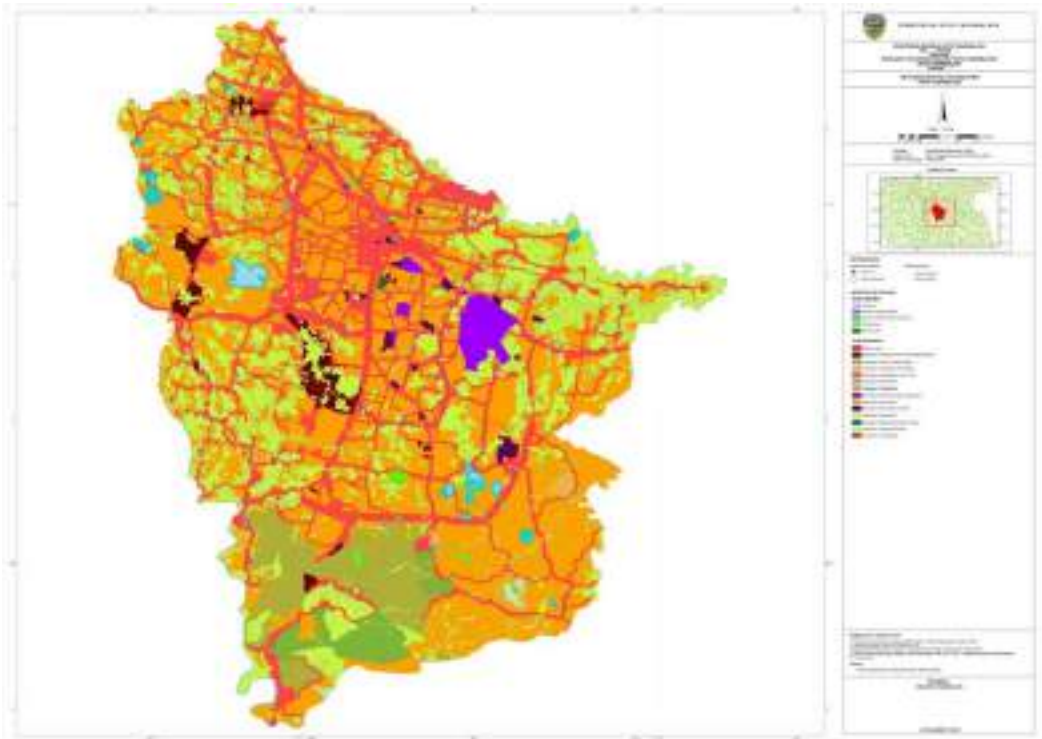
No	Peruntukan Pola Ruang	Draft RTRW 2024-2044	
		Luas (Ha)	%
	KAWASAN LINDUNG		
	Resapan air		
	Sempadan Sungai		
	Sempadan Situ		
	Kawasan Perlindungan Setempat	125,912	0,69%
	Aliran Lahar		
	Rawan Gerakan Tanah		
	Cagar budaya	3,097	0,02%
	TPU/Pemakaman	45,036	0,25%
	Sempadan Rel		
	Sempadan SUTET		
	Badan Air	192,948	1,06%
	Taman Kota	7,964	0,04%
	Total Kawasan Lindung	374,956	2,06%
	KAWASAN BUDIDAYA		
	Hutan Produksi	371,955	2,04%
	Hutan Rakyat		
	Kawasan Pertanian		
	Pertanian Lainnya		
	Kawasan Perkebunan Rakyat	1.427,955	7,83%
	Kawasan Tanaman Pangan	1.407,486	7,72%
	Kawasan Peternakan	43,544	0,24%
	Kawasan Perikanan Budidaya	3,374	0,02%
	Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	57,331	0,31%
	Kawasan Perumahan	8.968,513	49,17%
	Kawasan Peruntukan Industri	443,578	2,43%
	Kawasan Perdagangan dan Jasa	4.510,572	24,73%
	Kawasan Perkantoran	11,222	0,06%
	Kawasan Terpadu		
	Pertahanan dan Keamanan	264,825	1,45%
	Kawasan Transportasi	11,765	0,06%
	Kawasan Pariwisata		
	Kawasan Evakuasi		
	Gardu induk		
	TPPAS		
	PT. PERTAMINA		
	Danau/Situ		
	Badan Jalan	228,930	1,26%



No	Peruntukan Pola Ruang	Draft RTRW 2024-2044	
		Luas (Ha)	%
	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	114,645	0,63%
	Kawasan Infrastruktur Perkotaan	53,609	0,29%
	Kawasan Ruang Terbuka Non-Hijau	2,110	0,01%
Total Luasan Kawasan Budidaya		17.864,083	97,94%
Kota Tasikmalaya		18.239,039	100,00%

Sumber : Draft RTRW Kota Tasikmalaya 2024 - 2044

Gambar 2.10.
Peta Rencana Pola Ruang Kota Tasikmalaya



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2022

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Konsep pembangunan manusia (*human development*) telah diperkenalkan sejak tahun 1990 oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) dalam *Global Human Development Report*. Konsep ini disebut sebagai paradigma baru model pembangunan. Menurut UNDP, pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the people's choices*) dengan tujuan utama menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Pencapaian tujuan ini sangat bergantung pada empat hal pokok, yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil



pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

1. Umur panjang dan hidup sehat
2. Pengetahuan
3. Standar hidup layak

Pada Tabel 2.6 digambarkan kondisi IPM di Kota Tasikmalaya beserta komponennya, yaitu Umur Harapan Hidup (Tahun), Harapan Lama Sekolah (Tahun), Rata-rata Lama Sekolah (Tahun), serta Pengeluaran per Kapita. Jika dibandingkan dengan konteks lebih luas, yaitu Provinsi Jawa Barat, angka IPM Kota Tasikmalaya cenderung lebih tinggi dari rata-rata IPM di Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat, IPM Tasikmalaya meningkat sejak tahun 2019 -2023. Pertumbuhan IPM 2023 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 81,42 tahun, meningkat 0,45 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Dimensi pengetahuan yang diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata – rata Lama Sekolah (RLS) mengalami peningkatan secara indeks sebesar 0,09. Peningkatan tertinggi secara Indeks berada di Indeks Daya Beli yaitusebesar 1,37 menggambarkan dimensi standar hidup layak yang diukur oleh rata – rata pengeluaran real perkapita tingkat pendapatan penduduk Kota Tasikmalaya meningkat.

IPM Kota Tasikmalaya kembali meningkat lagi dan berada dalam kategori sedang. Kemudian, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, IPM Kota Tasikmalaya masuk ke dalam kategori tinggi, dan jika dibandingkan dengan konteks regional, IPM Kota Tasikmalaya juga secara konsisten berada posisi lebih tinggi dari IPM Provinsi Jawa Barat. Hal ini menjadi indikasi bahwa kualitas pembangunan manusia di Kota Tasikmalaya cenderung lebih baik dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Barat. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.6. dan Gambar 2.11.

Tabel 2.6
Indeks Pembangunan Manusia Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2023

Tahun	IPM Kota Tasikmalaya	Umur Harapan Hidup/UHH (tahun)	Harapan Lama Sekolah/HLS (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah/RLS (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (000 Rp)
2019	72,84	71,93	13,44	9,13	10414,00
2020	73,04	72,15	13,45	9,33	10263,00
2021	73,31	72,34	13,46	9,52	10213,00
2022	73,83	72,63	13,47	9,53	10578,00
2023	74,47	72,92	13,49	9,54	11063,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024 (diolah)



Gambar 2.11.
Perkembangan IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024 (diolah)

2. Kemiskinan

Angka kemiskinan dinyatakan sebagai persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan terhadap total penduduk di wilayah tersebut. Data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya mengalami lonjakan pada tahun 2021, di mana persentase penduduk miskin meningkat menjadi 13,13% dibandingkan dengan tahun 2020, angka kemiskinan di tingkat kota selama lima tahun terakhir masih berada di atas tingkat kemiskinan provinsi. Meskipun demikian, angka kemiskinan di tingkat kota memiliki tren penurunan yang signifikan yang pada tahun 2023 menjadi 11,53%.

Tabel 2.7.
Data Kemiskinan Kota Tasikmalaya 2020 – 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kemiskinan (%) (P0)	12,97	13,13	12,72	11,53	11,10
Penduduk Miskin (ribu orang)	86,13	89,46	87,13	79,37	76,71
Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	470.150	480.341	498.711	537.497	565.377
Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,75	2,41	2,34	1,62	1,35
Keparahan Kemiskinan (P2)	0,39	0,69	0,65	0,32	0,26

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Bulan Maret tahun 2024 tingkat kemiskinan Kota Tasikmalaya mengalami penurunan menjadi 11,10%, namun masih berada pada angka yang masih tinggi, di atas tingkat kemiskinan nasional dan Provinsi Jawa Barat.



Gambar 2.12.
Target & Realisasi Angka Kemiskinan Kota Tasikmalaya
Tahun 2020-2023 (Persen)



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2024

Gambar 2.13.
Kemiskinan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dan Nasional



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2024

Kemiskinan Kota Tasikmalaya bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan daerah lainnya di provinsi Jawa Barat maka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa barat

Nama Wilayah	Persentase Penduduk Miskin (PO) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2021	2022	2023
JAWA BARAT	8.40	8.06	7,62
Bogor	8.13	7.73	7,27
Sukabumi	7.70	7.34	7,01
Cianjur	11.18	10.55	10,22
Bandung	7.15	6.80	6,4
Garut	10.65	10.42	9,77
Tasikmalaya	11.15	10.73	10,28



Nama Wilayah	Persentase Penduduk Miskin (PO) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2021	2022	2023
Ciamis	7.97	7.72	7,42
Kuningan	13.10	12.76	12,12
Cirebon	12.30	12.01	11,2
Majalengka	12.33	11.94	11,21
Sumedang	10.71	10.14	9,36
Indramayu	13.04	12.77	12,13
Subang	10.03	9.75	9,52
Purwakarta	8.83	8.70	8,46
Karawang	8.95	8.44	7,87
Bekasi	5.21	5.01	4,93
Bandung Barat	11.30	10.82	10,52
Pangandaran	9.65	9.32	8,98
Kota Bogor	7.24	7.10	6,67
Kota Sukabumi	8.25	8.02	7,5
Kota Bandung	4.37	4.25	3,96
Kota Cirebon	10.03	9.82	9,16
Kota Bekasi	4.74	4.43	4,1
Kota Depok	2.58	2.53	2,38
Kota Cimahi	5.35	5.11	4,66
Kota Tasikmalaya	13.13	12.72	11,53
Kota Banjar	7.11	6.73	6,14

Sumber : BPS Jawa Barat, 2024.

Sejak tahun 2008 Kota Tasikmalaya menjadi wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Jawa Barat, sejalan dengan pembangunan yang dilaksanakan melalui program penanggulangan kemiskinan, pada tahun 2023 Kota Tasikmalaya telah berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 11,53 persen sehingga Kota Tasikmalaya tidak lagi menjadi wilayah termiskin di Jawa Barat.

Gambar 2.14.
Kemiskinan Jawa Barat Tahun 2023



Sumber : BPS Jawa Barat, 2024.



3. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari 21.589,5 Milyar pada tahun 2020 dan menjadi 24.974,68 pada tahun 2022. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.9. dan tabel 2.10.

Tabel 2. 9.
Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2023 (Milyar Rupiah)

	Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.079,4	1.100,18	1.202,36	1.319,55
B	Pertambangan dan Penggalian	1,8	1,91	1,99	2,00
C	Industri Pengolahan	3.051,3	3.159,59	3.450,78	3.669,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,9	2,99	3,15	3,30
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	90,7	96,31	97,44	100,96
F	Konstruksi	3.341,1	3.700,54	3.975,54	4.397,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	4.719,3	4.954,11	5.416,72	5.929,52
H	Transportasi dan Pergudangan	2.028,6	2.072,51	2.320,07	2.763,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.148,6	1.209,65	1.440,33	1.650,46
J	Informasi dan Komunikasi	915,2	978,57	1.038,06	1.121,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.201,9	2.396,31	2.596,50	2.708,69
L	Real Estat	360,6	397,89	438,12	472,71
M,N	Jasa Perusahaan Activities	222,2	240,39	288,50	321,67
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	895,5	921,48	918,53	954,97
P	Jasa Pendidikan	483,9	511,52	534,79	592,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	501,0	547,86	605,46	669,84
R,S,T,U	Jasa Lainnya	545,5	553,75	646,33	733,97
	Produk Domestik Bruto	21.589,5	22.845,56	24.974,68	27.411,43

Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka, BPS Kota Tasikmalaya, 2024.

Tabel 2.10.
Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Konstan,
Tahun 2020 -2023 (Milyar Rupiah)

	Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	658,9	660,75	690,75	718,53
B	Pertambangan dan Penggalian	1,3	1,36	1,38	1,33
C	Industri Pengolahan	2.153,5	2.194,62	2.312,87	2.390,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,6	1,68	1,74	1,80
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	59,6	63,01	63,00	64,65
F	Konstruksi	2.333,3	2.475,68	2.577,18	2.762,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.575,0	3 681,31	3 841,48	4.042,74



	Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023
H	Transportasi dan Pergudangan/	1.435,1	1.439,91	1.542,85	1.715,00
I	Penyediaan Akomodasi dan	753,5	771,50	879,72	961,19
	Makan Minum				
J	Informasi dan Komunikasi	869,8	932,45	989,33	1.067,95
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.470,0	1.552,58	1.539,33	1.574,86
L	Real Estat	290,4	319,77	341,52	361,79
M,N	Jasa PerusahaanActivities	156,6	168,53	193,83	207,36
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	579,3	591,46	591,23	605,12
P	Jasa Pendidikan	306,5	314,93	321,55	343,77
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Activities	361,1	386,04	416,11	442,76
R,S,T, U	Jasa LainnyaActivities	424,4	425,66	477,17	519,85
	Produk Domestik Bruto	15.430,0	15.981,25	16.781,04	17.781,93

Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka, BPS Kota Tasikmalaya, 2024.

4. Struktur Perekonomian

Dari besaran PDRB, dapat digambarkan kontribusi nilai tambah setiap kategori dalam pembentukan PDRB atau distribusi persentase kategorial terhadap pembentukan PDRB sehingga terlihat struktur perekonomiannya. Semakin besar persentase suatu kategori semakin besar pengaruh kategori tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah, sehingga akan tampak kategori-kategori yang menjadi pemicu pertumbuhan di wilayah bersangkutan. Lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.11.

Tabel 2.11.
Peranan Kategorial dalam PDRB Kota Tasikmalaya
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 - 2023 (Persen)

	Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,00	4,82	4,81	4,81
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01	0,01
C	Industri Pengolahan	14,13	13,83	13,82	13,39
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,42	0,42	0,39	0,37
F	Konstruksi	15,48	16,20	15,92	16,04
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	21,86	21,69	21,69	21,63
H	Transportasi dan Pergudangan	9,40	9,07	9,29	10,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,32	5,29	5,77	6,02
J	Informasi dan Komunikasi	4,24	4,28	4,16	4,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,20	10,49	10,40	9,88
L	Real Estat	4,24	4,28	4,16	1,72
M,N	Jasa Perusahaan Activities	10,20	10,49	10,40	1,17



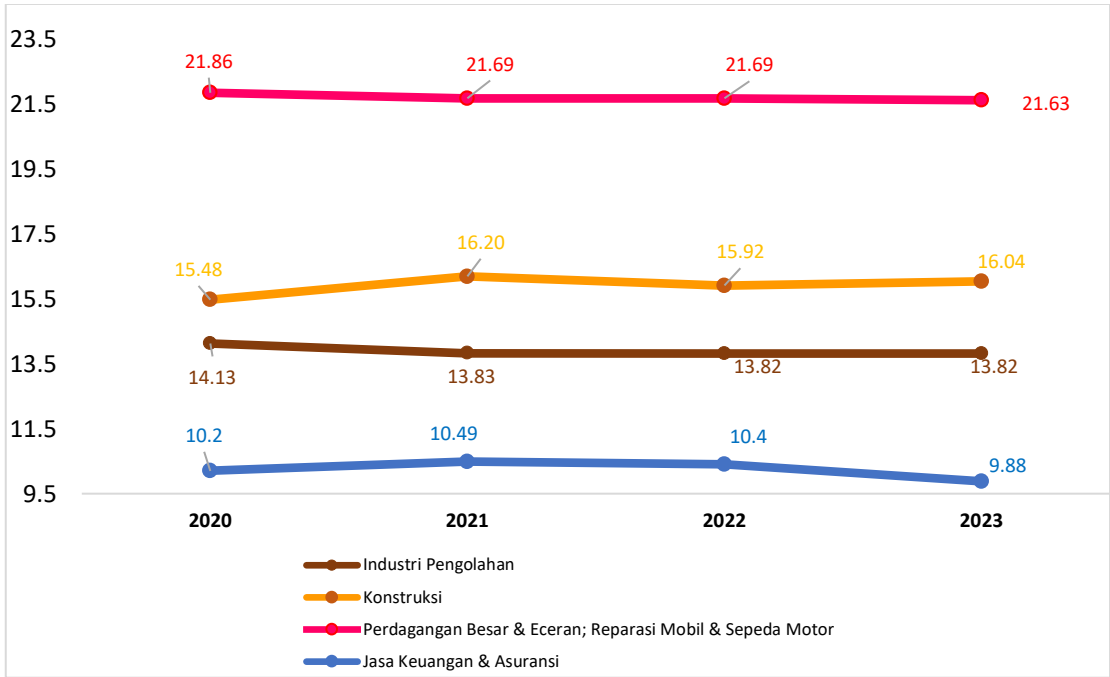
	Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,15	4,03	3,68	3,48
P	Jasa Pendidikan	2,24	2,24	2,14	2,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,32	2,40	2,42	2,44
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,53	2,42	2,59	2,68
	Produk Domestik Bruto	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka, BPS Kota Tasikmalaya, 2024.

Selama Empat tahun terakhir (2020 - 2023) struktur perekonomian Kota Tasikmalaya didominasi oleh kategori lapangan usaha; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Industri Pengolahan. Telah terjadi pergeseran struktur ekonomi pada periode lima tahun terakhir. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dari tahun 2020 s.d. 2023 menduduki peringkat pertama kontribusinya terhadap PDRB Kota Tasikmalaya. Peranan Kategori PDRB Kota Tasikmalaya tahun 2020 s.d 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.15.

Empat Besar Peranan Kategori PDRB Kota Tasikmalaya, 2020-2023 (Persen)



Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka, BPS Kota Tasikmalaya, 2024.

Empat besar kontribusi kategori lapangan usaha terhadap PDRB Kota Tasikmalaya pada tahun 2023, antara lain Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,63 persen, kemudian disusul oleh Kategori Konstruksi sebesar 16,04 persen, dan Kategori Industri Pengolahan sebesar 13,82 persen serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,88 persen.

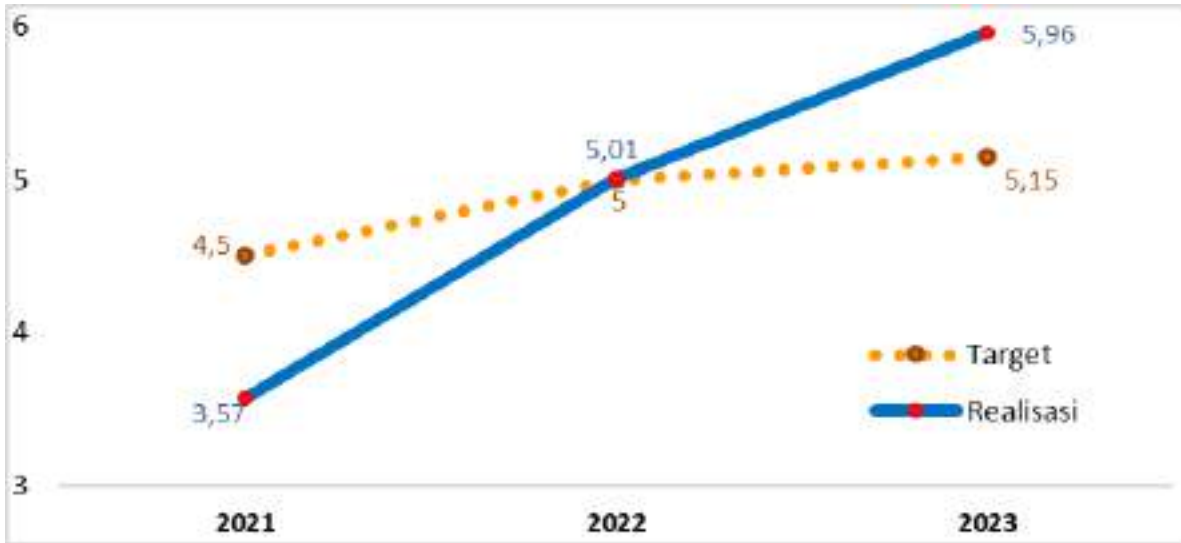
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Umumnya, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. LPE Kota Tasikmalaya dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota



tasikmalaya tercatat 5,96 persen, seiring dengan pemulihan ekonomi dan kinerja perekonomian yang semakin baik. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

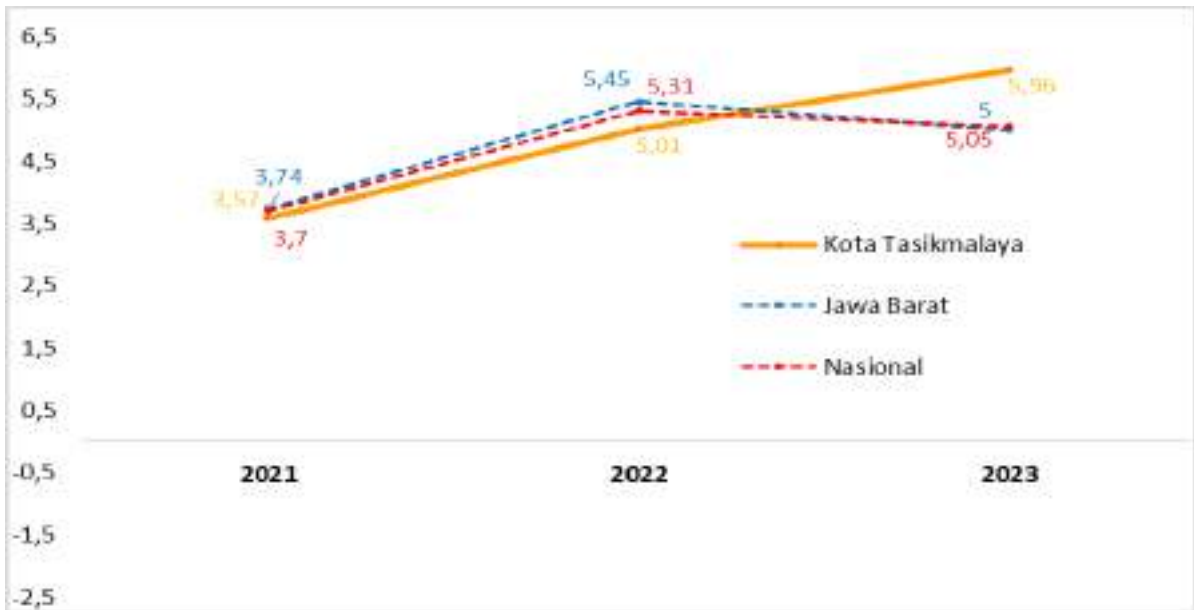
Gambar 2.16.
Target & Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya
Tahun 2021 - 2023 (Persen)



Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka, BPS Kota Tasikmalaya, 2024.

Bila dibandingkan dengan LPE Jawa Barat dan Nasional, LPE Kota Tasikmalaya tahun 2023 lebih tinggi. Berikut gambaran perbandingan LPE Kota Tasikmalaya dengan LPE Jawa Barat dan LPE Nasional.

Gambar 2.17.
LPE Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2021 – 2023 (persen)

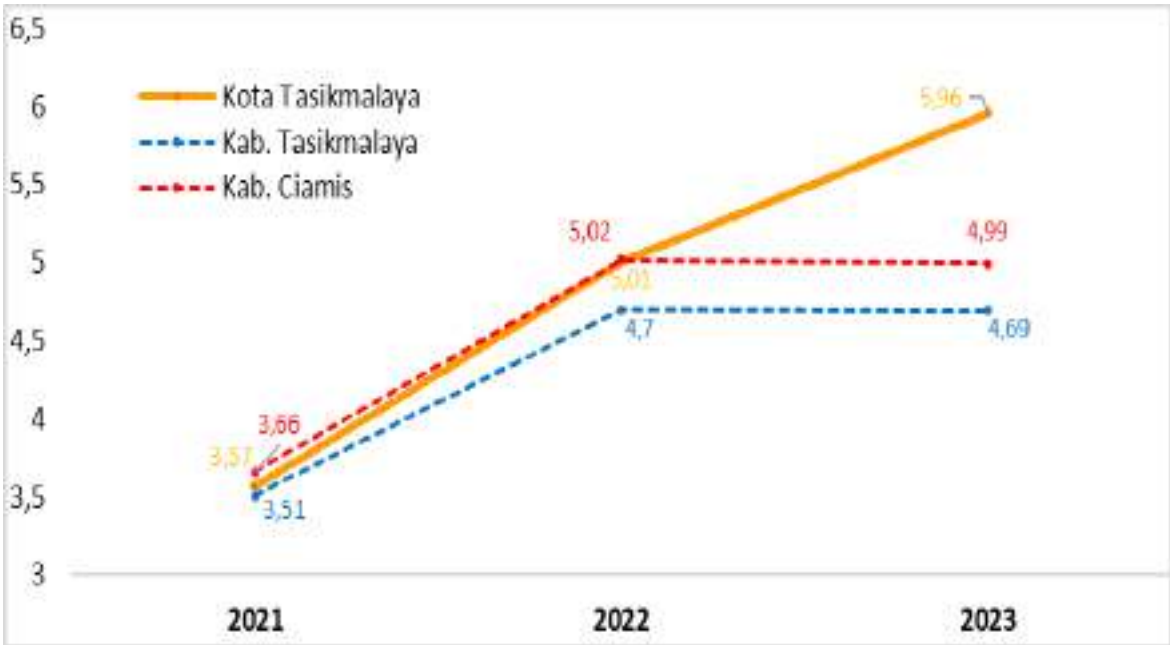


Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2024

Apabila dibandingkan dengan daerah tetangga, LPE Kota Tasikmalaya berada di atas LPE Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis seperti dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.18.
LPE Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis
Tahun 2021 - 2023



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2024

6. PDRB Menurut Pengeluaran

Kontribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12.
PDRB menurut pengeluaran Tahun 2021 - 2023

Komponen PDRB Pengeluaran	Distribusi PDRB Seri 2010 Menurut Pengeluaran (Persen)		
	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	69.67	69.84	70,99
Pengeluaran Konsumsi LNPR	2.29	2.21	2,43
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10.87	10.26	10,15
Pembentukan Modal Tetap Bruto	33.15	32.32	32,72
Perubahan Inventor	-0.65	-0.22	-0,20
Net Ekspor Impor Antar Daerah	-15.32	-14.41	-16,08
Produk Domestik Regional Bruto	100.00	100.00	100,00

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, Tahun 2024

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga pada tahun 2023 memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDRB pengeluaran yaitu 70,99 persen atau naik sebesar 1,15 persen dari tahun 2022. Adapun pembentukan modal tetap bruto mengalami peningkatan dari 32,32 persen pada tahun 2022 menjadi 32,72 persen pada tahun 2023.



7. Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga merupakan pengeluaran terbesar dalam pengeluaran akhir berbagai barang dan jasa, baik yang berasal dari domestik maupun impor. Dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Tasikmalaya, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kota Tasikmalaya maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Tabel 2.13.
Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga Kota Tasikmalaya,
2019 - 2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Konsumsi Rumah Tangga (Miliar Rp)					
a. ADHB	15.710,37	15.559,84	15.915,40	17.441,15	19.460,19
b. ADHK 2010	10.334,39	10.080,21	10.177,77	10.681,71	11.296,51
Proporsi terhadap PDRB (persen)	72,23	72,07	69,67	69,84	70,99
Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (Juta Rp)					
a. ADHB	23,27	21,78	21,98	23,78	26,24
b. ADHK	15,31	14,11	14,06	14,56	15,23
Pertumbuhan (persen)					
a. Konsumsi RT	4,60	-2,46	0,97	4,95	5,76
a. Konsumsi Perkapita	2,66	-7,80	-0,37	3,59	4,43

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2024.

Selama periode 2019-2023, proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB mengalami fluktuasi, yaitu 72,23 persen (2019); 72,07 persen (2020); 69,67 persen (2021); 69,84 persen (2022) dan 70,99 persen (2023). Proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 72,23 persen dan terendah pada tahun 2021 sebesar 69,67 persen.

8. Konsumsi Lembaga Non Profit

Lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPR) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPR merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup

Tabel 2.14.
Perkembangan Konsumsi Lembaga Non Profit (LNPR) Kota Tasikmalaya
Tahun 2019-2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi LNPR (Miliar Rp)					



URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. ADHB	519,37	508,27	523,52	552,78	665,24
b. ADHK 2010	362,56	350,78	356,67	363,52	391,86
Proporsi terhadap PDRB (persen)	2,39	2,35	2,29	2,21	2,43
Pertumbuhan (persen)	4,47	-3,25	1,68	1,92	7,80

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2024

Total konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2019- 2023 mengalami fluktuasi baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2019 konsumsi LNPRT sebesar 519,37 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu 508,27 miliar rupiah (2020), 523,52 miliar rupiah (2021), 552,78 miliar rupiah (2022) dan 665,24 miliar rupiah (2023).

Pertumbuhan konsumsi LNPRT tahun dasar 2019 juga berfluktuasi, berturut-turut sebesar 4,47 persen (2019), -3,25 persen (2020), 1,68 persen (2021), 1,92 persen (2022) dan 7,80 persen.

9. Konsumsi Akhir Pemerintahan

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan. Total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 2,36 triliun rupiah (2019), 2,35 triliun rupiah (2020), 2,48 triliun rupiah (2021), 2,56 triliun rupiah (2022) dan 2,78 triliun rupiah (2023). Untuk konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, mengalami perubahan yang fluktuatif. Total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga konstan adalah sebesar 1,48 triliun rupiah (2019), 1,46 triliun rupiah (2020), 1,50 triliun rupiah (2021), 1,49 triliun rupiah (2022) dan 1,57 triliun rupiah (2023). Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil pengeluaran pemerintah masih belum stabil dari sisi kuantitas.

Tabel 2.15.
Perkembangan Konsumsi Pemerintah Kota Tasikmalaya
Tahun 2019-2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Pemerintah (Miliar Rp)					
a. ADHB	2.360,58	2.359,90	2.481,65	2.562,71	2.782,24
b. ADHK 2010	1.475,19	1.456,69	1.496,80	1.488,11	1.571,41
Proporsi terhadap PDRB (persen)	10,85	10,93	10,86	10,26	10,15
Konsumsi Pemerintah Perkapita (Juta Rp)					
a. ADHB	3,50	3,30	3,43	3,49	3,75
b. ADHK 2010	2,18	2,04	2,07	2,03	2,12
Pertumbuhan (persen)					
a. Konsumsi Pemerintah	3,21	-1,25	2,75	-0,58	5,60
b. Konsumsi Pemerintah Perkapita	1,30	-6,66	1,39	-1,87	4,28

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2024



10. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Komponen PMTB pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Tabel 2.16.
Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Tasikmalaya, 2019-2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PMTB (Miliar Rp)					
a. ADHB	7.134,47	6.837,09	7.573,28	8.072,08	8.968,07
b. ADHK 2010	5.028,16	4.800,18	5.095,88	5.111,42	5.447,11
Proporsi terhadap PDRB (persen)	32,80	31,67	33,14	32,32	32,72
Struktur PMTB (persen)					
a. Bangunan	96,89	97,22	97,21	97,05	97,00
b. Non Bangunan	3,11	2,78	2,79	2,95	3,00
Pertumbuhan (persen)	5,85	-4,53	6,16	0,30	6,57

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2024

Tabel diatas menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2019-2023 mengalami fluktuasi dari 5,85 persen (2019), kemudian di tahun 2020 terkontraksi sampai minus 4,53 persen. Namun kembali tumbuh di tahun 2021 hingga mencapai 6,16 persen. Pada tahun 2022 mengalami perlambatan dimana PMTB hanya tumbuh sebesar 0,30 persen. Pada tahun 2023, pertumbuhan PMTB sebesar 6,57 persen.

11. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk "persediaan" berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen perubahan inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki dua tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen



inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya.

Tabel 2.17.
Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kota Tasikmalaya, 2019-2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Inventori (Miliar Rp)					
a. ADHB	747,19	283,76	-149,56	-54,32	-55,54
b. ADHK 2010	442,58	167,52	-83,41	-3.599,72	-30,18
Proporsi terhadap PDRB (persen)	3,44	1,31	-0,65	-0,22	-0,20

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2024

Pada tahun 2019, perubahan inventori Kota Tasikmalaya atas dasar harga berlaku sebesar 747,19 miliar rupiah. Pada tahun-tahun selanjutnya menjadi 283,76 miliar rupiah (2020), -149,56 miliar rupiah (2021), -54,32 miliar rupiah (2022) dan -55,54 miliar rupiah (2023). Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kota Tasikmalaya cenderung mengalami penurunan hingga tahun 2023. yaitu 3,44 persen (2019), 1,31 persen (2020), -0,65 persen (2021), -0,22 persen (2022) dan -0,20 persen (2023).

12. PDRB Perkapita

PDRB per kapita merepresentasikan rata-rata “pendapatan” yang diperoleh satu individu dari keseluruhan aktivitas ekonomi di wilayah tertentu. Oleh karenanya, PDRB per kapita umumnya digunakan sebagai pendekatan untuk mengindikasikan standar hidup di wilayah tertentu. Data PDRB per kapita Kota Tasikmalaya disajikan melalui gambar berikut.

Gambar 2.19.
PDRB per Kapita Kota Tasikmalaya Adh Konstan 2019-2023

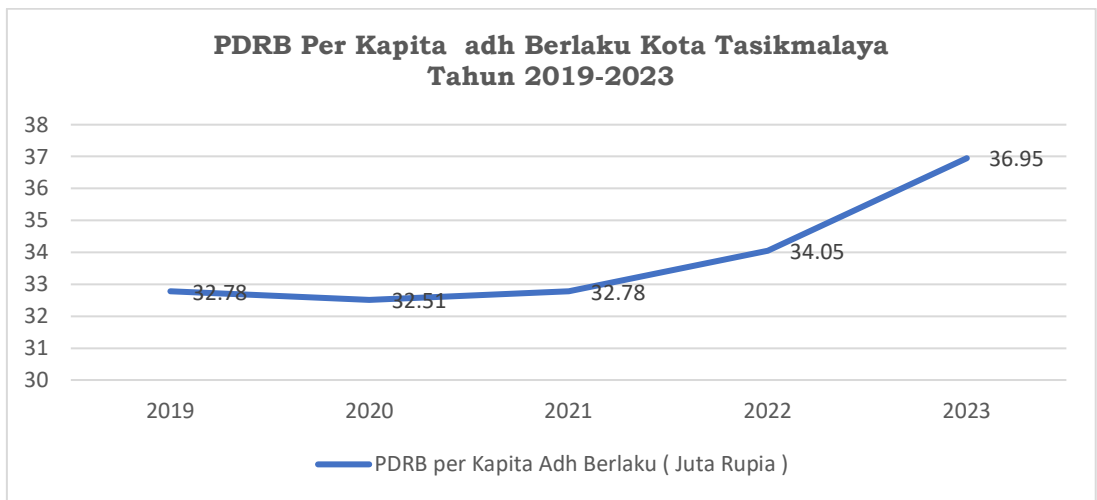


Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2024

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa sepanjang kurun waktu tahun 2019 hingga 2023, PDRB per kapita Kota Tasikmalaya masih berada di bawah PDRB per kapita provinsi Jawa Barat. Sedangkan pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.20.
PDRB per Kapita Kota Tasikmalaya adh Berlaku 2019-2023



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2024

Secara umum, PDRB per kapita terus mengalami peningkatan, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020 akibat pandemic COVID-19. PDRB per kapita pasca pandemi sudah menunjukkan pemulihan, walaupun belum mencapai nilai sebelum pandemi terjadi. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku di Kota Tasikmalaya tahun 2023 sebesar Rp.36,95 juta, mengalami peningkatan sebesar 8,52 persen dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp.34,05 juta. Peningkatan PDRB Perkapita ini merupakan indikasi bahwa pemulihan ekonomi dan kinerja perekonomian di Kota Tasikmalaya semakin membaik pada tahun 2023.

13. Inflasi

Metrik pengukuran perekonomian lain yang juga akan disajikan dalam bagian ini adalah laju inflasi. Perkembangan laju inflasi Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu tahun 2019-2023 disajikan melalui gambar berikut.

Gambar 2.21.
Perkembangan Laju Inflasi Kota Tasikmalaya 2019-2023



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2024

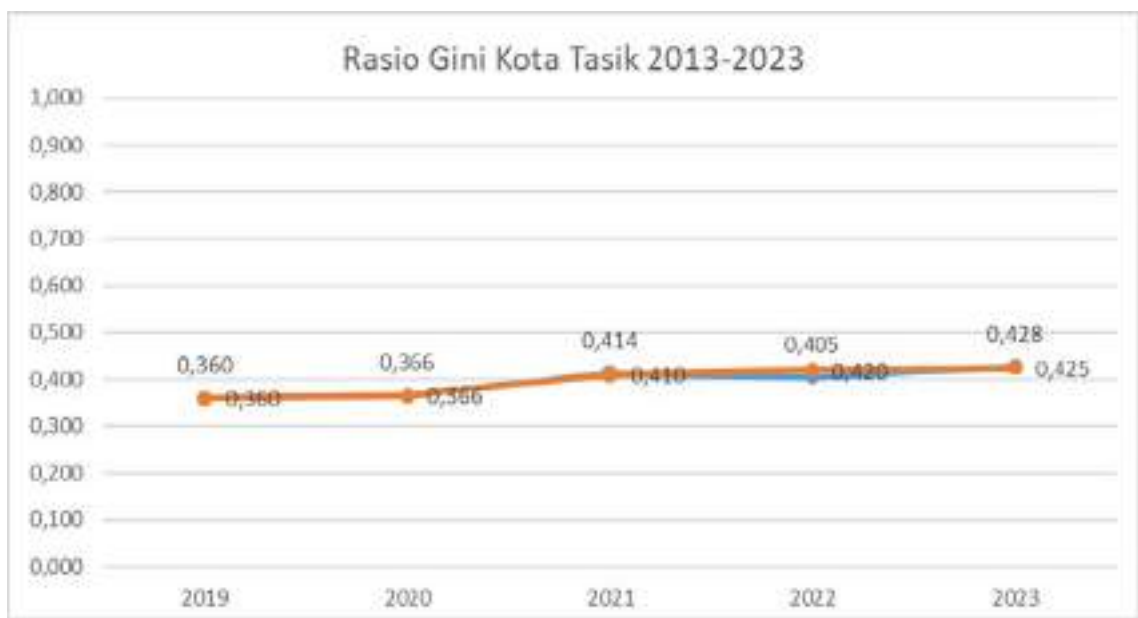


Gambar tersebut menunjukkan bahwa laju inflasi cenderung fluktuatif. Jika disandingkan seperti pada gambar, pola fluktuasi yang terjadi di tingkat kota memiliki sedikit kemiripan dengan pola fluktuasi yang terjadi di tingkat provinsi. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa jika laju inflasi di kedua tingkatan tersebut dirata-ratakan selama kurun waktu 5 tahun menjadi sebuah laju inflasi tahunan, keduanya menunjukkan perbedaan yang signifikan inflasi Kota Tasikmalaya masih berada di atas inflasi Jawa Barat. Laju inflasi tahunan kota adalah sebesar 3,19% per tahun, sedangkan laju inflasi tahunan provinsi adalah sebesar 2,73 % per tahun.

14. Indeks Gini

Metrik pengukuran kesejahteraan ekonomi lain yang berkaitan erat dengan PDRB per kapita adalah koefisien atau indeks Gini. Koefisien Gini memberikan gambaran distribusi pendapatan antara individu di dalam wilayah tertentu, yang mengindikasikan ketimpangan di wilayah tersebut. Indeks gini diukur dalam skala 0 – 1, di mana 0 merepresentasikan kesetaraan distribusi pendapatan yang sempurna, sedangkan 1 merepresentasikan ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna. Koefisien gini Kota Tasikmalaya disajikan melalui gambar berikut.

Gambar 2.22.
Koefisien Gini Kota Tasikmalaya 2019-2023



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2024

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien Gini di Kota Tasikmalaya cenderung fluktuatif. Meskipun demikian, secara umum nilai koefisien Gini di tingkat kota masih lebih rendah sedikit dibandingkan dengan tingkat provinsi. Jika dirata-ratakan, koefisien Gini Kota Tasikmalaya selama 5 tahun adalah sebesar 0,395, sedangkan koefisien Gini Provinsi Jawa Barat pada periode yang sama adalah sebesar 0,396 . Angka tersebut mengindikasikan bahwa pendapatan antar individu di Kota Tasikmalaya sedikit lebih terdistribusi secara merata dibandingkan dengan distribusi pendapatan di tingkat provinsi, walaupun secara umum menunjukkan distribusi yang masih timpang dan secara historis cenderung menunjukkan peningkatan ketimpangan.



2.1.2.2. Kesejahteran Sosial

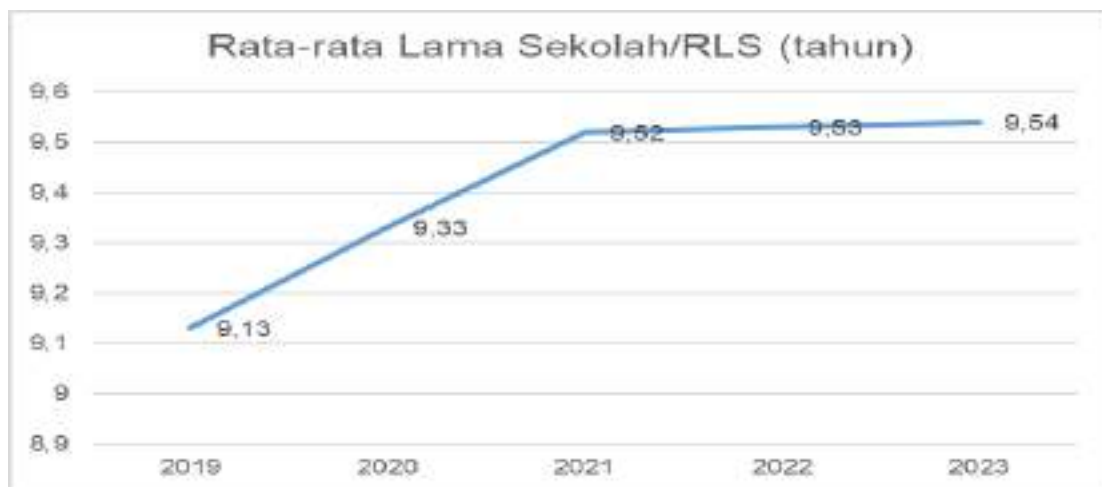
2.1.2.2.1 Pendidikan

1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Capaian angka rata-rata lama sekolah (RLS) di Kota Tasikmalaya dari tahun 2019 hingga 2023 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 capaian rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun keatas di Kota Tasikmalaya sebesar 9,13 tahun meningkat perlahan setiap tahun hingga mencapai 9,54 tahun pada tahun 2023 artinya bahwa secara rata-rata penduduk Kota Tasikmalaya usia 25 tahun ke atas telah bersekolah selama 9,54 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga setingkat dengan I SMA. Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar 2.23.

Gambar 2.23.
Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2024

2. Harapan Lama Sekolah

Sesuai dengan metode penghitungan baru IPM pada Tahun 2010, ada pergantian indikator bidang pendidikan yang semula Angka Melek Huruf (AMH) menjadi Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS Kota Tasikmalaya pada tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan. Angka HLS Kota Tasikmalaya pada tahun 2019 adalah 13,44 dan meningkat hingga pada tahun 2023 angka HLS ada pada angka 13,49 tahun. Dengan kata lain lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun) di masa mendatang memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga D1 atau D2. Secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar 2.24.



Gambar 2.24.
Capaian Harapan Lama Sekolah



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2024

Gambaran Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kota di Jawa Barat tahun 2023 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.18.
Perbandingan Capaian HLS dan RLS Kota di Jawa Barat Tahun 2023

No	Kota di Jawa Barat	HLS	RLS
1.	Provinsi Jawa Barat	12,68	8,83
2.	Kota Bogor	13.45	10.64
3.	Kota Sukabumi	13.60	10.37
4.	Kota Bandung	14.24	11.06
5.	Kota Cirebon	13.16	10.37
6.	Kota Bekasi	14.12	11.66
7.	Kota Depok	13.96	11.58
8.	Kota Cimahi	13.84	11.39
9.	Kota Tasikmalaya	13.49	9.54
10.	Kota Banjar	13.27	8.79

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2024

Angka Harapan Lama Sekolah Kota Tasikmalaya sebesar 13,49 sedangkan Provinsi sebesar 12,68 akan tetapi dibandingkan dengan 9 Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, Kota Tasikmalaya berada di atas Kota Cirebon, Kota Banjar dan Kota Bogor.

2.1.2.2.2 Kesehatan
1. Gambaran umum indikator makro Kesehatan

Gambaran umum indakator makro kesehatan Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu 2019-2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.19.
Gambaran Umum Kesehatan Kota Tasikmalaya 2019-2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Usia Harapan Hidup (thn)	71,93	72,35	72,34	72,36	72,92
2	Persentase balita gizi buruk (%)	0,54	1,02	0,82	0,52	0,27



No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
3	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	80,00	162,25	303,87	180,15	192,22
4	Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	5,29	6,15	8,5	7,67	7,87
5	Prevalensi Stunting (persen)*	10,50	20,10	14,81	12,62	10,75
6	Prevalensi Stunting (persen)**	25,73	24,75	28,9	22,4	27,1
7	SPM Kesehatan		62,01	48,99	81,19	96,75

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya dan Dinas Kesehatan Kota Tasik dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2024

Ket * berdasarkan EPPGM Kota Tasikmalaya

** berdasarkan SSGI

Dapat dilihat dari tabel 2.19. bahwa angka Usia Harapan Hidup di Kota Tasikmalaya terus meningkat, persentase balita gizi buruk mengalami penurunan dari tahun ke tahun dari tahun 2019 di 0,54 % dan tahun 2023 0,27 %. Angka kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH pada Tahun 2023 terealisasi 192,22 Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 dimana Angka Kematian Ibu mencapai 180,15 Permasalahan tersebut disebabkan oleh masih rendahnya derajat kesehatan ibu hamil, rendahnya kesadaran ibu hamil memeriksakan kehamilan, masih adanya pernikahan dini dan masih adanya proses kelahiran diluar fasilitas kesehatan. Prevalensi Stunting (%) berdasarkan berdasarkan EPPGM Kota Tasikmalaya juga cenderung mengalami tren yang menurun.Tren tersebut kemungkinan terjadi disebabkan oleh Pandemi COVID-19, namun penurunan kembali terjadi di tahun 2022 menjadi 12,62 menurut Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat Kota Tasikmalaya dan menurut Survei Status Gizi Nasional menjadi 22,4 persen.

2. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan terdiri dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP), fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL), praktik pengobatan tradisional, laboratorium kesehatan serta sarana produksi dan distribusi kefarmasian. Seluruhnya berjumlah 844 unit. Data fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.20.
Fasilitas pelayanan Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2023

1	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	
	Puskesmas Klinik Pratama	48 Klinik Pramata
	Puskesmas Klinik Utama	7 Klinik Utama
	Puskesmas dengan fasilitas rawat inap	9 Unit
	Puskesmas non rawat inap	13 Unit
2	Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL)	
	Rumah sakit Khusus	14 Unit
3	Sarana Produksi Dan Distribusi Kefarmasian	
	Usaha Mikro obat tradisional	5 Usaha
	pedagang besar farmasi	13 Pedagang
	Apotik	263 Apotik
	Toko Obat	12 toko Obat



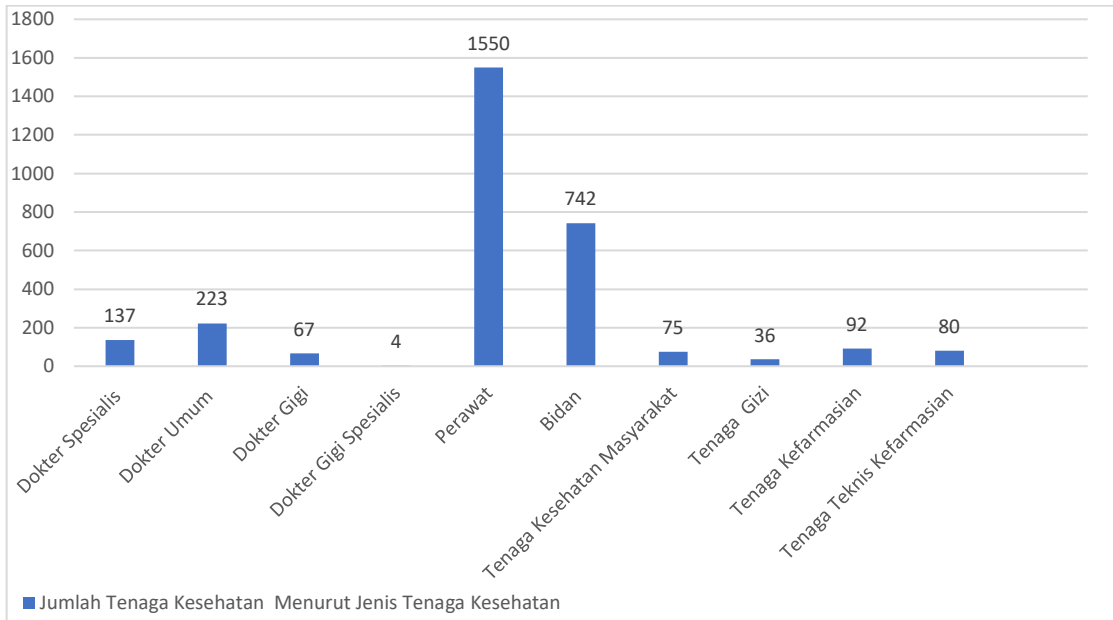
	Toko Alat Kesehatan	14 toko alat kesehatan
	Gudang Farmasi	1 unit Gudang farmasi
4	Laboratorium Kesehatan	
	laboratorium Puskesmas,	27 Unit
	UPTD laboratorium kesehatan	1 Unit
	labortorium milik swasta	7 Unit
5	Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	
	Posyandu Strata Pratama	0 Posyandu
	Posyandu Strata Madya	185 Posyandu
	Posyandu Strata Purnama	382 Posyandu
	Posyandu strata Mandiri	326 Posyandu
6	Pos Binaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular (PTM)	
	Posbindu PTM	195 Posbindu

Sumber: Dinas kesehatan Kota Tasikmalaya, 2024 (diolah)

3. Sumber Daya Manusia Kesehatan

Dalam pembangunan kesehatan, tenaga kesehatan merupakan subjek yang mempunyai peran sentral untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ketersediaan tenaga kesehatan sangat menentukan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan pelayanan rujukan di Rumah Sakit misalnya jenis tenaga dan ratio jenis tenaga terhadap penduduk. Jumlah tenaga kesehatan di kota Tasikmalaya baik itu yang ada di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun milik swasta pada tahun 2023 sebagai berikut:

Gambar 2.25.
Jumlah Tenaga Kesehatan menurut Jenis Tenaga
di Kota Tasikmalaya tahun 2023



Sumber: Dinas kesehatan Kota Tasikmalaya, 2024 (diolah)

Tenaga kesehatan yang ada di Kota Tasikmalaya terdiri dari dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, gizi, ATLM dan farmasi. Adapun rasio jenis tenaga kesehatan terhadap penduduk di Kota Tasikmalaya tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2.21.
Rasio Tiap Jenis Tenaga Kesehatan terhadap Penduduk
Kota Tasikmalaya Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah			Rasio Terhadap Jmlh Penduduk	Standar SK Menko Kesra no 54/2013
		Laki-laki	Perempuan	Total		
1	Dokter Spesialis	96	41	137	27,8	11
2	Dokter Umum	92	131	223	24,4	45
3	Dokter Gigi	15	52	67	7,9	13
4	Dokter Gigi Spesialis	1	3	4	3,3	-
5	Perawat	611	939	1550	197,8	180
6	Bidan	-	742	742	89,5	120
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat	20	55	75	7,2	16
8	Tenaga Kesehatan Lingkungan	17	19	36	6,1	18
9	Tenaga Gizi	20	72	92	12,8	14
10	Tenaga Kefarmasian	11	69	80	37,9	
	a. Tenaga Teknis Kefarmasian	-	-	-	-	24
	b. Apoteker	-	-	-	-	12

Sumber: Dinas kesehatan Kota Tasikmalaya, 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui rasio tenaga kesehatan untuk setiap 100.000 penduduk di Kota Tasikmalaya hampir seluruh rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk, semua kategori tenaga kesehatan sampai dengan tahun 2023 yang ada belum dapat memenuhi target kebutuhan tenaga kesehatan yang telah ditetapkan secara nasional yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota peduli Hak Asasi Manusia.

4. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan terdiri dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP), fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL), praktik pengobatan tradisional, laboratorium kesehatan serta sarana produksi dan distribusi kefarmasian. Seluruhnya berjumlah 844 unit. Data fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.22.
Fasilitas pelayanan Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2023

1	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	
	Puskesmas Klinik Pratama	48 Klinik Pramata
	Puskesmas Klinik Utama	7 Klinik Utama
	Puskesmas dengan fasilitas rawat inap	9 Unit



	Puskesmas non rawat inap	13 Unit
2	Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL)	
	Rumah sakit Khusus	14 Unit
3	Sarana Produksi Dan Distribusi Kefarmasian	
	Usaha Mikro obat tradisional	5 Usaha
	pedagang besar farmasi	13 Pedagang
	Apotik	263 Apotik
	Toko Obat	12 toko Obat
	Toko Alat Kesehatan	14 toko alat kesehatan
	Gudang Farmasi	1 unit Gudang farmasi
4	Laboratorium Kesehatan	
	laboratorium Puskesmas,	27 Unit
	UPTD laboratorium kesehatan	1 Unit
	labortorium milik swasta	7 Unit
5	Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	
	Posyandu Strata Pratama	0 Posyandu
	Posyandu Strata Madya	185 Posyandu
	Posyandu Strata Purnama	382 Posyandu
	Posyandu strata Mandiri	326 Posyandu
6	Pos Binaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular (PTM)	
	Posbindu PTM	195 Posbindu

Sumber: Dinas kesehatan Kota Tasikmalaya, 2024 (diolah)

2.1.2.2.3 Ketenagakerjaan

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah penduduk yang berstatus sebagai penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka mencakup penduduk yang tidak memiliki dan tidak mencari pekerjaan, penduduk yang tidak memiliki tetapi sedang mencari pekerjaan, dan penduduk yang sudah memiliki tetapi belum memulai pekerjaan. TPT Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu tahun 2019-2023 disajikan dalam gambar berikut.

Gambar 2.26.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tasikmalaya 2019 -2023



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2024



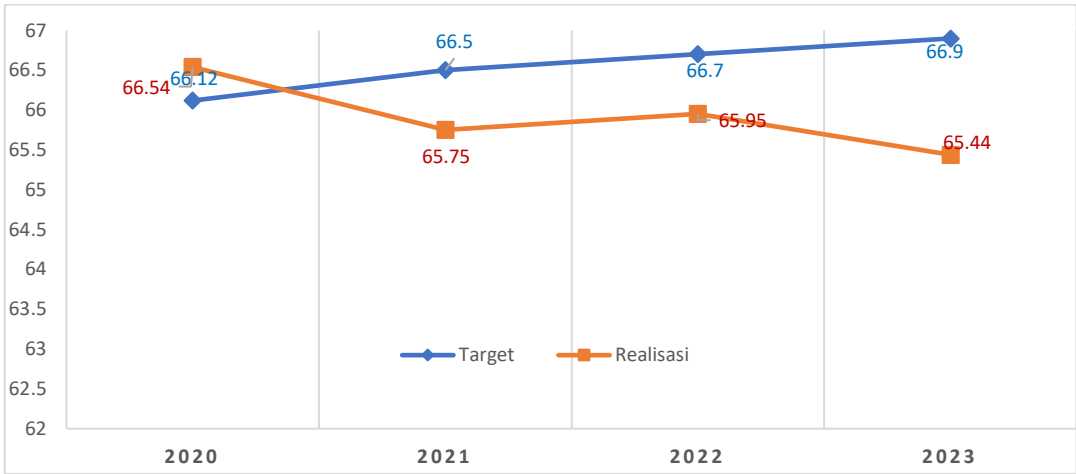
Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka di Kota Tasikmalaya konsisten berada di bawah rata-rata provinsi dan cenderung mengalami penurunan. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa jarak antara besaran TPT di tingkat kota dengan tingkat provinsi mengalami penurunan. Selain itu, TPT juga menunjukkan tren penurunan baik di tingkat kota maupun di tingkat provinsi dalam kurun waktu tersebut.

2. Partisipasi Angkatan Kerja

Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 tercatat 65,44 persen turun dari angka tahun 2022 yang berada di angka 65,95. Hal ini terjadi karena ekonomi belum pulih sebagai akibat pandemi Covid-19 yang terjadi di Kota Tasikmalaya menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan karena siklus bisnis belum lancar.

Gambar 2.27.

Partisipasi Angkatan Kerja Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2023 (persen)



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2023.

2.1.2.2.4 Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni budaya merupakan wujud kearifan lokal yang keberadaannya harus dipertahankan masyarakat dan pemerintah daerah.

Tabel 2.23.

Jumlah Grup dan Gedung Seni Budaya

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah grup kesenian	173	173	173	173	173
Jumlah gedung kesenian	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, 2024 (diolah)

Sementara itu aktivitas masyarakat dalam menjaga kebugaran tubuhnya dan bersosialisasi, salah satunya ditunjukkan dengan banyaknya lapangan



olahraga. Berikut adalah jumlah lapangan olahraga milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang masih aktif dari tahun 2019-2023.

Tabel 2.24.
Jumlah Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Lapangan Sepakbola/ Futsal	Lapangan Basket	Lapangan Volly	Bulungtangkis (terbuka/Tertutup)	Kolam Renang
1	Mangkubumi	10	3	18	33	5
2	Purbaratu	2	4	1	26	-
3	Indihiang	4	6	8	25	1
4	Bungursari	9	3	-	17	6
5	Kawalu	4	3	1	35	-
6	Cihideung	4	6	5	28	11
7	Cipedes	6	6	6	33	5
8	Tamansari	7	9	10	23	-
9	Tawang	6	9	3	37	3
10	Cibeureum	-	1	3	31	5
	TOTAL	52	50	55	288	36

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, 2024 (diolah)

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni budaya merupakan wujud kearifan lokal yang keberadaannya harus dipertahankan masyarakat dan pemerintah daerah. Secara berkelanjutan, bangunan cagar budaya juga harus dilestarikan. Pada tahun 2020, terdapat 65 Cagar Budaya yang ditetapkan, 17 Cagar Budaya yang dilestarikan dengan daftar Cagar Budaya yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25.
Jumlah Cagar Budaya Kota Tasikmalaya Tahun 2023

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2022
Jumlah Cagar Budaya Yang Ditetapkan	Buah	65	65	65	65
Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Buah	17	23	26	26

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, 2024 (diolah)

Tabel 2.26.
Data Cagar Budaya Kota Tasikmalaya Tahun 2023

NO	Nama Benda, Situs & Kawasan Cagar Budaya	Alamat	No dan tanggal Surat Keputusan/Keteta pan Sebagai Benda, Situs & Kawasan Cagar Budaya
1	Tugu Peta	Jl. Veteran	PO2018121300012
2	Tugu 0 Km	Jl.Dr. Sukarjo	PO2018121300009



NO	Nama Benda, Situs & Kawasan Cagar Budaya	Alamat	No dan tanggal Surat Keputusan/Ketetapan Sebagai Benda, Situs & Kawasan Cagar Budaya
3	Cilamajang Kota Tasikmalaya Jawa Barat	Cilamajang	PO2018121300018
4	Makam Gn. Subang	Lintasan Mangkubumi -Indihiang	PO2016061000161
5	Komplek Makam Syeh Tubagus Abdullah	Sukaasih	PO2016060900121
6	Makam (Mesjid) H. Bakri	Hz. Mustopa	PO2016061000356
7	Makam Gn Saena	Citamiang	PO2018121300019
8	Makam Eyang Cakra Ningrat	Ciseeng BabaknArsi	PO2018121300015
9	Punden Berundak, Gunung Pa Jahim	Leuwiliang, Kawalu	-
10	Makam H Hasan	Babakan Peundeuy	PO2018121300020
11	Makam Dalem Patuakan	Tanjung Kota TasikmalayaJawa Barat	PO2018121300014
12	Makam Eyang Patinggi	Leuwiliang	PO2018121300016
13	Makam Dalem Kutawaringin	Lewiliang	PO2018121300017
14	Lingga Yoni	Lintasan Mangkubumi Indihiang	PO2016061000161
15	Tugu Istiwa	Citamiang	PO2018121300002
16	Makam Nyimas Saena	Tanjung	PO2018121300021
17	Naskah Wasiat Sukapura (Manuskrip)	Tawang	-
18	Naskah Ndalem Patuakan	Jln. Komarasari Tawang	
19	Makam Sakarembong	Jl. Bantar,bantarsari Kota tasikmalaya	
20	Makam Eyang Jiwaraga	Kp Nagrog	
21	Makam Eyang Prabudilaya	Kota Tasikmalaya Jawa Barat	
22	Makam Syekh Abdul Gharib	Cibeas Kota Tasikmalaya	
23	Makam Eyang Cakraningrat	Ciseeng Babakn Arsi Kota Tasikmalaya Jawa Barat	800/80- SK/Bidbud/2021 14 Februari 2021
24	Makam Dalem Darpanagga		
25	Makam Dalem Kutawaringin	Lewiliang Kota Tasikmalaya Jawa Barat	800/80- SK/Bidbud/2021 14 Februari 2021
26	Makam HM Bakri		

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, 2024



2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

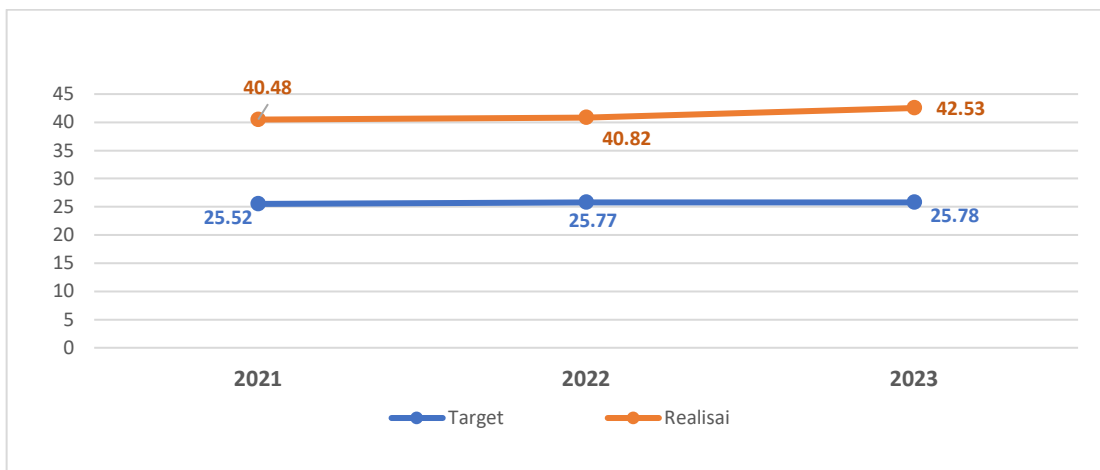
2.1.3.1. Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1. Urusan Pendidikan

1. Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar merupakan indikator pendidikan yang mengukur partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK didefinisikan sebagai jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk usia jenjang tertentu. Capaian APK PAUD, SD, dan SMP di Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu tahun 2021-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

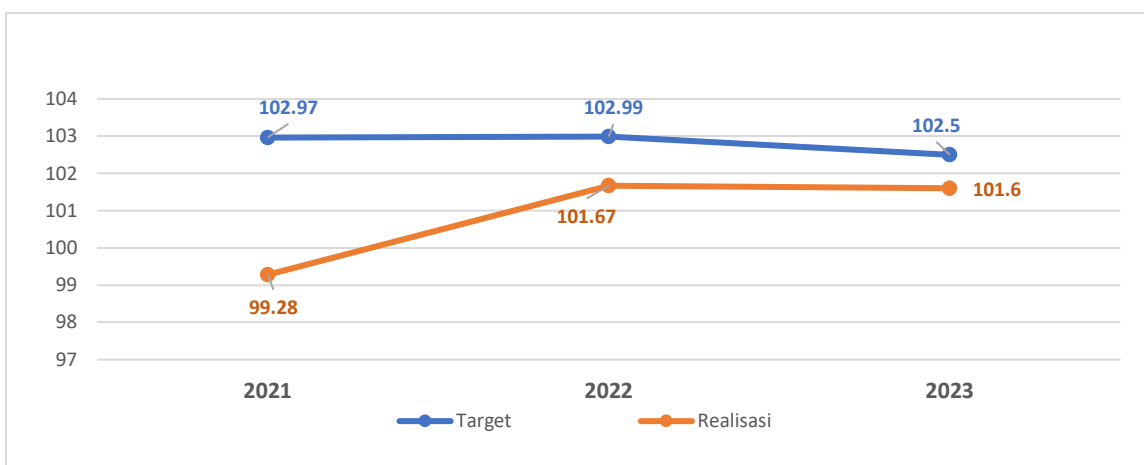
Gambar 2.28.
Angka Partisipasi Kasar PAUD Tahun 2021-2023



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2024.

Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, APK PAUD mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2023, APK PAUD sebesar 42,53 persen yang menunjukkan masih ada usia PAUD yang belum terdaftar sebagai siswa PAUD. Hal ini diantaranya disebabkan oleh masih terbatasnya akses pendidikan PAUD, kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya serta masih tingginya biaya pendidikan PAUD.

Gambar 2.29.
Angka Partisipasi Kasar SD Tahun 2021-2023



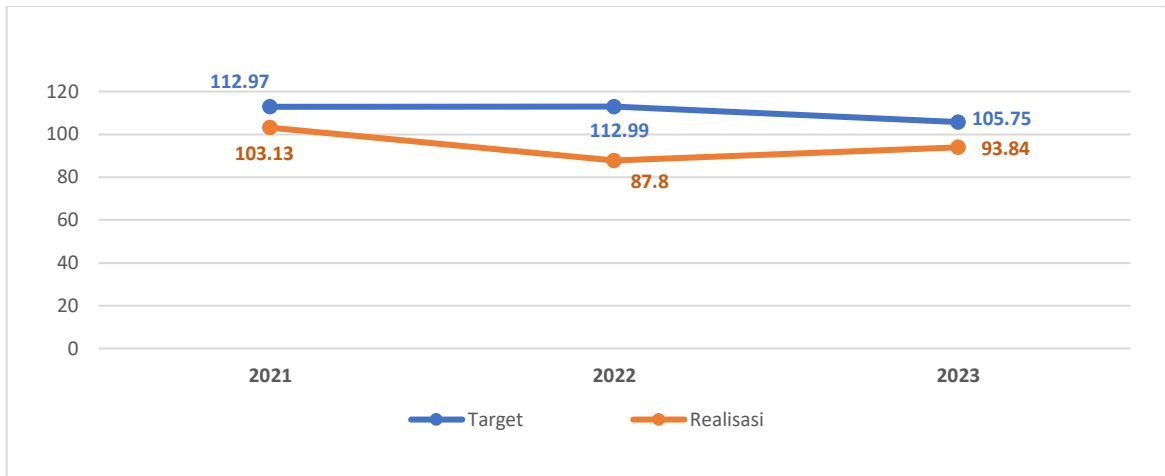
Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2024

Pada jenjang Sekolah Dasar APK mengalami fluktuasi, terjadi kenaikan pada tahun 2022 sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan. Pada tahun



2022 APK SD/MI sebesar 101,67 artinya mengalami kenaikan sebesar 2,39 persen dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan 0,07 persen. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat anak dibawah usia 7 tahun sudah masuk SD/MI.

Gambar 2.30.
Angka Partisipasi Kasar SMP Tahun 2021-2023



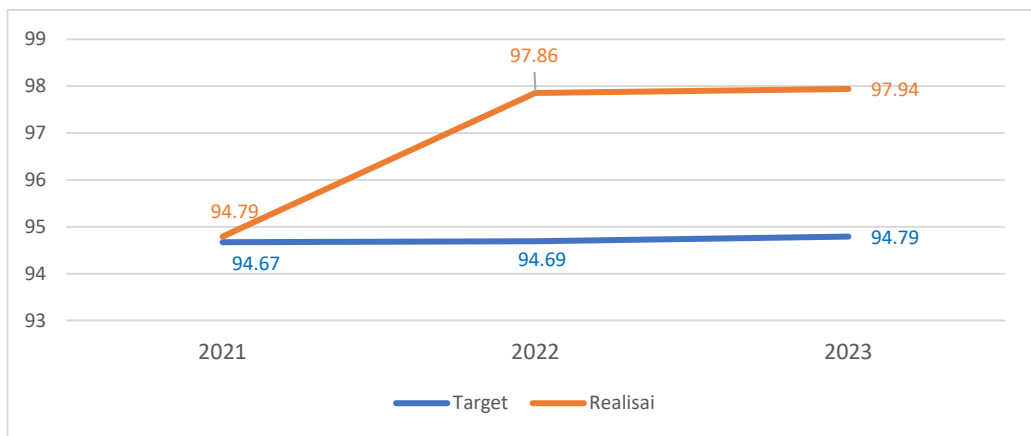
Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2024

APK SMP mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 APK SMP mengalami penurunan sebesar 15,26 persen dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan lagi dari 87,80 persen menjadi 93,84 persen atau sebesar 4,04 persen. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat siswa usia 15 tahun sudah berada di SMA/SMK/MA.

2. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur seberapa banyak anak usia sekolah yang bersekolah tepat waktu. APM didefinisikan sebagai jumlah siswa/penduduk kelompok usia tertentu yang bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia tertentu.

Gambar 2.31.
Angka Partisipasi Murni SD Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2023



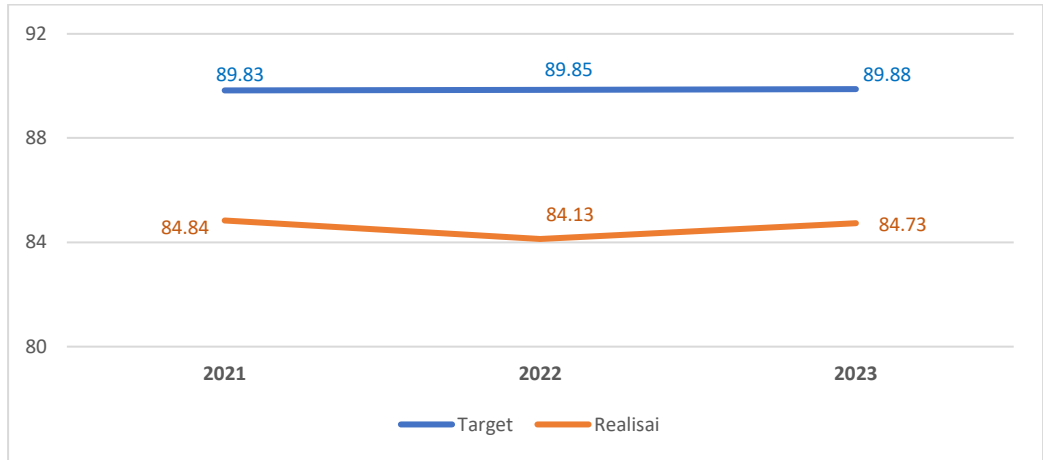
Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2024

APM SD/MI Sederajat pada tahun 2022 menunjukkan angka 97,86 persen sedangkan tahun sebelumnya 94,79 persen atau dengan kata lain naik sebesar



3,07 persen dan pada tahun 2023 ada kenaikan relative kecil sebesar 0,08%. APM SD/MI relatif baik tapi masih ada usia 12 tahun sudah di SMP/MTs.

Gambar 2.32.
Angka Partisipasi Murni SMP Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2023



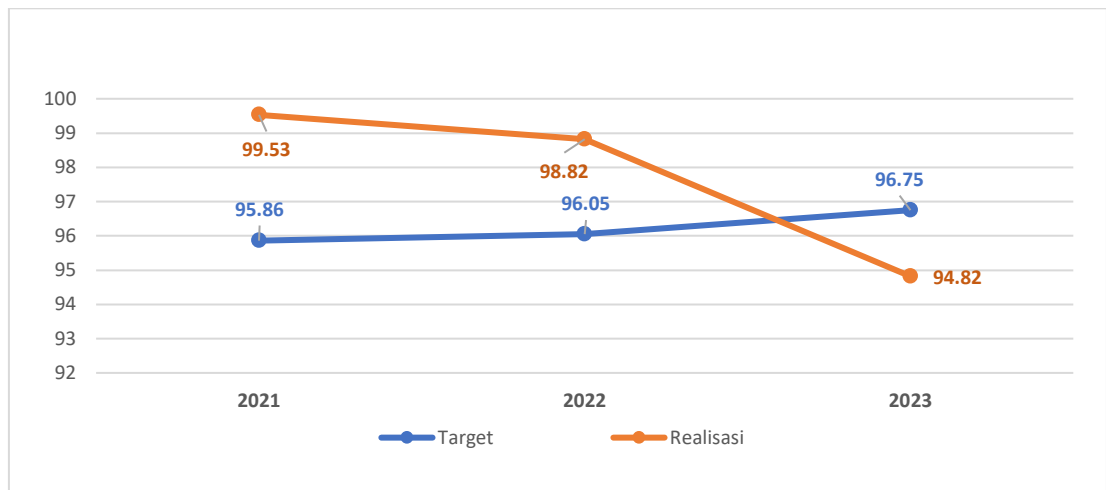
Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2024

Pada jenjang SMP/MTs, APM mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun akan tetapi pergeserannya relatif kecil. Pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,71 persen dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,60 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak usia jenjang SMP/MTs yang sudah ada di jejang SMA/SMK/MA.

3. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Patisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah anak usia 7-12 dan 13-15 tahun yang sedang bersekolah dibagi seluruh jumlah anak usia (7-12) dan usia (13-15). Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.33.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun Kota Tasikmalaya
Tahun 2021-2023



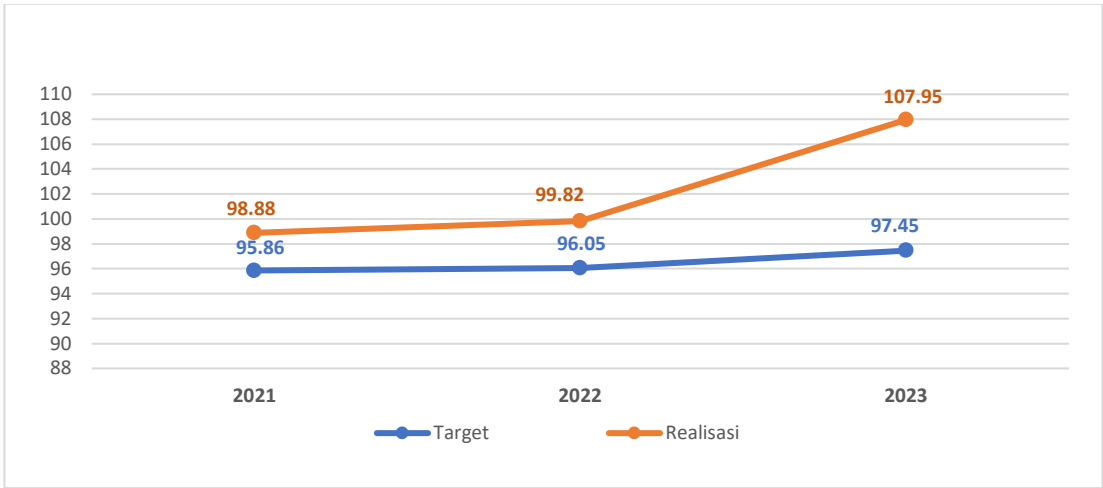
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2024

Perbandingan realisasi APS usia 7-12 tahun yang dicapai pada tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan 0,71 persen, yakni dari sebesar 99,53 persen



menjadi 98,82 persen. Pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 4,00% dari 98,82% ke 94,82%. Hal ini menunjukkan bahwa dari seluruh penduduk usia 7-12 tahun, sebesar 94,82% sudah bersekolah sedangkan sisanya sebesar 5,18 persen ada yang tidak/belum sekolah dan yang sudah tidak bersekolah lagi (putus sekolah) atau sekolah ke daerah lain.

Gambar 2.34.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun Kota Tasikmalaya
Tahun 2021-2023



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2024

Sementara itu, Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada tahun 2021 sebesar 98,88 persen, pada tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar 0,94 persen dan pada tahun 2023 ada kenaikan yang signifikan sebesar 8,13%. Angka Partisipasi Sekolah 13-15 tahun lebih tinggi jika dibandingkan dengan APS 7-12 tahun. Hal ini disebabkan antara lain masih banyak anak dari daerah lain yang sekolah di Kota Tasikmalaya.

4. Ketersediaan Sekolah

Pada tahun 2023, ketersediaan sekolah jenjang pendidikan dasar untuk tingkat SD/MI mengalami pengurangan, hal ini disebabkan terjadinya penggabungan beberapa sekolah. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs mengalami penambahan sekolah baru untuk SMP Swasta. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27.
Jumlah Sekolah di Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2023

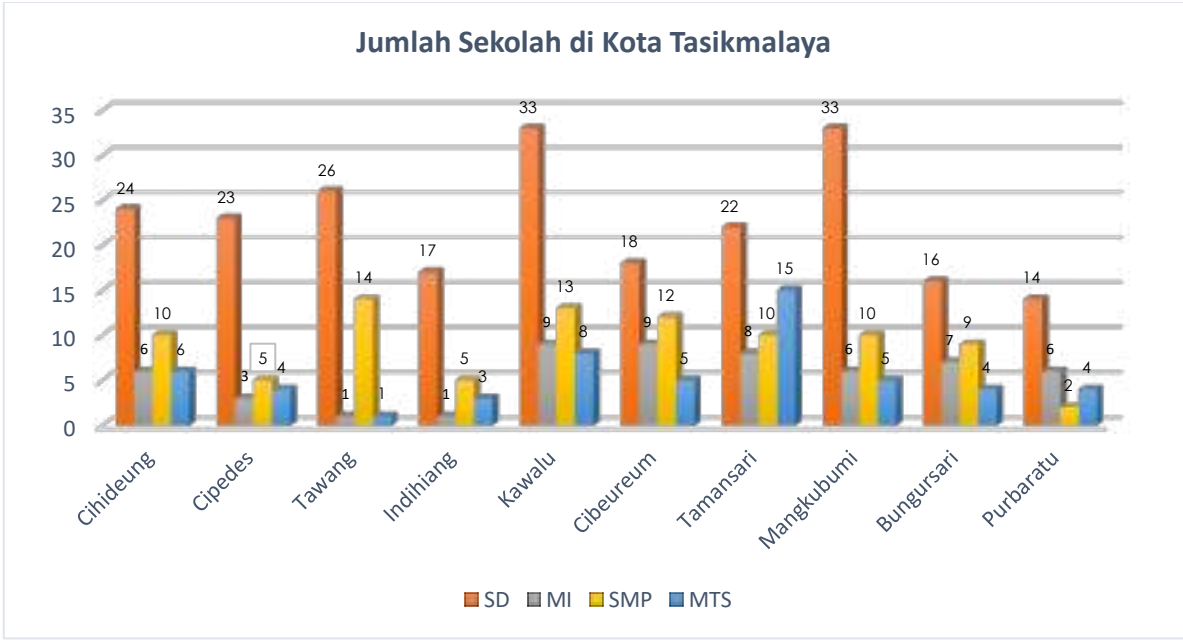
No	Tahun	SD/MI					SMP/MTs				
		SD		Jumlah SD	MI	Jumlah SD dan MI	SMP		Jumlah SMP	MTs	Jumlah SMP dan MTs
		Negeri	Swasta				Negeri	Swasta			
1	2021	199	33	232	55	287	21	60	81	51	132
2	2022	193	36	229	55	284	21	65	86	55	141
3	2023	189	37	226	56	282	21	69	90	55	145

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2024



Sebaran sekolah per kecamatan dapat terlihat pada gambar 2.35, untuk tingkat SD, MI, SMP dan MTs sebarannya antar kecamatan cukup merata.

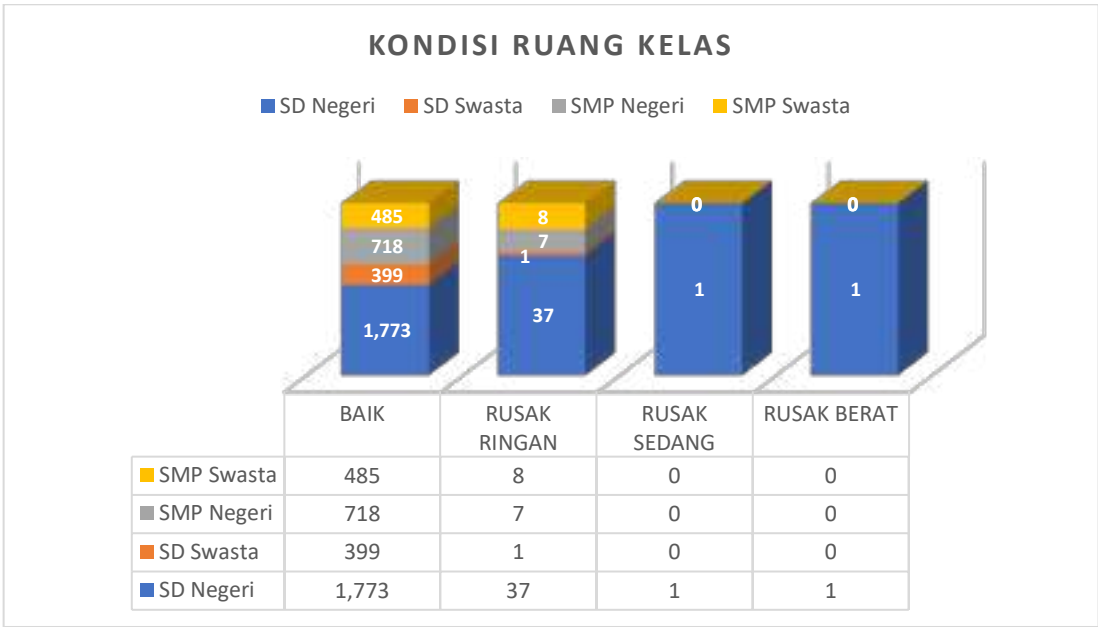
Gambar 2.35.
Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan Tahun 2023



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2024

Selain sebaran sekolah, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang cukup penting adalah ruang kelas. Kondisi ruang kelas SD dan SMP di Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

Gambar 2.36.
Kondisi Ruang Kelas SD dan SMP Tahun 2023



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2024.

5. Rasio Guru – Murid

Salah satu penunjang peningkatan angka indikator rata-rata lama sekolah adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti jumlah sekolah dan rombongan belajar (rombel) yang mencukupi untuk semua



penduduk usia sekolah, juga banyaknya guru yang mengajar mencukupi untuk semua murid. Selain jumlah guru yang mencukupi, kualitas guru pun sangat menentukan berhasil tidaknya suatu pendidikan.

Tabel 2.28.
Rasio Guru-Murid dan Rombel-Murid
SD di Kota Tasikmalaya Tahun 2021 - 2023

Tahun	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Jumlah Rombel	Rasio Guru-Murid	Rasio Rombel-Murid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2021	3.188	62.421	2.025	1 : 19,58	1 : 30,82
2022	3.330	62.469	2.443	1 : 18,76	1 : 25,57
2023	3.454	75.360	2.422	1 : 21,82	1 : 31,11

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2024

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk tingkat Sekolah Dasar pada tahun 2023, rasio murid dengan guru selama periode tersebut berada pada posisi 1 : 21,82. Sedangkan untuk rasio rombel-murid sebesar 1 : 31,11, kondisi ini belum sesuai dengan standar sesuai Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Jenjang pendidikan lanjutan (SMP) menunjukkan kecenderungan lebih baik dibandingkan dengan sekolah tingkat dasar dari sisi rasio guru dan murid serta rasio murid dan rombel. Rasio guru dengan murid berada pada posisi 1 : 15,39. Hal ini menunjukkan bahwa satu orang guru SMP/MTs di Kota Tasikmalaya melayani 15 orang murid SMP/MTs. Dengan demikian rasio guru dan murid SMP di Kota Tasikmalaya sudah di atas standar. Sedangkan untuk rasio rombel-murid pada tahun 2022 sebesar 1 : 28,94 hal ini masih di atas standar yaitu 1 : 32 walaupun mengalami kenaikan sebagaimana Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Tabel 2.29.
Rasio Guru-Murid dan Rombel-Murid
SMP di Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Jumlah Rombel	Rasio Guru-Murid	Rasio Rombel-Murid
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)
2021	1.777	28.739	1.057	1 : 16,17	1: 27,19
2022	1.843	28.357	980	1 : 15,39	1 : 28,94
2023	1.890	44.994	1.209	1 : 23,80	1 : 37,22

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2024

Selain pendidikan formal yang dilaksanakan juga dilaksanakan pendidikan non formal diantaranya pendidikan kesetaraan. Berikut data murid program kesetaraan di Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 - 2023.



Tabel 2.30.
Jumlah Murid Program Paket A, B dan C
di Kota Tasikmalaya Tahun 2021 - 2023

No	Kecamatan	2021			2022			2023		
		Paket A	Paket B	Paket C	Paket A	Paket B	Paket C	Paket A	Paket B	Paket C
1	Cihideung	10	84	271	17	86	287	11	40	311
2	Cipedes	-	81	217	-	83	228	2	11	261
3	Tawang	10	39	105	20	53	98	7	28	126
4	Indihiang	1	39	95	0	31	93		21	87
5	Kawalu	8	114	296	18	104	260	5	24	313
6	Cibeureum	-	98	281	4	57	244	6	10	294
7	Tamansari	1	241	464	20	201	486	6	69	816
8	Mangkubumi	2	90	248	5	116	282	1	48	387
9	Bungursari	3	45	137	7	71	182	3	10	242
10	Purbaratu	11	146	315	16	155	305	20	86	387
Kota Tasikmalaya		46	977	2.429	107	957	2.465	61	347	3224

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2024

6. Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan

Salah satu indikator kualitas pendidikan adalah Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan. Jumlah penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan di Kota Tasikmalaya dalam rentang waktu tahun 2021 s.d.2023 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.31.
Jumlah penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan
Yang Ditamatkan di Kota Tasikmalaya Tahun 2021 sd 2023

No	Tingkatan Sekolah	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Sekolah Dasar	2.180.654	2.676.998	2.854.799
2	Sekolah Menengah Pertama	8.981305	10.013612	10.588.091
3	Sekolah Menengah Atas	3.861.946	3.396.917	3.225.301
4	Perguruan Tinggi	188.530	64.205	112.217

Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka (BPS), 2021 s.d. 2023

Tabel 2.31. di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2021, didominasi oleh tamat Sekolah Mengeah Pertama dengan persentase sebesar 59,04 persen dan pada tahun 2023 sebesar 63,10%. Namun demikian terdapat kenaikan pada jumlah penduduk yang lulus pada tingkat Perguruan Tinggi dari tahun 2022 ke tahun 2023.

7. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan

Tahun 2023 merupakan tahun peralihan dari RPJMD Tahun 2017-2022 dan RPD tahun 2023-2026. Indikator kinerja urusan yang dipergunakan pada RPJMD Tahun 2017-2022 ada yang masih dipergunakan pada RPD tahun 2023-2026 dan ada juga yang sudah tidak dipergunakan lagi atau diganti dengan



indikator lain yang lebih relevan. Hal ini berlaku untuk indikator kinerja semua urusan pada tahun 2023.

Adapun capaian indikator kinerja urusan pendidikan tahun 2021 - 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Pendidikan
Tahun 2021- 2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan	Point	-	-	-	-	72	95,73
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	%	25,52	40,48	25,77	40,82	25,78	42,53
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	102,97	99,28	102,99	101,67	102,5	101,6
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	112,97	103,13	112,99	87,80	105,75	93,84
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	94,67	94	95,05	97,86	89,79	97,94
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	89,83	84,84	89,90	84,13	78,65	84,71
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (7-12)	%	100	99,53	100	98,82	100	94,82
8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (12-15) Tahun	%	100	98,88	100	99,82	100	107,95
9	Tingkat Partisipasi anak usia 7 -18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100	100	100	100	100
10	Tingkat Kelulusan Warga Belajar pada Lembaga Kursus dan Pelatihan	%	100	100	100	100	100	100
11	Persentase PAUD Terakreditasi B	%	-	-	-	-	51,55	78,32
12	Persentase SD Terakreditasi A	%	-	-	-	-	60,26	59,73



No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
13	Persentase SMP Terakreditasi A	%	-	-	-	-	58,19	55,56
14	Persentase Non Formal /Kesetaraan Terakreditasi B	%	-	-	-	-	51,85	61,90
15	Persentase Sarana Prasarana dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	67,38	97,97
15	Persentase capaian pengembangan kurikulum	%	100	100	100	100	100	100
17	Persentase Capaian Kualitas Pendidik PAUD dan Pendidikan Dasar	%	-	-	-	-	51,45	80,43
18	Persentase Siswa berprestasi yang dicapai ke Tingkat Provinsi jenjang Pendidikan Dasar	%	30	34,78	40	40,32	25,03	38,21

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2024.

Tabel di atas menunjukkan bahwa Indeks Pencapaian SPM Pendidikan jauh melebihi target yang telah ditetapkan. Sedangkan APM SD/MI Sederajat pada tahun 2023 sudah mencapai target dan pada jenjang SMP, APM mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 3,71 persen dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan lagi sebesar 0,58 persen. APM SMP tidak mencapai target yang telah ditentukan, hal ini disebabkan oleh adanya peserta didik usia 15 tahun sudah berada di SMA/SMK/MA. Untuk tingkat kelulusan warga belajar pada Lembaga Kursus dan Pelatihan terealisasi 100 persen sesuai dengan target sedangkan pemenuhan perlengkapan sarana prasarana pendidikan dasar masih terus diupayakan sehingga kedepannya dapat memenuhi target yang diharapkan. Capaian persentase siswa berprestasi yang dicapai ke Tingkat Provinsi jenjang pendidikan dasar pada tahun 2023 yakni dari target 25,03 persen terealisasi sebesar 38,21 persen.

2.1.3.1.2. Urusan kesehatan

Data capaian pelayanan umum urusan kesehatan dalam kurun waktu tahun 2021 - 2023 secara umum mengalami fluktuasi. Secara lengkap data capaian indikator kinerja pembangunan daerah urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kesehatan
Tahun 2021-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2021		2022		2023	
			Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
1	Persentase masyarakat miskin mendapat jaminan Kesehatan	%	76,9	40.75	76,9	98,39	-	-



No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2021		2022		2023	
			Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
2	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	5,72	8,5	5,72	7,67	8,6	7,87
3	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	145,18	303,87	145,18	180,15	303,8	192,22
4	Prevalensi Stunting	%	19,1	14,81	18,10	12,62	14,8	10,73
5	Persentase capaian SPM penyakit menular dan tidak menular	%	100	54,15	100	68,17	75	96,75
6	Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	100	95,5	100	95,45	-	-
7	Persentase layanan jaminan kesehatan nasional masyarakat miskin	%	100	80,31	95	95,56	-	-
8	Persentase ketersediaan obat dan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	90	66,6	90	91,11	-	-
9	Cakupan pelayanan kesehatan ibu, anak dan remaja	%	100	100	100	100	-	-
10	Persentase Rumah Tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	%	45,13	40,83	45,13	43,88	25,78	48,57
11	Persentase balita gizi buruk	%	0,5	0,82	0	0,52	-	-
12	Capaian Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga yang memenuhi standar	%	54,25	38,21	54,25	38,21	-	-
13	Persentase Puskesmas sesuai standar permenkes 75	%	95	77	95	100	-	-
14	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar	%	80	71	80	77,27	-	-
15	Persentase pelayanan kesehatan keluarga	%	85	75,17	85	85,24	-	-
16	Persentase Penyakit menular ditangani sesuai tatalaksana standar	%	100	61,5	100	88,55	-	-
17	Persentase penyakit tidak menular yang ditangani sesuai tatalaksana standar	%	100	50,5	100	57,98	-	-
19	Capaian fasilitas kesehatan tahapan pertama yang terakreditasi	%	100	95	100	27,27	-	-
20	Persentase Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya	%	100	100	100	100	-	-
21	Capaian Penyelenggaraan Operasional Pelayanan terhadap jumlah lab dan gudang farmasi	%	100	100	100	100	-	-



No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2021		2022		2023	
			Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
22	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja sesuai standar	%	100	100	100	100	-	-
23	Persentase implementasi sistem informasi kesehatan	%	100	100	100	100	-	-
24	Persentase standar pelayanan minimal rumah sakit	%	100	100	86	100	-	-
25	Akreditasi Rumah Sakit dr. Soekardjo	kategori	5	5	5	9	-	-
26	Cost Recovery Ratio (CRR)	%	100	100	100	98	-	-
27	Persentase capaian Mutu dan Keselamatan Pasien	%	83	83	83	74,93	-	-
28	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dr. Soekardjo	%	85	83,45	85	70,83	-	-
29	Indeks Pencapaian SPM kesehatan	%					75	98,12
30	Indeks Pencapaian SPM kesehatan masyarakat	%					75	99,68
31	Indeks Keluarga Sehat	%					0,35	0,12
32	Persentase tenaga kesehatan yang tersertifikasi	%					91	86,21
33	Persentase sarana kefarmasian dan Makanan Minuman Sesuai Standar	%					77	84,01

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2024

Pelayanan kesehatan sangat didukung oleh ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Berikut disampaikan jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan di Kota Tasikmalaya sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.34.
Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2023

No	Puskesmas	No	Rumah Sakit / Faskes Lainnya
1	Kersanagara	1	RSUD dr. Soekardjo
2	Kawalu	2	RS ISLAM Hj. Siti Munaroh
3	Karanganyar	3	RS Jasa Kartini
4	Tamansari	4	RSB dr. Hj. Karmini EH
5	Cibeureum	5	RS Tasik Medika Citratama (TMC)
6	Purbaratu	6	RSB UMMI
7	Kahuripan	7	RSIA Sayang Bunda
8	Tawang	8	RSIA Widaningsih
9	Cihideung	9	RS Syifa Medina
10	Cilembang	10	RSIA Bunda Aisyah



No	Puskesmas	No	Rumah Sakit / Faskes Lainnya
11	Mangkubumi	11	RS Prasetya Bunda
12	Sambongpari	12	RS Permata Bunda Tasikmalaya
13	Indihiang	13	RS Hermina
14	Parakanyasag	14	RS Jantung
15	Bungursari	15	Fasilitas Kesehatan lainnya (6 unit)
16	Sukalaksana		
17	Bantar		
18	Cipedes		
19	Panglayungan		
20	Cigeureung		
21	Urug		
22	Sangkali		

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2024

Selain fasilitas kesehatan, jumlah SDM kesehatan/tenaga medis di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35.
Jumlah Tenaga Medis Di Fasilitas Kesehatan Kota Tasikmalaya
Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah			Rasio terhadap Jmlh Penduduk	Standar SK Menko Kesra no 54/2013
		Laki-laki	Perempuan	Total		
1	Dokter Spesialis	96	41	137	27,8	11
2	Dokter Umum	92	131	223	24,4	45
3	Dokter Gigi	15	52	67	7,9	13
4	Dokter Gigi Spesialis	1	3	4	3,3	-
5	Perawat	611	939	1.550	197,8	180
6	Bidan	-	742	742	89,5	120
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat	20	55	75	7,2	16
8	Tenaga Kesehatan Lingkungan	17	19	36	6,1	18
9	Tenaga Gizi	20	72	92	12,8	14
10	Tenaga Kefarmasian	11	69	80	37,9	
	a. Tenaga Teknis Kefarmasian	-	-	-	-	24
	b. Apoteker	-	-	-	-	12

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2024

Berdasarkan data di atas, masih terdapat beberapa ketersediaan SDM kesehatan yang berada di bawah standar yaitu Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Tenaga Gizi dan Tenaga Teknis Kefarmasian.



2.1.3.1.3. **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

A. Jalan Kota

Jalan di wilayah Kota Tasikmalaya terdiri dari Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kota. Ruas jalan kota di Kota Tasikmalaya sepanjang 461,209 Km Berdasarkan Keputusan Walikota Tasikmalaya nomor 600/Kep.880-DPUTR/2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan di Kota Tasikmalaya sebagai Jalan Kota, terkoneksi dengan jalan nasional dan jalan provinsi.

Jaringan jalan berperan untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan dan menyeimbangkan pengembangan kawasan agar merata di seluruh wilayah. Rasio atau perbandingan panjang jalan dengan luas wilayah menggambarkan aksesibilitas jalan.

Rasio panjang jalan dengan luas wilayah diperoleh dengan membagi panjang jalan (km) dengan luas wilayah daerah terkait (km²). Nilai rasio ini memiliki arti panjang jalan yang terdapat di suatu daerah dalam 1 km² luas wilayah. Rasio ini juga dapat dijadikan sebagai informasi tingkat aksesibilitas suatu daerah. Semakin tinggi nilai rasio panjang jalan dengan luas wilayah, maka aksesibilitasnya semakin baik, sehingga konektivitas jalan di daerah tersebut juga semakin baik dilihat dari ketersediaan jaringan jalannya.

Tabel 2.36.
Rasio Panjang Jalan dengan Luas Wilayah Kota Tasikmalaya
Tahun 2019-2023

Tahun	Panjang Jalan (km)	Luas Wilayah (km ²)	Rasio Panjang Jalan dengan Luas Wilayah
2019	450,742	183,94	2,45
2020	450,742	183,94	2,45
2021	450,742	183,94	2,45
2022	450,742	183,94	2,45
2023	461,209	183,94	2,51

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, 2024

Indeks Aksesibilitas Kota Tasikmalaya diukur dengan rasio panjang jalan dengan luas wilayah masuk dalam kategori tinggi (>1,5). Seiring dengan selesainya pembangunan Jalan Lingkar Utara dan Jalan Mangin-Bungursari, maka indeks aksesibilitas Kota Tasikmalaya mengalami kenaikan pada tahun 2023.

Jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang ada di Kota Tasikmalaya maka rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada tahun 2022 sebesar 0,0018, sehingga dapat dikatakan bahwa kapasitas jalan masih memadai untuk penduduk Kota Tasikmalaya. Berikut Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Tasikmalaya dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 2.37.
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Tahun	Panjang Jalan (km)	Jumlah Kendaraan Bermotor (unit)	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
2019	450,74	278.870	0,001616309



Tahun	Panjang Jalan (km)	Jumlah Kendaraan Bermotor (unit)	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
2020	450,74	327.480	0,013763894
2021	450,74	239.366	0,001883058
2022	450,74	237.742	0,001895921
2023	461,209	314.155	0,001468093

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, 2024

Kinerja infrastruktur jalan dan jembatan diukur berdasarkan kondisi jalan dan jembatan. Selama kurun waktu dari tahun 2019 sampai dengan 2023, terdapat perubahan indikator di tahun 2021 dan 2023. Secara rinci kinerja infrastruktur jalan dan jembatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38.

Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Panjang Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	Km	411,302	379,525	397,127	402,422	_*
Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	%	91,25	84,2	88,11	89,28	_*
Panjang jalan dan jembatan yang dibangun terhadap target	Km	0,9	2,45	_*	_*	_*
Capaian jumlah jalan dan jembatan yang dibangun terhadap target	%	14,05	38,25	_*	_*	_*
Panjang jalan dan jembatan yang ditingkatkan terhadap target	Km	37,47	16,083	_*	_*	_*
Capaian jalan dan jembatan yang ditingkatkan terhadap target (200 Km)	%	18,74	8,04	_*	_*	_*
Panjang jalan dan jembatan yang dipelihara secara rutin	Km	80,42	45,9	_*	_*	_*
Capaian panjang jalan dan jembatan yang dipelihara secara rutin (target 300 Km selama 5 thn, 60 Km per tahun)	%	26,81	15,3	_*	_*	_*
Panjang jalan yang dibangun	Km	_*	_*	3,309	4,389	4,389
Persentase panjang jalan yang dibangun	%	_*	_*	165,45	219,45	219,45
Panjang jalan yang ditingkatkan	Km	_*	_*	14,026	27,353	27,353
Persentase panjang jalan yang ditingkatkan	%	_*	_*	70,13	136,77	136,77



Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Panjang jalan yang direhabilitasi	Km			5,575	25,057	25,057
Persentase panjang jalan yang direhabilitasi	%	-*	-*	27,88	125,29	125,29
Jumlah jembatan yang ditangani	Unit	-*	-*	6	9	9
Persentase jembatan yang ditangani	%	-*	-*	8,22	12,33	12,33
Persentase jalan dalam kondisi baik	%	-*	-*	-*	-*	67,69
Persentase panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhabilitasi dan direkonstruksi	%	-*	-*	-*	-*	89,23
Persentase Drainase Jalan dalam kondisi baik	%	-*	-*	-*	-*	17,43

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2024

Catatan :Capaian indikator dihitung terhadap panjang jalan kota berdasarkan Keputusan Walikota Tasikmalaya nomor 541.03/Kep.136-DPUKR/2017 tentang Penetapan Status Ruas Jalan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai Jalan Kota sepanjang 450,742 km.

Tingkat kemantapan jalan Kota Tasikmalaya yang diwakili oleh indikator Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik dari tahun 2019 mengalami penurunan di tahun 2020 kemudian meningkat kembali dari tahun ke tahun sampai dengan 2023. Turunnya jalan kondisi baik dan sedang menjadi rusak ringan dan rusak berat dikarenakan adanya pengurangan alokasi anggaran untuk pemeliharaan, rehabilitasi dan rekontruksi jalan untuk penanganan Covid-19.

B. Sumber Daya air

Terdapat 35 Daerah Irigasi yang berada di Kota Tasikmalaya dengan luas 5.321 Hektar terdiri dari 29 Daerah Irigasi merupakan kewenangan Kota (luas 1.749 Hektar, total panjang 332,53 Km), 5 Daerah Irigasi merupakan kewenangan Provinsi (luas 1.445 Hektar, total panjang 81,35 Km) dan 1 Daerah Irigasi Kewenangan Pusat (luas 2.128 Hektar, total panjang 196 Km). Kinerja infrastruktur irigasi selama kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2023, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.39.
Kinerja Jaringan Irigasi dan Pengairan Lainnya Tahun 2021-2023

Indikator	Satuan	Tahun					
		2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase luas sawah terairi	%	75	75	80	80	-	-
Persentase sumber daya air dalam kondisi baik	%	34,95	45,67	35,53	37,50	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2024.

Indikator Kinerja Infrastruktur Irigasi dan pengairan lainnya dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya 2023 – 2026 tidak dikategorikan



ke dalam kinerja infrastruktur melainkan dalam indikator pertanian, sehingga khusus untuk indikator irigasi dapat dilihat dalam urusan pertanian.

C. Tata Ruang

Indikator Kinerja Tata Ruang mengalami perubahan yang semula terdapat 4 (empat) indikator menjadi 1 (satu) indikator yaitu persentase kesesuaian pemanfaatan ruang. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.40.
Capaian Kinerja Tata Ruang Tahun 2021-2023

Indikator	Satuan	Tahun					
		2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Capaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTR	%	87	88	90	97,02	-	-
Capaian pengawasan ijin pemanfaatan ruang	%	97	97,15	98	98	-	-
Prosentase tersedianya dokumen rencana tata ruang wilayah daerah	%	50	50	100	100	-	-
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	-	-	-	-	98	98,2

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2024

D. Tata Bangunan

Indikator kinerja tata bangunan mengalami perubahan yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya, yang semula terdapat 4 (empat) indikator lama yang dipertahankan hanya indikator persentase penyedia jasa yang mendapatkan pembinaan, selebihnya menggunakan indikator yang termuat dalam dokumen RPD. Target dan realisasi tiap indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.41.
Capaian Indikator Kinerja Tata Bangunan Tahun 2021 - 2023

Indikator	Satuan	Tahun					
		2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase bangunan gedung yang ditangani	%	13,16	15,79	26,32	32,45	-	-
Persentase penyedia jasa yang mendapatkan pembinaan	%	42,37	42,37	100	42,37	42,37	54,66
Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Teknis	%	-	-	-	-	32,86	35,32
Prosentase bangunan gedung kewenangan pemda yang ditangani	%	-	-	-	-	32,46	32,46
Persentase Kawasan/ Lingkungan Yang di Tingkatkan Sesuai dengan RTBL nya	%	-	-	-	-	16,67	16,67

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2024.

Kondisi bangunan gedung kantor pemerintahan di Kota Tasikmalaya saat ini masih ada yang belum memadai dan rusak, terkait hal tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.42.
Kondisi Bangunan Gedung Kantor Pemerintah Tahun 2023

Kondisi Bangunan	OPD	Kecamatan	Kelurahan
Baik / Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
Baik / Memadai	5	0	3
Baik / Kurang Memadai / Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
Baik / Memadai /Konstruksi Dalam Pengerjaan	2	0	0
R. Ringan / Memadai	17	5	52
R. Ringan / Kurang Memadai	2	3	0
R. Sedang / Memadai	3	0	11
R. Sedang / Kurang Memadai	6	2	3
Belum memiliki Gedung Definitif	0	0	0
R. Berat /Kurang Memadai	1	0	0
R. Ringan / Memadai / Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
Jumlah	36	10	69

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2024

E. Permukiman

Infrastruktur permukiman yang menjadi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup infrastruktur jalan, drainase lingkungan, penyediaan sarana prasarana air minum dan penyediaan sarana prasarana air limbah.

Indikator yang digunakan dalam infrastruktur permukiman berdasarkan RPD hanya memiliki satu indikator yaitu Persentase sistem jaringan sarana prasarana permukiman dalam kondisi baik, indikator ini mengalami perbedaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk melihat perbedaan indikator tersebut dapat dilihat secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43.
Indikator Infrastruktur Permukiman
Tahun 2021 – 2023

Indikator	Satuan	Tahun					
		2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jalan Lingkungan yang ditangani	Km	524	549	630	795	-	-
Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	%	27,01	28,26	32,42	40,95	-	-
Drainase Lingkungan yang ditangani	m	66.725	50.990	89.402	77.150	-	-
Drainase Lingkungan dalam kondisi baik	%	71,44	54,59	95,72	82,60	-	-
Realisasi KK berakses SPAL	KK	110.142	110.423	111.134	111.348	-	-
Capaian KK berakses SPAL	%	61,04	61,20	61,59	61,71	61,62	62,8
Realisasi KK berakses Air Minum	KK	100.723	101.454	101.174	102.512	-	-
Capaian KK berakses Air Minum	%	55,82	56,23	56,07	56,81	56,67	57,57
Persentase sistem jaringan sarana prasarana permukiman dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	25	27,13

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2024.



Seluruh indikator infrastruktur permukiman yang ditargetkan pada tahun 2023 melebihi target yang telah ditentukan seperti capaian KK berakses SPAL, KK berakses air minum dan sistem jaringan sarana prasarana permukiman dalam kondisi baik.

2.1.3.1.4. **Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman secara umum mengalami peningkatan setiap tahunnya. Capaian indikator urusan perumahan dan kawasan permukiman tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.44.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 – 2023

Indikator	Satuan	Tahun					
		2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	47,59	54,15	51,59	60,38	-	-
Persentase penanganan kawasan kumuh	%	99,23	99,23	100	100	2,42	12,69
Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani	Unit	1000	1320	1000	780	-	-
Persentase PSU yang diverifikasi	%	30,11	28,62	37,55	38,28	-	-
Persentase PSU yang diserahterimakan	%	17,84	18,58	21,56	24,16	25	44,44
Persentase rumah korban bencana yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100
Persentase fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	20	100	20
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	-	-	-	-	-	9,24	12,02
Persentase Pengelolaan PSU Perumahan	-	-	-	-	-	25	50
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	-	-	-	20	23,6
Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	-	-	-	8,56	16,27
Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	-	-	-	1,36	7,76

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya, 2024.

Dari tabel diatas, seluruh indikator kinerja telah memenuhi dan melampaui target dalam RPD kecuali untuk indikator Persentase fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota, hal ini dikarenakan penanganan relokasi tersebut harus berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku seperti untuk relokasi bencana atau program pemerintah, sedangkan untuk tahun 2023 tidak ada rumah yang terkena dampak bencana atau program pemerintah.



Persentase penanganan kawasan kumuh di tahun 2022 sudah 100% terhadap target yang telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 050.13/Kep.374.Bappeda/2014 tentang Penetapan Sasaran Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Kumuh di Kota Tasikmalaya pada Tahun 2014 terdiri dari 18 (delapan belas) lokasi dengan luas total 276,17 hektar. Berdasarkan hasil identifikasi di tahun 2021, terdapat kawasan kumuh seluas 168,49 Hektar yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Walikota Nomor 648/Kep.733.1-Disperwaskim/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Tasikmalaya. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.45.
Kawasan Kumuh di Kota Tasikmalaya Berdasarkan SK Walikota
Tahun 2021

No.	Nama Lokasi	Kelurahan	Kecamatan	Luas (Ha)
1	ARGASARI	Argasari	Cihideung	3,78
2	CIPALAYUNG	Cipedes-	Cipedes	15,40
3	CIPANYIR	Cipedes-	Cipedes-Indihiang	16,31
4	INDIHIANG	Indihiang	Indihiang	1,59
5	PARAKANYASAG	Parakanyasag	Indihiang	1,31
6	SUKAMAJU	Sukamaju Kaler	Indihiang	2,14
7	TUGURAJA	Tuguraja	Cihideung	3,90
8	CIKALANG	Cikalang	Tawang	2,80
9	PURBARATU	Purbaratu	Purbaratu	9,30
10	SUKAJAYA	Sukajaya	Purbaratu	14,00
11	SUKAMENAK	Sukamenak	Purbaratu	9,23
12	MUGARSARI	Mugarsari	Tamansari	4,73
13	SETIAWARGI	Setiawargi	Tamansari	2,25
14	SUMERANG	Sumelap-Ciherang	Tamansari-	17,00
15	CIAKAR	Ciakar	Cibeureum	11,60
16	KOTABARU	Kotabaru	Cibeureum	6,05
17	SETIAJAYA	Setiajaya	Cibeureum	9,77
18	MARGABAKTI	Margabakti	Cibeureum	4,36
19	BUNGURSARI	Bungursari	Bungursari	3,22
20	SUKAJAYA	Sukajaya	Bungursari	1,22
21	CIBEUTI	Cibeuti	Kawalu	5,00
22	URUG	Urug	Kawalu	11,50
23	LEUWILIANG	Leuwiliang	Kawalu	2,80
24	TANJUNG	Tanjung	Kawalu	3,47
25	CIGANTANG	Cigantang	Mangkubumi	0,45
26	KARIKIL	Karikil	Mangkubumi	5,31
JUMLAH				168,49

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya, 2024.

2.1.3.1.5. Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Linmas

Urusan keamanan, ketertiban umum dan Linmas dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Data capaian indikator urusan keamanan, ketertiban umum dan linmas dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.46.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan
Keamanan, Ketertiban Umum dan Linmas
Tahun 2021 – 2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase capaian pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	100	100	-	-
2	Persentase capaian pendidikan politik bagi masyarakat	%	100	100	100	100	-	-
3	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (per 10.000)	point	1,16	2,27	1,16	1,17	-	-
4	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk (per 10.000)	point	56,3	53,95	56,5	51,49	-	-
5	Persentase Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan (%)	%	30	26,30	31	1.259,4	-	-
6	Persentase penanganan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	90	100	90	100	-	-
7	Cakupan patroli petugas Satpol PP (%)	%	80	100	85	100	-	-
8	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota (%)	%	96	100	100	100	-	-
9	Persentase Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Wilayah Kota (%)	%	0,00563	0,00539	0,00566	0,514	-	-
10	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota (%)	%	95	96,1	95	96,1	-	-
11	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	%	85,5	85,71	85,5	85,71	-	-
12	Persentase penegakan perda dan perkada	%	85,5	86,13	90	100	-	-
13	Persentase pembinaan dalam penegakan peraturan daerah	%	90	100	100	100	-	-
14	Persentase rekomendasi penindakan yang ditangani	%	95	100	95	100	-	-
15	Angka Kriminalitas	Point	3	5,88	2,5	2,9	-	-
16	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	%	96	100	100	100	-	-
17	Persentase penanganan	%	95	100	95	100	-	-



No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	perlindungan masyarakat							
18	Persentase pelayanan bencana kebakaran kota yang dilayani	%	95	100	100	100	-	-
19	Cakupan patroli petugas Satpol PP	%	80 -1,5	-8,76	2,1	8,76	-	-
20	Persentase ketersediaan anggota linmas per kelurahan sesuai standar (Permendagri)	%	100	100	100	100	-	-
21	Capaian pelatihan anggota linmas	%	48	71,20	58	49,09	-	-
22	Capaian pos siskamling aktif per RW	%	85	94,85	85	94,85	-	-
23	Capaian penanganan gangguan masyarakat tingkat kelurahan	%	95	100	100	100	-	-
24	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi kualifikasi	%	30	76,2	30	76,2	-	-
25	Persentase aktifitas pencegahan rawan kebakaran yang dilakukan	%	50	100	50	60	-	-
26	Persentase pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang tangani	%	100	100	100	100	-	-
27	Presentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang di Selesaikan	%	-	-	-	-	100	100
28	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakan	%	-	-	-	-	93	100
29	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota	%	-	-	-	-	100	100
30	Persentase Pengawasan dan penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	-	-	-	-	93	100
31	Presentase PPNS yang di Bina	%	-	-	-	-	100	100
32	Indeks Katahanan Daerah	Poin	-	-	-	-	0,34	0,43
33	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran	%	-	-	-	-	86	100
34	Persentase Masyarakat yang Memperoleh Informasi Layanan Bencana	%	-	-	-	-	100	100
35	Persentase Masyarakat yang	%	-	-	-	-	100	100



No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana							
36	Persentase Penanganan Bencana dan warga negara korban bencana	%	-	-	-	-	100	100
37	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah Wilayah Managemen Kebakaran (WMK)	%	-	-	-	-	86	80,27
38	Persentase penyelesaian potensi konflik sosial	%	-	-	-	-	100	100
39	Persentase ormas yang aktif	%	-	-	-	-	65	58
40	Persentase capaian pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	-	-	-	-	100	100
41	Persentase capaian pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	%	-	-	-	-	100	100
42	Persentase penanganan konflik sosial	%	-	-	-	-	64	100
43	Persentase parpol yang dibina	%	-	-	-	-	100	100
44	Persentase ormas yang dibina	%	-	-	-	-	71	58

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran,BPBD, KesbangPol , 2024.

Pada umumnya indikator keamanan, ketertiban umum dan linmas dapat dicapai 100%. Untuk pelaksanaan penanganan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah telah dilaksanakan dengan penegakan sanksi. Begitu juga dengan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan konflik sosial, kegiatan sudah dilaksanakan secara optimal sehingga capaian indikatornya 100%.

Pencapaian kinerja persentase ormas yang aktif dengan target 65% hanya terealisasi 58%. Adapun penyebab internal yang dimaksud antara lain masih adanya Ormas yang tidak melaporkan perkembangan organisasinya, baik bila melakukan pergantian kepengurusan maupun lokasi Sekretariat. Bidang Poldagri pun memiliki keterbatasan SDM untuk melakukan kegiatan verifikasi terhadap Ormas yang jumlahnya tiap tahun bertambah.

Persentase ormas yang dibina dengan target 71% hanya terealisasi 58%. Hal ini disebabkan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2018, selama kepengurusan Ormas dan domisilinya tetap maka tidak ada masa kadaluarsa dari surat keberadaan Ormas, sehingga berpengaruh terhadap jumlah Ormas yang kian tahun tambah banyak, bila dibandingkan dengan kemampuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan terhadap Ormas/Orpol/LSM. Pembinaan yang dilakukan terhadap ormas di Tahun 2023 ini diharapkan dapat berperan



dalam pendidikan politik pada masyarakat sehingga partisipasi masyarakat Kota Tasikmalaya dalam Pemilu tahun 2024 meningkat dan pemilu berlangsung damai.

Upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan keaktifan Ormas pada kegiatan pembinaan Ormas diantaranya:

1. Telah dihimbau pada Ormas se Kota Tasikmalaya untuk menjaga keaktifan dalam berorganisasi, memberitahukan informasi apabila terjadi perubahan dalam domisili dan perubahan kepengurusan.
2. Melaksanakan pembinaan terhadap ormas secara berkesinambungan.
3. Melakukan verifikasi lapangan pada ormas yang baru.

Tabel 2.47.
Kejadian Bencana Tahun 2021-2023

No.	Bencana	Kejadian		
		2021	2022	2023
1.	Angin Putting Beliung	3	40	1
2.	Pohom tumbang	43	102	47
3.	Rumah Roboh	94	245	119
4.	Gempa bumi	0	20	3
5.	Longsor	37	97	36
6.	Banjir	6	14	24
7.	Tersambar petir	4	11	7
8.	Gerakan Tanah	3	2	4
9.	Kekeringan	-	-	1
10.	Pandemi Covid-19	1	-	-
11.	Kebakaran		47	
	Jumlah	214	578	242

Sumber :BPBD Kota Tasikmalaya, 2024.

2.1.3.1.6 Urusan Sosial

Capaian layanan urusan sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Sosial Tahun 2021 – 2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	%	77	79,9	77	83	-	-
2	Capaian Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100	100	100	100	-	-
3	Persentase Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	%	16	16	16	34	-	-
4	Capaian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Memiliki Komunitas Binaan	%	100	100	100	68	-	-



No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
5	Capaian Pemeliharaan Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan	%	100	100	100	0	-	-
6	Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap PPKS	%	-	-	-	-	100	100
7	Persentase Capaian Jaminan Sosial terhadap PPKS	%	-	-	-	-	78	100
8	Persentase Capaian Penanganan Perlindungan Sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial	%	-	-	-	-	100	100
9	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan PPKS	%	-	-	-	-	25	100
10	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	-	-	-	-	100	100
11	persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	100	100
12	Persentase penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	-	-	-	-	100	100
13	Persentase Penanganan Bencana Alam dan Sosial	%	-	-	-	-	100	100
14	Persentase PSKS Aktif	%	-	-	-	-	100	100
15	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	-	-	-	-	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, 2024

2.1.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1. Tenaga Kerja

Menurut data Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) BPS Tahun 2023, jumlah penduduk usia kerja di Kota Tasikmalaya sebanyak 565.093 orang, dari jumlah tersebut yang termasuk dalam Angkatan Kerja sebanyak 369.778 orang atau 65,44 persen, sedangkan yang Bukan Angkatan Kerja adalah sebanyak 195.315 orang. Data lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.49.

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kategori Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Tasikmalaya
Tahun 2021-2023

Kategori	Tahun		
	2021	2022	2023
Angkatan Kerja	342.585	347.063	369.778
1. Bekerja	316.349	324.099	345.544
2. Pengangguran Terbuka	26.236	22.964	24.234
Bukan Angkatan Kerja	178.418	178.909	195.315
Jumlah	521.003	525.972	565.093
Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	92,34	93,38	93,45



Kategori	Tahun		
	2021	2022	2023
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja	65,75	65,98	65,44
Tingkat Pengangguran Terbuka	7,66	6,62	6,55

Sumber : Data Sakernas BPS Tahun 2023

Merujuk pada Data SAKERNAS Tahun 2023 di atas, total Angkatan Kerja di Kota Tasikmalaya adalah sebanyak 369.778 orang. Dari total angkatan kerja tersebut, sebanyak 345.544 orang atau 93,45 persen merupakan penduduk yang bekerja, sedangkan 24.234 orang merupakan pengangguran, yang artinya bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Tasikmalaya tahun 2023 sebesar 6,55 persen.

Tabel 2.50.

Jumlah dan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja dan Pengangguran Terbuka di Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2023

Kategori	2021		2022		2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Bekerja	316. 349	92,34	324.099	93,38	345.544	93,45
Pengangguran	26.236	7,66	22.964	6,62	24.234	6,55
Angkatan Kerja	342 585	100	347.063	100	369.778	100

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2024

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, antara lain: Pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan); Manufaktur; dan Jasa.

Untuk meningkatkan kapasitas calon tenaga kerja, Pemerintah Kota Tasikmalaya memberikan pelatihan baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Latihan (LPK) yang berjumlah 58 LPK. Berikut capaian pelayanan urusan tenaga kerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.51.

Capaian Indikator Pelayanan Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2021 - 2023

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,72	7,66	7,02	6,62	6,5	6,55
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	66,50	65,75	66,7	65,98	66,9	65,44
3	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	%	100	23	62	83,19	-	-
4	Jumlah Wirausaha Baru	Orang	150	163	150	150	-	-
5	Persentase perusahaan yang memilik lembaga ketenagakerjaan	%	20	15,58	20	16,17	-	-
6	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	100	100	83,19	-	-
7	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	43,32	24,96	44,3	27	-	-
8	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar perserta BPJS ketenagakerjaan)	%	-	-	-	-	4,23	80,29



No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
9	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	-	-	-	-	4,98	13,25
10	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja daerah	%	-	-	-	-	4	100
11	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	-	-	-	-	27	54,17

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya, 2024.

2.1.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambaran umum pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan anak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52.

Capaian Indikator Pelayanan Urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 - 2023

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak	%	100	100	100	100	100	100
2	Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)	SKOR	800	756	-	382,1	750	430

Sumber : DPPKBP3A Kota Tasikmalaya, 2024

2.1.3.2.3. Pangan

Tugas pemerintah daerah di bidang pangan adalah mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan melalui meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan, meningkatkan keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, penanganan kerawanan pangan, menjaga stabilitas harga pangan pokok strategis, dan penguatan kelembagaan ketahanan pangan. Penganekaragaman konsumsi pangan penduduk diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Implementasi indikator kuantitatif tersebut disebut skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama. PPH Kota Tasikmalaya tahun 2023 mencapai 92,4 telah mencapai nilai optimal yaitu nilai skor PPH ideal minimal 90. Kajian ini menyimpulkan bahwa konsumsi pangan masyarakat Kota Tasikmalaya sudah cukup berkualitas. Berikut capaian pelayanan urusan pangan Kota Tasikmalaya.



Tabel 2.53.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Pangan Tahun 2021 - 2023

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun					
			2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Skor Pola Pangan Harapan/PPH Konsumsi (point)	poin	91	91,3	91	91,3	91,4	92,4
2	Skor Pola Pangan Harapan/PPH Ketersediaan (point)	poin	84	91,5	85	90,8	-	-
3	Persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG)	%	71	124,9	100	122,9	-	-
4	Jumlah Infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang dibangun	unit	3	0	6	-	1	-
5	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	%	88	110,6	100	111,7	110,7	103,9
6	Persentase kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani	%	50	66,67	51	33,33	15	75
7	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	79	100	80	100	-	-
8	Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	%	-	-	-	-	125	116,8
9	Persentase pengawasan keamanan pangan	%	-	-	-	-	100	100

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2024

2.1.3.2.4. Pertanian

Capaian layanan urusan pertanian di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.54.
Pelayanan Umum Urusan Pertanian Tahun 2021 - 2023

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun					
			2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase pengelolaan penatagunaan tanah	%	60	50	100	100	-	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2024.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026, indikator kinerja urusan pertanian tidak dimuat secara terpisah dikarenakan urusan pertanian sudah masuk ke dalam urusan tata ruang yang memiliki irisan kinerja yang sama, sehingga dapat dilihat kinerja urusan pertanian di tahun 2023 dalam urusan penataan ruang.

2.1.3.2.5. Lingkungan Hidup

Selama kurun waktu 2021 sampai dengan 2023, urusan Lingkungan Hidup yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup, memperlihatkan perkembangan sebagai berikut:



Tabel 2.55.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2021 – 2023

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun					
			2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Penambahan ruang terbuka hijau (Ha)	Ha	-	-	0,65	0,7318	0,09	0,1876
2	Persentase Timbulan Sampah yang Ditangani	%	-	-	-	-	72	65,21
3	Capaian Indeks Kualitas Air dan Udara	Point	IKA = 53,54 (Sedang) IKU = 79,00 (Baik)	IKA = 65,75 IKU = 83,45	IKA = 53,6 IKU = 79,60	IKA = 35,33 IKU = 82,26	IKA = 53,75 IKU = 80,50	IKA = 38,44 (kurang) IKU = 83,72 (Baik)
4	Persentase Pengelolaan Sampah	%	77,86	73,86	83,45	81,77	99	82,17
5	Capaian Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Disusun	%	100	0	100	100	100	128,57
6	Capaian Volume Sampah yang terangkut ke TPA	%	-	-	-	-	72	65,21
7	Capaian Pengurangan Sampah	%	-	-	-	-	27	16,96
8	Capaian tersedianya Dokumen Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati	Dok	50	50	100	100	0	0
9	Capaian Luas RTH yang dikelola	Ha	100	100	100	100	100	100
10	Capaian Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan Penanggung jawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	%	100	150	100	100	100	330

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2024.

Pada tabel di atas terlihat bahwa Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2023 ada peningkatan dari tahun 2022, namun pada dua tahun tersebut nilai capaiannya masih di bawah target yang ditentukan. Hal ini disebabkan karena rumus perhitungan IKA terbaru berbeda dengan pada saat penentuan target, yaitu tanpa menyertakan faktor koreksi, sehingga menimbulkan penurunan nilai IKA di tahun 2022 dan 2023. Selain itu juga ada beberapa sungai yang status mutu airnya cemar berat, di antaranya Sungai Cilamajang Hulu, Cilamajang Tengah, Ciloseh Tengah, Cikalang Tengah, Sungai Cimulu Hilir, dan beberapa sungai lainnya.



Untuk capaian pengelolaan sampah, dari tahun 2021 hingga tahun 2023, juga belum mencapai target yang ditetapkan. Keadaan ini terjadi karena tingkat pengurangan sampah dari sumbernya belum terlaksana secara maksimal.

Untuk capaian pengelolaan sampah, dari tahun 2021 hingga tahun 2023, juga belum mencapai target yang ditetapkan. Keadaan ini terjadi karena tingkat pengurangan sampah dari sumbernya belum terlaksana secara maksimal. Ruang lingkup urusan Lingkungan Hidup dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan RTH

Ada beberapa RTH yang berada di bawah pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup, yaitu seperti diperlihatkan pada tabel berikut.

Tabel 2.56.
Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2023

No	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas (Ha)	Persentase terhadap luas kota (%)
1	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	12,274994	0,06565
2	Taman	4,512916	0,02413
3	Daerah Resapan Air (Bukit)	10,9686	0,05865
	Total	27,75651	0,14843

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2024
Catatan : Luas Kota = 18.698,76 Ha

Dalam rangka memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau di Kota Tasikmalaya, sejak tahun 2008 Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan pembebasan bukit, dengan rincian penambahan luas seperti yang ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.57.
Pembebasan Lahan untuk RTH

No.	Nama Bukit	Lokasi		Luas (m2)	Tahun Pembebasan	Ket.
		Kelurahan	Kecamatan			
1	Bukit Kokosan	Cibunigeulis	Bungursari	35.796	2008, 2009, 2011, 2015	Setda, KPLH
2	Bukit Kiara	Bungursari	Bungursari	10.162	2011	KPLH
3	Bukit Tengah	Bungursari	Bungursari	4.555	2013	KPLH
4	Bukit Pondok	Bungursari	Bungursari	5.410	2013, 2014	KPLH
5	Bukit Hanjuang	Cibunigeulis	Bungursari	6.707	2013	KPLH
6	Bukit Bondan	Sukajaya	Bungursari	1.027	2014	KLH
7	Bukit Jambore	Sukalaksana	Bungursari	3.965	2014	KLH
8	Bukit Bubut	Cipawitra	Mangkubumi	2.200	2017	DLH
9	Bukit Putri	Cibunigeulis	Bungursari	17.745	2018, 2022	DLH
10	Bukit Cilamajang	Cipawitra	Mangkubumi	20.453	2017, 2018, 2019	DLH
11	Bukit Situ Butak	Mangkubumi	Mangkubumi	1.666	2022, 2023	DLH
Jumlah				109.686		

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2024.

Selain bukit, yang termasuk dalam ruang terbuka hijau adalah Taman Pemakaman Umum (TPU). Berdasarkan hasil survey, luas TPU di Kota Tasikmalaya yaitu 101,94 Ha, yang terdiri dari TPU milik masyarakat 89,67 Ha dan TPU milik pemerintah 12,27 Ha (Tabel 2.58.). Sedangkan jumlah dan lokasi taman dapat dilihat pada Tabel 2.59.



Tabel 2.58.
Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tahun 2023

No.	Nama TPU	Luas (Ha)
1	Aisha Rashida	7,151238
2	Cieunteung	1,556754
3	Cinehel	3,567002
	Total	12,274994

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2024

Tabel 2.59.
Taman Kota Tasikmalaya Tahun 2023

No	Nama	Luas (Ha)
1	Taman Dadaha	0,7
2	Taman Kota	0,5524
3	Taman Alun-Alun	1,2789
4	Taman Warga Cigeureung	0,1596
5	Batas Kota Indihiang	0,061
6	Batas Kota Karangresik	0,0552
7	Median Jalan Wasita Kusumah	0,0372
8	Median Jalan HZ Mustofa	0,482
9	Median Jalan Letnan Harun	0,065
10	Median Brigjen Sutoko	0,132
11	Median Jalan Aji Witono	0,13
12	Median Jalan EZ Mutaqin	0,16
13	Tugu HZ Mustofa	0,048531
14	Tugu Asmaul Husna	0,003997
15	Tugu Canting Batik/Pulau Jalan Wasita Kusumah	0,007992
16	Tugu Simpang Lima	0,004373
17	Pulau Jalan Cibogor	0,013631
18	Pulau Jalan Dewi Sartika	0,0006
19	Pulau Jalan Tanuwijaya-Sutsen	0,009486
20	Pulau Jalan Tanuwijaya-PM	0,007839
21	Pulau Jalan Tarumanagara	0,001726
22	Pulau Jalan HZ Mustofa (Adipura)	0,0143
23	Pulau Jalan Tentara Pelajar (Dadaha)	0,004891
24	Pulau Jalan Cilolohan	0,00262
25	Pulau Jalan Ir. H. Juanda-RE Martadinata (Jati)	0,009398
26	Pulau Jalan Tamansari (Kelom Geulis)	0,006178
27	Pulau Jalan Rancabango	0,084054
28	Huta Kota (Dadaha)	0,48
	Total	4,512916

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2024.

2. Pengendalian dan Pengawasan Kualitas Lingkungan

Dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas air dan udara, penanganan pengaduan, pemantauan ijin lingkungan, dan pelaksanaan kampung iklim. Berikut beberapa data dan penjelasan mengenai pengendalian dan pengawasan lingkungan.

Pemantauan kualitas air dan udara adalah salah satu kegiatan pengendalian lingkungan, dengan pengambilan contoh air atau udara secara berkala ataupun secara terus menerus untuk keperluan menentukan tingkat pencemaran/radiasi. Aktivitas pemantauan ini adalah salah satu tugas



pengawasan lingkungan dalam mendeteksi dan mengevaluasi apabila terjadi perubahan kualitas suatu lingkungan.

Pemantauan kualitas air dan udara ini berfungsi untuk memberikan informasi faktual tentang kondisi (status) kualitas air masa sekarang, kecenderungan masa lalu dan prediksi perubahan lingkungan masa depan. Informasi dasar yang dihasilkan dari kegiatan pemantauan dapat dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan lingkungan, rencana tata ruang, ijin lokasi untuk usaha atau kegiatan, serta penentuan baku mutu air dan air limbah. Tabel 2.60. dan Tabel 2.61. berikut ini memperlihatkan Indeks Kualitas Air dan Udara berdasarkan lokasi sampel di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.60.

Perhitungan Indeks Kualitas Air Berdasarkan Lokasi Sampel Tahun 2023

No.	Lokasi Sampel	Periode Pengukuran	Nilai IPj	Status Mutu Air
1	Sungai Ciloseh Hulu	Periode I	3.167	Cemar Ringan
2	Sungai Ciloseh Tengah	Periode I	2.528	Cemar Ringan
3	Sungai Ciloseh Hilir	Periode I	2.673	Cemar Ringan
4	Sungai Cikalang Hulu	Periode I	2.898	Cemar Ringan
5	Sungai Cikalang Tengah	Periode I	6.111	Cemar Sedang
6	Sungai Cikalang Hilir	Periode I	3.393	Cemar Ringan
7	Sungai Cilamajang Hulu	Periode I	10.308	Cemar Berat
8	Sungai Cilamajang Tengah	Periode I	4.972	Cemar Ringan
9	Sungai Cilamajang Hilir	Periode I	4.295	Cemar Ringan
10	Sungai Cibangbay Hulu	Periode I	0.698	Memenuhi
11	Sungai Cibangbay Tengah	Periode I	6.696	Cemar Sedang
12	Sungai Cibangbay Hilir	Periode I	3.065	Cemar Ringan
13	Sungai Cimulu Hulu	Periode I	2.397	Cemar Ringan
14	Sungai Cimulu Tengah	Periode I	7.797	Cemar Sedang
15	Sungai Cimulu Hilir	Periode I	6.085	Cemar Sedang
16	Sungai Ciloseh Hulu	Periode II	1.896	Cemar Ringan
17	Sungai Ciloseh Tengah	Periode II	4.278	Cemar Ringan
18	Sungai Ciloseh Hilir	Periode II	2.071	Cemar Ringan
19	Sungai Cikalang Hulu	Periode II	2.927	Cemar Ringan
20	Sungai Cikalang Tengah	Periode II	10.253	Cemar Berat
21	Sungai Cikalang Hilir	Periode II	4.269	Cemar Ringan
22	Sungai Cilamajang Hulu	Periode II	5.810	Cemar Sedang
23	Sungai Cilamajang Tengah	Periode II	12.862	Cemar Berat
24	Sungai Cilamajang Hilir	Periode II	5.016	Cemar Sedang
25	Sungai Cibangbay Hulu	Periode II	1.909	Cemar Ringan
26	Sungai Cibangbay Tengah	Periode II	5.009	Cemar Sedang
27	Sungai Cibangbay Hilir	Periode II	5.748	Cemar Sedang
28	Sungai Cimulu Hulu	Periode II	2.270	Cemar Ringan
29	Sungai Cimulu Tengah	Periode II	2.840	Cemar Ringan
30	Sungai Cimulu Hilir	Periode II	7.796	Cemar Sedang
31	Sungai Ciloseh Hulu	Periode III	4.595	Cemar Ringan
32	Sungai Ciloseh Tengah	Periode III	16.387	Cemar Berat
33	Sungai Ciloseh Hilir	Periode III	4.189	Cemar Ringan
34	Sungai Cikalang Hulu	Periode III	7.747	Cemar Sedang
35	Sungai Cikalang Tengah	Periode III	20.048	Cemar Berat
36	Sungai Cikalang Hilir	Periode III	0.728	Memenuhi



No.	Lokasi Sampel	Periode Pengukuran	Nilai IPj	Status Mutu Air
37	Sungai Cilamajang Hulu	Periode III	15.710	Cemar Berat
38	Sungai Cilamajang Tengah	Periode III	5.630	Cemar Sedang
39	Sungai Cilamajang Hilir	Periode III	2.483	Cemar Ringan
40	Sungai Cibangbay Hulu	Periode III	1.549	Cemar Ringan
41	Sungai Cibangbay Tengah	Periode III	1.493	Cemar Berat
42	Sungai Cibangbay Hilir	Periode III	8.568	Cemar Sedang
43	Sungai Cimulu Hulu	Periode III	0.732	Memenuhi
44	Sungai Cimulu Tengah	Periode III	8.521	Cemar Sedang
45	Sungai Cimulu Hilir	Periode III	10.386	Cemar Berat
Nilai IKA			38,44 (Kurang)	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2024

Tabel 2.61.
Indeks Kualitas Udara Berdasarkan Lokasi Sampel Tahun 2023

Peruntukan	Tahap I Kadar SO2 (µG/M3)	Tahap I Kadar NO2 (µG/M3)	Tahap II Kadar SO2 (µG/M3)	Tahap II Kadar NO2 (µG/M3)	IEU SO2	IEU NO2	IKU	KET
Perumahan	4.01	4.7	5.43	4	0,282	0,504	83,72	Baik
Perumahan	8.66	5.22	8.32	11.14				
Industri	9.69	19.9	8.3	17.8				
Industri	11.72	10.58	11.42	15.41				
Transportasi	10.4	17.9	7.78	12.3				
Transportasi	14.45	11.2	19.79	19.37				
Komersial	3.09	11.4	3.26	13.4				
Komersial	7.31	11.14	15.19	7.58				

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2024.

Indeks kualitas udara pada tabel di atas adalah berdasarkan lokasi sampel perumahan/permukiman, industri, transportasi, dan kawasan komersil. Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) atau Air Quality Indeks (AQI) Kota Tasikmalaya secara umum berada pada nilai 83,72 yang berarti memiliki kualitas baik.

Pada Tabel 2.62. berikut ini diperlihatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Tasikmalaya selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.62.
Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)
Kota Tasikmalaya Tahun 2021 - 2023

No.	Indikator Kinerja	Tahun					
		2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Kualitas Air	53,54 (Sedang)	65,75	53,60 (Sedang)	35,33	53,75 (Sedang)	38,44 (Kurang)
2	Indeks Kualitas Udara	79,00 (Baik)	83,45	79,60 (Baik)	82,26	80,50 (Baik)	83,72 (Baik)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2024.



Dari tabel di atas diketahui bahwa selama tiga tahun terakhir, IKU di Kota Tasikmalaya berada pada kategori baik (berdasarkan rentang nilai AQI), hal ini berarti kualitas udara di Kota Tasikmalaya masih cukup baik. Sedangkan untuk kualitas air, Kota Tasikmalaya berada pada kategori rendah, yaitu 38,44 pada tahun 2023, sedangkan target yang ditetapkan adalah 53,75, dan target nasional 55. Keadaan ini menunjukkan bahwa kualitas air di Kota Tasikmalaya sudah menurun, sehingga perlu bersungguh-sungguh dalam pengelolaan air buangan (limbah), baik dari rumah tangga maupun dari industri.

Penanganan Pengaduan

Ada beberapa pengaduan permasalahan lingkungan dari masyarakat yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup. Tabel 2.63. berikut ini menunjukkan beberapa pengaduan yang berhasil ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 2.63.
Penanganan Pengaduan Tahun 2021 – 2023

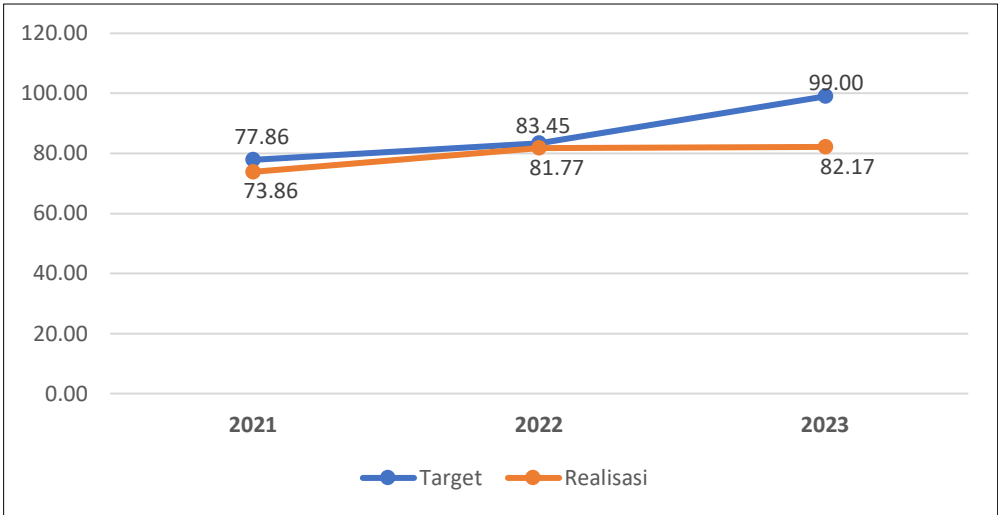
Penanganan Pengaduan	Tahun			Jumlah
	2021	2022	2023	
	6	6	10	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2024.

3. Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan persampahan di Kota Tasikmalaya dilaksanakan melalui dua langkah, yaitu penanganan dan pengurangan sampah. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, maka setiap tahunnya jumlah sampah akan semakin meningkat pula. Timbulan sampah di Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 adalah 117.955,24 ton/tahun atau 323,17 ton/hari, sedangkan capaian pengelolaan sampah yaitu sebesar 265,55 ton/hari atau 96.925,31 ton/tahun. Dengan demikian capaian pengelolaan sampah baru mencapai 82,17 % dari timbulan sampah keseluruhan pada tahun 2023. Gambar 2.37 memperlihatkan capaian pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya.

Gambar 2.37.
Persentase Capaian Pengelolaan Sampah Tahun 2021-2023

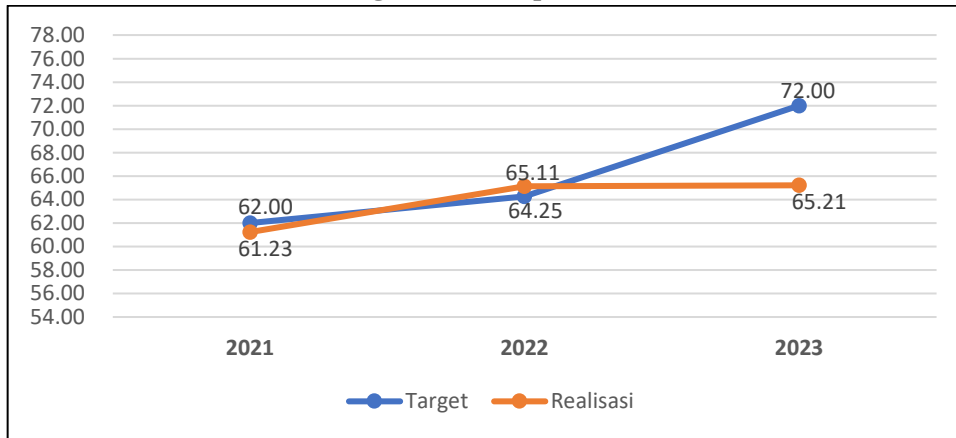


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2024.



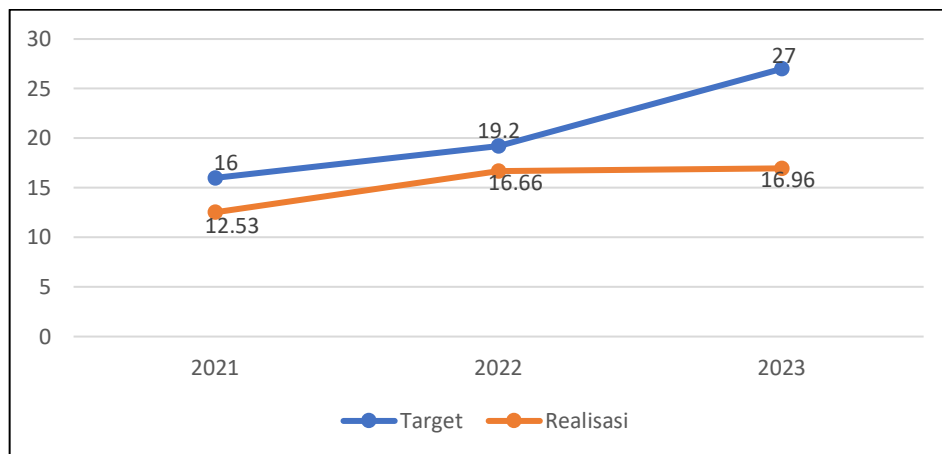
Apabila melihat gambar di atas, capaian pengelolaan sampah selama tahun 2021-2023 menunjukkan trend yang meningkat walaupun masih di bawah target yang ditetapkan. Adapun perkembangan dalam penanganan dan pengurangan sampah selama tahun 2021-2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.38.
Persentase Penanganan Sampah Tahun 2021-2023



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2024.

Gambar 2.39.
Persentase Pengurangan Sampah Tahun 2021-2023



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2024.

Jika melihat gambar penanganan sampah di atas, diketahui bahwa selama periode 2019 – 2023 capaian penanganan sampah mendekati target yang ditetapkan, bahkan pada tahun 2022 dapat melebihi target. Pada tahun 2023 capaian penanganan sampah juga terlihat sedikit meningkat dari tahun 2022, namun tingkat capaian ini masih berada di bawah target yang ditetapkan. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya tingkat capaian ini, di antaranya adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana pengangkutan sampah baik kuantitas maupun kualitasnya, kurangnya SDM, dan belum adanya teknologi pengolahan sampah di TPA Ciangir.

Sedangkan untuk pengurangan sampah, gambar di atas menunjukkan bahwa capaian pengurangan sampah jauh melebihi target pada tahun 2019 dan 2020, namun kembali menurun di bawah target pada tahun 2021 sampai tahun 2023. Capaian penanganan dan pengurangan sampah yang tidak mencapai target ini di antaranya disebabkan karena adanya revisi renstra Dinas Lingkungan Hidup



yang merubah target di tahun 2021, sehingga kinerja pengelolaan sampah tidak memenuhi target.

Adapun untuk langkah pengurangan sampah, selain penyebab di atas, adalah karena hingga saat ini pengurangan sampah atau pengelolaan sampah secara mandiri dari sumbernya, belum menjadi pola hidup atau kebiasaan pada masyarakat Kota Tasikmalaya, sehingga capaian pengurangan sampah masih rendah dan belum bisa mencapai target. Namun demikian, upaya terus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mengajak masyarakat agar berperan aktif dalam pengelolaan sampah pada sumbernya, yaitu dengan sosialisasi dan edukasi melalui berbagai program, di antaranya pembentukan bank sampah, sedekah sampah, budidaya maggot, dan program Gedong Resik.

Seperti telah disampaikan bahwa peningkatan jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya, diikuti oleh jumlah sampah yang dihasilkan. Hal ini tentunya harus ditunjang dengan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang mendukung agar tidak terjadi penumpukan sampah. Penyebab kondisi penumpukan sampah pada beberapa wilayah dikarenakan sistem pengangkutan sampah kurang efektif dan efisien. Pada Tabel 2.64. dapat dilihat jenis dan jumlah sarana pengangkutan sampah di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.64.
Sarana Pengangkutan Persampahan Tahun 2023

No.	Jenis	Kondisi			Jumlah
		Baik	Layak	Tidak Layak/ Rusak	
1	Dump Truck	11	6	13	30
2	Arm roll	2	8	4	14
3	Truck Engkel	1	1	1	3
4	Pick Up		2		3
5	Motor Roda 3	7	8	12	27
6	Kontainer Amroll	26	16	45	87
Jumlah					164

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2024.

Selain sarana pengangkutan sampah, dalam pengelolaan sampah juga diperlukan sarana alat berat. Berikut sarana alat berat yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.65.
Sarana Alat Berat Persampahan Tahun 2023

No.	Jenis	Kondisi			Jumlah
		Baik	Layak	Rusak	
1	Buldozer D31			1	1
2	Buldozer D39			1	1
3	Eksavator Liu Gong			1	1
4	Eksavator Pindad	1	1		2
Jumlah					5

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2024.



Pengelolaan sampah di TPA Ciangir saat ini masih menggunakan sistem yang paling sederhana yaitu open dumping. Karena sistem ini tanpa pengolahan, maka dalam jangka panjang dapat menimbulkan masalah, terutama untuk jenis sampah organik yang membusuk karena menimbulkan gangguan bau, pencemaran air, estetika, dan menjadi sumber penularan penyakit. TPA Ciangir yang memiliki luas ± 13 Ha, saat ini terlihat penuh oleh tumpukan sampah bahkan hingga menutupi jalan inspeksi, walaupun sebenarnya volume efektifnya belum mencapai over capacity. Kondisi ini terjadi karena belum optimalnya penanganan sampah di TPA Ciangir yang disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya SDM, dan pelaksanaan SOP yang belum maksimal dalam operasional TPA.

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan sampah, telah dikembangkan gerakan 3R melalui kegiatan bank sampah yang dimulai dari tingkat paling rendah yaitu tingkat RW sampai dengan tingkat kecamatan. Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan dibentuknya bank sampah di setiap kelurahan melalui anggaran Dana Kelurahan, sehingga sampai dengan tahun 2023 jumlah bank sampah, baik bank sampah induk maupun unit, dan TPS3R di Kota Tasikmalaya mencapai 31 unit. Secara lebih jelas jumlah bank sampah diperlihatkan pada Tabel 2.66.

Tabel 2.66.
Jumlah Bank Sampah di Kota Tasikmalaya Tahun 2021 – 2023

Jenis Bank Sampah	Tahun		
	2021	2022	2023
Bank Sampah Induk	1	1	1
Bank Sampah Unit	16	21	28
TPS3R	2	2	2
Jumlah	19	24	31

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2024.

2.1.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data capaian pelayanan umum urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil tahun 2021-2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.67.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun					
			2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%)	%	97,5	101,1	98	99,56	-	-
2	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	%	75	101,6	80	97,35	-	-
3	Jumlah pasangan yang membuat akte nikah non muslim (buah)	Lembar	210	471	210	544	-	-
4	Kepemilikan KTP (orang)	Orang	506.351	538.841	506.351	530.234	-	-
5	Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk (per 1.000)	Poin	373,2	410,3	373,2	448,6	-	-



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun					
			2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
6	Ketersediaan database kependudukan skala kota		Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	-	-
7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	-	-
8	Capaian IKM Perangkat Daerah	Kategori	Sangat Baik	Baik	Sangat baik	83,13	-	-
9	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	77	87,04	78	84	94	98,76
10	Persentase Kepemilikan Akte Pencatatan Sipil	%	68	100,8	69	99,11	-	-
11	Persentase Akurasi Database Kependudukan	%	90	100,8	95	100	-	-
12	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	80	100	100	100	-	-
13	Persentase Penerbitan Akte Pencatatan Sipil	%	80	100	80	100	-	-
14	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	80	100	80	100	100	100
15	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi Kependudukan	%	80	100	80	100	-	-
16	Persentase Kerjasama Administrasi Kependudukan	%	100	100	100	100	-	-
17	Persentase Implementasi Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	100	100	100	100	-	-
18	Persentase Lembaga Pemanfaat Data Kependudukan	%	100	100	100	100	-	-
19	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	%	-	-	-	-	100	100
20	Persentase Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	%	-	-	-	-	98	98,57
21	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	%	-	-	-	-	93	98,96
22	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	%	-	-	-	-	100	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, 2024.

Terdapat beberapa capaian indikator urusan kependudukan tahun 2023 yang melebihi target. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya data kependudukan dan pencatatan sipil. Pemerintah Kota Tasikmalaya selama ini berusaha meningkatkan kesadaran



masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui Sosialisasi KESA (Kelurahan Sadar Administrasi Kependudukan).

Selanjutnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menciptakan inovasi, seperti adanya layanan Go-dok kependudukan (Layanan Antar Dokumen Kependudukan secara langsung kepada masyarakat pada saat terjadi pandemic Covid) dan SIDDAKTA (Penyisiran Dokumen dan Data Kependudukan yaitu layanan kepada masyarakat dengan cara *door to door* atau langsung menemui masyarakat yang belum memiliki atau belum melengkapi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil).

Ketersediaan database kependudukan skala kota tidak dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan SIAK Terpusat yang merupakan sistem digitalisasi yang digunakan agar pelayanan Dukcapil dapat terkoneksi daring secara nasional.

Salah satu pelayanan administrasi kependudukan adalah pelayanan KTP-elektronik. Sampai dengan tahun 2023 jumlah penduduk yang memiliki KTP Elektronik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.68.
Jumlah Penduduk yang memiliki KTP-Elektronik Tahun 2023

NO	KECAMATAN	WKTP	PEREKAMAN KTP -EL			PENCETAKAN KTP _EL		
			SUDAH	BELUM	%	SUDAH	BELUM	%
1	CIHIDEUNG	55.887	55.400	487	99,13	54.603	1.284	97,70
2	CIPEDES	63.018	62.464	554	99,12	61.907	1.111	98,24
3	TAWANG	48.853	48.410	443	99,09	47.964	889	98,18
4	INDIHIANG	45.050	44.410	376	99,17	44.176	874	98,06
5	KAWALU	76.020	75.480	540	99,29	74.458	1.562	97,95
6	CIBEUREUM	54.410	53.887	523	99,04	53.390	1.020	98,13
7	TAMANSARI	60.315	59.835	480	99,20	59.087	1.228	97,96
8	MANGKUBUMI	75.482	75.021	461	99,39	73.948	1.534	97,97
9	BUNGURSARI	46.322	45.926	396	99,15	45.419	903	98,05
10	PURBARATU	34.855	34.522	333	99,04	34.198	657	98,12
TOTAL		560.212	555.619	4.593	99,18	549.150	11.062	98,03

Sumber: DKB Semester II Tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, 2024

2.1.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat di Kota Tasikmalaya dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 2.69.
Pelayanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021 – 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun		
			2021	2022	2023
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Buah	69	69	69
2	Jumlah kelompok binaan PKK	Buah	871	859	861
3	Jumlah LSM (buah)	Buah	218	218	218
4	LPM Berprestasi	Persen	-	-	-
5	PKK aktif	Persen	100	100	100
6	Posyandu aktif	Unit	890	901	909
7	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	-	-	-
8	Penerima Manfaat dari Program Gema Madani / Dana Kelurahan				



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun		
			2021	2022	2023
	a. Bidang Infrastruktur	Kelompok/ Paket	413	-	-
	b. Bidang Ekonomi	Orang	1.664	1.386	17.983
	c. Bidang Sosial	Orang	5.227	-	-

Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Data Diolah, 2024

Adapun untuk capaian indikator urusan pemberdayaan masyarakat tahun 2021 – 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.70.

Capaian Indikator Pelayanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat
Tahun 2021 – 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	100	100	-	-
2	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	-	-	-	-	100	100

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya, 2024

2.1.3.2.8. Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan, karena penduduk dapat menjadi modal namun juga dapat menjadi masalah bagi pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu penduduk harus dikendalikan salahsatunya melalui program keluarga berencana. Pelaksanaan urusan penengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.71.

Pelayanan Umum Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2021 – 2023

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Cakupan Layanan Keluarga Berencana	%	67	63,60	67	72,98	-	-
2	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif	%	67	72,37	72,6	72,98	-	-
3	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun	%	1	0,60	-	20,85	-	-
4	Persentase Peran serta masyarakat dlm pembangunan kesejahteraan keluarga	%	100	100	100	100	-	-
5	Cakupan data mikro keluarga yang akurat	%	100	96	100	83,63	-	-



No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
6	Cakupan Anggota BKB yang Ber KB	%	-	-	-	-	82,53	85,30
7	Cakupan Anggota BKR yang Ber KB	%	-	-	-	-	76,61	73,84
8	Cakupan Anggota BKL yang Ber KB	%	-	-	-	-	74,97	67,83
9	Jumlah Dokumen Laporan Pemutakhiran Data Kependudukan	Dok	-	-	-	-	1	1
10	Persentase Kebersertaan KB MKJP	%	-	-	-	-	100	92,92
11	Persentase Kebersertaan Un Meet Need	%	-	-	-	-	13,5	13,59

Sumber: DPPKBP3A Kota Tasikmalaya, 2024

2.1.3.2.9. Perhubungan

Pelayanan urusan perhubungan berkaitan dengan mobilitas masyarakat baik dalam pengadaan transportasi maupun sarana dan prasarananya. Pelaksanaan urusan perhubungan dalam kurun waktu tahun 2021 - 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.72.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perhubungan
Tahun 2021 - 2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase kenyamanan berlalulintas dan angkutan umum	%	82,34	88,03	96,48	117,61	98	135,25
2	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan	%	50	53,57	100	55,36	100	63,66
3	Persentase pelayanan andalin	%	100	160	100	140	100	161
4	Persentase pemenuhan standar keselamatan angkutan	%	95,25	76,7	100	164,50	100	164,50
5	Persentase Pelayanan angkutan umum	%	84,12	61,84	85,91	110,58	85,91	110,58

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2024.

Dari data pada tabel diatas secara umum, capaian indikator pelayanan urusan perhubungan meningkat dalam kurun waktu 2021 – 2023. Untuk indicator presentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan dari tahun 2021 hingga 2023 belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2023 persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan dimana target yang ditetapkan yaitu 100% dan realisasi tercatat 63,66%. Hal ini disebabkan belum terpenuhinya jumlah perlengkapan jalan yang sesuai dengan kebutuhan.



Kondisi geografis Kota Tasikmalaya yang terletak di Bagian Tenggara Wilayah Provinsi Jawa Barat dan berjarak ±105 km dari Ibukota Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Bandung serta merupakan Pusat Kegiatan Wilayah Priangan Timur, maka untuk menghubungkan antar wilayah tentunya diperlukan prasarana berupa jaringan jalan beserta kelengkapannya. Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas perlu dilakukan pemenuhan terhadap kebutuhan akan perlengkapan jalan sebagai bagian dari prasarana jalan. Kondisi fasilitas kelengkapan jalan secara keseluruhan jalan di Kota Tasikmalaya tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.73.
Pembangunan Urusan Perhubungan
Dari Tahun 2021-2023

No.	Uraian	Satuan	Capaian Tahun		
			2021	2022	2023
1	Jumlah Rambu terpasang	Unit	2006	2.036	2.063
2	Jumlah Marka Jalan terpasang	M^2	3.622,2	4.123	4.123
3	Jumlah Traffic light terpasang	Lokasi	21	21	21
4	Jumlah Warning Light terpasang	Lokasi	49	49	49
5	Jumlah PJU terpasang	Unit	11.030	11.624	12.057
6	Jumlah Halte/shelter terbangun	Unit	33	33	33
7	Jumlah Guardrail terbangun	m2	261	261	261
8	Jumlah ATCS terpasang	Unit	24	24	24
9	Jumlah Terminal terbangun	Buah	5	5	5

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2024.

Rambu-rambu lalu lintas merupakan salah satu fasilitas kelengkapan jalan yang harus tersedia sesuai dengan kebutuhannya. Adapun jumlah dan kondisi rambu-rambu lalu lintas yang terdapat di jaringan jalan Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.74.
Jumlah dan Kondisi Rambu-Rambu Lalu Lintas
Tahun 2021-2023

No	Lokasi	Di butuhkan	2021			2022			2023		
			Ter pasang	Kondisi		Ter pasang	Kondisi		Ter pasang	Kondisi	
				Baik	Rusak		Baik	Rusak		Baik	Rusak
1	Jalan Nasional	230	175	120	55	175	110	65	175	110	65
2	Jalan Provinsi	726	256	135	121	256	125	131	256	125	131
3	Jalan Kota	1.750	1.575	791	784	1.605	850	755	1.632	877	755
Jumlah		2.706	2.006	1.046	960	2.036	1.085	951	2.063	978	951

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2024.

Berdasarkan hasil survey, di Kota Tasikmalaya perlu dipasang rambu-rambu lalu lintas sebanyak 2.706 unit. Pada tahun 2023, telah terpasang sebanyak 2.036 unit (75% dari kebutuhan) di lokasi jalan Nasional, Provinsi dan Kota, dimana 1.632 unit kondisi baik dan 951 unit kondisi dalam kondisi rusak. Terdapat penambahan rambu lalu lintas sebanyak 27 unit dari tahun 2022.



Dengan demikian untuk memenuhi kebutuhan, rambu-rambu lalu lintas yang belum terpasang sebanyak 964 unit dan 951 diperlukan perbaikan/penggantian.

Fasilitas kelengkapan jalan yang berikutnya adalah marka jalan. Marka jalan merupakan salah satu fasilitas yang penting untuk memberi batas dan mengatur arus kendaraan lalu lintas pada jaringan jalan. Adapun data marka jalan di jaringan jalan Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.75.
Marka Jalan Menurut Kondisinya Tahun 2021- 2023

No	Lokasi	Dibutuh kan (m2)	2021				2022				2023			
			Ter pasang (m2)	Kondisi			Ter pasang (m2)	Kondisi			Ter pasang (m2)	Kondisi		
				Baik (%)	Sedang (%)	Pudar (%)		Baik (%)	Sedang (%)	Pudar (%)		Baik (%)	Sedang (%)	Pudar (%)
1	Jalan Nasional	947,2	807	50	20	30	807	50	20	30	807	50	20	30
2	Jalan Provinsi	3.654,1	1.543	30	40	30	1.543	30	40	30	1.543	30	40	30
3	Jalan Kota	4.022,29	1.272,2	85	20	20	4.000	85	20	20	4.000	85	20	20
Jumlah		8.623,59	3.622,2	165	80	80	6.350	165	80	80	6.350	165	80	80

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2024

Pada tahun 2023, Kota Tasikmalaya telah membuat marka jalan sepanjang 6.370 m2 (73% dari kebutuhan). Panjang marka yang telah dibuat tidak berubah dari tahun 2022 ke tahun 2023. Marka jalan dalam kondisi baik sebagian besar terletak di Jalan Kota sebanyak 85% dalam kondisi baik, sedangkan kondisi marka yang pudar terletak disekitar jalan nasional dan provinsi sebesar 20%. Kebutuhan marka jalan yang harus dibuat sebesar 8.623,59 m2 yang tersebar di jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota, sehingga kekurangan pembuatan marka sepanjang 2.253,59 m2.

Fasilitas kelengkapan jalan yang berikutnya adalah Penerangan Jalan Umum (PJU). PJU merupakan salah satu fasilitas yang penting untuk memberikan pencahayaan buatan pagi pengguna jalan dalam mempermudah melihat pada malam hari sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan. Adapun data PJU yang terdapat di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.76.
Penerangan Jalan Umum (PJU) Menurut Kondisinya Tahun 2021-2023

No	Lokasi	Dibutuhkan (unit)	2021		2022		2023	
			Terpasang (unit)	Berfungsi (unit)	Terpasang (unit)	Berfungsi (unit)	Terpasang (unit)	Berfungsi (unit)
1	Jalan Nasional	552	240	232	150	60	-	-
2	Jalan Provinsi	1.844	676	452	200	56	-	-
3	Jalan Kota	11.604	10.114	10.087	12.000	11.594	12.783	12.207
Jumlah		14.000	11.030	10.771	12.350	11.710	12.783	12.207

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2024

Jumlah PJU dibutuhkan di Kota Tasikmalaya sebanyak 14.000 unit untuk jalan Nasional, Provinsi dan Kota. Adapun PJU yang terpasang sampai dengan tahun 2023 yaitu sebanyak 12.783 unit (91% dari kebutuhan), dengan 94% (12.207 unit) berfungsi. Berdasarkan kebutuhan tersebut, masih dibutuhkan pemasangan PJU sebanyak 1.217 unit.



Fasilitas kelengkapan jalan yang berikutnya adalah fasilitas penyebrangan (Zebra Cross). Fasilitas penyebrangan juga merupakan salah satu fasilitas yang penting untuk area penyebrangan pejalan kaki dan penanda bagi pengemudi untuk memperlambat kecepatan saat ada pejalan kaki. Kondisi fasilitas penyebrangan di Kota Tasikmalaya belum sesuai dengan kebutuhan. Adapun jumlah ketersediaan fasilitas penyebrangan di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.77.

Fasilitas Penyebrangan (Zebra Cross) Menurut Kondisinya Tahun 2021-2023

No	Fasilitas	Dibutuhkan (buah)	2021		2022		2023	
			Terpasang (buah)	Berfungsi (buah)	Terpasang (buah)	Berfungsi (buah)	Terpasang (buah)	Berfungsi (buah)
1	Jalan Nasional	30	20	Baik	30	20	-	-
2	Jalan Provinsi	70	46	Baik	70	46	-	-
3	Jalan Kota	120	86	Baik	461	110	-	-
Jumlah		220	152	Baik	561	176	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2024

Berdasarkan hasil survey, di Kota Tasikmalaya dibutuhkan 220 buah, dan telah terpasang sampai tahun 2022 yaitu 176 buah dengan kondisi baik, sehingga masih perlu dilakukan pemasangan Zebra Cross sebanyak 44 buah.

Fasilitas kelengkapan jalan yang berikutnya adalah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL). APILL berfungsi sebagai lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyebrangan, dan tempat arus lalu lintas lainnya. Kondisi APILL di Kota Tasikmalaya sudah terpasang sesuai dengan kebutuhan seperti terlihat pada tabel rincian berikut:

Tabel 2.78.

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Menurut Kondisinya Tahun 2021 - 2023

No	Jenis lokasi	Kebutuhan (buah)	2021			2022			2023		
			Ter pasang (buah)	Kondisi (buah)		Ter pasang (buah)	Kondisi (buah)		Ter pasang (buah)	Kondisi (buah)	
				Ber fungsi	Tidak		Ber fungsi	Tidak		Ber fungsi	Tidak
1	Jalan Nasional	8	6	6	-	8	6	2	8	6	2
2	Jalan Provinsi	7	4	4	-	7	4	3	7	4	3
3	Jalan Kota	12	8	7	1	12	8	4	12	8	4
Jumlah		27	18	17	1	27	18	9	27	18	9

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2024

Berdasarkan kebutuhan ruas jalan yang berada di Kota Tasikmalaya, diperlukan 27 buah alat pemberi isyarat lalu lintas. Yang telah terpasang sebanyak 27 unit dengan kondisi 18 berfungsi (67%) dan 9 tidak berfungsi. Perlu adanya perbaikan terhadap APILL yang tidak berfungsi untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pada persimpangan.

Fasilitas kelengkapan jalan yang berikutnya adalah Guard Rail (Pagar Pengaman). Guard Rail (Pagar Pengaman) adalah sistem pengaman orang atau kendaraan yang terbuat dari rail besi atau baja panjang yang berfungsi untuk pelindung kendaraan. Adapun data panjang Guard Rail (Pagar Pengaman) di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.79.
Panjang Guard Rail (Pagar Pengaman) Tahun 2021 - 2023

No	Lokasi	Dibutuhkan (meter)	Tahun		
			2021	2022	2023
1	Jalan Nasional	-	-	-	-
2	Jalan Provinsi	700	200	200	200
3	Jalan Kota	300	61	61	61
Jumlah		1.000	261	261	261

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2024

Berdasarkan kebutuhan ruas jalan yang berada di Kota Tasikmalaya, diperlukan sepanjang 1.000 m² pagar pengaman. Sejak tahun 2021 hingga 2023, pagar pengaman yang telah terpasang baru sepanjang 261 m² (26% dari kebutuhan) sehingga perlu adanya penambahan pemasangan pagar pengaman sepanjang 739 m².

Fasilitas kelengkapan jalan yang berikutnya adalah cermin tikungan. Cermin tikungan merupakan kelengkapan tambahan yang berfungsi untuk menambah jarak pandang pengemudi yang biasanya berada pada tikungan tajam dan persimpangan. Jumlah cermin tikungan di jaringan jalan Kota Tasikmalaya belum sesuai dengan kebutuhan. Adapun jumlah cermin tikungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.80.
Cermin Tikungan Menurut Jumlahnya Tahun 2021 - 2023

No	Lokasi	Dibutuhkan (buah)	Tahun		
			2021	2022	2023
1	Jalan Nasional	4	0	4	4
2	Jalan Provinsi	6	0	6	6
3	Jalan Kota	20	2	2	2
Jumlah		30	2	12	12

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2024

Berdasarkan kebutuhan untuk keselamatan jalan, fasilitas cermin tikungan sebanyak 30 buah, yang terpasang baru 12 buah (40% dari kebutuhan). Sehingga masih diperlukan pemasangan cermin tingkungan sebanyak 18 buah yang akan ditempatkan di tikungan yang belum terdapat cermin tikungan.

Fasilitas kelengkapan jalan yang berikutnya adalah pita penggaduh. Pita penggaduh berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, melindungi penyebrang jalan untuk mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Adapun jumlah pita penggaduh yang sudah ada di jaringan jalan Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.81.
Pita Penggaduh Menurut Kondisinya Tahun 2021 - 2023

No	Lokasi	Dibutuhkan (buah)	Terpasang (buah)		
			2021	2022	2023
1	Jalan Nasional	10	6	6	6
2	Jalan Provinsi	8	4	4	4
3	Jalan Kota	25	12	12	12
Jumlah		43	22	22	22

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2024

Berdasarkan kebutuhan untuk keselamatan jalan, fasilitas pita penggaduh seharusnya terdapat 43 buah. Saat ini di Kota Tasikmalaya terdapat



22 buah pita penggaduh (50% dari kebutuhan). Sehingga masih diperlukan sejumlah 21 buah pita penggaduh untuk memenuhi kebutuhan.

Fasilitas parkir bertujuan untuk memberikan tempat bagi kendaraan dan menunjang kelancaran lalu lintas. Fasilitas perparkiran menurut jenis dan kondisinya sampai dengan tahun 2023, Ruang Parkir pada badan jalan direncanakan 8,8 km dan telah digunakan 6,5 km. Sehingga hampir keseluruhan telah digunakan (73%).

Tabel 2.82.
Ruang Parkir Pada Badan Jalan Tahun 2021 - 2023

No	Lokasi	Jml Ruas	Panjang jalan yg terdapat rambu parkir (Km)			Panjang jalan yg digunakan parkir (Km)		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Jalan Nasional	-	-	-	-	-	-	-
2	Jalan Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
3	Jalan Kota	33	8,80	8,80	8,80	7,83	6,50	6,50
Jumlah		34	8,80	8,80	8,80	7,83	6,50	6,50

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2024

Selain infrastruktur jalan serta fasilitas kelengkapannya, sarana yang dibutuhkan dalam transportasi adalah adanya alat transportasi baik armada maupun prasarana jalan yang berupa terminal. Kewenangan Kota untuk pengelolaan terminal adalah terminal penumpang tipe C yang saat ini berjumlah 4 terminal serta 1 terminal tipe A yang dikelola oleh pemerintah pusat. Prasarana terminal angkutan penumpang di Kota Tasikmalaya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.83.
Terminal Angkutan Penumpang Tahun 2023

No.	Nama Terminal	Tipe	Luas (Ha)	Instansi Pengelola
1.	Terminal Indihiang	A	7,50	Kementerian PHB
2.	Terminal Pancasila	C	0,30	Dishub
3.	Terminal Padayungan	C	0,23	Dishub
4.	Terminal Cikurubuk	C	0,29	Dishub
5.	Terminal Awipari	C	1,49	Dishub

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2024

Kota Tasikmalaya memiliki 5 terminal, 1 terminal tipe A, dan 4 terminal tipe C. Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018 - 2022, direncanakan akan dibangun terminal tipe C Batunungku. Namun, sampai dengan Namun, sampai dengan tahun 2021 pembangunan terminal Batunungku baru terealisasi 20%.

Menurut Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor: 550/kep.969 – Dishub/2019, Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe C dan Tempat Pemberhentian Kendaraan Penumpang Umum dan Tempat Pemberhentian Kendaraan Penumpang Umum di Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Terminal Pancasila: Jl. A. Yani Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang
2. Cibeureum: Jl. Letkol Basyir Surya, kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum.
3. Cikurubuk: Jl. Residen Ardiwinangun, Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi.
4. Padayungan: Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung.



5. Batu Nungku: Jl . mangkubumi – Indihiang Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi.
6. Rest Area Urug: Jl. Syeikh Abdul Muhyi Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu
7. Indihiang: Jl. Letjend Ibrahim Adjie, Kelurahan Indihiang Kecamatan Indihiang
8. Cigeureung: Jl. Cigeureung, kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes
9. Setiawargi: Jl. Setiawargi Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari
- 10.Nyantong: Jl. Siliwangi, Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang
- 11.Cilembang: Jl. Cilembang, Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung
- 12.Sirnagalih: Jl. Sirnagalih Kelurahan Sirnagalih, Kecamatan Indihiang

Terkait dengan sarana yang dibutuhkan dalam transportasi yaitu adanya alat transportasi yang baik. pada Kota Tasikmalaya terdapat alat transportasi berupa angkutan umum berupa angkutan kota (angkot), angkutan perbatasan (angtas), angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), serta Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP). Adapun jumlah trayek angkutan umum di Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.84.
Jumlah Trayek Angkutan Umum Tahun 2023

No.	Trayek	Jumlah Trayek eksisting	Jumlah Usulan Trayek Baru
1	ANGKOT	21	3
2	ANGTAS	44	1
3	AKDP	43	9
4	AKAP	20	
		128	13

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2024

Dapat terlihat dari tabel diatas jumlah keseluruhan trayek angkutan kota yang ada di Kota Tasikmalaya adalah 128 trayek yang dibagi dalam 4 jenis angkutan yaitu 21 trayek untuk angkot, 44 trayek angkutan perbatasan, 43 trayek AKDP, dan 20 trayek AKAP. Selain itu akan diusulkan trayek baru sebanyak 13 trayek. Untuk rincian angkutan kota sebanyak 21 trayek dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.85.
Data Trayek Angkutan Kota Tahun 2022 – 2023

No	No/ kode trayek	Panjang trayek (km)	2022					2023				
			Jumlah armada (unit)					Jumlah armada (unit)				
			Mobil Penumpang Umum					Mobil Penumpang Umum				
			Alokasi	Realisasi	Alokasi		Sisa	Alokasi	Realisasi	Status		Sisa
					Aktif	Non Aktif				Aktif	Non Aktif	
1	01	27	91	91	49	42	0	91	91	22	69	0
2	02	16	52	49	10	39	3	52	49	7	42	3
3	03	19,5	125	122	50	72	3	125	122	34	88	3
4	04	23	100	92	53	39	8	100	92	38	54	8
5	05	23,5	150	141	59	82	9	150	141	33	108	9
6	06	23	33	21	14	7	12	33	21	9	12	12
7	07	23	70	63	32	31	7	70	63	23	40	7
8	08	23	70	60	11	49	10	70	60	4	56	10
9	09	25	56	27	11	16	29	56	27	6	21	29



No	No/ kode trayek	Panjang trayek (km)	2022					2023				
			Jumlah armada (unit) Mobil Penumpang Umum					Jumlah armada (unit) Mobil Penumpang Umum				
			Alokasi	Realisasi	Alokasi		Sisa	Alokasi	Realisasi	Status		Sisa
					Aktif	Non Aktif				Aktif	Non Aktif	
10	09 A	30	35	32	21	11	3	35	32	12	20	3
11	010	34,5	71	67	31	36	4	71	67	6	61	4
12	011	16	19	19	10	9	0	19	19	10	9	0
13	012	15	28	23	15	8	5	28	23	11	12	5
14	012 A	20	4	2	0	2	2	4	2	0	2	2
15	013	26	50	47	20	27	3	50	47	9	38	3
16	014	33	20	16	9	7	4	20	16	4	12	4
17	015	44	35	31	11	20	4	35	31	9	22	4
18	016	28	35	21	7	14	14	35	21	0	21	14
19	017	13	35	35	23	12	0	35	35	12	23	0
20	018	19,5	40	25	12	13	15	40	25	8	17	15
21	019	28	19	18	8	10	1	19	18	5	13	1
Jumlah			1.138	1.002	456	546	136	1138	1002	262	740	136

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2024

Selain hal-hal yang telah diuraikan, Dinas Perhubungan bertugas pula untuk menguji kendaraan umum bermotor. Pengujian kendaraan umum bermotor dilakukan dengan memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Adapun rincian data ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.86.
Data Kendaraan Wajib Uji Tahun 2021 – 2023

TAHUN	MOBIL BARANG						KERETA GANDEN GAN		KERETA TEMPELAN		MOBIL BUS		KHUSUS		MOBIL PENUMPANG		TOTAL
	KECIL		SEDANG		BESAR												
	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	
2021	2375	5990	1440	2277	380	194	2	4	33	191	1938	222	60	29	188	16	15339
2022	2344	5602	1371	2106	483	275	1	7	36	185	1862	208	77	23	172	10	14762
2023	2357	4880	1223	1933	541	212	0	13	30	169	1689	214	64	23	142	9	13499

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2024

Dapat terlihat dari tabel tersebut bahwa jumlah kendaraan wajib uji dari tahun 2021-2023 terus mengalami penurunan kecuali pada beberapa kendaraan seperti mobil barang besar, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus. Dari data-data tersebut setiap tahunnya diwajibkan untuk dilakukan uji. Adapun realisasi jumlah kendaraan yang lulus uji dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.87.
Realiasi Kegiatan Ijin Trayek Aktif dan Jumlah Kendaraan Lulus uji Dinas Perhubungan 2021-2023

No.	Uraian	Satuan	Capaian Tahun		
			2021	2022	2023
1	Ijin trayek aktif	Unit	616	360	309
2	Jumlah kendaraan lulus uji	Unit	15.339	14.762	13.499

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2024

Berdasarkan jumlah kendaraan yang melakukan izin trayek di Kota Tasikmalaya pada tahun 2021-2023 mengalami penurunan dimana kendaraan aktif yang melakukan perpanjangan izin trayek pada tahun 2023 hanya 309 kendaraan. Hal ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan selama 2 tahun berturut dikarenakan menurunnya jumlah angkutan kota yang beroperasi, berdampak terhadap disiplin pemilik/awak angkutan kota untuk memperpanjang izin trayek, dan adanya eksistensi kendaraan angkutan penumpang berbasis online/ojol.

Untuk jumlah kendaraan yang lulus uji juga mengalami penurunan selama 2 tahun berturut-turut. Hal ini dikarenakan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 22 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa akan dihapusnya retribusi pengujian kendaraan bermotor, ini bisa dibuktikan mulai bulan September Tahun 2023 pelayanan uji kendaraan bermotor semakin berkurang sampai bulan Desember 2023. Selain itu, kurangnya pengawasan dilapangan terhadap kendaraan angkutan barang dan angkutan orang yang tidak melakukan uji, sehingga mereka tidak sadar untuk melaksanakan uji kendaraan bermotor.

2.1.3.2.10. Komunikasi & Informatika

Pelaksanaan pelayanan umum urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Capaian pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.88.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 – 2023

No.	Indikator	Satuan	Realisasi					
			2021		2022		2023	
			Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realisasi
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	-	-
2	Capaian penyebarluasan informasi dan komunikasi publik	%	40	41,68	40	41,68	-	-
3	Persentase pelayanan informasi/ dokumentasi dan pengaduan	%	80	100	80	100	-	-



No.	Indikator	Satuan	Realisasi					
			2021		2022		2023	
			Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realisasi
4	Persentase pengelolaan saluran informasi	%	100	100	100	100	-	-
5	Persentase domain dan sub domain yang dikelola	%	100	100	100	100	-	-
6	Capaian Predikat Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	2,7	2,68	2,7	2,68	2,9	3,25
7	Jumlah titik jaringan intranet Pemerintah Daerah	Node	400	400	400	400	-	-
8	Persentase penataan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	-	-
9	Capaian Pengelolaan Pusat Data	Tier	1	1	1	1	-	-
10	Jumlah sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah	Sistem	2	2	2	2	-	-
11	Jumlah data dan informasi elektronik	Unit	1	1	1	1	-	-
12	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	Aplikasi	2	2	2	2	-	-
13	Jumlah Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem	7	7	7	7	-	-
14	Jumlah Sarana dan Prasarana TIK yang dikelola	Paket	3	3	3	3	-	-
15	Capaian Government Chief Information Officer (GCIO)	Level	1	1	1	1	-	-
16	Capaian Predikat Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	%	-	-	-	-	80	90,14
17	Persentase Layanan SPBE yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	-	-	-	-	60	60,71
18	Persentase Layanan Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik	%	-	-	-	-	Informatif (80%)	90,14

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, 2024.

Capaian predikat keterbukaan informasi dan komunikasi publik adalah salah satu capaian dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, baik kebijakan, program dan kegiatan maupun menjaring opini dan aspirasi publik. Dinas Komunikasi dan Informatika terus berupaya dalam mengelola konten sebagai bahan informasi yang disajikan melalui beberapa media komunikasi publik, baik yang dikelola oleh internal maupun yang dikerjasamakan dengan pihak eksternal.

Capaian Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi, pada tahun 2023 mencapai 90,14 persen dari target 80,00 persen sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 112,68% dan melebihi target. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam tingginya capaian kinerja yang melebihi target untuk indikator ini, salah satunya adalah melaksanakan pelayanan publik dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui SP4N LAPOR dengan efektif dan efisien serta penguatan konten-konten Informasi yang



disampaikan ke masyarakat melalui berbagai media. Sehingga Kota Tasikmalaya mendapatkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 dari Komisi Informasi Jawa Barat.

Pencapaian indikator untuk Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2023, Pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan nilai sebesar 3,25 poin dengan kategori Baik melebihi target untuk indikator ini yaitu sebesar 2,9 poin sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 112,07 persen, hal ini berdasarkan Kepmenpan RB Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023. Begitupun dengan Persentase Layanan SPBE yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi tahun 2023 mencapai 60,71 persen melebihi target sebesar 60,00 persen.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Dalam upaya melaksanakan amanat pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yakni untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik, Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tahun 2013 membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Penetapan Kebijakan PPID Pemerintah Kota Tasikmalaya di dukung dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 103 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kota Tasikmalaya yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar pelaksanaan tugas operasional PPID Kota Tasikmalaya. Sebelumnya Wali Kota Tasikmalaya membentuk kelembagaan PPID melalui Keputusan Keputusan Wali Kota Nomor 550/kep.119-Kominfo/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Tasikmalaya. Untuk memperlancar kegiatan PPID di Kota Tasikmalaya, pada tahun 2022 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Selaku PPID Utama mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 473.2/Kep.02/PPID-Utama tentang Penetapan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama.

Dalam meningkatkan Pelayanan informasi, Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui PPID telah membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media sebagai berikut:

1. Melalui website <http://ppid.tasikmalayakota.go.id>
2. Help desk/layanan langsung/frontdesk
3. Ruang tunggu pelayanan
4. Layanan melalui telepon dan email
Nomor tlp : (0265) 7523616
Email : ppid@tasikmalayakota.go.id

Dalam memberikan layanan informasi secara langsung kepada pemohon informasi, PPID menetapkan waktu pelayanan yang dilaksanakan pada hari kerja (Senin sampai dengan Jumat). Adapun pelayanan informasi secara online dapat diakses melalui website PPID (www.ppid.tasikmalayakota.go.id). Permohonan informasi publik dari masyarakat pada Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 2.89.
Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan dan Ditolak

Tahun	Permohonan dikabulkan seluruhnya	Permohonan dikabulkan sebagian	Permohonan tidak dikabulkan atau ditolak	Jumlah
2023	19	2	0	21

Sumber: Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melakukan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 kepada pemerintah kabupaten/ kota se-Jawa Barat melalui *Self Assesment Questioner* (SAQ), visitasi dan uji publik. Dari hasil Monitoring dan Evaluasi tersebut Pemerintah Kota Tasikmalaya berhasil meraih nilai sebesar 90,14 pada Kategori Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota yang Informatif menunjukkan bahwa pelayanan dan pengelolaan PPID di Pemerintah Kota Tasikmalaya sudah baik.

2.1.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang penting dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya potensi koperasi dan UMKM di Kota Tasikmalaya baik dari jumlah koperasi dan pelaku usaha mikro kecil maupun peredaran uang di sektor ini. Berikut adalah keragaan koperasi di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.90.
Keragaman Koperasi di Kota Tasikmalaya tahun 2023

Nama Koperasi	Jmlh	Koperasi		RAT	JUMLAH				
		Aktif	Tdk Aktif		Anggota	Pengurus	Pengawas	Karyawan	Manajer
					(Org)	(Org)	(Org)	(Org)	(Org)
I. Koperasi Unit Desa (KUD)	10	10	-	3	4.110	27	19	20	-
II. Koperasi Serba Usaha	105	60	45	19	8.899	335	272	163	8
III. Kop. Pondok Pesantren	45	12	34	4	6.138	146	125	11	1
IV. Koperasi Simpan Pinjam									
4.1. KSP :	93	77	16	29	21.467	300	237	172	15
4.2. KBMT :	34	13	21	3	6.185	106	97	68	7
V. Koperasi Konsumsi									
5.1. KPRI	52	37	16	20	9.710	178	138	54	4
5.2. KOPKAR :	39	18	21	9	4.975	118	97	28	9
5.3. Koperasi Angkatan Darat	2	2	-	1	1.535	10	6	8	-
5.4. Koperasi Angkatan Udara	1	1	-	1	173	3	2	3	-
5.5. Koperasi Kepolisian	1	1	-	1	862	3	3	2	-
5.6. Koperasi Wanita :	10	6	4	2	1.287	32	24	7	1
5.7. Koperasi Wredatama :	6	1	5	-	486	17	17	3	1
5.8. Koperasi Mahasiswa/Pemuda:	2	1	1	1	759	8	6	-	1
5.9. Koperasi Lainnya									
5.9.1. Koperasi Warga	101	23	78	6	7.046	281	250	32	2
5.9.2. Pokmas	41	4	37	1	3.151	127	113	18	-
5.9.3. Pepabri	1	1	-	1	380	4	3	2	-
5.9.4. Kop. Veteran :	1	1	-	1	942	4	2	1	-
VI. Koperasi Produksi									
6.1. Kopinkra / INKRA	26	6	20	4	1.399	84	72	23	-
6.2. Koperasi Pertanian	9	1	8	-	637	27	27	3	-
VII. Koperasi Pemasaran									
7.1. Koperasi Pasar	16	8	8	-	1.681	44	35	10	-
VIII. Koperasi Profesi	2	1	1	-	75	6	6	5	
IX. Koperasi Sekunder	6	3	3	2	13.288	18	17	10	-
X. Koperasi Produsen	5	5	-	-	127	19	15	2	-
XI. Koperasi Konsumen	33	28	5	12	2.637	89	70	14	3



Nama Koperasi	Jmlh	Koperasi		RAT	JUMLAH				
		Aktif	Tdk Aktif		Anggota	Pengurus	Pengawas	Karyawan	Manajer
					(Org)	(Org)	(Org)	(Org)	(Org)
Jumlah Total	641	320	321	120	97.948	1.986	1.652	659	52

Sumber: Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2024.

Menurut keragaman koperasi di atas, sampai dengan tahun 2023 jumlah koperasi di Kota Tasikmalaya sebanyak 641 buah koperasi. Jumlah koperasi tahun 2023 meningkat 24 koperasi dari tahun 2022 yang berjumlah 627 koperasi. Koperasi aktif sebanyak 320 buah koperasi namun yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) hanya 120 koperasi. Koperasi yang melaksanakan RAT meningkat 19 koperasi dari koperasi yang melaksanakan RAT tahun 2022 yang berjumlah 101 koperasi. RAT merupakan agenda wajib setiap badan usaha koperasi, karena di dalamnya akan dibahas tentang pertanggungjawaban pengurus koperasi selama satu tahun kepada anggota koperasi yang bersangkutan. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi Pasal 43 menyatakan bahwa koperasi yang tidak melakukan RAT selama 3 tahun berturut-turut dapat dibubarkan oleh Menteri.

Jumlah anggota koperasi tahun 2023 sebanyak 97.948 orang berkurang 1.336 orang dari jumlah anggota koperasi tahun 2022 yang sebanyak 99.284 orang. Hal ini berdampak pada turunnya modal baik modal sendiri maupun modal dari luar, volume usaha dan asset koperasi. Pada tahun 2023, modal koperasi yang terhimpun secara mandiri tercatat sebanyak Rp.233,092 milyar turun Rp.3,75 milyar dari tahun 2022 yang sebanyak Rp.236,843 milyar. Sementara modal koperasi yang berhasil dihimpun dari luar juga berkurang Rp.3,68 milyar dari Rp.162,566 milyar tahun 2022 menjadi Rp.158,879 milyar pada tahun 2023. Demikian juga volume usaha koperasi berkurang Rp.23 milyar dari Rp.278,911 milyar pada tahun 2022 menjadi Rp.255,622 milyar pada tahun 2023.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 21/Per/M/KUKM/IX/2025 tentang Peningkatan Koperasi menyatakan Koperasi Berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial. Koperasi berkualitas dinilai dari koperasi aktif (yang melaksanakan RAT) yang meningkat volume usaha dan assetnya. Koperasi berkualitas di Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 baru mencapai 45 koperasi atau 37,50 persen dari koperasi yang melaksanakan RAT Tahun 2023. Berikut adalah sebaran koperasi yang berkualitas di Kota Tasikmalaya Tahun 2023.

Tabel.2.91.

Sebaran Koperasi yang Berkualitas di Kota Tasikmalaya Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH KOPERASI YANG MENINGKAT KUALITASNYA BERDASARKAN RAT				JUMLAH KOPERASI BERKUALITAS	KET
		RAT	VOLUME USAHA	ASSET	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CIHIDEUNG	16	23.150.409.100,56	33.147.657.723,61	56.298.066.824,71	5	
2	CIPEDES	16	20.916.360.390,58	52.424.150.140,36	73.340.510.530,94	6	



NO	KECAMATAN	JUMLAH KOPERASI YANG MENINGKAT KUALITASNYA BERDASARKAN RAT				JUMLAH KOPERASI BERKUALITAS	KET
		RAT	VOLUME USAHA	ASSET	JUMLAH		
3	TAWANG	30	60.688.558.828,84	93.810.860.527,44	154.499.419.356,28	15	
4	INDIHIANG	17	12.325.004.156,00	18.560.872.749,33	30.885.876.905,33	6	
5	KAWALU	3	6.834.283.735,00	11.339.725.040,00	18.174.008.775,00	0	
6	CIBEUREUM	10	6.188.569.522,00	8.651.097.778,00	14.839.667.300,00	3	
7	TAMANSARI	8	3.042.709.476,00	5.310.023.540,80	8.352.733.016,80	3	
8	MANGKUBUMI	8	15.838.988.475,00	25.813.404.171,06	41.652.392.646,76	3	
9	BUNGURSARI	6	14.028.186.772,00	15.898.657.917,50	29.926.844.689,50	2	
10	PURBARATU	6	5.027.705.584,00	7.864.622.818,00	12.892.328.402,00	2	
JUMLAH		120	168.040.776.039,98	272.821.072.406,10	440.861.848.447,32	45	

Sumber: Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2024.

Kementerian Koperasi UKM memberlakukan Nomor Induk Koperasi (NIK) kepada Koperasi Aktif seluruh Indonesia. Pada tahun 2023 koperasi yang telah mendapatkan Nomor Induk Koperasi di Kota Tasikmalaya sebanyak 207 koperasi bertambah 10 koperasi dari tahun 2022 yang sebanyak 197 koperasi. Koperasi yang telah berserifikat NIK dan sebarannya di Kota Tasikmalaya sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.92.
Data Koperasi Bersertifikat NIK Per-Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Indihiang	20
2	Bungursari	18
3	Mangkubumi	17
4	Cihideung	29
5	Cipedes	20
6	Tawang	39
7	Kawalu	17
8	Tamansari	16
9	Cibeureum	21
10	Purbaratu	10
	Jumlah	207

Sumber: Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2024.

Menurut Permen KUKM Nomor 10 Tahun 2016 manfaat Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) adalah memberikan kepastian eksistensi koperasi secara sah sebagai badan hukum, memastikan koperasi masih aktif secara kelembagaan maupun usaha; dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan para pihak yang bermitra terhadap koperasi. Untuk mendapatkan kepercayaan Masyarakat dan para pihak koperasi harus sehat. Hasil penilaian kesehatan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kota Tasikmalaya Tahun 2023 mencapai 11,2 persen.

Di Kota Tasikmalaya, usaha ekonomi produktif didominasi oleh jenis usaha mikro. Pada tahun 2023 jumlah usaha mikro di Kota Tasikmalaya yang sudah mendapatkan perizinan mencapai 17.512 pelaku usaha meningkat tajam dari data tahun 2022 yang mencapai 6.370 pelaku usaha. Hal ini terjadi karena adanya program *self declare* sertifikasi halal dari Kemeterian Agama RI untuk pelaku usaha mikro yang mana kehalalan produk didasari pada pernyataan pelaku usaha kemudian diverifikasi oleh pendamping PPH dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga keagamaan Islam, maupun perguruan tinggi



(BPJPH 2021). Program *self declare* sertifikasi halal hanya mensyaratkan usaha mikro untuk mempunyai izin. Berbeda dengan program sertifikasi halal reguler, sertifikasi halal membutuhkan pengujian kehalalan produk oleh LPH. Hal ini menyebabkan pelaku usaha mikro berbondong-bondong mengajukan izin yang dapat dilakukan secara online. Sebaran usaha mikro per kecamatan di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.93.
Jumlah Usaha Mikro di Kota Tasikmalaya
Berdasarkan Izin Usaha yang Dikeluarkan Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH USAHA MIKRO
1	2	3
1	CIHIDEUNG	1.206
2	CIPEDES	1.107
3	TAWANG	1.478
4	INDIHIANG	1.368
5	KAWALU	1.334
6	CIBEUREUM	1.850
7	TAMANSARI	1.934
8	MANGKUBUMI	3.617
9	BUNGURSARI	1.452
10	PURBARATU	2.166
	JUMLAH	17.512

Sumber: Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2024.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan umum urusan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagaimana pada table berikut:

Tabel 2.94.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Tahun 2021-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase koperasi sehat	%	24	23,00	24	40	6	11,2
2	Persentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi usaha kecil	%	-	-	1	0	-	-
3	Persentase usaha mikro yang bersertifikat	%	2	17,00	2	2,2	2	5,88
4	Jumlah Koperasi yang dibina	Buah	550	182	305	90	-	-
5	Jumlah usaha mikro yang terakses dukungan usaha	Buah	150	1.695	150	1900	-	-
6	Persentase wirausaha baru yang dibina	%	-	-	100	100	-	-
7	persentase masyarakat miskin yang dibina	%	100	100	100	35	-	-
8	Persentase koperasi simpan pinjam yang diberi rekomendasi penerbitan izin usaha dan/ atau izin operasional	%	100	100	100	100	100	0
9	Persentase koperasi aktif yang diawasi dan diperiksa	%	13,51	36,42	100	29,83	-	-



No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
10	Persentase Bina Koperasi yang berkompeten	%	33	40,00	33,3	33,3	-	-
11	Persentase koperasi aktif yang dibina	%	100	60,26	13,51	32,79	-	-
12	Persentase pemberdayaan usaha mikro	%	65	74,50	65	29,83	-	-
13	Jumlah masyarakat miskin yang dibina pada sektor jasa	Orang	100	100	100	35	-	-
14	Persentase koperasi yang memiliki NIK (Nomor Induk Koperasi)	%	-	-	-	-	64	64,60
15	Persentase koperasi aktif (persentase peningkatan koperasi aktif)	%	-	-	-	-	1	2,6
16	Persentase SDM koperasi yang kompeten	%	-	-	-	-	25	30
17	Persentase koperasi aktif yang diberdayakan	%	-	-	-	-	25	26,15
18	Persentase pemberdayaan usaha mikro	%	-	-	-	-	2	1,71
19	Persentase Usaha Mikro yang dibina	%	-	-	-	-	5	5,80

Sumber: Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2024.

2.1.3.2.12. Penanaman modal

Penanaman modal merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu didorong agar kinerja sektor penanaman modal dapat meningkat. Berikut capaian pelayanan urusan penanaman modal.

Tabel 2.95.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Penanaman Modal
Tahun 2021 – 2023

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	M/Rp	250	1.630	700	4.777,36	1.304	18.702,16
2	Capaian penerbitan perijinan terpadu sesuai SOP	%	67	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi RUPM Kota Tasikmalaya	%	-	-	-	-	100	100
4	Persentase pelayanan perijinan sesuai standar pelayanan	%	100	100	100	100	-	-
5	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	5	26,4	2	120	100	100
6	Persentase pengelolaan basis data potensi investasi sesuai SOP	%	100	100	100	100	25	100



No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
7	Persentase pengelolaan perijinan sesuai SOP	%	100	100	100	100	-	-
8	Persentase pengelolaan data perijinan sesuai SOP	%	-	-	-	-	75	100

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya, 2024.

Pemerintah Kota Tasikmalaya telah memiliki regulasi terkait kemudahan penanaman modal yaitu dengan telah terbitnya Perda Kota Tasikmalaya No. 6 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Dalam meningkatkan investasi atau penanaman modal perlu dukungan infrastruktur dan suprastruktur perekonomian yang memadai. Langkah lainnya untuk meningkatkan investasi di Kota Tasikmalaya, perlu dibuat pemetaan peluang dan potensi penanaman modal di Kota Tasikmalaya, karena meningkatnya penanaman modal akan memberikan pengaruh positif bagi peningkatan laju perekonomian sekaligus pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Pemetaan peluang dan potensi penanaman modal di Kota Tasikmalaya dibuat berdasarkan zonasi, tata ruang atau sentra/klaster produk unggulan kewilayahan. Berdasarkan hal ini di Kota Tasikmalaya terdapat kawasan yang strategis dari sudut perekonomian seperti kawasan perdagangan, hotel dan restoran di pusat kota, Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan, Kawasan Minapolitan di Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Bungursari, dan Kawasan Pendidikan Terpadu di Kecamatan Tamansari.

2.1.3.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Pelaksanaan pelayanan umum urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.96.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2021 -2023

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase OKP yang dibina	%	28	28,57	30	30,77	29,67	31,87
2	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi	%	75	60	83	85,71	34,15	52,38

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, 2024.

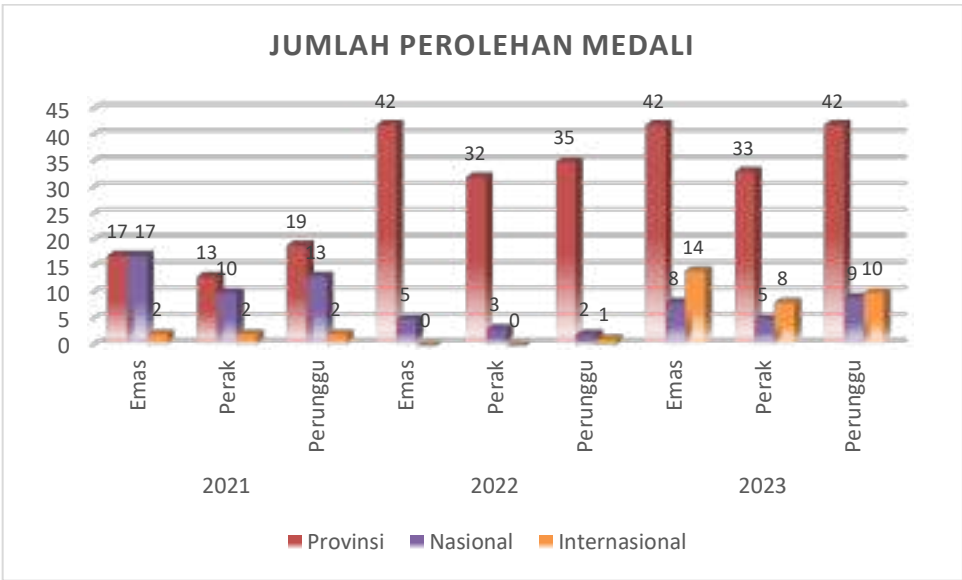
Pada tahun 2023 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Kota Tasikmalaya tercatat 91 (sembilan puluh satu) OKP, dan OKP yang telah dibina adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) OKP. Presentase OKP yang dibina melebihi target karena terdapat penambahan sasaran OKP yang dibina dari 27 (dua puluh tujuh) OKP menjadi 29 (dua puluh sembilan) OKP. Presentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi dapat melebihi dari target yang telah ditentukan dari 34,15 persen atau dengan perolehan medali sebanyak 22 medali tingkat provinsi. Pada tahun 2023 terdapat banyak event olahraga digelar, sehingga prestasi olahraga di tingkat provinsi meningkat.

Perolehan medali pada tahun 2023 mengalami peningkatah dari tahun sebelumnya, perolehan medali emas pada kejuaraan tingkat provinsi, nasional dan



internasional tercatat sebanyak 42 medali, sedangkan perolehan perak dan perunggu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Cabang olahraga yang paling banyak menyumbangkan medali di tingkat provinsi, nasional dan internasional pada tahun 2023 adalah taekwondo, yakni sebanyak 18 medali. Selain itu, perolehan medali di tingkat internasional diperoleh dari Paragym. Perolehan medali di tingkat provinsi pun didominasi oleh cabang olahraga taekwondo dan atletik dalam Peparda. Data perolehan medali pada cabang olahraga berprestasi tingkat provinsi, nasional, dan internasional tahun 2023 dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2.40.
Perolehan Medali Cabang Olahraga Beprestasi
Kota Tasikmalaya Tahun 2021 - 2023



Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, 2024.

2.1.3.2.14. Statistik

Pelaksanaan urusan stasistik di Kota Tasikmalaya dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.97.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Statistik
Tahun 2021-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2021		2022		2023	
			Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realisasi
1	Persentase data dan informasi statistik sektoral	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pengelolaan basis data/Informasi dan statistik terpadu	%	100	100	100	100	-	-
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	-	-	-	-	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, 2024.



Implementasi optimalisasai dalam pengelolaan data statistik telah dibangun Open Data Kota Tasikmalaya dari kumpulan data dan informasi semua Perangkat Daerah yang telah diolah dan dianalisa dapat diakses oleh masyarakat secara online melalui media sosial.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya mendapatkan penghargaan OPD Ter-CANTIK (Ter Cinta Statistik) pada hari Statistik Nasional Tahun 2023 dari BPS Kota Tasikmalaya.

2.1.3.2.15. Persandian

Pelaksanaan urusan persandian di Kota Tasikmalaya dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya. Urusan persandian ini berkaitan dengan keamanan informasi kedinasan.

Tabel 2.98.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Persandian
Tahun 2021-2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2021		2022		2023	
			T	R	T	R	T	R
1	Capaian penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	%	-	-	60	63,64	41	48,21
2	Persentase Area Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	50	33,33	60	63,64	-	-
3	Jumlah Area Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Area	8	N/A	-	-	-	-
4	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan/Perwal	2	N/A	-	-	-	-
5	Jumlah Jenis Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jenis	3	N/A	-	-	-	-
6	Persentase jumlah Insiden Kemanan Informasi yang tertangani	%	100	100	100	100	-	-
7	Persentase tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah	%	-	-	-	-	41	48,21

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, 2024.

Capaian kinerja indikator penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi merupakan Realisasi Area Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah terhadap total Area Pengendalian Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Sedangkan Persentase tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah adalah capaian yang dihasilkan berdasarkan standar internasional indeks KAMI (Keamanan Informasi) ISO 27001. Capaian penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2022 dan 2023 terdapat perbedaan formulasi, sehingga target indikatornya pun berbeda. Pada tahun 2023 capaian tingkat keamanan Informasi Pemerintah di Kota Tasikmalaya sebesar 48,21 persen dari target sebesar 41,00 persen.



2.1.3.2.16. **Kebudayaan**

Capaian pelaksanaan urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.99.

Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kebudayaan Tahun 2021-2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Pengembangan Kebudayaan	%	57	57,97	61	63,77	63,73	64,65
2	Persentase pembinaan dan pengembangan seni budaya	%	20	20,23	20	20,33	-	-
3	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	%	50	50	50	50	25	25
4	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	34	35,38	40	40	46,15	46,15
5	Presentase Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	%	-	-	-	-	63,73	64,65
6	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Tradisional	%	-	-	-	-	25	25,43

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, 2024.

Sebagai upaya perlindungan cagar budaya dan seni di Kota Taikmalaya telah dilaksanakan pelestarian dengan capaian sebagai berikut.

Tabel 2.100.

Data Cagar Budaya dan Kelompok Seni Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2023

No	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
1	Jumlah Cagar Budaya Yang Terdata	buah	65	65	65
2	Jumlah Cagar Budaya Terdata Yang Dilestarikan	buah	23	26	30
3	Jumlah Grup Kesenian Yang Dibina	buah	35	35	44

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2022.

Tabel 2.101.

Data Cagar Budaya Kota Tasikmalaya

No	Nama Benda, Situs & Kawasan Cagar Budaya	Alamat	No dan tanggal Surat Keputusan/Ketetapan Sebagai Benda, Situs & Kawasan Cagar Budaya
1	<u>Tugu Peta</u>	Jl. Veteran	PO2018121300012
2	<u>Tugu 0 Km</u>	Jl.Dr. Sukarjo	PO2018121300009
3	Cilamajang Kota TasikmalayaJawa Barat	Cilamajang	PO2018121300018
4	<u>Makam Gn. Subang</u>	Lintasan Mangkubumi – Indihiang	PO2016061000161
5	<u>Komplek Makam SyehTubagus Abdullah</u>	Sukaasih	PO2016060900121
6	<u>Makam (Mesjid) H. Bakri</u>	Hz. Mustopa	PO2016061000356
7	<u>Makam Gn Saena</u>	Citamiang	PO2018121300019



No	Nama Benda, Situs & Kawasan Cagar Budaya	Alamat	No dan tanggal Surat Keputusan/Ketetapan Sebagai Benda, Situs & Kawasan Cagar Budaya
8	<u>Makam Eyang CakraNingrat</u>	Ciseeng BabaknArsi	PO2018121300015
9	Punden Berundak, Gunung Pa Jahim	Leuwiliang, Kawalu	-
10	<u>Makam H Hasan</u>	Babakan Peundeuy	PO2018121300020
11	<u>Makam Dalem Patuakan</u>	Tanjung Kota TasikmalayaJawa Barat	PO2018121300014
12	<u>Makam Eyang Patinggi</u>	Leuwiliang	PO2018121300016
13	<u>Makam DalemKutawaringin</u>	Lewiliang	PO2018121300017
14	<u>Lingga Yoni</u>	Lintasan Mangkubumi Indihiang	PO2016061000161
15	<u>Tugu Istiwa</u>	Citamiang	PO201812130002
16	<u>Makam Nyimas Saena</u>	Tanjung	PO2018121300021
17	Naskah Wasiat Sukapura (Manuskrip)	Tawang	-
18	Naskah Ndalem Patuakan	Jln. Komarasari Tawang	
19	Makam Sakarembong	Jl. Bantar,bantarsari Kota tasikmalaya	
20	Makam Eyang Jiwaraga	Kp Nagrog	
21	Makam Eyang Prabudilaya	Kota Tasikmalaya Jawa Barat	
22	Makam Syekh Abdul Gharib	Cibeas Kota Tasikmalaya	
23	Makam Eyang Cakraningrat		

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2024.

2.1.3.2.17. Perpustakaan

Pelaksanaan urusan perpustakaan di Kota Tasikmalaya dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Capaian pelaksanaan urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.102.

Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perpustakaan Tahun 2021 – 2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Kesesuaian dengan Standar Nasional Perpustakaan	%	35	35,19	37	37,47	38	39,84
2	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	14	71,52	17	51,39	20	38
3	Persentase pembinaan perpustakaan	%	5,53	5,53	5,53	5,53	4,42	0,74

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tasikmalaya, 2024.

Jumlah perpustakaan di Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.



Tabel 2.103.
Data Perpustakaan Kota Tasikmalaya Tahun 2021

No	Jenis Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan	Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan	Jumlah Koleksi		Jumlah Pengunjung/ Hari	Jumlah Anggota Perpustakaan
				Judul	Eksemplar		
A	PERPUSTAKAAN UMUM	119	320	80.148	141.659	349	4.068
1	Perpustakaan Kab/Kota	1	5	26.948	49.359	75	1.228
2	Perpustakaan Kelurahan	69	207	33.750	67.350	69	690
3	Perpustakaan Kecamatan	10	30	5.000	10.000	10	200
4	Taman Bacaan Masyarakat	39	78	14.450	14.950	195	1.950
B	PERPUSTAKAAN SEKOLAH	714	1.135	448.132	1.018.177	18.582	193.126
1	Perpustakaan SD	231	502	152.699	354.577	4.620	50.007
2	Perpustakaan MI	53	-	-	-	-	-
3	Perpustakaan SMP	76	151	82.833	209.560	3.700	37.950
4	Perpustakaan MTS	55	111	53.704	107.442	2.750	26.833
5	Perpustakaan SMA Negeri	10	21	12.896	54.598	1.000	10.436
6	Perpustakaan SMA swasta	20	40	20.000	40.000	400	10.000
7	Perpustakaan MA Negeri	3	6	3.000	6.000	300	3.000
8	Perpustakaan MA Swasta	34	68	34.000	68.000	680	17.000
9	Perpustakaan SMK Negeri	4	8	4.000	8.000	400	4.000
10	Perpustakaan SMK Swasta	50	100	50.000	100.000	1.000	25.000
11	Perpustakaan SLB	6	12	6.000	12.000	120	300
12	Perpustakaan Pondok Pesantren	172	116	29.000	58.000	3.612	8.600
C	PERPUSTAKAAN KHUSUS	54	57	30.500	68.000	152	2.600
1	Perpustakaan Rumah sakit	1	1	500	1.500	2	50
2	Perpustakaan Puskesmas	20	20	10.000	20.000	40	1.000
3	Perpustakaan OPD Kab/Kota	26	26	12.000	36.000	48	1.200
4	Perpustakaan Bank	2	5	5.500	5.500	20	100
5	Perpustakaan Vertikal	4	4	2.000	4.000	40	200
6	Perpustakaan PKK Kabupaten/Kota	1	1	500	1.000	2	50
D	PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI	20	49	54.133	117.004	483	15.626
1	Perpustakaan PT Negeri	3	19	18.000	49.000	160	5.000
2	Perpustakaan PT Swasta	17	30	36.133	68.004	323	10.626
	JUMLAH	907	1.561	612.913	1.344.840	19.566	215.420

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, 2022



2.1.3.2.18. Kearsipan

Pelaksanaan urusan perpustakaan di Kota Tasikmalaya dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Capaian pelaksanaan urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.104.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kearsipan
Tahun 2021 – 2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal	Point	-	-	77	56,05	44,80	61,66
2	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Point	-	-	51,07	54,73	52,43	59,03
3	Persentase kesesuaian kinerja kearsipan pada Lembaga Kearsipan Daerah	%	-	-	-	-	37,48	58,40
4	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai pengawasan kearsipan internal minimal kategori cukup	%	63,89	63,89	70,27	55,56	77,78	83,33

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tasikmalaya, 2024.

2.1.3.3. Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.3.1. Kelautan Dan Perikanan

Potensi areal perikanan di Kota Tasikmalaya sebesar 692,27 Ha, terdiri dari kolam pembenihan 19,49 Ha, kolam pembesaran 621,23 Ha, sawah irigasi untuk pengembangan minapadi seluas 51,42 Ha dan kolam air deras 0,14 Ha.

Aktifitas ekonomi di sektor perikanan melibatkan 393 kelompok pembudidaya ikan yang terdiri dari 375 pokdaan, 15 poklahsar dan 3 pokmaswas dengan jumlah anggota kelompok sebanyak 4.842 orang. Aktivitas di sector perikanan secara juga didukung oleh 2 Unit Pelaksana Teknis Dinas dan 1 unit pelayanan yaitu UPTD Balai Benih Ikan (BBI), UPTD Pengembangan Produksi Ikan dan Unit Pelayanan Pengembangan (UPP). Selain itu terdapat 61 Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang mendukung ketersediaan benih ikan di Kota Tasikmalaya.

Menurut kategori teknologi yang digunakan, aktivitas budidaya ikan di Kota Tasikmalaya sebagian besar dilakukan dengan semi intensif (51%), dan menggunakan teknologi yang sederhana (48,7%). Hanya 0,3% yang berbudidaya ikan secara intensif. Teknologi budidaya intensif adalah teknologi yang cukup maju dalam budidaya perairan. Budidaya Semi Intensif merupakan sistem budidaya peralihan, antara budidaya alami (esktensif/sederhana) dan budidaya intensif (buatan/perlakuan khusus). Hal ini sangat mempengaruhi terhadap produksi ikan di Kota Tasikmalaya.

Produksi perikanan dalam kurun waktu tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.105.
Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan
Tahun 2021-2023

No.	Komoditas	2021 (Ton)	2022 (Ton)	2023 (Ton)
1	Mas	2004,39	1.850,20	1.692,08
2	Nila	2188,93	2.340,40	2.518,42
3	Nilem	1243,34	1.250,41	1.239,09
4	Mujair	465,49	467,03	465,03
5	Lele	1489,55	1.494,50	1.511,60
6	Gurame	744,77	747,24	643,24
7	Tawes	1109,16	1.106,30	1.157,00
8	Tambakan	465,48	467,02	463,32
9	Ikan Lainnya	279,28	280,21	270,30
	Jumlah	9.990,39	10.003,31	9.960,08

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2024.

Pelaksanaan urusan perikanan di Kota Tasikmalaya menjadi wewenang Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Berikut disajikan data pelaksanaan pelayanan umum urusan Perikanan.

Tabel 2.106.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perikanan Tahun 2021 - 2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Wirausaha Baru Sektor Perikanan	Orang	150	150	150	196	-	-
2	Capaian produksi perikanan budidaya	Ton	10.400	9.990,39	10.000	10.003,31	-	-
3	Angka produksi hasil perikanan	Ton	199,39	312,78	197	333,1	-	-
4	Tingkat pengembangan kawasan budidaya air tawar	%	40	53,88	40	69,28	-	-
5	Jumlah masyarakat miskin sektor perikanan yang dibina	Orang	75	75	75	75	-	-
6	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	-	-	-	-	10.000	9.960,08
7	Produksi produk hasil olahan perikanan	Ton	-	-	-	-	300	335,497
8	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/ Tahun	-	-	-	-	22,25	23,41

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2024.

2.1.3.3.2. Pariwisata

Pariwisata di Kota Tasikmalaya mempunyai potensi pertumbuhan yang cukup besar. Secara lebih detail data objek wisata dan daya tarik wisata di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.107.
Data Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata di Kota Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Nama Objek Wisata	Klasifikasi Objek Wisata	Lokasi	Keterangan
1	Kawalu	1. Makam Syekh Abdul Ghorib	Wisata Budaya	Kel. Gunung Gede Kecamatan Kawalu	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Air Tanjung	Wisata Alam	Jl. Air Tanjung-Tasikmalaya	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		3. Bordir Kawalu	Wisata Minat Khusus	Jl. Perintis Kemerdekaan, Karsamenak	Produk Wisata Yang Sudah Dikembangkan
		4. Kampung Salapan (Hutan Urug) - Gua Sarongge - Curug Sawidak - Puncak Nangela - Cadas Ngampar	Wisata Alam	Jl. Syekh Abdul Muhyi	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		5. Bukit Lestari	Wisata Alam	RT 03 RW 03 Kel. Leuwiliang	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		6. Arung Jeram Sungai Ciwulan	Wisata Alam	Jl. Syekh Abdul Muhyi	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		7. Dalem Patuakan	Wisata Budaya	Tanjung 02/04	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		8. Makam Guning Saena	Wisata Budaya	Citamiang 06/08	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		9. Tugu Istiwa	Wisata Budaya	Citamiang 02/08	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		10. Makam H.M. Bakri	Wisata Budaya	Citamiang 02/08	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		11. Makam Eyang Ciseeng/ Cakraningrat	Wisata Budaya	Babakan Arsi 03/06	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		12. Makam H. Hasan	Wisata Budaya	Babakan Peundeuy 007	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		13. Makam Gn. Subang	Wisata Budaya	Cilamajang, Kawalu	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		14. Makam Eyang Patinggi	Wisata Budaya	Leuwiliang, Kawalu	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
2	Tamansari	1. Situ Cibeureum	Wisata Alam	Kel. Tamanjaya	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Kelom Gelis	Wisata Minat Khusus	Kp. Gobras Kel. Sukahurip	Produk Wisata Yang Sudah Dikembangkan
		3. Curug Tonjong	Wisata Alam	Kel. Setiawargi	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan



No.	Kecamatan	Nama Objek Wisata	Klasifikasi Objek Wisata	Lokasi	Keterangan
		4. Situ Malingping	Wisata Alam	Kel. Tamanjaya	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		5. Situ Cipajaran	Wisata Alam	Kel.Mugarsari	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		6. Makam Situ Malingping	Wisata Budaya	Kel.Tamanjaya	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		7. Makam Situ Kasindang	Wisata Budaya	Kel. Tamanjaya	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
3	Cibeureum	1. Petilasan Purbasari	Wisata Budaya	Jl. Letkol Basir Surya	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Pasir Pataya	Wisata Rekreasi	Kel. Ciakar	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		3. Perkebunan Salak	Wisata Minat Khusus	Peundeuy, Kel. Ciakar	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
4	Purbaratu	1. Arung Jeram sungai Citanduy	Wisata Alam	Kel. Sukajaya	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		2. Wisata Edukasi Bambu	Wisata Minat Khusus	Kel. Sukajaya	Produk Wisata potensial yang belum dikembangkan
		3. Makam Syekh Kusumayuda	Wisata Budaya	Kel. Sukajaya	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		4. Makam Tubagus Abdulah	Wisata Budaya	Purbaratu	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		5. Makam Jiwa Raga	Wisata Budaya	Purbaratu	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		6. Kampung Awi	Wisata Alam		Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan
		7. Farm House	Wisata Buatan		Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan
		8. Kerajinan Mendong	Wisata Kriya		Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan
5	Tawang	1. Kuliner Tawang	Wisata Minat Khusus	Jl. BKR, Jl. Kolektoran	Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan
		2. Titik Nol	Wisata Budaya		Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan
		3. Mambo Kuliner	Wisata Kuliner	Jl. Mayor Utarya	Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan
6	Cihideung	1. Pasar Minggu Dadaha	Wisata Minat Khusus	Jl. Dadaha	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		2. Teejay Waterpark	Wisata Rekreasi	Komp. Plaza Asia Jl. KHZ mustofa	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		3. Kolam Renang Asia	Wisata Buatan	Komplek Dadaha	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
7	Mangkubumi	1. Situ Gede	Wisata Alam	Kel. Linggajaya Kecamatan Mangkubumi	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Makam Eyang Prabudilaya	Wisata Budaya	Kel. Batarsari Kecamatan Bungursari	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		3. Mangkubumi Water Park	Wisata Rekreasi	Jl.A.H. Nasution KM. 7	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		4. Kampung Ulin	Wisata Alam	Kel.Linggajaya	Objek Wisata Sudah Dikembangkan



No.	Kecamatan	Nama Objek Wisata	Klasifikasi Objek Wisata	Lokasi	Keterangan
		5. Perkebunan Buah Naga	Wisata Minat Khusus	Jl. Cibeet	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
8	Indihiang	1. Situs Linggayoni	Wisata Budaya	Kel. Sukamaju Kidul	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Payung Geulis Tasik	Wisata Minat Khusus	Kel. Panyingkiran	Produk Wisata Yang Sudah Dikembangkan
		3. Wisata Ciloseh	Wisata Alam	Kel. Panyingkiran	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		4. Lapang Minisoccer (Indosoccernesia)	Wisata Minat Khusus	Kel. Sukamaju Kidul	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		5. Batu Bangkong	Wisata Alam	Kel. Sirnagalih	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		6. Kawasan Cipanyir (Cipedes Panyingkiran)	Wisata Alam	Kel. Panyingkiran	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		7. Babakan Sanca	Wisata Alam	Kel. Sirnagalih	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
9	Bungursari	1. Makam Eyang Dalem Sakarembong	Wisata Budaya	Kel. Bantarsari	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Ma'arif Garden	Wisata Alam	Jl. Sukarindik No.71, Sukarindik	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		3. Mutiara Aboh	Wisata Tirta	Kel. Sukamulya	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
10	Cipedes	1. Taman Rekreasi Karang Resik	Wisata Rekreasi	Jl. Mohamad Hatta, Sukamanah	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Sentra Batik	Wisata Minat Khusus	Jl. Ciroyom No.20, Nagarasari, Kec. Cipedes	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		3. Tebing Putih	Wisata Alam	Kel. Sukamanah	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		4. Budak Capetang	Wisata Buatan	Kel. Sukamanah	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		5. Pesantren Benda 67	Wisata Minat Khusus	Jl. Cisalak No.15, Benda, Nagarasari	Obyek wisata potensial yang belum kembangkan

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, 2024



Apabila dilihat dari capaian kinerja urusan pariwisata di Kota Tasikmalaya, seiring dengan meredanya kasus Covid 19 dan berakhirnya PPKM pada tahun 2022, jumlah kunjungan wisata ke Kota Tasikmalaya setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, kunjungan wisatawan ke Kota Tasikmalaya tercatat sebanyak 642.862 orang terdiri dari 691 orang wisatawan mancanegara dan 642.171 orang wistawan domestik. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 734 orang dari jumlah kunjungan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 642.128 orang wistawan.

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah kunjungan wisata di Kota Tasikmalaya selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Tabel. 2.108.
Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Tasikmalaya
Tahun 2021 - 2023

Tahun	Jumlah Wisatawan (Orang)		Jumlah Total
	Mancanegara	Domestik	
2021	6	483.563	483.569
2022	30	642.098	642.128
2023	691	642.171	642.862

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2024

Untuk mendukung kegiatan pariwisata di Kota Tasikmalaya, maka dibutuhkan sarana pendukung berupa penginapan seperti hotel, guest house, hostel, dan lain sebagainya. Tabel berikut merupakan data sarana penginapan di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.109.
Data Hotel di Kota Tasikmalaya

No.	Nama Hotel	Alamat	Kecamatan
1	Syariah Permata Sahid Hotel	Jl.Brigjen Wasita Kusumah, Indihiang, Indihiang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46151	Indihiang
2	Hotel Ramayana	Jl.Re Martadinata No.333, Panyingkiran, Indihiang, Kota Tasikmalaya 46151	Indihiang
3	Aden 2 Syariah	Jl.Re Martadinata No.268, Panyingkiran, Indihiang, Kota Tasikmalaya	Indihiang
4	Fresh Hotel	Jl.Re Martadinata No.191, Panyingkiran, Indihiang, Kota Tasikmalaya	Indihiang
5	Hotel Srikandi	Jl.Re Martadinata No.266, Panyingkiran, Indihiang, Kota Tasikmalaya	Indihiang
6	Crown Hotel	Jl. Re Martadinata No.45	Cipedes
7	Pondok Tasyiq Guest House	Jl.Cigantang, Kel.Cigantang, Kec.Mangkubumi	Mangkubumi
8	Fave Hotel Tasikmalaya	Jl.Re Martadinata 214, Rt.02/07 Kel.Cipedes, Kec.Cipedes Kota Tasikmalaya Kode Pos 46133	Cipedes
9	Harmoni Hotel	Jl.Rd.Ikik Wiradikarta 51 Tasikmalaya	Tawang
10	Hotel Mandalawangi	Jl.Re Martadinata 177, Tasikmalaya	Cipedes
11	Hotel Horison	Jl. Yudanagara No.16	Cihideung
12	Hotel Padjadjaran	Jl. Ir.H.Djuanda (By Pass)	Mangkubumi
13	Hotel Setuju	Jl.Cieunteung	Mangkubumi
14	Hotel Wijaya Kusumah	Jl. Ir.H.Djuanda (By Pass)	Bungursari
15	Surya Hotel	Jl.Siliwangi No.39 Tasikmalaya	Tawang
16	Mini Guest House	Jl. Cipedes li No.21a	Cipedes



No.	Nama Hotel	Alamat	Kecamatan
17	Hotel Merdeka	Jl.Tarumanegara No.48	Tawang
18	Hotel Priangan	Jl. Kebon Manggu I, Tasikmalaya	Cihideung
19	Shanrilla Hotel	Jl.Perintis Kemerdekaan No.93, Tasikmalaya	Cihideung
20	Hotel Santika	Jl.Yudanagara, No.57	Cihideung
21	Hotel Sartika	Jl.Perintis Kemerdekaan No.244	Kawalu
22	Hotel Sehat	Jl.Mitrabatik No.73	Cipedes
23	Hotel Selamat	Jl.Empang No.26 Tasikmalaya	Tawang
24	Hotel Tasik	Jl.Komalasari No.27 Rt.01 Rw.02, Empangsari	Tawang
25	Hotel Abadi	Jl.Empang No.58 Tasikmalaya	Tawang
26	Hotel Asri	Jl.Hz.Mustofa No.326 Tasikmalaya	Cihideung
27	Hotel Borobudur	Jl.Mayor Sl.Tobing No.25	Cihideung
28	Hotel City (Airy)	Jl.Sukalaya Barat No.50 Tasikmalaya	Cihideung
29	Hotel Amaris	Jl.Khz.Mustofa, Tugujaya, Cihideung	Cihideung
30	Grand Metro Hotel	Jl.Khz.Mustofa No.263, Nagarawangi	Cihideung
31	Hotel Kencana (Reddoorz Syariah)	JL.YUDANAGARA NO.15 TSM	Cihideung
32	Hotel Mangkubumi	Jl.Jendral Ah.Nasution Km.7 Tsm	Mangkubumi
33	Hotel Flamboyan	Jl.Galunggung No.50	Tawang
34	The Arsy Syariah Tasikmalaya Redpartner	Jl. Siliwangi 200-A	Tawang
35	RedDoorz Syariah @ Boemi Guesthouse Tasikmalaya	Jl. Paseh Gg. Gn. Ceuri I-86 RT.06/08	
36	HZ. Residence Tasikmalaya	Jl. HZ. Mustofa 325	Cihideung
37	Graha Martadinata Syariah	Jl. Martadinata 230	Cihideung
38	Oyo 2682 Bumi Eyang Enin Homestay Syariah	Jl. AH. Nasution	
39	RedDoorz Syariah Plus @ Perintis Guesthouse Tasikmalaya	Jl. Perintis Kemerdekaan 36-A	Kawalu
40	De Nanggela Guest House	Jl. PGRI Timur	Kawalu
41	RedDoorz BKR Residence Near Universitas Siliwangi Tasikmalaya	Jl. BKR Siliwangi 2	Tawang
42	Penginapan Homestay Kota Tasikmalaya	Cibeureum Dekat RM	Cibeureum
43	Villa Grand Venezia	Perum Andalusia	Mangkubumi
44	Oyo 2674 Siliwangi Guest House Syariah	Jl. Siliwangi 54-50	Tawang
45	RedDoorz Syariah Villa Grand Mutiara (VGM)	Jl. Bumi Resik Indah Blok Cikanyere Kl. Sukamanah Kc. Cipedes	Cipedes
46	Askara	Jl. Pasar Cikurubuk	Cihideung
47	RedDoorz Syariah Villa Grand Mutiara (VGM)	Jl. Bumi Resik Indah Blok Cikanyere Kl. Sukamanah Kc. Cipedes	Cipedes
48	D'Exclusive Guest House	Jl. Kol. H. Utuy Sobandi Jl. Cigeureung 27 Kl. Nagarasari Kc. Cipedes	Cipedes

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2024.

2.1.3.3.3. Pertanian

Sektor pertanian meliputi sektor pertanian tanaman pangan, sektor tanaman hortikultura, sektor tanaman perkebunan dan sektor peternakan. Produktivitas sektor pertanian ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan lahan. Luas lahan pertanian khususnya lahan sawah di Kota Tasikmalaya sejak tahun



2021 sampai dengan 2023 terus mengalami penurunan karena terjadi alih fungsi lahan sawah ke peruntukan lain. Pada tahun 2021 luas sawah sebesar 5.778 Ha, sementara pada tahun 2023 menjadi 5.728 Ha. Berdasarkan Statistik Pertanian dan Perikanan Perkembangan data luas lahan sawah di Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.110.
Data Luas Sawah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 – 2023

Tahun	Jumlah	Berkurang (Ha)
2021	5.778	12
2022	5.776	2
2023	5.728	48
Jumlah		62

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2024

Potensi sumberdaya pertanian berbentuk kelompok tani sebanyak 699 kelompok terdiri dari kelompok tani dewasa 455 kelompok, kelompok wanita tani (KWT) 161 kelompok, dan taruna tani 83 kelompok dengan jumlah anggota kelompok tani berjumlah 27.573 orang. Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terjadi fluktuasi baik dari jumlah kelompok tani maupun jumlah anggotanya. Berikut disajikan perkembangan kelompok tani di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.111.
Kelompok Tani di Kota Tasikmalaya Tahun 2021 - 2023

Tahun	Kelompok Tani			Jumlah Anggota
	Kelompok Dewasa	KWT	Taruna Tani	
2021	456	145	64	28.047
	665			
2022	452	154	78	21.803
	684			
2023	455	161	83	27.573
	699			

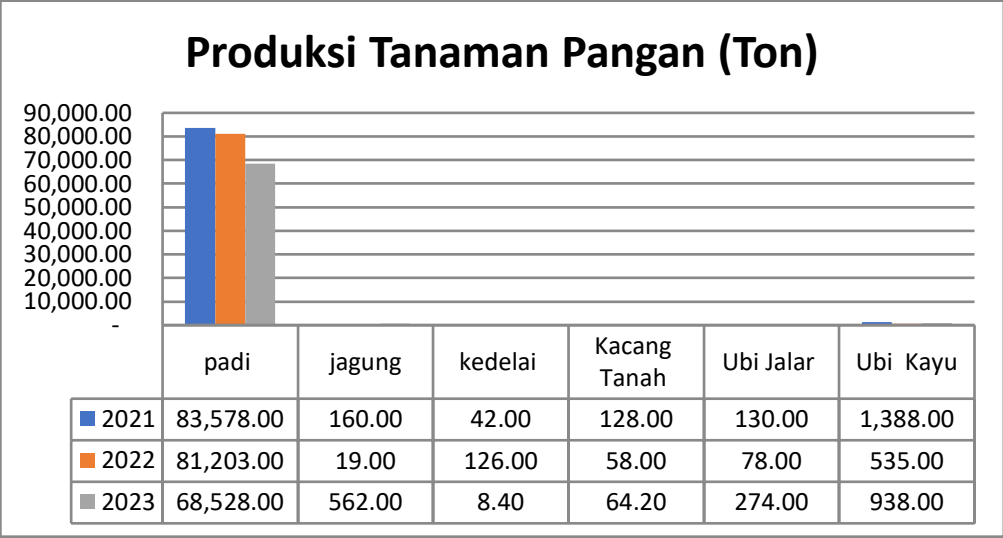
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2024

Penurunan luas lahan sawah dan terjadi kemarau cukup panjang di tahun 2023 menyebabkan produksi padi, sebagai salah satu komoditas sektor pertanian tanaman pangan, mengalami penurunan. Kekeringan berkepanjangan selama beberapa bulan dan puncaknya pada bulan Agustus-September 2023 yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya gelombang El-Nino di daerah Samudera Pasifik, sehingga berdampak pada menurunnya curah hujan di wilayah yang terlewati gelombang tersebut termasuk Indonesia. Dampak yang paling dirasakan oleh petani di Indonesia secara umum adalah terjadinya gagal panen dan berkurangnya musim tanam tanaman pangan terutama padi.

Pada akhir tahun 2023 diketahui bahwa produksi padi hanya mencapai 68.528 ton, jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian produksi tahun 2021 (83.578 ton) dan tahun 2022 (81.203 ton). Namun demikian produksi padi ini masih mendominasi produksi tanaman pangan di Kota Tasikmalaya dibandingkan tanaman pangan lainnya seperti jagung, kedelai, kacang tanah, ubi jalar dan ubi kayu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.41.
Produksi Tanaman Pangan di Kota Tasikmalaya Tahun 2021 – 2023



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2024

Padi juga merupakan komoditas pangan utama yang dikonsumsi masyarakat Kota Tasikmalaya. Jika konversi dari gabah ke beras sebesar 62,74 persen maka produksi beras di Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 sebanyak 42.994 ton turun dari tahun 2022 seiring turunnya produksi padi. Dengan jumlah penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 sebanyak 741.760 orang, dan diasumsikan kebutuhan beras per kapita/tahun sebanyak 100 kg/kapita/tahun dengan demikian kebutuhan beras seluruh penduduk Kota Tasikmalaya selama satu tahun sebanyak 74.176 ton. Sehingga produksi beras di Kota Tasikmalaya belum dapat memenuhi kebutuhan makan penduduknya. Berdasarkan data tersebut di atas, produksi beras di Kota Tasikmalaya baru memenuhi 57,96 persen dari total kebutuhan. Terdapat defisit beras sebanyak 31.182 ton atau 42,04 persen.

Sektor tanaman hortikultura di Kota Tasikmalaya terdiri dari tanaman hortikultura sayuran dan tanaman hortikultura buah-buahan. Komoditas tanaman hortikultura sayuran terdiri dari komoditas cabe besar, cabe rawit, tomat, ketimun, petsai/sawi, dan kacang panjang. Sementara komoditas tanaman hortikultura buah-buahan terdiri dari komoditas salak, pisang, rambutan, mangga, pepaya, durian dan manggis.

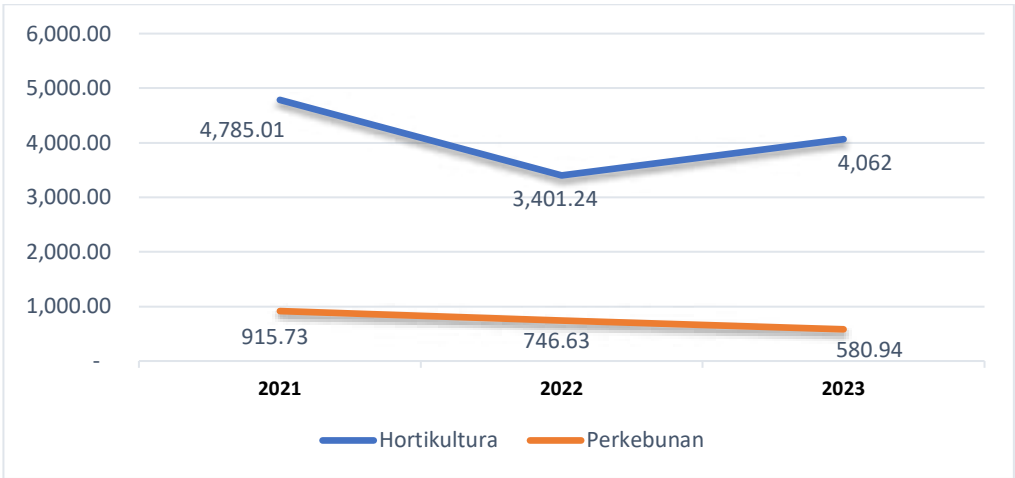
Sama halnya dengan tanaman pangan, pada sektor tanaman hortikultura di Kota Tasikmalaya mengalami fluktuasi produksi akibat kekeringan yang berkepanjangan. Beberapa komoditas tanaman hortikultura yang memang berkarakter tahan terhadap kemarau yang cukup panjang dapat berproduksi lebih maksimal seperti cabe rawit, tomat, jamur, mangga, durian dan manggis. Sementara komoditas tanaman hortikultura yang kurang tahan terhadap cuaca panas/kering dan memerlukan asupan air yang cukup seperti: cabe besar, salak, rambutan dan papaya, pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun secara keseluruhan, produksi tanaman hortikultura mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Selain itu terdapat juga komoditas tanaman perkebunan yang terdiri dari komoditas mendong, kelapa, lada, kakao, pala, kopi dan tembakau. Produksi tanaman hortikultura tahun 2023 meningkat dari 3.401,24 ton pada tahun 2022 menjadi 4.062 ton pada tahun 2023. Hal ini terjadi karena kemarau cukup



panjang, banyak sawah yang ditanami tanaman hortikultura Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar. 2.42.
Produksi Hortikultura dan Perkebunan di Kota Tasikmalaya
Tahun 2021-2023 (Ton)



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2024

Komoditas sektor peternakan terdiri dari ternak besar seperti sapi, kambing dan domba serta unggas seperti ayam, itik dan puyuh. Selain itu terdapat produksi hasil peternakan seperti daging, telur dan susu. Populasi ternak besar dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan walau dengan angka yang kecil.

Produksi sapi potong dari tahun 2021 sampai 2023 terus menurun, ayam ras pedaging dan petelur populasinya meningkat, sedangkan untuk kambing, itik, domba, puyuh berfluktuasi selama 3 tahun. Perkembangan populasi ternak dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.112.
Perkembangan Populasi Ternak di Kota Tasikmalaya
Tahun 2021 – 2023 (Ekor)

Komoditas	2021	2022	2023
Sapi Potong	2.911	2.878	2.774
Sapi Perah	212	210	202
Kerbau	680	680	680
Kuda	445	443	442
Kambing	3.156	3.304	3.313
Domba	13.119	13.297	13.279
Babi			
Ayam Buras	731.221	731.601	731.293
Ayam Ras Petelur	136.080	142.080	144.090
Ayam Ras Pedaging	1.090.762	1.093.762	1.095.145
Itik	46.729	46.729	46.279
Puyuh	29.859	33.859	33.859

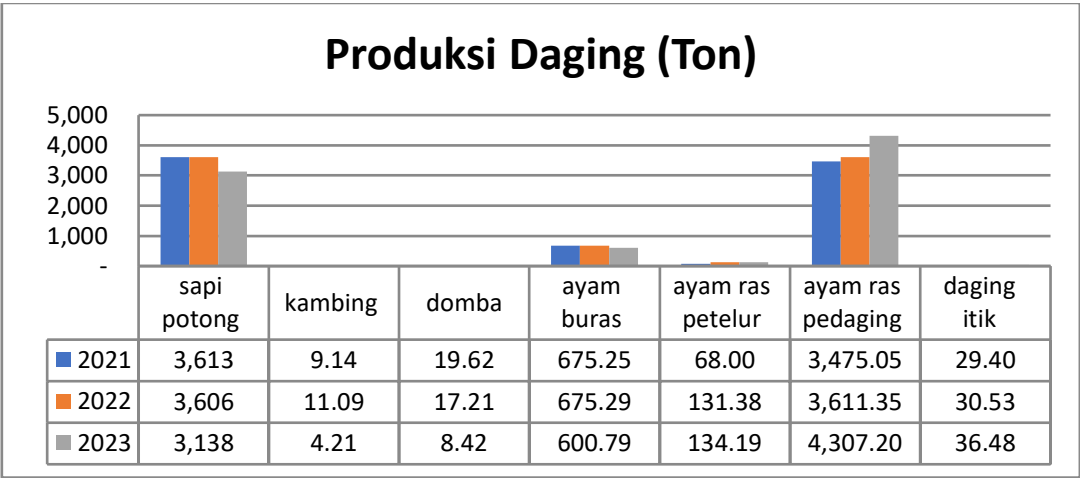
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2024

Sementara produksi daging dalam 3 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang tidak stabil. Produksi daging di Kota Tasikmalaya didominasi daging sapi potong dan daging ayam ras. Produksi daging ayam ras lebih banyak daripada



produksi daging sapi dan trennya terus meningkat selama 3 tahun terakhir seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

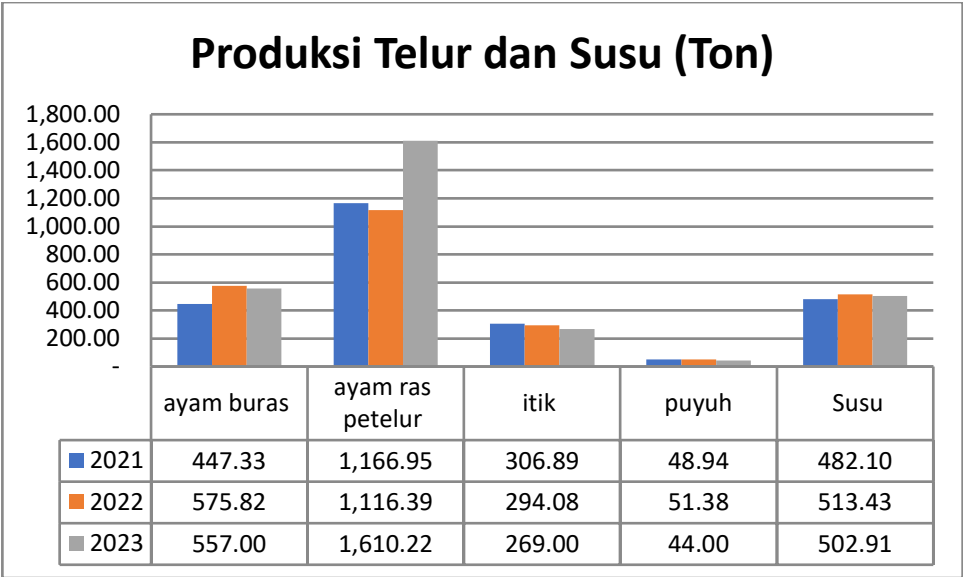
Gambar 2.42.
Perkembangan Produksi Daging di Kota Tasikmalaya
Tahun 2021 - 2023



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2024

Produksi telur didominasi oleh telur ayam ras petelur dan telur ayam bukan ras. Produksi telur ayam ras petelur meningkat tajam di tahun 2023 yang mencapai 1.610,22 ton dari 1.116,39 ton pada tahun 2022.

Gambar 2.43.
Perkembangan Produksi Telur dan Susu di Kota Tasikmalaya
Tahun 2021 - 2023



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2024

Produksi telur ayam ras pada tahun 2020 mencapai 1.190,61 ton, turun pada tahun 2021 menjadi 1.166,95 ton dan pada tahun 2022 turun kembali menjadi 1.116,39 ton. Untuk produksi telur ayam bukan ras, itik serta puyuh relative stagnan. Perkembangan produksi telur di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Di sektor peternakan, sarana prasarana milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang ada saat ini untuk memenuhi kebutuhan daging hewan adalah Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pasar Hewan. Untuk memenuhi daging yang



aman, sehat, utuh dan halal perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana memadai sesuai dengan standar teknis RPH, sehingga masih perlu dilakukan berbagai perbaikan dan pemeliharaan RPH dan Pasar Hewan. Untuk ternak unggas, saat ini Pemerintah Kota Tasikmalaya belum memiliki Rumah Potong Unggas, saat ini pemotongan unggas dilakukan tersebar oleh para pedagang unggas di pasar-pasar, dan belum memenuhi kaidah-kaidah keamanan dan kesehatan.

Tabel 2.113.
Capaian Pelayanan Umum Urusan Pertanian
Tahun 2021 – 2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Produksi Hortikultura dan Perkebunan	Ton	-	-	-	-	5.900	4.642,79
2	Jumlah petani miskin yang dibina	Orang	225	225	225	245	-	-
3	Capaian Produksi Tanaman Pangan	Ton	73.400	85.384	70.200	82.019	-	-
4	Produksi Tanaman Pangan	Ton	73.400	85.384	70.200	82.019	85.500	70.374,60
5	Persentase peningkatan populasi ternak	%	1	-1,59	1	0,67	1	0,12
6	Produksi Hasil Peternakan	Ton	-	-	-	-	10.350	11.212
7	Jumlah Wirausaha baru sektor pertanian	Orang	300	295	365	370	-	-
8	Cakupan bina kelompok petani	Kelompok	198	199	120	251	-	-
9	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Kwintal/ hektar	63	62,9	63	62,68	62,9	62,64
10	Capaian produksi Hasil peternakan	Ton	8.000	10.347	9.200	10.634	-	-
11	Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	%	100	100	100	100	-	-
12	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	%	30	4,35	30	3,8	4,5	1,14
13	Produksi pertanian dan perikanan	Ton	-	-	-	-	112.000	96.189,88
14	Persentase penanganan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-	-	-	-	100	100
15	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian	%	-	-	-	-	75	48,87
16	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	izin	-	-	-	-	3	67

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2024.

2.1.3.3.4. Perdagangan

Perekonomian Kota Tasikmalaya banyak didorong dan didukung oleh kategori perdagangan. Pasar rakyat di wilayah Kota Tasikmalaya semakin penting sebagai pusat lalu lintas perdagangan hasil pertanian dan hasil industri kecil menengah dari dan ke berbagai wilayah kabupaten/kota sekitarnya. Saat ini, Pasar Cikurubuk menjadi pasar induk hasil bumi bagi masyarakat di wilayah Priangan Timur, yang mampu memasarkan berbagai produk hasil pertanian paling



lengkap, seperti: beras, sayuran, daging, ikan, telur dan lainnya serta hasil industri kecil menengah seperti alas kaki dan bordir.

Tabel 2.114.
Jumlah Pasar Rakyat Tahun 2023

No.	Nama Pasar	Alamat	Tahun Pembangunan	Luas			Jumlah	
				Tanah (m2)	Bangunan (m2)	Lantai	Los	Kios
1	Pasar Cikurubuk	Jl. Residen Ardiwinangun, Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi	1994	43.120	25.650	1	50	2.772
2	Pasar Pancasila	Jl. Pancasila, Kel. Lengkongsari Kec. Tawang	1995	6.540	4.656	2	60	334
3	Pasar Indihiang	Jl. Letnan Harun, Kel. Sukamaju Kaler Kec. Indihiang	1997	10.622	743	1	0	402
4	Pasar Padayungan	Jl. Perintis Kemerdekaan, Kel. Tugujaya Kec. Cihideung	1995	9.000	1.968	1	0	261
5	Pasar Cibeuti	Jl. Raya Cibeuti Kel. Cibeuti Kec. Kawalu	1990	696	691	1	12	44
6	Pasar Gegernoong	Jl. Raya Tamansari Kel. Tamanjaya Kec. Tamansari	1999	1.000	538	1	0	91
7	Pasar Burung dan Besi	Jl. Kh. Ez. Mutaqien, Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi	1997	6.407	444	1	0	244
8	Pasar Nyemplong/ Sindang Hayu	Setiawargi Kel. Setiawargi Kec. Tamansari	2016	5.650	1.364	1	26	0
9	Pasar Cibeureum	Jl. Kh. Khoer Affandi Kel. Margabakti Kec. Cibeureum	2018	4.630	2.989	1	128	78
10	Pasar Purbaratu	Kp. Ciwasmendi. Kel. Singkup Ke. Purbaratu	2019	938	303	1	18	8

Sumber: Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2024.

Selain pasar rakyat tersebar pula pusat perbelanjaan dan toko swalayan sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP untuk pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP untuk toko swalayan. Berikut sebaran pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.115.
Sebaran Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan

NO	KECAMATAN	PELAKU USAHA YANG TELAH MEMILIKI IZIN
1	CIHIDEUNG	99
2	CIPEDES	102
3	TAWANG	106
4	INDIHIANG	163
5	KAWALU	69
6	CIBEUREUM	65
7	TAMANSARI	57
8	MANGKUBUMI	188
9	BUNGURSARI	63
10	PURBARATU	31
JUMLAH		943

Sumber: Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2024.



Data lebih lanjut mengenai pelaku usaha perdagangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.116.
Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan

No.	Jenis	Jumlah
1	Usaha Mikro yang Sudah Terdaftar	120
2	Usaha Mikro Anggota Koperasi LPM	2.332
3	PKL Kojengakang	780
4	PKL sepanjang jalan Kota Tasikmalaya (21 ruas jalan)	1.371
5	PKL Selter Lingkar Dadaha	140
6	Peserta Program Kemiskinan	600
	Jumlah	4.784

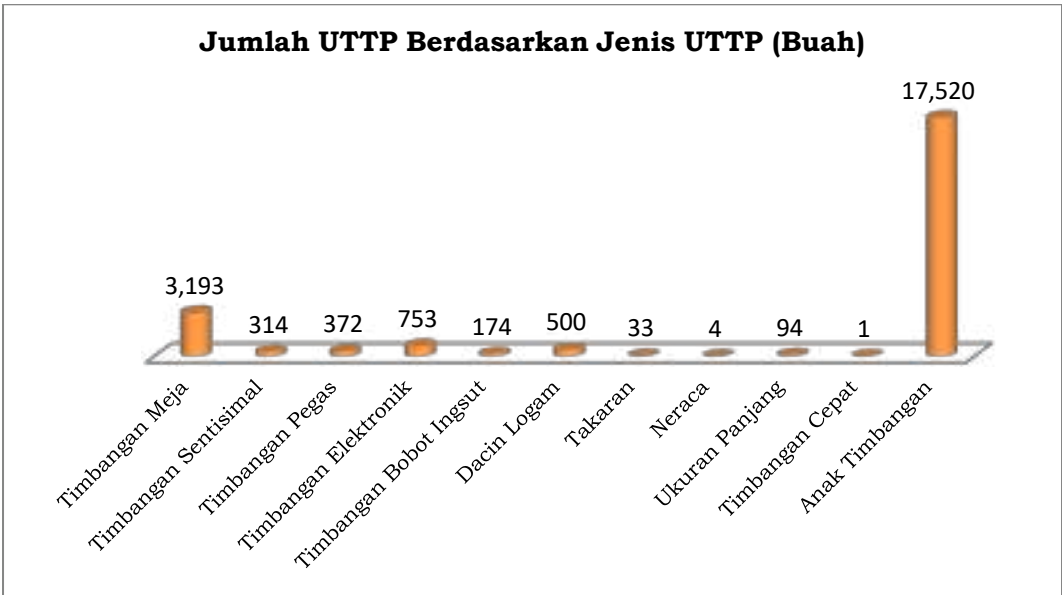
Sumber: Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2024.

Di Kota Tasikmalaya juga telah ada pelaku usaha berorientasi ekspor yaitu: PT. Wahana Tatanan Insani, PT. Via Motif, PT. Bineatama Kayone Lestari, PT. Goenoeng Poetri Lestari, PT. Tjiwulan Putra Mandiri, CV. Putra Jaya Abadi, PT. Gema Galunggung Perkasa, CV YD Anugrah. Pada tahun 2023 nilai ekspor mampu tumbuh 56 persen dari tahun 2022 dari \$19.854.481,99 tahun 2022 menjadi \$31.032.167,26 pada tahuun 2023.

Sebagai implementasi dari amanat Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib untuk pelaksanaan tera, tera ulang dan pengawasan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertujuan guna melindungi kepentingan umum sehingga mendapatkan kepastian hukum dalam hal kebenaran pengukuran.

Jenis dan jumlah UTTP yang dimiliki pedagang di Pasar Rakyat dan Pasar Swalayan serta yang dimiliki masyarakat di 10 kecamatan Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Total ada 22.958 UTTP dari berbagai jenis yang dimiliki pelaku usaha di Pasar Rakyat dan Pasar Swalayan serta masyarakat di 10 kecamatan.

Gambar 2.44.
Jumlah UTTP Berdasarkan Jenis UTTP



Sumber: Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2024



Pemilik UTTP juga tersebar di SPBU, SPBE, Perum Bulog, Perusahaan Ekspedisi, Kantor Pos, Tempat Pelayanan Kesehatan dan perusahaan lainnya dengan jumlah jenis UTTP sebanyak 30 jenis sebanyak 1.059 buah. Ada juga UTTP yang terpasang di Pelanggan Air dan Listrik di 10 kecamatan sebanyak 27.467 meter air dan 220.513 kWh meter.

Meskipun kategori perdagangan sudah cukup baik tetapi masih perlu peningkatan pada sarana dan prasarananya. Pasar-pasar tersebut secara bertahap harus ditingkatkan kebersihan, ketertiban dan kenyamanannya untuk meningkatkan daya saing dengan pasar-pasar modern atau pusat perbelanjaan dan minimart yang ada.

Tabel 2.117.
Capaian Pelayanan Umum Urusan Perdagangan
Tahun 2021 - 2023

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2021		2022		2023	
			Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
1	Persentase hasil pengawasan metrologi legal dalam kondisi baik	%	-	-	80	88,9	-	-
2	Persentase alat UTTP yang bertera sah	%	88	109	80	88,9	80	100,08
3	Jumlah wirausaha baru sektor perindustrian dan perdagangan yang dibina	Orang	-	-	-	508	-	-
4	Jumlah masyarakat miskin sektor perindustrian dan perdagangan yang dibina	Orang	-	-	200	35	-	-
5	Persentase peningkatan pelaku usaha berorientasi ekspor	%	3	1	3	0,47	1	0
6	Persentase peningkatan omset pelaku usaha	%	5	-6,64	5	2,97	-	-
7	Nilai ekspor bersih	US\$ (ribuan)	41.000	31.459.43	42.000	19.854,48	-	-
8	Persentase fasilitasi pemenuhan perizinan dan pendaftaran perusahaan	%	100	100	100	100	100	100
9	Persentase pasar rakyat dalam kondisi baik	%	100	80	100	100	70	80
10	Persentase Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil	%	72	54,5	72	34,5	40	21,31
11	Persentase peningkatan penggunaan produk unggulan kota tasikmalaya	%	88	88,9	88	66,7	10	3,7
12	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	-	-	-	-	4,59	5,01
13	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekpor	%	-	-	-	-	2	56,29

Sumber: Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2024.

2.1.3.3.5. Perindustrian

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu sektor usaha yang mempunyai peranan cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional. Disamping mampu menyerap tenaga kerja dan menyediakan lapangan usaha secara dominan, IKM juga memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat luas. IKM Kota Tasikmalaya terus tumbuh baik unit industri maupun penyerapan tenaga kerja. Mengacu dari data NIB yang dikeluarkan oleh DPMPST



dan IUI Dinas KUKM Perindag, Unit industri Kota Tasikmalaya Tahun 2023 mampu tumbuh 183,5 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Pertumbuhan unit industri ini dipacu adanya *self declare* sertifikasi halal dari Kementerian Agama. Berikut adalah perkembangan jumlah unit industri di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.118.
Perkembangan Jumlah Unit Industri Kota Tasikmalaya
Tahun 2022 – 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH INDUSTRI TAHUN 2022			JUMLAH INDUSTRI TAHUN 2023		
		KECIL	MENENGAH	JUMLAH	KECIL	MENENGAH	JUMLAH
1	CIHIDEUNG	350	37	387	1126	38	1164
2	CIPEDES	536	59	595	1260	59	1319
3	TAWANG	328	21	349	1822	21	1843
4	INDIHIANG	260	15	275	764	15	779
5	KAWALU	1338	175	1513	2557	175	2732
6	CIBEUREUM	275	34	309	990	34	1024
7	TAMANSARI	553	78	631	1473	78	1551
8	MANGKUBUMI	603	84	687	1413	85	1498
9	BUNGURSARI	262	26	288	949	27	976
10	PURBARATU	196	26	222	1987	26	2013
JUMLAH TOTAL				5.256			14.899

Sumber: Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2024.

Terdapat penambahan 9.643 unit usaha industri yang didominasi industri makanan olahan sebanyak 7.718 dengan tenaga kerja yang terserap sebanyak 12.908 orang dengan nilai investasi Rp.28.630.192.108. Berikut adalah data penambahan unit industri di Kota Tasikmalaya tahun 2023 berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai NIB yang dikeluarkan melalui aplikasi OSS (*Online Single Submission*) berbasis resiko yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). NIB ini dikeluarkan per produk yang dihasilkan oleh unit industry. Artinya 1 (satu) unit industry bisa mempunyai beberapa NIB berdasarkan produk yang dihasilkan.

Tabel 2.119.
Penambahan Unit Industri Di Kota Tasikmalaya Tahun 2023
berdasarkan KBLI

KBLI	Klasifikasi Industri	Perusahaan	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp)
10	Makanan Olahan	7.718	12.908	28.530.192.108
11	Minuman	643	1.117	3.424.924.000
12	Pengolahan Tembakau	2	3	16.000.000
13	Tekstil	33	95	1.193.000.000
14	Pakaian Jadi	588	2.571	27.907.289.897
15	Kulit, barang dari kulit dan Alas Kaki	35	214	1.554.901.000
16	Kayu, barang dari kayu dan gabus dari barang anyamandari bambu, rotan dan sejenisnya	349	452	1.069.200.000
17	Kertas barang dari kertas	2	5	210.000.000
18	Percetakan dan reproduksi media	34	95	1.867.000.000
19	Produk dari batu bara dan pengilangan minyak	1	10	50.000.000
20	Bahan kimia dan barang dari bahan kimia	22	45	477.000.000



KBLI	Klasifikasi Industri	Perusahaan	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp)
21	Farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional	16	38	73.950.000
22	Karet dan barang dari karet dan plastik	6	22	255.000.000
23	Barang galian bukan logam	20	73	2.654.500.000
24	logam dasar	2	14	27.000.000
25	Barang logam bukan mesin dan peralatannya	32	89	3.248.500.000
26	Komputer barang elektronik dan optik	9	32	308.500.000
27	Peralatan listrik	1	2	5.000.000
28	Mesin dan peralatannya	16	38	445.500.000
29	Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer	6	15	878.000.000
30	Alat angkutan lainnya	2	2	101.000.000
31	Furniture	49	156	2.251.700.000
32	Others	35	93	1.825.322.222
33	Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	22	48	1.703.000.000
	Jumlah	9.643	18.137	80.076.479.227

Sumber: Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2024.

Sebelum tahun 2023 data industri belum disusun menurut KBLI. Data industri disusun menurut komoditi industri sesuai potensi yang terdapat di Kota Tasikmalaya. Berikut ini data potensi komoditi industri unggulan Kota Tasikmalaya sampai dengan Tahun 2022.



Tabel 2.120.
Perkembangan Potensi Komoditi Industri Kota Tasikmalaya
Tahun 2020-2022

NO	KOMODITI INDUSTRI	UNIT USAHA (UU)			TENAGA KERJA (Orang)			NILAI INVESTASI (Rp. 000)			NILAI PRODUKSI/TAHUN (Rp. 000)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
A. KOMODITI UNGGULAN :													
1	Bordir	1.409	1.409	1.440	14.162	14.162	14.397	244.951.442	244.951.442	248.973.442	1.070.072.876	1.071.147.876	1.071.147.876
2	Kerajinan Mendong	174	174	174	174	2.292	2.292	7.131.232	7.131.232	7.131.232	43.203.874	43.203.874	43.203.874
3	Kerajinan Bambu	75	75	99	75	660	836	1.200.038	1.200.038	6.105.038	5.466.606	5.466.606	5.466.606
4	Alas Kaki (Kelom Geulis, Sandal, Sepatu)	531	531	572	531	6.275	6.600	51.431.794	51.431.794	55.051.094	401.276.430	403.696.430	403.696.430
5	Kayu Olahan (Meubel)	217	217	229	217	1.568	1.602	27.830.699	27.830.699	28.659.699	98.835.245	106.485.245	106.485.245
6	Batik	43	43	46	43	695	734	7.840.576	7.840.576	7.942.576	51.540.682	51.540.682	51.540.682
7	Payung Geulis	7	7	7	7	47	47	45.500	45.500	45.500	636.800	636.800	636.800
8	Makanan Olahan	574	585	1.689	574	5.378	9.096	58.809.160	61.108.674	99.255.955	952.037.078	953.737.078	953.737.078
JUMLAH		3.030	3.041	4.256	3.039	31.077	35.604	399.240.441	401.539.956	453.164.537	2.623.069.591	2.635.914.591	2.635.914.591
B. KOMODITI LAINNYA :													
1	Bahan Bangunan	326	326	326	326	4.198	4.198	217.454.132	217.454.132	217.454.132	561.840.403	561.840.403	561.840.403
2	Pakaian Jadi	120	122	429	120	1.831	3.610	29.076.300	29.155.300	62.996.418	170.268.350	170.268.350	170.268.350
3	Percetakan	48	51	97	48	441	628	10.003.500	10.353.625	15.903.537	32.271.116	32.271.116	32.271.116
4	Lain-lain	130	131	148	130	3.508	3.553	75.069.380	84.922.269	85.510.269	422.336.576	423.586.576	423.586.576
JUMLAH		624	630	1.000	641	9.978	11.989	331.603.312	341.885.326	381.864.356	1.186.716.445	1.187.966.445	1.187.966.445
TOTAL		3.654	3.671	5.256	3.680	41.055	47.593	730.843.754	743.425.281	835.028.892	3.809.786.036	3.823.881.036	3.823.881.036

Sumber: Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2023.



Adapun capaian pelaksanaan urusan industri dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.121.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Industri
Tahun 2021 - 2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase pertumbuhan industry	%	2	9,4	2	43,2	4	183,5
2	Jumlah sentra IKM yang dikembangkan	Buah	3	3	-	-	-	-
3	Persentase capaian sasaran rencana pembangunan industri	%	5	50	92,3	92,3	-	-
4	Jumlah wirausaha baru sektor industri	Orang	325	325	253	253	-	-
5	Jumlah masyarakat miskin yang dibina pada sektor industri	Orang	550	500	100	0	-	-
6	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri	%	100	0	100	100	100	100
7	Persentase IKM yang Terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional	%	30	1,6	30	0,8	5	0,6
8	Persentase implementasi pencapaian sasaran rencana pembangunan industri	-	-	-	-	-	5	100

Sumber: Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2024

2.1.3.4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.1.3.4.1. Sekretaris Daerah

1) Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Kota Tasikmalaya. Selain itu, laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya diukur atas dasar penilaian indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2022 terjadi penurunan nilai SAKIP dari tahun 2021 sebesar 71.63 poin dengan kriteria BB menjadi 70,73 poin berada kriteria BB. Hal dini dikarenakan terdapat perubahan Pedoman Evaluasi untuk penilaian SAKIP, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa terdapat perubahan komponen penilaian SAKIP dari 5 komponen (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, Pencapaian Sasaran Kinerja) menjadi 4 komponen (Perencanaan Kinerja,Pengukuran Kinerja, Pelaporan



Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal). Hasil penilaian tahun 2023 kembali mengalami kenaikan mejadi 71,83 poin berada pada kriteria BB.

Tabel. 2.122.
Nilai SAKIP Kota Tasikmalaya
Tahun 2021 - 2023

No	Uraian	Tahun					
		2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Nilai SAKIP	71-80 (BB)	71,63 (BB)	81-90 (A)	70,73 (BB)	72,50- 75,00 (BB)	71,83 (BB)

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya, 2024

2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah setiap tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan dilakukan evaluasi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Penetapan Peringkat dan skor LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memotret kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tabel. 2.123.
Capaian LPPD Kota Tasikmalaya
Tahun 2021 - 2023

No	Uraian	Tahun					
		2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Capaian LPPD	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)	2,38	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)	3,3348 (Sedang)	Sangat Tinggi	N/A

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya, 2024.

Indikator Nilai Evaluasi LPPD pada Tahun 2023 ditargetkan pada Kategori Sangat Tinggi, penetapan target tersebut berpedoman pada Permendagri Nomor 73 Tahun 2009. Sedangkan capaian Indikator Nilai Evaluasi LPPD pada Tahun 2022 masuk kedalam kategori Sedang berdasarkan kategorisasi pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. Nilai evaluasi LPPD tahun 2022, yaitu 3,3348 masuk ke dalam kategori "Sangat Tinggi" (range 3,21<...<4,00) berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 dan masuk kategori "Sedang" (range 2,61 - 3,40) berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. Namun demikian, terdapat kenaikan skor penilaian 0,95 point dari penilaian LPPD tahun 2021 sebesar 2,38 menjadi 3,3348 untuk penilaian LPPD tahun 2022.

3) Penggunaan E-Procurement

Bagian Pengadaan Barang/Jasa merupakan salah satu bagian pada Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.



Bagian Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. BPBJ mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk:

1. Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa dalam hal melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis serta pengelolaan pengadaan barang/jasa;
2. Pengelolaan LPSE, dalam hal melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis serta pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
3. Pembinaan dan Advokasi PBJ, melalui melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis dan petunjuk teknis serta pelaksanaan pembinaan advokasi pengadaan barang/jasa;

Sumber daya manusia pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 2.124.
Sumber Daya Manusia pada BPBJ Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah	Sertifikat	Pokja	JFT PBJ
1	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	1	1	-	-
2	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	12	11	10	6
3	Pembinaan dan advokasi PBJ	3	3	2	2
4	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	5	1	-	-
TOTAL		21	16	12	6

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya, 2024

Kinerja BPBJ dinilai melalui capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemerintah Daerah di Jawa Barat, yakni sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi. Capaian MCP Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 berada pada angka 77,56 persen mengalami penurunan dari nilai MCP tahun 2022 sebesar 90,32 persen karena terdapat perbedaan indikator penilaian, semula dari 5 indikator pada tahun 2022 yakni , terdiri dari indikator Pelaksanaan Pengadaan, Pengendalian Pengadaan, dan Penguatan Profesionalisme UKPBJ. Capaian 2023 mengalami penurunan karena terdapat perbedaan indikator penilaian, dari 5 (lima) indikator pada tahun 2022 yakni SDM UKPBJ, pelaksanaan Tupoksi, Perangkat Pendukung, Penayangan SIRUP, serta Pengendalian dan Pengawasan, menjadi 3 (tiga) indikator pada tahun 2023, yakni Inovasi Pelaksanaan Pengadaan, Pengendalian Pengadaan, dan Penguatan Profesionalisme UKPB. Berikut disajikan Indikator Kinerja BPBJ pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.125.
Capaian MCP Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Tasikmalaya

No.	Indikator MCP		Capaian		MCP 2023			
			2021	2022	No	Indikator		Capaian
1.	SDM UKPBJ	Ketersediaan SDM (%)	100	100	1	Inovasi Pelaksanaan Pengadaan	Pemenuhan Komitmen TKDN dan e-Purchasing	100
		Pokja UKPBJ Permanen (%)	100	100			Pencegahan Korupsi Pengadaan Langsung	18
		Ketersediaan Fungsional PBJ	10	19	2	Pengendalian Pengadaan	Reviu dan Transparansi Rencana Pengadaan	94
2.	Pelaksanaan Tupoksi	Advokasi PBJ	100	100			Pencegahan Korupsi Proyek Strategis Daerah	70
		Evaluasi Kegiatan PBJ	88	100			Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola PBJ	100
		Review Perencanaan PBJ	65	100			Survey Kepuasan Masyarakat	100
		Vendor Management system	38	100			Vendor Manajemen System	100
3.	Perangkat Pendukung	Kode Etik	100	100	3	Penguatan Profesionalisme UKPBJ	Penguatan SDM UKPBJ	70
		Standar Opearsional Prosedur	100	100			TPP Khusus PBJ	100
		TPP Khusus UKPBJ	0	100				
4.	Penayangan SiRUP	Persentase Penayanan SiRUP	82	82				
5.	Pengendalian dan Pegawasan	Review HPS	60	100				
		Review Kinerja UKPBJ & Tindak	85	100				

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya, 2024.

Pelayanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dilakukan kepada penyedia, UKPBJ, Auditor dan Intansi. Paket pengadaan barang/jasa melalui LPSE oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 sebanyak 1.179 paket, dengan jumlah paket tender sebanyak 91 paket, dan non tender sebanyak 1.088 paket.

2.1.3.4.2. Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dokumen perencanaan daerah Kota Tasikmalaya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang selanjutnya dijabarkan dalam program kerja dan perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

- 1) Tersedianya dokumen RPD tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Wali Kota)

RPD Kota Tasikmalaya disusun seiring dengan berakhirnya RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 pada Tahun 2022, seiring dengan berakhirnya masa jabatan Walikota Tasikmalaya. Selain itu, Kebijakan nasional tentang pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati, Walikota akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Sehingga pada masa transisi ini, dipandang dari sisi perencanaan, maka rencana pembangunan jangka menengah daerah terjadi “kekosongan”.

Dokumen RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. RPD ini disusun untuk mengisi kekosongan perencanaan daerah jangka menengah. RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2022 pada tanggal 28 April 2022.

- 2) Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Wali Kota)

Dokumen RKPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kota Tasikmalaya telah ditetapkan dengan peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2023. RKPD tahun 2024 mengacu kepada RPD Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026 dan merupakan RKPD tahun kedua dari periode RPD 2023-2026.

- 3) Tersusunnya dokumen rancangan awal RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045

Dokumen RPJPD Kota Tasikmalaya 2025-2045 disusun sesuai dengan sistematika yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. RPJPD berfungsi sebagai panduan strategis untuk pembangunan wilayah dalam periode 20 tahun dengan penjelasan tentang rumusan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok jangka panjang yang akan menjadi panduan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang lebih rinci, juga pedoman bagi semua pihak yang berperan dalam pembangunan.

- 4) Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Sejak beberapa tahun terakhir Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menggunakan sistem informasi berbasis online dalam proses perencanaan di Provinsi Jawa Barat. Sistem ini memuat perencanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusat memberlakukan penggunaan satu sistem perencanaan penganggaran di tingkat nasional yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sebuah sistem aplikasi elektronik yang terdiri dari sistem informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah, dan sistem informasi pemerintahan daerah lainnya antara lain untuk data dan informasi pembangunan, merupakan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, dengan tujuan:



- 1) menyediakan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat;
- 2) menghasilkan layanan informasi berbasis elektronik; serta
- 3) meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.

Perencanaan pembangunan di Kota Tasikmalaya telah menggunakan sistem informasi perencanaan pembangunan. Seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kota Tasikmalaya juga telah menggunakan SIPD yang sebelumnya menggunakan sistem perencanaan mandiri (*E-planning*).

Adapun indikator kinerja penunjang bidang perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.126.
Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Bidang
Perencanaan Tahun 2021 - 2023

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Tahun					
			2021		2022		2023	
			Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
1	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	-	-
2	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	10	100	100	100	-	-
3	Persentase keselarasan Rencana Kerja terhadap RKPD	%	100	100	100	100	-	-
4	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam perencanaan	%	30	66,06	35	56,72	-	-
5	Persentase capaian kinerja indikator kinerja utama daerah	%	90	67,85	95	51,22	-	-
6	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	%	100	100	100	100	-	-
7	Nilai Perencanaan Kinerja dalam penilaian SAKIP	Poin	-	-	-	-	25,20 - 25,30	23,85
8	Nilai Pengukuran Kinerja dalam penilaian SAKIP	Poin	-	-	-	-	17,65 - 17, 85	19,94
9	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Daerah berpredikat minimal baik	%	-	-	-	-	80	100

Sumber : Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2024

Nilai perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen pembentuk Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Tasikmalaya. Nilai Perencanaan SAKIP Kota Tasikmalaya diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, sesuai surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/317/AA.05/2023 Tanggal 27 November 2023.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kota Tasikmalaya berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun



2023, sesuai surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/317/AA.05/2023 Tanggal 27 November 2023, menunjukkan bahwa nilai akuntabilitas kinerja Kota Tasikmalaya sebesar 71,83 dengan predikat BB. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.127.
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Kota Tasikmalaya Tahun 2023

KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	23,55	23,85
b. Pengukuran Kinerja	30	19,86	19,94
c. Pelaporan Kinerja	15	10,39	10,52
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,93	17,52
Nilai Hasil Evaluasi	100	70,73	71,83
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Sumber: Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/317/AA.05/2023 Tanggal 27 November 2023 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023

Nilai perencanaan kinerja SAKIP Kota Tasikmalaya Tahun 2023 hampir mencapai target yang ditentukan, yaitu sebesar 94,64%. Dari target yang ditetapkan antara 25,20 – 25,30, terealisasi Nilai Perencanaan Kinerja sebesar 23,85 poin, sebagaimana terlihat pada tabel diatas. Realisasi nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,30 poin dibandingkan dengan nilai tahun 2022, yaitu sebesar 23,55.

Nilai pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen pembentuk Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Tasikmalaya. Nilai Pengukuran SAKIP Kota Tasikmalaya diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, sesuai surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/317/AA.05/2023 Tanggal 27 November 2023.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kota Tasikmalaya berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, sesuai surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/317/AA.05/2023 Tanggal 27 November 2023, menunjukkan bahwa nilai akuntabilitas kinerja Kota Tasikmalaya sebesar 71,83 dengan predikat BB. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta



memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.128.
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Kota Tasikmalaya Tahun 2023

KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	23,55	23,85
b. Pengukuran Kinerja	30	19,86	19,94
c. Pelaporan Kinerja	15	10,39	10,52
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,93	17,52
Nilai Hasil Evaluasi	100	70,73	71,83
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Sumber: Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/317/AA.05/2023 Tanggal 27 November 2023 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023

Nilai pengukuran kinerja SAKIP Kota Tasikmalaya Tahun 2023 telah mencapai target yang ditentukan, yaitu sebesar 112,97%. Dari target yang ditetapkan antara 17,65 – 17,85, terealisasi nilai pengukuran kinerja sebesar 19,94 poin, sebagaimana terlihat pada tabel diatas. Realisasi nilai komponen pengukuran kinerja pada SAKIP Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,08 poin dibandingkan dengan nilai tahun 2022, yaitu sebesar 19,86.

Persentase capaian IKU Kota Tasikmalaya Tahun 2023 yang berpredikat minimal baik/tinggi didasarkan pada Skala Nilai Peringkat Kinerja yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut.

Tabel 2.129.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian IKU Kota Tasikmalaya Tahun 2023, terlihat bahwa seluruh capaian IKU (36 IKU) Kota Tasikmalaya Tahun 2023 telah lebih dari 76%, dimana terdapat 2 IKU mendapat predikat Tinggi dan 34 IKU mendapat Predikat Sangat Tinggi, sesuai dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.



Sehingga pada tahun 2023 Persentase Capaian IKU Berpredikat Minimal baik/tinggi adalah sebesar 100%.

2.1.3..4.3. Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Berdasarkan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Selanjutnya, rancangan Perda yang telah disetujui diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi bersama dengan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi perda dan peraturan Walikota. Namun bila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kota Tasikmalaya tentang APBD dan rancangan peraturan walikota tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, maka Pemerintah Kota Tasikmalaya setiap tahun menetapkan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Tabel 2.130.

Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Bidang Keuangan
Tahun 2021 – 2023

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun					
		2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Opini BKP atas LKPD Kota Tasikmalaya	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP		
Persentase waktu penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya	%	100	100	100	100		
Persentase laporan keuangan sesuai SAP	%	100	100	100	100		
Persentase waktu penetapan KUA dan PPAS	%	100	100	100	100		
Persentase realisasi belanja terhadap target belanja yang ditetapkan	%	95	96,97	95	90,21		



Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun					
		2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP	%	100	100	100	100		
Persentase inventarisasi asset milik daerah	%	100	100	100	100		
Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini					WTP	WTP
Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	%					100	100
Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Standar	%					100	100

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya, 2024

Transparansi Informasi APBD dalam rangka transparansi pengelolaan keuangan merupakan salah satu indikator utama yang ditekankan oleh pemerintah untuk mencegah tindak pidana korupsi serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Government*). Dalam upaya mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Guna mendorong keterbukaan informasi publik yang terkait pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Tasikmalaya menyediakan informasi APBD hingga ke level kegiatan yang dapat diakses secara *online* oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat luas melalui *website* di alamat <https://data.tasikmalayakota.go.id/> pada menu badan Pengelola Keuangan Daerah.

Gambar 2.45.
Ringkasan APBD pada Website



Sumber: Portal Data Kota Tasikmalaya, 2024



2.1.3.4.4. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pada tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.131.
Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penunjang
Bidang Kepegawaian Tahun 2021-2023

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun					
		2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	78	63,26	78	63,26	-	-
Kesesuaian Kompetensi Aparatur dengan Jabatannya	%	78	78,01	78	78,01	-	-
Tingkat disiplin aparatur perangkat daerah	%	99	99,84	99	99,84	-	-
Capaian implementasi SIMPEG	%	70	80,37	70	80,37	-	-
Capaian pembinaan disiplin aparatur	%	100	100,00	100	100,00	-	-
Capaian layanan kepegawaian	%	100	114,37	100	114,37	-	-
Capaian pendidikan dan pelatihan aparatur	%	100	100,54	100	100,54	-	-
Indeks Merit Sistem	Poin	-	-	-	-	175/ Kurang	327/ Sangat Baik
Persentase ASN yang diangkat sesuai dengan formasi	%	-	-	-	-	100	100
Persentase capaian pelayanan kepegawaian	%	-	-	-	-	100	100
Persentase PNS yang terpetakan kompetensinya	%	-	-	-	-	12	12
Persentase penyelesaian evaluasi kinerja dan penanganan disiplin	%	-	-	-	-	100	100
Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	-	-	-	-	17	31,72

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya, 2024.

Anugerah Meritokrasi merupakan penghargaan yang digelar dalam rangka mengapresiasi Instansi Pemerintah yang berhasil menerapkan sistem merit dengan baik. Pemerintah Kota Tasikmalaya terus konsisten dan berkomitmen dalam menerapkan sistem merit sesuai peraturan perundang-undangan dalam menerapkan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Komitmen yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dibuktikan dengan predikat penghargaan Anugerah Meritokrasi yang terus meningkat setiap tahunnya dan di tahun 2023 Pemerintah Kota Tasikmalaya meraih Indeks Sistem Merit sebesar 327 dengan Predikat Sangat Baik.



Realisasi persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun 2023 melebihi target kinerja yang diharapkan yaitu sebesar 17%. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam tingginya capaian kinerja yang melebihi target untuk indikator Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi, salah satunya adalah mulai berjalannya koordinasi dengan penyelenggara Diklat yang menggunakan dana dari APBN (Metode Rupiah Murni/RM) untuk mengakomodir peserta dari Kota Tasikmalaya.

2.1.3.4.5. Penelitian dan Pengembangan

Indikator kinerja urusan penelitian dan pengembangan pada tahun 2023 menunjukkan capaian yang cukup baik. Capaian indikator kinerja penelitian dan pengembangan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.132.
Target dan Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penunjang
Bidang Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2021 – 2023

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Tahun					
			2021		2022		2023	
			Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
1	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	%	100	100	100	100	-	-
2	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Kategori	-*	Inovatif	Inovatif	Inovatif	-	-
3	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	%	-	-	-	-	85	100
4	Jumlah inovasi daerah yang dilaporkan dan terverifikasi dalam Innovation Government Award (IGA)	Buah	-	-	-	-	10	18

Sumber : Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2024

Capaian persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan didapatkan dari kajian yang dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Kota Tasikmalaya. Pada Tahun 2023 capaian indikator persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan di Kota Tasikmalaya telah melebihi target yang ditentukan, yaitu dari target yang ditetapkan sebesar 85%, telah terealisasi persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan sebesar 100%.

Capaian jumlah inovasi yang dilaporkan dan terverifikasi dalam *Innovation Government Award* (IGA) didapatkan dari platform Kementerian Dalam Negeri (<https://indeks2022.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>) yang memuat hasil pelaporan dan verifikasi inovasi Kota Tasikmalaya Tahun 2023.

Pada Tahun 2023 capaian jumlah inovasi yang dilaporkan dan terverifikasi dalam *Innovation Government Award* (IGA) telah melebihi target yang ditentukan, yaitu dari target yang ditetapkan sebesar 10 buah, telah terealisasi jumlah inovasi yang dilaporkan dan terverifikasi dalam *Innovation Government Award* (IGA) sebesar 18 buah, yaitu:

1. CAFÉ CENTING (Calon Pengantin Minum Fe untuk Cegah Stunting);



- 2. KAPAL SIDORA (Kelurahan Panglayungan Siap Donor Darah);
- 3. Kultum Perdu (Kuliah 30 Menit untuk Peningkatan Kompetensi Kader Posyandu);
- 4. PUSLING KEMBANG SERUNI (Puskesmas Keliling Kesayangan Masyarakat Panglayungan Sebulan Sekali Dikunjungi);
- 5. SELIMUT MERAH (Sedekah Limbah Rumah Tangga Menuju Berkah);
- 6. BISMA (BMD Barcode Information System Mobile Apps);
- 7. ASIAPP (Aplikasi Sistem Informasi Aspirasi Publik dan Pengaduan Puskesmas);
- 8. TAMAS (TASIKMALAYA MANPOWER SISTEM);
- 9. Rumahku Paruku;
- 10. REKKOPUSING (Remaja Keren Kelola Calon Pengantin Untuk Cegah Stunting);
- 11. BUKIT LESTARI (Ibu Kader Ikut Entry, Status Gizi Teratasi);
- 12. BURISS SI CETAR (Ibu Hamil Resiko Tinggi Sahabat SI CETAR);
- 13. KU CINTA PTM (Kunjungi, Cek, Identifikasi, Tangani Penyakit Tidak Menular)
- 14. GEDONG RESIK (Gerakan Donasi Sampah Dan Jelantah Ngarah Resik Kota Tasikmalaya);
- 15. RANTING DELIMA (Rawat Balita Stunting Dengan Lingkungan dan Masyarakat);
- 16. SIPEJAL (Sistem Informasi Perlengkapan Jalan);
- 17. Kakaren Karamat (Kampung KB dan Kampung Ramah Anak Terpadu); dan
- 18. LAYAR KUSUMAH (Layanan Antar Sampai ke Rumah).

2.1.3.4.6. Unsur pengawasan

Fungsi penunjang terkait pengawasan akan mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial. Berikut capaian indikator unsur pengawasan:

Tabel 2.133.
Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Bidang Pengawasan Tahun 2021 – 2023

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun					
		2021		2022		2023	
		Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
Rekomendasi tindaklanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan	%	75	77,85	75	83,33		
Nilai SAKIP Kota	%	73	71	73	70,73		
Level Maturitas SPIP Kota Tasikmalaya	Level	3	2,83	3	3,081		
Skor PMPRB Kota Tasikmalaya	Poin	70	0	70	86,42		
Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Predikat WBK/WBBM	Unit	3	0	3	0		
Persentase Kepatuhan Pelaporan harta kekayaan aparatur	%	100	100	100	100		
Persentase perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi	%	100	N/A	100	100		
Indeks Persepsi korupsi hasil survey eksternal	Poin	3	2,96	3	1,86		
Persentase tindaklanjut hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat	%	100	95,50	100	100		
Tingkat capaian kapabilitas APIP	Level					2	3
Tingkat Maturitas SPIP Kota	Level					3	3



Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun					
		2021		2022		2023	
		Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
Pemenuhan Elemen Praktek Profesional	Level					2	3
Pemenuhan Elemen Praktek Budaya dan hubungan Organisasi	Level					2	3
Pemenuhan Elemen Praktek Struktur Tata Kelola	Level					2	3
Pemenuhan Elemen Praktek Peran Dan Layanan	Level					2	3
Pemenuhan Elemen praktek Pengelolaan SDM	Level					2	3
Pemenuhan Elemen Praktek Akuntabilitas Manajemen Kinerja	Level					2	3
Persentase Penanganan kasus	%					100	100
Skor Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level					3	2 (2,110)
persentase pemenuhan laporan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	%					100	100
persentase pemenuhan kebijakan teknis bidang pengawasan	%					100	100

Sumber: Inspektorat Kota Tasikmalaya, 2024.

Secara umum capaian urusan pengawasan telah melebihi target yang telah ditetapkan. Namun demikian masih terdapat indikator yang nilai capaiannya belum memenuhi target yaitu Skor Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah
1. Pengeluaran Konsumsi Perkapita

Angka konsumsi Rumah Tangga di Kota Tasikmalaya selama periode 2021-2023 terus meningkat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.134.

Angka Konsumsi Rumah Tangga di Kota Tasikmalaya Tahun 2021 – 2023

No	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Pengeluaran Rumah Tangga (Milyar Rp.)	15.729,30	17.441,15	19.460,19
2.	Jumlah Penduduk	723.920	733.467	741.760
3.	Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga perkapita (juta Rp.)	21,72	23,78	26,23

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2024

2. Persentase Konsumsi Non Pangan Perkapita

Persentase konsumsi non pangan perkapita di Kota Tasikmalaya selama periode 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.135.
Persentase Konsumsi Rumah Tangga
di Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2023

No.	Kelompok Konsumsi	Satuan	2021	2022	2023
1.	Makanan dan Minuman Selain Restoran (Pangan)	Juta Rp	8.135.152,20	8.965.934,45	10.234.430,84
	Persentase	%	35,61	35,90	37,34
2.	Pakaian, Alas Kaki, dan Jasa Perawatannya	Juta Rp	987.640,62	1.038.950,67	1.115.576,56
	Persentase	%	4,32	4,16	4,07
3.	Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Juta Rp	2.037.556,14	2.218.533,12	2.369.293,51
	Persentase	%	8,92	8,88	8,64
4.	Kesehatan dan Pendidikan	Juta Rp	586.103,39	628.512,43	671.405,92
	Persentase	%	2,57	2,52	2,45
5.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	Juta Rp	3.064.735,57	3.388.128,57	3.740.344,13
	Persentase	%	13,42	13,57	13,65
6.	Restoran dan Hotel	Juta Rp	320.490,19	355.247,06	410.382,96
	Persentase	%	1,40	1,42	1,50
7.	Lainnya	Juta Rp	783.721,65	845.844,41	918.758,11
	Persentase	%	3,43	3,39	3,35

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2024

2.1.4.2. Infrastruktur Kota Tasikmalaya

Kondisi infrastruktur yang memadai sangat mempengaruhi daya saing daerah. Ketersediaan infrastruktur wilayah Kota Tasikmalaya yang dapat meningkatkan daya saing daerah meliputi : aksesibilitas wilayah, penataan ruang, ketersediaan air bersih, ketersediaan fasilitas listrik dan komunikasi, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya.

Kota Tasikmalaya menjadi pusat wilayah pengembangan *hinterland* yang ada disekitarnya (Priangan Timur) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 – 2024 sehingga perlu ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Guna mendukung perwujudan pusat wilayah pengembangan tersebut. Kota Tasikmalaya memiliki beberapa infrastruktur pendukung diantaranya:

- Infrastruktur jalan, jalan di wilayah Kota Tasikmalaya terdiri dari Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kota. Panjang jalan kota sesuai dengan Keputusan Walikota Tasikmalaya nomor 541.03/Kep.136-DPUPR/2017 tentang Penetapan Status Ruas Jalan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai Jalan Kota adalah 450,742 km, terkoneksi dengan jalan nasional dan jalan provinsi. Proporsi jalan dalam kondisi baik sepanjang 30.510 km (67,69%) dan kondisi tidak mantap sepanjang 14,563 km (32,31%).
- Infrastruktur perhubungan:
 - Terminal Tipe A Indihiang untuk melayani angkutan bus di dalam kota, antar kota dan antar provinsi dan 9 (Sembilan) terminal tipe C.



- Stasiun kereta api di Kota Tasikmalaya melayani angkutan penumpang dan barang.
 - Bandara Wiriadinata melayani penumpang domestik, saat ini sedang diupayakan untuk reaktivasi.
- c. Infrastruktur Ekonomi, Pasar Cikurubuk yang merupakan pasar yang memiliki layanan regional Priangan Timur dan beberapa pasar rakyat lainnya.
- d. Infrastruktur Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekarjdo merupakan rumah sakit rujukan dengan status tipe B yang merupakan salah rumah sakit rujukan di Priangan Timur disamping beberapa rumah sakit tipe B yang dimiliki oleh swasta.
- e. Infrastruktur Pendidikan, perguruan tinggi yang berada di Kota Tasikmalaya cukup memadai untuk dijadikan rujukan bagi wilayah sekitar baik yang memiliki status negeri (Universitas Negeri Siliwangi, Universitas Pendidikan Indonesia, Poltekkes Negeri Kemenkes RI) maupun yang swasta (Universitas Muhamadiyah Tasikmalaya, Universitas Perjuangan, STISIP, STIA, STAI, dan lain-lain).

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam rancangan RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2023 – 2043 adalah mewujudkan ruang Kota Tasikmalaya sebagai pusat kegiatan wilayah Priangan Timur-Pangandaran yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya Kota Tasikmalaya sebagai pusat perdagangan, jasa dan industri kecil dan menengah termaju di Jawa Barat, sehingga ke depan untuk mewujudkannya direncanakan untuk:

1. Pembangunan Jalan Tol Gede Bage – Tasikmalaya – Cilacap (GETACI) yang merupakan proyek strategis nasional guna melancarkan mobilisasi orang atau barang keluar dan masuk ke wilayah Kota Tasikmalaya.
2. Menyediakan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di sekitar wilayah Jalan Gubernur Sewaka dan Jalan Mangkubumi-Indihiang.
3. Menyediakan Rumah Sakit.

Pelayanan terhadap fasilitas air minum di Kota Tasikmalaya dapat dikatakan mengalami perkembangan yang relatif meningkat tiap tahun, meskipun capaian KK berakses air minum Tahun 2023 baru mencapai 57,57%. Pelayanan air minum di Kota Tasikmalaya disediakan oleh Dinas PUTR dan PDAM Tirta Sukapura (milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya).

2.1.4.3. Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Investasi dipengaruhi oleh kondisi keamanan dan ketertiban umum suatu daerah yang salah satu indikatornya adalah jumlah kriminalitas yang terjadi. Jumlah tindakan kriminalitas di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.136.
Jumlah Kasus Kriminalitas di Kota Tasikmalaya
Tahun 2020 - 2022

No.	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Jumlah Kasus Narkoba	5	87	72
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	3	1	2



No.	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
3	Jumlah Kejahatan Seksual	35	32	1
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	39	4	38
5	Jumlah Kasus Pencurian	69	70	45
6	Jumlah Kasus Penipuan	105	67	88
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	0	1	-
8	Jumlah Pidana Lainnya	120	109	-
	Jumlah Tindak Kriminal selama 1 tahun	376	327	246

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya, 2023.

2. Jumlah Demonstrasi

Selain tingkat kriminalitas, kondisi keamanan dan ketertiban yang dapat mempengaruhi investasi daerah adalah banyaknya demonstrasi yang terjadi disuatu daerah. Jumlah demonstrasi di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.137.
Jumlah Demonstrasi di Kota Tasikmalaya
Tahun 2021-2023

No.	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Bidang Politik	6	7	9
2.	Ekonomi	6	8	4
3.	Lainnya	8	13	10
	Jumlah	20	28	23

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya, 2024

3. Pendapatan Per Kapita (PDRB Per Kapita)

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku di Kota Tasikmalaya tahun 2023 sebesar Rp.36,95 juta, mengalami peningkatan sebesar 8,52 persen dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp.34,05 juta. Peningkatan PDRB Perkapita ini merupakan indikasi bahwa pemulihan ekonomi dan kinerja perekonomian di Kota Tasikmalaya semakin membaik pada tahun 2023.

4. Kondisi Sarana Prasarana Pendukung

Kondisi sarana prasarana pendukung seperti sarana prasarana transportasi, komunikasi, dan utilitas yang memadai sangat mempengaruhi iklim investasi daerah. Jalan di Kota Tasikmalaya sudah terkoneksi baik dengan jalan nasional maupun provinsi, didukung adanya terminal tipe A, 4 terminal tipe C dan stasiun kereta api yang melayani angkutan penumpang dan barang dengan penambahan beberapa rute terbaru. Selain itu Pemerintah Kota Tasikmalaya sedang mengupayakan reaktivasi Bandara Wiriadinata untuk melayani penumpang domestik.



Sarana komunikasi seperti jaringan internet di Kota Tasikmalaya sudah baik, Pemerintah Kota Tasikmalaya sendiri mengelola 400 titik jaringan intranet Pemerintah Daerah. Demikian juga dengan sarana prasarana pos sudah baik dengan dukungan 7 kantor pos. Namun dukungan utilitas seperti pelayanan air minum di Kota Tasikmalaya yang disediakan oleh Dinas PUTR dan PDAM Tirta Sukapura (milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya) baru melayani 57,57% KK yang ada di Kota Tasikmalaya pada Tahun 2023. Sementara untuk pengelolaan sampah, pemerintah kota tasikmalaya mempunyai 1 unit TPA di Ciangir didukung 1 Bank Sampah Induk, 28 Bank Sampah Unit dan 2 TPS3R.

5. Birokrasi Perijinan

Birokrasi perijinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi investasi karena birokrasi yang panjang memperbesar biaya bagi investor. Birokrasi yang panjang akan memperbesar biaya bagi pengusaha karena akan memperpanjang waktu berurusan dengan aparat. Pemerintah Kota Tasikmalaya berupaya untuk mengatasi hal ini dengan membangun Mall Pelayanan Publik yang mulai beroperasi pada tanggal 17 Oktober 2021. Jumlah outlet yang ada di MPP berjumlah 21 outlet dengan rincian 10 outlet Instansi yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dan 11 outlet instansi vertikal, BUMD dan Provinsi. Jenis layanan yang akan diselenggarakan di MPP sebanyak 105 Jenis layanan.

Pemerintah Kota Tasikmalaya telah memiliki regulasi terkait kemudahan penanaman modal yaitu dengan telah terbitnya Perda Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

6. Kualitas Sumberdaya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia di Kota Tasikmalaya masih cukup rendah dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan yang didominasi oleh tamatan Sekolah Dasar dengan persentase sebesar 26,32 persen, Sekolah Menengah Pertama sebesar 17,24 persen, Sekolah Menengah Atas sebesar 23,76 persen, dan Perguruan Tinggi sebesar 7,92 persen pada Tahun 2023. Jumlah penduduk yang lulus pada usia sekolah mengalami penurunan. Data diambil dari BPS Kota Tasikmalaya.

Untuk meningkatkan kapasitas calon tenaga kerja, Pemerintah Kota Tasikmalaya memberikan pelatihan baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Latihan (LPK) yang berjumlah 58 LPK.

2.1.4.4. Kualitas Sumber Daya Manusia

1. Tingkat Ketergantungan

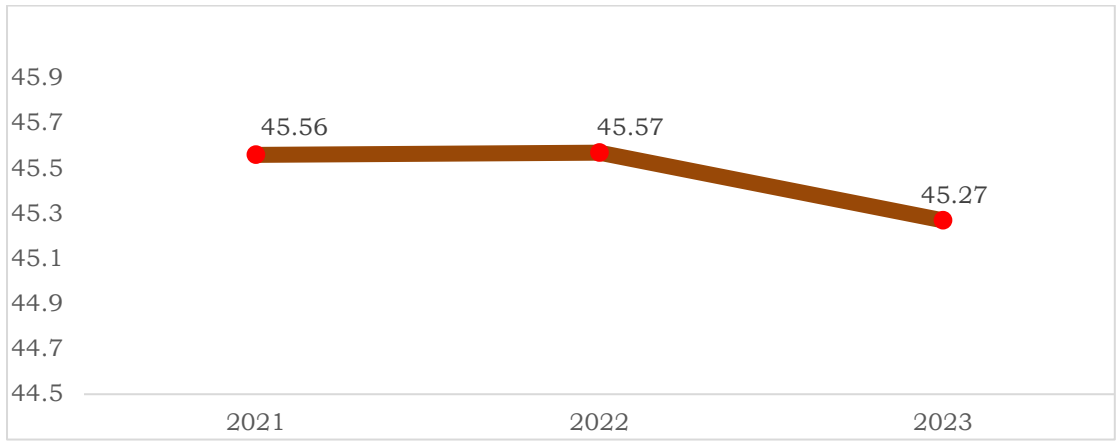
Tingkat ketergantungan penduduk ditunjukkan dengan angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*). Angka ini menggambarkan berapa besarnya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk usia non produktif. Selain itu, angka ini dijadikan pula sebagai indikator yang dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah, apakah tergolong daerah maju atau sedang berkembang.

Angka Beban Ketergantungan penduduk di Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 sebesar 45,27. Hal ini berarti, bahwa dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 45 penduduk usia tidak produktif



(usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas). Angka ini menyatakan bahwa masih banyak penduduk usia tidak produktif yang ditanggung penduduk usia produktif. Semakin besar angka beban ketergantungan, maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif.

Gambar 2.46.
Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*)
Kota Tasikmalaya 2021-2023



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2024.

2.2. Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
2.2.1 Evaluasi Kinerja Daerah

Indikator kinerja utama daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 050.13/Kep.857-Bappelitbangda/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026. Adapun capaian indikator kinerja utama Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 adalah sebagai berikut.



Tabel 2.138.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Kota Tasikmalaya

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Capaian (%)	Target Akhir RPD (Tahun 2026)	Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2023(%)
1	Tingkat kemiskinan	(%)	12,33	11,53	106,49	10,20	86,96
2	Indeks Pencapaian SPM Bidang Sosial	Poin	90	100	111,11	94	106,38
3	Rata-rata Lama Sekolah	(%)	9,76	9,54	97,75	10,16	93,90
4	Harapan Lama Sekolah	Poin	13,5	13,49	99,93	13,55	99,56
5	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Poin	72	95,73	132,96	79	121,18
6	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,57	72,92	100,48	72,94	99,97
7	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Poin	75	98,12	130,83	90	109,02
8	Laju Pertumbuhan Penduduk	Tahun	0,71	1,27	21,13	0,41	-109,76
9	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	60	59,81	99,68	60,30	99,19
10	Indeks Pembangunan Gender	Poin	91,84	92,96	101,22	92,24	100,78
11	Indeks Pencapaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum	Poin	100	99,67	99,67	100	99,67
12	Indeks Resiko Bencana	Poin	Sedang (117,15)	Sedang (114,69)	102,10	Sedang (117,15)	102,10
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,15	5,96	115,73	5,98	99,67
14	PDRB Perkapita	Juta / Tahun/ Kapita	33,4	36,95	110,63	36,26	101,90
15	Pengeluaran Per Kapita	Juta / Tahun/ Kapita	10,424	11,06	106,10	10,748	102,90



NO.	INDIKATOR	SATUAN	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Capaian (%)	Target Akhir RPD (Tahun 2026)	Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2023(%)
16	Indeks Gini	Poin	0,39	0,428	90,26	0,360	81,11
17	Inflasi	%	2,47	2,84	85,02	2,96	104,05
18	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,35	6,55	110,88	6,53	99,69
19	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adh Berlaku	(milyar)	8.002,90	8.968,07	112,06	8.844,56	101,40
20	Indeks kemantapan jalan	Poin	59,23	65,47	110,54	73,67	88,87
21	Indeks kawasan permukiman layak huni	Poin	15,88	23,33	146,91	65,36	35,69
22	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Poin	91,07	98,22	107,85	100	98,22
23	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan rakyat	Poin	100	99,29	99,29	100	99,29
24	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	57,93	57,02	98,43	58,59	97,32
25	Persentase Pengelolaan Sampah	%	99	82,17	83	100	82,17
26	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori/ Poin	Baik (83,32 – 85,80)	Baik 87,12	101,54	Baik (85,80 - 88,30)	98,66
27	Indeks Inovasi Daerah	Kategori/ Poin	Inovatif (46,43)	Inovatif (46,7)	100,58	Sangat Inovatif (62,01)	75,31
28	Indeks SPBE	Kategori/ Poin	Baik (2,9)	Baik (3,25)	112,07	Baik (3,2)	101,56
29	Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah	(Opini)	WTP	WTP	100	WTP	100
30	Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori/ Poin	BB (70-80)	BB (71,83)	102,61	BB (72,50- 75,00)	95,77
31	Nilai Evaluasi LPPD	Kategori	Sangat Tinggi (3,21- 4,00)	Sangat Tinggi (3,3348)	103,89	Sangat Tinggi	83,37
32	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	100	3	100

Sumber: RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026, Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Data diolah, 2024.



2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 – 2026

Tabel 2.139.

Evaluasi Pelaksanaan Program Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Sampai dengan Tahun 2023

No	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Indikator	Target		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	(%)		(Outcome/Output)		
1	2	3	4	5	6	7		8
DINAS PENDIDIKAN								
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	361.624.135.926	357.961.803.263	98,99	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	100	%	100
II	Program Pengelolaan Pendidikan	140.010.096.631	138.858.949.134	99,18	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	25,78	%	42,53
					Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	89,79	%	97,94
					Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	78,65	%	84,73
					Tingkat Partisipasi Pendidikan Kesetaraan	100	%	100
					Indeks Capaian SPM Bidang Pendidikan	72,00	%	95,73
					Persentase Pendidik yang memiliki sertifikat pendidik	51,55	%	52,04
					Persentase PAUD Terakreditasi B	35,76	%	63,45
					Persentase SD Terakreditasi A	60,26	%	58,69
					Persentase SMP Terakreditasi A	58,19	%	55,55
					Persentase Non Formal /Kesetaraan Terakreditasi B	51,85	%	61,90
	Persentase Sarana Prasarana dalam kondisi baik	67,38	%	98,29				
III	Program Pengembangan Kurikulum	30.000.000	29.920.000	99,73	Persentase capaian pengembangan kurikulum	100	%	100
IV	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	268.889.493	267.149.100	99,35	Persentase Capaian Kualitas Pendidik PAUD dan	51,45	%	80,43
V	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	75.000.000	74.999.900	100	Persentase Siswa Prestasi yang dicapai ke Tingkat Provinsi jenjang Pendidikan	25,03	%	38,21



No	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (outcome/output)		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	(%)				
1	2	3	4	5	6	7		8
DINAS KESEHATAN								
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	310.926.626.274	307.663.229.102	98,95	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	%	94,44
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	107.275.805.743	91.216.683.024	85,03	Indeks Pencapaian SPM kesehatan	75	%	98,21
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.401.060.000	1.160.691.007	82,84	Prosentase tenaga kesehatan yang tersertifikasi	91	%	86,21
IV	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	699.212.000	590.506.525	84,45	Persentase sarana kefarmasian dan Makanan Minuman Sesuai Standar	77	%	84,01
V	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.665.832.200	1.484.317.310	89,10	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan GERMAS	100	%	98,84

No	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (Outcome/Output)		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	(%)				
1	2	3	4	5	6	7		8
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG								
I	Program Penunjang UrusanPemerintah Daerah	11.649.483.636	11.592.508.304	99,51	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	%	100
II	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	10.384.487.853	10.022.820.962	96,52	Presentase Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik	25	%	153,88
III	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.637.610.000	7.992.733.254	92,53	KK/RT Yang Berakses Layanan Air Minum	56,67	%	101,59
IV	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	17.079.994.000	16.712.746.690	97,85	KK/RT Yang Berakses SPALD	61,62	%	101,91
V	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	567.140.000	273.618.000	48,25	Drainase Jalan Dalam Kondisi Baik	18,10	%	96,30
VI	Program Pengembangan Permukiman	52.000.654.000	49.786.152.395	95,74	Sistem Jaringan Sarana Prasarana Permukiman Dalam Kondisi Baik	25	%	108,52
VII	Program Penataan Bangunan Gedung	10.028.377.600	9.509.324.500	94,82	Bangunan Gedung Kewenangan Pemda Yang Ditangani	32,46	%	108,81



No	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (Outcome/Output)		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	(%)				
1	2	3	4	5	6	7		8
VIII	Program Penyelenggaraan Jalan	18.141.018.000	17.975.136.072	99,09	Persentase Panjang Jalan Dan Jembatan Yang Dibangun, Direhabilitasi Dan Direkonstruksi	66,77	%	133,64
IX	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	10.000.000	7.511.000	75,11	Penyedia Jasa Yang Mendapatkan Pembinaan	42,37	%	129,01
X	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	586.922.900	576.227.290	98,18	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	71	%	100
XI	Program Penatagunaan Tanah	23.077.100	22.508.893	97,54	Persentase Pengelolaan dan Penatagunaan Tanah	100	%	100

No	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (Outcome/Output)		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	(%)				
1	2	3	4	5	6	7		8
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.689.511.570	4.647.060.821	99,09	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	%	100
II	Program Pengembangan Perumahan	492.200.000	66.281.967	13,47	Persentase rumah korban bencana yang ditangani	100	%	100
					Persentase rumah korban relokasi program kabupaten/kota yang ditangani	100	%	20,00
III	Program Kawasan Permukiman	5.216.161.000	5.184.501.672	99,39	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	20	%	118,00
					Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	8,56	%	190,04
IV	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	5.060.455.000	3.941.419.734	77,89	Persentase Pengelolaan PSU Perumahan	25	%	188,89



No	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (Outcome/Output)		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	(%)				
1	2	3	4	5	6	7		8
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.647.582.560	9.583.387.850	99,33	Jumlah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	45.17	Dokumen	98,98
II	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	4.976.848.536	4.926.086.201	98,98	Jumlah Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.668	Kegiatan	100,54

No	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (Outcome/Output)		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	(%)				
1	2	3	4	5	6	7		8
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.968.081.760	6.868.093.543	98,57	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	100	%	100
II	Program Penanggulangan Bencana	3.123.759.900	3.093.345.593	99,03	Indeks Katahanan Daerah	0,34	Poin	0,43
III	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	602.950.000	583.332.700	96,75	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran	86	%	100

NO	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (outcome/output)		Realisasi (%)
			(Rp)	(Rp)		(%)		
1	2	3	4	5	6	7		8
DINAS SOSIAL								
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.477.512.878	7.424.274.743	99,29	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	100	%	100
II	Program Pemberdayaan Sosial	2.225.000.000	2.167.775.135	97,43	Persentase PSKS Aktif	100	%	100
III	Program Rehabilitasi Sosial	13.819.144.650	13.214.839.859	95,63	Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap PPKS	100	%	100



NO	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (outcome/output)		Realisasi (%)
			(Rp)	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7		8
IV	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	430.000.000	424.698.561	98,77	Persentase Capaian Jaminan Sosial terhadap PPKS	78	%	100
V	Program Penanganan Bencana	335.179.600	332.703.255	99,26	Persentase Capaian Penanganan Perlindungan Sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial	100	%	100
VI	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	43.000.000	42.599.000	99,07	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100	%	100

NO.	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (outcome/output)		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7		8
DINAS TENAGA KERJA								
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	5.313.832.260	5.249.288.454	98,79	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100	%	100
II	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	953.382.372	921.591.970	96,67	persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	4,98	%	9,34
III	Program Penempatan Tenaga Kerja	116.075.000	112.838.700	97,21	persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	27	%	54,17
IV	Program Hubungan Industrial	405.000.000	401.346.260	99,10	persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	54,25	%	80,29



NO.	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (outcome/output)		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	
DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN								
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	14.670.695.823	14.625.195.186	99,69	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Perangkat Daerah 100%	100	%	100
II	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.715.000.000	1.622.263.483	94,59	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	110	%	103,9
					Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	125	%	116,8
III	Program Penanganan Kerawanan Pangan	2.366.200.000	1.801.081.296	76,12	Persentase kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani 75%	15	%	75
IV	Program Pengawasan Keamanan Pangan	15.000.000	13.600.700	90,67	Persentase pengawasan keamanan pangan	100	%	100
V	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	5.225.600.000	4.603.704.248	88,1	Produksi Perikanan Budidaya	10.000	Ton	92,09
VI	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	413.200.000	406.477.870	98,37	Produksi produk hasil olahan perikanan	300	ton	100
VII	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.160.000.000	4.455.345.749	86,34	Persentase peningkatan populasi ternak (%)	1	%	97,53
					Produksi Tanaman Pangan (Ton)	70000	Ton	100,5
					Produksi Hortikultura dan perkebunan (Ton)	5900	ton	78,69
VIII	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	739.067.250	715.266.385	96,78	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Kw/Ha)	62,9	Kw/Ha	100
					Angka Produksi Hasil peternakan (Ton)	10350	ton	108,33
IX	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.695.575.000	1.658.361.741	97,81	Persentase penanganan kejadian kasus penyakit hewan menular	100	%	100
X	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	80.000.000	79.885.000	99,86	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian (%)	75	%	100
XI	Program Penyuluhan Pertanian	491.000.000	436.050.700	88,81	Persentase peningkatan kelas kelompok tani (%)	4,5	%	100



NO	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (Outcome/ Output)		Realisasi (%)
			(Rp)	(Rp)		%		
1	2	3	4	5	6	7		8
DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.839.517.800	16.618.231.895	98,69	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100	%	100
II	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	283.250.000	261.179.302	92,21	Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup	100	%	100
III	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	254.199.750	218.948.700	86,13	Indeks Kualitas Air	53,7	Point	71,58
					Indeks Kualitas Udara	80,50	Point	104,65
IV	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2.648.856.300	2.583.032.616	97,52	Persentase Rth Yang Dikelola	100	%	100
					Indeks Kualitas Lahan	24,36	Point	162,23
V	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	15.000.000	14.831.500	98,88	Persentase Peningkatan Dokumen Lingkungan Yang Dinilai Dan Diawasi Implementasinya	100	%	100
VI	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	20.000.000	19.855.250	99,28	Capaian Pelatihan, Penyuluhan, Dan Kampanye Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100	%	100
VII	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	308.070.000	297.715.835	96,64	Capaian Perolehan Penghargaan Lingkungan Hidup Oleh Masyarakat	100	%	100
VIII	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	8.100.000	8.090.000	99,88	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100	%	100
IX	Program Pengelolaan Persampahan	20.028.411.350	19.507.911.587	97,40	Persentase Pengurangan Sampah	27	%	62,78
					Persentase Penanganan Sampah	72	%	90,56

NO	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (Outcome/Output)		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7		8
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.636.938.140	8.572.164.307	99,25	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100	%	100



NO	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (Outcome/Output)		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	
II	Program Pendaftaran Penduduk	3.947.421.500	3.901.695.256	98,84	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	97	%	125
III	Program Pencatatan Sipil	247.056.500	246.663.403	99,84	Persentase Pencatatan Sipil	99,01	%	100
IV	Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	110.000.000	109.882.276	99,89	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	%	100

NO.	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (outcome/output)		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
I	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	55.000.000	43.000.000	78,18	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,84	Poin	92,96
					Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60	Poin	59,81
					Persentase Capaian PUG SKPD/Lembaga/Organisasi yang Responsif Gender	100	%	100
					Cakupan Sistem Data Gender dan Anak	100	%	63
II	Program Perlindungan Perempuan	25.000.000	24.750.000	99	Persentase Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak	100	%	100
					Persentase Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak	100	%	100
III	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	815.000.000	808.932.759	99,26	Persentase Pembinaan Peningkatan Kualitas Keluarga	100	%	100
IV	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	121.044.894	119.500.500	98,72	Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)	750	Poin	430
V	Program Perlindungan Khusus Anak	100.000.000	99.750.000	99,75	Persentase Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Tindak	100	%	100



NO.	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (outcome/output)		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7		8
					Kekerasan pada Perempuan dan Anak			
VI	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.545.178.578	4.502.705.978	99,07	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	%	100
VII	Program Pengendalian Penduduk	281.200.000	259.716.713	92,36	Jumlah Dokumen Laporan Pemutakhiran Data Kependudukan	1	Dokumen	1
VIII	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	6.979.630.000	5.762.982.420	82,57	Persentase Kebersertaan KB MKJP	100	%	92,92
					Persentase Kebersertaan Un Meet Need	13,5	%	13,59
IX	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	4.237.200.000	4.189.571.293	98,88	Cakupan Anggota BKB yang Ber KB	82,53	%	85,30
					Cakupan Anggota BKR yang Ber KB	76,61	%	73,84
					Cakupan Anggota BKL yang Ber KB	74,97	%	67,83

NO.	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (outcome/output)		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7		8
DINAS PERHUBUNGAN								
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	43.528.205.450	43.255.467.809	99,37	Tercapainya IKM Perangkat Daerah	Kategori/ Nilai 79		100,14
					Tercapainya SAKIP Perangkat Daerah	Kategori/ Nilai 82,75/A		84,85
II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	21.229.824.300	21.142.622.934	99,59	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,37	LoS	100
		563.196.000	560.707.569	99,56	Rasio konektivitas Kab/Kota	0,58	Poin	100



NO	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target		Realisasi
		(Rp)	(Rp)	%		(outcome/output)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7		8
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.778.158.409	5.736.193.898	99,27	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	%	104,01
II	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1.307.844.400	1.304.948.480	99,78	Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik	100	%	100
III	Program Aplikasi Informatika	10.080.850.000	10.069.418.513	99,89	Persentase Layanan SPBE yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	60	%	100
IV	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	280.000.000	273.255.544	97,59	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	%	100
V	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	407.700.000	400.933.728	98,34	Persentase tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah	41	%	48,21

NO.	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (outcome/output)		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7		8
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN								
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.752.477.643	10.680.447.183	99,33%	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	%	100
II	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	205.085.000	204.564.925	99,75%	Persentase SDM koperasi yang kompeten	25	%	141,18
III	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	510.400.000	259.950.500	50,93%	Persentase koperasi aktif yang diberdayakan	25	%	104,6
IV	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	337.800.000	319.093.510	94,46%	Persentase pemberdayaan usaha mikro	1,71	%	100
V	Program Pengembangan Umkm	205.085.000	204.329.800	99,63%	Persentase Usaha Mikro yang dibina	5	%	116
VI	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.190.120.736	4.171.586.523	99,56	Persentase pasar rakyat dalam kondisi baik	70	%	114,29



NO.	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (outcome/output)		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7		8
VII	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	819.515.000	589.454.950	71,93	Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	40	%	53,28
VIII	Program Pengembangan Ekspor	206.145.000	198.642.859	96,36	Persentase peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor	1	%	0
IX	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	205.437.200	192.859.959	93,88	Persentase alat UTTP yang bertera sah	80	%	100,075
X	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	343.855.000	342.734.550	99,67	Persentase peningkatan penggunaan produk unggulan Kota Tasikmalaya	10	%	100
XI	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	966.200.000	922.867.671	95,52	Persentase implementasi pencapaian sasaran rencana pembangunan industri	100	%	100

NO.	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (outcome/output)		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								
I	Program Penunjang UrusanPemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.720.554.612	6.602.061.633	98,24	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100	%	100
II	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	115.000.000	114.879.920	99,90	Persentase realisasi RUPM Kota Tasikmalaya	100	%	100
III	Program Promosi Penanaman Modal	66.120.000	65.939.751	99,73	Nilai penanaman modal daerah dari PMA dan PMDN yang masuk	1.304	Milyar	143
IV	Program Pelayanan Penanaman Modal	226.536.000	226.328.299	99,91	Capaian penerbitan perijinan terpadu tepat waktu sesuai SOP	100	%	100
V	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	473.400.000	472.193.250	99,75	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100	%	100

NO.	Program	ANGGARAN			KNERJA		
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target	
		(Rp)	(Rp)	%		(outcome/output)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8



NO.	Program	ANGGARAN			KNERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (outcome/output)		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	%				
DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA								
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.622.660.978	6.495.773.362	98,08	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	%	100
II	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	3.011.100.000	2.893.651.536	96,1	Persentase Pemuda / OKP yang dibina	29.67	%	31,87
III	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	6,882,875,000	6,842,583,290	99,41	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi	34,15	%	52,38
IV	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	684,867,200	684,853,092	100	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Tradisional	25	%	25,43
V	Program Pengembangan Kebudayaan	225.000.000	224.877.700	99,95	Persentase Pengembangan Kebudayaan	63,73	%	6,.73
VI	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	26.578.100	26.266.000	98,83	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	46,15	%	46,15
VII	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	288.086.600	277.746.377	96,41	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	59,18	%	59
VIII	Program Pemasaran Pariwisata	866.695.000	769.548.393	88,79	Jumlah kunjungan wisata	443.505	orang	538.183
IX	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	2.786.084.700	2.753.021.183	98,81	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	53,33	%	53

NO.	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (outcome/output)		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH								
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.852.439.570	4.792.323.832	98,76	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	%	100
II	Program Pembinaan Perpustakaan	1.085.295.150	1.070.123.795	98,6	Persentase kesesuaian penyelenggaraan perpustakaan umum daerah dengan standar nasional perpustakaan	38	%	39,84
					Persentase pembinaan perpustakaan	4,42	%	0,74



NO.	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (outcome/output)		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7		8
III	Program Pengelolaan Arsip	243.708.012	236.901.650	97,21	Persentase kesesuaian kinerja kearsipan pada Lembaga Kearsipan Daerah	37,48	%	37,48

NO.	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (outcome/output)		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7		8
SEKRETARIAT DAERAH								
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	45.168.376.580	45.013.410.165	99,66	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100	%	97,25
		346.606.516	334.852.033	96,61	Capaian IKM Perangkat Daerah	Kategori	Baik	100,25
		735.837.872	730.806.236	99,32	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	A	100
II	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	22.923.325.194	22.135.702.920	96,56	Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Hukum Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Meningkat	100	%	104,82
		215.841.883	215.410.445	99,8	Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik	100	%	100
		838.285.532	809.781.344	96,6	Persentase Produk Hukum Daerah yang Diundangkan	100	%	92,85
III	Program Perekonomian Dan Pembangunan	641.519.750	583.757.895	91	Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100	%	99,12
		1.098.819.840	1.069.850.101	97,36	Persentase Optimalisasi Percepatan Pembangunan Daerah	100	%	100
		1.181.975.246	1.176.771.150	99,56	Indek Kematangan UKPBJ	45540	Variabel	140

NO.	Program	ANGGARAN			KINERJA		
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (outcome/output)	Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
SEKRETARIAT DPRD							



NO.	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (outcome/output)		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7		8
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	46.588.310.413	46.314.462.895	99,41	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	%	99,59
II	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	19.841.798.115	19.431.498.667	97,93	Persentase hasil pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD	100	%	92,86

NO.	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (outcome/output)		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7		8
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								
I	Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.513.500.000	1.350.860.357	89,25	Tercapainya konsistensi perencanaan pembangunan daerah	100	%	100
II	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.698.000.000	1.676.544.182	98,74	Tercapaiannya keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap RKPD	100	%	100
					Meningkatnya rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah	80	%	100
III	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.394.185.582	12.127.290.558	97,85	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	100	%	100
IV	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.380.000.000	1.292.586.165	93,67	Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang direkomendasikan pemanfaatannya	85	%	100
					Meningkatnya Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah	10	Buah	100

NO.	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (outcome/output)		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7		8
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH								
I		14.409.705.679	14.304.739.904	99,27	Capaian IKM Perangkat Daerah	88,67	A	100,07



NO.	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (outcome/output)		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7		8
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	83,05	A	103,25
II	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	9.836.874.585	9.686.400.679	98,47	Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	100
III	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.126.701.700	3.913.321.133	94,83	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Standar	100	%	100

NO.	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (outcome/output)		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7		8
BADAN PENDAPATAN DAERAH								
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.875.084.489	19.529.885.440	98,26	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	%	99,83
II	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.902.776.803	3.778.419.125	96,81	Capaian Pajak Daerah	100	%	100
					Capaian PAD bukan Pajak Daerah	100	%	

NO.	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (outcome/output)		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7		8
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.785.748.920	9.749.424.766	99,63	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	%	100
II	Program Kepegawaian Daerah	2.834.500.000	2.785.274.219	98,26	Persentase Program Kepegawaian Daerah	100	%	100
III	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	375.000.000	368.115.876	98,16	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	100	%	100



NO	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target	Realisasi (%)	
		(Rp)	(Rp)	%		(outcome/output)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
INSPEKTORAT								
I	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.266.397.300	1.200.757.113	94,82	Level Pemenuhan Elemen Praktek Peran Dan Layanan	3	Level	Level 3
					Level Pemenuhan Elemen Praktek Profesional			
					Pemenuhan Elemen praktek Pengelolaan SDM			
					Pemenuhan Elemen Praktek Akuntabilitas Manajemen Kinerja			
					Level Pemenuhan Elemen Praktek Budaya dan hubungan Organisasi			
					Level Pemenuhan Elemen Praktek Struktur Tata Kelola			
					Persentase Penanganan kasus	100	%	100
II	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.109.024.220	978.865.131	88,26	Skor Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3	Level	Level 2
					2,11			
					Persentase pemenuhan laporan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	100	%	100
					Persentase pemenuhan kebijakan teknis bidang pengawasan	100	%	100
III	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.746.222.050	13.621.823.395	99,1	persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	%	100

NO.	Program	ANGGARAN			KINERJA		
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	%		(outcome/output)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8



NO.	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (outcome/output)		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	%				
KECAMATAN CIHIDEUNG								
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.019.712.320	6.978.780.147	99,42%	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	%	99,31%
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	632.231.620	601.556.400	95,15%	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	100	%	100
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.505.982.500	2.486.216.508	99,21%	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	100
IV	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	2.000.000	2.000.000	100	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Cihideung	100	%	100
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5.800.000	5.800.000	100	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	%	100

NO.	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (outcome/output)		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7		8
KECAMATAN CIPEDES								
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.685.652.290	5.638.207.760	99,17	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	100	%	100
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	125.200.000	123.287.000	98,47	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	%	100
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.989.437.200	1.966.319.095	98,84	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	100
					Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	18	Laporan	100
IV	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	7.500.000	7.199.800	96	Persentase Penanganan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Cipedes	100	%	100
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	46.000.000	45.999.700	100	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	%	100



NO.	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (outcome/output)		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7		8
KECAMATAN TAWANG								
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.490.863.670	6.445.707.906	99,3	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tawang, Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tawang	Sangat Baik (90,11 - 91,11), A (82,00)		100
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	910.146.000	886.486.496	97,4	Tingkat kinerja kecamatan	Sedang (252-257)		100
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.132.940.630	2.122.514.656	99,51	Persentase Kelurahan dengan kategori Cepat Berkembang	80	%	100
IV	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	3.000.000	3.000.000	100	Persentase penanganan gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan	100	%	100
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	8.000.000	8.000.000	100	Tingkat kinerja kecamatan	Sedang (252-257)		100

NO	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (outcome/output)		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7		8
KECAMATAN INDIHIANG								
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.959.470.300	6.912.556.016	99,33	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Baik A (83,00)		100
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.590.605.500	1.566.038.055	98,46	"Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) "	Sangat Baik (89,50)		100
					Persentase penyelenggaraan pemerintahan pelayanan Publik	100	%	100
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.451.965.000	2.440.989.725	99,55	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Indihiang	100	%	100
IV	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	5.000.000	2.015.000	40,3	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%	100
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	28.700.000	26.360.000	91,85	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	%	100



NO	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	%		(outcome/output)		
1	2	3	4	5	6	7		8
KECAMATAN KAWALU								
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.042.145.946	10.009.427.383	99,67	CAPAIAN SAKIP PERANGKAT DAERAH	100	%	100
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.180.022.542	1.171.973.437	99,32	Capaian Indeks Kepuasan Kategori Masyarakat (IKM)	100	%	100
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.049.414.294	4.017.870.587	99,22	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	100	%	100
IV	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	10.000.000	10.000.000	100	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec. Kawalu	12	%	100
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	30.073.850	25.713.200	85,5	Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan	39	%	100

NO.	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (outcome/output)		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7		8
KECAMATAN CIBEUREUM								
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.733.892.362	9.689.039.355	99,54	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cibeureum, Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Cibeureum	Sangat Baik (89,00), BB (82,85)		100
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	659.005.858	654.551.047	99,32	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	%	100
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.477.476.400	3.454.432.121	99,34	Presentase Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Kecamatan Tamansari	100	%	100
IV	Program Koodinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.775.000	6.392.125	94,35	Presentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%	100

NO	Program	ANGGARAN			KINERJA		
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (outcome/output)	Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
KECAMATAN TAMANSARI							



NO	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (outcome/output)		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7		8
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.071.481.152,00	8.037.041.823,00	99,57	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	100	%	100
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	885.072.000,00	866.038.310,00	97,85	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	%	100
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.223.949.100,00	3.177.863.073,00	98,57	Presentase Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Kecamatan Tamansari	100	%	100
IV	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	10.000.000	9.999.900	100	Persentase Penanganan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec. Tamansari	100	%	100
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	33.844.200,00	33.473.500,00	98,9	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	%	100

NO	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (outcome/output)		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7		8
KECAMATAN MANGKUBUMI								
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.454.463.750	8.391.115.521	99,25	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100	%	100
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	558.231.000	543.477.496	97,36	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	%	100
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.393.224.600	3.378.544.915	99,56738	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	100
IV	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	30.000.000	29.890.950	99,64	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Mangkubumi	100	%	100
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	51.200.000	51.185.000	99,97	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	%	100



NO.	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (outcome/output)		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7		8
KECAMATAN BUNGURSARI								
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.996.004.668	7.969.505.053	99,67	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bungursari, Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Bungursari	Sangat Baik (90,11 - 91,11), BB (78,00)		100
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	206.176.000	205.570.050	99,71	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	%	100
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.672.696.800	2.660.754.976	99,55	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	100
IV	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	10.000.000	9.999.780	100	Presentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%	100
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	27.000.000	26.998.250	99,99	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	%	100

NO	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (outcome/output)		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7		8
KECAMATAN PURBARATU								
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.189.718.110	7.168.969.686	99,71	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	100	%	100
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	937.812.000	913.203.100	97,38	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan Publik	100	%	100
III	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	48.155.000	48.085.000	99,85	Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	%	100
IV	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	6.550.000	6.550.000	100	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum di wilayah Kecamatan purbaratu	100	%	100
V	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.323.215.000	2.310.808.129	99,47	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa & kelurahan	100	%	100

NO.	Program	ANGGARAN			KINERJA		
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target	
		(Rp)	(Rp)	%		(outcome/output)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							



NO.	Program	ANGGARAN			KINERJA			
		Target (Pagu)	Realisasi		Uraian Program	Target (outcome/output)		Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7		8
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.069.125.200	2.980.496.517	97,11	Persentase keselarasan perencanaan perangkat daerah	100	%	100
II	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	4.255.000.000	4.125.256.227	96,95	Persentase capain Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	%	100
III	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	4.445.735.000	4.193.843.064	94,33	Persentase parpol yang dibina	100	%	100
IV	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5.497.000.000	5.027.742.984	91,46	Persentase ormas yang dibina	71	%	100
V	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	180.000.000	161.654.512	89,81	Persentase capaian pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	100	%	100
VI	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	24.467.261.100	23.809.303.008	97,31	persentase penanganan konflik sosial	100	%	100

Sumber: LKPJ Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2023, Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan sebagai berikut:
Realisasi Program yang belum memenuhi target kinerja sebanyak 25 Program;
Realisasi Program yang telah memenuhi target kinerja sebanyak 98 Program;
Realisasi Program yang melebihi target kinerja sebanyak 60 Program.



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; khususnya Pasal 156 dinyatakan bahwa : (i) Analisis keuangan Daerah dirumuskan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD; (ii) Analisis keuangan Daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah; serta (iii) Kapasitas riil keuangan Daerah, diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan.

Menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur APBD. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa 4 tahun mendatang. Dasar yuridis pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya mengacu pada batasan pengelolaan keuangan daerah yang tercantum dalam:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Peraturan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut, dan bermanfaat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban, yang kesemuanya mengacu pada tujuan tersebut di atas.

Untuk memahami kemampuan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya, perlu dicermati kondisi kinerja keuangannya, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa yang akan datang.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dalam periode 5 tahun yang lalu yaitu periode tahun 2018-2022. Berdasarkan analisis kinerja masa lalu atau beberapa tahun kebelakang, maka akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai analisis proyeksi keuangan ke depan.

Kinerja keuangan masa lalu terdiri atas kinerja pelaksanaan APBD dan neraca keuangan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD terdiri atas target dan realisasi pendapatan, target dan realisasi belanja, serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sedangkan neraca keuangan daerah berupa perkembangan dan analisis neraca keuangan daerah.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja dan kapasitas keuangan daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah selama 5 tahun yang lalu dapat tercermin dari realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai kebutuhan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, dengan kekayaannya tersebut pemerintah daerah membuat program dan kegiatan untuk menjawab kebutuhan pembangunan sebagaimana dirumuskan dalam permasalahan dan isu strategis baik jangka pendek/tahunan maupun jangka menengah.

Struktur Pendapatan Daerah, berdasarkan peraturan yang berlaku terdiri dari:

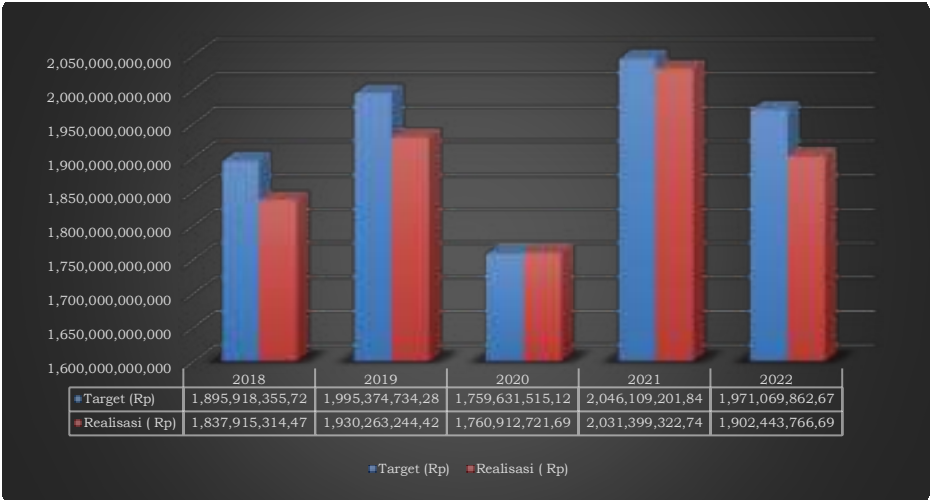
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan, yaitu bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).



3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan daerah lain, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Selama kurun waktu 5 tahun, kinerja keuangan dari sisi pendapatan daerah telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari realisasi pendapatan daerah tahun 2018 yaitu sebesar 1,837 trilyun rupiah meningkat menjadi 1,902 triliun rupiah pada tahun 2022 atau secara keseluruhan meningkat sebesar 3,51 %. Selengkapnya rincian target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar 3.1.

Gambar 3.1.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022

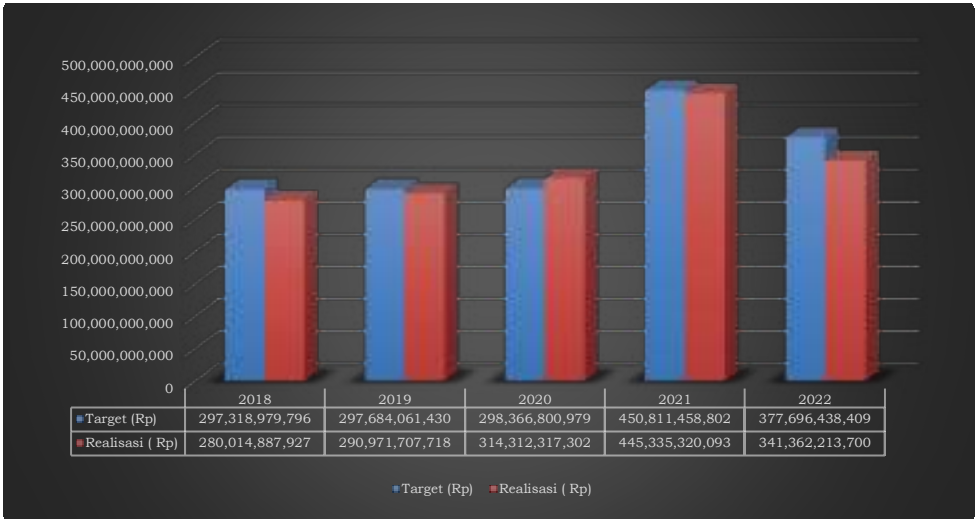


Sumber: BPKAD Kota Tasikmalaya, 2024.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2018, Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya dari target sebesar Rp.297,318 milyar, dengan realisasinya sebesar Rp.280,014 milyar (94,18%), selanjutnya meningkat cukup signifikan pada tahun 2022 dari target sebesar Rp.377,696 milyar, realisasinya sebesar Rp.341,362 milyar (90,38%). Untuk lebih jelasnya lihat gambar 3.2.

Gambar 3.2.
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018-2022



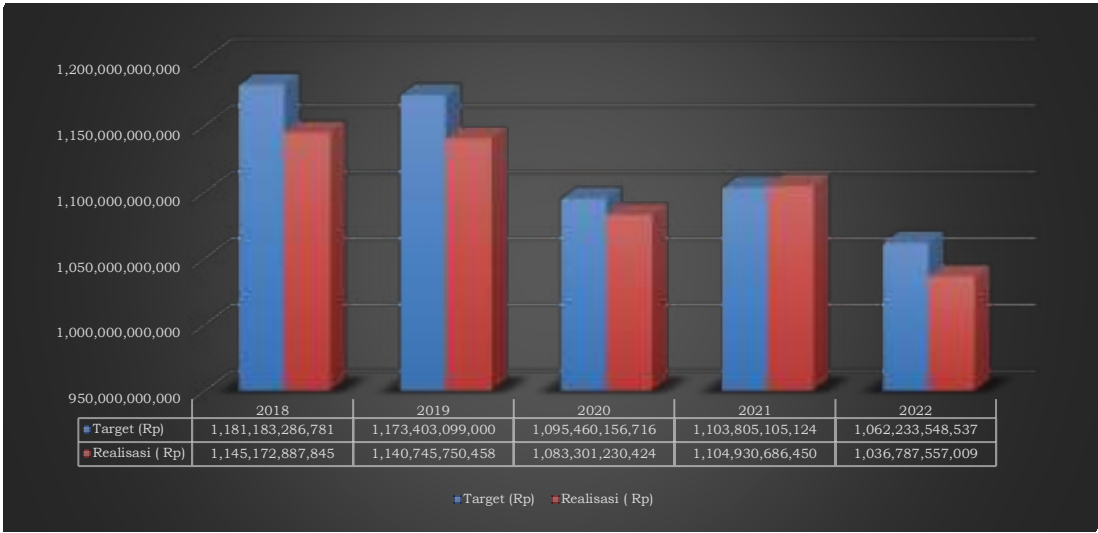
Sumber: BPKAD Kota Tasikmalaya, 2024.



2. Dana Perimbangan

Selama tahun 2018-2022, target tahun 2018 sebesar Rp.1,181 triliun realisasinya Rp.1,145 triliun (96,95%); dan tahun 2022 dari target sebesar Rp.1,062 triliun rupiah realisasinya Rp.1,036 triliun (97,55%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.3.

Gambar 3.3.
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2018-2022

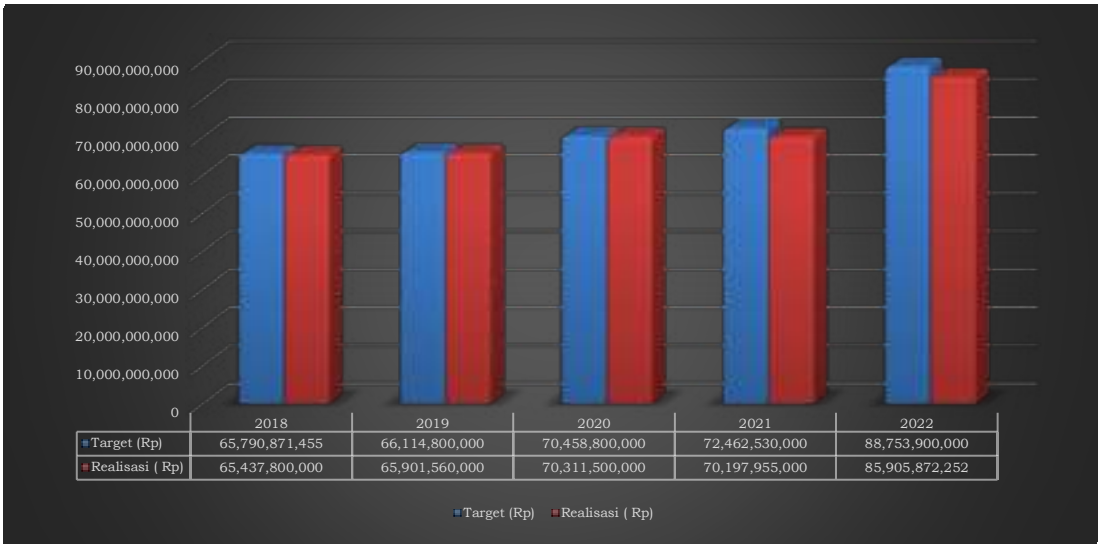


Sumber: BPKAD Kota Tasikmalaya, 2024.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada tahun 2018, lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan Rp.65,790 milyar realisasinya Rp.65,437 milyar (99,46%), tahun 2019 di targetkan Rp.66,114 milyar realisasinya Rp.65,901 milyar (99,68%), tahun 2020 ditargetkan Rp.70,458 milyar realisasinya Rp.70,311 milyar (99,79%), tahun 2021 ditargetkan Rp.72,462 milyar realisasinya Rp.70,077 milyar (96,71%) dan tahun 2022 ditargetkan Rp.88,753 milyar realisasinya Rp.85,905 milyar (96,79%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.4.

Gambar 3.4.
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun 2018-2022



Sumber: BPKAD Kota Tasikmalaya, 2024.



3.1.1.2. Belanja Daerah

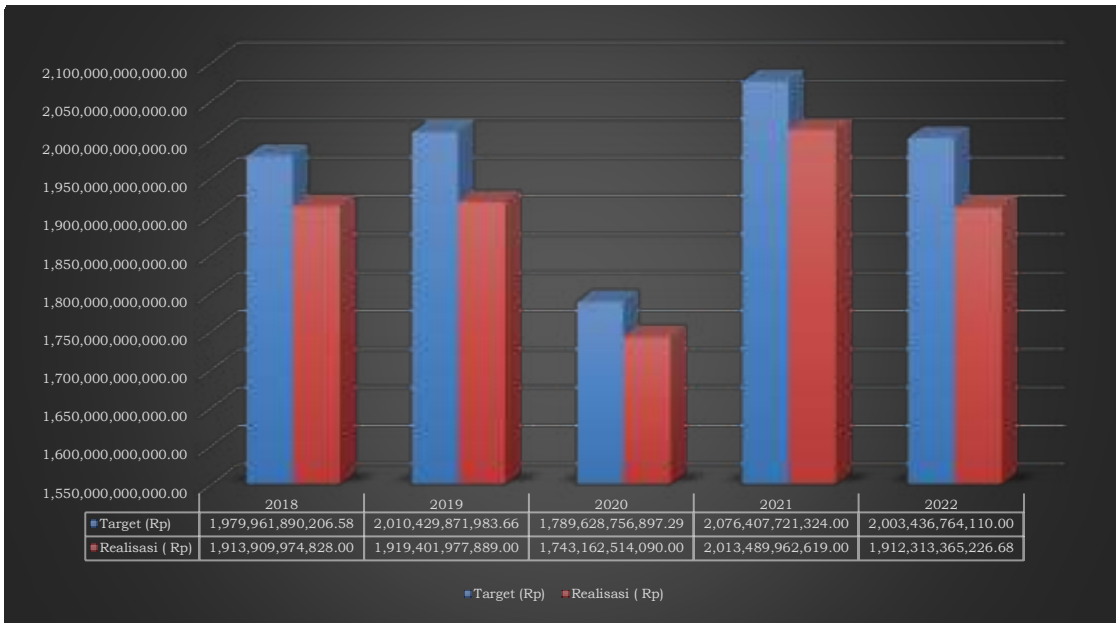
Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dari tahun 2018-2022, total akumulasi realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya sebesar Rp. 9,502 triliun dari rencana sebesar Rp. 9,859 triliun (96,37%).

Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- b. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- c. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- d. Belanja transfer Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Gambar 3.5.
Target dan Realisasi Belanja Tahun 2018-2022



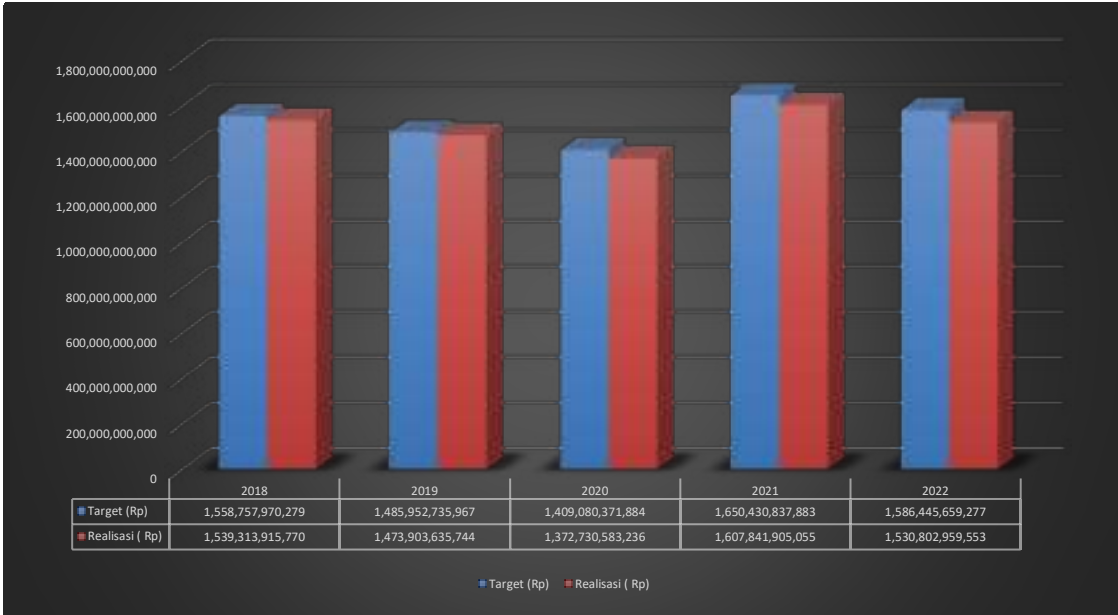
Sumber: BPKAD Kota Tasikmalaya, 2024.

1. Belanja Operasi

Realisasi belanja Operasi dari tahun 2018-2022 sebesar Rp. 7,524 triliun dari rencana sebesar Rp.7,690 triliun. Rincian rencana dan realisasi belanja Operasi dapat dilihat pada gambar 3.6.



Gambar 3.6.
Target dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2018-2022

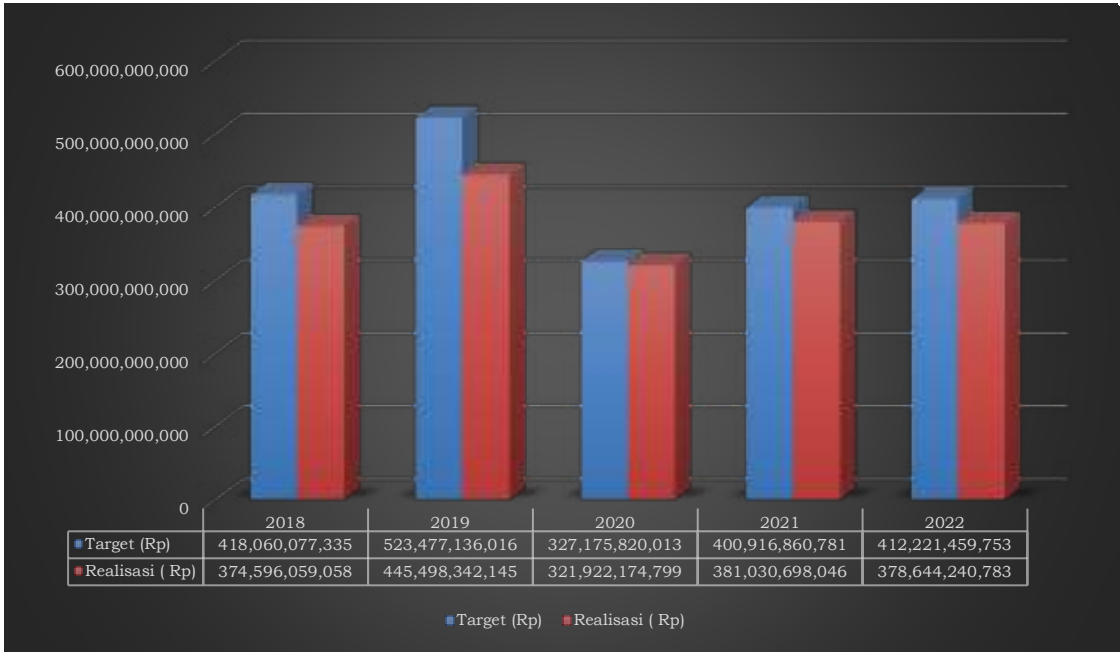


Sumber: BPKAD Kota Tasikmalaya, 2024.

2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal dari Tahun 2018-2022 sebesar Rp. 1,901 triliun. Rincian rencana dan realisasi belanja modal dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.7.
Target dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2018-2022



Sumber: BPKAD Kota Tasikmalaya, 2024.

3. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga dari Tahun 2018-2022 sebesar Rp. 75,993 milyar. Rincian rencana dan realisasi belanja tidak terduga dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.8.

Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2018-2022



Sumber: BPKAD Kota Tasikmalaya, 2024.



3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah dari Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2018-2022

Uraian	<u>2018</u>		<u>2019</u>		<u>2020</u>		<u>2021</u>		<u>2022</u>	
	<u>TARGET</u>	<u>REALISASI</u>	<u>TARGET</u>	<u>REALISASI</u>	<u>TARGET</u>	<u>REALISASI</u>	<u>TARGET</u>	<u>REALISASI</u>	<u>TARGET</u>	<u>REALISASI</u>
PEMBIAYAAN DAERAH										
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	113.548.945.486	107.728.014.704	28.456.755.406	79.534.816.944	55.397.875.408	77.418.838.521	91.798.519.475	75.943.417.801	79.866.901.438	57.934.408.438
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	28.500.000.000	14.405.361.345	12.396.206.703	53.992.807.070	24.158.320.000	63.370.526.654	61.500.000.000	43.985.876.490	47.500.000.000	25.562.006.620
PEMBIAYAAN NETTO	85.048.945.486	93.322.653.359	16.060.548.703	25.542.009.874	31.239.555.408	14.048.311.867	30.298.519.475	31.957.541.311	32.366.901.438	32.372.401.818
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	16.322.587.947	-	35.397.875.408	0	31.798.519.475	0	49.866.901.438	0,00	22.502.803.291

Sumber: BPKAD Kota Tasikmalaya, 2024.



3.1.1.4. Rata-rata Pertumbuhan APBD

Berdasarkan data-data yang tersaji pada tabel dan gambar perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan APBD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi APBD

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Keuangan 2018-2022
Pendapatan	1.837.915.314.476,09	1.930.263.244.423,47	1.760.912.721.698,25	2.031.399.322.745,92	1.902.443.766.698,35	(0,05)
Pendapatan asli daerah (PAD)	280.014.887.927,09	290.971.707.718,47	314.312.317.302,25	445.335.320.092,92	341.362.213.700,35	0,22
Pendapatan transfer	1.492.462.626.549,00	1.573.389.976.705,00	1.376.288.904.396,00	1.515.866.047.653,00	1.475.175.680.746,00	(0,10)
Dana insentif daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	19.040.718.000,00	26.767.451.000,00	0,41
Pendapatan transfer antar daerah	1.492.462.626.549,00	432.644.226.247,00	292.987.673.972,00	391.894.643.203,00	411.620.672.737,00	0,78
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	65.437.800.000,00	65.901.560.000,00	70.311.500.000,00	70.197.955.000,00	85.905.872.252,00	0,28
Jumlah pendapatan	1.837.915.314.476,09	1.930.263.244.423,47	1.760.912.721.698,25	2.031.399.322.745,92	1.902.443.766.698,35	(0,05)
Belanja	1.913.909.974.828,00	1.919.401.977.889,00	1.741.920.201.560,00	2.013.489.962.619,00	1.912.313.365.226,68	0,01
Belanja operasi	1.539.313.915.770,00	1.473.903.635.744,00	1.372.730.583.236,00	1.607.841.905.055,00	1.530.802.959.552,68	0,10
Belanja modal	374.596.059.058,00	445.498.342.145,00	321.922.174.799,00	381.030.698.046,00	378.644.240.783,00	(0,29)
Belanja tidak terduga	0,00	0,00	47.267.443.525,00	24.617.359.518,00	2.866.164.891,00	(1,36)
Transfer	1.005.405.060,00		1.242.312.530,00			0,24
Jumlah belanja	1.913.909.974.828,00	1.919.401.977.889,00	1.741.920.201.560,00	2.013.489.962.619,00	1.912.313.365.226,68	0,01
Total surplus/(defisit)	-77.000.065.411,91	10.861.266.534,47	17.750.207.608,25	17.909.360.126,92	-9.869.598.528,33	0,23
Pembiayaan						



Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Keuangan 2018-2022
Penerimaan pembiayaan	107.728.014.703,67	79.534.816.943,76	77.418.838.521,23	75.943.417.801,48	57.934.408.438,40	(0,02)
Pengeluaran pembiayaan	14.405.361.345,00	53.992.807.070,00	63.370.526.654,00	43.985.876.490,00	25.562.006.620,00	(3.30)
Pembiayaan netto	93.322.653.358,67	25.542.009.873,76	14.048.311.867,23	31.957.541.311,48	32.372.401.818,40	1.56
Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan	16.322.587.946,76	35.397.875.408,23	31.798.519.475,48	49.866.901.438,40	22.502.803.291,01	(1.25)

Sumber: BPKAD Kota Tasikmalaya, Tahun 2024.



3.1.2. Neraca Daerah

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Tasikmalaya menyusun laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada waktu tertentu. Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Ekuitas Dana yang meliputi Dana Lancar, dan Dana Investasi, merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Untuk lebih mengetahui tentang perkembangan neraca daerah Kota Tasikmalaya tersaji pada tabel 3.3. berikut:



Tabel 3.3.
Neraca Pemerintah Kota Tasikmalaya
Per 31 Desember Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
ASET					
ASET LANCAR	103.292.895.888,70	126.168.549.573,97	115.151.099.781,71	141.272.500.767,15	146.859.382.282,84
Kas	16.356.675.978,76	35.450.316.597,23	31.905.163.882,48	49.899.057.812,40	22.639.946.954,07
Piutang	69.559.094.288,25	67.222.578.401,66	61.516.406.446,20	61.399.553.304,21	86.361.796.186,61
Persediaan	16.138.430.549,46	22.293.671.551,32	20.693.441.001,34	29.083.578.869,11	37.270.467.057,61
Beban Dibayar di Muka	1.238.695.072,23	1.201.983.023,75	1.036.088.451,69	890.310.781,43	587.172.084,55
ASET TETAP	3.034.491.416.631,37	3.338.629.078.489,96	3.481.406.094.763,24	3.614.486.211.713,39	3.774.896.213.987,04
Tanah	1.196.505.756.920,04	1.298.656.796.240,04	1.341.958.168.584,08	1.365.170.638.881,04	1.360.042.383.925,68
Peralatan dan mesin	710.129.106.100,64	787.922.862.826,78	841.677.741.588,95	924.755.110.919,55	1.032.507.478.505,39
Gedung dan bangunan	712.316.949.169,78	909.320.854.334,39	947.887.562.312,46	977.699.113.553,52	1.041.622.464.958,61
Jalan, irigasi, dan jaringan	2.158.395.783.179,77	2.397.613.479.827,87	2.563.472.132.784,26	2.779.946.879.678,13	2.970.209.541.569,18
Aset tetap lainnya	99.397.437.197,11	33.313.822.101,30	33.271.712.813,11	38.338.088.926,90	41.406.660.186,11
Konstruksi dalam pengerjaan	72.455.600.412,28	125.993.282.216,81	177.907.027.909,01	186.907.045.690,01	197.239.954.268,00
Akumulasi Penyusutan	-1.914.709.216.348,25	-2.214.192.019.057,22	-2.424.768.251.228,62	-2.658.330.665.935,75	-2.868.132.269.425,93
ASET LAINNYA	45.539.567.800,32	45.535.479.685,73	47.365.278.940,74	44.721.021.830,74	30.201.729.607,52
Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)					8.160.783.711,00
Tagihan penjualan angsuran					



Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah					
Kemitraan dengan pihak ketiga					10.291.224.855,00
Aset tak berwujud	35.460.515.379,74	43.649.706.582,74	50.572.847.889,00	53.769.203.547,00	53.776.742.546,00
Tuntutan Perbendaharaan					
Aset Lain-Lain	64.815.925.030,32	58.309.794.342,72	54.404.528.239,38	54.958.489.582,66	52.287.630.759,74
Tagihan Jangka Panjang	3.125.000,00	12.850.000,00	5.850.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-27.396.287.081,20	-37.181.916.622,00	-40.835.961.667,60	-44.877.953.226,80	-48.838.820.586,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-27.343.710.528,54	-19.254.954.617,73	-16.781.985.520,04	-19.140.718.072,12	-45.487.831.678,22
INVESTASI JANGKA PANJANG	68.619.706.808,01	33.824.680.717,01	35.018.872.808,03	34.962.203.350,10	42.852.775.978,56
Dana Bergulir	13.394.925.000,00	13.394.925.000,00	13.394.925.000,00	1.093.581.226,21	1.151.027.362,63
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	65.886.291.861,95	31.081.001.152,56	32.265.104.011,82	33.868.622.123,89	41.701.748.615,93
(Dana Bergulir Diragukan Tertagih)	-10.661.510.053,94	-10.651.245.435,55	-10.641.156.203,79		
DANA CADANGAN	-	-			
Dana Cadangan	-	-			
JUMLAH ASET DAERAH	3.251.943.587.128,40	3.544.157.788.466,66	3.678.941.346.293,71	3.835.441.937.661,39	3.994.810.101.855,96
KEWAJIBAN	102.479.679.047,58	132.229.865.556,08	81.576.043.736,00	35.743.115.587,00	115.476.635.511,63
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	102.479.679.047,58	132.229.865.556,08	81.576.043.736,00	35.743.115.587,00	115.476.635.511,63



Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Utang perhitungan pihak ketiga	-	50.429.168,00	106.482.087,00	32.156.374,00	137.143.664,00
Uang muka dari kas daerah	-	-	0		
Pendapatan diterima dimuka	1.451.786.392,58	1.715.622.761,08	0	1.642.899.837,00	1.809.503.366,63
Utang Jangka Pendek Lainnya	41.614.638.370,00	63.353.552.325,00	1.669.539.905,00		
Utang Belanja			64.616.884.629,00	34.068.059.376,00	113.529.988.481,00
Utang Beban	59.413.254.285,00	67.070.958.266,00	15.183.137.115,00		
EKUITAS DANA	3.149.463.908.080,82	3.411.927.922.910,58	3.597.365.302.557,71	3.799.698.822.074,39	3.889.536.145.564,34
EKUITAS DANA LANCAR					
SILPA	-	-	-		
Cadangan piutang	-	-	-		
Cadangan persediaan	-	-	-		
Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-	-	-		
EKUITAS DANA INVESTASI	-	-	-		
Diinvestasikan dalam aset tetap	-	-	-		
Diinvestasikan dalam aset lainnya	-	-	-		
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	-	-	-		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.251.943.587.128,40	3.544.157.788.466,66	3.678.941.346.293,71	3.835.441.937.661,39	4.005.012.781.075,97

Sumber: BPKAD Kota Tasikmalaya, 2024.



Dari tabel 3.3, rata-rata pertumbuhan aktiva atau aset Pemerintah Kota Tasikmalaya dari tahun 2018-2022 sebesar 0,03% yang menandakan bahwa jumlah aktiva/aset Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan. Aset tersebut terdiri atas aset lancar, aset tetap, aset lainnya, investasi jangka panjang, dan dana cadangan. Hal ini disebabkan terjadinya peningkatan di aset tetap dan aset lainnya.

Aset lancar yang terdiri atas kas, piutang, dan persediaan tetap selama periode tahun 2018-2022 mengalami penurunan dengan rata-rata penurunannya -0,04%. Aset tetap yang terdiri atas tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan rata-rata peningkatannya mencapai 0,03%. Aset lainnya berupa tuntutan ganti rugi, aset tak berwujud, tuntutan perbendaharaan dan aset lain-lain rata-rata pertumbuhannya mencapai -0,34%. Kemudian Investasi jangka panjang berupa dana bergulir dan penyertaan modal pemerintah daerah rata-rata pertumbuhannya mencapai -0,77%.

Prinsip neraca menunjukkan angka-angka yang secara keseluruhan menunjukkan keseimbangan prinsip dari tiga unsur yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam rumus persamaan ($\text{aset} = \text{kewajiban} + \text{ekuitas dana}$) atau ($\text{aktiva} = \text{pasiva}$). Rata-rata pertumbuhan pasiva berupa kewajiban dan ekuitas dana Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2018-2022 sebesar 0,03%.

Rata-rata pertumbuhan kewajiban Pemerintah Kota Tasikmalaya sebesar 1,00% yang terdiri atas kewajiban/utang jangka pendek. Sedangkan rata-rata pertumbuhan ekuitas dana Pemerintah Kota Tasikmalaya yang terdiri atas ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi mencapai 0,05 %.

Selain analisis di atas, analisis neraca daerah yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya, rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, rumusnya yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan, hasilnya dibagi kewajiban jangka pendek.

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total hutang terhadap total aset (*total debt to total asset ratio*) dan rasio hutang terhadap ekuitas (*total debt to equity ratio*).



Rasio total hutang terhadap total aset, mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin hutangnya dengan aktiva/aset yang dimilikinya, rumusnya total hutang dibagi total aset. Sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas mengukur seberapa jauh aset pemerintah daerah dibelanjai pihak kreditur dan modal sendiri (ekuitas), rumusnya total hutang dibagi total ekuitas. Semakin kecil rasio ini berarti semakin kecil dana yang diambil dari luar dan sebaliknya.

Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Rasio aktivitas juga dimaknai merupakan rasio yang mengukur seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam pendayagunaan aktiva yang dimiliki dan dalam pengelolaan sumber-sumber dananya.

Jenis rasio aktivitas yang digunakan untuk pemerintah daerah antara lain rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Semakin besar periode rata-rata, semakin besar risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang dan sebaliknya. Cara perhitungan rata-rata umur piutang adalah 365 dibagi perputaran piutang, dimana perputaran piutang sendiri adalah pendapatan daerah dibagi rata-rata piutang pendapatan daerah. Sedangkan, rata-rata piutang pendapatan daerah adalah saldo awal piutang ditambah saldo akhir piutang kemudian dibagi dua.

Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik). Semakin besar periode rata-rata, semakin besar risiko kemungkinan persediaan berada di gudang dan sebaliknya. Cara menghitung rata-rata umur persediaan adalah 365 dibagi perputaran persediaan, dimana perputaran persediaan adalah nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun dibagi rata-rata nilai persediaan. Sedangkan, rata-rata nilai persediaan adalah saldo awal persediaan ditambah saldo akhir persediaan lalu hasilnya dibagi dua.

Tabel 3.4.
Rasio Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya
Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio likuiditas					
	▪ Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	1,01	0,95	1,41	3,54	1,27
	▪ Rasio cepat (<i>quick ratio</i>)	0,85	0,79	1,16	0,88	0,94
2	Rasio solvabilitas					
	▪ Rasio total hutang terhadap total aset	0,03	0,04	0,02	0,01	0,02
	▪ Rasio hutang terhadap modal	0,03	0,04	0,02	0,02	0,3
3	Rasio aktivitas					
	▪ Rata-rata umur piutang	12,18	16,86	9,27	12,64	14,19
	▪ Rata-rata umur persediaan	15,29	86,58	381,64	337,79	300,07

Sumber: BPKAD Kota Tasikmalaya, Tahun 2024.



Dari tabel 3.4 di atas menunjukkan bahwa rasio lancar Pemerintah Kota Tasikmalaya berfluktuasi, dari 1,01 pada tahun 2018 menjadi 1,27 pada tahun 2022. Pada tahun 2019, rasio lancar Pemerintah Kota Tasikmalaya sebesar 0,95 artinya setiap Rp.1 kewajiban jangka pendek/hutang lancar Pemerintah Kota Tasikmalaya dijamin oleh aktiva lancarnya sebesar Rp.0,95. Fluktuasi rasio cepat Pemerintah Kota Tasikmalaya polanya sama dengan rasio lancar, yang secara implisit berarti Pemerintah Kota Tasikmalaya mampu membayar kewajiban jangka pendeknya.

Sedangkan rasio solvabilitas terutama untuk rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2018 sampai dengan 2022 berkisar maksimal pada 0,04. Rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tahun 2019 sebesar 0,04 artinya sebesar Rp0,04 dari setiap Rp1,00 total aktiva merupakan pendanaan dari hutang, atau aktiva Pemerintah Kota Tasikmalaya yang didanai oleh hutang sebesar 0,04%, sisanya dari modal sendiri (ekuitas). Untuk rasio hutang terhadap modal, memiliki rasio yang sama dengan rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kota Tasikmalaya. Pada tahun 2019, rasio hutang terhadap modal sebesar 0,04 menunjukkan bahwa Rp0,04 dari setiap Rp1,00 modal sendiri menjadi jaminan hutang, dengan kata lain menunjukkan tingginya modal sendiri dari Pemerintah Kota Tasikmalaya (dibelanjai pihak sendiri).

Adapun rasio aktivitas menunjukkan bahwa rata-rata umur piutang Pemerintah Kota Tasikmalaya cukup singkat, artinya Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menagih piutang atau merubah piutang menjadi kas, yaitu dalam tempo hanya 16,86 hari pada tahun 2019.

Berdasar tabel 3.4 bahwa rata-rata umur persediaan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebesar 86,58 hari pada tahun 2019; 381,64 hari pada tahun 2020; menurun menjadi 337,79 hari pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022, sebesar 300,07 hari.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kapasitas fiskal daerah mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan fiskal daerah ini dapat diukur dari besar kecilnya penerimaan pendapatan daerah yang tertuang dalam APBD. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dengan keterbatasan kemampuan fiskal dan sumber-sumber pendapatan daerah, mengharuskan pemerintah daerah melakukan upaya terobosan dalam meningkatkan pendapatan daerah, diantaranya dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana-dana perimbangan dari pusat maupun provinsi, termasuk pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta aset daerah secara profesional guna menunjang pendapatan pemerintah daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah



nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah;
2. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, mencakup Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya, Lain-lain Penerimaan, Dana Transfer Pusat, dan Dana Insentif Daerah.

Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya adalah:

- 1) Penggalan dan peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan (intensifikasi dan ekstensifikasi) terutama bagi sumber pendapatan pajak dan retribusi yang potensial;
- 2) Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan Perangkat Daerah penghasil;
- 3) Optimalisasi penggunaan Teknologi dan Sistem Infomasi untuk pengelolaan pendapatan daerah;
- 4) Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah Penghasil, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
- 5) Meningkatkan penyertaan modal pada BUMD dan Perusahaan Daerah untuk peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
- 6) Meningkatkan pendayagunaan aset dan keuangan daerah.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:

- 1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penghasilan dana bagi hasil baik dari pajak maupun bukan pajak lainnya;
- 2) Meningkatkan akurasi data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Perimbangan;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

Berdasarkan arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut di atas, untuk dapat merealisasikan proyeksi penerimaan pendapatan daerah diperlukan strategi pencapaiannya, antara lain:

- a. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, dapat ditempuh melalui:
 - 1) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
 - 2) Optimalisasi pemungutan atas pajak dan retribusi serta pengembangan sistem penagihan atas wajib pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;



- 3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah
 - 4) Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - 5) Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak, seperti pengembangan gerai/outlet, dan kerjasama dengan pihak perbankan;
 - 6) Meningkatkan penyertaan modal untuk BUMD dan Perusahaan Daerah guna peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
 - 7) Revitalisasi Perusahaan Daerah (PD) melalui berbagai upaya, antara lain: pengelolaan PD secara profesional, peningkatan sarana/prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas agar PD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari publik/perbankan;
 - 8) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - 9) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, terutama dengan perbankan sehingga mempermudah pelayanan pembayaran pajak daerah melalui layanan perbankan secara langsung;
 - 10) Mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah penghasil.
- b. Strategi pencapaian target Dana Perimbangan, dapat ditempuh melalui:
- 1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak penghasilan dan Pajak lainnya yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Tasikmalaya, serta bukan pajak lainnya
 - 2) Meningkatkan akurasi data-data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Perimbangan;
 - 3) Sosialisasi mengenai pungutan pajak dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 - 4) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengupayakan peningkatan Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak).
- c. Strategi pencapaian target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dapat ditempuh melalui:
- 1) Sosialisasi mengenai pungutan pajak yang dikelola oleh provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dan pajak metrologi, dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 - 2) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bantuan Keuangan.

3.2.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan Belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang efisien, efektif, proporsional, fokus, transparan dan akuntabel, terutama belanja daerah dengan ketentuan sebagai berikut:



1. Alokasi belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan dana kelurahan;
2. Alokasi belanja untuk pelayanan dan operasional perangkat daerah yang sifatnya wajib diselenggarakan dalam 1 tahun penuh, diantaranya seperti biaya listrik, tenaga pengamanan dan kebersihan kantor, dll;
3. Alokasi belanja untuk Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang terdiri dari 6 bidang urusan yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial;
4. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan prioritas dalam RPJMD melalui pendekatan *Money Follow Programs*, *Holistik-Tematik*, *Integratif dan Spasial*;
5. Alokasi belanja untuk kegiatan prioritas yang menjadi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kunjungan kerja pimpinan daerah dan anggota DPRD pada saat pelaksanaan reses;
6. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan target kinerja dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
7. Alokasi belanja untuk mendukung program dan kegiatan prioritas pemerintah pusat dan provinsi.
8. Alokasi belanja untuk pendanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024.

3.2.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada:

1. Optimalisasi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
2. Penyertaan Modal atau Investasi Daerah kepada perusahaan daerah;
3. Pembayaran Pokok Utang pada pinjaman yang dilakukan oleh RSUD dr. Soekardjo.

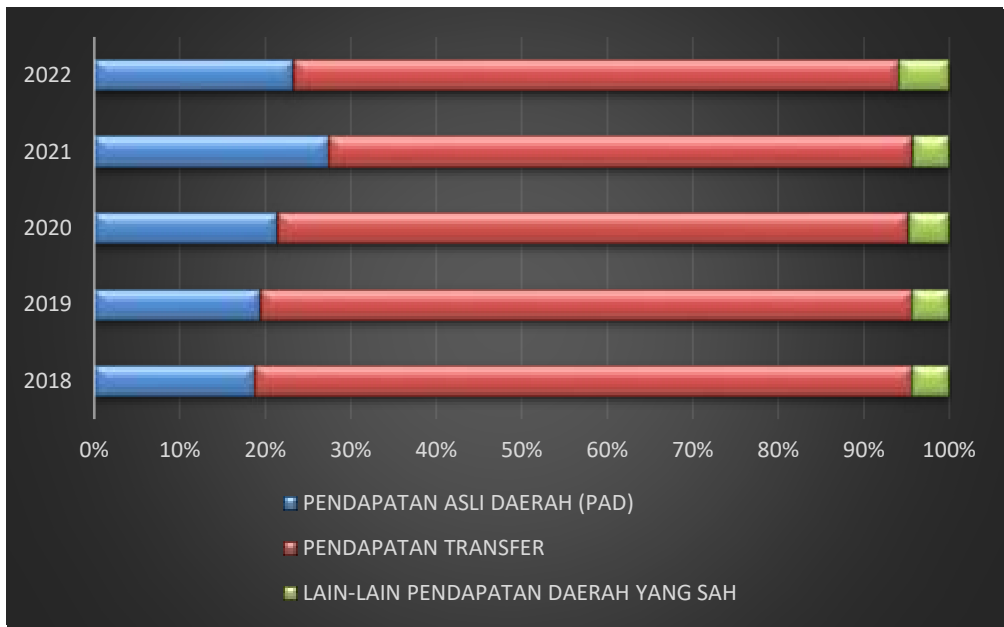
3.2.4. Proporsi Anggaran Pendapatan

Sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah; dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2018-2022 Pemerintah Kota Tasikmalaya berhasil meningkatkan sumber pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dan mendanai pembangunan di Kota Tasikmalaya.



Ditinjau dari nilai atau besaran perolehannya masing-masing sumber pendapatan daerah mengalami peningkatan. Ditinjau dari proporsinya, pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan walaupun tetap di bawah dana perimbangan. Proporsi perolehan pendapatan daerah Kota Tasikmalaya dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar 3.9.

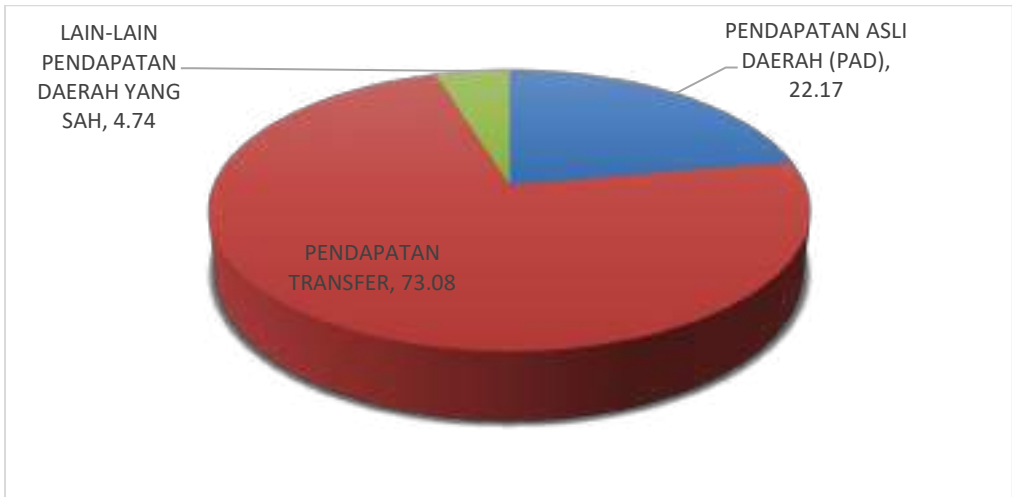
Gambar 3.9.
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022



Sumber: BPKAD Kota Tasikmalaya, 2024

Bila dihitung secara agregat selama 5 (lima) tahun terakhir, dari tahun 2018-2022, kontribusi keseluruhan pendapatan asli daerah sebesar 22,17%; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 4,74%. Sementara itu dana perimbangan memberi kontribusi terbesar pada pendapatan daerah Kota Tasikmalaya yakni 73,08%. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi kepada dana-dana dari pusat dan provinsi. Secara skematik proporsi total dari ketiga sumber pendapatan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.10.
Proporsi Agregat Realisasi Pendapatan Tahun 2018-2022



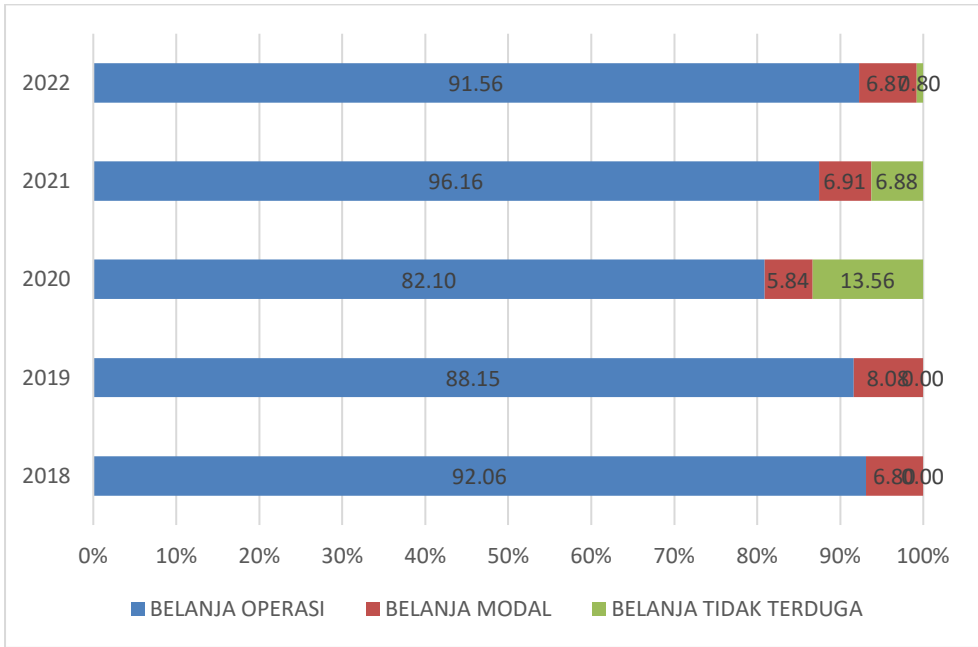
Sumber: BPKAD Kota Tasikmalaya, 2024.



3.2.5. Proporsi Penggunaan Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja Pemerintah Kota Tasikmalaya dari tahun 2018- 2022 berfluktuatif dengan adanya dampak dari covid 19 ke kas daerah sehingga terdapat penyesuaian dalam anggaran belanja daerah.

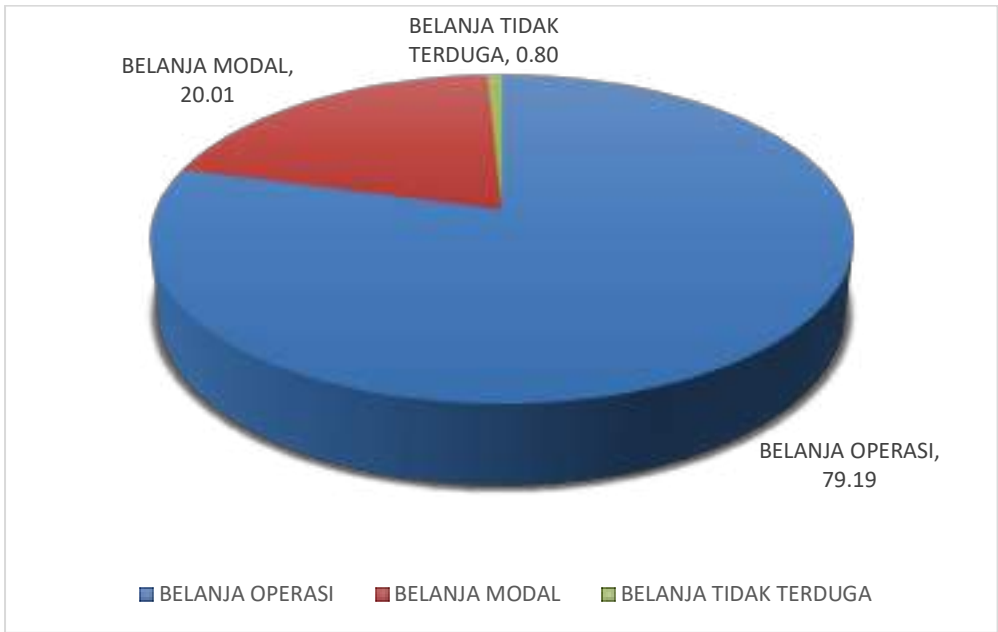
Gambar 3.11.
Proporsi Realisasi Belanja Tahun 2018-2022



Sumber: BPKAD Kota Tasikmalaya, 2024

Proporsi belanja operasional semakin bertambah dengan berkurangnya belanja modal seiring dengan belanja tidak terduga yang semakin mengecil seiring stabilnya kembali keuangan dari dampak covid 19 pada tahun 2022 selengkapnya bisa terlihat dalam gambar dibawah ini.

Gambar 3.12.
Proporsi Agregat Realisasi Belanja Tahun 2018-2022



Sumber: BPKAD Kota Tasikmalaya, 2024



3.2.6. Analisa Pembiayaan Daerah

Tabel 3.5
Surplus/Defisit dan Pembiayaan Daerah Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI
Surplus (Defisit)	(77.000.065.412)	10.861.266.534	17.750.207.608	17.909.360.127	(9.869.598.528)
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	107.728.014.704	79.534.816.944	77.418.838.521	75.943.417.801	57.934.408.438
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	102.948.945.487	16.322.587.947	35.397.875.408	31.798.519.475	49.866.901.438
Pencairan Dana Cadangan					
Penerimaan Pinjaman Daerah	4.779.069.217	63.165.168.639	42.020.963.113	42.485.876.490	8.062.007.000
Penerimaan kembali pemberian pinjaman		47.060.358		1.659.021.836	5.500.000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan					
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.405.361.345	53.992.807.070	63.370.526.654	43.985.876.490	25.562.006.620
Pembentukan Dana Cadangan					10.000.000.000
Penyertaan Modal Daerah	8.339.359.100		1.500.000.000	1.500.000.000	7.499.999.620
Pembayaran pokok utang	6.066.002.245	53.992.807.070	61.870.526.654	42.485.876.490	8.062.007.000
Pemberian pinjaman daerah					
Kegiatan lanjutan tahun lalu					
Pengembalian kelebihan penerimaan tahun lalu					
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan					
PEMBIAYAAN NETTO	93.322.653.359	25.542.009.874	14.048.311.867	31.957.541.311	32.372.401.818
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	16.322.587.947	35.397.875.408	31.798.519.475	49.866.901.438	22.502.803.291

Ket: SiLPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.
SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya.
Sumber: BPKAD Kota Tasikmalaya, 2024.

Berdasarkan tabel 3.5 pada tahun 2018 sampai 2022, APBD Kota Tasikmalaya mengalami surplus artinya realisasi pendapatan daerah melebihi realisasi belanja daerah, yaitu sebesar Rp.10,861 milyar pada tahun 2019, Rp.17,750 milyar pada tahun 2020 dan Rp.17,909 milyar pada tahun 2021. Namun pada tahun 2018 dan tahun 2022 mengalami defisit artinya realisasi pendapatan daerah kurang dari realisasi belanja daerah yakni sebesar Rp.77,000 milyar pada tahun 2018 dan Rp.9.869 milyar pada tahun 2022.



Untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Untuk mendapatkan surplus atau defisit riil harus diperhitungkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, pembayaran kegiatan lanjutan tahun lalu, dan pengembalian kelebihan penerimaan tahun lalu.

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 4 tahun ke depan. Oleh sebab itu perlu dihitung dulu kemampuan riil anggaran untuk 4 tahun kedepan. Salah satu metode sederhana untuk memperkirakan kemampuan anggaran tersebut adalah fungsi *forecast*, yaitu menggunakan regresi linear untuk memperkirakan sebuah nilai berdasarkan hubungan 2 (dua) kumpulan data, ditambah asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi pada tahun berkenaan.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Untuk kepentingan perencanaan diperlukan perkiraan pendapatan daerah Kota Tasikmalaya. Seiring dengan adanya wabah Covid-19 pendapatan daerah pada tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami penurunan dari tahun 2019, terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

Proyeksi pendapatan dan belanja untuk tahun 2023-2026 dipengaruhi oleh kondisi perekonomian pasca pandemic Covid 19, kondisi sosial politik dalam pelaksanaan Pemilu, Pilpres dan Pilkada serentak Tahun 2024 dan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah serta asumsi lainnya.

Berdasarkan hasil *forecasting* menurut data eksisting dan asumsi, didapat proyeksi pendapatan daerah tahun 2023-2026 sebagai berikut:



Tabel 3.6.
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2023-2026

URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2023	PROYEKSI TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN 2026
PENDAPATAN	1.676.762.383.893,00	1.819.725.131.648,00	1.833.726.890.062,00	1.845.521.198.490,05
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	340.921.723.189,00	375.217.227.619,00	440.259.494.081,00	478.315.684.846,39
Pajak Daerah	159.480.186.629,00	163.574.975.200,00	229.946.165.050,00	261.534.438.091,78
Retribusi Daerah	17.440.917.000,00	199.594.110.216,00	203.192.674.897,00	209.288.455.143,91
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.337.970.075,00	6.798.558.734,00	6.798.558.734,00	7.138.486.670,70
Lain-lain PAD yang Sah	156.662.649.485,00	5.249.583.469,00	322.095.400,00	354.304.940,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.335.840.660.704,00	1.444.507.904.029,00	1.393.467.395.981,00	1.367.205.513.643,66
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.120.177.844.997,00	1.172.190.593.000,00	1.182.196.136.000,00	1.176.006.211.570,00
Dana Transfer	1.120.177.844.997,00	1.172.190.593.000,00	1.182.196.136.000,00	1.176.006.211.570,00
Dana Insentif Daerah	0	0	0	0
Transfer Antar Daerah	215.662.815.707,00	272.317.311.029,00	211.271.259.981,00	191.199.302.073,66
<i>Pendapatan Bagi Hasil</i>	139.719.348.419,00	149.589.062.770,00	88.543.011.722,00	91.199.302.073,66



URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2023	PROYEKSI TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN 2026
<i>Bantuan Keuangan</i>	75.943.467.288,00	122.728.248.259,00	122.728.248.259,00	100.000.000.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0	0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN	1.676.762.383.893,00	1.819.725.131.648,00	1.833.726.890.062,00	1.845.521.198.490,05
BELANJA DAERAH	1.781.715.480.681,00	1.840.471.923.190,00	1.854.292.970.230,00	1.865.341.195.906,50
BELANJA OPERASI	1.616.600.381.367,00	1.653.002.216.943,00	1.667.977.827.638,00	1.675.203.027.209,00
Belanja Pegawai	800.520.259.870,00	801.217.735.620,00	829.898.277.243,00	829.898.277.243,00
Belanja Barang dan Jasa	711.039.221.954,00	750.251.680.173,00	770.934.400.395,00	778.159.599.966,00
Belanja Bunga	1.000.000.000,00	200.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Belanja Subsidi	1.762.325.000,00	450.000.000,00	0	0
Belanja Hibah	99.478.574.543,00	99.402.801.150,00	63.145.150.000,00	63.145.150.000,00
Belanja Bantuan Sosial	2.800.000.000,00	1.480.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
BELANJA MODAL	154.591.618.264,00	172.864.401.922,00	173.130.895.325,00	175.138.168.697,50



URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2023	PROYEKSI TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN 2026
Belanja Modal Tanah	1.799.400.000,00	3.820.000.000,00	1.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.519.672.043,00	81.567.982.147,00	54.475.551.725,00	46.723.106.897,50
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.243.025.251,00	39.711.080.513,00	47.000.000.000,00	51.700.000.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.228.218.070,00	47.114.689.062,00	70.000.000.000,00	73.000.000.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	801.302.900,00	592.488.600,00	597.182.000,00	656.900.200,00
Belanja Modal Aset Lainnya		58.161.600,00	58.161.600,00	58.161.600,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	10.523.481.050,00	14.605.304.325,00	13.184.247.267,00	15.000.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	10.523.481.050,00	14.605.304.325,00	13.184.247.267,00	15.000.000.000,00
JUMLAH BELANJA	1.781.715.480.681,00	1.840.471.923.190,00	1.854.292.970.230,00	1.865.341.195.906,50
SURPLUS/DEFISIT	-104.953.096.788,00	-20.746.791.542,00	-20.566.080.168,00	-19.819.997.416,45
	-5,89	-1,13	-1,11	-1,06
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	42.502.803.290,00	32.246.791.542,00	32.066.080.168,00	31.319.997.416,45
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	22.502.803.290,00	20.408.886.918,00	22.066.080.168,00	21.319.997.416,45



URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2023	PROYEKSI TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN 2026
Pencairan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	1.837.904.624,00		
Penerimaan Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0			
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	42.502.803.290,00	32.246.791.542,00	32.066.080.168,00	31.319.997.416,45
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	0	0		
Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
Pembayaran pokok utang	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00
Pembiayaan Netto	31.002.803.290,00	20.746.791.542,00	20.566.080.168,00	19.819.997.416,45
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-73.950.293.498,00	0,00	0,00	0,00



Asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi APBD tersebut diantaranya:

A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahun antara lain disebabkan:
 - a. Bertambahnya objek dan wajib pajak dan retribusi
 - b. Adanya peningkatan tarif untuk beberapa ayat pajak dan retribusi
 - c. Adanya perubahan nilai jual objek pajak (NJOP) pada subjek dan objek PBB-P2 dan BPHTB
 - d. Adanya peningkatan penerimaan lain-lain PAD yang sah, seperti bagi hasil deviden, jasa giro, dan lain-lain
2. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari pemerintah pusat dan kejadian luar biasa, diasumsikan adanya kenaikan dana transfer setiap tahun, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Adanya kenaikan penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak seiring peningkatan penerimaan negara
 - b. Adanya kenaikan DAU, terutama adanya kebijakan penambahan penerimaan pegawai baru dan kenaikan gaji pegawai;
 - c. Adanya kenaikan DAK baik fisik maupun non fisik untuk membantu percepatan pembangunan daerah
 - d. Adanya kenaikan penerimaan dana bagi hasil pajak provinsi seiring peningkatan penerimaan provinsi
 - e. Adanya kenaikan bantuan keuangan untuk membantu percepatan pembangunan kabupaten/kota
3. Peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang sah diantaranya adanya kenaikan bantuan hibah untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seiring dengan meningkatnya jumlah siswa dan kenaikan harga satuan pendidikan dana BOS.

B. Belanja Daerah

1. Besaran belanja pegawai paling tinggi sebesar 30% dari APBD tidak termasuk tunjangan guru, yang dilaksanakan secara bertahap selama 5 tahun kedepan, sehingga dimungkinkan pertumbuhan pegawai tidak ada penambahan (*zero growth*);
2. Besaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling sedikit sebesar 40% dari APBD di luar transfer ke daerah bawahannya dan desa;
3. Belanja subsidi untuk pembayaran jasa bagi hasil pinjaman modal kerja dari lanjutan program pencetakan wirausaha baru;
4. Belanja hibah dan bantuan sosial dialokasikan untuk membantu penyelenggaraan pembangunan daerah;
5. Kebutuhan belanja publik yang semakin meningkat untuk mendanai program prioritas daerah;
6. Alokasi belanja untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024;
7. Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja.



C. Pembiayaan Daerah

1. Penganggaran defisit sesuai peraturan perundang-undangan
2. Proyeksi penerimaan SiLPA dan pencairan dana cadangan
3. Penambahan penyertaan modal untuk PT. BPRS Al-Madinah dan Bank Jabar Banten
4. Pembayaran Pokok Utang pada pinjaman yang dilakukan oleh BLUD.

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja serta pembiayaan di atas, maka dihitung kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya, sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:



Tabel 3.7.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Tahun 2023-2026

NO.	URAIAN	2023	2024	2025	2026
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	Pendapatan	1.676.762.383.893	1.819.725.131.648	1.833.726.890.062	1.845.521.198.490
2	Pencairan Dana Cadangan	10.000.000.000	0	0	0
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	22.502.803.290	20.408.886.918	22.066.080.168	21.319.997.416
	Total Penerimaan	1.709.265.187.183	1.840.134.018.566	1.855.792.970.230	1.866.841.195.907
4	Belanja Pegawai	800.520.259.870	801.217.735.620	829.898.277.243	829.898.277.243
5	Pengeluaran Pembiayaan	11.500.000.000	11.500.000.000	11.500.000.000	11.500.000.000
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	897.244.927.313	1.027.416.282.946	1.014.394.692.987	1.025.442.918.664



Berdasarkan perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut di atas, maka dialokasikan untuk mendanai program pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui program operasional pada program perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing dalam rangka memenuhi pelayanan perangkat daerah, memenuhi janji politik dan program unggulan kepala daerah serta pelaksanaan program prioritas perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Alokasi dana yang tersedia didistribusikan pada program prioritas pembangunan daerah dan program perangkat daerah masih bersifat indikatif dan akan dijabarkan pada perencanaan tahunan.

3.3.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan pada bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Kebijakan keuangan daerah memberikan gambaran tentang arah dan upaya dalam pengelolaan keuangan daerah. Optimalisasi penerimaan dan pembiayaan daerah serta efisiensi dan efektifitas belanja daerah menjadi upaya prioritas dalam arah kebijakan keuangan daerah mendatang.

Selain pendanaan yang bersumber dari APBD baik yang bersumber dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pendanaan non APBD seperti dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSLP)/*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan potensi yang dapat menunjang pendanaan pembangunan di Kota Tasikmalaya.

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya adalah:

- 1) Penggalan dan peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan (intensifikasi dan ekstensifikasi) terutama bagi sumber pendapatan pajak dan retribusi yang potensial;
- 2) Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan Perangkat Daerah penghasil;
- 3) Optimalisasi penggunaan Teknologi dan Sistem Infomasi untuk pengelolaan pendapatan daerah;
- 4) Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah Penghasil, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
- 5) Meningkatkan penyertaan modal pada BUMD dan Perusahaan Daerah untuk peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
- 6) Meningkatkan pendayagunaan aset dan keuangan daerah;

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:

- 1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penghasilan dana bagi hasil baik dari pajak maupun bukan pajak lainnya;
- 2) Meningkatkan akurasi data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Transfer;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.



Berdasarkan arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut di atas, untuk dapat merealisasikan proyeksi penerimaan pendapatan daerah diperlukan strategi pencapaiannya, antara lain:

Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, dapat ditempuh melalui:

- 1) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
- 2) Optimalisasi pemungutan atas pajak dan retribusi serta pengembangan sistem penagihan atas wajib pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
- 3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah
- 4) Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
- 5) Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak, seperti pengembangan gerai/outlet, dan kerjasama dengan pihak perbankan;
- 6) Meningkatkan penyertaan modal untuk BUMD dan Perusahaan Daerah guna peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
- 7) Revitalisasi Perusahaan Daerah (PD) melalui berbagai upaya, antara lain: pengelolaan PD secara profesional, peningkatan sarana/prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas agar PD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari publik/perbankan;
- 8) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- 9) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, terutama dengan perbankan sehingga mempermudah pelayanan pembayaran pajak daerah melalui layanan perbankan secara langsung;
- 10) Mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah penghasil.

Strategi pencapaian target Dana Perimbangan, dapat ditempuh melalui:

- 1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak penghasilan dan Pajak lainnya yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Tasikmalaya, serta bukan pajak lainnya
- 2) Meningkatkan akurasi data-data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Perimbangan;
- 3) Sosialisasi mengenai pungutan pajak dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
- 4) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengupayakan peningkatan Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak).

Strategi pencapaian target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dapat ditempuh melalui:

- 1) Sosialisasi mengenai pungutan pajak yang dikelola oleh provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dan pajak meteorologi, dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;



- 2) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bantuan Keuangan.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang efektif, efisien, proporsional, fokus, transparan dan akuntabel, terutama untuk belanja daerah yang prioritas seperti:

1. Pemenuhan belanja pegawai yang meliputi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai;
2. Pemenuhan alokasi anggaran untuk pelayanan dan operasional kantor perangkat daerah;
3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial;
4. Pemenuhan alokasi anggaran untuk urusan dan bidang tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*Mandatory Spending*);
5. Pemenuhan alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi sebagai dampak Pandemi Covid-19 terutama sektor kesehatan dan pangan;
6. Penganggaran belanja kegiatan dan program prioritas secara proporsional, rasional, efektif dan efisien berbasis program prioritas (*Money Follow Programs, Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial*);
7. Pemenuhan alokasi belanja untuk kegiatan prioritas yang menjadi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kunjungan kerja pimpinan daerah dan anggota DPRD pada saat pelaksanaan reses;
8. Pemenuhan belanja untuk program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan target kinerja dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
9. Alokasi belanja untuk mendukung program dan kegiatan prioritas pemerintah pusat dan provinsi Jawa Barat.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada:

1. Optimalisasi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
2. Penyertaan Modal atau Investasi Daerah kepada perusahaan daerah;
3. Pengelolaan hutang terutama untuk menjaga arus kas pada BLUD.



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah dan stakeholder lainnya.

Secara umum permasalahan pembangunan daerah dapat dikelompokkan pada:

1. Kemiskinan dan permasalahan sosial

Sampai dengan tahun 2019, angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya menunjukkan trend penurunan yang cukup baik dan berada di angka 11,6 persen. Namun demikian, terjadinya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan berakibat pada perubahan tatanan kehidupan sosial, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sehingga pada tahun 2020 dan tahun 2021 angka kemiskinan Kota Tasikmalaya mengalami kenaikan yaitu pada angka 12,97 persen dan 13,13 persen. Berkat upaya penanggulangan dan pemulihan dampak pandemi COVID-19 yang dilakukan pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah, tingkat kemiskinan di Kota Tasikmalaya kembali mengalami penurunan menjadi 12,72 persen pada tahun 2022 dan 11,53 persen pada tahun 2023. namun masih berada pada angka yang masih tinggi, di atas tingkat kemiskinan nasional dan Provinsi Jawa Barat.

Kemiskinan ini disebabkan diantaranya oleh masih rendahnya akses terhadap pelayanan dasar, akses ekonomi, sanitasi dan pola hidup masyarakat serta rendahnya daya beli masyarakat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Kemiskinan berkaitan erat dengan kesempatan kerja dan berusaha serta tingkat pengangguran terbuka yang mengalami kenaikan sebagai dampak dari pandemi Covid 19.

Selain kemiskinan, permasalahan sosial lainnya diantaranya masih banyaknya anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar, korban penyalahgunaan Napza, dan keluarga berumah tak layak huni.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2023 mencapai 741.760 jiwa menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan SDM. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Kota Tasikmalaya mampu bersaing secara regional, dan nasional. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait perkembangan SDM antara lain belum optimalnya pelayanan pendidikan yang ditunjukkan oleh



capaian rata-rata lama sekolah yang baru mencapai 9,54 tahun dan harapan lama sekolah yang baru mencapai 13,49 tahun.

Selain permasalahan pelayanan pendidikan, permasalahan pelayanan kesehatan di Kota Tasikmalaya pada saat ini menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan indeks kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih tinggi. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, serta kinerja pelayanan kesehatan yang rendah. Disamping itu, permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih tinggi yang ditunjukkan dengan masih tingginya prevalensi stunting.

Pemberdayaan perempuan di Kota Tasikmalaya saat ini masih perlu ditingkatkan. Peran aktif perempuan dalam sektor ekonomi, politik, hukum, dan sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Penguatan industri rumahan dan UKM bagi perempuan memiliki peran positif terhadap perbaikan indikator ketenagakerjaan perempuan. Dari perspektif pembangunan, strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan berkelanjutan perlu dioptimalisasi guna mengetahui permasalahan kesenjangan di Kota Tasikmalaya sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan daya saing perempuan Kota Tasikmalaya.

Pembangunan dalam bidang kepemudaan, olahraga dan kebudayaan masih kurang optimal. Prestasi bidang kepemudaan dan olahraga baik ditingkat Provinsi maupun nasional masih kurang optimal, selain itu ketersediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang masih kurang serta sarana dan prasarana kebudayaan seperti gedung kesenian dan kegiatan seni budaya masih sedikit.

Sebagai sebuah kota yang cukup heterogen, kerukunan hidup masyarakat menjadi permasalahan yang harus diperhatikan sehingga tercipta masyarakat yang dapat hidup berdampingan dengan damai yang ditunjang oleh keamanan dan keteriban umum sehingga dapat tercipta masyarakat yang aman dan tertib.

3. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya mengalami perlambatan pada masa pandemi COVID-19 yang ditandai dengan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yaitu sebesar -2,01 persen. Seiring dengan berakhirnya pandemic Covid-19, secara perlahan ekonomi Kota Tasikmalaya mulai bangkit yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,57 persen pada tahun 2021, 5,01 persen pada tahun 2022 dan 5,96 persen pada tahun 2023. Diharapkan ekonomi kota Tasikmalaya dapat terus meningkat di masa yang akan datang.

Beberapa permasalahan perekonomian Kota Tasikmalaya diantaranya belum optimalnya perkembangan UMKM, khususnya pada akses permodalan, pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi berbasis digital *literacy*, belum meratanya penerapan standar produk usaha mikro dan



kecil. Belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif.

Belum optimalnya iklim penanaman modal yang disebabkan oleh belum optimalnya pelayanan perijinan, ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata, dinamika sosial mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha, belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal.

Pada sektor pertanian terjadi beberapa permasalahan yang ditandai dengan masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian, terganggunya ekosistem pertanian dan menurunnya luas lahan pertanian. Hal tersebut disebabkan oleh intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi, rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, serta rendahnya regenerasi petani dan rendahnya akses permodalan dan akses pasar, SDM petani masih terbatas, teknologi digital belum banyak digunakan di sektor pertanian kota Tasikmalaya.

Sementara pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, distribusi dan sarana prasarana perdagangan.

Lebih lanjut, pada sektor industri ditemui masalah pokok yaitu masih rendahnya pertumbuhan sektor industri. Hal tersebut disebabkan oleh produk industri memiliki daya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi. Kondisi ini dipicu oleh infrastruktur kawasan industri belum terintegrasi yang mengakibatkan tingginya biaya logistik, peranan IKM masih kecil dalam rantai pasok industri, dan belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan bersertifikasi.

4. Infrastruktur dan penataan ruang

Meskipun pembangunan infrastruktur di Kota Tasikmalaya pada periode sebelumnya telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, namun pembangunan infrastruktur masih perlu dilaksanakan terutama dalam mendukung infrastruktur sanitasi, air minum, pengelolaan limbah dan pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir secara komprehensif. Selain itu, pembangunan infrastruktur lanjutan periode sebelumnya mendapatkan prioritas untuk dilaksanakan seperti penyelesaian lingkaran utara Kota Tasikmalaya.

Penataan ruang di Kota Tasikmalaya untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang telah sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan perencanaan penataan ruang. Seiring dengan perkembangan pembangunan dan penyesuaian regulasi penataan ruang, perlu adanya penyesuaian rencana tata ruang dan wilayah yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan.

Dalam proses pembangunan, lingkungan hidup berperan sangat penting dalam kelangsungan kehidupan manusia dan pemanfaatannya seharusnya berjalan dengan seimbang dengan pembangunan, sehingga pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah pengendalian pencemaran dan penanganan kerusakan lingkungan, masih terbatasnya taman kehati dan perlindungan kawasan lindung serta proposi Ruang Terbuka Hijau di Kota Tasikmalaya.



5. Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Tasikmalaya masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama dalam pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi yaitu: manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan organisasi, penataan SDM aparatur, Deregulasi kebijakan, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan pelayanan publik.

Beberapa permasalahan yang dihadapi antaralain masih perlu ditingkatkan profesionalisme aparatur, dan belum optimalnya pengelolaan aset/kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi memberikan dampak dalam pengelolaan kepegawaian baik pengembangan karir maupun pembiayaannya.

Selain itu, identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan melalui pendekatan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum yang menggambarkan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya serta aspek daya saing. Hal ini dimaksudkan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

4.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Permasalahan pembangunan pada aspek geografi dan demografi yaitu:

1. Perubahan tata guna lahan di kawasan daerah aliran sungai (DAS) mengakibatkan berkurangnya fungsi resapan air, meningkatnya perbedaan debit maksimum-minimum, erosi, dan juga sedimentasi;
2. Daya tampung dan debit air situ kurang optimal, terutama pada musim kemarau beberapa situ berkurang debit airnya;
3. Arus urbanisasi yang terus meningkat sebagai akibat perkembangan kota.

4.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

4.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Masih tingginya tingkat kemiskinan;
2. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka;
3. Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja;
4. Menurunnya daya beli masyarakat;
5. Belum optimalnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
6. Masih tingginya kesenjangan pendapatan masyarakat yang ditunjukkan tingginya rasio gini;
7. Masih tingginya kontribusi bahan makanan terhadap laju inflasi.

4.1.2.2. Kesejahteraan Sosial

1. Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah;
2. Masih ditemukannya kasus balita gizi buruk dan stunting;
3. Belum optimalnya pelayanan PPKS.



4.1.2.3. Seni Budaya dan Olahraga

1. Masih kurangnya sarana prasarana kesenian dan olahraga;
2. Masih kurangnya event seni budaya dan olah raga.

4.1.3. Aspek Pelayanan Umum

4.1.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
 - a. Masih rendah tingkat pendidikan yang ditamatkan;
 - b. Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. Masih belum optimalnya capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS);
 - d. Sarana dan prasarana pendidikan belum memadai;
 - e. Belum terpenuhinya SPM bidang pendidikan.
2. Kesehatan
 - a. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
 - b. Sarana dan prasarana kesehatan masih kurang;
 - c. Belum meratanya tingkat penyebaran tenaga kesehatan dengan kompetensi tertentu antara lain Sub spesialis dan spesialis tertentu;
 - d. Masih tingginya tingkat penyebaran penyakit menular diantaranya penyakit TB, HIV Aids dan sebagainya;
 - e. Masih tingginya Prevalensi Stunting;
 - f. Belum Optimalnya capaian SPM Bidang Kesehatan.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Belum optimalnya kualitas jaringan irigasi terutama pada daerah yang menuju lahan pertanian teknis;
 - b. Belum tersedianya saluran drainase dan atau trotoar pada sebagian jaringan jalan di Kota Tasikmalaya. Hal ini disebabkan antara lain oleh terbatasnya ruang milik jalan di beberapa ruas jalan;
 - c. Belum optimalnya kualitas jalan terutama jalan poros dan jalan lingkungan;
 - d. Masih terdapat beberapa perangkat daerah yang belum memiliki bangunan kantor yang representatif;
 - e. Belum optimalnya pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - f. Belum optimalnya capaian rumah tangga yang dapat mengakses air minum, dan memiliki akses terhadap sarana pengelolaan air limbah domestik.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - a. Masih terdapat kawasan kumuh;
 - b. Masih terdapat rumah tidak layak huni;
 - c. Masih terdapat Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan formal yang belum diserahterimakan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya.
 - d. Basis data perumahan belum lengkap.
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
 - a. Belum optimal Penegakan Peraturan Daerah;
 - b. Masih kurangnya jumlah anggota Polisi Pamong Praja dan belum optimal pejabat PPNS;
 - c. Masih terjadinya gangguan kriminalitas, ketenteraman dan ketertiban umum;



- d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah;
- e. Kurang optimalnya penanganan bencana daerah, yang disebabkan kurangnya SDM, sarana prasarana, informasi kebencanaan, koordinasi dan kapasitas kelembagaan lintas sektoral.

6. Sosial

- a. Masih banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak-anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di luar panti, serta masyarakat yang di bawah garis kemiskinan;
- b. Belum optimalnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
- c. Belum optimalnya Penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- d. Masih lemahnya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

4.1.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- a. Belum adanya sarana Balai Latihan Kerja (BLK);
- b. Kurang optimalnya hubungan industrial, pengantar kerja dan instruktur pelatihan ketenagakerjaan;
- c. Belum optimalnya peran lembaga ketenagakerjaan;
- d. Belum optimalnya *link and match* antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan dunia usaha;
- e. Masih kurangnya penempatan angkatan kerja.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Belum optimalnya capaian Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender;
- a. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- b. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.

3. Pangan

- a. Belum optimalnya implementasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- b. Belum Optimalnya ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah;
- c. Belum optimalnya pengelolaan pangan dan gizi;
- d. Belum Optimalnya Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan;
- e. Belum optimalnya ketahanan pangan daerah.

4. Pertanahan

- a. Masih rendahnya bukti kepemilikan lahan yang sah/bersertifikat;
- b. Belum optimalnya pengelolaan data pertanahan.

5. Lingkungan Hidup

- a. Belum optimalnya pemantauan, pengendalian, dan penegakan hukum lingkungan untuk pelestarian lingkungan hidup;
- b. Belum optimalnya penanganan persampahan;
- c. Belum optimalnya peran masyarakat dalam pengurangan sampah;
- d. Belum tercapainya proporsi Ruang Terbuka Hijau



6. Kependudukan dan Catatan Sipil
 - a. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan;
 - c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan;
7. Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Kurangnya koordinasi dan sinergi program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
 - b. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan secara langsung.
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. Belum optimalnya layanan keluarga berencana;
 - b. Belum optimalnya capaian Total Fertility Rate (TFR);
 - c. Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam kegiatan BKB;
 - d. Masih kurangnya wawasan reproduksi bagi remaja.
9. Perhubungan
 - a. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. Belum optimalnya ketersediaan ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas.
10. Komunikasi dan Informatika
 - a. Sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi belum memadai;
 - b. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. Belum optimalnya implemantasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);
 - d. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
11. Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
 - a. Masih rendahnya jumlah koperasi sehat;
 - b. Masih rendahnya daya saing Usaha Mikro baik dari kapasitas SDM, maupun standarisasi dan mutu produk;
 - c. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan Usaha Mikro;
 - d. Masih kurangnya akses permodalan dan pemasaran ;
 - e. Belum optimalnya penggunaan iptek dalam pengelolaan dan pengembangan Usaha Mikro;
 - f. Belum optimalnya pengelolaan potensi unggulan, pengembangan sentra dan klaster Usaha Mikro.
12. Penanaman Modal
 - a. Belum optimalnya pemetaan potensi dan peluang investasi;
 - b. Belum optimalnya promosi investasi daerah.
13. Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
 - b. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;
 - c. Belum optimalnya peran serta pemuda dalam pembangunan.



14. Statistik

- a. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data untuk pembangunan;
- b. Belum optimalnya implementasi satu data.

15. Persandian

- a. Belum optimalnya pengamanan data dan informasi daerah;
- b. Belum optimalnya koordinasi dalam pengamanan informasi.

16. Kebudayaan

- a. Belum optimalnya pembinaan seni dan budaya lokal;
- b. Belum optimalnya pelestarian terhadap seni dan budaya daerah seperti pelestarian terhadap benda, situs dan cagar budaya.
- c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana seni dan budaya.

17. Perpustakaan

- a. Belum optimalnya layanan perpustakaan yang memenuhi standar Nasional Perpustakaan;
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan daerah.

18. Kearsipan

- a. Belum optimalnya pengelolaan kearsipan;
- b. Belum optimalnya penerapan standar baku kearsipan pada perangkat daerah;
- c. Belum tersedia gedung depo arsip daerah.

4.1.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- a. Belum optimalnya hasil produksi perikanan;
- b. Belum optimalnya penggunaan teknologi perikanan.

2. Pariwisata

- a. Kurangnya objek dan daya tarik wisata unggulan;
- b. Belum optimalnya pembinaan, koordinasi dan sinergi antar stakeholder kepariwisataan;
- c. Belum optimalnya promosi wisata.

3. Pertanian

- a. Infrastruktur pendukung pertanian khususnya penyediaan sumber air/irigasi masih kurang memadai;
- b. Belum optimalnya penggunaan teknologi pertanian;
- c. SDM di sektor pertanian didominasi oleh petani penggarap dan buruh tani;
- d. Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam hal budidaya terutama di budidaya pertanian di lahan pertanian bukan sawah;
- e. Kurangnya daya saing produk olahan hasil pertanian.

4. Perdagangan

- a. Belum optimalnya pengelolaan pasar rakyat dan terbatasnya jumlah pasar rakyat; Rendahnya kesadaran para pedagang dalam melakukan tera ulang alat ukur;
- b. Belum optimalnya penataan, pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- c. Belum optimalnya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa.



5. Perindustrian

- a. Masih terbatasnya kemampuan permodalan para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM);
- b. Terbatasnya inovasi dan pemanfaatan teknologi oleh IKM;
- c. Daya saing produk IKM masih rendah;

4.1.3.4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

1. Administrasi Pemerintahan.

- a. Belum optimalnya fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi kebijakan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- b. Belum optimalnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas instansi pemerintah;
- c. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Walikota kepada camat.

2. Pengawasan

- a. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- b. Belum optimalnya manajemen resiko.

3. Perencanaan,

- a. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data;
- b. Belum optimalnya sinergitas, konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan.

4. Penelitian dan Pengembangan

- a. Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta implementasinya dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pembangunan;
- b. Belum optimalnya implementasi inovasi daerah.

5. Keuangan

- a. Masih tingginya rasio Dana Perimbangan dalam struktur APBD;
- b. Belum optimalnya penatausahaan barang dan aset daerah.

6. Kepegawaian

- a. Kurangnya jumlah sumber daya manusia ASN pada semua perangkat daerah;
- b. Belum optimalnya pemetaan SDM ASN Kota Tasikmalaya
- c. Belum optimalnya kompetensi ASN.

4.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

4.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Masih tingginya pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita terutama konsumsi bahan makanan;
2. Masih rendahnya daya beli masyarakat.

4.1.4.2. Iklim Investasi

1. Belum optimalnya pelayanan perijinan;
2. Belum optimalnya implementasi regulasi yang mendukung iklim usaha;



3. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi antara pemerintah, investor dan masyarakat.

4.1.4.3. Sumber Daya Manusia

1. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan maupun keahlian;
2. Masih tingginya angka beban ketergantungan (*dependency ratio*);
3. Rendahnya rasio wirausahaan (*entrepreneurship*).

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang. Oleh karena pentingnya proses perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan, maka untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah maka perlu memperhatikan isu strategis kota, provinsi, nasional bahkan dunia internasional dalam proses perumusannya.

Fungsi keselarasan dan keterlibatan nasional dan provinsi ialah untuk menjelaskan permasalahan dan isu nasional dan provinsi yang ada di daerah, maupun sebaliknya untuk memberikan masukan permasalahan dan isu yang ada di daerah kepada provinsi. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional.

4.2.1. Isu Strategis Internasional

4.2.1.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "*No-one Left Behind*". SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran SDGs berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan tujuan untuk menggalakkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup yang dilaksanakan secara



berkelanjutan. Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian SDGs, perlu adanya penyelerasan dengan RPJPN, RPJMN, RPJPD dan RPJMD.

Adapun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

4.2.1.2. Tantangan Ekonomi Global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Perdagangan Bebas AFTA

Tantangan utama dari ekonomi global bersumber dari pertumbuhan ekonomi global yang masih belum cukup kuat dan berlanjutnya penurunan harga komoditas dunia. Sementara itu, meski ketidakpastian pasar keuangan dunia membaik sejalan dengan menyempitnya divergensi kebijakan moneter antar negara maju, dampak risiko perekonomian Tiongkok perlu diwaspadai. Meskipun pertumbuhan ekonomi global diperkirakan membaik, namun masih terdapat



risiko pertumbuhan tersebut menjadi lebih rendah sejalan dengan perekonomian AS yang belum cukup solid dan perlambatan ekonomi Tiongkok.

Tantangan global lainnya yaitu mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang memberikan peluang sekaligus tantangan ke depan. Para pemimpin negara-negara ASEAN telah sepakat untuk mentransformasi wilayah ASEAN menjadi kawasan bebas aliran barang, jasa, investasi, permodalan, dan tenaga kerja. MEA menggambarkan adanya perekonomian yang mengglobal di antara negara-negara ASEAN dan MEA dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan mewujudkan kawasan ekonomi ASEAN tahun 2020.

Sedangkan AFTA, sejatinya merupakan kesepakatan diantara negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan. Tujuan utamanya untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan bisnis ASEAN di kancah dunia. Harapannya, jika AFTA sukses, negara-negara ASEAN bisa menjadi basis produksi dunia, seperti Cina.

Dengan adanya kebijakan perdagangan bebas AFTA ini, nantinya tidak akan ada hambatan tarif, ataupun hambatan non-tarif untuk negara anggota ASEAN. Skema *Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA) merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya.

Perkembangan terakhir terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi negara-negara ASEAN. Dengan adanya kebijakan-kebijakan terkait AFTA, tentu akan menyusul tantangan serta peluang yang akan dihadapi negara Indonesia, khususnya di sisi bisnis dan ekonomi.

Dalam kaitan ini, peluang Indonesia dan Kota Tasikmalaya khususnya untuk menjadi pemasok dalam rantai nilai ASEAN dan global cukup besar. Namun demikian, bila produk domestik tidak mampu bersaing, maka Indonesia dan Kota Tasikmalaya hanya akan menjadi pasar bagi produk negara MEA lainnya. Di sisi domestik, perekonomian Indonesia ke depan juga masih dihadapkan dengan berbagai tantangan permasalahan struktural domestik yang belum terselesaikan secara menyeluruh.

4.2.2. Isu Strategis Nasional

Salah satu penelaahan isu dan kebijakan pembangunan yang wajib dijadikan rujukan adalah penelaahan terhadap isu dan kebijakan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN. Hal ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal untuk mendapatkan kebijakan pemerintah yang penting, berhubungan, dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam 4 tahun ke depan.

Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau sebaliknya bagi daerah selama kurun waktu 4 tahun yang akan datang. RPJMN tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja presiden yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dengan mempertimbangkan masalah pokok kebangsaan dan tantangan global.



Gambar 4.1.
Visi misi, arah kebijakan dan agenda pembangunan nasional
tahun 2020-2024



Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, menyatakan visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah “TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata,



mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedang isu strategis yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan:
 - a) Keberlanjutan Sumber Daya Alam;
 - b) Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi;
 - c) Transformasi Struktural Berjalan Lambat;
 - d) Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan:
 - a) Tingginya angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI);
 - b) Masih adanya ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan dan perkotaan;
 - c) Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa;
 - d) Terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan;
 - e) Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing:
 - a) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
 - b) Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk;
 - c) Pemenuhan Layanan Dasar;
 - d) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
 - e) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan:
 - a) Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa;
 - b) Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia;
 - c) Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti;
 - d) Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama;
 - e) Belum Kukuhnya Moderasi Beragama untuk Memperkuat Toleransi dan Kerukunan;
 - f) Belum Optimalnya Peran Keluarga;
 - g) Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar:



- a) Infrastruktur Pelayanan Dasar;
 - b) Infrastruktur Ekonomi;
 - c) Infrastruktur Perkotaan;
 - d) Energi dan Ketenagalistrikan;
 - e) Transformasi Digital.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim:
- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
 - c) Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik :
- a) Konsolidasi Demokrasi;
 - b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
 - c) Penegakan Hukum Nasional;
 - d) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
 - e) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Adapun agenda pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

4.2.3. Isu Strategis Provinsi Jawa Barat

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa datang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu: (1) Permasalahan pembangunan Provinsi Jawa Barat; (2) Dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Jawa Barat; (3) Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Jawa Barat; (4) Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Provinsi Jawa Barat, maka ditetapkan 4 (empat) isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat yaitu: (1) Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia; (2) Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan; (3) Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan; dan (4) Peningkatan kehidupan berdemokrasi serta Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah.

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, keempat isu strategis di atas diuraikan sebagai berikut:

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia



- a. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi.
 - b. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat.
 - c. Penurunan stunting dan penanganan AIDS, Tuberculosis, dan Malaria.
 - d. Peningkatan standar hidup layak masyarakat.
 - e. Percepatan Penanggulangan kemiskinan;
 - f. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pembangunan pemuda, serta ketahanan keluarga dan keluarga berencana.
 - g. Pengendalian pertumbuhan dan distribusi penduduk.
2. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan
 - a. Penerapan link and match industri kecil-industri besar.
 - b. Penerapan UMKM dan industri hijau.
 - c. Percepatan digitalisasi ekonomi.
 - d. Penerapan ketahanan pangan berkelanjutan.
 - e. Pembentukan sentra pertanian, perikanan, dan UMKM.
 - f. Penerapan pertanian ekologis.
 - g. Pengembangan ekonomi lokal pada sektor pariwisata, ekonomi kreatif, industri, UMKM, pertanian dan perikanan.
 - h. Peningkatan nilai investasi dan kualitas usaha
 - i. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas ketenagakerjaan.
3. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan
 - a. Pengembangan dan pembangunan pusat kegiatan pada wilayah terisolir.
 - b. Konektivitas dan aksesibilitas di wilayah Utara dan Selatan Jawa Barat.
 - c. Pengembangan dan pembangunan kawasan industri Rebana, Kawasan Jabar Selatan, Kawasan Bodebekkarpur, dan Kawasan Cekungan Bandung.
 - d. Penyediaan transportasi massal perkotaan.
 - e. Penyediaan infrastruktur dasar (telekomunikasi, jalan, air bersih, drainase) yang terjangkau seluruh wilayah.
 - f. Pemerataan akses terhadap layanan listrik menjangkau seluruh wilayah.
 - g. Penyediaan hunian layak huni.
 - h. Pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
 - i. Penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.
 - j. Penerapan *Circular economy*;
 - k. Mitigasi, adaptasi, dan penanggulangan bencana.
 - l. Pemerataan pembangunan wilayah perdesaan.
 4. Peningkatan kehidupan berdemokrasi serta Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah
 - a. Peningkatan kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.
 - b. Penataan dan penguatan organisasi.
 - c. Deregulasi peraturan perundang-undangan daerah dan kebijakan lainnya serta penegakan hukum.
 - d. Penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, dan lincah serta budaya birokrasi dengan ASN yang profesional.
 - e. Penataan tata laksana proses bisnis, dan SOP serta keterbukaan informasi.
 - f. Penataan sistem manajemen SDM aparatur.
 - g. Penguatan akuntabilitas.



- h. Penguatan pengawasan.
- i. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- j. Penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

4.2.4. Isu Strategis Kabupaten/Kota Sekitar

Dalam pengembangan pembangunan di Kota Tasikmalaya tentunya tidak terlepas dari peran dan kontribusi dari kabupaten/kota sekitar, terutama dari kabupaten/kota yang berbatasan langsung Kota Tasikmalaya.

4.2.4.1. Kabupaten Tasikmalaya

Visi, misi dan isu strategis dari RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Visi: “Mewujudkan Tasikmalaya Berkharisma, Unggul dan Inovatif”

Adapun misi adalah sebagai berikut:

1. Membentuk karakter warga masyarakat yang unggul, beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, partisipatif, transparan dan akuntabel dilandasi kerjasama ulama, umara dan cerdik cendekia;
3. Meningkatkan produktivitas masyarakat dan berdaya saing dengan berbasiskan agribisnis;
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan dengan berbasiskan aspek lingkungan yang berkelanjutan.

Isu Strategis RPJMD perubahan Kabupaten Tasikmalaya:

1. Aksesibilitas dan keterjangkauan pelayanan dasar yang berkualitas
2. Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Baik dan Efektif Berbasis Teknologi Informasi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan infrastruktur daerah
4. Meningkatkan derajat Kesehatan dan Penanggulangan Covid-19
5. Recovery Ekonomi dampak Pandemi Covid-19
6. Pengembangan daya saing kepariwisataan dan ekonomi kreatif berbasis komunitas
7. Memperluas jejaring kerjasama dan investasi dibidang pertanian dan kepariwisataan
8. Peningkatan daya saing produk pertanian di pasar lokal, nasional, regional dan global
9. Penanggulangan Kemiskinan
10. Penanganan pengangguran
11. Penurunan angka stunting, AKI dan AKB
12. Penataan kawasan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya
13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

4.2.4.2. Kabupaten Ciamis

Visi misi dan isu strategis dari RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Visi : “Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua”, dengan misi:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah;



3. Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal;
4. Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien;
6. Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa.

Adapun isu strategis pembangunan daerahnya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kesempatan pendidikan;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
3. Peningkatan daya beli masyarakat;
4. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan;
5. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur;
6. Peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
7. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana alam;
8. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
9. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
10. Peningkatan pengembangan kawasan pertumbuhan;
11. Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan.

4.2.4.3. Kabupaten Garut

Visi Kabupaten Garut dalam RPJMD tahun 2019 -2024 yaitu : "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera". Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Adapun isu strategis pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja;
2. Peningkatan moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
3. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
4. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur antar wilayah secara merata dan Pemekaran Wilayah Otonomi Baru;
5. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengurangan risiko bencana;



7. Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik;
8. Peningkatan iklim usaha dan investasi bagi penguatan ekonomi lokal.

4.2.4.4. Kota Banjar

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Banjar, maka kondisi yang ingin dicapai pada periode 2018–2023 adalah: “Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan”

Dengan memperhatikan perubahan kondisi yang akan dicapai pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “Banjar Semakin Berseri”, maka misi pembangunan Daerah Kota Banjar pada periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
3. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE);
4. Mewujudkan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM);
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan;
6. Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah.

Berdasarkan analisis permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis di atas, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis daerah Kota Banjar berikut:

1. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik, Profesional dan Akuntabel;
2. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berkualitas;
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengurangan Resiko Bencana;
5. Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah.

4.2.4.5. Kabupaten Pangandaran

Visi pembangunan lima tahun ke depan yaitu “Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”. Untuk mewujudkan visi di atas, didukung oleh 6 misi yaitu:

1. Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan
2. Mengembangkan aksesibilitas pendidikan sampai perguruan tinggi, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan
3. Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal
4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman, taqwa, dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama
5. Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan.



4.2.5. Isu Strategis Kota Tasikmalaya

4.2.5.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Visi pembangunan Kota Tasikmalaya jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 adalah : “DENGAN IMAN DAN TAKWA KOTA TASIKMALAYA SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN INDUSTRI TERMAJU DI JAWA BARAT”.

Dalam mewujudkan Visi Kota Tasikmalaya tersebut telah disepakati 7 (tujuh) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota bernuansa agamis, demokratis dan taat hukum.
2. Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota yang berbudaya dan berwawasan global.
3. Menghasilkan pelaku-pelaku bisnis di sektor ekonomi khususnya industri, perdagangan, jasa dan pertanian yang mempunyai daya saing tinggi serta meningkatkan produktivitas dan iklim hubungan industri yang sehat.
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas yang mampu menciptakan keberkelanjutan pembangunan di sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian sehingga mampu mendorong tumbuh kembangnya sektor pariwisata di Kota Tasikmalaya.
5. Menciptakan dan memelihara pelayanan publik yang berbasis pada *good governance* dengan berlandaskan pada prinsip *government entrepreneurship* sehingga mampu menghasilkan iklim mandiri dan partisipatif pada semua lapisan masyarakat di Kota Tasikmalaya.
6. Menciptakan pembangunan Kota Tasikmalaya yang berbasis pada pengembangan sektor-sektor unggulan dengan mengoptimalkan prasarana dan sarana kota secara berkelanjutan.
7. Mewujudkan Kota Tasikmalaya yang sehat, nyaman dan berwawasan lingkungan.

Tujuan pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya hingga tahun 2025 berfungsi sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju Kota Tasikmalaya yang sejahtera, adil dan makmur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, perlu dijabarkan arah pembangunan jangka panjang serta arah pembangunan kewilayahan sebagai berikut:

1. Arah Pembangunan Jangka Panjang Kota Tasikmalaya

Arah pembangunan jangka panjang menggambarkan kondisi umum pembangunan yang akan dicapai oleh Kota Tasikmalaya hingga tahun 2025, yang memperhatikan arah kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan provinsi.

1. Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat.
2. Terwujudnya pembangunan prasarana dan sarana publik yang dapat diakses dengan mudah dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
3. Terwujudnya masyarakat Kota Tasikmalaya yang agamis, beradab dan berbudaya menuju masyarakat yang madani.
4. Meningkatkan peran sektor-sektor unggulan sebagai faktor penggerak utama perekonomian Kota Tasikmalaya.



5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang didasarkan pada pencapaian indeks pembangunan manusia yang tinggi.
6. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang diarahkan pada pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya alam.
7. Terciptanya keserasian dan keterkaitan sektor pariwisata yang berkembang di wilayah Priangan Timur, sehingga dapat menjadi pendorong dan peningkatan tourism attractiveness yang khas serta mampu menumbuhkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yang lebih baik dan maju.

2. Arah Pembangunan Kewilayahan Kota Tasikmalaya

Perwujudan Visi Pembangunan Kota Tasikmalaya hingga tahun 2025 sangat ditentukan pula oleh perencanaan tata ruang wilayah kota. Penataan ruang dan wilayah hingga tahun 2025 diarahkan bagi terwujudnya keserasian, kelestarian dan optimalisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi dan daya dukung wilayah dengan mengembangkan struktur dan pola tata ruang yang efektif dan efisien sesuai dengan fungsi pengembangan kota dalam konteks regional dan nasional, yang tujuannya:

- a. Terciptanya kehidupan kota yang bersih, sehat, indah dan nyaman serta berkelanjutan sesuai dengan tata nilai yang ada;
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- c. Meningkatkan kehidupan sosial-ekonomi serta meratanya pendapatan seluruh masyarakat dengan menciptakan peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu.

Kawasan lindung atau kawasan yang berfungsi lindung yang direncanakan atau ditetapkan dalam wilayah Kota Tasikmalaya meliputi:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, maka secara khusus diidentifikasikan sebagai hutan kota atau hutan konservasi.
- b. Kawasan perlindungan setempat, yang dalam hal ini adalah sempadan sungai, kawasan sekitar situ dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

Kawasan budidaya didasarkan pada dominasi fungsi atau kegiatan utama yang ada dan akan dikembangkan di kawasan tersebut. Adapun penggolongan kawasan budidaya dalam RTRW Kota Tasikmalaya adalah:

- a. Kawasan budidaya yang berfungsi lindung;
- b. Kawasan pusat kota;
- c. Kawasan perdagangan dan jasa regional;
- d. Koridor perdagangan dan jasa;
- e. Kawasan pemerintahan;
- f. Kawasan pendidikan;
- g. Kawasan kesehatan;
- h. Kawasan terminal;
- i. Kawasan perumahan dan permukiman;
- j. Kawasan industri;
- k. Kawasan pergudangan;
- l. Sarana fasilitas umum dan sosial;
- m. Sarana rekreasi dan olahraga;
- n. Kawasan militer;
- o. Tempat Pembuangan Akhir (TPA); dan
- p. Ruang Terbuka Hijau (RTH).



Untuk menunjang perkembangan kota yang terarah dan efisien serta memiliki tingkat pelayanan yang baik, maka Kota Tasikmalaya dibagi menjadi bagian-bagian wilayah kota. Pertimbangan dalam pembagian Bagian Wilayah Kota (BWK) yaitu:

- a. Homogenitas dan intensitas perkembangan BWK yaitu konsentrasi dominasi guna lahan saat ini.
- b. Pola jaringan jalan dan pola pergerakan yaitu aksesibilitas yang baik
- c. Pusat lingkungan (Pusat BWK/Pusat Sub BWK) ditentukan berdasarkan banyaknya fasilitas dan utilitas yang dimiliki.
- d. Beberapa pusat lingkungan dialokasikan berdasarkan fungsi eksisting sebagai pusat pelayanan masyarakat.
- e. Pusat-pusat tersebut mengakomodasikan fungsi Bagian Wilayah Kota yang bersangkutan.

Adapun Wilayah Kota Tasikmalaya dalam RTRW Kota tahun 2004 dibagi menjadi 5 BWK dan 10 sub BWK, dimana pembagian wilayah dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. BWK I, mencakup sebagian Kec. Cihideung, sebagian Kec. Tawang serta sebagian Kec. Cipedes.
- b. BWK II, meliputi sebagian Kec. Cipedes, sebagian Kec. Cibeureum. Dalam BWK II terbagi menjadi 2 (dua) sub BWK yaitu:
 - 1) BWK II A dengan fungsi sebagai perkantoran skala lingkungan dan perumahan.
 - 2) BWK II B dengan fungsi sebagai wisata/rekreasi, perdagangan lokal, perangkutan regional dan perumahan.
- c. BWK III, meliputi sebagian Kec. Tawang, sebagian Kec. Cibeureum, sebagian Kec. Tamansari dan sebagian Kec. Kawalu. Dalam BWK III ini dibagi menjadi 3 (tiga) sub BWK yaitu:
 - 1) BWK III A dengan fungsi perkantoran, industri kecil, perumahan menengah, pertokoan lokal, perdagangan dan perumahan.
 - 2) BWK III B dengan fungsi militer, industri kecil dan menengah.
 - 3) BWK III C dengan fungsi perumahan, pendidikan.
- d. BWK IV, meliputi sebagian Kec. Kawalu, sebagian Kec. Mangkubumi, sebagian Kec. Cihideung. Dalam BWK IV ini di bagi menjadi 2 (dua) sub BWK yaitu:
 - 1) BWK IV A dengan fungsi industri menengah dan besar.
 - 2) BWK IV B dengan fungsi perumahan dan cadangan pengembangan.
- e. BWK V, meliputi sebagian Kec. Cipedes, Kec. Indihiang, Kec. Mangkubumi, serta sebagian Kec. Cihideung. BWK V ini terbagi ke dalam 3 (tiga) sub BWK yaitu:
 - 1) BWK V A, dengan fungsi perdagangan regional, perumahan, perkantoran, transportasi regional.
 - 2) BWK V B, dengan fungsi wisata, perumahan.
 - 3) BWK V C, dengan fungsi perumahan dan pergudangan.

Tahap keempat dalam RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 sebagai disebut Tahap Pencapaian Kota Industri dan Perdagangan Termaju di Jawa Barat. Tahap keempat ini merupakan tahap pencapaian pada visi dan misi yang diharapkan dimana fokus pembangunan lebih diarahkan dalam memantapkan pada perkembangan sektor industri, perdagangan dan jasa dengan diimbangi



dengan peningkatan kualitas pembangunan disektor lainnya, yang digambarkan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur berkualitas kota hampir menyentuh seluruh wilayah kota terutama pada jalur yang menuju ke pusat pelayanan publik, pusat perdagangan dan jasa, serta sentra industri kecil dan menengah.
- 2) Sumber daya manusia semakin berkualitas, cerdas, terampil, berwawasan global berbasis keunggulan lokal semakin kuat, bermoral berlandaskan iman dan taqwa semakin siap dalam menghadapi persaingan global. Kualitas dan relevansi pendidikan yang didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien, efektif dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat, teknologi informasi menjadi basis dalam pembelajaran dan pemantapan program wajib belajar 12 tahun serta perintisan wajib belajar ke jenjang perguruan tinggi.
- 3) Kesehatan dan status gizi masyarakat semakin baik ditunjang dengan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah dan mudah diakses
- 4) Kesejahteraan masyarakat semakin meningkat seiring dengan meningkatnya daya beli dan pendapatan perkapita yang menyebabkan tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi baik lokal, regional maupun nasional terus meningkat. Jaminan sosial dari pemerintah semakin nyata dirasakan oleh masyarakat sehingga angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin terus menurun
- 5) Struktur perekonomian kota semakin kuat dan kompetitif dalam era pasar global yang semakin nyata semakin mendorong berkembangnya sektor perdagangan dan industri kecil, menengah dan besar serta sektor jasa dengan dukungan investasi yang terus meningkat, peningkatan kualitas pengelolaan sektor pertanian dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan sebagai pemantapan ketahanan pangan
- 6) Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin baik karena tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih semakin nyata keberadaannya, kualitas pelayanan publik yang lebih baik, cepat, transparan, dan akuntabel makin meningkat.
- 7) Pelestarian lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan lebih ditingkatkan untuk mengimbangi akan meningkatnya kebutuhan akan air bersih dan pengelolaan sampah yang modern
- 8) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah sebagai modal pembangunan dengan menggali sumber-sumber pendapatan yang tidak membebani masyarakat serta kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar pajak dan retribusi semakin baik.

4.2.5.2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031.

1. Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Dengan mengacu kepada UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan:



- 1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- 3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan:

- 1) Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- 2) Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 3) Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- 4) Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5) Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- 6) Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 7) Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;
- 8) Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
- 9) Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Selanjutnya dengan merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka perumusan tujuan harus mempertimbangkan visi dan misi pembangunan kota bersangkutan. Dengan memperhatikan visi pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya adalah “Dengan Iman dan Takwa Kota Tasikmalaya menjadi Pusat Perdagangan dan Industri Maju di Jawa Barat”, maka tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut : *Mewujudkan ruang wilayah Kota Tasikmalaya, sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Priatim-Pangandaran, yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya kota perdagangan dan jasa, serta industri kreatif yang termaju di Jawa Barat.*

Pusat industri dan perdagangan termaju disini adalah Industri Kreatif yang berbasis kerajinan (Handycraft). Berdasarkan cetak biru “Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025” Departemen Perdagangan RI, ada 14 (Empat Belas) elemen yang tergolong industri kreatif yaitu : periklanan, arsitektur pasar seni dan antik, kerajinan, desain fesyen, film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan, jasa komputer dan piranti lunak televisi dan radio serta riset dan pengembangan. Dari 14 (Empat Belas) jenis industri tersebut yang telah dimiliki dan berkembang di Kota Tasikmalaya adalah Industri Kerajinan (Handycraft). Jenis industri kreatif tersebut antara lain Batik, Bordir, berbagai rupa anyaman Mendong dan Bambu, Kelom dan Alas Kaki.

Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia Tasikmalaya mengenai “Pemetaan Daya Saing Industri Kreatif Kota/Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2007”, Indutri Kreatif Kota Tasikmalaya menduduki rangking teratas terutama komoditi Bordir dan Alas Kaki. Sehingga tolok ukur pencapaian visi bisa mengacu pada hasil kajian tersebut.



2. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Berdasarkan pada perumusan tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya serta merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka rumusan kebijakan penataan ruang bagi Kota Tasikmalaya sebagai berikut:

Kebijakan penataan ruang Kota Tasikmalaya meliputi:

- 1) peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis;
- 2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana;
- 3) pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 4) peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup;
- 5) peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
- 6) pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 7) penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya; dan
- 8) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Strategi penataan ruang wilayah Kota Tasikmalaya meliputi:

- 1) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis, meliputi:
 - a. Meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah sekitar dalam kesatuan Kawasan Wilayah Priangan Timur;
 - b. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah sekitar dalam kesatuan Wilayah Priangan Timur; dan
 - c. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan.
- 2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, meliputi:
 - a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan udara;
 - b. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi/tertinggal;
 - c. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - d. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. Mengembangkan jaringan prasarana lingkungan.
- 3) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi:
 - a. Menetapkan kawasan berfungsi lindung;
 - b. Mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kota Tasikmalaya sesuai dengan kondisi ekosistemnya; dan
 - c. Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah menurun.



- 4) Strategi peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup, meliputi:
 - a. Menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan;
 - c. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. Mencegah perubahan sifat fisik lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi mendatang;
 - f. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan secara berkelanjutan; dan
 - g. Mengembangkan kegiatan budi daya dengan memperhatikan potensi kawasan rawan bencana.
- 5) Strategi peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya, meliputi:
 - a. Menetapkan kawasan budi daya dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis;
 - b. Mengembangkan kegiatan budi daya yang unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
 - c. Mempertahankan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan.
- 6) Strategi pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
 - a. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana;
 - b. Mengarahkan pemukiman di kawasan pertumbuhan baru; dan
 - c. Mengembangkan kawasan pelayanan umum di sebelah selatan kota.

3. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

Kebijakan pengembangan kawasan strategis Kota Tasikmalaya yaitu Strategi penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya, meliputi:

- a. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi; dan
- c. Melestarikan dan meningkatkan potensi sosial dan budaya.

Pada tahun 2016, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW) Tasikmalaya Tahun 2011-2031 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012, telah memasuki tahun ke-5 (lima). Selama kurun waktu tersebut, kebijakan nasional dan daerah telah mewarnai pembangunan di Jawa Barat, dan beberapa diantaranya tidak tercantum di dalam dokumen RTRW yang telah ditetapkan. Sebagai rujukan utama dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat spasial di Kota Tasikmalaya, Dokumen RTRW memiliki fungsi dan kedudukan sebagai pedoman pembangunan seluruh sektor, dan harus mengakomodasi seluruh kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan



Ruang memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap RTRW Kota/Kabupaten sebanyak 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali RTRW mempertimbangkan kondisi perubahan lingkungan strategis atau perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi pembangunan/pemanfaatan ruang provinsi dan/atau internal provinsi.

Dengan dilakukannya revisi RTRW Provinsi Jawa Barat, perubahan RPJMN, serta terbitnya peraturan-peraturan sektoral yang berpengaruh pada rencana tata ruang, Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu untuk melaksanakan peninjauan kembali RTRW Kota Tasikmalaya pada Tahun 2016 untuk mengetahui apakah substansi RTRW masih relevan dengan dinamika pembangunan yang terjadi, dan sejauh mana RTRW diimplementasikan. Peninjauan kembali RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 dilakukan melalui tahapan kajian, evaluasi dan penilaian dalam menghasilkan rekomendasi tentang penyempurnaan dalam hal apa saja yang perlu dilakukan untuk pelaksanaan RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 pada sisa masa berlakunya RTRW, yaitu 15 (lima belas) tahun ke depan untuk mencapai tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan penilaian peninjauan kembali RTRW Kota Tasikmalaya, diketahui bahwa diperlukan perubahan materi sebanyak 19,47%, maka kesimpulan Peninjauan Kembali adalah RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 sesuai dengan PERLU DI REVISI. Hasil Peninjauan Kembali tersebut dituangkan dalam Keputusan Walikota No. 050.13/Kep.60-Bappelitbangda/2017 tentang Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031, yang berisi:

- a. Percepatan perwujudan struktur dan pola ruang terutama yang telah diprogramkan jangka menengah pertama akan dituangkan dalam program jangka menengah selanjutnya
- b. Perlu dilakukan revisi yang mempertimbangkan arahan kebijakan antara lain:
 - RTRW Nasional Hasil Revisi
 - RTR Kawasan Strategis Priangan Timur
 - RTRW Provinsi Jawa Barat Hasil Revisi
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - Undang – undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
 - Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri
 - Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
 - Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tatacara Peran serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang Daerah
 - Permendagri No. 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Evaluasi Raperda Tata Ruang
 - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara



- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara
 - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
 - Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
 - Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2015 tentang pembangunan saluran kelistrikan
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Barat
 - Rencana Induk Kepariwisata Daerah Kota Tasikmalaya
 - Kajian FS jalan lingkar dan fly over.
 - Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Kota Tasikmalaya
- c. Perlu dilakukan revisi yang mengamandemen pasal pada perda RTRW Kota Tasikmalaya yang terkait dengan perubahan kebijakan tingkat pusat dan propinsi, serta merespon dinamika perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Tasikmalaya.

4.2.5.3. Isu Strategis RPD

Berdasarkan permasalahan yang perlu penanganan prioritas dan memperhatikan isu strategis di provinsi, nasional serta internasional, analisis gambaran umum dan capaian kinerja pembangunan RPJMD tahun 2017-2022, maka isu strategis yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan dan permasalahan sosial

Kemiskinan menjadi isu global yang menjadi Tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada periode Tahun 2018-2021 penduduk miskin di Kota Tasikmalaya menunjukkan penurunan sampai dengan tahun 2019. Namun memasuki tahun 2020, kondisi memburuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan sehingga pada tahun 2020 dan tahun 2021 kemiskinan mengalami kenaikan yaitu pada angka 12,97 persen dan 13,13 persen. Berkat upaya penanggulangan dan pemulihan dampak pandemi COVID-19 yang dilakukan pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah, tingkat kemiskinan di Kota Tasikmalaya kembali mengalami penurunan menjadi 12,72 pada tahun 2022 dan 11,53% pada tahun 2023. namun masih berada pada angka yang masih tinggi, di atas tingkat kemiskinan nasional dan Provinsi Jawa Barat.

Kemiskinan ini disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat. Kemiskinan di



Kota Tasikmalaya terutama disebabkan oleh daya beli masyarakat yang rendah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Daya beli berkaitan erat dengan kesempatan kerja dan berusaha, tingkat pengangguran terbuka di Kota Tasikmalaya yang mengalami kenaikan sebagai dampak dari pandemic Covid 19 semakin memperburuk daya beli masyarakat.

2. Kualitas SDM berbasis kearifan lokal

Jumlah penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2023 mencapai 741.760 jiwa menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan SDM. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Kota Tasikmalaya mampu bersaing secara regional, dan nasional. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait perkembangan SDM antara lain belum optimalnya pelayanan pendidikan yang ditunjukkan oleh capaian APK dan APM untuk pendidikan dasar yang belum mencapai seratus persen. Selain itu masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, serta belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi.

Selain permasalahan pelayanan pendidikan, permasalahan pelayanan kesehatan di Kota Tasikmalaya pada saat ini menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan indeks kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih tinggi. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, serta kinerja pelayanan kesehatan yang rendah.

Disamping itu, permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih tinggi yang ditunjukan dengan masih tingginya prevalensi stunting. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana layanan kesehatan, seperti peningkatan dan pemenuhan alat-alat kesehatan, pembangunan rumah sakit dan/atau puskesmas. Pemulihan dampak pandemi COVID-19 dilakukan melalui rehabilitasi masyarakat yang terkena dampak, pemberian bantuan sosial bagi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam penanganan, serta pemulihan akibat dampak pandemi COVID-19. Dalam kondisi pandemi COVID-19, masyarakat tetap dituntut untuk terus berdaya guna dan beradaptasi dengan pola kehidupan baru/beradaptasi dalam kondisi pandemic COVID-19.

Pemberdayaan perempuan di Kota Tasikmalaya saat ini masih perlu ditingkatkan. Peran aktif perempuan dalam sektor ekonomi, politik, hukum, dan sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Penguatan industri rumahan dan UKM bagi perempuan memiliki peran positif terhadap perbaikan indikator ketenagakerjaan perempuan. Dari perspektif pembangunan, strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan berkelanjutan perlu dioptimalisasi guna mengetahui permasalahan kesenjangan di Kota Tasikmalaya sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan daya saing perempuan Kota Tasikmalaya.



Pembangunan dalam bidang kepemudaan, olahraga dan kebudayaan masih kurang optimal. Prestasi bidang kepemudaan dan olahraga baik ditingkat Provinsi maupun nasional masih kurang optimal, selain itu ketersediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang masih kurang serta sarana dan prasarana kebudayaan seperti gedung kesenian dan kegiatan seni budaya masih sedikit.

Keamanan dan keteriban umum masih menjadi masalah yang harus mendapatkan perhatian sehingga dapat tercipta masyarakat yang aman dan tertib. Sebagai kota dengan aktivitas ekonomi dan social warganya tentu memiliki permasalahan seperti pelanggaran perda, pedagang kaki lima dan gangguan trantibum. Selain itu sebagai kota yang cukup heterogen kerukunan masyarakat menjadi permasalahan yang harus diperhatikan sehingga tercipta masyarakat yang dapat hidup berdampingan dengan damai.

3. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya mengalami perlambatan selama beberapa tahun terakhir. Dengan adanya pandemi COVID-19, maka semakin berdampak buruk terhadap perekonomian Kota Tasikmalaya. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 terhadap tahun 2019 mengalami kontraksi.

Sebelum terjadinya pandemi, perekonomian Kota Tasikmalaya telah dihadapkan dengan beberapa hal, diantaranya belum berkembangnya KUKM, khususnya pada akses modal KUKM terhadap dunia perbankan masih minim, belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif, pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal, belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil, dan belum optimalnya kapasitas digital literacy bagi para pelaku UKM dalam memasarkan produknya, sehingga UKM bisa tetap bertahan di masa pandemi COVID-19.

Terjadinya penurunan realisasi investasi yang disebabkan oleh realisasi investasi di kota Tasikmalaya, ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata, dinamika sosial mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha, belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan/kegiatan PMA/PMDN. Dampak pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial di berbagai negara dan wilayah di Indonesia menyebabkan terjadinya dinamika ekonomi yang cukup tinggi dan meningkatkan ketidakpastian dalam berusaha sehingga menyebabkan keragu-raguan pasar dalam berinvestasi.

Pada sektor pertanian terjadi beberapa permasalahan yang ditandai dengan masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian, terganggunya ekosistem pertanian dan menurunnya luas lahan pertanian. Hal tersebut disebabkan oleh intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi, rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, serta rendahnya regenerasi petani dan rendahnya akses permodalan, petani kesulitan dalam akses pasar; SDM petani masih terbatas; teknologi digital belum banyak digunakan di sektor pertanian kota Tasikmalaya; Disamping itu,



belum tersedianya pusat distribusi daerah produk pertanian dan rendahnya infrastruktur irigasi.

Pada sektor pangan harus dilakukan antisipasi potensi krisis pangan yang disebabkan oleh adanya pembatasan aktivitas saat pandemi COVID-19. Hal ini ditandai dengan ketersediaan stok pangan yang mulai berkurang sehingga mengakibatkan lonjakan harga pada beberapa komoditi pangan. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah antara lain seperti meningkatnya jumlah masyarakat miskin rawan pangan, masyarakat akan kesulitan dalam mendapatkan pangan dari sisi harga dan kualitas sehingga akan berpengaruh terhadap kondisi gizi masyarakat Kota Tasikmalaya.

Sementara pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, dan belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.

Lebih lanjut, pada sektor industri ditemui masalah pokok yaitu masih rendahnya pertumbuhan sektor industri. Hal tersebut disebabkan oleh produk industri memiliki daya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi (pajak dan biaya distribusi). Kondisi ini dipicu oleh infrastruktur kawasan industri belum terintegrasi yang mengakibatkan tingginya biaya logistik, bahan baku industri mayoritas impor, peranan IKM masih kecil dalam rantai pasok industri, dan belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan bersertifikasi.

4. Infrastruktur dan penataan ruang

Meskipun pembangunan infrastruktur di Kota Tasikmalaya pada periode sebelumnya telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, namun pembangunan infrastruktur masih perlu dilaksanakan terutama dalam mendukung infrastruktur sanitasi, air minum, pengelolaan limbah dan pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir secara komprehensif. Selain itu, pembangunan infrastruktur lanjutan periode sebelumnya mendapatkan prioritas untuk dilaksanakan seperti penyelesaian lingkaran utara Kota Tasikmalaya.

Penataan ruang di Kota Tasikmalaya untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang telah sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan perencanaan penataan ruang. Dalam proses pembangunan, lingkungan hidup berperan sangat penting dalam kelangsungan kehidupan manusia dan pemanfaatannya seharusnya berjalan dengan seimbang dengan pembangunan, sehingga pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah pengendalian pencemaran dan penanganan kerusakan lingkungan, masih terbatasnya taman kehutanan dan perlindungan kawasan lindung serta proposi Ruang Terbuka Hijau di Kota Tasikmalaya.

5. Implementasi Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Tasikmalaya masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih perlu ditingkatkan antarlain profesionalisme aparatur, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota, serta belum optimalnya



pengelolaan aset/kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi memberikan dampak dalam pengelolaan kepegawaian baik pengembangan karir maupun pembiayaannya.



Tabel 4.1.
Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya, RPD Provinsi Jawa Barat dan RPJMN

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN		
RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 -2026	RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026	RPJMN Tahun 2020-2024
1 Kemiskinan dan permasalahan sosial	1 Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	2.1. Tingginya angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) 2.2. Masih adanya ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan dan perkotaaan 2.3. Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa Terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan 2.4. Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan 2.5. Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk
2 Kualitas SDM berbasis kearifan lokal	1 Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	3.1. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan 3.2. Pemenuhan layanan dasar 3.3. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda 3.4. Peningkatan produktivitas dan daya saing 4.1. Melemahnya ideologi pancasila dan ketahanan budaya bangsa 4.2. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan indonesia 4.3. Belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti 4.4. Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama



ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN		
RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 -2026	RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026	RPJMN Tahun 2020-2024
		4.5. Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan 4.6. Belum optimalnya peran keluarga 4.7. Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
3 Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi	2 Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan	1.1. Keberlanjutan sumber daya alam 1.2. Efektivitas tata kelola sumber daya ekonomi 1.3. Transformasi struktural berjalan lambat 1.4. Revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital
4 Infrastruktur dan penataan ruang	3 Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan	5.1. Infrastruktur pelayanan dasar 5.2. Infrastruktur ekonomi 5.3. Infrastruktur perkotaan 5.4. Energi dan ketenagalistrikan 5.5. Transformasi digital
5 Implementasi Reformasi birokrasi	4 Peningkatan kehidupan berdemokrasi serta Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah	6.1. Konsolidasi demokrasi 6.2. Optimalisasi kebijakan luar negeri 6.3. Penegakan hukum nasional 6.4. Reformasi birokrasi dan tata kelola 6.5. Menjaga stabilitas keamanan nasional

Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2024.



BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Berbeda dengan penyusunan RPJMD yang memuat visi dan misi dari kepala daerah terpilih, dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tidak memuat visi dan misi daerah untuk jangka menengah. Hal ini dikarenakan kepala daerah dalam periode 2023-2026 sebagai pelaksana RPD 2023-2026 merupakan penjabat kepala daerah yang ditunjuk oleh pejabat berwenang, bukan kepala daerah hasil pemilihan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang beserta perubahannya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, penentuan tujuan dan sasaran pada RPD didasarkan pada visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap keempat dan isu strategis yang aktual.

5.1. Visi dan Misi RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025

Visi yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tasikmalaya (RPJPD) tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

***“DENGAN IMAN DAN TAKWA KOTA TASIKMALAYA SEBAGAI PUSAT
PERDAGANGAN DAN INDUSTRI TERMAJU DI JAWA BARAT”***

Visi tersebut mengandung makna:

1. Visi Kota Tasikmalaya tersebut merupakan arah dan gambaran masa depan (2025) yang akan dituju oleh segenap masyarakat guna mensejahterakan dirinya melalui fungsi dan kegiatan-kegiatan perdagangan dan industri dengan modal nilai-nilai iman dan taqwa.
2. Dipilihnya aktivitas perdagangan dan industri sebagai aktivitas utama Kota Tasikmalaya tidak terlepas dari karakteristik masyarakat Kota Tasikmalaya yang dikenal sebagai pedagang dan pelaku industri (khususnya perdagangan dan industri kecil) yang tangguh.
3. Yang dimaksud dengan “pusat” pada pernyataan visi di atas adalah suatu kawasan yang melayani wilayah lain.
4. “Termaju di Jawa Barat” pada pernyataan visi di atas mengandung arti bahwa Kota Tasikmalaya termasuk salah satu kota/kabupaten termaju di Jawa Barat pada sektor perdagangan dan industri.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal



maupun lingkungan internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai.

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota bernuansa agamis, demokratis dan taat hukum.
2. Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota yang berbudaya dan berwawasan global.
3. Menghasilkan pelaku-pelaku bisnis di sektor ekonomi khususnya industri, perdagangan, jasa dan pertanian yang mempunyai daya saing tinggi serta meningkatkan produktivitas dan iklim hubungan industri yang sehat.
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas yang mampu menciptakan keberkelanjutan pembangunan di sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian sehingga mampu mendorong tumbuh kembangnya sektor pariwisata di Kota Tasikmalaya.
5. Menciptakan dan memelihara pelayanan publik yang berbasis pada *good governance* dengan berlandaskan pada prinsip *government entrepreneurship* sehingga mampu menghasilkan iklim mandiri dan partisipatif pada semua lapisan masyarakat di Kota Tasikmalaya.
6. Menciptakan pembangunan Kota Tasikmalaya yang berbasis pada pengembangan sektor-sektor unggulan dengan mengoptimalkan prasarana dan sarana kota secara berkelanjutan.
7. Mewujudkan Kota Tasikmalaya yang sehat, nyaman dan berwawasan lingkungan.

5.2. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Tahap Keempat

Tujuan pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya hingga tahun 2025 berfungsi sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju Kota Tasikmalaya yang sejahtera, adil dan makmur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, perlu dijabarkan arah pembangunan jangka panjang serta arah pembangunan kewilayahan sebagai berikut:

Arah pembangunan jangka panjang menggambarkan kondisi umum pembangunan yang akan dicapai oleh Kota Tasikmalaya hingga tahun 2025, yang memperhatikan arah kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan provinsi.

1. Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat.
2. Terwujudnya pembangunan prasarana dan sarana publik yang dapat diakses dengan mudah dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
3. Terwujudnya masyarakat Kota Tasikmalaya yang agamis, beradab dan berbudaya menuju masyarakat yang madani.
4. Meningkatnya peran sektor-sektor unggulan sebagai faktor penggerak utama perekonomian Kota Tasikmalaya.
5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang didasarkan pada pencapaian indeks pembangunan manusia yang tinggi.
6. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang diarahkan pada pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya alam.



7. Terciptanya keserasian dan keterkaitan sektor pariwisata yang berkembang di wilayah Priangan Timur, sehingga dapat menjadi pendorong dan peningkatan *tourism attractiveness* yang khas serta mampu menumbuhkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yang lebih baik dan maju.

Tahap keempat dalam RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 sebagai disebut Tahap Pencapaian Kota Industri dan Perdagangan Termaju di Jawa Barat. Tahap keempat ini merupakan tahap pencapaian pada visi dan misi yang diharapkan dimana fokus pembangunan lebih diarahkan dalam memantapkan pada perkembangan sektor industri, perdagangan dan jasa dengan diimbangi dengan peningkatan kualitas pembangunan disektor lainnya, dengan analisa sasaran pokok yang digambarkan sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur berkualitas kota hampir menyentuh seluruh wilayah kota terutama pada jalur yang menuju ke pusat pelayanan publik, pusat perdagangan dan jasa, serta sentra industri kecil dan menengah.
2. Sumber daya manusia semakin berkualitas, cerdas, terampil, berwawasan global berbasis keunggulan lokal semakin kuat, bermoral berlandaskan iman dan taqwa semakin siap dalam menghadapi persaingan global. Kualitas dan relevansi pendidikan yang didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien, efektif dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat, teknologi informasi menjadi basis dalam pembelajaran dan pemantapan program wajib belajar 12 tahun serta perintisan wajib belajar ke jenjang perguruan tinggi.
3. Kesehatan dan status gizi masyarakat semakin baik ditunjang dengan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah dan mudah diakses.
4. Kesejahteraan masyarakat semakin meningkat seiring dengan meningkatnya daya beli dan pendapatan perkapita yang menyebabkan tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi baik lokal, regional maupun nasional terus meningkat. Jaminan sosial dari pemerintah semakin nyata dirasakan oleh masyarakat sehingga angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin terus menurun.
5. Sruktur perekonomian kota semakin kuat dan kompetitif dalam era pasar global yang semakin nyata semakin mendorong berkembangnya sektor perdagangan dan industri kecil, menengah dan besar serta sektor jasa dengan dukungan investasi yang terus meningkat, peningkatan kualitas pengelolaan sektor pertanian dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan sebagai pemantapan ketahanan pangan.
6. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin baik karena tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih semakin nyata keberadaannya, kualitas pelayanan publik yang lebih baik, cepat, transparan, dan akuntabel makin meningkat.
7. Pelestarian lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan lebih ditingkatkan untuk mengimbangi akan meningkatnya kebutuhan akan air bersih dan pengelolaan sampah yang modern.
8. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah sebagai modal pembangunan dengan menggali sumber-sumber pendapatan yang tidak membebani masyarakat serta kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar pajak dan retribusi semakin baik.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu periode perencanaan yaitu tahun 2023-2026. Rumusan tujuan dan



sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* dan *impact* program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Dengan memperhatikan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap keempat, isu strategis yang aktual dan hasil evaluasi pelaksanaan RPD tahun 2023-2026, tujuan dan sasaran RPD Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

T1. Meningkatnya kesejahteraan sosial, dengan 1 (satu) sasaran:

S1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan;

T.2. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan lokal, yang terdiri dari 5 (lima) sasaran:

S2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat;

S3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;

S4. Meningkatnya pengendalian penduduk, pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

S5. Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah;

S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.

T.3. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas, yang terdiri dari 2 (dua) sasaran:

S7. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan;

S8. Meningkatnya iklim penanaman modal untuk membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

T4. Terwujudnya infrastruktur dan penataan ruang yang mendukung kota nyaman huni berwawasan lingkungan, yang terdiri dari 2 (dua) sasaran:

S9. Meningkatnya layanan infratraktur kota yang berkualitas;

S10. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;

T5. Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi, yang terdiri dari 1 (satu) sasaran:

S11. Meningkatnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik prima.

Pada perubahan RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 ini, terdapat beberapa penyesuaian yaitu:

- 1) penyesuaian sasaran 4 yakni “Meningkatnya pengendalian penduduk, pengarusutamaan gender” menjadi “Meningkatnya pengendalian penduduk, pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak”;
- 2) penyesuaian sasaran 11 yakni “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif berbasis teknologi informasi” menjadi “Meningkatnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik prima”;
- 3) penyesuaian beberapa indikator sasaran diantaranya:
 - a. penambahan indikator Prevalensi Stunting pada sasaran 3 “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat”



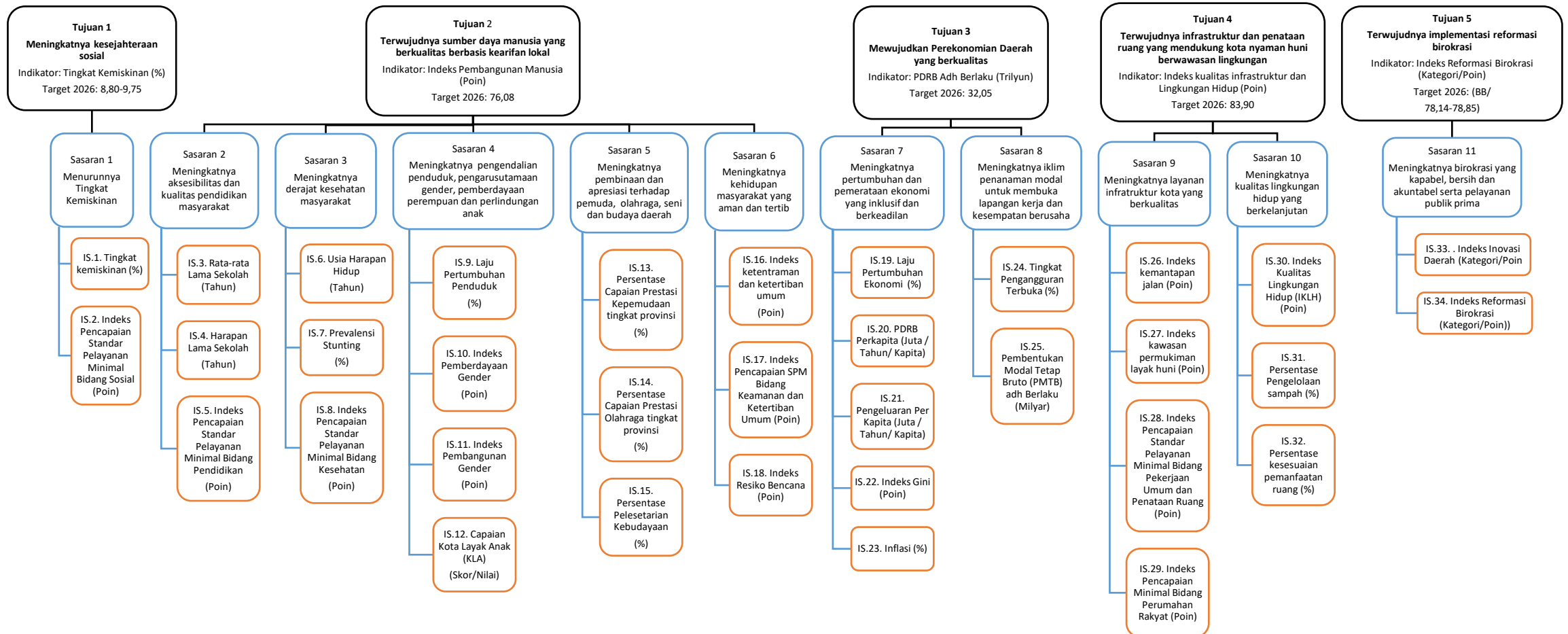
- b. penambahan indikator Capaian Kota Layak Anak (KLA) pada sasaran 4 “Meningkatnya pengendalian penduduk, pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak”
- c. penambahan indikator Indeks ketentraman dan ketertiban umum pada sasaran 6 “Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib”
- d. penyesuaian indikator Indeks Persentase kemantapan jalan pada sasaran 9 “Meningkatnya layanan infrastruktur kota yang berkualitas”
- e. penambahan indikator Indeks Reformasi Birokrasi untuk mengganti indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks SPBE, Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah, Nilai Evaluasi SAKIP, Nilai Evaluasi LPPD dan Tingkat Maturitas SPIP pada sasaran 11 “Meningkatnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik prima”.

Untuk lebih jelas melihat keterkaitan antara tujuan dan sasaran termasuk indikator kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilannya disajikan pada gambar cascading sebagai berikut:



Gambar 5.1.

Cascading Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023 -2026





Tabel 5.1.
Tujuan Dan Sasaran
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Tahun 2022	Perubahan Target Capaian RPD Tahun 2023-2026							Kondisi Akhir RPD
							2023	2024		2025		2026		2026
								Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	
1	T1. Meningkatnya kesejahteraan sosial		IT.1. Tingkat kemiskinan	(%)	13,13	11,50	12,33	11,33	11,33	10,73	9,2 - 10,16	10,20	8,80 - 9,75	8,80 - 9,75
		S1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan	IS.1. Tingkat kemiskinan	(%)	13,13	11,50	12,33	11,33	11,33	10,73	9,2 - 10,16	10,20	8,80 - 9,75	8,80 - 9,75
			IS.2. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	Poin	100	100	90	90	100	92	100	94	100	100
2	T2. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan lokal		IT.2. Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,31	73,95	73,95	74,28	75,65	74,62	75,86	74,96	76,08	76,08
		S2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	IS.3. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,52	9,70	9,76	9,89	9,55	10,02	9,56	10,16	9,57	9,57
			IS.4. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,46	13,54	13,50	13,52	13,50	13,53	13,52	13,55	13,56	13,56
			IS.5. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Poin	69,12	100	72	75	95,80	77	96,02	79	97,00	97,00
		S3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	IS.6. Usia Harapan Hidup	Tahun	72,34	73,15	72,57	72,69	75,26	72,81	75,44	72,94	75,63	75,63
			IS.7. Prevalensi Stunting	%	-	-	-	-	24,53	-	23,73	-	22,53	22,53
			IS.8. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Poin	48,09	100	75	80	98,5	85	100	90	100	100



Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Tahun 2022	Perubahan Target Capaian RPD Tahun 2023-2026								Kondisi Akhir RPD
							2023	2024		2025		2026		2026	
								Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		
		S4. Meningkatnya pengendalian penduduk, pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	IS.9. Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,81	0,20	0,71	0,61	0,61	0,51	0,51	0,41	0,41	0,41	
			IS.10. Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	59,51	62,96	60,00	60,10	60,10	60,20	60,20	60,30	60,30	60,30	
			IS.11. Indeks Pembangunan Gender	Poin	91,74	91,54	91,84	91,94	93,0	92,04	93,40	92,24	93,75	93,75	
			IS.12. Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Skor/ Nilai	-	-	563	-	663	-	763	-	863	863	
		S5. Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah	IS.13. Persentase Capaian Prestasi Kepemudaan tingkat provinsi	%	-	-	2,20	3,30	8,8	4,40	42	5,49	44	44	
			IS.14. Persentase Capaian Prestasi Olahraga tingkat provinsi	%	60	-	34,15	36,59	52,38	39,02	39,02	41,46	41,46	41,46	
			IS.15. Persentase Pelesetarian Kebudayaan	%	-	80	63,73	68,63	68,63	73,53	73,53	78,43	78,43	78,43	
		S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	IS.16. Indeks ketentraman dan ketertiban umum	Poin	-	-	60	-	62		64		66	66	
			IS.17. Indeks Pencapaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum	Poin	98,47	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
			IS.18. Indeks Resiko Bencana	Poin	Sedang (117,37)	-	Sedang (117,15)	Sedang (117,15)	Sedang (117,15)	Sedang (117,15)	Sedang (114,15)	Sedang (117,15)	Sedang (112,85)	Sedang (112,85)	
3	T.3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang berkualitas		IT.3. PDRB adh Berlaku	Triliun	22,85	23,61	24,40	25,21	28,93	26,02	30,45	26,83	32,05	32,05	
	S7. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	IS.19. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,57	5,0	5,15	5,69	5,69	5,81	5,43 - 6,17	5,98	5,42 - 6,19	5,42 - 6,19		
IS.20. PDRB Perkapita		Juta / Tahun/ Kapita	31,56	32,46	33,40	34,35	37,63	35,33	39,01	36,26	40,09	40,09			



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Tahun 2022	Perubahan Target Capaian RPD Tahun 2023-2026								Kondisi Akhir RPD
							2023	2024		2025		2026		2026	
								Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		
			IS.21. Pengeluaran Per Kapita	Juta / Tahun/ Kapita	10,213	9,86	10,424	10,531	11,141	10,639	11,244	10,748	11,333	11,333	
			IS.22. Indeks Gini	Poin	0,414	0,39	0,390	0,380	0,400	0,370	0,355 - 0,405	0,360	0,35-0,39	0,35-0,39	
			IS.23. Inflasi	%	1,17	2,00	2,47	2,65	2,65	2,83	2,83	2,96	2,5	2,5	
		S8. Meningkatkan iklim penanaman modal dan kesempatan kerja	IS.24. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,66	7,02	7,35	7,18	6,50	6,84	5,97 - 6,49	6,53	5,74-6,25	5,74-6,25	
			IS.25. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adh Berlaku	(milyar)	7.573,28	-	8.002,90	8.283,45	9.208,07	8.564,01	9.283,45	8.844,56	9.358,83	9.358,83	
4	T.4. Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni berwawasan Lingkungan		IT.4. Indeks kualitas infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Poin	-	-	70,53	74,48	79,39	78,96	82,41	83,62	83,90	83,90	
		S9. Meningkatkan layanan infratraktur kota yang berkualitas	IS.26. Indeks kemantapan jalan	Poin	-	-	59,23	62,05	78,93	66,87	81,90	73,67	82,93	82,93	
			IS.27. Indeks kawasan permukiman layak huni	Poin	-	-	15,88	31,77	38,06	48,57	47,46	65,36	54,51	54,51	
			IS.28. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Poin	58,71	100	91,07	94,74	98,74	97,57	100	100	100	100	
			IS.29. Indeks Pencapaian Minimal Bidang Perumahan Rakyat	Poin	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		S10. Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	IS.30. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	-	74,40	57,93	58,15	58,15	58,37	61,62	58,59	61,79	61,79	
			IS.31. Persentase Pengelolaan sampah	%	77,86	83,45	99	99	99	100	100	100	100	100	



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Tahun 2022	Perubahan Target Capaian RPD Tahun 2023-2026								Kondisi Akhir RPD
							2023	2024		2025		2026		2026	
								Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		
			IS.32. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	-	-	98	98,5	98,5	99	99	99,5	99,5	99,5	
5	T5. Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi		IT.5. Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori /Poin	CC (57,58)	61-70 (B)	BB (78,14)	CC (57,58- 60,00)	BB (78,14- 78,85)	B (60,01- 65,00)	BB (78,14- 78,85)	B (60,01- 65,00)	BB (78,14- 78,85)	BB (78,14- 78,85)	
		S11. Meningkatnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik prima	IS.33. Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori/ Poin	Baik (83,32)	Baik (77-88)	Baik (83,32 - 85,80)	Baik (83,32 - 85,80)	-	Baik (85,80 - 88,30)	-	Baik (85,80 - 88,30)	-	Baik 85,80 - 88,30	
			IS.34. Indeks Inovasi Daerah	Kategori/ Poin	Inovatif (36,43)	-	Inovatif (46,43)	Inovatif (52,43)	Inovatif (47,20)	Sangat Inovatif (60,01)	Inovatif (53,20)	Sangat Inovatif (62,01)	Sangat Inovatif (60,20)	Sangat Inovatif (60,20)	
			IS.35. Indeks SPBE	Kategori/ Poin	Baik (2,68)	Sangat Baik (3,00)	Baik (2,9)	Baik (3,0)	Baik (3,0)	Baik (3,1)	-	Baik (3,2)	-	Baik (3,2)	
			IS.36. Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah	(Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	WTP	-	WTP	
			IS.37. Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori/ Poin	BB (70,81)	81-90 (A)	BB (72,50- 75,00)	BB (72,50- 75,00)	BB (72,50- 75,00)	BB (72,50- 75,00)	-	BB (72,50- 75,00)	-	BB (72,50- 75,00)	
			IS.38.Nilai Evaluasi LPPD	Kategori	Sangat Tinggi	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	-	Sangat Tinggi	-	Sangat Tinggi	
			IS.39. Tingkat Maturitas SPIP	Level	2,83	3	3	3	3	3	-	3	-	3	
			IS. 40. Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori/ Poin	-	-	-	-	78,34	-	78,40	-	78,50	78,50	

Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2024.



Perencanaan Pembangunan daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Oleh karena itu perlu adanya keselarasan dalam perencanaan pembangunan daerah dengan rencana pembangunan provinsi dan Nasional, sehingga pembangunan dapat saling bersinergi dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

Seiring dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2026, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Tasikmalaya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026 serta tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019-2024.

Untuk lebih lengkapnya tentang keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan RPD Kota Tasikmalaya dengan RPD Provinsi Jawa Barat dan RPJMN dapat dilihat pada table berikut.



Tabel 5.2.
Keselarasan Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026	RPJMN 2019-2024
Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran	Sasaran/Indikator Sasaran	Sasaran/Indikator Sasaran
T1. Meningkatnya kesejahteraan sosial	S1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan ➤ IS.1. Tingkat Kemiskinan (%) ➤ IS.2. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial (Poin)	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat ➤ Persentase Penduduk Miskin (%)	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk ➤ Persentase penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial:
T2. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan lokal	S2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat ➤ IS.3. Rata-rata Lama Sekolah (tahun) ➤ IS.4. Harapan Lama Sekolah (tahun) ➤ IS.5. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Poin)	Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat ➤ Rata-Rata lama sekolah (tahun) ➤ Harapan Lama Sekolah (tahun)	Terpenuhinya layanan dasar ➤ Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun) ➤ Harapan Lama Sekolah (Tahun) ➤ Tingkat Penyelesaian Pendidikan (%) ➤ Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (PT) (%) ➤ Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (%) ➤ Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 Persen Termiskin dan 20 Persen Terkaya ➤ Nilai rata-rata hasil PISA ➤ Proporsi Anak di Atas Standar Kompetensi Minimum dalam Test PISA (%) ➤ Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Asesmen Kompetensi (%)
	S3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat ➤ IS.6. Usia Harapan Hidup (Tahun) ➤ IS.7. Prevalensi Stunting (%) ➤ IS.8. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Poin)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat ➤ Angka Harapan Hidup (tahun) ➤ Prevalensi <i>Stunting</i>	Terpenuhinya layanan dasar ➤ Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup) ➤ Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup) ➤ Angka prevalensi kontrasepsi modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) (%) ➤ Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) (%) ➤ Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) ➤ Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)



RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026	RPJMN 2019-2024
Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran	Sasaran/Indikator Sasaran	Sasaran/Indikator Sasaran
			➤ Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%) ➤ Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV) ➤ Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) ➤ Eliminasi malaria (kab/kota) ➤ Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%) ➤ Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%) ➤ Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%) ➤ Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%) ➤ Persentase rumah sakit terakreditasi (%) ➤ Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%) ➤ Persentase puskesmas tanpa dokter (%) ➤ Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%) ➤ Persentase obat memenuhi syarat (%) ➤ Persentase makanan memenuhi syarat (%)
	S4. Meningkatnya pengendalian penduduk, pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ➤ IS.9. Laju Pertumbuhan Penduduk (%) ➤ IS.10. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Point) ➤ IS.11. Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Point) ➤ IS.12. Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk ➤ Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda ➤ Indeks Pemberdayaan Gender (Nilai) ➤ Indeks Perlindungan Anak	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan ➤ Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i>/TFR) ➤ Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda
	S5. Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah ➤ IS.13. Persentase Capaian Prestasi Kepemudaan (%)	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda ➤ Indeks Pembangunan Pemuda (Poin)	Meningkatkan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan ➤ Indeks Pembangunan Kebudayaan Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan



RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026	RPJMN 2019-2024
Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran	Sasaran/Indikator Sasaran	Sasaran/Indikator Sasaran
	➤ IS.14. Persentase Capaian Prestasi Olahraga (%) ➤ IS.15. Persentase Pelesetarian Kebudayaan (%)		➤ Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing ➤ Budaya dan prestasi olahraga
	S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib ➤ IS.16. Indeks ketentraman dan ketertiban umum ➤ IS.17. Indeks Pencapaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum (Poin) ➤ IS.18. Indeks Resiko Bencana (Poin)	Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana ➤ Indeks Risiko Bencana (Poin)	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni social dalam kehidupan beragama ➤ Indeks kerukunan Umat Beragama Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional ➤ Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional Tingkat Kriminalitas (Orang/100.000 Penduduk)
T.3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang berkualitas	S7.Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan ➤ IS.19. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) ➤ IS.20. PDRB Perkapita (Juta/Tahun/Kapita) ➤ IS.21. Pengeluaran Per Kapita (Juta/Tahun/Kapita) ➤ IS.22. Indeks Gini (Poin) ➤ IS.23. Inflasi (%)	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat ➤ Pengeluaran per kapita (Rp.000) Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan ➤ Laju Pertumbuhan Sektor Industri (%) ➤ Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%) Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan ➤ Skor Pola Pangan Harapan ➤ Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) Meningkatnya pertumbuhan sektor Penyediaan akomodasi makan dan minum ➤ Laju Pertumbuhan Sektor penyediaan akomodasi makan dan minum	Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi ➤ Rasio kewirausahaan nasional (%) ➤ Kontribusi UMKM terhadap PDB (%) ➤ Kontribusi koperasi terhadap PDB (%) ➤ Proporsi Industri Mikro Kecil (IMK) yang menjalin kemitraan (%) ➤ Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal (8.10.1(b)) (%) ➤ Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan (%) ➤ Jumlah koperasi modern yang dikembangkan (unit) ➤ Pertumbuhan wirausaha (%) ➤ Jumlah sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) baru di luar Jawa yang beroperasi (sentra) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi ➤ Pertumbuhan PDB pertanian (%)
	S8. Meningkatnya iklim penanaman modal dan kesempatan kerja ➤ IS.24. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi ➤ Pertumbuhan perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor (%)



RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026	RPJMN 2019-2024
Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran	Sasaran/Indikator Sasaran	Sasaran/Indikator Sasaran
	➤ IS.25. Pembentukan Modal Tetap Bruto ADH Berlaku (Triliun)	➤ Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (Triliun Rupiah) ➤ Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit (%) ➤ Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	➤ Pertumbuhan PDB industri pengolahan - Pertumbuhan investasi (PMTB) (%) - Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing ➤ Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%) ➤ Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (%) ➤ Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan (%) ➤ Jumlah lulusan pelatihan vokasi (juta orang)
T.4. Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni berwawasan Lingkungan	S9. Meningkatnya layanan infratraktur kota yang berkualitas ➤ IS.26. Indeks kemantapan jalan (Poin) ➤ IS.27. Persentase kawasan permukiman layak huni (%) ➤ IS.28. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Poin) ➤ IS.29. Indeks Pencapaian Minimal Bidang Perumahan Rakyat (Poin)	Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan Pelayanan infrastruktur ➤ Tingkat Konektivitas (%) Meningkatnya Kualitas infrastruktur ➤ Indeks Kualitas infrastruktur Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman ➤ Persentase rumah tangga hunian layak (%) Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan ➤ Indeks Desa Membangun	Meningkatnya konektivitas wilayah ➤ Panjang jalan baru yang terbangun (Km) ➤ Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten-kota (%) Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan ➤ Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang (kota) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar ➤ Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%) ➤ Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman (%) ➤ Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) ➤ Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%) ➤ Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman/kota/regional (Rumah Tangga) ➤ Jumlah rumah tangga yang terlayani instalasi pengolahan lumpur tinja (Rumah Tangga)



RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026	RPJMN 2019-2024
Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran	Sasaran/Indikator Sasaran	Sasaran/Indikator Sasaran
			➤ Rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (%) ➤ Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan (%) ➤ Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar metode lahan urug saniter (Rumah Tangga)
	S10. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan ➤ IS.30. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point) ➤ IS.31. Persentase Pengelolaan Sampah (%) ➤ IS.32. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup ➤ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana ➤ Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Poin)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup ➤ Indeks Kualitas Udara (IKU) ➤ Indeks Kualitas Air (IKA) ➤ Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) ➤ Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ➤ Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan (lokasi) ➤ Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu lingkungan (perusahaan)
T5. Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi	S11. Meningkatnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik prima ➤ IS.33. Indeks Inovasi Daerah (Kategori) ➤ IS.34. Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori/Poin)	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ➤ Indeks Reformasi Birokrasi Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan ➤ Indeks Inovasi Daerah (Poin)	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ➤ Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks RB ≥ Baik* ➤ Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sakip ➤ Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik
			Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ➤ Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik ➤ Instansi Pemerintah (IP) dengan tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik (IP)

Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2024.



Tujuan dan sasaran RPD tahun 2023-2026 mengacu pada RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025, berikut keselarasan antara Tujuan dan sasaran RPD dengan misi RPJPD.

Tabel 5.3.
Keselarasan Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPJPD Kota Tasikmalaya 2005-2025
Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran	Misi
T1. Meningkatnya kesejahteraan sosial	S1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan ➤ IS.1. Tingkat Kemiskinan (%) ➤ IS.2. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial (Poin)	Misi 4: Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas yang mampu menciptakan keberkelanjutan pembangunan di sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian sehingga mampu mendorong tumbuh kembangnya sektor pariwisata di Kota Tasikmalaya.
T2. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan lokal	S2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat ➤ IS.3. Rata-rata Lama Sekolah (tahun) ➤ IS.4. Harapan Lama Sekolah (tahun) ➤ IS.5. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Poin)	Misi 4: Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas yang mampu menciptakan keberkelanjutan pembangunan di sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian sehingga mampu mendorong tumbuh kembangnya sektor pariwisata di Kota Tasikmalaya.
	S3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat ➤ IS.6. Usia Harapan Hidup (Tahun) ➤ IS.7. Prevalensi Stunting (%) ➤ IS.8. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Poin)	Misi 7: Mewujudkan Kota Tasikmalaya yang sehat, nyaman dan berwawasan lingkungan.
	S4. Meningkatnya pengendalian penduduk, pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ➤ IS.9. Laju Pertumbuhan Penduduk (%) ➤ IS.10. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Point) ➤ IS.11. Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Point) ➤ IS.12. Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Misi 4: Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas yang mampu menciptakan keberkelanjutan pembangunan di sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian sehingga mampu mendorong tumbuh kembangnya sektor pariwisata di Kota Tasikmalaya.
	S5. Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah ➤ IS.13. Persentase Capaian Prestasi Kepemudaan (%) ➤ IS.14. Persentase Capaian Prestasi Olahraga (%) ➤ IS.15. Persentase Pelesetarian Kebudayaan (%)	Misi 2: Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota yang berbudaya dan berwawasan global.



RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPJPD Kota Tasikmalaya 2005-2025
Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran	Misi
	S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib ➤ IS.16. Indeks ketentraman dan ketertiban umum ➤ IS.17. Indeks Pencapaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum (Poin) ➤ IS.18. Indeks Resiko Bencana (Poin)	Misi 1: Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota bernuansa agamis, demokratis dan taat hukum.
T.3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang berkualitas	S7. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan ➤ IS.19. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) ➤ IS.20. PDRB Perkapita (Juta/Tahun/Kapita) ➤ IS.21. Pengeluaran Per Kapita (Juta/Tahun/Kapita) ➤ IS.22. Indeks Gini (point) ➤ IS.23. Inflasi (%)	Misi 3: Menghasilkan pelaku-pelaku bisnis di sektor ekonomi khususnya industri, perdagangan, jasa dan pertanian yang mempunyai daya saing tinggi serta meningkatkan produktivitas dan iklim hubungan industri yang sehat.
	S8. Meningkatnya iklim penanaman modal dan kesempatan kerja ➤ IS.24. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) ➤ IS.25. Pembentukan Modal Tetap Bruto ADH Berlaku (Triliun)	Misi 3: Menghasilkan pelaku-pelaku bisnis di sektor ekonomi khususnya industri, perdagangan, jasa dan pertanian yang mempunyai daya saing tinggi serta meningkatkan produktivitas dan iklim hubungan industri yang sehat.
T.4. Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni berwawasan Lingkungan	S9. Meningkatnya layanan infratraktur kota yang berkualitas ➤ IS.26. Indeks kemantapan jalan (Poin) ➤ IS.27. Persentase kawasan permukiman layak huni (%) ➤ IS.28. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Poin) ➤ IS.29. Indeks Pencapaian Minimal Bidang Perumahan Rakyat (Poin)	Misi 6: Menciptakan pembangunan Kota Tasikmalaya yang berbasis pada pengembangan sektor-sektor unggulan dengan mengoptimalkan prasarana dan sarana kota secara berkelanjutan.
	S10. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan ➤ IS.30. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point) ➤ IS.31. Persentase Pengelolaan Sampah (%) ➤ IS.32. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	Misi 7: Mewujudkan Kota Tasikmalaya yang sehat, nyaman dan berwawasan lingkungan.
T5. Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi	S11. Meningkatnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik prima ➤ IS.33. Indeks Inovasi Daerah (Kategori) ➤ IS.34. Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori/Poin)	Misi 5: Menciptakan dan memelihara pelayanan publik yang berbasis pada good governance dengan berlandaskan pada prinsip government entrepreneurship sehingga mampu menghasilkan iklim mandiri dan partisipatif pada semua lapisan masyarakat di Kota Tasikmalaya

Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2024.



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

6.1.1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsip sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan yang akan dijelaskan lebih lanjut.

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah berdasarkan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, threats*);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi;
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.



Selain itu, dalam menentukan strategi pembangunan daerah dirumuskan melalui pendekatan:

- 1. Mempertahankan, artinya program pembangunan yang sudah berjalan dengan baik saat ini agar dipertahankan, dijaga dan terus dijalankan;
- 2. Melanjutkan, artinya program pembangunan yang sudah berjalan dengan baik agar terus dijalankan dan dilakukan pengembangan agar lebih baik lagi;
- 3. Reorientasi/inovasi, artinya harus dapat merumuskan dan menyusun program kegiatan baru yang sifatnya terobosan, inovatif yang dapat mempercepat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- 4. Mendukung, artinya terus memberikan dukungan terhadap program prioritas pembangunan pemerintah baik bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi jawa barat dalam rangka sinergitas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Penentuan alternatif strategi untuk pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran dirumuskan dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas yang telah diuraikan dan dirumuskan dalam bab-bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang telah dan proyeksi yang akan terjadi dimasa mendatang. Analisis pengaruh lingkungan yang digunakan adalah metode analisis SWOT. Penggunaan metode SWOT dalam penentuan strategi lebih dikarenakan mudah dipahami, sederhana dan banyak digunakan oleh pelaku pembangunan di Indonesia.

Identifikasi faktor internal dan eksternal berdasarkan analisis SWOT digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Gambar 6.1.
Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal Berdasarkan Analisis SWOT

I N T E R N A L	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
	1. Pemegang regulator dan kebijakan 2. Regulasi yang ada cukup memadai dalam menjalankan pemerintahan 3. Anggaran yang cukup tersedia baik yang bersumber dari APBD kota, provinsi dan pusat 4. Sarana dan prasarana pemerintahan yang cukup memadai	1. SDM aparatur yang terbatas baik kuantitas maupun kualitas 2. Pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang belum optimal 3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan (<i>e-government</i>) belum optimal 4. Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi yang belum optimal 5. Belum optimalnya impelentasi refomasi birokrasi
E K S T E R N A L	Opportunity (Peluang)	Threat (Ancaman)
	1. Perkembangan teknologi informasi 2. Lokasi yang strategis sebagai PKW Priangan Timur 3. Percepatan pembangunan dan bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan provinsi 4. Pasar bebas dunia 5. Pembangunan Jalan Tol Cigatas	1. Masih tinggi angka kemiskinan dan pengangguran 2. Pertumbuhan ekonomi yang melambat dan dinamika ekonomi global 3. Infrastruktur dasar perkotaan, perumahan dan permukiman kumuh serta akses sanitasi masih belum optimal 4. Pandemi Covid-19 dan perubahan iklim 5. Perubahan perilaku dan budaya asing 6. Gangguan ketentraman dan ketertiban umum

Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya 2024



Berdasarkan hasil identifikasi dan analisa SWOT serta memperhatikan analisis kondisi, permasalahan dan isu strategis, maka strategi umum pembangunan yang digunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengurangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial, melalui jaminan dan perlindungan sosial yang terintegrasi berbasis data terpadu, pemberdayaan masyarakat, koordinasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat yang berkarakter, cerdas, sehat dan berdaya saing berbasis kearifan lokal;
3. Meningkatkan kinerja perekonomian daerah yang inklusif dan merata dengan meningkatkan produktivitas pertanian, usaha dan industri mikro, kecil dan menengah, mengembangkan pariwisata perkotaan, meningkatkan iklim penanaman modal dan perluasan lapangan kerja serta kesempatan berusaha;
4. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar perkotaan, perumahan dan permukiman, yang aman, nyaman, sehat, inklusif dan berkelanjutan serta sesuai rencana penataan ruang;
5. Mempercepat pelaksanaan 8 area perubahan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi

Guna lebih mempertajam dan memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaannya, maka strategi umum pembangunan tersebut dirinci lagi kedalam strategi pembangunan berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 yaitu menurunnya tingkat kemiskinan dengan strategi meningkatkan sistem jaminan, perlindungan dan rehabilitasi sosial, Pemberdayaan masyarakat miskin, sinergitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan;
2. Sasaran 2 yaitu meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat dengan strategi peningkatan kualitas pelayanan dan aksesibilitas pendidikan berbasis teknologi informasi;
3. Sasaran 3 yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan strategi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
4. Sasaran 4 yaitu meningkatnya pengendalian penduduk, pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan strategi meningkatkan pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender serta memperkuat ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
5. Sasaran 5 yaitu meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah dengan strategi meningkatkan pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah;
6. Sasaran 6 yaitu meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib dengan strategi meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penegakan perda dengan melibatkan sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pelayanan kebencanaan;
7. Sasaran 7 yaitu meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan dengan strategi meningkatkan kualitas dan produktivitas koperasi, usaha dan industri mikro kecil, revitalisasi pasar rakyat dan fasilitasi perdagangan dan jasa, meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian dan perikanan yang ditunjang oleh pengelolaan sumber daya air yang memadai untuk mendukung ketahanan pangan



- daerah, meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta guna mendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta mendorong geliat sektor pariwisata perkotaan dan ekonomi kreatif serta meningkatkan pengendalian pasokan, distribusi, harga komoditas barang untuk menjaga stabilitas inflasi daerah;
8. Sasaran 8 yaitu meningkatnya iklim penanaman modal dan kesempatan kerja dengan startegi meningkatkan pelayanan, pengembangan, promosi dan pengendalian penanaman modal, meningkatkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan terhadap tenaga kerja;
 9. Sasaran 9 yaitu meningkatnya layanan infratraktur kota yang berkualitas dengan startegi meningkatkan kualitas infrastruktur dasar perkotaan dan pelayanan sanitasi serta meningkatkan penataan perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang nyaman dan sehat;
 10. Sasaran 10 yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan startegi meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan optimalisasi pemanfaatan tata ruang kota yang berkelanjutan;
 11. Sasaran 11 yaitu meningkatnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik prima dengan strategi meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, profesional dan inovatif berbasis teknologi infomasi serta meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan yang diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah.

6.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah dan perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPD secara bertahap.

Guna mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka pelaksanaan prioritas pembangunan harus fokus dan terarah dengan jelas. Untuk itu diperlukan arah kebijakan pembangunan daerah selama 4 (empat) tahun kedepan dalam horizon waktu yang dituangkan dalam tema pembangunan pada setiap tahun yang akan dijabarkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah.

Terjadinya pandemik covid-19 yang telah berlangsung sejak tahun 2020 menuntut pemerintah untuk secara cepat dan tepat mengatur strategi untuk melakukan penanganan dan mempertahankan stabilitas perekonomian dalam negerinya masing-masing. Dampak dari pandemik covid-19 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Begitu pula pemerintah daerah dituntut untuk merumuskan kebijakan dalam penanganan pandemic Covid-19 dan dampaknya baik aspek social, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pandemi



Covid-19 dan dampaknya merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam menyusun arah kebijakan pembangunan tahun 2023-2026.

Untuk lebih mempertajam dan memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaannya, maka arah kebijakan dari masing-masing strategi guna menjawab permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang berkembang diuraikan dalam tabel berikut:



Tabel 6.1.
Strategi Pembangunan dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
T.1. Meningkatnya kesejahteraan sosial	S1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan	1. Meningkatkan sistem jaminan, perlindungan dan rehabilitasi sosial, 2. Pemberdayaan masyarakat miskin, 3. Sinergitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan	1. Penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) serta Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya. 2. Peningkatan program penanggulangan kemiskinan pada sektor sosial, kesehatan, pendidikan, perumahan, usaha dan industri serta perdagangan mikro kecil, pertanian, perikanan dan sektor lainnya,
T.2. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan lokal	S2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan dan aksesibilitas pendidikan berbasis teknologi informasi	1. Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memenuhi standar 2. Peningkatan jumlah dan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, 3. Peningkatan kurikulum/metode pembelajaran dan pengelolaan pendidikan yang berkarakter, efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi 4. Peningkatan pengelolaan keperpustakaan dan minat baca masyarakat
	S3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan	1. Meningkatkan mutu pelayanan sesuai standar pada fasilitas pelayanan kesehatan; 2. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan; dan 3. Peningkatan sinergitas lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			dalam bidang kesehatan;
	S4. Meningkatnya pengendalian penduduk, pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender serta memperkuat ketahanan dan pemberdayaan keluarga	1. Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga. 2. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
	S5. Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah	Meningkatkan pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah	1. Peningkatan pembinaan, pemberdayaan, penggalian potensi pemuda dan olahraga. 2. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemuda, olahraga, seni dan budaya
	S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penegakan perda dengan melibatkan sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pelayanan kebencanaan	1. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan penegakan perda secara humanis dan komprehensif, 2. Peningkatan sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pelayanan kebencanaan
T.3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang berkualitas	S7. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas koperasi, usaha dan industri mikro kecil. 2. Revitalisasi pasar rakyat dan fasilitasi perdagangan dan jasa. 3. Meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian dan perikanan yang ditunjang oleh pengelolaan sumber daya air yang memadai untuk mendukung ketahanan pangan daerah. 4. Meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta	1. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi bagi koperasi, usaha mikro dan industri kecil menengah 2. Peningkatan revitalisasi pasar rakyat dan fasilitasi perdagangan dan jasa. 3. Peningkatan kualitas dan produktivitas pertanian dan perikanan yang ditunjang oleh pengelolaan sumber daya air yang memadai untuk mendukung ketahanan pangan daerah. 4. Peningkatan kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		guna mendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta mendorong geliat sektor pariwisata perkotaan dan ekonomi kreatif 5. Meningkatkan pengendalian pasokan, distribusi, harga komoditas barang untuk menjaga stabilitas inflasi daerah	guna mendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. 5. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi bagi pelaku usaha sektor pariwisata perkotaan dan ekonomi kreatif
	S8. Meningkatnya iklim penanaman modal dan kesempatan kerja	1. Meningkatkan pelayanan, pengembangan, promosi dan pengendalian penanaman modal 2. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja 3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan terhadap tenaga kerja	1. Peningkatan pelayanan penanaman modal yang mudah, cepat, dan transparan. 2. Peningkatan promosi, pengembangan iklim dan pengendalian penanaman modal. 3. Peningkatan pelatihan kompetensi bagi angkatan kerja. 4. Peningkatan pembinaan hubungan industrial dan memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga kerja
T.4. Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni berwawasan Lingkungan	S9. Meningkatnya layanan infratraktur kota yang berkualitas	1. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar perkotaan dan pelayanan sanitasi 2. Meningkatkan penataan perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang nyaman dan sehat	1. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang menunjang keselamatan berlalulintas. 2. Peningkatan pelayanan akses sanitasi rumah tangga terutama ari minum dan air limbah yang layak. 3. Peningkatan penataan perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang nyaman dan sehat
	S10. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan optimalisasi pemanfaatan tata ruang kota yang berkelanjutan	1. Peningkatan pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan hidup. 2. Penataan RTRW yang komprehensif dan mendukung pembangunan daerah



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
T.5. Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi	S11. Meningkatnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik prima;	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, profesional dan inovatif berbasis teknologi informasi serta Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan yang diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang ditunjang oleh penyediaan sarana prasarana yang memadai . 2. Percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua pelayanan publik dan penunjang kerja perangkat daerah 3. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. 4. Peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah

Sumber: Bappelitbangda, data diolah, 2024.



Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan diatas, dapat disimpulkan tema atau fokus pembangunan. Tema atau fokus pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPD yang dijabarkan dalam RKPD pada setiap tahun yang disesuaikan dengan dinamika yang berkembang.

Adapun arah kebijakan dalam horizon waktu atau tema pembangunan tahunan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.2.
Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan
(Tema Pembangunan)

Arah KebijakanPembangunan			
Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas untuk Pengurangan Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Stabilitas Keamanan dan Peningkatan Daya Saing untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Iklim Penanaman Modal dan Pelayanan Publik untuk untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pelayanan Dasar Untuk Kemajuan Dan Kesejahteraan Masyarakat

Sumber : Bappelitbangda, data diolah, 2022.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota harus selaras dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini untuk membangun sinergitas dan kolaborasi perencanaan pembangunan sehingga terbangun keselarasan pelaksanaan pembangunan antara Kota Tasikmalaya dengan pembangunan provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional. Keselarasan startegi dan arah kebijakan pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 6.3.
Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

No	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPD Provinsi 2023-2026	RPJMN 2019-2024	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026	RPD Provinsi 2023-2026	RPJMN 2019-2024
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	1. Meningkatkan sistem jaminan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 2. Pemberdayaan masyarakat miskin, Sinergitas dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan	1. Penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan tepat sasaran 2. Peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat	Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial	1. Penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) serta Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya. 2. Peningkatan program penanggulangan kemiskinan pada sektor sosial, kesehatan, pendidikan, perumahan, usaha dan industri serta perdagangan mikro kecil, pertanian, perikanan dan sektor lainnya,	1. Perlindungan terhadap keluarga dan kelompok 2. Pemberdayaan masyarakat miskin dan mencegah terjadinya kemiskinan baru 3. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan memperkuat rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta Perlindungan dan Jaminan Sosial 4. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh 5. Penyediaan akses peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha 6. Peningkatan akses terhadap rumah layak huni 7. Pemberdayaan masyarakat dan desa 8. Pemberdayaan Perempuan	1. Penguatan pelaksanaan jaminan sosial, 2. Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran 3. Perlindungan sosial adaptif 4. Peningkatan kesejahteraan sosial 5. Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu



No	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPD Provinsi 2023-2026	RPJMN 2019-2024	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026	RPD Provinsi 2023-2026	RPJMN 2019-2024
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	1. Peningkatan kualitas pelayanan dan aksesibilitas pendidikan berbasis teknologi informasi	Transformasi Sistem Pendidikan	Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	1. Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memenuhi standar 2. Peningkatan jumlah dan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, 3. Peningkatan kurikulum/metode pembelajaran dan pengelolaan pendidikan yang berkarakter, efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi 4. Peningkatan pengelolaan keperpustakaan dan minat baca masyarakat	1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta distribusi yang menjangkau seluruh wilayah 3. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar 4. Peningkatan minat baca dan literasi masyarakat	1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran 2. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun 3. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata 4. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah 5. Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan	Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung	1. Meningkatkan mutu pelayanan sesuai standar pada fasilitas pelayanan kesehatan; 2. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan; dan 3. Peningkatan sinergitas lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat dalam	1. Penguatan fasilitas kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan 2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja 3. Peningkatan Pelayanan Penyakit Menular (AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria) yang komprehensif 4. Percepatan Penurunan	1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi 2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat 3. Peningkatan pengendalian penyakit 4. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 5. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan



No	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPD Provinsi 2023-2026	RPJMN 2019-2024	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026	RPD Provinsi 2023-2026	RPJMN 2019-2024
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
				inovasi dan pemanfaatan teknologi	bidang kesehatan;	Stunting 5. Pemenuhan tenaga kesehatan/SDMK 6. Peningkatan pelayanan penyakit tidak menular yang komprehensif 7. Penguatan Pembiayaan Kesehatan 8. Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	makanan
4	Meningkatnya pengendalian penduduk, pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender serta memperkuat ketahanan dan pemberdayaan keluarga	1. Sinergi kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk 2. Pengarusutamaan gender dan peningkatan partisipasi aktif pemuda	1. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi 2. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	1. Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga. 2. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	1. Pengendalian pertumbuhan dan distribusi Penduduk 2. Peningkatan perlindungan perempuan 3. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 4. Pemenuhan hak dan perlindungan anak 5. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup	1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi 2. Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah untuk memastikan anak menikmati haknya 3. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 4. Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO



No	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPD Provinsi 2023-2026	RPJMN 2019-2024	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026	RPD Provinsi 2023-2026	RPJMN 2019-2024
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
5	Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah	1. Meningkatkan pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah	1. Pengarusutamaan gender dan peningkatan partisipasi aktif pemuda	1. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda 2. Pengembangan budaya dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional 3. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	1. Peningkatan pembinaan, pemberdayaan, penggalan potensi pemuda dan olahraga. 2. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemuda, olahraga, seni dan budaya	1. Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, dan daya saing pemuda Menumbuhkan budaya bergerak dan berolahraga di masyarakat 2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga	1. Peningkatan kualitas pemuda 2. Penguatan dan penataan regulasi keolahraagaan; 3. Pengembangan budaya olahraga melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat, baik mencakup olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus maupun olahraga pendidikan; 4. Penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan berbasis cabang olahraga Olimpiade dan potensi daerah, khususnya melalui sinergi pembinaan olahraga di satuan pendidikan dengan olahraga prestasi didukung dengan pemusatan pelatihan, penerapan sport science, statistik keolahraagaan serta sistem remunerasi dan penghargaan; 5. Penataan kelembagaan olahraga untuk meningkatkan prestasi keolahraagaan; 6. Peningkatan ketersediaan tenaga keolahraagaan berstandar internasional; 7. Peningkatan prasarana dan sarana olahraga berstandar internasional yang ramah difabel; dan 8. Pengembangan peran dunia



No	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPD Provinsi 2023-2026	RPJMN 2019-2024	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026	RPD Provinsi 2023-2026	RPJMN 2019-2024
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
							usaha dalam pendampingan, pembiayaan, dan industri olahraga. 9. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong-royong, dan kerja sama antarwarga 10. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat 11. Pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif 12. Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia 13. Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan
6	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	1. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penegakan perda dengan melibatkan sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum,	1. Peningkatan kesatuan bangsa dengan budaya politik yang kondusif 2. Penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim	1. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 2. Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan	1. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan penegakan perda secara humanis dan komprehensif, 2. Peningkatan sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban	1. Peningkatan kapasitas sektor-sektor atau kelompok untuk mandiri dan otonom 2. Penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan	1. Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba; 2. Penanganan kasus TPPO, serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya; 3. Peningkatan layanan



No	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPD Provinsi 2023-2026	RPJMN 2019-2024	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026	RPD Provinsi 2023-2026	RPJMN 2019-2024
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
		perlindungan masyarakat dan pelayanan kebencanaan		harmoni sosial,	umum, perlindungan masyarakat dan pelayanan kebencanaan		kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya; dan 4. Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan anggota Polri; 5. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama 6. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama 7. Penyelarasan relasi agama dan budaya 8. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama 9. Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan
7	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas koperasi, usaha dan industri mikro kecil. 2. Revitalisasi pasar rakyat dan fasilitasi perdagangan dan jasa. 3. Meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian dan	1. Peningkatan daya saing produk industri dan perdagangan 2. Peningkatan produksi dan diferensiasi produk di sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan 3. Pengembangan ketahanan pangan berkelanjutan 4. Peningkatan daya saing dan kontribusi	1. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi 2. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan 3. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan	1. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi bagi koperasi, usaha mikro dan industri kecil menengah 2. Peningkatan revitalisasi pasar rakyat dan fasilitasi perdagangan dan jasa. 3. Peningkatan kualitas dan produktivitas pertanian dan perikanan yang ditunjang oleh pengelolaan sumber daya air yang memadai untuk	1. Penerapan link and match industri kecil-industri besar 2. Pengembangan IKM dan industri hijau 3. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur industri serta pengembangan sentra industri terpadu 4. Optimalisasi perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta perdagangan digital	1. meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar; 2. meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; 3. meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; 4. meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up; serta 5. meningkatkan nilai tambah



No	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPD Provinsi 2023-2026	RPJMN 2019-2024	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026	RPD Provinsi 2023-2026	RPJMN 2019-2024
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
		perikanan yang ditunjang oleh pengelolaan sumber daya air yang memadai untuk mendukung ketahanan pangan daerah. 4. Meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta guna mendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta mendorong geliat sektor pariwisata perkotaan dan ekonomi kreatif 5. Meningkatkan pengendalian pasokan, distribusi, harga komoditas barang untuk menjaga stabilitas inflasi daerah	pariwisata	kelautan	mendukung ketahanan pangan daerah. 4. Peningkatan kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta guna mendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. 5. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi bagi pelaku usaha sektor pariwisata perkotaan dan ekonomi kreatif	5. Peningkatan diversifikasi produk ekspor dan pasar tujuan ekspor 6. Penguatan jaringan distribusi serta pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok 7. Peningkatan Perlindungan Konsumen 8. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian serta kelautan dan perikanan 9. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian 10. Peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan petani 11. Pemenuhan kebutuhan bahan baku industri kelautan dan perikanan, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan 12. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan	6. meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan; 7. meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok; 8. meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan serta kepastian pasar; 9. menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, sistem pertanian presisi, pengelolaan lahan dan air irigasi; serta 10. meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional. 11. mengelola ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan; 12. meningkatkan produksi, produktivitas, standarisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan



No	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPD Provinsi 2023-2026	RPJMN 2019-2024	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026	RPD Provinsi 2023-2026	RPJMN 2019-2024
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
						sumbu daya kelautan dan perikanan 13. Pengembangan sentra pertanian dan perikanan yang terpadu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas 14. Peningkatan perhutanan sosial 15. Perbaikan tata kelola pangan, dengan memperhatikan akses, ketersediaan dan pemanfaatan pangan 16. Integrasi Kultur (Budaya) dalam Peningkatan Daya Saing Pangan Lokal 17. Pengembangan <i>Smart Fishing</i> dan <i>Sustainable Aquaculture</i> 18. Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang bernilai tambah dan berdaya saing 19. Peningkatan dan perluasan promosi dan pemasaran pariwisata dan produk ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis 20. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi	perikanan; 13. meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, teknologi dan pasar; peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan terpadu; perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil; serta



No	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPD Provinsi 2023-2026	RPJMN 2019-2024	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026	RPD Provinsi 2023-2026	RPJMN 2019-2024
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
						kreatif 21. Pengembangan budaya lokal yang mendukung pengembangan pariwisata	
8	Meningkatnya iklim penanaman modal dan kesempatan kerja	1. Meningkatkan pelayanan, pengembangan, promosi dan pengendalian penanaman modal 2. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja 3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan terhadap tenaga kerja	1. Peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal 2. Transformasi perluasan kesempatan kerja	Meningkatkan produktivitas dan daya saing	1. Peningkatan pelayanan penanaman modal yang mudah, cepat, dan transparan. 2. Peningkatan promosi, pengembangan iklim dan pengendalian penanaman modal. 3. Peningkatan pelatihan kompetensi bagi angkatan kerja. 4. Peningkatan pembinaan hubungan industrial dan memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga kerja	1. Peningkatan kemudahan berusaha dan berinvestasi kebutuhan pasar 2. Promosi dan peningkatan layanan investasi 3. Modernisasi Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik Kelas 4. Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global 5. Peningkatan keterampilan angkatan kerja 6. Pengembangan pelatihan dan pendidikan vokasional sesuai dengan kebutuhan kerja 7. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan 8. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha kecil	1. Peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi 2. Reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi penguatan pembelajaran inovatif dengan penyelaras program studi/bidang keahlian mendukung pengembangan sektor unggulan dan kebutuhan industri/swasta



No	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPD Provinsi 2023-2026	RPJMN 2019-2024	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026	RPD Provinsi 2023-2026	RPJMN 2019-2024
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
9	Meningkatnya layanan infratraktur kota yang berkualitas	1. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar perkotaan dan pelayanan sanitasi 2. Meningkatkan penataan perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang nyaman dan sehat	1. Percepatan Pembangunan infrastruktur berdasarkan arahan tata ruang 2. Pemerataan dan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur 3. Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas dan terjangkau 4. Percepatan pembangunan desa	1. Peningkatan kualitas jalan dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, termasuk pemeliharaan rutin jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan 2. Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan 3. meningkatkan infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan 4. Meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang menunjang keselamatan berlalulintas. 2. Peningkatan pelayanan akses sanitasi rumah tangga terutama ari minum dan air limbah yang layak. 3. Peningkatan penataan perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang nyaman dan sehat	1. Pembangunan pusat kegiatan baru untuk membuka akses, distribusi penduduk, dan/atau peningkatan ekonomi 2. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas di wilayah Utara dan Selatan Jawa Barat 3. Percepatan pembangunan infrastruktur di Kawasan Rebana dan Kawasan Jabar Selatan, serta Kawasan Cekungan Bandung 4. Peningkatan konektivitas antar wilayah terutama untuk mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan 5. Pengendalian dan Pemanfaatan ruang yang efektif 6. Pengembangan Sistem Transportasi yang berkeselamatan dan Transportasi Massal yang ramah lingkungan 7. Pemenuhan air baku untuk rumah tangga, pertanian, dan industri	1. perbaikan tata kelola penyelenggaraan jalan yang memprioritaskan kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala 2. Skema kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Availability Payment (AP) yang berbasis kinerja serta Program Hibah Jalan Daerah yang mendorong kinerja pemeliharaan jalan perlu diperluas 3. Pembangunan sistem angkutan umum massal termasuk di 6 Wilayah Metropolitan (Major Project); ii) Pembangunan fasilitas alih moda yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perekonomian, permukiman dan fasilitas umum pada simpul-simpul transportasi, iii) Pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan, iv) Pembangunan jalan lingkar perkotaan, serta v) Penyediaan PSO dan subsidi angkutan umum massal perkotaan 4. Penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar untuk perkotaanPengembangan sistem layanan panggilan darurat, Pengembangan sistem Public Protection and Disaster Relief (PPDR),



No	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPD Provinsi 2023-2026	RPJMN 2019-2024	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026	RPD Provinsi 2023-2026	RPJMN 2019-2024
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
						8. Pemerataan akses terhadap layanan listrik menjangkau seluruh wilayah 9. Pemantapan jalan provinsi 10. Peningkatan akses infrastruktur dasar permukiman 11. Peningkatan kuantitas dan kualitas perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan/atau terdampak bencana dan program pemerintah 12. Peningkatan Kualitas kawasan Permukiman 13. Penyelenggaraan Bangunan Gedung 14. Peningkatan Pelayanan dan Ketersediaan Perumahan 15. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa 16. Peningkatan kualitas pemerintahan desa dan potensi desa 17. Peningkatan infrastruktur desa	5. Penguatan implementasi standar keandalan dan tertib bangunan, kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan, serta pengembangan teknologi dan bahan bangunan murah; 6. Peningkatan kapasitas pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan; 7. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan; 8. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan; 9. Pengembangan badan layanan umum perumahan nasional dan daerah. 10. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sanitasi di Perkotaan 11. Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi 12. mengembangkan sistem perumahan publik



No	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPD Provinsi 2023-2026	RPJMN 2019-2024	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026	RPD Provinsi 2023-2026	RPJMN 2019-2024
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
10	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan optimalisasi pemanfaatan tata ruang kota yang berkelanjutan	1. Peningkatan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan 2. Penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Peningkatan pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan hidup. 2. Penataan RTRW yang komprehensif dan mendukung pembangunan daerah	1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta pemulihan kualitas lingkungan hidup 2. Peningkatan upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan 3. Rehabilitasi hutan dan lahan Kritis 4. Pengelolaan kelautan dan wilayah pesisir yang berkelanjutan 5. Penerapan sistem pertanian tanaman terpadu, dan intensifikasi pertanian 6. Penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan 7. Pengembangan potensi konservasi energi baru dan terbarukan 8. Penerapan waste to energy dan circular economy dalam pengelolaan persampahan, serta peningkatan pengendalian food waste dan food loss 9. Pencegahan dan penanganan penyakit akibat perubahan iklim secara terpadu dan	1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,



No	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPD Provinsi 2023-2026	RPJMN 2019-2024	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026	RPD Provinsi 2023-2026	RPJMN 2019-2024
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
						cepat 10. Peningkatan mitigasi dan adaptasi bencana termasuk bencana hidrometeorologi	
11	Meningkatnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik prima	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, profesional dan inovatif berbasis teknologi informasi serta Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan yang diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah	1. Pemantapan Reformasi Birokrasi 2. Peningkatan peran aktif pelaku pembangunan untuk melakukan inovasi daerah	1. Penguatan implementasi manajemen ASN 2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis 3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja 4. Transformasi pelayanan publik	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang ditunjang oleh penyediaan sarana prasarana yang memadai 2. Percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua pelayanan publik dan penunjang kerja perangkat daerah 3. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. 4. Peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah	1. Penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, menuju tata kelola pemerintahan yang dinamis (Good Governance and Clean Governance to Dynamic Governance) dalam mewujudkan World Class Government 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 3. Pengembangan Smart Governance yang unggul dalam rangka mewujudkan Jabar Smart Province 4. Penguatan dan Penataan Organisasi 5. Penerapan sistem merit secara konsisten 6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN melalui pengembangan corporate university 7. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan	1. penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional; 2. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi; 3. Perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran 4. pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu.



No	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPD Provinsi 2023-2026	RPJMN 2019-2024	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026	RPD Provinsi 2023-2026	RPJMN 2019-2024
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
						pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi 8. Penataan proses bisnis dan SOP pelayanan publik, serta peningkatan keterbukaan informasi 9. Optimalisasi inovasi daerah berbasis kolaborasi dalam pembangunan dan pengembangan potensi daerah	

Sumber : Bappelitbangda, data diolah, 2024.



6.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan isu strategis, pembangunan daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026, difokuskan pada prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Penanggulangan Kemiskinan, diantaranya:
 - a. Pengelolaan data base dan pelayanan keluarga miskin;
 - b. Penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin;
 - c. Perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin;
 - d. Pemberdayaan keluarga miskin;
 - e. Beasiswa bagi mahasiswa dari rumah tangga miskin.
2. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan lokal, diantaranya:
 - a. Pelayanan kesehatan dalam rangka penurunan prevalensi stunting;
 - b. Pembinaan keluarga dan ketahanan remaja;
 - c. Penyediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
 - d. Penyediaan sanitasi keluarga yang layak.
3. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
 - a. Peningkatan kompetensi pencari kerja;
 - b. Peningkatan pelayanan penanaman modal dan perijinan;
 - c. Peningkatan produksi tanaman pangan holtikultura dan perkebunan, ternak dan ikan;
 - d. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan Usaha Mikro;
 - e. Pembinaan dan Pengembangan sarana distribusi perdagangan;
 - f. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan sektor Industri.
4. Optimalisasi Infrastruktur dan penataan ruang yang berwawasan Lingkungan dengan prioritas:
 - a. Penyelesaian jalan lingkar utara;
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana air limbah;
 - c. Pengembangan sarana dan Prasarana air minum;
 - d. Peningkatan pengelolaan persampahan;
 - e. Penataan kawasan permukiman kumuh;
 - f. Pembangunan dan reabilitasi gedung pelayanan publik;
 - g. Penyelesaian revisi rencana tata ruang.
5. Percepatan Implementasi Reformasi birokrasi dan Pemilu serta Pemilukada, dengan prioritas:
 - a. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada;
 - b. Percepatan implementasi 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi;
 - c. Peningkatan implementasi Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);
 - d. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan.

Prioritas pembangunan daerah RPD 2023-2026 harus selaras dengan program prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024. Berikut tabel keselarasan antara program prioritas RPD dengan program prioritas RPJMN.



Tabel 6.4.
Keselarasan Prioritas pembangunan daerah RPD 2023-2026

Prioritas pembangunan daerah RPD 2023-2026	Prioritas Provinsi Jawa Barat dalam RPD 2024-2026	Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024
1. Penanggulangan Kemiskinan	P4 Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan; PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
2. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan lokal	P2 Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan serta pendidikan agama P3 Penguatan sistem kesehatan daerah	PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing; PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
3. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	P1 Pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan serta pengembangan pariwisata	PN 1, Memperkuat Ketahanan Ekonom untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
4. Optimalisasi Infrastruktur dan penataan ruang yang berwawasan Lingkungan	P5 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar PN 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
5. Percepatan Implementasi Reformasi birokrasi	P6 Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah	PN 7, Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sumber: Bappelitbangda, data diolah, 2024.



6.3. Program Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan harus diimplementasikan melalui Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui program perangkat daerah. Untuk lebih rinci program daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.5.
Program Pembangunan Daerah

No	Tujuan RPD/Sasaran RPD /Program Perangkat Daerah	Indikator Tujuan RPD/ Sasaran RPD/	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	T1. Meningkatnya kesejahteraan sosial S1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan	IT.1. Angka kemiskinan(%) IS.1. Angka kemiskinan(%) IS.2. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial (Poin)	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
			Program pengelolaan taman makam pahlawan	Dinas Sosial
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	Dinas KUMKM Perindag
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2	T2. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan lokal S2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	IT.2. Indeks Pembangunan Manusia (Poin) IS.3. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) IS.4. Harapan Lama Sekolah (Tahun) IS.5. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Poin)		
			Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Dinas Pendidikan
			Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



No	Tujuan RPD/Sasaran RPD /Program Peangkat Daerah	Indikator Tujuan RPD/ Sasaran RPD/	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	S3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	IS.6. Usia Harapan Hidup (Tahun) IS.7. Prevalensi Stunting (%) IS.8. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Poin)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
	S4. Meningkatnya pengendalian penduduk, pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	IS.9. Laju Pertumbuhan Penduduk (%) IS.10. Indeks Pemberdayaan Gender (Poin) IS.11. Indeks Pembangunan Gender (Poin) IS.12.Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	S5. Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah	IS.13. Persentase Capaian Prestasi Kepemudaan tingkat Provinsi (%) IS.14. Persentase Capaian Prestasi Olahraga tingkat Provinsi (%)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata



No	Tujuan RPD/Sasaran RPD /Program Peangkat Daerah	Indikator Tujuan RPD/ Sasaran RPD/	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung jawab
		IS.15. Persentase Pelesetarian Kebudayaan (%)	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pembinaan Sejarah	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
	S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	IS.16. Indeks ketentraman dan ketertiban umum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
		IS.17. Indeks Pencapaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum (%)	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		IS.18. Indeks Resiko Bencana (Poin)	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
3	T.3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang berkualitas	IT.3. PDRB adh Berlaku (Triliun Rupiah)		
	S7. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	IS.19. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan
		IS.20. PDRB Perkapita (Juta rupiah)	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan
		IS.21. Pengeluaran Per Kapita (Juta rupiah)	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan
		IS.22. Indeks Gini (Poin)	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan
		IS.23. Inflasi (%)	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan



No	Tujuan RPD/Sasaran RPD /Program Peangkat Daerah	Indikator Tujuan RPD/ Sasaran RPD/	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan
			Program Pengembangan UMKM	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan
			Program Pengembangan Ekspor	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			Program pengawasan Keamanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan



No	Tujuan RPD/Sasaran RPD /Program Peangkat Daerah	Indikator Tujuan RPD/ Sasaran RPD/	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
	S8. Meningkatnya iklim penanaman modal dan kesempatan kerja	IS.24. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) IS.25. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adh Berlaku (Milyar Rupiah)	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
			Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
			Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
4	T.4. Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni berwawasan Lingkungan	IT.4. Indeks kualitas infrastruktur dan Lingkungan Hidup		
	S9. Meningkatnya layanan infratraktur kota yang berkualitas	IS.26. Indeks kemantapan jalan (Poin)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		IS.27. Indeks kawasan permukiman layak huni (Poin)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		IS.28. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Poin)	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		IS.29. Indeks Pencapaian Minimal Bidang Perumahan dan Permukiman (Poin)	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



No	Tujuan RPD/Sasaran RPD /Program Peangkat Daerah	Indikator Tujuan RPD/ Sasaran RPD/	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Penatagunaan Tanah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
	S10. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;	IS.30. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Poin)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		IS.31. Persentase Pengelolaan sampah (%)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	S11. Meningkatnya birokrasi yang kapabel, bersih dan	IS.33. Indeks Inovasi Daerah (Poin/Kategori)	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbangda



No	Tujuan RPD/Sasaran RPD /Program Peangkat Daerah	Indikator Tujuan RPD/ Sasaran RPD/	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung jawab
	akuntabel serta pelayanan publik prima	IS.34. Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori/Poin)	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Bappelitbangda
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekeratriat Daerah
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekeratriat Daerah
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
			Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh SKPD



6.4. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kota Tasikmalaya. Untuk mencapai pelaksanaan SPM tersebut di Kota Tasikmalaya dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 6.6.
Penerapan Standar Pelayanan Minimal

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
1	SPM PENDIDIKAN			
	Pendidikan anak usia dini	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang PAUD	Dinas Pendidikan
			Nilai Mutu PAUD/PNF	
	Pendidikan dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang SD	
			Nilai Mutu Sekolah Dasar	
			Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang SMP	
			Nilai Mutu Sekolah Menengah Pertama	
	Pendidikan kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan	
			Nilai Mutu PAUD/PNF	
2	SPM KESEHATAN			
	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM pelayanan Kesehatan Masyarakat	Dinas kesehatan
			Persentase SPM Kesmas	
	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM pelayanan Kesehatan Masyarakat	
			Persentase SPM Kesmas	
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM pelayanan Kesehatan Masyarakat	
			Persentase SPM Kesmas	
	Pelayanan kesehatan balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM pelayanan Kesehatan Masyarakat	



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
			Persentase SPM Kesmas	
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM pelayanan Kesehatan Masyarakat	
			Persentase SPM Kesmas	
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM pelayanan Kesehatan Masyarakat	
			Persentase SPM Kesmas	
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM pelayanan Kesehatan Masyarakat	
			Persentase SPM Kesmas	
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM pelayanan penyakit menular dan tidak menular	
			Persentase SPM PM dan PTM	
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM pelayanan penyakit menular dan tidak menular	
			Persentase SPM PM dan PTM	
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM pelayanan penyakit menular dan tidak menular	
			Persentase SPM PM dan PTM	
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM pelayanan penyakit menular dan tidak menular	
			Persentase SPM PM dan PTM	
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus);	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM pelayanan penyakit menular dan tidak menular	
			Persentase SPM PM dan PTM	



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
3	SPM PEKERJAAN UMUM			
	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase KK berakses layanan air minum	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kota Tasikmalaya	
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	persentase KK yang berakses SPALD	
			Persentase kebutuhan infrastruktur Air limbah domestik yang terpenuhi	
4	SPM PERUMAHAN			
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana yang ditangani	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Persentase rumah korban bencana dan relokasi program Kab/Kota yang tertangani	
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Program Pengembangan Perumahan	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	
			Persentase rumah korban bencana dan relokasi program Kab/Kota yang tertangani	
5	SPM KEAMANAN, DAN KETERTIBAN UMUM			
	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan pelanggaran K3	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
			Persentase Gangguan Trantibum yang Diselesaikan	
	Pelayanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Prosentase Peran Serta Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	BPBD
			Persentase Pengurangan Risiko Bencana	
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	Prosentase Peran Serta Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	BPBD
			Persentase Pengurangan Risiko Bencana	
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Penanggulangan Bencana	Prosentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	BPBD
			Persentase Pengurangan Risiko Bencana	
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response rime rate) layanan wilayah manajemen kebakaran	BPBD
			Persentase Layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	
6	SPM SOSIAL			
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
			Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap PPKS	
	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	
			Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap PPKS	
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
			Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap PPKS	
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	
			Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap PPKS	
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Prosentase Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial	
			Persentase Bansos Kesejahteraan Keluarga Tepat Sasaran	
		Program penanganan bencana	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	

6.5. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (SDGs)

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs disusun program pembangunan untuk mendukung pencapaiannya. Berikut disajikan program dalam rangka pencapaian Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Suistainable Development Goals (SDGs) dapat dilihat sebagai berikut.



Tabel 6.7.
Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /
Sustainable Development Goals (SDGs)

TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	TANPA KEMISKINAN [MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN]				
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional	1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
1.3.	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		1.3.1.(C)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial
1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBP3A
		1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUTR
		1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUTR
				Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas LH
		1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perwaskim
		1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Program Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL
1.5.	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
		1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
1.5..a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.5.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
		1.5. a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
2	TANPA KELAPARAN				
2.1.	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas KP3
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas KP3



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1.a	Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita.	Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawananan Pangan.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas KP3
		2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas KP3
2.2.	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas KP3



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas KP3
3	KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA				
3.1.	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		3.1.1*	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
3.2.	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		3.2.2(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		3.2.2(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1.	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		3.3.2.	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		3.3.3	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		3.3.5.	Jumlah orang yg memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
3.4.	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		3.4.2.	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
3.5.	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna narkoba dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		3.5.1.(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
3.7.	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBP3A
		3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBP3A
		3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBP3A
		3.7.2.	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBP3A
				Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBP3A
		3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBP3A
		3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBP3A
		3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBP3A
		3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBP3A



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
3.8.	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		3.8.2.	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
3.9.	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
3.a.1*	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
3.b.1. (a)	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.				
3.c.1*	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
4	PENDIDIKAN BERKUALITAS				
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
4.4.	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.Global	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
4.5.	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
4.6.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
4.a.1*	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
4.c.1*	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
5	KESETARAAN GENDER				
5.1.	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas PPKBP3A
5.2.	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Program Perlindungan Perempuan	Dinas PPKBP3A
		5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas PPKBP3A
		5.2.2.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Program Perlindungan Perempuan	Dinas PPKBP3A



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Program Perlindungan Perempuan	Dinas PPKBP3A
5.3.	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBP3A
		5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBP3A
		5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBP3A
		5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
5.5.	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas PPKBP3A
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
		5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas PPKBP3A
5.6.	Target 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBP3A
		5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBP3A
		5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBP3A



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBP3A
5.b.	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfo
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak				
6.1.	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUTR
		6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUTR
		6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUTR
6.2.	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUTR
		6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUTR
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	DPUTR



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUTR
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUTR
		6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUTR
6.3.	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUTR
		6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUTR
6.4.	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LH
		6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUTR



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
6.5.	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUTR
		6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUTR
		6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUTR
		6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUTR
		6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUTR
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi				
8.1.	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	Dinas KUMKM Perindag
				Program Pengembangan UMKM	Dinas KUMKM Perindag
				Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas KUMKM Perindag
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas KUMKM Perindag
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas KUMKM Perindag



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
				Program Pengembangan Ekspor	Dinas KUMKM Perindag
				Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas KUMKM Perindag
				Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas KUMKM Perindag
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas KUMKM Perindag
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Dinas KUMKM Perindag
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas KUMKM Perindag
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
8.3.	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Program Pengembangan UMKM	Dinas KUMKM Perindag
8.5.	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
		8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
8.6	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
8.9.	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
8.10.	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1. (b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Program Pengembangan UMKM	Dinas KUMKM Perindag
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur				
9.1.	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUTR
9.4.	Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Program Penelitian dan Pengembangan	Bappelitbangda



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
9.c.	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfo
		9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfo
		9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfo
10	Berkurangnya Kesenjangan				
10.1.	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Koefisien Gini.	Program Pengembangan UMKM	Dinas KUMKM Perindag
				Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas KUMKM Perindag
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas KUMKM Perindag
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas KUMKM Perindag
				Program Pengembangan Ekspor	Dinas KUMKM Perindag
				Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas KUMKM Perindag
				Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas KUMKM Perindag
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas KUMKM Perindag
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas KUMKM Perindag



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas KUMKM Perindag
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas KP3
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas KP3
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas KP3
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Porabudpar
				Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Porabudpar
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Porabudpar
	10.1.1. (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas KP3
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas KP3
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Keci dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas KUMKM Perindag
	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
			jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas KP3
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas KP3
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Keci dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas KUMKM Perindag
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesbangpol
10.3.	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1. (a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA
		10.3.1. (b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA
		10.3.1. (c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA
10.4.	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1. (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan				
11.1.	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap	11.1.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perwaskim



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.	11.1.1. (b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perwaskim
		11.1.1. (c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perwaskim
11.2.	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	11.2.1. (a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dinas Perhubungan
11.3.	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPELITBANGDA
11.5.	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugianekonomi relatif terhadap PDB yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		11.5.1. (a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		11.5.1. (b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1. (c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
11.6.	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1. (a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas LH
11.7.	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1. (a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas LH
11.b.	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
12	Kosumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab				
12.4.	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2. (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Program Pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dinas LH
12.5.	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1. (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas LH
12.8.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1. (a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas LH
13	Penanganan Perubahan Iklim				
13.1.	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
15	Ekosistem Daratan				
15.1.	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1. (a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas LH
15.2.	Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.	15.2.1. (a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas LH
16	PERDAMAIAN Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh				
16.1.	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1. (a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	SatPOLPP
		16.1.2. (a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	SatPOLPP
		16.1.3. (a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	SatPOLPP
		16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	SatPOLPP



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
16.2.	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas PPKBP3A
		16.2.1. (b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas PPKBP3A
16.3.	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	16.3.1. (b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA
16.5.	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1. (a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
16.6.	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
		16.6.1. (a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
		16.6.1. (b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA
		16.6.1. (c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Program Perekonomian dan Pembangunan	SETDA
		16.6.1. (d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		16.6.2. (a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA
16.7.	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1. (a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
		16.7.1. (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
		16.7.2. (a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lemabaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Badan Kesbangpol
		16.7.2. (b)	Indeks Kebebasan Sipil.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesbangpol
		16.7.2. (c)	Indeks Hak-hak Politik.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lemabaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Badan Kesbangpol
16.9.	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Program Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL
		16.9.1. (a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Program Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL
		16.9.1. (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Program Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
16.10 .	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2 (a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfo
		16.10.2. (b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfo
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan				
17.1.	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan
		17.1.1. (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan
17.6.	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2. (b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfo
			Proporsi penduduk terlayani mobile broadband.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfo



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
17.8.	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfo
17.18 .	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	BAPPELITBANGDA
17.19 .	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara	17.19.2.(a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Diskominfo



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	berkembang.				
17.19 .	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2. (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	Program Pencatatan Sipil	Disdukcapil
		17.19.2. (c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Diskominfo
		17.19.2. (d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Diskominfo

Sumber: Bappelitbangda, data diolah, 2024.



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Sumber-sumber pendanaan yang digunakan untuk mendanai pembangunan daerah terdiri dari APBD Kota, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN serta dana-dana dari pihak-pihak lain seperti swasta, CSR, masyarakat, dan bantuan lain yang tidak mengikat.

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagaimana diuraikan pada bab III, maka kerangka pendanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan didistribusikan pada program-program pembangunan daerah dan program perangkat daerah sebagaimana tabel berikut:



Tabel 7.1
Kapabilitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Tahun 2023 - 2026

NO.	URAIAN	2023	2024	2025	2026
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	Pendapatan	1.676.762.383.893	1.819.725.131.648	1.833.726.890.062	1.845.521.198.490
2	Pencairan Dana Cadangan	10.000.000.000	0	0	0
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	22.502.803.290	20.408.886.918	22.066.080.168	21.319.997.416
	Total Penerimaan	1.709.265.187.183	1.840.134.018.566	1.855.792.970.230	1.866.841.195.907
4	Belanja Pegawai	800.520.259.870	801.217.735.620	829.898.277.243	829.898.277.243
5	Pengeluaran Pembiayaan	11.500.000.000	11.500.000.000	11.500.000.000	11.500.000.000
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	897.244.927.313	1.027.416.282.946	1.014.394.692.987	1.025.442.918.664



7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Indikasi rencana program pembangunan dalam RPD terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung terhadap janji dan program prioritas kepala daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta program prioritas pembangunan lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), prioritas pusat dan provinsi, yang selanjutnya dijabarkan dan diimplementasikan dalam program prioritas yang bersifat operasional pada perangkat daerah yang disesuaikan dengan program-program yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta program-program tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Selain itu akan disajikan pula pencapaian indikator dan target kinerja serta alokasi pendanaan pagu indikatif program. Pagu indikatif merupakan jumlah anggaran sementara yang dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan. Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun renstra perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Program operasional pada perangkat daerah yang disertai kebutuhan pendanaannya terbagi ke dalam 6 urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 7 perangkat daerah, 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 12 perangkat daerah dan 5 urusan pilihan yang dilaksanakan oleh 3 perangkat daerah, serta unsur pendukung urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 2 perangkat daerah, dan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 4 perangkat daerah, unsur pengawasan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh 1 perangkat daerah, unsur kewilayahan dilaksanakan oleh 10 perangkat daerah dan unsur pemerintahan umum dilaksanakan oleh 1 perangkat daerah.

Jumlah program operasional yang akan dilaksanakan pada perangkat daerah sebanyak 163 program, yang terdiri dari 1 program untuk operasional kesekretariatan yang berada pada seluruh perangkat daerah dan 162 program yang terbagi pada perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaannya terinci pada tabel berikut ini:

Tabel 7.2.

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 - 2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	KOTA TASIKMALAYA				1.781.715.480.681		1.840.471.923.190		1.854.292.970.226		1.865.341.210.082		7.341.821.584.179	
DINAS PENDIDIKAN					516.198.371.222		536.124.093.106		540.084.523.745		543.236.856.733		2.135.643.844.806	
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				516.198.371.222		536.124.093.106		540.084.523.745		543.236.856.733		2.135.643.844.806	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Non Formal /Kesetaraan Terakreditasi B	51,84 %	51,85 %	4.713.702.665	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	4.713.702.665	Dinas Pendidikan
		Persentase PAUD Terakreditasi B	35,75 %	35,76 %	11.624.750.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	11.624.750.000	Dinas Pendidikan
		Persentase Sarana Prasarana dalam kondisi baik	67,37 %	67,38 %	33.591.740.706	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	33.591.740.706	Dinas Pendidikan
		Persentase SD Terakreditasi A	60,25 %	60,26 %	57.183.284.019	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	57.183.284.019	Dinas Pendidikan
		Persentase SMP Terakreditasi A	58,18 %	58,19 %	34.146.984.920	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	34.146.984.920	Dinas Pendidikan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Capaian Pengembangan Kurikulum	100 %	100 %	30.000.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	30.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Capaian Kualitas Pendidik PAUD dan Pendidikan Dasar	51,44 %	51,45 %	268.889.493	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	268.889.493	Dinas Pendidikan
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Siswa Prestasi yang dicapai ke Tingkat Provinsi jenjang Pendidikan Dasar	25,02 %	25,03 %	75.000.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	75.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah (APS) SD	0 %	0 %	0,00	0,10 %	100.000.000	0,10 %	110.000.000	0,10 %	110.000.000	0,10 %	320.000.000	Dinas Pendidikan
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP	0 %	0 %	0,00	0,50 %	50.000.000	0,50 %	55.000.000	0,49 %	55.000.000	0,49 %	160.000.000	Dinas Pendidikan
		Nilai Mutu PAUDPNF	0 %	0 %	0,00	63,45 %	15.412.235.665	63,46 %	19.583.126.432	63,47 %	19.583.126.432	63,47 %	54.578.488.529	Dinas Pendidikan
		Nilai Mutu Sekolah Dasar	0 %	0 %	0,00	59,73 %	105.533.333.900	59,74 %	71.564.008.229	59,75 %	73.920.758.156	59,75 %	251.018.100.285	Dinas Pendidikan
		Nilai Mutu Sekolah Menengah Pertama	0 %	0 %	0,00	55,56 %	49.348.893.074	55,57 %	42.828.824.575	55,58 %	43.234.452.542	55,58 %	135.412.170.191	Dinas Pendidikan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Digunakan	0 %	0 %	0,00	100 %	30.000.000	100 %	247.500.000	100 %	247.500.000	100 %	525.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	0 %	0 %	0,00	47,40 %	6.093.468.731	47,41 %	7.755.000.000	47,42 %	7.755.000.000	47,42 %	21.603.468.731	Dinas Pendidikan
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase PKBM yang terakreditasi B	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	61,90 %	74.250.000	61,91 %	74.250.000	61,91 %	148.500.000	Dinas Pendidikan

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase SD yang terakreditasi A	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	55,56 %	45.000.000	55,57 %	49.500.000	55,57 %	94.500.000	Dinas Pendidikan
		Persentase SMP yang terakreditasi A	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	59,73 %	45.000.000	59,74 %	49.500.000	59,74 %	94.500.000	Dinas Pendidikan
		Persentase TK yang terakreditasi B	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	63,45 %	74.250.000	63,46 %	74.250.000	63,46 %	148.500.000	Dinas Pendidikan
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Prestasi Siswa Pendidikan Dasar	0 %	0 %	0,00	25,02 %	87.500.000	25,03 %	110.000.000	25,04 %	110.000.000	25,04 %	307.500.000	Dinas Pendidikan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian IKM Dinas Pendidikan	77,87 kategori	77,88 kategori	7.321.862.674	0 kategori	0,00	0 kategori	0,00	0 kategori	0,00	0 kategori	7.321.862.674	Dinas Pendidikan
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70 Kategori	71 Kategori	367.242.156.745	0 Kategori	0,00	0 Kategori	0,00	0 Kategori	0,00	0 Kategori	367.242.156.745	Dinas Pendidikan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	0 Kategori (Poin)	0 Kategori (Poin)	0,00	80 (Baik) Kategori (Poin)	2.760.206.808	81 (Baik) Kategori (Poin)	5.124.295.000	82 (Baik) Kategori (Poin)	5.124.295.000	82 (Baik) Kategori (Poin)	13.008.796.808	Dinas Pendidikan
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	0 Kategori (Poin)	0 Kategori (Poin)	0,00	70 (B) Kategori (Poin)	356.708.454.928	71 (BB) Kategori (Poin)	392.468.269.509	72 (BB) Kategori (Poin)	392.849.224.603	72 (BB) Kategori (Poin)	1.142.025.949.040	Dinas Pendidikan
DINAS KESEHATAN					400.180.797.824		443.641.888.502		446.919.138.957		449.527.689.809		1.740.269.515.092	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				400.180.797.824		443.641.888.502		446.919.138.957		449.527.689.809		1.740.269.515.092	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Farmalkes yang tersedia	0 Persen	0 Persen	0,00	100 Persen	11.403.308.509	100 Persen	19.500.485.410	100 Persen	19.500.485.410	100 Persen	50.404.279.329	Dinas Kesehatan
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (UHC)	80.31 Persen	82 Persen	37.569.001.955	100 Persen	37.143.470.534	100 Persen	37.143.470.534	100 Persen	37.143.470.534	100 Persen	148.999.413.557	Dinas Kesehatan
		Cakupan Kinerja Layanan P2P	100 Persen	100 Persen	2.859.777.342	0 Persen	5.351.361.579	0 Persen	3.099.258.342	0 Persen	3.099.258.342	0 Persen	14.409.655.605	Dinas Kesehatan
		Cakupan Kinerja Pelayanan Kesehatan	66 Persen	71 Persen	2.122.596.118	0 Persen	2.237.554.000	0 Persen	1.237.554.000	0 Persen	1.237.554.000	0 Persen	6.835.258.118	Dinas Kesehatan
		Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat	17.70 Persen	25.10 Persen	466.737.000	0 Persen	1.546.382.000	0 Persen	746.382.000	0 Persen	746.382.000	0 Persen	3.505.883.000	Dinas Kesehatan
		Cakupan penelitian kesehatan	0 Persen	0 Persen	0,00	0 Persen	0,00	0 Persen	0,00	0 Persen	0,00	0 Persen	-	Dinas Kesehatan
		Cakupan Rumah Sakit Kelas C, D dan Faskes Tk.Kota dengan ijin operasional yang masih berlaku	100 Persen	100 Persen	601.089.000	0 Persen	606.306.100	0 Persen	556.306.100	0 Persen	556.306.100	0 Persen	2.320.007.300	Dinas Kesehatan
		Capaian Kota Sehat	100 Persen	100 Persen	196.584.000	0 Persen	0,00	0 Persen	0,00	0 Persen	0,00	0 Persen	196.584.000	Dinas Kesehatan

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Capaian Penyelenggaraan Operasional Puskesmas laboratorium dan gudang farmasi	100 Persen	100 Persen	14.113.823.100	0 Persen	41.293.938.448	0 Persen	21.910.662.517	0 Persen	21.940.662.517	0 Persen	99.259.086.582	Dinas Kesehatan
		Indeks Keluarga Sehat	0.12 Poin	0.12 Poin	0,00	0.12 Poin	168.908.100	0.13 Poin	168.908.100	0.14 Poin	168.908.100	0.14 Poin	506.724.300	Dinas Kesehatan
		Indeks Pencapaian SPM kesehatan	65.58 Persen	Tuntas Pratama Persen	2.163.300.000	0 Persen	0,00	0 Persen	0,00	0 Persen	0,00	0 Persen	2.163.300.000	Dinas Kesehatan
		Integrasi Pelayanan Primer	0 Persen	0 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	-	Dinas Kesehatan
		Persentase Kecamatan yang menyelenggaraan KKS	0 Persen	0 Persen	0,00	100 Persen	197.844.000	100 Persen	197.844.000	100 Persen	197.844.000	100 Persen	593.532.000	Dinas Kesehatan
		Persentase Balita Stunting	14.8 Persen	17.1 Persen	1.398.519.000	0 Persen	0,00	0 Persen	0,00	0 Persen	0,00	0 Persen	1.398.519.000	Dinas Kesehatan
		Persentase Balita Stunting yang tertangani	100 Persen	0 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	-	Dinas Kesehatan
		Persentase Faskes dengan SIK terinterasi	0 Persen	100 Persen	170.270.195	100 Persen	202.697.200	100 Persen	261.164.200	100 Persen	261.164.200	100 Persen	895.295.795	Dinas Kesehatan
		Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan lingkungan	0 Persen	0 Persen	0,00	91.25 Persen	1.587.159.000	0 Persen	587.159.000	0 Persen	587.159.000	0 Persen	2.761.477.000	Dinas Kesehatan
		Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	0 Persen	0 Persen	0,00	68.3 Persen	61.818.000	0 Persen	61.818.000	0 Persen	61.818.000	0 Persen	185.454.000	Dinas Kesehatan
		Persentase SPM Kesmas	65,58 %	0 %	0,00	100 %	1.161.295.600	100 %	1.161.295.600	100 %	1.161.295.600	100 %	3.483.886.800	Dinas Kesehatan
		Persentase SPM PM dan PTM	100 Persen	0 Persen	0,00	0 Persen	3.116.535.264	100 Persen	3.116.535.264	100 Persen	3.116.535.264	100 Persen	9.349.605.792	Dinas Kesehatan
		Rasio Faskes terhadap penduduk	Per 10000 Perbandingan jumlah faskes thd 10.000 penduduk	1.1 Perbandingan jumlah faskes thd 10.000 penduduk	25.470.410.640	1.1 Perbandingan jumlah faskes thd 10.000 penduduk	16.528.026.626	1.1 Perbandingan jumlah faskes thd 10.000 penduduk	39.727.836.566	1.1 Perbandingan jumlah faskes thd 10.000 penduduk	37.453.476.218	1.1 Perbandingan jumlah faskes thd 10.000 penduduk	119.179.750.050	Dinas Kesehatan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang tersertifikasi	88,1 %	91 %	207.293.000	94 %	1.957.925.526	97 %	892.106.296	100 %	892.106.296	100 %	3.949.431.118	Dinas Kesehatan

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase TPM, Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang memenuhi persyaratan HS	66.6 Persen	76.7 Persen	320.388.000	79.8 Persen	731.644.000	83.16 Persen	466.422.000	87 Persen	466.422.000	87 Persen	1.984.876.000	Dinas Kesehatan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pesentase Keluarga ber-PHBS	0 %	55 %	1.594.382.200	60 %	2.785.280.342	65 %	2.974.151.000	75 %	2.974.151.000	75 %	10.327.964.542	Dinas Kesehatan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	Baik Kategori/Poin	Baik Kategori/Poin	173.716.534.137	Baik (82) Kategori/Poin	169.822.136.756	Baik (83) Kategori/Poin	175.896.163.516	Baik (84) Kategori/Poin	180.749.074.716	Baik (84) Kategori/Poin	700.183.909.125	Dinas Kesehatan
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Kategori/Poin	BB Kategori/Poin	137.210.092.137	BB (78,91) Kategori/Poin	145.738.296.918	BB (79,41) Kategori/Poin	137.213.616.512	BB (80) Kategori/Poin	137.213.616.512	BB (80) Kategori/Poin	557.375.622.079	Dinas Kesehatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG					129.897.875.083		151.241.754.614		158.359.000.577		159.283.300.903		598.781.931.178	
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				129.874.797.983		151.234.079.614		158.344.281.497		159.267.109.915		598.720.269.010	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Presentase Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik	35,53 %	25,00 %	10.384.487.853	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	10.384.487.853	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase peningkatan jaringan drainase jalan kota	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0,36 %	3.450.000.000	0,40 %	3.895.000.000	0,76 %	7.345.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase peningkatan jaringan jalan	0 %	0 %	0,00	2,25 %	14.702.319.656	3,81 %	9.155.226.121	5,04 %	8.420.748.733	11,09 %	32.278.294.510	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang jaringan irigasi kondisi baik	0 %	0 %	0,00	38,19 %	29.737.728.000	38,71 %	33.231.120.735	39,35 %	28.524.041.140	39,35 %	91.492.889.875	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase panjang jaringan sungai yang berfungsi optimal	0 %	0 %	0,00	23,76 %	4.171.283.000	27,94 %	4.788.411.300	32,41 %	5.267.252.430	32,41 %	14.226.946.730	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase jalan dalam kondisi baik	17,01 %	18,10 %	567.140.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	567.140.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhabilitasi dan direkonstruksi	68,25 %	66,77 %	18.141.018.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	18.141.018.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung kewenangan pemda yang ditangani	15,79 %	32,46 %	10.028.377.600	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	10.028.377.600	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase jumlah penyedia jasa yang mendapatkan pembinaan	100 %	42,37 %	10.000.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	10.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase pemilik ijin yang menerapkan ketentuan bangunan	0 %	0 %	0,00	99,373 %	9.636.047.000	99,378 %	10.599.651.700	99,384 %	11.931.677.100	99,384 %	32.167.375.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase jasa konstruksi yang bersertifikat jasa konstruksi	0 %	0 %	0,00	33,66 %	60.000.000	35,30 %	66.000.000	36,93 %	72.600.000	36,93 %	198.600.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase infrastruktur drainase lingkungan permukiman di luar kawasan Permukiman kumuh dalam kondisi baik	31,59 %	65,01 %	9.280.138.806	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	9.280.138.806	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase infrastruktur jalan lingkungan permukiman di luar kawasan Permukiman kumuh dalam kondisi baik	24,99 %	51,97 %	42.720.515.194	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	42.720.515.194	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase infrastruktur drainase lingkungan permukiman di luar kawasan Permukiman kumuh dalam kondisi baik	0 %	0 %	0,00	65,01 %	10.972.517.514	66,41 %	12.069.769.265	67,99 %	13.276.746.191	67,99 %	36.319.032.970	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase infrastruktur jalan lingkungan permukiman di luar kawasan Permukiman kumuh dalam kondisi baik	0 %	0 %	0,00	51,97 %	43.660.813.900	60,88 %	48.026.895.290	64,21 %	48.716.144.290	64,21 %	140.403.853.480	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kota Tasikmalaya	0 %	0 %	0,00	57,26 %	14.998.072.900	58,01 %	16.260.555.190	58,79 %	17.886.610.709	58,79 %	49.145.238.799	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	IKM pelayanan pengelolaan Air limbah domestik	0 Kategori	0 Kategori	0,00	83 Kategori	430.000.000	84 Kategori	473.000.000	85 Kategori	520.300.000	85 Kategori	1.423.300.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase kebutuhan infrastruktur Air limbah domestik yang terpenuhi	0 %	0 %	0,00	62,05 %	9.430.906.600	62,48 %	5.492.146.527	62,92 %	4.823.505.913	62,92 %	19.746.559.040	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase KK/RT yang Berakses Layanan Air Minum	56,07 %	56.67 %	8.637.610.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	8.637.610.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase KK/RT Yang berakses SPLD	61,59 %	61,63 %	17.079.994.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	17.079.994.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kepatuhan Pemanfaatan Ruang terhadap KKPR yang telah diterbitkan	0 %	0 %	0,00	98 %	826.925.000	99 %	1.285.139.820	99,5 %	1.413.653.802	99,5 %	3.525.718.622	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	90 %	71 %	586.922.900	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	586.922.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	0 Kategori (Poin)	0 Kategori (Poin)	0,00	B (85,00) Kategori (Poin)	1.997.692.100	B (85,85) Kategori (Poin)	2.237.243.930	B (86,20) Kategori (Poin)	2.460.968.323	B (86,20) Kategori (Poin)	6.695.904.353	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0 Kategori (Poin)	0 Kategori (Poin)	0,00	A (81,67) Kategori (Poin)	10.609.773.944	A (82,86) Kategori (Poin)	11.209.121.619	A (83,02) Kategori (Poin)	12.057.861.284	A (83,02) Kategori (Poin)	33.876.756.848	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100 %	100 %	12.438.593.630	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	12.438.593.630	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				23.077.100		7.675.000		14.719.080		16.190.988		61.662.168	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Kesesuaian Luas Tanah yang dimanfaatkan untuk fasilitas umum fasilitas sosial dengan rencana tata ruang	0 %	0 %	0,00	100 %	7.675.000	100 %	14.719.080	100 %	16.190.988	100 %	38.585.068	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Pengelolaan dan Penatagunaan Tanah	100 %	100 %	23.077.100	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	23.077.100	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					15.647.280.185		16.341.204.038		16.461.919.010		16.558.002.953		65.008.406.186	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				15.647.280.185		16.341.204.038		16.461.919.010		16.558.002.953		65.008.406.186	

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase perumahan yang sesuai dengan standar bangunan dan perumahan	0 %	0 %	0,00	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	150.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase rumah korban bencana dan relokasi program Kab/Kota yang tertangani	0 %	0 %	0,00	100 %	674.705.060	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	1.674.705.060	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase Rumah Korban Bencana yang Ditangani	100 %	100 %	200.000.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	200.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase Rumah Korban Relokasi Program Kab/Kota	100 %	100 %	300.000.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	300.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Pengelolaan PSU Perumahan	25 %	25 %	5.039.000.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	5.039.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase PSU Perumahan yang dimanfaatkan	0 %	0 %	0,00	50 %	2.952.877.978	79,53 %	3.400.000.000	100 %	3.400.000.000	100 %	9.752.877.978	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	20 %	20 %	2.228.519.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	2.228.519.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertata	0 %	0 %	0,00	15,11 %	6.818.969.100	18,73 %	5.200.000.000	22,36 %	5.300.000.000	22,36 %	17.318.969.100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	8,56 %	8,56 %	3.019.800.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	3.019.800.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase penurunan RTLH di luar kawasan kumuh	0 %	0 %	0,00	7,76 %	772.900.000	9,20 %	2.000.000.000	10,63 %	2.000.000.000	10,63 %	4.772.900.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	0 Kategori (Poin)	0 Kategori (Poin)	0,00	B (81,20) Kategori (Poin)	1.071.549.440	A (81,40) Kategori (Poin)	1.170.912.032	A (81,60) Kategori (Poin)	1.170.912.032	A (81,60) Kategori (Poin)	3.413.373.504	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0 Kategori (Poin)	0 Kategori (Poin)	0,00	A (80,00) Kategori (Poin)	4.000.202.460	A (81,50) Kategori (Poin)	4.141.006.978	A (82,00) Kategori (Poin)	4.137.090.921	A (82,00) Kategori (Poin)	12.278.300.359	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	4.859.961.185	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	4.859.961.185	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					15.029.078.780		16.374.665.080		16.495.627.234		16.591.907.923		64.491.279.017	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				15.029.078.780		16.374.665.080		16.495.627.234		16.591.907.923		64.491.279.017	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang Diselesaikan	100 %	0 %	0,00	100 %	5.154.624.600	100 %	4.422.206.500	100 %	4.572.828.500	100 %	14.149.659.600	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Diselesaikan	5 %	0 %	0,00	60 %	870.005.998	65 %	678.579.760	70 %	682.801.908	70 %	2.231.387.666	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	0 %	100 %	4.106.151.300	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	4.106.151.300	Satuan Polisi Pamong Praja
		Presentase pelanggaran penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang diselesaikan	0 %	80 %	870.697.236	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	870.697.236	Satuan Polisi Pamong Praja
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan, Keindahan)	0 %	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	-	Satuan Polisi Pamong Praja
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	87,94 poin	89 poin	921.225.800	90 poin	1.407.981.376	90,1 poin	2.127.840.974	90,2 poin	2.069.289.209	90,2 poin	6.526.337.359	Satuan Polisi Pamong Praja
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69,81 (B) Kategori	70 (BB) Kategori	9.131.004.444	71 (BB) Kategori	8.942.053.106	79 (BB) Kategori	9.267.000.000	79,5 (BB) Kategori	9.266.988.306	79,5 (BB) Kategori	36.607.045.856	Satuan Polisi Pamong Praja
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	87,94 poin	89 poin	0,00	0 poin	0,00	0 poin	0,00	0 poin	0,00	0 poin	-	Satuan Polisi Pamong Praja
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69.81 poin	70 poin	0,00	0 poin	0,00	0 poin	0,00	0 poin	0,00	0 poin	-	Satuan Polisi Pamong Praja
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					10.710.388.640		10.695.789.000		11.000.000.000		11.289.403.711		43.695.581.351	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				10.710.388.640		10.695.789.000		11.000.000.000		11.289.403.711		43.695.581.351	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pengurangan Risiko Bencana	0 %	0 %	0,00	57,58 %	2.511.600.000	54,55 %	2.668.000.000	45,45 %	2.578.000.000	45,45 %	7.757.600.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Masyarakat yang Memperoleh Informasi Layanan Bencana	100 %	100 %	650.000.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	650.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase Masyarakat yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	875.000.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	875.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase Penanganan Bencana dan warga negara korban bencana	100 %	100 %	1.215.742.200	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	1.215.742.200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	0 %	0 %	0,00	100 %	1.424.400.000	100 %	1.240.000.000	100 %	1.445.000.000	100 %	4.109.400.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	85,5 %	86 %	620.000.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	620.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	B (88) Kategori (poin)	0 Kategori (poin)	0,00	B (88) Kategori (poin)	1.050.280.800	B (88,5) Kategori (poin)	1.215.000.000	B (89) Kategori (poin)	1.378.400.000	B (89) Kategori (poin)	3.643.680.800	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (65) Kategori (poin)	0 Kategori (poin)	0,00	BB (75) Kategori (poin)	5.709.508.200	BB (77) Kategori (poin)	5.877.000.000	BB (79) Kategori (poin)	5.888.003.711	BB (79) Kategori (poin)	17.474.511.911	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	7.349.646.440	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	7.349.646.440	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
DINAS SOSIAL					21.341.506.788		23.784.420.900		24.784.082.299		24.928.740.546		94.838.750.533	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				21.341.506.788		23.784.420.900		24.784.082.299		24.928.740.546		94.838.750.533	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	0 %	100 %	10.579.412.033	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	100 %	10.579.412.033	Dinas Sosial
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial	0 %	100 %	500.000.000	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	100 %	500.000.000	Dinas Sosial
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana Alam dan Sosial	0 %	100 %	375.000.000	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	100 %	375.000.000	Dinas Sosial
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Aktif dan Mendapatkan Bimbingan Teknis	- %	- %	0,00	100 %	1.115.000.000	100 %	1.160.000.000	100 %	1.177.000.000	100 %	3.452.000.000	Dinas Sosial

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah							
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap PPKS	- %	- %	0,00	100 %	15.296.910.300	100 %	15.497.625.000	100 %	15.571.625.000	100 %	46.366.160.300	Dinas Sosial					
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Bansos Kesejahteraan Keluarga Tepat Sasaran	- %	- %	0,00	100 %	925.000.000	100 %	1.030.000.000	100 %	1.050.000.000	100 %	3.005.000.000	Dinas Sosial					
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	- %	- %	0,00	100 %	1.009.000.000	100 %	1.249.000.000	100 %	1.275.000.000	100 %	3.533.000.000	Dinas Sosial					
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang Terstandar	- %	- %	0,00	100 %	40.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	140.000.000	Dinas Sosial					
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Aktif	- %	100 %	2.305.000.000	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	100 %	2.305.000.000	Dinas Sosial					
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	0 %	100 %	43.000.000	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	100 %	43.000.000	Dinas Sosial					
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	0 Kategori (Point)	- Kategori (Point)	0,00	Baik (86,5) Kategori (Point)	1.385.500.000	Baik (87,5) Kategori (Point)	1.734.829.980	Baik (88) Kategori (Point)	1.741.812.409	Baik (88) Kategori (Point)	4.862.142.389	Dinas Sosial					
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0 Kategori (Point)	- Kategori (Point)	0,00	BB (73) Kategori (Point)	4.013.010.600	BB (74,61) Kategori (Point)	4.062.627.319	BB (74,65) Kategori (Point)	4.063.303.137	BB (74,65) Kategori (Point)	12.138.941.056	Dinas Sosial					
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	0 %	100 %	7.539.094.755	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	7.539.094.755	Dinas Sosial					
DINAS TENAGA KERJA					6.871.917.325			7.821.709.200			7.879.489.362			7.925.479.893			30.498.595.780		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				6.871.917.325			7.821.709.200			7.879.489.362			7.925.479.893			30.498.595.780		
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	53,75 %	54,25 %	405.000.000		0 %	0,00		0 %	0,00		54,25 %	405.000.000		Dinas Tenaga Kerja			
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan dengan mengacu ke rencana tenaga kerja	0 %	0 %	0,00		0 %	0,00		0 %	0,00		0 %	-		Dinas Tenaga Kerja			
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Presentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	3,61 %	0 %	953.382.372		0 %	0,00		0 %	0,00		0 %	953.382.372		Dinas Tenaga Kerja			

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	25 %	27 %	116.075.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	116.075.000	Dinas Tenaga Kerja
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan dengan mengacu ke rencana tenaga kerja	0 %	0 %	0,00	5 %	77.600.000	8 %	30.000.000	12 %	50.000.000	12 %	157.600.000	Dinas Tenaga Kerja
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja dan tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	0 %	0 %	0,00	19,70 %	1.668.333.161	20,20 %	1.101.592.800	20,70 %	1.243.000.000	20,70 %	4.012.925.961	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang bekerja	0 %	0 %	0,00	29 %	210.000.000	31 %	375.000.000	33 %	413.000.000	33 %	998.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	0 %	0 %	0,00	80,29 %	164.527.200	80,79 %	420.000.000	81 %	458.000.000	81 %	1.042.527.200	Dinas Tenaga Kerja
		Presentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	0 %	0 %	0,00	100 %	343.850.000	100 %	440.000.000	100 %	479.500.000	100 %	1.263.350.000	Dinas Tenaga Kerja
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100 %	100 %	5.397.459.953	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	5.397.459.953	Dinas Tenaga Kerja
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	0 ktgr (Point)	0 ktgr (Point)	0,00	BB (75,31) ktgr (Point)	1.450.243.700	BB (76,31) ktgr (Point)	1.573.618.500	BB (77,31) ktgr (Point)	1.625.250.000	BB (77,310) ktgr (Point)	4.649.112.200	Dinas Tenaga Kerja
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0 ktgr (Point)	0 ktgr (Point)	0,00	Baik (85,10) ktgr (Point)	3.907.155.139	Baik (85,4) ktgr (Point)	3.939.278.062	Baik (85,6) ktgr (Point)	3.656.729.893	Baik (85,6) ktgr (Point)	11.503.163.094	Dinas Tenaga Kerja
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN					32.641.426.360		31.978.388.150		37.214.617.392		37.431.829.441		139.266.261.343	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				17.221.426.360		17.271.426.360		18.914.617.392		18.631.829.441		72.039.299.553	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang dibangun	0 unit	0 unit	0,00	1 unit	300.000.000	1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000	3 unit	1.300.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	0 %	110,7 %	1.000.000.000	104 %	750.000.000	104,5 %	2.000.000.000	105 %	2.000.000.000	105 %	5.750.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	0 %	125 %	0,00	116,8 %	0,00	117 %	0,00	117,5 %	0,00	117,5 %	-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani	10,3 %	15 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Persentase penurunan daerah rawan pangan	0 %	15 %	300.000.000	15 %	300.000.000	15 %	300.000.000	15 %	300.000.000	15 %	1.200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan keamanan pangan	100 %	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Persentase sampel pangan yang memenuhi standar keamanan pangan	0 %	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	400.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	82,01 poin	83 poin	15.871.426.360	84 poin	15.871.426.360	84 poin	15.964.617.392	84 poin	15.681.829.441	84 poin	63.389.299.553	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,19 poin	79,5 poin	0,00	80 poin	0,00	80 poin	0,00	80 poin	0,00	80 poin	-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				5.500.000.000		5.586.961.790		7.000.000.000		7.000.000.000		25.086.961.790	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Angka Konsumsi Ikan	22,95 Kg/Kap/Tahun	22,25 Kg/Kap/Tahun	0,00	0 Kg/Kap/Tahun	0,00	0 Kg/Kap/Tahun	0,00	0 Kg/Kap/Tahun	0,00	0 Kg/Kap/Tahun	-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Persentase pembudidaya ikan yang produktif	0 %	0 %	0,00	80 %	0,00	80 %	0,00	80 %	0,00	80 %	-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Persentase peningkatan produksi benih ikan	0 %	0 %	500.000.000	5 %	500.000.000	5 %	500.000.000	5 %	500.000.000	5 %	2.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		persentase sarana dan prasarana perikanan yang dimanfaatkan	0 %	0 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Produksi Perikanan Budidaya	0 ton	10000 ton	4.000.000.000	10000 ton	4.086.961.790	10100 ton	5.500.000.000	10100 ton	5.500.000.000	10100 ton	19.086.961.790	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	IKM Pelayanan Pasar Ikan	0 Indeks	Baik (84) Indeks	250.000.000	Baik (84) Indeks	250.000.000	Baik (84) Indeks	250.000.000	Baik (84) Indeks	250.000.000	Baik (84) Indeks	1.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Persentase peningkatan produksi olahan ikan	0 %	5 %	750.000.000	5 %	750.000.000	5 %	750.000.000	5 %	750.000.000	5 %	3.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				9.920.000.000		9.120.000.000		11.300.000.000		11.800.000.000		42.140.000.000	

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana peternakan yang dimanfaatkan	0 %	0 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Persentase sarana Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan yang dimanfaatkan	0 %	0 %	1.500.000.000	100 %	1.500.000.000	100 %	1.500.000.000	100 %	2.000.000.000	100 %	6.500.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Produksi hasil peternakan	0 ton	0 ton	0,00	0 ton	0,00	10450 ton	0,00	10500 ton	0,00	10500 ton	-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Produksi Hortikultura dan perkebunan	0 ton	5900 ton	0,00	6000 ton	0,00	6100 ton	0,00	6100 ton	0,00	6100 ton	-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Produksi Tanaman Pangan	0 ton	70000 ton	2.000.000.000	75000 ton	1.500.000.000	75000 ton	2.000.000.000	75000 ton	2.000.000.000	75000 ton	7.500.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	IKM Pelayanan Rumah Potong Hewan	0 Indeks	Baik (84) Indeks	500.000.000	Baik (84) Indeks	500.000.000	Baik (84) Indeks	500.000.000	Baik (84) Indeks	500.000.000	Baik (84) Indeks	2.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Persentase prasarana Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan yang dimanfaatkan	0 %	0 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	0 Kw/Ha	62,9 Kw/Ha	4.300.000.000	62,65 Kw/Ha	4.000.000.000	62,7 Kw/Ha	5.300.000.000	62,7 Kw/Ha	5.300.000.000	62,7 Kw/Ha	18.900.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penanganan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100 %	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Persentase penyakit hewan yang tertanggulangi	0 %	0 %	620.000.000	100 %	620.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	3.240.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana TPH yang terdeteksi dini dan tertanggulangi	0 %	0 %	0,00	75 %	0,00	75 %	0,00	75 %	0,00	75 %	-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	0 %	4,5 %	1.000.000.000	1,5 %	1.000.000.000	2 %	1.000.000.000	2,5 %	1.000.000.000	2,5 %	4.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP					40.739.032.160		34.866.783.000		39.003.907.335		39.231.563.004		153.841.285.499	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				40.739.032.160		34.866.783.000		39.003.907.335		39.231.563.004		153.841.285.499	

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Dimanfaatkan	0 %	0 %	0,00	100 %	489.600.000	100 %	464.600.000	100 %	350.000.000	100 %	1.304.200.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup	0 %	100 %	283.250.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	283.250.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air; Indeks Kualitas Udara	65,75; 83,45 Point; Point	38,44; 83,72 Point; Point	254.199.750	0 Point; Point	0,00	0 Point; Point	0,00	0 Point; Point	0,00	0 Point; Point	254.199.750	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Penurunan Pencemaran	0 %	0 %	0,00	0,15 %	227.985.647	0,20 %	338.000.000	0,20 %	2.485.000.000	0,20 %	3.050.985.647	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan RTH	0 %	0 %	0,00	100 %	1.616.012.111	100 %	2.515.280.000	100 %	3.000.000.000	100 %	7.131.292.111	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase RTH yang Dikelola; Indeks Kualitas Lahan	100; 24,347 %; Point	100; 39,52 %; Point	2.763.856.300	0 %; Point	0,00	0 %; Point	0,00	0 %; Point	0,00	100; 39,52 %; Point	2.763.856.300	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Mematuhi Ketentuan Pengelolaan B3 dan LB3	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	10.000.000	100 %	15.000.000	100 %	25.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Mematuhi Ketentuan Lingkungan	0 %	0 %	0,00	100 %	48.000.000	100 %	88.000.000	100 %	98.000.000	100 %	234.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Peningkatan Dokumen Lingkungan yang Dinilai dan Diawasi Implementasinya	3 Jenis Dokumen; 25 Kegiatan %	100 %	15.000.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	15.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	150 %	100 %	8.100.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	8.100.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup Yang Terselesaikan	0 %	0 %	0,00	100 %	10.800.000	100 %	30.000.000	100 %	200.000.000	100 %	240.800.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Capaian Pelatihan, Penyuluhan, dan Kampanye Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	0 %	100 %	20.000.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	20.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Lembaga/Kelompok Masyarakat yang Aktif Menjaga Lingkungan Hidup	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	-	Dinas Lingkungan Hidup

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Capaian Perolehan Penghargaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat	100 %	100 %	305.000.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	305.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Peningkatan Masyarakat yang Mendapatkan Penghargaan Lingkungan Hidup	0 %	0 %	0,00	100 %	10.000.000	100 %	55.000.000	100 %	55.000.000	100 %	120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	61,23 %	72 %	19.393.542.150	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	72 %	19.393.542.150	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Pengurangan Sampah	12,63 %	27 %	787.566.200	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	27 %	787.566.200	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase pengurangan sampah di sumber sesuai standar	0 %	0 %	0,00	100 %	2.168.462.500	100 %	375.000.000	100 %	375.000.000	100 %	2.918.462.500	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase sampah di tps yang terangkut ke tpa sesuai standar	0 %	0 %	0,00	100 %	10.933.174.995	100 %	9.626.935.424	100 %	9.627.471.093	100 %	30.187.581.512	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Sampah yang Ditampung di TPA	0 %	0 %	0,00	100 %	2.479.965.847	100 %	5.162.620.000	100 %	2.687.620.000	100 %	10.330.205.847	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	0 Kategori (Poin)	0 Kategori (Poin)	0,00	Sangat Baik (88,62) Kategori (Poin)	2.448.771.800	Sangat Baik (88,63) Kategori (Poin)	5.012.724.576	Sangat Baik (88,64) Kategori (Poin)	5.012.724.576	Sangat Baik (88,64) Kategori (Poin)	12.474.220.952	Dinas Lingkungan Hidup
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0 Kategori (Poin)	0 Kategori (Poin)	0,00	A (80,20) Kategori (Poin)	14.434.010.100	A (80,25) Kategori (Poin)	15.325.747.335	A (80,30) Kategori (Poin)	15.325.747.335	A (80,30) Kategori (Poin)	45.085.504.770	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	100 %	100 %	16.908.517.760	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	16.908.517.760	Dinas Lingkungan Hidup
DINAS KEPEN DUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					13.067.059.120		9.848.407.900		10.921.159.594		10.984.903.564		44.821.530.178	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				13.067.059.120		9.848.407.900		10.921.159.594		10.984.903.564		44.821.530.178	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	96,1 %	97 %	3.949.086.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	3.949.086.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Pencatat an Sipil	99 %	99,3 %	255.798.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	255.798.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	100 %	110.000.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	110.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Kependudukan yang terlayani sesuai standar	0 %	0 %	0,00	98 %	503.100.000	100 %	505.000.000	100 %	434.500.000	100 %	1.442.600.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Permohonan Pencatatan Sipil yang terlayani sesuai standar	0 %	0 %	0,00	99,07 %	265.000.000	99,1 %	400.000.000	99,1 %	395.200.000	99,1 %	1.060.200.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Kualitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	0 %	0 %	0,00	100 %	180.000.000	100 %	342.691.234	100 %	253.000.000	100 %	775.691.234	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah Dokumen Kependudukan yang dihasilkan sesuai kewajiban OPD berdasarkan Permendagri	0 %	0 %	0,00	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	33.000.000	100 %	93.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Kerjasama Dokumen kependudukan dan pemanfaatan data	0 %	0 %	0,00	100 %	80.000.000	100 %	100.000.000	100 %	88.000.000	100 %	268.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	0 poin	0 poin	0,00	88 poin	2.666.797.000	91 poin	2.891.813.900	92 poin	3.122.549.104	92 poin	8.681.160.004	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0 nilai	0 nilai	0,00	77 nilai	6.123.510.900	77 nilai	6.651.654.460	78 nilai	6.658.654.460	78 nilai	19.433.819.820	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100 %	100 %	8.752.175.120	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	8.752.175.120	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DINAS PENGE NDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					17.387.308.563		15.419.531.100		15.533.437.534		15.624.102.171		63.964.379.368	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				5.889.278.563		5.963.482.100		6.017.388.534		6.098.004.171		23.968.153.368	

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Capaian PUG SKPD yang Responsif Gender	100 persen	100 persen	55.000.000	0 persen	0,00	0 persen	0,00	0 persen	0,00	100 persen	55.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase pembinaan peningkatan kualitas keluarga	0 %	100 %	815.000.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	815.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan sistem data gender dan anak	0 %	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	-	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penanganan kasus	100 %	100 %	25.000.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	25.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pembinaan lembaga yang peduli dalam Pemenuhan Hak Anak	100 %	100 %	121.044.894	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	121.044.894	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penanganan kasus anak	100 %	100 %	100.000.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	100.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perangkat daerah yang menerapkan program PUG	0 %	0 %	0,00	100 %	55.000.000	100 %	55.000.000	100 %	55.000.000	100 %	165.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah /Urusan/ Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase peserta lulusan pelatihan yang melakukan pemberdayaan ekonomi perempuan	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	-	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase peserta yang lulus pelatihan	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	-	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang aktif dalam pengarusutamaan gender	0 %	0 %	0,00	100 %	750.000.000	100 %	800.000.000	100 %	800.000.000	100 %	2.350.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data terpilah yang dimanfaatkan	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	1.000.000	100 %	1.000.000	100 %	2.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus yang tertangani	0 %	0 %	0,00	100 %	130.120.000	100 %	221.840.000	100 %	221.840.000	100 %	573.800.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase lembaga pemenuhan hak anak yang aktif	0 %	0 %	0,00	100 %	137.327.000	100 %	119.000.000	100 %	119.000.000	100 %	375.327.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap anak	0 %	0 %	0,00	100 %	169.892.100	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	469.892.100	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100 persen	100 persen	1.209.985.828	0 persen	0,00	0 persen	0,00	0 persen	0,00	100 persen	1.209.985.828	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100 persen	100 persen	3.563.247.841	0 persen	0,00	0 persen	0,00	0 persen	0,00	100 persen	3.563.247.841	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0 Nilai	0 Nilai	0,00	BB Nilai	3.444.148.100	BB Nilai	3.401.848.534	A Nilai	3.450.000.000	A Nilai	10.295.996.634	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	0 Nilai	0 Nilai	0,00	90,80 Nilai	1.276.994.900	91,90 Nilai	1.268.700.000	92,00 Nilai	1.301.164.171	0 Nilai	3.846.859.071	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				11.498.030.000		9.456.049.000		9.516.049.000		9.526.098.000		39.996.226.000	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase rencana aksi pengendalian penduduk yang diterapkan	0 %	0 %	0,00	100 %	294.200.000	100 %	364.200.000	100 %	364.200.000	100 %	1.022.600.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kepesertaan KB MKJP	0 %	0 %	0,00	73 %	5.115.049.000	75 %	5.115.049.000	80 %	5.125.098.000	80 %	15.355.196.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah Dokumen laporan pemutakhiran data kependudukan	1 dokumen	1 dokumen	281.200.000	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	1 dokumen	281.200.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kepesertaan KB MKJP	100 %	100 %	6.979.630.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	6.979.630.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Kepesertaan Unmet Need	14 %	13,5 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	13,5 %	-	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota BKB yang ber KB	82,03 %	82,53 %	4.237.200.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	82,53 %	4.237.200.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Cakupan anggota BKL yang ber KB	74,47 persen	74,97 persen	0,00	0 persen	0,00	0 persen	0,00	0 persen	0,00	74,97 persen	-	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Cakupan anggota BKR yang ber KB	76,11 persen	76,61 persen	0,00	0 persen	0,00	0 persen	0,00	0 persen	0,00	76,61 persen	-	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Perentase Keluarga yang memenuhi 8 Fungsi Keluarga	0 %	0 %	0,00	100 %	4.046.800.000	100 %	4.036.800.000	100 %	4.036.800.000	0 %	12.120.400.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/ Urusan/ Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
DINAS PERHUBUNGAN					61.370.741.715		40.014.769.100		40.310.364.317		40.545.645.436		182.241.520.568	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				61.370.741.715		40.014.769.100		40.310.364.317		40.545.645.436		182.241.520.568	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kebutuhan prasarana perhubungan yang terpenuhi	0 %	0 %	0,00	84,94 %	3.444.650.000	87,09 %	2.555.245.217	89,23 %	2.555.245.217	89,23 %	8.555.140.434	Dinas Perhubungan
		Persentase ruas jalan yang lancar	0 %	0 %	0,00	58,93 %	703.630.000	60,71 %	823.630.000	62,50 %	838.939.697	62,50 %	2.366.199.697	Dinas Perhubungan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan berkeselamatan	0 %	0 %	0,00	78,32 %	591.102.000	79,82 %	856.102.000	81,82 %	856.102.000	81,82 %	2.303.306.000	Dinas Perhubungan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Layanan Lalu Lintas dan Angkutan	67,23 %	67,23 %	21.793.020.300	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	21.793.020.300	Dinas Perhubungan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	0 kategori (poin)	0 kategori (poin)	0,00	B (79,60) kategori (poin)	25.443.378.000	B (79,60) kategori (poin)	26.148.378.000	B (79,60) kategori (poin)	26.318.378.000	B (79,60) kategori (poin)	77.910.134.000	Dinas Perhubungan
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0 kategori (poin)	0 kategori (poin)	0,00	A (82,65) kategori (poin)	9.832.009.100	A (82,65) kategori (poin)	9.927.009.100	A (82,65) kategori (poin)	9.976.980.522	A (82,65) kategori (poin)	29.735.998.722	Dinas Perhubungan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	79,00 poin	79,00 poin	30.025.830.665	0 poin	0,00	0 poin	0,00	0 poin	0,00	0 poin	30.025.830.665	Dinas Perhubungan
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,60 poin	82,60 poin	9.551.890.750	0 poin	0,00	0 poin	0,00	0 poin	0,00	0 poin	9.551.890.750	Dinas Perhubungan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					20.137.347.980		18.281.321.300		18.416.368.215		18.523.859.769		75.358.897.264	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				19.449.647.980		17.783.321.300		17.918.368.215		17.898.859.769		73.050.197.264	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	80 %	80 %	1.309.935.300	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	1.309.935.300	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik	100 %	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan SPBE yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	60 %	60 %	12.369.645.171	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	12.369.645.171	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai pengelolaan informasi dan komunikasi publik	0 poin	0 poin	0,00	92 poin	2.329.200.000	92.5 poin	1.754.200.000	93 poin	1.754.200.000	93 poin	5.837.600.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pemenuhan Dokumen Evidence Penilaian SPBE	0 %	0 %	0,00	100 %	9.217.000.000	100 %	9.555.000.000	100 %	9.499.327.591	100 %	28.271.327.591	Dinas Komunikasi dan Informatika
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	0 poin	0 poin	0,00	90 poin	1.297.201.500	90.5 poin	1.440.500.000	91 poin	1.510.000.000	91 poin	4.247.701.500	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0 poin	0 poin	0,00	81 poin	4.939.919.800	82 poin	5.168.668.215	83 poin	5.135.332.178	83 poin	15.243.920.193	Dinas Komunikasi dan Informatika
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100 %	100 %	5.770.067.509	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	5.770.067.509	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				280.000.000		252.982.000		250.000.000		250.000.000		1.032.982.000	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	280.000.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	280.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Peningkatan pengunjung web open data	0 %	0 %	0,00	20 %	252.982.000	25 %	250.000.000	30 %	250.000.000	30 %	752.982.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				407.700.000		245.018.000		248.000.000		375.000.000		1.275.718.000	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah	41 %	41 %	407.700.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	407.700.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Nilai kelengkapan pengamanan informasi	0 Poin	0 Poin	0,00	291 Poin	245.018.000	297 Poin	248.000.000	304 Poin	375.000.000	304 Poin	868.018.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				18.643.117.780		18.459.364.800		19.673.644.714		19.788.474.665		76.564.601.959	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				12.285.389.764		12.078.588.400		14.021.211.200		14.235.177.998		52.620.367.362	
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang Memiliki Izin	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	20.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Tingkat Kepatuhan Koperasi	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	35,4 %	10.000.000	40 %	10.000.000	40 %	20.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Sertifikat Kesehatan KSP/USP Koperasi	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	4 %	10.000.000	5 %	10.000.000	5 %	20.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang bersertifikat kompetensi	0 %	0 %	0,00	8,25 %	205.535.000	9 %	205.535.000	10 %	205.535.000	10 %	616.605.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Laju Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	0 %	0 %	0,00	2,5 %	223.800.000	4 %	305.000.000	7 %	305.000.000	7 %	833.800.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi simpan pinjam yang diberi rekomendasi penerbitan izin usaha dan/ atau izin operasional	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM koperasi yang Kompeten	0 %	25 %	205.085.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	205.085.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif yang diberdayakan	0 %	25 %	510.400.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	510.400.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro	0 %	2 %	347.800.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	347.800.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang dibina	0 %	5 %	205.085.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	205.085.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan SDM Usaha Mikro yang Bersertifikat	0 %	0 %	0,00	5,57 %	615.535.000	5,6 %	710.535.000	5,8 %	710.535.000	5,8 %	2.036.605.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang Memiliki Akses Pemasaran	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	5,6 %	180.000.000	5,8 %	180.000.000	5,8 %	360.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	0 poin	0 poin	0,00	86 poin	2.892.333.600	87 poin	4.060.945.200	88 poin	4.247.944.700	88 poin	11.201.223.500	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0 poin	0 poin	0,00	80 poin	8.141.384.800	80.5 poin	8.529.196.000	81 poin	8.556.163.298	81 poin	25.226.744.098	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	0 %	100 %	11.017.019.764	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	11.017.019.764	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				5.481.528.016		5.065.776.400		4.902.433.514		4.803.296.667		20.253.034.597	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase fasilitasi pemenuhan perizinan dan pendaftaran perusahaan	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	100.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Laju Sarana Distribusi Perdagangan	0 %	0 %	0,00	80 %	4.275.776.400	90 %	3.607.433.514	100 %	3.408.296.667	100 %	11.291.506.581	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Rekomendasi Hasil Pemantauan yang Ditindaklanjuti	0 %	0 %	0,00	10 %	15.000.000	10 %	395.000.000	10 %	395.000.000	10 %	805.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor non migas	0 US\$ (Juta)	0 US\$ (Juta)	0,00	33 US\$ (Juta)	575.000.000	34 US\$ (Juta)	475.000.000	35 US\$ (Juta)	525.000.000	35 US\$ (Juta)	1.575.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Konsumen yang dilayani dan ditangani tepat waktu pada UPTD Metrologi Legal	0 %	0 %	0,00	80 %	200.000.000	85 %	200.000.000	90 %	200.000.000	90 %	600.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Laju Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	10,4 %	175.000.000	11,4 %	225.000.000	11,4 %	400.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase fasilitasi pemenuhan perizinan dan pendaftaran perusahaan	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat dalam Kondisi Baik	70 %	70 %	4.146.575.816	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	4.146.575.816	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	0 %	40 %	579.515.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	579.515.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor	0 %	1 %	288.960.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	288.960.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP yang bertera sah	0 %	80 %	205.437.200	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	205.437.200	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan penggunaan produk unggulan Kota Tasikmalaya	0 poin	10 poin	261.040.000	0 poin	0,00	0 poin	0,00	0 poin	0,00	0 poin	261.040.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				876.200.000		1.315.000.000		750.000.000		750.000.000		3.691.200.000	

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase implementasi pencapaian sasaran rencana pembangunan industri	0 %	5 %	876.200.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	876.200.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pengendalian Izin Usaha Industri	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terdaftar di sistem informasi industri nasional	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Industri	0 %	0 %	0,00	6,78 %	1.315.000.000	8 %	665.000.000	10 %	665.000.000	10 %	2.645.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Industri yang Mematuhi Ketentuan Izin	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	20.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri yang masuk ke dalam SIINAS	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0,6 %	75.000.000	1 %	75.000.000	1 %	150.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					7.722.800.175		7.995.267.700		8.054.329.965		8.101.340.996		31.873.738.836	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				7.722.800.175		7.995.267.700		8.054.329.965		8.101.340.996		31.873.738.836	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	5 %	100.000.000	6 %	150.000.000	6 %	250.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase realisasi RUPM Kota Tasikmalaya	0 %	20 %	115.000.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	20 %	115.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	persentase peningkatan investasi yang masuk	0 %	4 %	75.000.000	0 %	0,00	15 %	230.000.000	15 %	250.000.000	15 %	555.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan penanaman modal	0 %	0 %	0,00	1 %	435.817.000	5 %	200.000.000	7 %	200.000.000	7 %	835.817.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/ Urusan/ Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	0,13 %	1 %	473.400.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	473.400.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Capain penerbitan perijinan terpadu tepat waktu sesuai SOP	100 %	100 %	235.000.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	235.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	0 %	0 %	0,00	25 %	131.030.000	25 %	221.330.000	25 %	325.000.001	25 %	677.360.001	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi DPMPSTP yang dimanfaatkan	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	10.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase pengelolaan basis data potensi penanaman modal sesuai SOP	25 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	25 %	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase pengelolaan data perijinan sesuai SOP	80 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Baik (87.36) kategori (Poin)	Sangat Baik (92) kategori (Poin)	2.419.688.761	Sangat Baik (88.32) kategori (Poin)	2.910.135.150	Sangat Baik (89) kategori (Poin)	2.853.572.355	Sangat Baik (90) kategori (Poin)	2.705.972.335	Sangat Baik (90) kategori (Poin)	10.889.368.601	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Baik (73) kategori (Poin)	A (82) kategori (Poin)	4.404.711.414	Sangat Baik (80) kategori (Poin)	4.518.285.550	A (81) kategori (Poin)	4.444.427.610	A (82) kategori (Poin)	4.465.368.660	A (82) kategori (Poin)	17.832.793.234	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DINAS KEPEM UDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					22.415.144.765		19.883.953.357		20.030.839.160		20.147.753.962		82.477.691.244	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				18.218.024.965		15.731.833.557		15.775.839.160		15.102.753.962		64.828.451.644	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda / OKP yang dibina	28,57 %	30,77 %	1.841.002.850	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	1.841.002.850	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase Pemuda terbina keorganisasian yang aktif profesional yang terpenuhi dalam organisasi kemasyarakatan	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	-	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase pemuda terbina wirausaha yang berwirausaha	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	-	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provins	60,00 %	36,59 %	9.342.997.515	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	9.342.997.515	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda Terbina Keorganisasian Yang Aktif Dalam Organisasi Kemasyarakatan	- %	- %	0,00	67,71 %	505.000.000	67,89 %	800.000.000	68,10 %	850.000.000	68,10 %	2.155.000.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase Pemuda Terbina Kepeloporan Yang Menjadi Pemuda Pelopor	- %	- %	0,00	- %	0,00	25,00 %	100.000.000	25,00 %	100.000.000	50,00 %	200.000.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase Pemuda Terbina Wirausaha Yang Berwirausaha	- %	- %	0,00	33,24 %	200.000.000	34,21 %	875.000.000	35,40 %	375.000.000	35,40 %	1.450.000.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Medali yang Diperoleh dalam Event Provinsi	0 %	0 %	0,00	37,00 %	7.898.820.707	39,02 %	6.893.939.160	41,46 %	5.910.593.962	41,46 %	20.703.353.829	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase Partisipasi Masyarakat Berolahraga	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	46,25 %	87.500.000	46,31 %	65.000.000	46,31 %	152.500.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	- Kategori (Poin)	- Kategori (Poin)	0,00	Sangat Baik (81,26) Kategori (Poin)	1.995.762.850	Sangat Baik (81,30) Kategori (Poin)	1.887.000.000	Sangat Baik (81,33) Kategori (Poin)	2.669.760.000	Sangat Baik (81,33) Kategori (Poin)	6.552.522.850	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	- Kategori (Poin)	- Kategori (Poin)	0,00	A (80,70) Kategori (Poin)	5.132.250.000	A (80,72) Kategori (Poin)	5.132.400.000	A (80,75) Kategori (Poin)	5.132.400.000	A (80,75) Kategori (Poin)	15.397.050.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	7.034.024.600	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	7.034.024.600	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.595.000.000		2.550.000.000		2.765.000.000		2.865.000.000		9.775.000.000	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Kebudayaan	57,97 %	63,73 %	350.000.000	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	350.000.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase Peningkatan Kebudayaan Daerah	- %	- %	0,00	68,63 %	350.000.000	73,53 %	1.360.000.000	78,43 %	950.000.000	78,43 %	2.660.000.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/ Urusan/ Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Tradisional	20,23 %	25 %	1.245.000.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	25 %	1.245.000.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase Peningkatan Kesenian Tradisional	0 %	0 %	0,00	25 %	2.200.000.000	25 %	1.250.000.000	25 %	1.600.000.000	75 %	5.050.000.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Dokumen Sejarah Lokal yang Dilestarikan	50 %	0 %	0,00	0 %	0,00	25 %	55.000.000	25 %	45.000.000	50 %	100.000.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang Terlindungi	35,38 %	0 %	0,00	0 %	0,00	61,54 %	100.000.000	69,23 %	270.000.000	69,23 %	370.000.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				2.602.119.800		1.602.119.800		1.490.000.000		2.180.000.000		7.874.239.600	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	55,1 %	61,22 %	102.835.000	61,22 %	102.835.000	63,27 %	325.000.000	65,31 %	485.000.000	65,31 %	1.015.670.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisata	483569 Orang	542625 Orang	1.542.272.300	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	542625 Orang	1.542.272.300	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase Peningkatan Wisatawan yang Mengakses Informasi Pariwisata	0 %	0 %	0,00	13,35 %	542.272.300	16,67 %	485.000.000	33,33 %	495.000.000	33,33 %	1.522.272.300	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50 %	56,67 %	957.012.500	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	56,67 %	957.012.500	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase Kebutuhan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Profesional yang Terpenuhi	0 %	0 %	0,00	56,67 %	957.012.500	60,00 %	680.000.000	63,33 %	1.200.000.000	63,33 %	2.837.012.500	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
DINAS PERPUS TAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH					6.321.653.475		6.422.027.100		6.969.467.595		7.010.146.566		26.723.294.736	
2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				6.077.944.869		6.022.896.100		6.751.698.595		6.699.656.867		25.552.196.431	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Sosialisasi	- Orang	- Orang	0,00	530 Orang	110.000.000	530 Orang	184.610.300	530 Orang	184.610.300	1590 Orang	479.220.600	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Jumlah Kunjungan Masyarakat	- orang	- orang	0,00	20376 orang	339.350.800	20987 orang	892.579.300	21617 orang	935.545.312	62980 orang	2.167.475.412	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Persentase kesesuaian penyelenggaraan perpustakaan umum daerah dengan standar nasional perpustakaan	- %	38 %	554.295.150	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	554.295.150	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Persentase pembinaan perpustakaan	5,53 %	4,42 %	531.000.000	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	531.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	25 %	60.000.000	25 %	60.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	0 Poin	0 Poin	0,00	84,5 Poin	2.082.368.200	85 Poin	1.825.860.659	85 Poin	1.781.850.400	85 Poin	5.690.079.259	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	- Poin	- Poin	0,00	81 Poin	3.491.177.100	81 Poin	3.848.648.336	82 Poin	3.737.650.855	82 Poin	11.077.476.291	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	- %-	100 %-	4.992.649.719	- %-	0,00	- %-	0,00	- %-	0,00	- %-	4.992.649.719	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				243.708.606		399.131.000		217.769.000		310.489.699		1.171.098.305	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai aspek kebijakan	- Nilai	- Nilai	0,00	19,5 Nilai	56.500.000	19,7 Nilai	58.600.000	19,9 Nilai	58.600.000	19,9 Nilai	173.700.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Nilai aspek pembinaan	- Nilai	- Nilai	0,00	13.6 Nilai	16.300.000	13.8 Nilai	23.000.000	14 Nilai	23.000.000	14 Nilai	62.300.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Nilai aspek pengelolaan arsip statis	- Nilai	- Nilai	0,00	15,9 Nilai	242.331.000	15,9 Nilai	50.000.000	16,3 Nilai	142.720.699	16,7 Nilai	435.051.699	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Nilai aspek sumber daya kearsipan	- Nilai	- Nilai	0,00	13 Nilai	84.000.000	13,2 Nilai	86.169.000	13,4 Nilai	86.169.000	13,4 Nilai	256.338.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Persentase kesesuaian kinerja kearsipan pada lembaga kearsipan daerah	21,45 %	37,48 %	84.250.000	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	84.250.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Persentase perangkat daerah dengan nilai pengawasan kearsipan internal minimal kategori cukup	63,89 %	77,78 %	159.458.606	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	159.458.606	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
SEKRETARIAT DAERAH					75.784.863.006		82.734.574.975		83.345.747.929		83.832.215.397		325.697.401.306	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				75.784.863.006		82.734.574.975		83.345.747.929		83.832.215.397		325.697.401.306	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Hukum Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Meningkatkan	0 %	100 %	25.409.788.452	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	25.409.788.452	Sekretariat Daerah
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik	0 %	100 %	222.517.405	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	222.517.405	Sekretariat Daerah
		Persentase Produk Hukum Daerah yang Diundangkan	0 %	100 %	748.365.532	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	748.365.532	Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indek Kematangan UKPBJ	0 Variabel	5/9 Variabel	1.219.175.246	0 Variabel	0,00	0 Variabel	0,00	0 Variabel	0,00	5/9 Variabel	1.219.175.246	Sekretariat Daerah
		Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Bidang Perekonomian dan Pembangunan	0 %	100 %	626.717.750	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	626.717.750	Sekretariat Daerah
		Persentase Optimalisasi Percepatan Pembangunan Daerah	0 %	100 %	1.132.803.840	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	1.132.803.840	Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Reformasi Hukum	0 Nilai	0 Nilai	0,00	86,88 Nilai	961.267.000	86,89 Nilai	1.021.500.000	86,90 Nilai	1.021.500.000	86,90 Nilai	3.004.267.000	Sekretariat Daerah
		Nilai Daerah Kabupaten / Kota Peduli HAM	0 Nilai	0 Nilai	0,00	92,7 Nilai	0,00	92,90 Nilai	0,00	93,00 Nilai	0,00	93,00 Nilai	-	Sekretariat Daerah
		Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	0 Nilai	0 Nilai	0,00	45 Nilai	26.415.860.833	50 Nilai	24.878.400.000	55 Nilai	24.878.570.765	55 Nilai	76.172.831.598	Sekretariat Daerah
		Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan	0 Nilai	0 Nilai	0,00	45 Nilai	1.469.457.600	50 Nilai	853.600.000	55 Nilai	853.600.000	55 Nilai	3.176.657.600	Sekretariat Daerah
		Persentase Pemenuhan Eviden Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam SILPPD	0 %	0 %	0,00	100 %	639.935.950	100 %	612.600.000	100 %	612.600.000	100 %	1.865.135.950	Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Tata Kelola Pengadaan	0 Skor	0 Skor	0,00	70,74 Skor	1.110.021.939	72,71 Skor	1.140.400.000	73,71 Skor	1.140.400.000	73,71 Skor	3.390.821.939	Sekretariat Daerah
		Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan	0 Nilai	0 Nilai	0,00	45 Nilai	624.578.360	50 Nilai	624.600.000	55 Nilai	624.600.000	55 Nilai	1.873.778.360	Sekretariat Daerah

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	0 Nilai	0 Nilai	0,00	45 Nilai	836.174.397	50 Nilai	705.200.000	55 Nilai	705.200.000	55 Nilai	2.246.574.397	Sekretariat Daerah
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pembangunan yang Ditindklanjuti	0 %	0 %	0,00	100 %	722.583.120	100 %	733.900.000	100 %	733.900.000	100 %	2.190.383.120	Sekretariat Daerah
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kota	0 Nilai	0 Nilai	0,00	88,31 Nilai	0,00	88,50 Nilai	0,00	88,75 Nilai	0,00	88,75 Nilai	-	Sekretariat Daerah
		Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya	0 Nilai	0 Nilai	0,00	85,00 Nilai	21.554.364.712	88,00 Nilai	22.331.366.530	90,00 Nilai	22.601.900.000	90,00 Nilai	66.487.631.242	Sekretariat Daerah
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	0 Nilai	0 Nilai	0,00	78,88 Nilai	455.752.757	79,50 Nilai	548.700.000	80,50 Nilai	548.800.000	80,50 Nilai	1.553.252.757	Sekretariat Daerah
		Nilai Dimensi Pelaporan Kinerja dalam Penilaian SAKIP Pemerintah Daerah	0 Nilai	0 Nilai	0,00	10,55 Nilai	484.279.456	10,58 Nilai	485.300.000	10,60 Nilai	485.300.000	10,60 Nilai	1.454.879.456	Sekretariat Daerah
		Nilai Komposit Kelembagaan	0 Nilai	0 Nilai	0,00	83,00 Nilai	356.667.872	84,00 Nilai	356.700.000	84,00 Nilai	356.700.000	84,00 Nilai	1.070.067.872	Sekretariat Daerah
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0 Nilai	0 Nilai	0,00	83,75 Nilai	26.763.895.007	83,95 Nilai	28.713.581.399	84,00 Nilai	28.929.244.632	84,00 Nilai	84.406.721.037	Sekretariat Daerah
		Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Kebijakan Standar Pelayanan Publik	0 %	0 %	0,00	100 %	339.735.972	100 %	339.900.000	100 %	339.900.000	100 %	1.019.535.972	Sekretariat Daerah
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian IKM Perangkat Daerah	Baik Kategori	Baik Kategori	745.698.301	0 Kategori	0,00	0 Kategori	0,00	0 Kategori	0,00	Baik Kategori	745.698.301	Sekretariat Daerah
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B Kategori	A Kategori	370.907.016	0 Kategori	0,00	0 Kategori	0,00	0 Kategori	0,00	A Kategori	370.907.016	Sekretariat Daerah
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	0 %	100 %	45.308.889.464	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	45.308.889.464	Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH					64.482.875.677		61.909.339.500		62.366.673.256		62.730.691.317		251.489.579.750	
4.02	SEKRETARIAT DPRD				64.482.875.677		61.909.339.500		62.366.673.256		62.730.691.317		251.489.579.750	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat DPRD	0 Kategori	0 Kategori	0,00	85,00 Kategori	16.009.944.258	86,00 Kategori	16.009.944.258	87,00 Kategori	16.009.944.258	87,00 Kategori	48.029.832.774	Sekretariat DPRD
		Persentase hasil pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD	100% Persentase	100% Persentase	17.479.959.095	0 Persentase	0,00	0 Persentase	0,00	0 Persentase	0,00	0 Persentase	17.479.959.095	Sekretariat DPRD

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	0 Kategori	0 Kategori	0,00	85,00 Kategori	39.736.240.062	86,00 Kategori	40.193.573.818	87,00 Kategori	40.557.591.879	87,00 Kategori	120.487.405.759	Sekretariat DPRD
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0 Kategori	0 Kategori	0,00	83,30 Kategori	6.163.155.180	82,00 Kategori	6.163.155.180	82,50 Kategori	6.163.155.180	82,50 Kategori	18.489.465.540	Sekretariat DPRD
		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100% Persentase	100% Persentase	47.002.916.582	0 Persentase	0,00	0 Persentase	0,00	0 Persentase	0,00	0 Persentase	47.002.916.582	Sekretariat DPRD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					17.205.026.360		16.899.581.600		17.524.421.393		17.626.706.886		69.255.736.239	
5.01	PERENCANAAN				15.755.026.360		15.799.581.600		16.524.421.393		16.626.706.886		64.705.736.239	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	23.78 Poin	- Poin	0,00	23.98 Poin	145.666.950	24.08 Poin	114.554.500	24.18 Poin	114.554.500	24.18 Poin	374.775.950	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Capaian Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	25.41 Poin	- Poin	0,00	25.61 Poin	1.749.333.050	25.71 Poin	1.435.445.500	25.81 Poin	1.702.695.500	25.81 Poin	4.887.474.050	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase konsistensi RKPD terhadap RPD/ RPJMD	100 %	100 %	1.478.190.940	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	1.478.190.940	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	23.69 Poin	- Poin	0,00	23.89 Poin	141.650.000	23.99 Poin	141.650.000	24.09 Poin	141.650.000	24.09 Poin	424.950.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Capaian Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Kewilayahan	24.11 Poin	- Poin	0,00	24.31 Poin	69.780.000	24.41 Poin	77.470.500	24.51 Poin	77.470.500	24.51 Poin	224.721.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Capaian Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	25.33 Poin	- Poin	0,00	25.53 Poin	1.093.350.000	25.63 Poin	1.093.350.000	25.73 Poin	1.093.350.000	25.73 Poin	3.280.050.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Capaian Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Perangkat Daerah lingkup bidang Perekonomian dan Infrastruktur Kewilayahan	25.69 Poin	- Poin	0,00	25.89 Poin	490.220.000	25.99 Poin	482.529.500	26.09 Poin	482.529.500	26.09 Poin	1.455.279.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap RKPD	100 %	100 %	1.700.000.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	1.700.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	- %	100 %	12.576.835.420	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	12.576.835.420	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Sangat Baik (88,77) Kategori (Poin)	0 Kategori (Poin)	0,00	Sangat Baik (88,87) Kategori (Poin)	3.730.502.600	Sangat Baik (88,97) Kategori (Poin)	4.000.580.368	Sangat Baik (89,07) Kategori (Poin)	3.809.076.861	Sangat Baik (89,07) Kategori (Poin)	11.540.159.829	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (83,61) Kategori (Poin)	0 Kategori (Poin)	0,00	A (84,00) Kategori (Poin)	8.379.079.000	A (84,30) Kategori (Poin)	9.178.841.025	A (84,60) Kategori (Poin)	9.205.380.025	A (84,60) Kategori (Poin)	26.763.300.050	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.450.000.000		1.100.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		4.550.000.000	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah inovasi daerah yang dilaporkan dan terverifikasi dalam Inovation Government Award (IGA)	9 Buah	10 Buah	425.000.000	0 Buah	0,00	0 Buah	0,00	0 Buah	0,00	0 Buah	425.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	0 Persen	85 Persen	1.025.000.000	85 Persen	605.000.000	85 Persen	403.594.700	85 Persen	403.594.700	85 Persen	2.437.189.400	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase Peningkatan Inovasi Daerah yang terlaporkan dan terverifikasi dalam Innovation Government Award (IGA)	0 Persen	0 Persen	0,00	10 Persen	495.000.000	10 Persen	596.405.300	10 Persen	596.405.300	40 Persen	1.687.810.600	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					56.686.805.703		44.612.354.958		44.941.913.244		45.204.227.511		191.445.301.416	

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5.02	KEUANGAN				56.686.805.703		44.612.354.958		44.941.913.244		45.204.227.511		191.445.301.416	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	100 %	38.150.398.324	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	38.150.398.324	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Standar	0 %	0 %	0,00	100 %	17.940.072.646	100 %	12.209.090.724	100 %	12.471.404.991	100 %	42.620.568.361	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah Sesuai Standar	0 %	0 %	0,00	100 %	2.807.274.400	100 %	1.987.650.000	100 %	1.987.650.000	100 %	6.782.574.400	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Sesuai Standar	0 %	0 %	0,00	100 %	1.615.042.000	100 %	903.700.000	100 %	903.700.000	100 %	3.422.442.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Standar	100 %	100 %	4.126.701.700	100 %	4.778.606.000	100 %	3.200.000.000	100 %	3.200.000.000	100 %	15.305.307.700	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	88,54 Point	88,67 Point	4.320.661.300	89,01 Point	4.790.404.000	89,28 Point	3.522.800.000	89,42 Point	3.522.800.000	89,42 Point	16.156.665.300	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,94 Point	83,05 Point	10.089.044.379	83,17 Point	12.680.955.912	83,26 Point	23.118.672.520	83,35 Point	23.118.672.520	83,35 Point	69.007.345.331	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BADAN PENDAPATAN DAERAH					24.313.498.100		25.642.546.080		30.831.971.488		31.011.929.692		111.799.945.360	
5.02	KEUANGAN				24.313.498.100		25.642.546.080		30.831.971.488		31.011.929.692		111.799.945.360	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Capaian PAD Bukan Pajak Daerah	100 %	100 %	49.500.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	49.500.000	Badan Pendapatan Daerah
		Capaian Pajak Daerah	100 %	100 %	3.853.276.803	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	3.853.276.803	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase Dokumen Target Pendapatan Asli Daerah yang Akurat	100 %	0 %	0,00	100 %	20.000.000	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	90.000.000	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase Layanan yang memanfaatkan teknologi informasi	100 %	0 %	0,00	100 %	1.794.883.028	100 %	1.896.000.000	100 %	1.896.000.000	100 %	5.586.883.028	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase penerapan kebijakan teknis	100 %	0 %	0,00	100 %	1.106.418.900	100 %	1.283.800.000	100 %	1.423.500.000	100 %	3.813.718.900	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase pengelolaan penerimaan pajak yang sesuai standar	100 %	0 %	0,00	100 %	1.400.214.380	100 %	2.090.810.688	100 %	2.586.301.266	100 %	6.077.326.334	Badan Pendapatan Daerah

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi pendapatan yang ditindaklanjuti	100 %	0 %	0,00	100 %	410.000.000	100 %	675.000.000	100 %	775.000.000	100 %	1.860.000.000	Badan Pendapatan Daerah
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Badan Pendapatan Daerah	0 Kategori (Poin)	0 Kategori (Poin)	0,00	Sangat Baik (88,31) Kategori (Poin)	4.127.091.771	Sangat Baik (88,31) Kategori (Poin)	4.245.823.194	Sangat Baik (88,31) Kategori (Poin)	3.670.590.820	Sangat Baik (88,31) Kategori (Poin)	12.043.505.785	Badan Pendapatan Daerah
		Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah	0 Kategori (Poin)	0 Kategori (Poin)	0,00	A (82,91) Kategori (Poin)	16.783.938.001	A (82,92) Kategori (Poin)	20.605.537.606	A (82,92) Kategori (Poin)	20.625.537.606	A (82,92) Kategori (Poin)	58.015.013.213	Badan Pendapatan Daerah
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	20.410.721.297	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	20.410.721.297	Badan Pendapatan Daerah
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					13.072.900.585		12.980.517.000		14.076.406.063		14.158.566.387		54.288.390.035	
5.03	KEPEGAWAIAN				12.697.900.585		12.216.517.000		12.376.406.063		12.458.566.387		49.749.390.035	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai kriteria kualitas evaluasi kinerja	12 nilai/kategori	0 nilai/ka tegori	0,00	67.5 nilai /kategori	50.000.000	69.5 nilai /kategori	50.000.000	69.5 nilai /kategori	50.000.000	69.5 nilai/kategori	150.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Nilai kriteria kualitas pengadaan asn	15 nilai/kategori	0 nilai/ka tegori	0,00	38 nilai/k ategori	197.580.000	40 nilai/k ategori	200.000.000	41 nilai/k ategori	200.000.000	41 nilai/kategori	597.580.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Nilai kriteria kualitas pengelolaan promosi mutasi	11,5 nilai/kategori	0 nilai/ka tegori	0,00	35 nilai/k ategori	217.740.000	35 nilai/k ategori	250.000.000	35 nilai/k ategori	250.000.000	35 nilai/kategori	717.740.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		nilai kriteria kualitas pengembangan karir dimensi manajemen talenta	11,5 nilai/kategori	0 nilai/ka tegori	0,00	72.5 nilai /kategori	491.540.000	72.5 nilai /kategori	600.000.000	72.5 nilai /kategori	700.000.000	72.5 nilai/kategori	1.791.540.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Nilai kriteria kualitas penggajian, penghargaan dan disiplin	11 nilai/kategori	0 nilai/ka tegori	0,00	35 nilai/k ategori	232.890.000	35 nilai/k ategori	250.000.000	35 nilai/k ategori	250.000.000	35 nilai/kategori	732.890.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Nilai kriteria kualitas perencanaan kebutuhan asn	17 nilai/kategori	0 nilai/ka tegori	0,00	40 nilai/k ategori	15.000.000	42 nilai/k ategori	20.000.000	43 nilai/k ategori	25.000.000	43 nilai/kategori	60.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Nilai kriteria kualitas perlindungan dan pelayanan	13 nilai/kategori	0 nilai/ka tegori	0,00	12 nilai/k ategori	550.000.000	14 nilai/k ategori	425.000.000	15 nilai/k ategori	425.000.000	15 nilai/kategori	1.400.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Nilai kriteria kualitas sistem informasi	12 nilai/kategori	0 nilai/ka tegori	0,00	20 nilai/k ategori	372.208.800	22 nilai/k ategori	300.000.000	23 nilai/k ategori	300.000.000	23 nilai/kategori	972.208.800	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang diangkat sesuai dengan formasi	0 nilai/kategori	100 nilai /kategori	1.373.500.000	0 nilai/k ategori	0,00	0 nilai/k ategori	0,00	0 nilai/k ategori	0,00	0 nilai/kategori	1.373.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase capaian pelayanan kepegawaian	100 persen	100 persen	244.000.000	0 persen	0,00	0 persen	0,00	0 persen	0,00	0 persen	244.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase penyelesaian evaluasi kinerja dan penanganan disiplin	100 persen	100 persen	214.000.000	0 persen	0,00	0 persen	0,00	0 persen	0,00	0 persen	214.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase PNS yang terpetakan kompetensinya	- persen	7 persen	1.003.000.000	0 persen	0,00	0 persen	0,00	0 persen	0,00	0 persen	1.003.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	90,03 nilai/kategori	0 nilai/ka tegori	0,00	91,5 nilai /kategori	1.066.000.000	92 nilai/k ategori	1.164.000.000	92 nilai/k ategori	1.184.000.000	92 nilai/kategori	3.414.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,49 nilai/kategori	0 nilai/ka tegori	0,00	83 nilai/k ategori	9.023.558.200	83 nilai/k ategori	9.117.406.063	84 nilai/k ategori	9.074.566.387	84 nilai/kategori	27.215.530.650	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	90,03 poin	91 poin	893.780.000	0 poin	0,00	0 poin	0,00	0 poin	0,00	0 poin	893.780.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	80,49 Nilai/Kategori	81 Nilai/ Kategori	8.969.620.585	0 Nilai/K ategori	0,00	0 Nilai/K ategori	0,00	0 Nilai/K ategori	0,00	0 Nilai/ Kategori	8.969.620.585	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				375.000.000		764.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000		4.539.000.000	

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	0 persen	17 persen	375.000.000	0 persen	0,00	0 persen	0,00	0 persen	0,00	0 persen	375.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
													-	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai kriteria kualitas pengembangan karir dimensi pengembangan kompetensi	17 nilai/kategori	0 nilai/kategori	0,00	30 nilai/kategori	764.000.000	30 nilai/kategori	1.700.000.000	31 nilai/kategori	1.700.000.000	31 nilai/kategori	4.164.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
INSPEKTORAT					16.340.880.730		16.324.501.700		17.445.093.289		17.546.915.765		67.657.391.484	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				16.340.880.730		16.324.501.700		17.445.093.289		17.546.915.765		67.657.391.484	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Level Kapabilitas APIP	3 level	3 level	0,00	3 level	1.199.784.145	3 level	567.840.000	3 level	567.840.000	3 level	2.335.464.145	Inspektorat
		Persentase kejadian kerugian keuangan yang diselesaikn sesuai standar	0 %	0 %	0,00	100 %	33.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	53.000.000	Inspektorat
		Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikn sesuai standar	0 %	0 %	0,00	100 %	85.000.000	100 %	110.500.000	100 %	110.500.000	100 %	306.000.000	Inspektorat
		Persentase perangkat daerah wilayah irban I yang menindaklanjuti LHE SAKIP	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	-	Inspektorat
		Persentase perangkat daerah wilayah irban II yang menindaklanjuti LHE SAKIP	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	-	Inspektorat
		Persentase perangkat daerah wilayah irban III yang menindaklanjuti LHE SAKIP	100 0	100 0	0,00	100 0	0,00	100 0	0,00	100 0	0,00	100 0	-	Inspektorat
		Persentase TLHP yang diverifikasi	100 %	100 %	0,00	100 %	143.121.700	100 %	163.121.700	100 %	163.121.700	100 %	469.365.100	Inspektorat
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	capaian penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	3 level	3 level	0,00	3 level	123.635.600	3 level	80.417.900	3 level	80.417.900	3 level	284.471.400	Inspektorat

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		capaian penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	3 level	3 level	0,00	3 level	93.632.300	3 level	100.500.000	3 level	100.500.000	3 level	294.632.300	Inspektorat
		Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	3 level	3 level	0,00	3 level	15.263.000	3 level	9.183.000	3 level	9.183.000	3 level	33.629.000	Inspektorat
		level MRI	2 level	2 level	0,00	2 level	0,00	3 level	15.000.000	3 level	15.000.000	3 level	30.000.000	Inspektorat
		persentase ASN yang melaporkan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan)	100 %	0 %	0,00	100 %	0,00	100 %	35.500.000	100 %	35.500.000	100 %	71.000.000	Inspektorat
		persentase Perangkat Daerah yang membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM	0 %	0 %	0,00	67,20 %	51.979.000	67,20 %	51.979.000	67,20 %	51.979.000	67,20 %	155.937.000	Inspektorat
		Persentase Perangkat daerah yang menerapkan RADPK	0 %	100 %	0,00	100 %	644.670.900	100 %	415.250.000	100 %	415.250.000	100 %	1.475.170.900	Inspektorat
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tingkat Kota	100 %	0 %	0,00	100 %	56.363.100	100 %	56.363.100	100 %	56.363.100	100 %	169.089.300	Inspektorat
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	% Penanganan Kasus	0 %	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	-	Inspektorat
		Level Pemenuhan Elemen Praktik Budaya dan Hubungan Organisasi	0 level	3 level	0,00	0 level	0,00	0 level	0,00	0 level	0,00	0 level	-	Inspektorat
		Level Pemenuhan Elemen Praktik Peran dan Layanan	0 level	3 level	1.385.279.300	0 level	0,00	0 level	0,00	0 level	0,00	0 level	1.385.279.300	Inspektorat
		Level Pemenuhan Elemen Praktik Profesional	0 level	3 level	0,00	0 level	0,00	0 level	0,00	0 level	0,00	0 level	-	Inspektorat
		Level Pemenuhan Elemen Praktik Struktur Tata Kelola	0 level	3 level	0,00	0 level	0,00	0 level	0,00	0 level	0,00	0 level	-	Inspektorat
		Pemenuhan Elemen Praktik Akuntabilitas Manajemen Kinerja	0 level	3 level	0,00	0 level	0,00	0 level	0,00	0 level	0,00	0 level	-	Inspektorat
		Pemenuhan Elemen Praktik Pengelolaan SDM	0 level	3 level	0,00	0 level	0,00	0 level	0,00	0 level	0,00	0 level	-	Inspektorat

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pemenuhan kebijakan teknis bidang pengawasan	0 %	100 %	15.263.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	15.263.000	Inspektorat
		Skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	0 poin	3 poin	946.990.900	0 poin	0,00	0 poin	0,00	0 poin	0,00	0 poin	946.990.900	Inspektorat
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Level Kapabilitas APIP	3 level	0 level	0,00	3 level	746.143.300	3 level	780.972.000	3 level	780.972.000	3 level	2.308.087.300	Inspektorat
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	0 poin	0 poin	0,00	83.50 poin	1.668.499.921	84.00 poin	1.185.156.799	84.50 poin	1.285.156.800	84.50 poin	4.138.813.520	Inspektorat
		Nilai PM maturitas penyelenggaraan SPIP Inspektorat Daerah	3.072 poin	0 poin	0,00	3.075 poin	29.722.700	3.085 poin	25.000.000	3.10 poin	25.000.000	3.10 poin	79.722.700	Inspektorat
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84.71 poin	0 poin	0,00	84.72 poin	11.433.686.034	84.74 poin	13.838.309.790	84.76 poin	13.840.132.265	84.76 poin	39.112.128.089	Inspektorat
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	0 %	100 %	13.993.347.530	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	13.993.347.530	Inspektorat
KECAMATAN CIHIDEUNG					10.416.612.130		10.283.369.700		11.673.081.510		11.741.214.253		44.114.277.593	
7.01	KECAMATAN				10.416.612.130		10.283.369.700		11.673.081.510		11.741.214.253		44.114.277.593	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	100 %	100 %	877.909.860	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	877.909.860	Kecamatan Cihideung
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100 %	2.549.480.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	2.549.480.000	Kecamatan Cihideung
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	100 %	100 %	2.000.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	2.000.000	Kecamatan Cihideung
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	5.800.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	5.800.000	Kecamatan Cihideung
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Data dan Informasi Kecamatan yang dilaporkan	0 %	0 %	0,00	100 %	12.000.000	100 %	10.000.000	100 %	12.000.000	100 %	34.000.000	Kecamatan Cihideung
		Persentase Permohonan Administratif Bidang Pemerintahan yang terlayani sesuai Standar	0 %	0 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	-	Kecamatan Cihideung

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persetase Sarana dan Prasarana di Kecamatan yang dimanfaatkan	0 %	0 %	0,00	100 %	0,00	100 %	75.000.000	100 %	0,00	100 %	75.000.000	Kecamatan Cihideung
		Presentase Peningkatan Kelurahan berprestasi	0 %	0 %	0,00	100 %	20.000.000	100 %	16.500.000	100 %	20.000.000	100 %	56.500.000	Kecamatan Cihideung
		Presentase permohonan administratif Bidang Pemerintahan yang terlayani sesuai standar	0 %	0 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	-	Kecamatan Cihideung
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase infrastruktur kelurahan yang dimanfaatkan	0 %	0 %	0,00	100 %	683.783.082	100 %	1.874.280.000	100 %	1.967.994.000	100 %	4.526.057.082	Kecamatan Cihideung
		Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum	0 %	0 %	0,00	100 %	1.508.616.918	100 %	818.400.000	100 %	860.970.000	100 %	3.187.986.918	Kecamatan Cihideung
		Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Ekbang	0 %	0 %	0,00	100 %	507.894.944	100 %	818.000.000	100 %	886.700.000	100 %	2.212.594.944	Kecamatan Cihideung
		Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Kesra	0 %	0 %	0,00	100 %	275.661.000	100 %	228.000.000	100 %	287.400.000	100 %	791.061.000	Kecamatan Cihideung
		Presentase bidang kesekretariatan kelurahan yang terpenuhi sesuai standar	0 %	0 %	0,00	100 %	336.000.000	100 %	438.500.000	100 %	415.800.000	100 %	1.190.300.000	Kecamatan Cihideung
		Presentase permohonan administratif Kelurahan yang terlayani sesuai standar	0 %	0 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	-	Kecamatan Cihideung
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase penurunan gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	0,00	100 %	35.800.000	100 %	135.800.000	100 %	137.300.000	100 %	308.900.000	Kecamatan Cihideung
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100 %	100 %	6.981.422.270	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	6.981.422.270	Kecamatan Cihideung

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	- Kategori (Poin)	- Kategori (Poin)	0,00	Sangat Baik (91, 16-92,16) Kategori (Poin)	446.006.056	Sangat Baik (92, 17-93,17) Kategori (Poin)	438.045.000	Sangat Baik (93, 18-94,18) Kategori (Poin)	811.370.000	Sangat Baik (93,18-94,18) Kategori (Poin)	1.695.421.056	Kecamatan Cihideung
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0 Kategori (Poin)	0 Kategori (Poin)	0,00	A (81,50) Kategori (Poin)	6.457.607.700	A (82,00) Kategori (Poin)	6.820.556.510	A (82,50) Kategori (Poin)	6.341.680.253	A (82,50) Kategori (Poin)	19.619.844.463	Kecamatan Cihideung
KECAMATAN CIPEDES					7.991.117.370		8.243.067.500		9.300.641.600		9.354.927.028		34.889.753.498	
7.01	KECAMATAN				7.991.117.370		8.243.067.500		9.300.641.600		9.354.927.028		34.889.753.498	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data dan informasi kecamatan yang dilaporkan	0 %	0 %	0,00	100 %	1.000.000	100 %	1.139.442	100 %	5.000.000	100 %	7.139.442	Kecamatan Cipedes
		Persentase Peningkatan Kelurahan berprestasi	0 %	0 %	0,00	100 %	15.500.000	100 %	14.000.000	100 %	15.000.000	100 %	44.500.000	Kecamatan Cipedes
		Persentase permohonan administratif Bidang Kesra yang terlayani sesuai standar	0 %	0 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	-	Kecamatan Cipedes
		Persentase permohonan administratif Bidang Pemerintahan yang terlayani sesuai standar	0 %	0 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	-	Kecamatan Cipedes
		Persentase sarana dan prasarana di Kecamatan yang dimanfaatkan	0 %	0 %	0,00	100 %	610.000.000	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	100 %	730.000.000	Kecamatan Cipedes
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase bidang sekretariatan kelurahan yang terpenuhi sesuai standar	0 %	0 %	0,00	100 %	241.500.000	100 %	264.000.000	100 %	264.000.000	100 %	769.500.000	Kecamatan Cipedes
		Persentase infrastruktur kelurahan yang dimanfaatkan	0 %	0 %	0,00	100 %	435.790.832	100 %	777.610.000	100 %	777.610.000	100 %	1.991.010.832	Kecamatan Cipedes
		Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum	0 %	0 %	0,00	100 %	1.344.429.168	100 %	1.644.110.000	100 %	1.644.110.000	100 %	4.632.649.168	Kecamatan Cipedes

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Ekbang	0 %	0 %	0,00	100 %	5.000.000	100 %	485.000.000	100 %	135.000.000	100 %	625.000.000	Kecamatan Cipedes
		Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Kesra	0 %	0 %	0,00	100 %	30.000.000	100 %	112.000.000	100 %	144.000.000	100 %	286.000.000	Kecamatan Cipedes
		Persentase permohonan administratif Bidang Ekbang yang terlayani sesuai standar	0 %	0 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	-	Kecamatan Cipedes
		Persentase permohonan administratif Kelurahan yang terlayani sesuai standar	0 %	0 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	-	Kecamatan Cipedes
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	0 %	0 %	0,00	100 %	47.000.000	100 %	139.500.000	100 %	49.500.000	100 %	236.000.000	Kecamatan Cipedes
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	0 %	0 %	0,00	100 %	26.570.500	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	26.570.500	Kecamatan Cipedes
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	100 %	100 %	1.541.293.300	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	1.541.293.300	Kecamatan Cipedes
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	95 %	100 %	2.025.220.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	2.025.220.000	Kecamatan Cipedes
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	100 %	100 %	7.500.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	7.500.000	Kecamatan Cipedes
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	100 %	46.000.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	46.000.000	Kecamatan Cipedes
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Baik (86,12) Kategori (Poin)	Baik (86,13-87,13) Kategori (Poin)	405.788.200	0 Kategori (Poin)	0,00	0 Kategori (Poin)	0,00	0 Kategori (Poin)	0,00	0 Kategori (Poin)	405.788.200	Kecamatan Cipedes
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (74,12) Kategori (Poin)	BB (76,00) Kategori (Poin)	3.965.315.870	0 Kategori (Poin)	0,00	0 Kategori (Poin)	0,00	0 Kategori (Poin)	0,00	0 Kategori (Poin)	3.965.315.870	Kecamatan Cipedes

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	0 Kategori (Poin)	0 Kategori (Poin)	0,00	89,05 (Sangat Baik) Kategori (Poin)	362.522.700	89,06 (Sangat Baik) Kategori (Poin)	446.165.000	89,07 (Sangat Baik) Kategori (Poin)	465.165.000	89,07 (Sangat Baik) Kategori (Poin)	1.273.852.700	Kecamatan Cipedes
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0 Kategori (Poin)	0 Kategori (Poin)	0,00	78 (BB) Kategori (Poin)	5.123.754.300	80 (A) Kategori (Poin)	5.357.117.158	81 (A) Kategori (Poin)	5.795.542.028	81 (A) Kategori (Poin)	16.276.413.486	Kecamatan Cipedes
KECAMATAN TAWANG					9.479.792.645		9.209.712.800		10.321.263.394		10.381.505.926		39.392.274.765	
7.01	KECAMATAN				9.479.792.645		9.209.712.800		10.321.263.394		10.381.505.926		39.392.274.765	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	100 %	100 %	719.146.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	719.146.000	Kecamatan Tawang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	sentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	95 %	100 %	2.183.900.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	2.183.900.000	Kecamatan Tawang
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	3.000.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	3.000.000	Kecamatan Tawang
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	19.000.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	19.000.000	Kecamatan Tawang
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana dan prasarana di Kecamatan yang dimanfaatkan	0 %	0 %	0,00	100 %	0,00	100 %	90.000.000	100 %	20.000.000	100 %	110.000.000	Kecamatan Tawang
		Presentase data dan informasi Kecamatan yang dilaporkan	0 %	0 %	0,00	100 %	6.000.000	100 %	6.000.000	100 %	10.000.000	100 %	22.000.000	Kecamatan Tawang
		Presentase Peningkatan Kelurahan berprestasi	0 %	0 %	0,00	100 %	10.975.000	100 %	10.661.154	100 %	47.549.926	100 %	69.186.080	Kecamatan Tawang
		Presentase permohonan administratif Bidang Kesra yang terlayani sesuai standar	0 %	0 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	-	Kecamatan Tawang
		Presentase permohonan administratif Bidang Pemerintahan yang terlayani sesuai standar	0 %	0 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	-	Kecamatan Tawang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase infrastruktur Kelurahan yang dimanfaatkan	0 %	0 %	0,00	100 %	687.540.000	100 %	946.000.000	100 %	917.965.000	100 %	2.551.505.000	Kecamatan Tawang

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum	0 %	0 %	0,00	100 %	1.202.860.000	100 %	1.359.100.000	100 %	2.190.785.000	100 %	4.752.745.000	Kecamatan Tawang	
		Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Ekbang	0 %	0 %	0,00	100 %	365.900.000	100 %	425.000.000	100 %	42.000.000	100 %	832.900.000	Kecamatan Tawang	
		Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Kesra	0 %	0 %	0,00	100 %	149.000.000	100 %	254.000.000	100 %	130.000.000	100 %	533.000.000	Kecamatan Tawang	
		Presentase bidang kesekretariatan Kelurahan yang terpenuhi sesuai standar	0 %	0 %	0,00	100 %	280.000.000	100 %	330.000.000	100 %	280.000.000	100 %	890.000.000	Kecamatan Tawang	
		Presentase permohonan administratif Bidang Ekbang yang terlayani sesuai standar	0 %	0 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	-	Kecamatan Tawang	
		Presentase permohonan administratif Kelurahan yang terlayani sesuai standar	0 %	0 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	-	Kecamatan Tawang	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	0 %	0 %	0,00	100 %	44.000.000	100 %	135.000.000	100 %	72.000.000	100 %	251.000.000	Kecamatan Tawang	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	0 Kategori (Poin)	0 Kategori (Poin)	0,00	Sangat Baik (90,63) Kategori (Poin)	367.345.000	Sangat Baik (91,13) Kategori (Poin)	389.795.000	Sangat Baik (91,63) Kategori (Poin)	772.500.000	Sangat Baik (91,63) Kategori (Poin)	1.529.640.000	Kecamatan Tawang	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0 Kategori (Poin)	0 Kategori (Poin)	0,00	A (81,50) Kategori (Poin)	6.096.092.800	A (82,00) Kategori (Poin)	6.375.707.240	A (82,15) Kategori (Poin)	5.898.706.000	A (82,15) Kategori (Poin)	18.370.506.040	Kecamatan Tawang	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100 %	100 %	6.554.746.645	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	6.554.746.645	Kecamatan Tawang	
KECAMATAN INDIHIANG						11.075.271.760		10.176.524.800		11.116.143.441		11.181.025.480		43.548.965.481	
7.01	KECAMATAN					11.075.271.760		10.176.524.800		11.116.143.441		11.181.025.480		43.548.965.481	

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelayanan Administratif Bidang Kesra sesuai Standar	0 %	0 %	1.561.006.200	100 %	325.000.000	100 %	107.000.000	100 %	200.000.000	100 %	2.193.006.200	Kecamatan Indihiang
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0 Laporan	1 Laporan	30.000.000	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	30.000.000	Kecamatan Indihiang
		Persentase sarana dan prasarana di Kecamatan yang dimanfaatkan	0 %	0 %	0,00	100 %	10.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	40.000.000	Kecamatan Indihiang
		Presentase data dan informasi kecamatan yang dilaporkan	0 %	0 %	0,00	100 %	7.500.000	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	47.500.000	Kecamatan Indihiang
		Presentase Peningkatan Kelurahan berprestasi	0 %	0 %	0,00	100 %	10.000.000	100 %	15.000.000	100 %	20.000.000	100 %	45.000.000	Kecamatan Indihiang
		Presentase permohonan administratif Bidang Pemerintahan yang terlayani sesuai standar	0 %	0 %	8.099.300	100 %	10.000.000	100 %	20.000.000	100 %	10.000.000	100 %	48.099.300	Kecamatan Indihiang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase infrastruktur kelurahan yang dimanfaatkan	0 %	0 %	808.244.104	100 %	720.341.765	100 %	720.341.765	100 %	720.341.765	100 %	2.969.269.399	Kecamatan Indihiang
		Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum	0 %	0 %	566.835.896	100 %	654.738.235	100 %	954.738.235	100 %	654.738.235	100 %	2.831.050.601	Kecamatan Indihiang
		Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Ekbang	0 %	0 %	24.000.000	100 %	30.000.000	100 %	28.000.000	100 %	32.000.000	100 %	114.000.000	Kecamatan Indihiang
		Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Kesra	0 %	0 %	25.090.000	100 %	75.300.000	100 %	180.000.000	100 %	200.000.000	100 %	480.390.000	Kecamatan Indihiang
		Presentase bidang sekretariatan yang terpenuhi sesuai standar	0 %	0 %	300.000.000	100 %	348.500.000	100 %	396.000.000	100 %	420.000.000	100 %	1.464.500.000	Kecamatan Indihiang
		Presentase permohonan administratif Bidang Ekbang yang terlayani sesuai standar	0 %	0 %	7.000.000	100 %	10.000.000	100 %	75.000.000	100 %	60.000.000	100 %	152.000.000	Kecamatan Indihiang

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Presentase permohonan administratif Kelurahan yang terlayani sesuai standar	0 %	0 %	727.800.000	100 %	727.800.000	100 %	727.800.000	100 %	727.800.000	100 %	2.911.200.000	Kecamatan Indihiang
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase penurunan gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	0 %	0 %	21.560.000	100 %	70.000.000	100 %	125.000.000	100 %	130.000.000	100 %	346.560.000	Kecamatan Indihiang
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	89,73 Poin	89,50 Poin	433.396.280	90 Poin	440.268.284	90,50 Poin	917.323.641	91,50 Poin	1.161.205.118	91,50 Poin	2.952.193.323	Kecamatan Indihiang
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,45 poin	80,50 poin	6.562.239.980	80,75 poin	6.737.076.516	81 poin	6.814.939.800	81,50 poin	6.809.940.362	82 poin	26.924.196.658	Kecamatan Indihiang
KECAMATAN KAWALU					15.348.557.365		15.089.883.100		17.340.773.725		17.441.987.314		65.221.201.504	
7.01	KECAMATAN				15.348.557.365		15.089.883.100		17.340.773.725		17.441.987.314		65.221.201.504	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.180.022.542	0 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	1.180.022.542	Kecamatan Kawalu
		Persentase permohonan registrasi administratif Bidang Kesra yang terlayani sesuai standar	0 %	0 %	0,00	100 %	1.352.340.300	100 %	530.000.000	100 %	635.000.000	100 %	2.517.340.300	Kecamatan Kawalu
		Presentase data dan informasi kecamatan yang dilaporkan	0 %	0 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	-	Kecamatan Kawalu
		Presentase Peningkatan Kelurahan berprestasi	0 %	0 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	-	Kecamatan Kawalu
		Presentase permohonan administratif Bidang Pemerintahan yang terlayani sesuai standar	0 %	0 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	-	Kecamatan Kawalu
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase infrastruktur kelurahan yang dimanfaatkan	0 %	0 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	-	Kecamatan Kawalu
		Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Kesra, ekbang, pemerintahan dan tantribum	0 %	0 %	0,00	100 %	4.071.900.000	100 %	5.932.879.500	100 %	5.983.176.231	100 %	15.987.955.731	Kecamatan Kawalu

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Ekonomi Pembangunan	0 %	0 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	-	Kecamatan Kawalu
		Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	0 %	0 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	-	Kecamatan Kawalu
		Persentase Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	100 %	4.049.414.294	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	4.049.414.294	Kecamatan Kawalu
		Persentase sarana dan prasarana di Kecamatan yang dimanfaatkan	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	-	Kecamatan Kawalu
		Presentase bidang sekretariat yang terpenuhi sesuai standar	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	-	Kecamatan Kawalu
		Presentase Permohonan Administratif Bidang Ekonomi Pembangunan yang Terlayani Sesuai Standar	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	-	Kecamatan Kawalu
		Presentase permohonan administratif yang terlayani sesuai standar	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	-	Kecamatan Kawalu
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase penurunan gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	0 %	0 %	10.000.000	100 %	8.000.000	100 %	120.000.000	100 %	120.000.000	100 %	258.000.000	Kecamatan Kawalu
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	9 Kegiatan	9 Kegiatan	30.073.850	9 Kegiatan	52.500.000	0 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	82.573.850	Kecamatan Kawalu
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kawalu	Sangat Baik (94,05) Kategori	Sangat Baik (94,06-95,05) Kategori	764.948.288	0 Kategori	0,00	0 Kategori	0,00	0 Kategori	0,00	0 Kategori	764.948.288	Kecamatan Kawalu
		Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Kawalu	BB (73,11) Kategori	BB (80,01) Kategori	9.314.098.391	0 Kategori	0,00	0 Kategori	0,00	0 Kategori	0,00	0 Kategori	9.314.098.391	Kecamatan Kawalu
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Sangat Baik (90,15) Kategori (Point)	Sangat Baik (90,15-91,15) Kategori (Point)	0,00	0Sangat Baik (91,16-92,16) Kategori (Point)	413.111.684	Sangat Baik (92,17-93,17) Kategori (Point)	1.000.200.000	Sangat Baik (93,18-94,18) Kategori (Point)	946.116.858	Sangat Baik (95) Kategori (Point)	2.359.428.542	Kecamatan Kawalu

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (73,11) Kategori (Point)	BB (80,01) Kategori (Point)	0,00	BB (81,01) Kategori (Point)	9.192.031.116	BB (82,01) Kategori (Point)	9.757.694.225	BB (83,01) Kategori (Point)	9.757.694.225	BB (83,01) Kategori (Point)	28.707.419.566	Kecamatan Kawalu
KECAMATAN CIBEUREUM					13.947.677.885		13.611.302.700		15.131.396.884		15.219.714.914		57.910.092.383	
7.01	KECAMATAN				13.947.677.885		13.611.302.700		15.131.396.884		15.219.714.914		57.910.092.383	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Permohonan Administratif Bidang Kesra yang terlayani sesuai Standar	0 %	0 %	75.200.000	100 %	82.600.000	100 %	80.500.000	100 %	85.500.000	100 %	323.800.000	Kecamatan Cibeureum
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum	0 %	0 %	3.531.200.000	100 %	3.170.200.000	100 %	4.393.961.145	100 %	4.398.961.145	100 %	15.494.322.290	Kecamatan Cibeureum
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase penurunan gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	0 %	0 %	105.000.000	100 %	120.000.000	100 %	115.000.000	100 %	120.000.000	100 %	460.000.000	Kecamatan Cibeureum
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	0 %	0 %	150.000.000	100 %	110.000.000	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	260.000.000	Kecamatan Cibeureum
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Baik (89,00) Kategori (Poin)	Sangat Baik (90,00) Kategori (Poin)	10.086.277.885	0Sangat Baik (91,00) Kategori (Poin)	10.128.502.700	0Sangat Baik (91,00) Kategori (Poin)	10.541.935.739	0Sangat Baik (91,00) Kategori (Poin)	10.615.253.769	Sangat Baik (91,00) Kategori (Poin)	41.371.970.093	Kecamatan Cibeureum
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0 Kategori (poin)	A (82,65) Kategori (poin)	0,00	A (82,75) Kategori (poin)	0,00	A (80,20) Kategori (poin)	0,00	A (80,25) Kategori (poin)	0,00	A (80,45) Kategori (poin)	-	Kecamatan Cibeureum
KECAMATAN TAMANSARI					12.357.705.840		11.372.518.500		14.148.780.001		14.231.362.752		52.110.367.093	
7.01	KECAMATAN				12.357.705.840		11.372.518.500		14.148.780.001		14.231.362.752		52.110.367.093	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik	100 %	100 %	885.672.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	885.672.000	Kecamatan Tamansari
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	0 %	90 %	3.246.340.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	3.246.340.000	Kecamatan Tamansari
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 %	100 %	10.000.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	10.000.000	Kecamatan Tamansari

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	57.156.200	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	57.156.200	Kecamatan Tamansari
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Data dan Informasi Kecamatan yang dilaporkan	0 %	0 %	0,00	100 %	7.000.000	100 %	6.000.000	100 %	10.000.000	100 %	23.000.000	Kecamatan Tamansari
		Persentase Peningkatan Kelurahan Berprestasi	0 %	0 %	0,00	100 %	25.000.000	100 %	21.000.000	100 %	62.399.969	100 %	108.399.969	Kecamatan Tamansari
		Persentase Permohonan Administratif Bidang Kesra yang terlayani sesuai standar	0 %	0 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	Kecamatan Tamansari
		Persentase Permohonan Administratif Bidang Pemerintahan yang terlayani sesuai standar	0 %	0 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	-	Kecamatan Tamansari
		Persentase Sarana dan Prasarana di Kecamatan yang dimanfaatkan	0 %	0 %	0,00	100 %	48.500.000	100 %	190.000.000	100 %	200.000.000	100 %	438.500.000	Kecamatan Tamansari
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Bidang Kesekretariatan Kelurahan yang terpenuhi standar	0 %	0 %	0,00	100 %	448.000.000	100 %	528.000.000	100 %	448.000.000	100 %	1.424.000.000	Kecamatan Tamansari
		Persentase Infrastruktur Kelurahan yang dimanfaatkan	0 %	0 %	0,00	100 %	1.093.581.600	100 %	1.956.824.000	100 %	1.330.690.000	100 %	4.381.095.600	Kecamatan Tamansari
		Persentase Kelurahan yang Masyarakattnnya Aktif dalam Pembangunan Bidang Ekbang	0 %	0 %	0,00	100 %	82.621.750	100 %	850.000.000	100 %	155.000.000	100 %	1.087.621.750	Kecamatan Tamansari
		Persentase Kelurahan yang Masyarakattnnya aktif dalam pembangunan Bidang Kesra	0 %	0 %	0,00	100 %	59.155.000	100 %	78.500.000	100 %	277.000.000	100 %	414.655.000	Kecamatan Tamansari
		Persentase Kelurahan yang Masyarakattnnya Aktif dalam Pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum	90 %	0 %	0,00	100 %	1.688.358.400	100 %	1.838.216.000	100 %	2.866.630.000	100 %	6.393.204.400	Kecamatan Tamansari
		Persentase permohonan administratif bidang ekbang yang terlayani sesuai standar	0 %	0 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	-	Kecamatan Tamansari

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Permohonan Administratif yang Terlayani Sesuai Standar	0 %	0 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	-	Kecamatan Tamansari
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	0 %	0 %	0,00	100 %	42.000.000	100 %	136.000.000	100 %	82.000.000	100 %	260.000.000	Kecamatan Tamansari
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	0 %	100 %	8.158.537.640	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	8.158.537.640	Kecamatan Tamansari
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	o Kategori (Poin)	0 Kategori (Poin)	0,00	Baik (86) Kategori (Poin)	449.443.250	Baik (87) Kategori (Poin)	467.909.135	Sangat Baik (88,31) Kategori (Poin)	1.517.000.000	Sangat Baik (88,31) Kategori (Poin)	2.434.352.385	Kecamatan Tamansari
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0 Kategori (Poin)	0 Kategori (Poin)	0,00	A (80,00) Kategori (Poin)	7.428.858.500	A (80,75) Kategori (Poin)	8.076.330.866	A (81) Kategori (Poin)	7.232.642.783	A (81) Kategori (Poin)	22.737.832.149	Kecamatan Tamansari
KECAMATAN MANGKUBUMI					12.709.141.730		11.793.351.300		13.553.943.083		13.633.053.926		51.689.490.039	
7.01	KECAMATAN				12.709.141.730		11.793.351.300		13.553.943.083		13.633.053.926		51.689.490.039	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	100 %	100 %	558.231.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	558.231.000	Kecamatan Mangkubumi
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	0 %	100 %	3.393.224.600	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	3.393.224.600	Kecamatan Mangkubumi
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0 %	100 %	30.000.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	30.000.000	Kecamatan Mangkubumi
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	51.200.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	51.200.000	Kecamatan Mangkubumi
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana dan prasarana di Kecamatan yang dimanfaatkan	0 %	0 %	0,00	100 %	0,00	100 %	30.000.000	100 %	22.000.000	100 %	52.000.000	Kecamatan Mangkubumi
		Presentase Data dan Informasi Kecamatan Yang Dilaporkan	0 %	0 %	0,00	100 %	4.500.000	100 %	6.000.000	100 %	6.000.000	100 %	16.500.000	Kecamatan Mangkubumi
		Presentase Peningkatan Kelurahan berprestasi	0 %	0 %	0,00	100 %	32.000.000	100 %	23.750.000	100 %	23.750.000	100 %	79.500.000	Kecamatan Mangkubumi

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Presentase Permohonan Administratif Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Terlayani Sesuai Standar	0 %	0 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	5.000.000	0 %	5.000.000	Kecamatan Mangkubumi
		Presentase permohonan administratif Bidang Pemerintahan yang terlayani sesuai standar	0 %	0 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	-	Kecamatan Mangkubumi
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase infrastruktur kelurahan yang dimanfaatkan	0 %	0 %	0,00	100 %	1.057.572.901	100 %	1.575.580.000	100 %	1.575.580.000	100 %	4.208.732.901	Kecamatan Mangkubumi
		Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum	0 %	0 %	0,00	100 %	1.876.167.099	100 %	2.328.460.000	100 %	2.328.460.000	100 %	6.533.087.099	Kecamatan Mangkubumi
		Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Ekonomi Pembangunan	0 %	0 %	0,00	100 %	245.100.000	100 %	375.000.000	100 %	175.000.000	100 %	795.100.000	Kecamatan Mangkubumi
		Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	0 %	0 %	0,00	100 %	157.500.000	100 %	148.000.000	100 %	135.000.000	100 %	440.500.000	Kecamatan Mangkubumi
		Presentase bidang sekretariatan yang terpenuhi sesuai standar	0 %	0 %	0,00	100 %	448.000.000	100 %	528.000.000	100 %	448.000.000	100 %	1.424.000.000	Kecamatan Mangkubumi
		Presentase Permohonan Administratif Bidang Ekonomi Pembangunan yang Terlayani Sesuai Standar	0 %	0 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	-	Kecamatan Mangkubumi
		Presentase permohonan administratif yang terlayani sesuai standar	0 %	0 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	-	Kecamatan Mangkubumi
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase penurunan gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	0 %	0 %	0,00	100 %	69.500.000	100 %	159.500.000	100 %	69.500.000	100 %	298.500.000	Kecamatan Mangkubumi
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100 %	100 %	8.676.486.130	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	8.676.486.130	Kecamatan Mangkubumi

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	0 Kategori (Poin)	0	0,00	Sangat Baik (90,00) Kategori (Poin)	454.905.000	Sangat Baik (91,00) Kategori (Poin)	512.936.984	Sangat Baik (93,00) Kategori (Poin)	984.200.000	Sangat Baik (93,00) Kategori (Poin)	1.952.041.984	Kecamatan Mangkubumi
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0 Kategori (Poin)	0	0,00	BB (78,00) Kategori (Poin)	7.448.106.300	BB (80,00) Kategori (Poin)	7.866.716.099	A (81,00) Kategori (Poin)	7.860.563.926	A (81,00) Kategori (Poin)	23.175.386.325	Kecamatan Mangkubumi
KECAMATAN BUNGURSARI					11.078.116.830		10.934.032.400		12.523.400.051		12.596.495.882		47.132.045.163	
7.01	KECAMATAN				11.078.116.830		10.934.032.400		12.523.400.051		12.596.495.882		47.132.045.163	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	100 %	100 %	186.176.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	186.176.000	Kecamatan Bungursari
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	2.718.660.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	2.718.660.000	Kecamatan Bungursari
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	100 %	100 %	10.000.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	10.000.000	Kecamatan Bungursari
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	44.500.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	44.500.000	Kecamatan Bungursari
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana dan prasarana di Kecamatan yang dimanfaatkan	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	1.000.000	100 %	1.000.000	100 %	2.000.000	Kecamatan Bungursari
		Presentase Data dan Informasi Kecamatan Yang Dilaporkan	0 %	0 %	0,00	100 %	1.793.100	100 %	1.902.062	100 %	1.893.184	100 %	5.588.346	Kecamatan Bungursari
		Presentase Peningkatan Kelurahan berprestasi	0 %	0 %	0,00	100 %	22.400.000	100 %	21.000.000	100 %	23.000.000	100 %	66.400.000	Kecamatan Bungursari
		Presentase Permohonan Administratif Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Terlayani Sesuai Standar	0 %	0 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	-	Kecamatan Bungursari
		Presentase permohonan administratif Bidang Pemerintahan yang terlayani sesuai standar	0 %	0 %	0,00	100 %	1.706.900	100 %	1.800.000	100 %	1.800.000	100 %	5.306.900	Kecamatan Bungursari
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase infrastruktur kelurahan yang dimanfaatkan	0 %	0 %	0,00	100 %	901.659.000	100 %	1.335.068.238	100 %	1.335.068.238	100 %	3.571.795.476	Kecamatan Bungursari

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Kesra, ekbang, pemerintahan dan tantribum	0 %	0 %	0,00	100 %	1.408.901.000	100 %	1.577.692.232	100 %	1.577.692.232	100 %	4.564.285.464	Kecamatan Bungursari
		Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Ekonomi Pembangunan	0 %	0 %	0,00	100 %	319.025.000	100 %	471.500.000	100 %	473.000.000	100 %	1.263.525.000	Kecamatan Bungursari
		Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	0 %	0 %	0,00	100 %	218.500.000	100 %	181.000.000	100 %	181.000.000	100 %	580.500.000	Kecamatan Bungursari
		Presentase bidang kesekretariatan Kelurahan yang terpenuhi sesuai standar	0 %	0 %	0,00	100 %	402.000.000	100 %	462.000.000	100 %	472.500.000	100 %	1.336.500.000	Kecamatan Bungursari
		Presentase Permohonan Administratif Bidang Ekonomi Pembangunan yang Terlayani Sesuai Standar	0 %	0 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	-	Kecamatan Bungursari
		Presentase permohonan administratif yang terlayani sesuai standar	0 %	0 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	-	Kecamatan Bungursari
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase penurunan gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	0 %	0 %	0,00	100 %	42.000.000	100 %	135.000.000	100 %	135.000.000	100 %	312.000.000	Kecamatan Bungursari
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100 %	100 %	8.118.780.830	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	8.118.780.830	Kecamatan Bungursari
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	0 Kategori (Poin)	0 Kategori (Poin)	0,00	Sangat Baik (90,63) Kategori (Poin)	412.895.000	Sangat Baik (91,13) Kategori (Poin)	436.205.000	Sangat Baik (91,13) Kategori (Poin)	492.205.000	Sangat Baik (91,13) Kategori (Poin)	1.341.305.000	Kecamatan Bungursari
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0 Kategori (Poin)	0 Kategori (Poin)	0,00	A (81,50) Kategori (Poin)	7.203.152.400	A (82,00) Kategori (Poin)	7.899.232.519	A (82,00) Kategori (Poin)	7.902.337.228	A (82,00) Kategori (Poin)	23.004.722.147	Kecamatan Bungursari
KECAMATAN PURBARATU					10.649.544.945		9.492.252.900		10.539.402.871		10.600.918.626		41.282.119.342	
7.01	KECAMATAN				10.649.544.945		9.492.252.900		10.539.402.871		10.600.918.626		41.282.119.342	

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana dan prasarana di Kecamatan yang dimanfaatkan	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	1.000.000	100 %	12.000.000	100 %	13.000.000	Kecamatan Purbaratu
		Presentase data dan informasi kecamatan yang dilaporkan	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	7.000.000	100 %	7.000.000	100 %	14.000.000	Kecamatan Purbaratu
		Presentase Peningkatan Kelurahan berprestasi	0 %	0 %	0,00	100 %	31.980.000	100 %	39.700.000	100 %	40.000.000	100 %	111.680.000	Kecamatan Purbaratu
		Presentase permohonan administratif Bidang kesra yang terlayani sesuai standar	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	7.000.000	100 %	7.000.000	100 %	14.000.000	Kecamatan Purbaratu
		Presentase permohonan administratif Bidang Pemerintahan yang terlayani sesuai standar	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	20.000.000	Kecamatan Purbaratu
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase infrastruktur kelurahan yang dimanfaatkan	0 %	0 %	0,00	100 %	734.502.950	100 %	1.242.414.950	100 %	1.240.530.000	100 %	3.217.447.900	Kecamatan Purbaratu
		Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum	0 %	0 %	0,00	100 %	1.236.677.050	100 %	1.421.001.897	100 %	2.058.220.000	100 %	4.715.898.947	Kecamatan Purbaratu
		Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Ekbang	0 %	0 %	0,00	100 %	235.816.500	100 %	42.000.000	100 %	42.000.000	100 %	319.816.500	Kecamatan Purbaratu
		Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Kesra	0 %	0 %	0,00	100 %	131.652.100	100 %	90.000.000	100 %	90.000.000	100 %	311.652.100	Kecamatan Purbaratu
		Presentase bidang kesekretariatan Kelurahan yang terpenuhi sesuai standar	0 %	0 %	0,00	100 %	336.000.000	100 %	364.000.000	100 %	300.000.000	100 %	1.000.000.000	Kecamatan Purbaratu
		Presentase permohonan administratif Kelurahan yang terlayani sesuai standar	0 %	0 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	-	Kecamatan Purbaratu
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase penurunan gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	0 %	0 %	0,00	100 %	38.853.000	100 %	72.000.000	100 %	72.000.000	100 %	182.853.000	Kecamatan Purbaratu

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	100 %	0,00	100 %	9.500.000	100 %	20.000.000	100 %	50.000.000	100 %	79.500.000	Kecamatan Purbaratu
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	100 %	100 %	937.812.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	937.812.000	Kecamatan Purbaratu
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	100 %	2.323.215.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	2.323.215.000	Kecamatan Purbaratu
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase penurunan gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	6.550.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	6.550.000	Kecamatan Purbaratu
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	48.155.000	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	48.155.000	Kecamatan Purbaratu
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	(86,14) Baik Kategori	(86,14) Baik Kategori	0,00	(90,00) Sangat Baik Kategori	6.679.743.300	(91,00) Sangat Baik Kategori	7.148.840.413	(92,00) Sangat Baik Kategori	6.531.668.626	(92,00) Sangat Baik Kategori	20.360.252.339	Kecamatan Purbaratu
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	(80,01) A Kategori	(80,50) A Kategori	0,00	(80,50) A Kategori	57.528.000	(80,75) A Kategori	74.445.611	(81,50) A Kategori	140.500.000	(81,50) A Kategori	272.473.611	Kecamatan Purbaratu
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100 %	100 %	7.333.812.945	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	7.333.812.945	Kecamatan Purbaratu
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					42.452.244.080		59.967.153.730		20.000.000.000		20.116.748.981		142.536.146.791	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				42.452.244.080		59.967.153.730		20.000.000.000		20.116.748.981		142.536.146.791	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat terbina yang memiliki rencana aksi tindak lanjut di bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	0 persen	0 persen	0,00	1 persen	6.682.749.000	0,33 persen	3.670.000.000	0,1 persen	2.590.000.000	1,43 persen	12.942.749.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/ Urusan/ Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat terbina yang memiliki rencana aksi tindak lanjut di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi lembaga pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	0 persen	0 persen	0,00	0,55 persen	5.718.314.700	0,2 persen	2.970.030.000	0,3 persen	3.386.530.000	1,05 persen	12.074.874.700	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas terbina yang memiliki rencana aksi tindak lanjut bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi, sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	0 Persen	0 Persen	0,00	65 Persen	4.445.005.880	65 Persen	5.040.000.000	65 Persen	4.015.000.000	65 Persen	13.500.005.880	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase Ormas yang terkendali	58 Persen	0 Persen	0,00	65 Persen	8.578.300	65 Persen	30.000.000	65 Persen	320.000.000	65 Persen	358.578.300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase masyarakat terbina yang memiliki rencana aksi tindak lanjut di bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	0 persen	0 persen	0,00	0,48 persen	3.247.750.000	0,01 persen	250.000.000	0,05 persen	1.050.000.000	0,54 persen	4.547.750.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi ancaman dan gangguan yang terkendali	0 %	0 %	0,00	70-80 %	36.569.597.650	70-80 %	4.060.000.000	70-80 %	4.550.000.000	70-80 %	45.179.597.650	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Capaian Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi pancasila dan Karakter kebangsaan	100 Persen	100 Persen	4.305.000.000	0 Persen	0,00	0 Persen	0,00	0 Persen	0,00	100 Persen	4.305.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Capaian pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	100 persen	100 persen	180.000.000	0 persen	0,00	0 persen	0,00	0 persen	0,00	100 persen	180.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan konflik sosial	100 persen	100 persen	25.008.016.100	0 persen	0,00	0 persen	0,00	0 persen	0,00	100 persen	25.008.016.100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase parpol yang dibina	100 persen	100 persen	4.395.535.000	0 persen	0,00	0 persen	0,00	0 persen	0,00	100 persen	4.395.535.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang dibina	71 Persen	71 Persen	5.487.000.000	0 Persen	0,00	0 Persen	0,00	0 Persen	0,00	71 Persen	5.487.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	BB (87,02) Poin	0 Poin	0,00	BB (86,5) Poin	809.759.000	BB (86,8) Poin	1.337.449.000	BB (86,9) Poin	1.444.200.000	BB (86,9) Poin	3.591.408.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (70-80) Kategori (Poin)	0 Kategori (Poin)	0,00	BB (70-80) Kategori (Poin)	2.485.399.200	BB (70-80) Kategori (Poin)	2.642.521.000	BB (70-80) Kategori (Poin)	2.761.018.981	BB (70-80) Kategori (Poin)	7.888.939.181	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	3.076.692.980	0 Persen	0,00	0 Persen	0,00	0 Persen	0,00	100 Persen	3.076.692.980	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah pada akhir periode perencanaan. Indikator ini merupakan akumulasi pencapaian indikator *outcome* atau *impact* dari pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah. Penetapan indikator dan target kinerja didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja pemerintahan daerah masa lalu, dan proyeksi yang disertai perhitungan atas hasil pelaksanaan program dan kegiatan kedepan dalam kurun waktu 2023– 2026.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penetapan indikator kinerja daerah dibagi kedalam dua kelompok, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

IKU yang termuat dalam RPD adalah IKU Daerah yang merupakan gambaran ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan IKD merupakan indikator kinerja pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan disajikan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 8.1.
Penetapan Target Indikator Makro Kota Tasikmalaya

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2021)	Target Tahun 2022	TAHUN								Target Akhir Periode RPD
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Point	73,31	73,95	73,95	75,47	74,28	75,65	74,62	75,86	74,96	76,08	76,08
	Indeks Pendidikan	Point	69,12	68,50	70,04	69,27	70,51	69,33	70,99	69,42	71,49	65,57	65,57
	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,52	9.70	9,76	9,54	9,89	9,55	10,02	9,56	10,16	9,57	9,57
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,46	13,54	13,50	13,49	13,52	13,50	13,53	13,52	13,55	13,56	13,56
	Indeks Kesehatan	Point	80,52	81,65	80,88	84,74	81,06	85,02	81,25	85,29	81,44	85,58	85,58
	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,34	73,15	72,57	75,08	72,69	75,26	72,81	75,44	72,94	75,63	75,63
	Indeks Daya Beli	Point	70,78	59,63	71,40	73,22	71,72	73,44	72,03	73,72	72,34	73,96	73,96
	Pengeluaran per Kapita	Juta Rp	10,213	9,86	10,424	11,06	10,531	11,141	10,639	11,244	10,748	11.333	11.333
2.	PDRB Perkapita	Juta Rp	31,56	32,46	33,40	36,95	34,35	37,63	35,33	39,01	36,26	40,09	40,09
3.	PDRB ADH Berlaku	Triliyun RP	22,85	23,61	24,40	27,41	25,21	28,93	26,02	30,45	26,83	32,05	32,05
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,57	5,0	5,15	5,96	5,69	5,69	5,81	5,43 - 6,17	5,98	5,42 - 6,19	5,42 - 6,19
5.	Inflasi	%	1,17	2,00	2,47	2,84	2,65	2,65	2,83	2,83	2,96	2,5	2,5
6.	Indeks gini	Point	0,414	0,39	0,390	0,428	0,380	0,400	0,370	0,355 - 0,405	0,360	0,35-0,39	0,35-0,39
7.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,81	0,20	0,71	1,27	0,61	0,61	0,51	0,51	0,41	0,41	0,41
8.	Tingkat Kemiskinan	%	13,13	11,50	12,33	11,53	11,33	11,33	10,73	9,2 - 10,16	10,20	8,80 - 9,75	8,80 - 9,75
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,66	7,02	7,35	6,55	7,18	6,50	6,84	5,97 - 6,49	6,53	5,74-6,25	5,74-6,25
10.	Penurunan emisi GRK Kumulatif	Ton CO2eq	-	-	-	-	-	-	-	70.105,43	-	106.737,04	106.737,04



Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Tasikmalaya

NO.	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	Kondisi Awal (2021)	Target Tahun 2022	Target								
						2023		2024		2025		2026		Target Akhir Periode RPD
						Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	Tingkat kemiskinan	(%)	Persentase Tingkat Kemiskinan yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	13,13	11,50	12,33	11,53	11,33	11,33	10,73	9,2 - 10,16	10,20	8,80 - 9,75	8,80 - 9,75
2	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	Poin	Capaian indikator SPM bidang sosial/jumlah total SPM bidang sosial	100	100	90	100	90	100	92	100	94	100	100
3	Rata-rata Lama Sekolah	(%)	Persentase Rata-rata Lama Sekolah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	9,52	9,70	9,76	9,54	9,89	9,55	10,02	9,56	10,16	9,57	9,57
4	Harapan Lama Sekolah	Poin	Harapan Lama Sekolah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	13,46	13,54	13,50	13,49	13,52	13,50	13,53	13,52	13,55	13,56	13,56
5	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Poin	Capaian indikator SPM bidang pendidikan/jumlah total SPM bidang Pendidikan	69,12	100	72	95,73	75	95,80	77	96,02	79	97,00	97,00
6	Usia Harapan Hidup	Tahun	Usia Harapan Hidup yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	72,34	73,15	72,57	75,08	72,69	75,26	72,81	75,44	72,94	75,63	75,63
7	Prevalensi Stunting	%	Hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI)	-	-	-	-	-	24,53	-	23,73	-	22,53	22,53



NO.	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	Kondisi Awal (2021)	Target Tahun 2022	Target								
						2023		2024		2025		2026		Target Akhir Periode RPD
						Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
8	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Poin	Capaian indikator SPM bidang Kesehatan/jumlah total SPM bidang Kesehatan	48,09	100	75	98,21	80	100	85	100	90	100	100
9	Laju Pertumbuhan Penduduk	Tahun	Laju Pertumbuhan Penduduk yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	0,81	0,20	0,71	1,27	0,61	0,61	0,51	0,51	0,41	0,41	0,41
10	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	Indeks Pemberdayaan Gender yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	59,51	62,96	60,00	59,81	60,10	60,10	60,20	60,15	60,30	60,20	60,20
11	Indeks Pembangunan Gender	Poin	Indeks Pembangunan Gender yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	91,74	91,54	91,84	92,96	91,94	93,0	92,04	93,40	92,24	93,75	93,75
12	Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Skor/Nilai	Hasil evaluasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	763	-	863	863
13	Indeks ketentraman dan ketertiban umum	Poin	Hasil survey indeks ketentraman dan ketertiban umum	-	-	-	-	-	-	-	61	-	63	63
14	Indeks Pencapaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum	Poin	Capaian indikator SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat/ jumlah total SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	98,47	100	100	99,67	100	100	100	100	100	100	100



NO.	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	Kondisi Awal (2021)	Target Tahun 2022	Target								
						2023		2024		2025		2026		Target Akhir Periode RPD
						Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
15	Indeks Resiko Bencana	Poin	Tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana, dan dikeluarkan oleh BNPB	Sedang (117,37)	-	Sedang (117,15)	Sedang (114,69)	Sedang (117,15)	Sedang (117,15)	Sedang (117,15)	Sedang (114,15)	Sedang (117,15)	Sedang (112,85)	Sedang (112,85)
16	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	3,57	5,0	5,15	5,96	5,69	5,69	5,81	5,43 - 6,17	5,98	5,42 - 6,19	5,42 - 6,19
17	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	Persentase PDRB Per kapita berdasarkan hasil penghitungan dikeluarkan oleh BPS	31,56	32,46	33,40	36,95	34,35	37,63	35,33	39,01	36,26	40,09	40,09
18	Pengeluaran Per Kapita	Juta Rupiah	Pengeluaran Per Kapita berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	10,213	9,86	10,424	11,063	10,531	11,141	10,639	11,244	10,748	11.333	11.333
19	Indeks Gini	Poin	Indeks Gini berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	0,414	0,39	0,390	0,428	0,380	0,400	0,370	0,355 - 0,405	0,360	0,35-0,39	0,35-0,39
20	Inflasi	%	Inflasi berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	1,17	2,00	2,47	2,84	2,65	2,65	2,83	2,83	2,96	2,5	2,5
21	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Tingkat Penangguran terbuka berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	7,66	7,02	7,35	6,55	7,18	6,50	6,84	5,97 - 6,49	6,53	5,74-6,25	5,74-6,25



Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

NO.	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	Kondisi Awal (2021)	Target Tahun 2022	Target								
						2023		2024		2025		2026		Target Akhir Periode RPD
						Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
22	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adh Berlaku	(Milyar Rupiah)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	7.573,28	-	8.002,90	8.968,07	8.283,45	9.208,07	8.564,01	9.283,45	8.844,56	9.358,83	9.358,83
23	Indeks kemantapan jalan	Poin	Indeks dari Jalan dalam kondisi mantap/total panjang jalan x 100%	-	-	59,23	65,47	62,05	78,93	66,87	81,90	73,67	82,93	82,93
24	Indeks kawasan permukiman layak huni	Poin	Indeks dari kawasan permukiman layak huni/ total kawasan permukiman x 100%	-	-	15,88	23,33	31,77	38,06	48,57	47,46	65,36	54,51	54,51
25	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	poin	Capaian indikator SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/jumlah total SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	58,71	100	91,07	98,22	94,74	98,74	97,57	100	100	100	100
26	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan rakyat	Poin	Jumlah unit penyediaan/rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program yang ditangani terhadap target	100	100	100	99,29	100	100	100	100	100	100	100
27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	-	74,40	57,93	57,02	58,15	58,15	58,37	61,62	58,59	61,79	61,79
28	Persentase Pengelolaan Sampah	%	Persentase sampah yang dikelola+persentase sampah pengurangan	77,86	83,45	99	82,17	99	99	100	100	100	100	100



NO.	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	Kondisi Awal (2021)	Target Tahun 2022	Target								
						2023		2024		2025		2026		Target Akhir Periode RPD
						Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
29	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori/Poin	Hasil survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah	Baik (83,32)	Baik (77-88)	Baik (83,32 - 85,80)	Baik 87,12	Baik (83,32 - 85,80)	Baik (87,12 - 88,30)	Baik (85,80 - 88,30)	-	Baik (85,80 - 88,30)	-	Baik (87,12 - 88,30)
30	Indeks Inovasi Daerah	Kategori/Poin	Indeks inovasi yang dihitung dan dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri	Inovatif (36,43)	-	Inovatif (46,43)	Inovatif (46,7)	Inovatif (52,43)	Inovatif (47,20)	Sangat Inovatif (60,01)	Inovatif (53,20)	Sangat Inovatif (62,01)	Sangat Inovatif (60,20)	Sangat Inovatif (60,20)
31	Indeks SPBE	Kategori/Poin	Capaian Indeks SPBE yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB	Baik (2,68)	Sangat Baik (3,00)	Baik (2,9)	Baik (3,25)	Baik (3,0)	Baik (3,30)	Baik (3,1)	-	Baik (3,2)	-	Baik (3,30)
32	Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah	(Opini)	Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	WTP	-	WTP
33	Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori/Poin	Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh KemenPANRB	BB (70,81)	81-90 (A)	BB (72,50-75,00)	BB (71,83)	BB (72,50-75,00)	BB (72,50-75,00)	BB (72,50-75,00)	-	BB (72,50-75,00)	-	BB (72,50-75,00)
34	Nilai Evaluasi LPPD	Kategori	Hasil Evaluasi LPPD yang dikeluarkan oleh Kemendagri	Sangat Tinggi	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)	Sangat Tinggi	3,3348 (Sangat Tinggi)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	-	Sangat Tinggi	-	Sangat Tinggi
35	Tingkat Maturitas SPIP	Level	Hasil penilaian SPIP oleh BPKP	2,83	3	3	3	3	3	3	-	3	-	3
36	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	Hasil evaluasi reformasi birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB	-	-	-	-	-	78,34	-	78,40	-	78,50	78,50



Tabel 8.3.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	2021			2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD	
				Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT													
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi													
1.1.	Pertumbuhan PDRB	%	Angka Pertumbuhan PDRB yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	3,57	5,15	5,96	5,69	5,69	5,81	5,43 - 6,17	5,98	5,42 - 6,19	5,42 - 6,19
1.2.	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	2,97	4,59	5,01	5,86	5,86	6,53	5,59 - 6,35	7,28	5,58 – 6,37	5,58 – 6,37
1.3.	Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian	%	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	1,91	3,71	3,35	4,60	4,60	5,53	4,39 – 4,99	6,41	4,38 – 5,00	4,38 – 5,00
1.4.	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	%	Persentase Pertumbuhan PDRB kategori Pertanian yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	0,28	0,45	4,02	0,56	0,56	0,62	0,53 – 0,61	0,68	0,53 -0,61	0,53 -0,61
1.5.	Laju inflasi Kota	%	Angka Inflasi daerah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	1,17	2,47	2,84	2,65	2,65	2,83	2,83	2,96	2,5	2,5
1.6.	• Indeks Gini	point	Indeks gini yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	0,414	0,390	0,428	0,380	0,400	0,370	0,355 - 0,405	0,360	0,35-0,39	0,35-0,39
1.7.	• Indeks Pembangunan Manusia/ IPM	point	Angka IPM yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	73,95	73,95	75,47	74,28	75,65	74,62	75,86	74,96	76,08	76,08
1.7.1	• Indeks Kesehatan	point	Indeks kesehatan yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	80,52	80,88	84,74	81,06	85,02	81,25	85,29	81,44	85,58	85,58
1.7.2	• Indeks Pendidikan	point	Indeks kesehatan dan dikeluarkan oleh BPS	69,12	70,04	69,27	70,51	69,33	70,99	69,42	71,49	65,57	65,57
1.7.3	• Indeks Daya Beli	point	Indek daya beli yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	70,78	71,40	73,22	71,72	73,44	72,03	73,72	72,34	73,96	73,96
Fokus Kesejahteraan Masyarakat													
1.	Pendidikan												
1.1.	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	Angka RLS yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	9,52	9,76	9,54	9,89	9,55	10,02	9,56	10,16	9,57	9,57



Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	2021			2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD	
				Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
2.	Kesehatan												
2.1.	Angka Kematian Bayi (per 1.000)	Point	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu /Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu x 1.000	8,5	8,6	7,87	8,2	7.87	7,7	7.41	7,3	6.96	6.96
2.2.	Angka Kematian Ibu (per 100.000)	Point	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun/ Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama x 100.000	312,5	303,8	192,22	286,5	192.2	269,1	173.9	251,7	155.6	155.6
2.3.	Persentase masyarakat miskin mendapat jaminan kesehatan	%	Realisasi jaminan kesehatan daerah masyarakat miskin terhadap masyarakat miskin yang ditetapkan oleh pemerintah x 100	-	84	98,39	86	100	88	100	90	100	100
2.4.	Prevalensi Stunting	%	Jumlah kasus stunting/Jumlah anak x 100	14,8	14,8	10,73	13,8	10.85	12,8	10.75	11,8	10.65	10.65
ASPEK PELAYANAN UMUM													
Fokus Layanan Urusan Wajib													
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar												
1.	Pendidikan												
1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	Jumlah Siswa TK/RA/KB/SPS/TPA dibagi Penduduk usia 3-6 thn X 100	25,77	25,78	42,53	25,79	42,55	25,80	42,60	25,81	42,70	42,70
1.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	Jumlah Siswa SD/MI/Paket A usia 7-12 thn dibagi Penduduk usia 7-12 thn X 100	89,78	89,79	97,94	89,80	97,94	89,82	97,95	89,83	97,95	97,95
1.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	Jumlah Siswa SMP/MTs/Paket B usia 13-15 thn dibagi Penduduk usia 13-15 thn X 100	84,84	78,65	84,73	78,66	84,74	78,68	84,75	79,25	84,75	84,75
1.4	Tingkat Partisipasi Pendidikan Kesetaraan	%	Jumlah Warga Belajar yang lulus dan mendapatkan sertifikat / Jumlah seluruh Warga Belajar yang mengikuti pelatihan x 100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.5	Nilai Rapor Pendidikan	%	Nilai Mutu dari Rapor Pendidikan	68,19	-	-	-	68,20	-	68,21	-	68,21	68,21
1.6	Indeks Penapaian SPM Bidang Pendidikan	%	Nilai dari E-SPM Kemendagri	-	72	95,73	75	95,80	77	96,02	79	97,00	97,00
1.7	Persentase Pendidik yang memiliki sertifikat pendidik	%	Persentase Pendidik PAUD + Pendidikan Dasar Bersertifikat Pendidik	51,45	51,55	38,02	51,65	-	51,85	-	51,89	-	51,89
1.8	Persentase PAUD Terakreditasi	%	Jumlah PAUD Terakreditasi B dibagi Jumlah seluruh PAUD	-	35,76	63,45	35,79	-	35,83	-	35,87	-	35,87



Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD
					Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
	B												
1.9	Persentase SD Terakreditasi A	%	Jumlah SD Terakreditasi A dibagi Jumlah seluruh SD	-	60,26	59,73	60,32	-	60,38	-	60,44	-	60,44
1.10	Persentase SMP Terakreditasi A	%	Jumlah SMP Terakreditasi A dibagi Jumlah seluruh SMP	-	58,19	55,55	58,25	-	58,31	-	58,37	-	58,37
1.11	Persentase Non Formal /Kesetaraan Terakreditasi B	%	Jumlah Non Formal/kesetaraan Terakreditasi B dibagi Jumlah seluruh Non Formal/kesetaraan	-	51,85	61,90	51,90	=	51,95	-	52,01	-	52,01
1.12	Persentase Sarana Prasarana dalam kondisi baik	%	Jumlah Ruang Kelas SD,SMP,PAUD dan Non Formal/Kesetaraan Kondisi Baik dibagi seluruh Ruang Kelas SD,SMP,PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	-	67,38	97,97	67,45	-	67,52	-	67,59	-	67,59
1.13	Persentase capaian pengembangan kurikulum	%	Jumlah peserta yang mendapatkan sertifikat pelatihan kurikulum dibagi Jumlah seluruh peserta Pelatihan Penyusunan Kurikulum	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100
1.14	Persentase Capaian Kualitas Pendidik PAUD dan Pendidikan Dasar	%	Jumlah pendidik PAUD dan Pendidikan Dasar yang bersertifikat pendidikan dibagi seluruh pendidik PAUD dan Pendidikan Dasar	51,45	51,45	80,43	51,50	-	51,55	-	51,61	-	51,61
1.15	Persentase Siswa Prestasi yang dicapai ke Tingkat Provinsi jenjang Pendidikan Dasar	%	Jumlah prestasi siswa Pendidikan Dasar yang diraih di tingkat provinsi dibagi Jumlah peserta yang mengikuti perlombaan ke tingkat provinsi	30	25,03	38,21	25,05	-	25,08	-	25,10	-	25,10
1.16	Angka Putus Sekolah SD	%	Jumlah Siswa SD/MI/Paket A yang putus sekolah dibagi Jumlah seluruh Siswa SD/MI/Paket A	-	-	-	-	0,10	-	0,10	-	0,10	0,10
1.17	Angka Putus Sekolah SMP	%	Jumlah Siswa SMP/MTs/Paket B yang putus sekolah dibagi Jumlah Siswa SMP/MTs/Paket B	-	-	-	-	59,73	-	59,74	-	59,75	59,75
1.18	Nilai Mutu PAUD/PNF	%	Nilai Mutu dari Rapor Pendidikan	-	-	-	-	0,50	-	0,50	-	0,51	0,51
1.19	Nilai Mutu Sekolah Dasar	%	Nilai Mutu dari Rapor Pendidikan	-	-	-	-	55,56	-	55,57	-	55,58	55,58
1.20	Nilai Mutu Sekolah Menengah Pertama	%	Nilai Mutu dari Rapor Pendidikan	-	-	-	-	63,45	-	63,46	-	63,47	63,47
1.21	Persentase sekolah yang menggunakan kurikulum muatan local	%	Jumlah sekolah yang menggunakan kurikulum muatan local di bagi Seluruh sekolah	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
1.22	Persentase guru bersertifikat pendidik	%	Jumlah guru bersertifikat pendidik di bagi Seluruh guru	-	-	-	-	47,40	-	47,41	-	47,42	47,42
1.23	Persentase prestasi siswa pendidikan dasar	%	Jumlah Peserta Didik yang berprestasi di tingkat Provisi dibagi jumlah Peserta Didik yang mengikuti Perlombaan	-	-	-	-	25,01	-	25,03	-	25,04	25,04



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	2021			2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD	
				Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
2.	Kesehatan												
2.1	Angka Kematian Bayi (per 1.000)	Point	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu /Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu x 1.000	8,5	8,4	7,87	8,2	7.87	7,7	7.41	7,3	6.96	6.96
2.2	Angka Kematian Ibu (per 100.000)	Point	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun/ Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama x 100.000	312,5	303,8	192,22	286,5	192.2	269,1	173.9	251,7	155.6	155.6
2.3	Prevalensi Stunting	%	Jumlah kasus stunting/Jumlah anak x 100	14,8	14,8	10,73	13,8	10.85	12,8	10.75	11,8	10.65	10.65
2.4	Indeks Pencapaian SPM kesehatan	%	Rata-rata Nilai Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima	65,58	75	98,12	80	100	85	100	90	100	100
2.5	Indeks Pencapaian SPM kesehatan masyarakat	%	Rata-rata Nilai Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima Bidang Kesehatan masyarakat	-	75	99,68	80	-	85	-	90	-	75
2.6	Persentase SPM Kesmas	%	Rata-rata nilai capaian SPM Kesehatan masyarakat	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
2.7	Indeks Pencapaian SPM Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	%	Rata-rata Nilai Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima Bidang P2P (SPM PM dan PTM)	-	75	96,75	80	-	85	-	90	-	75
2.8	Persentase SPM PM dan PTM	%	Rata-rata nilai capaian SPM PM dan PTM	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
2.9	Indeks Keluarga Sehat	Poin	Jumlah keluarga sehat yang ada di wilayah kota tasikmalaya / jumlah seluruh keluarga	0,16	0,30	0,12	0,40	0.12	0,50	0.13	0,60	0.14	0.14
2.10	Persentase tenaga kesehatan yang tersertifikasi	%	Jmlah tenaga kesehatan yang tersertifikasi dibagi jumla tenaga kesehatan dikali 100	88,1	91	86,21	94	94	97	97	100	100	100
2.11	Persentase sarana kefarmasian dan Makanan Minuman Sesuai Standar	%	Jumlah sarana kefarmasian dan makanan minuman sesuai standar dibagi jumlah sarana kefarmasian dan makanan minuman yang diperiksa	66,60	77	84,01	80	-	83	-	87	-	87
2.12	Persentase TPM, Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang memenuhi persyaratan HS	%	Rata-rata Nilai Persentase TPM, Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang memenuhi persyaratan Higiene Sanitasi	-	-	-	-	79.8	-	83.16	-	87	87
2.13	Persentase Keluarga berperilaku Hidup Bersih dan	%	Jumlah Keluarga ber-PHBS dibagi jumlah keluarga dikali 100	25,77	25,78	48,57	25,79	55	25,90	60	26,81	65	65



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	2021			2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD	
				Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	Sehat (PHBS)												
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
3.1	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik (bobot 70%) + panjang drainase dalam kondisi baik (bobot 30%) / total panjang jalan dan jembatan X 100%	52,88	53,49	67,69	57,34	-	64,43	-	74,75	-	53,49
3.2	Prosentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Teknis	%	rosentase bangunan gedung kewenangan pemda yang ditangani (70%) + Persentase Kawasan/ Lingkungan Yang di Tingkatkan Sesuai dengan RTBL nya (10%) + persentase jumlah penyedia jasa yang mendapatkan pembinaan (20%)	-	32,86	35,32	47,86	-	61,19	-	76,19	-	32,86
3.3	Persentase Permukiman yang Layak Huni	%	Permukiman yang Layak Huni/ Luas Permukimanx 100%	-	25	27,13	50	-	75	-	100	-	25
3.4	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	Target capaian RT yang berakses SPALD dan RT yang berakses Air Minum tahun exsisting / target pertahun capaian RT yang berakses SPALD dan RT yang berakses Air Minum (100%)	-	100	98,22	100	-	100	-	100	-	100
3.5	Persentase panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhabilitasi dan direkonstruksi	%	panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhabilitasi dan direkonstruksi / total panjang jalan dan jembatan X 100%	68,25	68,66	89,23	73,69	-	83,35	-	97,63	-	68,66
3.6	Persentase Drainase Jalan dalam kondisi baik	%	Panjang drainase dalam kondisi baik / total panjang drainase	17,01	18,10	17,43	19,19	-	20,27	-	21,36	-	18,10
3.7	Prosentase bangunan gedung kewenangan pemda yang ditangani	%	Jumlah bangunan gedung kewenangan pemda yang ditangani/ total bangunan gedung yang menjadi kewenangan pemda (114 gedung)	15,79 (18 gedung)	32,46	32,46	49,12	-	65,79	-	82,46	-	32,46
3.8	Persentase Kawasan/ Lingkungan Yang di Tingkatkan Sesuai dengan RTBL nya	%	Kawasan/ Lingkungan Yang di Tingkatkan Sesuai dengan RTBL nya/ Jumlah Kawasan x 100%	-	16,67	16,67	50,00	-	66,67	-	100,00	-	16,67
3.9	Persentase jumlah penyedia jasa yang mendapatkan pembinaan	%	jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan / jumlah badan usaha di kota tasikmalaya (236 badan usaha * 100%)	-	42,37	54,66	42,37	-	42,37	-	42,37	-	42,37
3.10	Persentase sistem jaringan sarana prasarana permukiman dalam kondisi baik	%	Jumlah sistem jaringan sarana prasarana permukiman dalam kondisi baik / jumlah target sistem jaringan sarana prasarana permukiman akan ditangani (800 untuk 4 th)	-	25	27,13	50	-	75	-	100	-	25



Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD
					Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
3.11	Prosentase KK/RT Yang berakses SPLD	%	KK/RT Yang berakses SPLD/jumlah KK/RT x 100%	-	61,62	62,8	62,03	-	62,45	-	62,86	-	61,62
3.12	Prosentase KK/RT yang Berakses Layanan Air Minum	%	KK/RT yang Berakses Layanan Air Minum/Jumlah KK/RT x 100%	-	56,67	57,57	57,26	-	58,01	-	58,79	-	56,67
3.13	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	-	90	98,2	80	-	61	-	71	-	90
3.14	Capaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Air Minum dan air Limbah Domestik)	%	Capaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.15	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	luas lahan yang dimanfaatkan sesuai dengan rencana pola ruang / luas lahan yang diberikan KKPR*100%	-	-	-	-	98.50	-	99,00	-	99.5	99.5
3.16	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang terdampak oleh irigasi	%	Luas sawah yang terdampak / luas sawah total kewenangan kota tasikmalaya (1749 Ha)	-	-	-	-	23.72	-	24.77	-	25.87	25.87
3.17	Persentase peningkatan jaringan jalan	%	Panjang jalan yang dibangun dan dipelihara / total panjang jalan kota *100%	-	-	-	-	2,25	-	3,81	-	5,04	11,09
3.18	Persentase peningkatan jaringan Drainase Jalan kota	%	Panjang jaringan drainase jalan kota yang dibangun + direhabilitasi + dipelihara/ total jalan kota *100	-	-	-	-	-	-	0,36	-	0,40	0,76
3.19	Persentase pemilik ijin yang menerapkan ketentuan bangunan	%	Jumlah pemilik ijin yang menerapkan ketentuan ijin bangunan/jumlah bangunan berijin *100%	-	-	-	-	99,373	-	99,378	-	99,384	99,384
3.20	Persentase jasa konstruksi yang bersertifikat jasa konstruksi	%	Jumlah tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikat / jumlah tenaga kerja jasa konstruksi keseluruhan*100%	-	-	-	-	33,66	-	35,30	-	36,93	36,93
3.21	Persentase infrastruktur drainase lingkungan permukiman di luar kawasan permukiman kumuh dalam kondisi baik	%	Panjang drainase lingkungan permukiman di luar kawasan Permukiman kumuh dalam kondisi baik dan sedang / total panjang drainase lingkungan permukiman *100%	-	-	-	-	65,01	-	66,41	-	67,99	67,99
3.22	Persentase infrastruktur jalan lingkungan permukiman di luar kawasan Permukiman kumuh dalam kondisi baik	%	Panjang jalan lingkungan permukiman di luar kawasan Permukiman kumuh dalam kondisi baik dan sedang / total panjang jalan lingkungan permukiman *100%	-	-	-	-	51,97	-	60,88	-	64,21	64,21



Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD
					Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
3.23	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kota Tasikmalaya	%	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota/Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kota Tasikmalaya * 100%	-	-	-	-	57,26	-	58,01	-	58,79	58,79
3.24	Persentase kebutuhan infrastruktur Air limbah domestik yang terpenuhi	%	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagi Jumlah Proyeksi rumah tangga di Kota Tasikmalaya*100%	-	-	-	-	62,05	-	62,48	-	62,92	62,92
3.25	IKM pelayanan pengelolaan Air limbah domestik	Kategori	Nilai IKM	-	-	-	-	83,00	-	84,00	-	85,00	85,00
3.26	Persentase kepatuhan Pemanfaatan Ruang terhadap KKPR yang telah diterbitkan	%	Luas area pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen KKPR terhadap seluruh luas lahan yang diberikan KKPR *100%	-	-	-	-	98,00		99,00		99,50	99,50
3.27	Persentase panjang jaringan sungai yang berfungsi optimal	%	Panjang jaringan sungai yang berfungsi optimal / Panjang jaringan sungai*100%	-	-	-		23,76	-	27,94	-	32,41	32,41
3.28	Persentase Panjang jaringan irigasi kondisi baik	%	Panjang jaringan irigasi kondisi baik / panjang total jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya	-	-	-	-	38,19	-	38,71	-	39,35	39,35
4.	Perumahan Dan Kawasan Permukiman												
4.1	Persentase Perumahan yang Layak huni	%	Persentase PSU yang diserahkan+yang dikelola dibagi 2	-	25	47,22	50	50	75	79,5	100	100	100
4.2	Indeks Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat	%	Jumlah unit penyediaan/ rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan rekolasi program yang ditangani terhadap target	100	100	99,3	100	100	100	100	100	100	100
4.3	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	%	Luas penanganan kawasan kumuh/total kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha (82, 68 Ha)	-	2,42	12,69	4,84	-	8,47	-	12,09	-	2,42
4.4	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	%	Luas penanganan kawasan kumuh/total kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha (82, 68 Ha)	-	-	-	-	12,69	-	18,73	-	22,36	22,36
4.5	Cakupan Ketersediaan Rumah	%	Jumlah penanganan RTLH (didalam kawasan kumuh+diluar kawasan kumuh) dibagi total RTLH se Kota (	-	9,24	12,02	18,55	12,23	30,60	15,59	42,64	18,95	18,95



Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD
					Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
	Layak Huni		9081 unit)										
4.6	Persentase rumah korban bencana yang ditangani	%	Jumlah unit penyediaan/rehabilitasi rumah bagi korban bencana yang ditangani terhadap target	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100
4.7	Persentase rumah korban relokasi program kabupaten/kota yang ditangani	%	Jumlah rumah korban relokasi program yang difasilitasi terhadap target	100	100	20	100	-	100	-	100	-	100
4.8	Persentase Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Kab/Kota yang Tertangani	%	Persentase penyediaan/ rehabilitasi rumah bagi korban bencana yang ditangani terhadap target + persentase fasilitas rumah korban relokasi program terhadap target dibagi 2	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
4.9	Persentase Perumahan yang Sesuai dengan Standar Bangunan dan Perumahan	%	Jumlah pemennuhan penerbitan izin perumahan yang sesuai dengan standar bangunan dan perumahan	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
4.10	Persentase Pengelolaan PSU Perumahan	%	Persentase PSU yang diserahkan terimakan + yang dikelola dibagi 2	-	25	50	50	-	75	-	100	-	25
4.11	Persentase PSU Perumahan yang dimanfaatkan	%	Persentase PSU yang diserahkan terimakan+yang dikelola dibagi 2	-	-	-	-	50	-	79,53	-	100	100
4.12	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	%	Luas penanganan kawasan kumuh/total target kawasan kumuh yang ditangani	-	20	23,6	40	-	70	-	100	-	20
4.13	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang Tertata	%	Luas penanganan kawasan kumuh / luas kawasan kumuh di Bawah 10 Ha (82,68Ha)	-	-	-	-	12,69	-	18,73	-	22,36	22,36
4.14	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	%	Jumlah unit RTLH yang ditangani di dalam kawasan kumuh/total RTLH di dalam kawasan kumuh (1.752 Unit)	-	8,56	16,27	17,24	-	28,65	-	40,07	-	8,56
4.15	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	%	Jumlah unit RTLH yang ditangani di dalam kawasan kumuh/total RTLH di luar kawasan kumuh (7329 Unit)	-	1,36	7,76	2,63	-	3,89	-	5,15	-	1,36
4.16	Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni di Luar	%	Jumlah unit RTLH yang ditangani di dalam kawasan kumuh/total RTLH di luarkawasan kumuh (7329 Unit)	-	-	-	-	7,76	-	9,2	-	10,63	10,63



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	2021			2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD	
				Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	Kawasan Kumuh												
5.	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat												
5.1	Presentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang di selesaikan	%	Jumlah pengaduan yang ditangani/Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk x 100%	80	100	100	100	-	100	-	100	-	100
5.2	Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan/ Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi x 100%	86	93	93	94	-	95	-	96	-	93
5.3	Tingkat Penyelesaian pelanggaran keamanan, ketertiban dan Keindahan (K3)	%	Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang di selesaikan/jumlah gangguan x 100%	80	100	100	100	-	100	-	100	-	100
5.4	Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	(Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan masyarakat dan temuan yang ditangani oleh satpol PP pada tahun n-1 dikurangi Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan masyarakat dan temuan yang ditangani oleh satpol PP pada Tahun n) dibagi Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan masyarakat dan temuan yang ditangani oleh satpol PP pada tahun n-1 dikali 100 %	-	-	-	-	3	-	3,5	-	4	4
5.5	Persentase Penurunan Pelanggar Perda dan Perkada yang Memuat Sanksi	%	(Pelanggaran Perda dan Perkada yang memuat sanksi Tahun n-1 dikurangi Pelanggaran Perda dan Perkada yang memuat sanksi Tahun n) dibagi Pelanggaran Perda dan Perkada yang memuat sanksi Tahun n-1 dikali100%	-	-	-	-	4,5	-	5,5	-	7	7
5.6	Persentase Pengawasan dan penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	Pengawasan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah/Jumlah Pelanggaran x 100%	86	93	93	94	-	95	-	96	-	93
5.7	Persentase Pelanggaran Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Diselesaikan	%	Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang di selesaikan/jumlah Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah x 100%	-	80	60	-	60	-	65	-	70	70
5.8	Presentase PPNS yang dibina	%	Jumlah PPNS yang dibina/jumlah total PPNS x 100%	-	80	100	81	-	82	-	83	-	83



Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD
					Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
5.9	Indeks Katahanan Daerah	Poin	Tercapainya Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana dan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	0,34	0.34	0,43	0.35	0,51	0.35	0,53	0.36	0,55	0.55
5.10	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran	%	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran		86	100	86	-	86,50	-	86,50	-	86
5.11	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Kebakaran yang Sesuai Respon Time	%	Jumlah Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Kebakaran yang Sesuai Respon Time / Jumlah Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Kebakaran x 100%	-	-	-	-	86	-	86,50	-	86,50	86,50
5.12	Persentase Masyarakat yang Memperoleh Informasi Layanan Bencana	%	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana / Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana x 100%	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100
5.13	Persentase Masyarakat yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	%	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh Layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai jenis ancaman bencana / Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana x 100%	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100
5.14	Persentase Penanganan Bencana dan warga negara korban bencana	%	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi/Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana x 100%	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100
5.15	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Poin	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	86	86	80,27	86	-	86,50	-	86,50	-	86
5.16	Persentase Pengurangan Risiko Bencana	%	Jumlah Potensi Bencana yang Terjadi / Jumlah Potensi Bencana X 100%	-	-	-	-	57,58	-	54,55	-	45,45	45,45
5.17	Persentase Layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	%	Jumlah Layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan / Jumlah Layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran X 100%	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
6.	Sosial												
6.1	Persentase Rehabilitasi Sosial	%	Jumlah PPKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi	-	10	100	10.5	-	11	-	11.5	-	10



Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD
					Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
	Terhadap PPKS		Sosial/ Data PPKS <i>X 100</i>										
6.2	Persentase Capaian Jaminan Sosial terhadap PPKS	%	Jumlah PPKS yang mendapatkan Jaminan sosial/Jumlah Data DTKS <i>X 100</i>	-	78	100	79	-	79.5	-	80	-	78
6.3	Persentase Capaian Penanganan Perlindungan Sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial	%	Jumlah Korban Bencana alam dan Sosial yang di tangani/ Jumlah Korban Bencana alam dan Sosial <i>X 100</i>	-	100	100	100	-	100	-	100	-	100
6.4	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan PPKS	%	Jumlah PSKS yang diberdayakan/Jumlah Data PSKS <i>X 100</i>	-	25	100	25	-	25	-	25	-	25
6.5	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Daerah Asalnya/ Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan <i>X 100</i>	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100
6.6	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	%	Jumlah Lanjut Usia Terlantar, Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial/ Jumlah Target <i>X 100</i>	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100
6.7	Persentase penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	Jumlah PPKS yang Menerima Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial/ Target <i>X 100</i>	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100
6.8	Persentase Penanganan Bencana Alam dan Sosial	%	Jumlah Korban Bencana alam dan Sosial yang di tangani/ Jumlah Korban Bencana alam dan Sosial <i>X 100</i>	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100
6.9	Persentase PSKS Aktif	%	Jumlah PSKS aktif/Target <i>X 100</i>	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100
6.10	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	Jumlah TMP yang Dikelola / Jumlah TMP <i>X 100</i>	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100
6.11	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	Perolehan Capaian Kinerja Bidang (%) / Target Capaian Kinerja Bidang (%) <i>X 100</i>	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
6.12	Persentase PSKS Aktif dan Mendapatkan Bimbingan Teknis	%	Jumlah PSKS aktif dan mendapatakan bimbingan teknis / Jumlah PSKS x 100	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
6.13	Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap PPKS	%	Jumlah PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial / Jumlah Pengaduan PPKS <i>X 100</i>	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
6.14	Persentase Bansos Kesejahteraan Keluarga Tepat Sasaran	%	Jumlah penerima bantuan yang diverifikasi / jumlah data pengaduan <i>X 10</i>	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD
					Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
6.15	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	%	Jumlah korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial / Jumlah laporan korban bencana X 100	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
6.16	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang Terstandar	%	Jumlah Makam Pahlawan yg dikelola dan terstandar / Jumlah Makam Pahlawan x100	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar												
7.	Tenaga Kerja												
7.1	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak / jumlah perusahaan x 100%	53,75	54,23	80,29	54,50	-	54,75	-	55,00	-	54,23
7.2	persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dan terjaganya hubungan industrial yang harmonis	%	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dan perselisihan yang diselesaikan/ jumlah perusahaan x 100 %	-	-	-	-	67,25	-	67,38	-	67,50	67,50
7.3	persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi / jumlah tenaga kerja keseluruhan x 100%	3,61	4,98	13,25	5,56	-	6,92	-	8,30	-	4,98
7.4	Persentase pencari kerja dan tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	Jumlah pencari kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi / jumlah pencari kerja & tenaga kerja keseluruhan x 100%	-	-	-	-	19,70	-	20,20	-	20,70	20,70
7.5	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja daerah	%	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD / jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota x 100%	-	4	100	5	5	8	8	12	12	12
7.6	persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	Jumlah pencaker yang ditempatkan / jumlah pencaker yang terdaftar x 100 %	24,96	27	54,17	29	-	31	-	33	-	27
7.7	Persentase Pencari Kerja yang bekerja	%	Jumlah pencaker yang bekerja/ jumlah pencaker yang terdaftar x 100 %	-	-	-	-	29	-	31	-	33	33



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD
					Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
7.8	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan	%	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	53,75	54,23	80,29	54,50	-	54,75	-	55,00	-	54,23
7.9	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan ketenagakerjaan (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan BPJS ketenagakerjaan)	%	Jumlah perusahaan yang menerapkan peraturan ketenagakerjaan (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan BPJS ketenagakerjaan) / jumlah Perusahaan x 100	-	-	-	-	54,50	-	54,75	-	55	55
7.10	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan / jumlah kasus perselisihan x 100	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
8.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	91,74	91,84	92,96	91,94	93,0	92,04	93,40	92,24	93,75	93,75
8.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	59,51	60,00	59,81	60,10	60,10	60,20	60,15	60,30	60,20	60,20
8.3	Persentase Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak	%	Penyelesaian Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak / Jumlah Pengaduan x 100	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100
8.4	Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Poin	Realisasi Jumlah Skor dari indikator tingkatan Kota Layak Anak	756	758	430	760	-	800	-	800	-	758
8.5	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP)	%	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Usia 15-64 Tahun X 100 Jumlah Penduduk Perempuan Usia 15-64 Tahun	-	-	-	-	0,024	-	0,022	-	0,020	0,020
8.6	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA)	%	Jumlah Anak Usia 13-17 Tahun yang pernah Mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang Hidup X 100 jumlah anak Usia 13-17 Tahun	-	-	-	-	0,10	-	0,10	-	0,10	0,10
8.7	Persentase Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak	%	Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak/Jumlah Pengaduan x100	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100
8.8	Persentase Capaian PUG	%	Jumlah SKPD/Lembaga/Organisasi yang responsif gender /	20	100	100	100	-	100	-	100	-	100



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD
					Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
	SKPD/Lembaga/Organisasi yang Responsif Gender		Jumlah SKPD/lembaga/Organisasi x 100										
8.9	Persentase perangkat daerah yang menerapkan program PUG	%	Cakupan OPD yang Menjalankan Program PUG <u>Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan ARG</u> X 100 Jumlah Perangkat Daerah	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
8.10	Persentase Pembinaan Peningkatan Kualitas Keluarga	%	Jumlah Keluarga yang dibina / Jumlah Keluarga Sasaran x 100	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100
8.11	Persentase keluarga yang aktif dalam pengarusutamaan gender	%	Cakupan Keluarga yang Mengikuti Pelatihan PUG <u>Jumlah Keluarga yang Aktif dalam Pengarusutamaan Gender</u> X 100 Jumlah keluarga	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
8.12	Cakupan Sistem Data Gender dan Anak	%	Jumlah Gender dan Anak yang didata/dibina / Jumlah Total Gender dan Anak yang ada x 100	100	100	27	100	-	100	-	100	-	100
8.13	Persentase data terpilah yang dimanfaatkan	%	<u>Jumlah Data Terpilah yang dimanfaatkan</u> X 100 Jumlah Data Terpilah yang ada	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
8.14	Persentase Penanganan Kasus Anak	%	Jumlah Kasus yang ditangani/jumlah kasus x 100	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100
8.15	Persentase kasus yang tertangani	%	<u>Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti</u> X 100 Jumlah laporan/pengaduan yang masuk	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
9.	Ketahanan Pangan												
9.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	poin	PPH = % angka kecukupan gizi (AKG) x bobot masing- masing kelompok pangan	91,3	91,4	92,4	91,5	91,5	91,6	91,6	91,7	91,7	91,7
9.2	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang dibangun	unit	Jumlah infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang dibangun	-	-	-	2	1	1	1	-	1	3
9.3	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	%	Persentase Angka Kecukupan Energi	110,6	110,7	103,9	110,8	104	110,9	104,5	111	105	105
9.4	Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	%	Persentase Angka Kecukupan Protein	124,9	125	116,8	125,5	116,8	126	117	126,5	117,5	117,5
9.5	Persentase kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani	%	Jumlah kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani/Jumlah kelurahan rentan warga	10,3	15	75	15	-	20	-	20	-	15
9.6	Persentase penurunan daerah rawan pangan	%	Jumlah daerah rawan pangan tahun berjalan - Jumlah daerah rawan pangan Tahun sebelumnya x 100%	-	-	-	-	15	-	15	-	15	15



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD
					Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
9.7	Persentase pengawasan keamanan pangan	%	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi/Total sampel pangan yang diawasi	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100
10.	Pertanahan												
10.1	Persentase Pengelolaan dan Penatagunaan Tanah	%	Persentase Pengelolaan dan Penatagunaan Tanah	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100
10.2	Persentase PKKPR tanah aset pemkot untuk pembangunan fasilitas umum fasilitas sosial	%	Jumlah tanah aset pemkot yang sesuai dengan peruntukan ruang / luas tanah aset pemkot yang diberikan PKKPR*100%	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00	100
10.3	Persentase Kesesuaian Luas Tanah yang dimanfaatkan untuk fasilitas umum fasilitas sosial dengan rencana tata ruang	%	Luas tanah aset pemkot untuk pembangunan fasum fasos yang sesuai PKKPR / luas tanah ases pemkot yang diperlukan untuk pembangunan fasum fasos	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00	100
11.	Lingkungan Hidup												
11.1	Indeks kualitas Air	Poin	$IKA = \sum_{i=1}^n W_i \times I_i$ W= Bobot Parameter i I = Nilai dari Parameter i	65,75	53,7	38,44	53,75	48,6	53,80	65,09	53,85	65,29	65,29
11.2	Indeks kualitas Udara	Poin	$IKU = 100 - (\frac{50}{0,9}x(Ieu - 0,1))$	83,45	80,00	83,72	80,50	81,18	81,00	63,64	81,50	63,84	63,84
11.3	Indeks Kualitas Lahan	Poin	$DKK = \sum \text{Rumus } W \text{ di Tutupan Hutan} + \text{Rumus } W \text{ di Tutupan Belukar}$ $IKL = 100 - ((84, 3 - ((LTL) - DKK) \times 100)) \frac{50}{LW}$ 54,3	-	-	-	-	31,96	-	51,91	-	51,98	51,98
11.4	Persentase Penanganan Sampah	%	Junlah sampah yang ditangani dibagi jumlah timbulan sampah dikalikan 100%	61,23	72	65,21	71	71	70	70	70	70	70
11.5	Persentase Pengurangan Sampah	%	Persentase capaian kinerja Pengurangan sampah	12,63	27	16,96	28	28	30	30	30	30	30



Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD
					Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
11.6	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Dimanfaatkan	%	Rata-rata persentase pemenuhan dokumen lingkungan hidup pada tahun berjalan	-	-	-	-	100	-	100	-	-	100
11.7	Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup	%	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang disusun terhadap Target	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
11.8	Persentase Penurunan Pencemaran	%	Persentase Penurunan Pencemaran Air dan Udara Tahun Berjalan dkurangi Persentase Penurunan Pencemaran Air dan Udara Tahun Sebelumnya (Persentase penurunan adalah Nilai Indeks Kualitas yang diperoleh dibagi dengan nilai indeks kualitas kategori baik(70) dikali 100)	-	-	-	-	0,15	-	0,20	-	0,20	0,20
11.9	Persentase Peningkatan RTH	%	Rata-rata persentase capaian kinerja pengelolaan keanekaragaman hayati	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
11.10	Persentase RTH yang Dikelola; Indeks Kualitas Lahan	% Point	Persentase RTH yang dikelola pada tahun berjalan Point yang diperoleh dari perhitungan kategori pada indeks kualitas lahan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	100 23,347	100 24,360	100 39,50	100 24,360	-	100 24,360	-	100 24,360	-	100 24,360
11.11	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Mematuhi Ketentuan Pengelolaan B3 dan LB3	%	Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan yang memenuhi ketentuan pengelolaan B3 dan LB3 tahun berjalan dibagi Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan yang mendapatkan legalitas dalam pengelolaan B3 dan limbah B3 tahun berjalan dikali 100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	100
11.12	Persentase Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Mematuhi Ketentuan Lingkungan	%	Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan yang memenuhi ketentuan lingkungan pada tahun berjalan dibagi target pelaku Usaha/Kegiatan yang dinilai dan diawasi pada tahun berjalan dikali 100	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
11.13	Persentase Peningkatan Dokumen Lingkungan yang Dinilai dan Diawasi Implementasinya	%	Persentase capaian kinerja peningkatan dokumen lingkungan yang dinilai dan diawasi implementasinya pada tahun berjala	3 Jenis Dokumen; 25 Kegiatan %	100	120	100	-	100	-	100	-	100
11.14	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	%	Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang tertangani pada tahun berjalan dibagi target jumlah pengaduan lingkungan hidup dikali 100	150	100	333	100	-	100	-	100	-	100
11.15	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup Yang Terselesaikan	%	Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang tertangani pada tahun berjalan dibagi target jumlah pengaduan lingkungan hidup dikali 100	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
11.16	Capaian Pelatihan, Penyuluhan, dan Kampanye	%	Jumlah Masyarakat yang terbina lingkungan hidup pada tahun berjalan dibagi target jumlah masyarakat yang	-	100	100	100	-	100	-	100	-	100



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD
					Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
	Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		terbina lingkungan hidup dikali 100										
11.17	Persentase Lembaga/Kelompok Masyarakat yang Aktif Menjaga Lingkungan Hidup	%	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat yang terbina lingkungan hidup pada tahun berjalan dibagi target jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat yang terbina lingkungan hidup dikali 100	-	100	100	100	-	100	-	100	-	100
11.18	Capaian Perolehan Penghargaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat	%	Jumlah event penghargaan lingkungan hidup pada tahun berjalan dibagi target jumlah event penghargaan dikali 100	-	100	100	100	-	100	-	100	-	100
11.19	Persentase Peningkatan Masyarakat yang Mendapatkan Penghargaan Lingkungan Hidup	%	Jumlah event penghargaan lingkungan hidup pada tahun berjalan dibagi target jumlah event penghargaan dikali 100	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
11.20	Persentase pengurangan sampah di sumber sesuai standar	%	Jumlah tonase sampah yang dimanfaatkan dibagi jumlah timbulan sampah dikali 100	-	-	-	-	28	-	30	-	30	30
11.21	Persentase sampah di TPS yang terangkut ke tpa sesuai standar	%	Jumlah tonase sampah yang diangkut ke TPA dibagi jumlah timbulan sampah dikali 100	-	-	-	-	71	-	70	-	70	70
11.22	Persentase Sampah yang Ditimbun di TPA Sesuai Standar	%	Jumlah tonase sampah yang ditimbun di tpa dibagi jumlah tonase sampah yang diangkut ke tpa dikali 100	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
12.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil												
12.1	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	Dokumen Pendaftaran penduduk + Dokumen pencatatan sipil/2 x 100%	92	94	98,76	95	-	96	-	97	-	94
12.12	Persentase Masyarakat yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	%	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk + persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil / 2	-	-	-	-	98	-	98,2	-	98,5	98,5
12.2	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	%	Jumlah Lembaga yang telah memanfaatkan data kependudukan/jumlah lembaga yang telah melakukan perjanjian kerjasama x 100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12.3	Persentase Pelayanan Pendafta ran Kependudukan	%	Jumlah kepemilikan KTP + kepemilikan KIA + kepemilikan KK/3 x 100%	96,1	98	98,57	98,5	-	99	-	99,5	-	98
12.4	Persentase Pelayanan	%	Kepemilikan Akte Kelahiran + kepemilikan Akte Kematian +	99	93	98,96	95	-	96	-	97	-	93



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD
					Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
	Pencatatan Sipil		kepemilikan Akte Perceraian dan Perkawinan + kepemilikan Akte lainnya/4 x 100%										
12.5	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	Jenis Sistem Informasi/Jumlah system informasi x 100%	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100
12.6	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	%	Data kependudukan dan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan/2*100%	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100
12.7	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Kependudukan yang terlayani sesuai standar	%	Jumlah kepemilikan KTP + kepemilikan KIA + kepemilikan KK/3 x 100%	-	-	-	-	98	-	100	-	100	100
12.8	Persentase Kepemilikan Dokumen Permohonan Pencatatan Sipil yang terlayani sesuai standar	%	Kepemilikan Akte Kelahiran + kepemilikan Akte Kematian + kepemilikan Akte Perceraian dan Perkawinan + kepemilikan Akte lainnya/4 x 100%	-	-	-	-	99,07	-	99,1	-	99,1	99,1
12.9	Persentase Kualitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	%	Jenis Sistem Informasi/Jumlah system informasi x 100%	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
12.10	Jumlah Dokumen Kependudukan yang dihasilkan sesuai kewajiban OPD berdasarkan Permendagri	Dokumen	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	-	-	-	-	3	-	3	-	3	3
13.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana												
13.1	Nilai Pembangunan Keluarga	%	iBangga = 1/3 (Indeks Ketentraman + Indeks Kemandirian + Indeks kebahagiaan dikali 100	-	-	-	-	60	-	60,10	-	60,15	60,15
13.2	Total Fertility Rate (TFR)	%	TFR adalah jumlah anak yang akan dipunyai oleh seorang Wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita. Asumsi yang digunakan yaitu tidak ada seorang Perempuan pun yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya dan Tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu pengukuran. Rumus : $i=7$$TFR= 5\times \sum ASFR\ i$$i=1$	-	-	-	-	2,00	-	2,00	-	2,00	2,00



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD
					Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
13.3	Cakupan Anggota BKB yang Ber KB	%	Jumlah Anggota BKB yang ber KB/Jumlah Anggota BKB x 100	82,03	82,53	85,30	83,03	-	83,53	-	84,03	-	82,53
13.4	Cakupan Anggota BKR yang Ber KB	%	Jumlah Anggota BKR yang ber KB/Jumlah Anggota BKR x 100	76,11	76,61	73,84	77,11	-	77,61	-	78,11	-	76,61
13.5	Cakupan Anggota BKL yang Ber KB	%	Jumlah Anggota BKL yang ber KB/Jumlah Anggota BKL x 100	74,47	74,97	67,83	75,47	-	75,97	-	76,47	-	74,97
13.6	Perentase Keluarga yang memenuhi 8 Fungsi Keluarga	%	Jumlah keluarga yang diilatih orientasi ketahanan keluarga / Jumlah Keluarga X 100	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
13.7	Jumlah Dokumen Laporan Pemutakhiran Data Kependudukan	Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Pemutakhiran Data Kependudukan	1	1	1	1	-	1	-	1	-	1
13.8	Persentase rencana aksi pengendalian penduduk yang diterapkan	%	Laporan Hasil Pemutahiran Data Keluarga	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
13.9	Persentase Kebersertaan KB MKJP	%	Realisasi pelayanan KB MKJP/Target Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM KB) x100	336,15	100	92,92	100	73	100	75	100	80	80
13.10	Persentase Kebersertaan Un Meet Need	%	Unmeet need (ingin anak ditungu (iat)+ tidak ingin anak lagi (tia))/PUS x 100	14	13,50	13,59	13,25	-	13,00	-	12,75	-	13,50
14.	Perhubungan												
14.1	Prosentase layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan	%	Rata-rata prosentase layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan	66,09	67,23	62,37	68,62	-	70,27	-	72,16	-	67,23
14.2	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	poin	Tingkat Pelayanan, Volume Lalu lintas, Kapasitas ruas jalan dan Volume kapasitas dalam nilai Tingkat pelayanan Jumlah VC Ratio / Jumlah Ruas Jalan	-	-	-	-	0,36	-	0,32	-	0,30	0,30
14.3	Rasio Konektivitas Kab/Kota	poin	Perhitungan angkutan jalan , Dimana meliputi Jumlah trayek, Bobot Trayek, Jumlah Kebutuhan Trayek, dan angkutan Indikator Kinerja Angkutan Jalan x Bobot angkutan jalan	-	-	-	-	0,64	-	0,66	-	0,68	0,68
14.4	Persentase Layanan Lalu Lintas Bekeselamatan	%	Jumlah realisasi ruas jalan berkeselamatan / ruas jalan kota	58,93	61,07	57,14	63,21	-	65,36	-	67,50	-	61,07
14.5	Persentase Kebutuhan Prasarana Perhubungan yang Terpenuhi	%	Jumlah penyediaan prasarana perhubungan / jumlah kebutuhan prasarana perhubungan x 100 %	-	-	-	-	79,28	-	80,61	-	81,95	81,95
14.6	Persentase Ruas Jalan yang	%	Jumlah ruas jalan yang lancar / jumlah ruas jalan kota x	-	-	-	-	58,93	-	60,71	-	62,50	62,50



Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD
					Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
	Lancar		100 %										
14.7	Persentase Angkutan Lalu Lintas Berkeselamatan	%	Jumlah realisasi angkutan berkeselamatan/Jumlah angkutan yang di targetkan x 100 %	76,82	77,32	67,6	78,32	78,32	79,82	79,82	81,82	81,82	81,82
15.	Komunikasi dan Informatika												
15.1	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	Capaian Indeks SPBE berdasarkan Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 dan Permenpan RB No. 5 Tahun 2018	-	-	-	-	Baik (3,60)	-	Sangat Baik (3,70)	-	Sangat Baik (3,80)	Sangat Baik (3,80)
15.2	Capaian Predikat Indeks SPBE	Poin	Capaian Indeks SPBE berdasarkan Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 dan Permenpan RB No. 5 Tahun 2018	2,68	2,90	3,25	3,00	-	3,10	-	3,20	-	2,90
15.3	Capaian Predikat Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	%	Capaian Keterbukaan Informasi Publik Bersasarkan UU No 14 Tahun 2008, PP No 61 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2021 yang 15.3diselenggaraan oleh Komisi Informasi	Informatif (80)	Informatif (80)	Informatif (90,14)	Informatif (81)	-	Informatif (82)	-	Informatif (83)	-	Informatif (80)
15.4	Capaian penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	%	Realisasi Area Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah terhadap total Area Pengendalian Sistem Manajemen Keamanan Informasi	40	41	48,21	-	-	-	-	-	-	-
15.5	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	%	Capaian Keterbukaan Informasi Publik Bersasarkan UU No 14 Tahun 2008, PP No 61 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2021 yang diselenggaraan oleh Komisi Informasi	Informatif (80)	Informatif (80)	Informatif (90,14)	-	Informatif (92,5)	-	Informatif (93)	-	Informatif (93)	Informatif (93)
15.6	Persentase Layanan SPBE yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	Jumlah Layanan SPBE yang dilakukan secara online dan terintegrasi/Jumlah Layanan SPBE yang ada*100	60	60	60,71	65	-	70	-	75	-	75
15.7	Persentase Pemenuhan Dokumen Evidence Penilaian SPBE	%	Realisasi Dokumen Evidence Penilaian SPBE yang terpenuhi/Jumlah Total Dokumen Evidence Penilaian SPBE yang harus dipenuhi x 100	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
15.8	Persentase Nama Domain dan Subdomain yang aktif dari seluruh domian dan subdomain yang ada	%	Jumlah Subdomain yang aktif/Jumlah subdomain yang ada*100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-
15.9	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan infrastruktur SPBE	%	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan layanan infrastruktur SPBE/Jumlah Perangkat Daerah yang ada di Kota Tasikmalaya x 100	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
15.10	Persentase Pemenuhan unsur-unsur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang	%	Jumlah Unsur SPBE yang terpenuhi/Jumlah seluruh unsur SPBE yang menjadi urusan Kominfo x 100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD
					Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
	menjadi urusan Kominfo												
15.11	Tingkat Kematangan Kebijakan SPBE	level	Nilai kematangan kebijakan SPBE pada LHE SPBE	-	-	-	-	4	-	4	-	4	4
15.12	Tingkat Kematangan Layanan SPBE	level	Nilai kematangan Layanan SPBE pada LHE SPBE	-	-	-	-	4	-	4	-	4	4
15.13	Tingkat Kematangan Tatakelola SPBE	level	Nilai kematangan Tatakelola SPBE pada LHE SPBE	-	-	-	-	3	-	4	-	4	4
15.14	Nilai pengelolaan informasi dan komunikasi publik	poin	Nilai yang dihasilkan pada indikator penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik	-	-	-	-	92	-	92,5	-	93	93
15.15	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	Realisasi capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah target capaian sub kegiatan x 100	-	-	-	-	92	-	92,5	-	93	93
15.16	Persentase Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	%	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat	Informatif (80)	Informatif (80)	90,14	-	-	-	-	-	-	-
15.17	Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik	%	Jumlah media Komunikasi Publik yang digunakan/Jumlah Media Komunikasi Publik sesuai permenkominfo nomor 8 tahun 2019 pasal 8 ayat 2	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-
15.18	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah Kab/Kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah Kota yang dibuat/Target jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah Kota sesuai dengan strategi komunikasi.	47	65	68,42	-	-	-	-	-	-	-
16.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah												
16.1	Persentase koperasi yang memiliki NIK (Nomor Induk Koperasi)	%	Jumlah Koperasi yang bersertifikat NIK/ Jumlah Koperasi Aktif x 100%	63	64	64,60	65	-	66	-	67	-	67
16.2	Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang Memiliki Izin	%	Jumlah KSP yang memiliki izin / Jumlah total KSP x 100%	-	-	-	-	-	-	100	-	100	100
16.3	Tingkat Kepatuhan Koperasi	%	Jumlah Koperasi yang mematuhi ketentuan/Jumlah total koperasi x 100%	-	-	-	-	-	-	35,4	-	40	40
16.4	Persentase usaha mikro yang bersertifikat	%	Jumlah usaha mikro yang bersertifikat/ jumlah total usaha mikro x 100%	2	2	5,88	2	-	2	-	2	-	2
16.5	Persentase koperasi simpan pinjam yang diberi	%	Jumlah koperasi yang diberi rekomendasi/ jumlah koperasi	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	2021			2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD	
				Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	rekomendasi penerbitan izin usaha dan/ atau izin operasional		pemohon rekomendasi x 100%										
16.6	Persentase Sertifikat Kesehatan KSP/USP Koperasi	%	Jumlah Koperasi aktif yang sehat/ jumlah total koperasi aktif) x 100%	-	-	-	-	-	-	4	-	5	5
16.7	Persentase koperasi aktif	%	Jumlah Pertumbuhan koperasi aktif/ total Koperasi Aktif x 100%	1	1	2,6	1	-	1	-	1	-	1
16.8	Persentase Koperasi Sehat	%	Jumlah KSP/USP sehat/Jumlah total KSP/USP x 100%	2	6	11,2	6	-	6	-	6	-	6
16.9	Persentase SDM koperasi yang kompeten	%	Jumlah SDM koperasi yang bersertifikat kompetensi/Jumlah SDM koperasi yang dibina x 100%	25	25	30	25	-	25	-	25	-	25
16.10	Persentase SDM Koperasi yang bersertifikat kompetensi		Jumlah SDM Koperasi yang bersertifikat kompetensi / Jumlah total pengurus koperasi x 100%	-	-	-	-	8,25	-	9	-	10	10
16.11	Persentase koperasi aktif yang diberdayakan	%	Jumlah koperasi aktif yang diberdayakan/Jumlah total koperasi aktif x 100%	25	25	26,15	25	-	25	-	25	-	25
16.12	Laju Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi		Jumlah volume usaha tahun n - tahun n-1/ Jumlah volume usaha tahun n-1 x 100%	-	-	-		2,5	-	4	-	7	7
16.13	Persentase pemberdayaan usaha mikro	%	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan / Jumlah usaha mikro x 100%	2	2	1,71	2	-	2	-	2	-	2
16.14	Persentase Peningkatan SDM Usaha Mikro yang Bersertifikat		Jumlah Usaha Mikro yang bersertifikat / Jumlah total Usaha Mikro x 100%	-	-	5,56	-	5,57	-	5,6	-	5,8	5,8
16.15	Persentase Usaha Mikro yang Memiliki Akses Pemasaran		Jumlah Usaha Mikro yang memiliki akses pemasaran / Jumlah total Usaha Mikro x 100%	-	-	-	-	-	-	5,6	-	5,8	5,8
16.16	Persentase Usaha Mikro yang dibina	%	Jumlah usaha mikro yang dibina / Jumlah usaha mikro x 100%	5	5	5,80	5	-	5	-	5	-	5
17.	Penanaman Modal												
17.1	Persentase Peningkatan Investasi	%	Jumlah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tahun n - Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tahun n-1 di kab/kota / jumlah PMTB n-1 di kab/kota	-	-	-	-	-	-	15	-	17	17
17.2	Nilai penanaman modal daerah dari PMA dan PMDN yang masuk	Rp./Milyar	Jumlah nilai PMA dan PMDN yang masuk yang tercatat di Dinas PMPTSP	1.242	1.304	18.702	1.369	1.369	1.430	1.430	1.501	1.501	1.501
17.3	Capaian penerbitan perijinan terpadu tepat waktu sesuai SOP	%	Persentase capaian penerbitan perijinan terpadu sesuai SOP terhadap pengajuan perijinan dengan persyaratan yang lengkap	100	100	100	100	100	100	-	100	-	100



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD
					Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
17.4	Persentase realisasi RUPM Kota Tasikmalaya	%	Realiasi RUPM/Jumlah tahapan dalam RUPM x 100%	-	20	100	20	-	20	-	20	-	80
17.5	Persentase Peningkatan Investor	%	Jumlah investor tahun n - jumlah investor n-1 dibagi Jumlah jumlah investor n-1 x 100	%	-	-	-	-	-	5	-	6	6
17.6	persentase peningkatan investasi yang masuk	%	Jumlah nilai PMA dan PMDN yang masuk yang tercatat di Dinas PMPTSP tahun n - Jumlah nilai PMA dan PMDN yang masuk yang tercatat di Dinas PMPTSP tahun n-1 / Jumlah nilai PMA dan PMDN yang masuk yang tercatat di Dinas PMPTSP tahun n-1	%	-	-	-	-	-	15	-	15	15
17.7	IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	%	Hasil Survei Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	-	-	-	-	-	-	25	-	25	25
17.8	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	Jumlah investor yang dibina/Jumlah total investor x 100%	0,13	1	100	1	-	1	-	1	-	1
17.9	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan penanaman modal	%	Jumlah Pelaku Usaha yang patuh / Jumlah Total Pelaku Usaha x 100	-	-	-	-	-	-	5	-	7	7
17.10	Persentase pengelolaan basis data potensi Penanaman Modal sesuai SOP	%	Jumlah basis data potensi penanaman modal yg dikelola sesuai SOP/Jumlah total basis data potensi investasi x 100%	0	25	100	25	-	25	-	25	-	25
17.11	Persentase data dan informasi PMPTSP yang dimanfaatkan	%	Jumlah Data dan Informasi yang dimanfaatkan / Jumlah Total Data dan Informasi yang tersedia x100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	100
17.12	Persentase pengelolaan data perijinan sesuai SOP	%	Jumlah data perijinan yang dikelola sesuai SOP/Jumlah total data perijinan x 100%	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18.	Kepemudaan dan Olahraga												
18.1	Persentase prestasi pemuda tingkat provinsi	%	Jumlah prestasi kepemudaan tingkat provinsi / jumlah OKP terdaftar x 100	3,30	2,20	8,8	3,30	-	4,40	-	5,49	-	2,20
18.2	Persentase Peningkatan Prestasi Pemuda di Tingkat Provinsi	%	(Jumlah prestasi pemuda tingkat provinsi : Jumlah Target Prestasi OKP) x 100	-	-	-	-	40	-	42	-	44	44
18.3	Persentase prestasi olahraga tingkat provinsi	%	Jumlah prestasi olahraga tingkat provinsi / jumlah cabor x 100	-	34,15	52,38	36,59	-	39,02	-	41,46	-	34,15
18.4	Persentase Cabang Olahraga Berprestasi Tingkat Provinsi	%	(Jumlah cabang olahrga berprestasi tingkat provinsi / jumlah cabang olahraga) x 100	-	-	-	-	36,59	-	39,02	-	41,46	41,46
18.5	Persentase OKP yang dibina	%	Jumlah OKP yang dibina / Jumlah OKP x 100	28,57	29,67	31,87	30,77	-	31,87	-	32,97	-	29,67



Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD
					Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
18.6	Persentase Pemuda Terbina Keorganisasian Yang Aktif Dalam Organisasi Kemasyarakatan	%	(Jumlah pemuda yang aktif pada organisasi kepemudaan / Jumlah pemuda di kota Tasikmlaya) x 100	-	-	-	-	67,71	-	67,89	-	68,10	68,10
18.7	Persentase Pemuda Terbina Kepeloporan Yang Menjadi Pemuda Pelopor	%	(Jumlah pemuda pelopor perwakilan Kota Tasikmalaya di Provinsi / Target Jumlah Pemuda pelopor) x 100	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	25,00
18.8	Persentase Pemuda Terbina Wirausaha Yang Berwirausaha	%	(Jumlah pemuda yang berwirausaha di Kota Tasikmalaya / Jumlah pemuda di Kota Tasikmalaya) x 100	-	-	-	-	33,24	-	34,21	-	35,40	35,40
18.9	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi	%	Perolehan medali tingkat provinsi / jumlah cabang olahraga * 100	60,00	34,15	52,38	36,59	-	39,02	-	41,46	-	34,15
18.10	Persentase Medali yang Diperoleh Dalam Event Provinsi	%	(Jumlah cabor berprestasi tingkat provinsi / jumlah cabor) x 100	-	-	-	-	37	-	39,02	-	41,46	41,46
18.11	Persentase Partisipasi Masyarakat Berolahraga	%	(Jumlah cabor rekreasi berpartisipasi di tingkat provinsi / jumlah cabor rekreasi) x 100	-	-	-	-	-	-	46,25	-	46,31	46,31
19.	Statistik												
19.1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (3 Point)	Poin	Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) berdasarkan Penilaian dari Badan Pusat Statistik	-	-	-	-	3	-	3,1	-	3,2	3,2
19.2	Persentase data dan informasi statistik sektoral	%	Jumlah realisasi kelompok data pada statistik sektoral terhadap jumlah kelompok data statistik sektoral. Berdasarkan Permendagri No 70 Tahun 2019 tentang SIPD terdapat 3 Kelompok Data : Kelompok Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan dasar dan Non Dasar, Kelompok Urusan Pemerintahan Pilihan dan Kelompok Data Umum.	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100
19.3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dlm penyusunan perencanaan Pembangunan Daerah/Jumlah OPD yang ada di Pemerintah Kota*100	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100
19.4	Persentase Peningkatan pengunjung web open data	%	Jumlah Pengunjung Tahun Sekarang-Jumlah Pengunjung Tahun Kemarin/Jumlah Pengunjung Tahun KemarinTahun KemarinX100	-	-	-	-	24	-	25	-	30	30
19.5	Rata-rata kunjungan website open data per hari	kunjungan	Jumlah Kunjungan website opendata selama 1 tahun/Jumlah hari dalam 1 tahun	500	500	530	-	-	-	-	-	-	500



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD
					Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
19.6	Persentase data prioritas yang tersusun	%	Jumlah Data Prioritas yang tersusun/Jumlah Daftar Data x 100	-	-	-	-	50	-	55	-	60	60
20.	Persandian												
20.1	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	%	Laporan Hasil Evaluasi Indeks KAMI (Keamanan Informasi) ISO 270001 (Nilai Hasil Indeks KAMI/Jumlah Total Nilai Indeks KAMI x 100)	-	-	-	-	45	-	46	-	47	47
20.2	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	Jumlah Nilai per Area Keamanan/Jumlah Area Keamanan x 100	25	25	44,39	41,50	-	42,00	-	42,50	-	41,00
20.3	Persentase tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah	%	Jumlah Nilai per Area Keamanan/Jumlah Area Keamanan*100	41,00	41,00	48,21	41,50	-	42,00	-	42,50	-	41,00
20.4	Nilai kelengkapan pengamanan informasi	Poin	Nilai yang dihasilkan pada Penilaian Indeks KAMI	-	-	-	-	291	-	297	-	304	516
20.5	Tingkat Kematangan Pengamanan Informasi	level	Nilai yang dihasilkan berdasarkan Laporan Hasil Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI)	-	-	-	-	3	-	3	-	3	3
20.6	Persentase OPD yang terhubung dalam jaring komunikasi Sandi	%	Jumlah OPD yang terhubung/OPD yang ada di Pemerintahan Kota x 100	-	-	-	-	-	-	75	-	100	100
21.	Kebudayaan												
21.1	Presentase Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	%	Jumlah OPK yang dilestarikan / Jumlah OPK x 100	57,97	63,73	64,65	68,63	-	73,53	-	78,43	-	63,73
21.2	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina dan dimanfaatkan	%	(Jumlah OPK yang dilestarikan : jumlah OPK terdaftar) x 100	-	-	-	-	68,63	-	73,53	-	78,43	78,43
21.3	Persentase Pengembangan Kebudayaan	%	OPK yang dikembangkan /Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) x 100	57,97	63,73	64,65	68,63	-	73,53	-	78,43	-	63,73
21.4	Persentase Peningkatan Kebudayaan Daerah	%	OPK yang dikembangkan /Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) x 100	-	-	-	-	68,63	-	73,53	-	78,43	78,43
21.5	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Tradisional	%	Jumlah grup kesenian yang dibina / jumlah grup kesenian tercatat x 100	20,23	25	25,43	25	-	25	-	25	-	25



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD
					Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
21.6	Persentase Peningkatan Kesenian Tradisional	%	(Jumlah Seniman/Sanggar/Grup yang dibina : jumlah Seniman/Sanggar/Grup terdaftar) x 100	-	-	-	-	25	-	25	-	25	75
21.7	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	%	Jumlah sejarah lokal yang dilestarikan/jumlah target x 100%	50,00	25	25	25	-	25	-	25	-	25
21.8	Persentase dokumen sejarah lokal yang dilestarikan	%	Jumlah sejarah lokal yang dilestarikan/jumlah target x 100%	-	-	-	-	-	-	25	-	25	50
21.9	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	Cagar budaya yang dipelihara / jumlah cagar budaya terdaftar x 100	35,38	46,15	46,15	53,85	-	61,54	-	69,23	-	46,15
21.10	Persentase cagar budaya yang terlindungi	%	Cagar budaya yang dipelihara / jumlah cagar budaya terdaftar x 100	35,38	-	-	-	-	-	61,54	-	69,23	69,23
22.	Perpustakaan												
22.1	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	Jumlah penambahan pengunjung pada tahun berkenaan / Jumlah pengunjung tahun lalu X 100%	-	0,3	0,376	0,3	-	0,3	-	0,3	-	0,3
22.2	Persentase pembinaan perpustakaan	%	Jumlah perpustakaan yang dibina _____ X 100% Jumlah perpustakaan yang seharusnya dibina	5,53	4,42	0,74	4,42	-	4,42	-	4,42	-	4,42
22.3	Persentase kesesuaian penyelenggaraan perpustakaan umum daerah dengan standar nasional perpustakaan	%	Rata-rata persentase kesesuaian penyelenggaraan perpustakaan umum daerah dengan standar nasional perpustakaan	-	38	39,84	39	-	40	-	41	-	38
22.4	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	%	Jumlah Calon Naskah Kuno dan koleksi etnis nusantara yang dilestarikan _____ X 100% Jumlah keseluruhan naskah kuno dan koleksi etnis nusantara yang direncanakan pada akhir periode renstra	-	23,81	-	26,19	26,19	23,81	23,81	26,19	26,19	25
22.5	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin/ Nilai	$IPLM \text{ Kab/Kota} = \frac{\sum_{i=1}^7 (UPLM)_i}{7} \times 100$	-	-	-	-	76,5	-	76,55	-	76,55	76,55
22.6	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin/ Nilai	TGM = (0.3TFM+0.3TDM+0.3TJB) + (0.05FAI+0.05 DAI)	-	-	-	-	69	-	69,5	-	70	70



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD
					Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
22.7	Jumlah Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Sosialisasi	Orang	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan (sosialisasi, pelatihan , pembinaan)	-	-	-	-	530	-	530	-	530	1.590
22.8	Jumlah Kunjungan Masyarakat	Orang	Jumlah pengunjung di layanan perpustakaan (umum dan keliling)	-	-	-	-	20.376	-	20.987	-	21.617	62.980
23.	Kearsipan												
	Indeks Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan	Poin/ Nilai	Jumlah (60% x Nilai Pengawasan Eksternal + 40% x Nilai Pengawasan Internal)	-	-	-	-	55.14	-	61.55	-	64.10	64.10
23.1	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Poin/ Nilai	Rata-rata Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Seluruh Perangkat Daerah, dengan kategori: a. > 90 – 100 = AA (Sangat Memuaskan) b. > 80 – 90 = A (Memuaskan) c. > 70 – 80 = BB (Sangat Baik) d. > 60 – 70 = B (Baik) e. > 50 – 60 = CC (Cukup) f. > 30 – 50 = C (Kurang) g. 0 – 30 = D (Sangat Kurang)	51,58	52,43	59,03	53,26	60	54,06	61	55,31	62	62
23.2	Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal	Poin/ Nilai	Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal, dengan kategori: a. > 90 – 100 = AA (Sangat Memuaskan) b. > 80 – 90 = A (Memuaskan) c. > 70 – 80 = BB (Sangat Baik) d. > 60 – 70 = B (Baik) e. > 50 – 60 = CC (Cukup) f. > 30 – 50 = C (Kurang) g. 0 – 30 = D (Sangat Kurang)	23,96	44,80	61,66	56,39	62	66,54	63	69,96	64	64
23.3	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai pengawasan kearsipan internal minimal kategori cukup	%	Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai Pengawasan Kearsipan minimal Kategori Cukup /Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan X 100%	63,89	77,78	83	86,11	-	91,67	-	100	-	77,78
23.4	Persentase kesesuaian kinerja kearsipan pada Lembaga Kearsipan Daerah	%	Total Nilai Perolehan pada Laporan Pengawasan Eksternal /Jumlah komponen pada aspek penilaian X 100%	21,45	37,48	58,4	47,24	-	55,98	-	60	-	37,48
23.5	Nilai aspek kebijakan	Poin/	Nilai aspek yang diperoleh dari nilai Pengawasan Kearsipan	-	-	-	-	19,5	-	19,7	-	19,9	19,9



Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD
					Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
		Nilai											
23.6	Nilai aspek pembinaan	Poin/ Nilai	Nilai aspek yang diperoleh dari nilai Pengawasan Kearsipan	-	-	-	-	13.6	-	13.8	-	14	14
23.7	Nilai aspek pengelolaan arsip statis	Poin/ Nilai	Nilai aspek yang diperoleh dari nilai Pengawasan Kearsipan	-	-	-	-	15,9	-	16,3	-	16,7	16,7
23.8	Nilai aspek sumber daya kearsipan	Poin/ Nilai	Nilai aspek yang diperoleh dari nilai Pengawasan Kearsipan	-	-	-	-	13	-	13,2	-	13,4	13,4
Fokus Layanan Urusan Pilihan													
1	Kelautan dan Perikanan												
1.1	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	9.990,39	10.000	9.960,08	10.000	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
1.2	Produksi produk hasil olahan perikanan	Ton	Jumlah produksi produk hasil olahan perikanan	312,78	300	335,497	310	310	320	320	330	330	330
1.3	Persentase peningkatan produksi olahan ikan	%	(Jumlah produksi olahan ikan tahun berjalan - Jumlah Produksi olahan ikan tahun sebelumnya) / Jumlah Produksi olahan ikan tahun sebelumnya x 100%	-	-	-	-	5	-	5	-	5	5
1.4	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	Angka Konsumsi Ikan yang dihitung dan dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik	22,95	22,25	43,95	22,5	44	22,75	44,05	23	44,10	44,10
1.5	Persentase pembudidaya ikan yang produktif	%	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang produktif/Jumlah total kelompok pembudidaya ikan x 100%	-	-	-	-	80	-	80	-	80	80
1.6	Persentase peningkatan produksi benih ikan	%	(Jumlah produksi benih ikan tahun berjalan - Jumlah Produksi Benih Tahun Lalu) / Jumlah Produksi Benih Tahun Lalu x 100%	-	-	-	-	5	-	5	-	5	5
1.7	persentase sarana dan prasarana perikanan yang dimanfaatkan	%	Jumlah sarana dan prasarana yang dimanfaatkan / Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan x 100%	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
1.8	IKM Pelayanan Pasar Ikan	Kategori (Indeks)	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTD PPI	-	-	-	-	Baik (84)	-	Baik (84)	-	Baik (84)	Baik (84)
2	Pariwisata												
2.1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	Jumlah occupancy hotel	483.569	443.505	538.183	542.625	-	641.746	-	740.866	-	443.505
2.2	Persentase peningkatan wisatawan	%	(Jumlah wisatawan tahun n – jumlah wisatawan thn n-1) x 100	3,79	-	-	-	3,82	-	3,83	-	3,84	3,84



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD
					Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
2.3	Persentase peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata	%	Objek pariwisata dipelihara/objek pariwisata terdaftar di RIPDA x 100%	55,10	59,18	60	61,22	-	63,27	-	65,31	-	59,18
2.4	Persentase Peningkatan wisatawan yang Mengakses Informasi Pariwisata	%	((Jumlah akses terhadap media promosi tahun N- jumlah akses Tahun N-1) / Jumlah akses tahun N-1) x 100	-	-	-	-	13,35	-	16,67	-	33,33	33,33
2.5	Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif	%	Jumlah usaha pariwsata dan sub sektor ekonomi kreatif yang dibina/jumlah Jumlah usaha pariwsata dan sub sektor ekonomi kreatif	46,15	53,33	53,85	56,67	-	60,00	-	63,33	-	53,33
2.6	Persentase kebutuhan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Profesional Yang Terpenuhi	%	(Jumlah jenis usaha pariwisata atau sub sektor ekraf yang dibina/ jumlah usaha pariwisata atau sub sektor ekraf) x 100		-	-	-	56,67	-	60,00	-	63,33	63,33
3	Pertanian												
3.1	Produksi pertanian dan perikanan	Ton	Jumlah produksi pertanian dan perikanan	70.000	75.000	96.189,88	80.000	-	85.000	-	85.000	-	75.000
3.2	Persentase peningkatan populasi ternak	%	Jumlah populasi ternak tahun n – Jumlah populasi ternak tahun n-1/jumlah populasi ternak n-1 x 100	-1,59	1	0,12	1	-	1	-	1	-	1
3.3.	Produksi Tanaman Pangan	Ton	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	85.384	85.500	70.374,60	86.000	75.000	86.500	75.000	87.000	75.000	75.000
3.4	Produksi Hortikultura dan Perkebunan	Ton	Jumlah Produksi Hortikultura dan Perkebunan	5.834	5.900	4.642,79	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200	6.100	6.100
3.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Kw/Ha	Produksi padi/luas panen hektar	62,9	62,9	62,64	63	62,65	63	62,7	63	62,7	62,7
3.6	Produksi Hasil Peternakan	Ton	Jumlah Produksi Hasil Peternakan	10.347	10.350	11.212	10.400	10.400	10.450	10.450	10.500	10.500	10.500
3.7	Persentase sarana peternakan yang dimanfaatkan	%	Jumlah sarana yang dimanfaatkan / Jumlah sarana yang disediakan x 100%	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
3.8	Persentase sarana Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan yang dimanfaatkan	%	Jumlah sarana yang dimanfaatkan / Jumlah sarana yang disediakan x 100%	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
3.9	Persentase penanganan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	jumlah kejadian/kasus yang ditangani dibagi jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular yang terjadi	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100
3.10	Persentase penyakit hewan yang tertanggulangi	%	Jumlah penyakit hewan yang ditanggulangi / Jumlah penyakit hewan yang terjadi x 100%	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100



Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD
					Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
3.11	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian	%	Jumlah area yang dapat ditanggulangi (Ha) dibagi Luas Area Terkena Bencana	73,56	75	48,87	75	-	75	-	75	-	75
3.12	Persentase bencana TPH yang terdeteksi dini dan tertanggulangi	%	Jumlah areal terkena bencana yang tertanggulangi/ Jumlah Areal Terkena Bencana x 100%	-	-	-	-	75	-	75	-	75	75
3.13	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	%	Jumlah kelompok tani yang naik kelas dibagi jumlah kelompok tyani x 100	4,35	4,5	1,14	5	1,5	5	2	5	2,5	2,5
3.14	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	izin	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	-	3	67	3	-	3	-	3	-	3
3.15	IKM Pelayanan Rumah Potong Hewan	Kategori (Poin)	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTD RPH	-	-	-	-	Baik (84)	-	Baik (84)	-	Baik (84)	Baik (84)
3.16	Persentase prasarana Tanaman Pangan, holtikultura dan Perkebunan yang dimanfaatkan	%	Jumlah prasarana yang dimanfaatkan / Jumlah prasarana yang disediakan x 100%	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
4.	Perdagangan												
4.1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	(PDRB sector perdagangan n – PDRB sector perdagangan n-1)/ PDRB sector Perdagangan n-1 x 100 %	2,97	4,59	5,01	5,86	5,86	6,53	6,53	7,28	7,28	7,28
4.2	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekpor	%	(Nilai eskpor tahun n – nilai ekpor tahun n-1)/ nilai ekpor tahun n-1 x 100 %	2	2	56,29	2	2	2	2	2	2	2
4.3	Nilai Ekspor non migas	%	Nilai ekspor tahun n - tahun n-1)/ nilai ekspor tahun n-1 x 100%	-	-	32	-	33	-	34	-	35	35
4.4	Persentase fasilitasi pemenuhan perizinan dan pendaftaran perusahaan	%	Jumlah perusahaan yang difasilitasi/Jumlah total perusahaan pemohon x 100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.5	Persentase pasar rakyat dalam kondisi baik	%	Jumlah pasar rakyat dalam kondisi baik / Jumlah total pasar rakyat x 100%	70	70	80	80	-	90	-	100	-	70
4.6	Laju Sarana Distribusi Perdagangan	%	Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik tahun n - tahun n-1 / jumlah sarana perdagangan dalam kondisi baik tahun n-1) x 100%	-	-	-	-	80	-	90	-	100	100
4.7	Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	%	Jumlah bapakting yang harganya stabil/Jumlah total bapakting x 100%	40	40	21,31	40	-	40	-	40	-	40



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD
					Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
4.8	Persentase Rekomendasi Hasil Pemantauan yang Ditindaklanjuti	%	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang ditindaklanjuti/ jumlah rekomendasi hasil pemantauan x 100%	-	-	-	-	10	-	10	-	10	30
4.9	Persentase peningkatan penggunaan produk unggulan Kota Tasikmalaya	%	Jumlah peningkatan pelaku usaha produk unggulan yang mengikuti even/Jumlah IKM leseluruhan x 100%	10	10	3,7	10	-	10	-	10	-	10
4.10	Laju Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri		Jumlah penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri tahun n - tahun n-1/ jumlah penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri tahun n-1) x 100%	-	-	-	-	-	-	10.4	-	11,4	11,4
4.11	Persentase peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor	%	Jumlah pelaku usaha yg berorientasi ekspor/Jumlah total pelaku usaha x 100%	1	1	0	1	-	1	-	1	-	1
4.12	Persentase alat UTTP yang bertera sah	%	Jumlah alat UTTP yang bertera sah/ Jumlah total alat UTTP x 100%	80	80	100	80	-	80	-	80	-	80
4.13	Persentase Konsumen yang dilayani dan ditangani tepat waktu pada UPTD Metrologi Legal		Jumlah konsumen yang dilayani dan ditangani tepat waktu/ jumlah konsumen yang mengajukan pelayanan x 100%	-	-	-	-	80	-	85	-	90	90
5.	Perindustrian												
5.1	Persentase pertumbuhan industri	%	Jumlah pertumbuhan industri/ total industri x 100%	2	4	183,5	4	-	4	-	4	-	4
5.2	Persentase Dokumen Perencanaan Industri yang Dimanfaatkan	%	Jumlah dokumen perencanaan industri yang dimanfaatkan / jumlah total dokumen perencanaan industri pada PPIK x 100%	-	-	100	-	100	-	100	-	100	100
5.3	Persentase Peningkatan Industri	%	Jumlah Industri tahun n - tahun n-1 / jumlah industri tahun n-1) x 100%	-	-	6,78	-	6,78	-	8	-	10	10
5.4	Persentase implementasi pencapaian sasaran rencana pembangunan industri	%	Jumlah realisasi sasaran RPIK/Jumlah total sasaran dalam RPIK x 100%	5	5	100	5	-	5	-	5	-	5
5.5	Persentase pengendalian Izin Usaha Industri	%	Jumlah Izin Usaha Industri yang dipantau dan diawasi/ jumlah total Izin Usaha Industri yang diterbitkan x 100%	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100
5.6	Persentase Industri yang Mematuhi Ketentuan Izin	%	Jumlah industri yang mematuhi ketentuan izin tahun n - tahun n-1/ jumlah industri tahun n-1 x 100%	-	-	-	-	-	-	100	-	100	100
5.7	Persentase IKM yang terdaftar di sistem informasi industri nasional	%	Jumlah IKM yang Terdaftar/ jumlah total IKM x 100%	5	5	0,6	5	-	5	-	5	-	5



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD
					Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
5.8	Persentase Industri yang masuk ke dalam SIINAS	%	Jumlah industri yang masuk dalam siinas / jumlah total industri) x 100%	-	-	-	-	-	-	0,6	-	1	1
Layanan Pendukung dan Penunjang Pemerintahan													
1.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan												
1.1	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Hasil Evaluasi SAKIP Kota	Nilai	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Hasil Evaluasi SAKIP Kota	10,69	11,00	10,52	11,25	-	11,50	-	11,75	-	11,00
1.2	Persentase Nilai IKM Perangkat Daerah Berkategori sangat Baik	Kategori	(Jumlah Nilai IKM Perangkat Daerah berkategori sangat baik/ Jumlah Perangkat Daerah) X 100%	38,89	40,00	41,67	45,00	-	50,00	-	55,00	-	40,00
1.3	Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang Meningkatkan	Kategori	Nilai LPPD dari Kemendagri	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi (3,3348	Sangat Tinggi	-	Sangat Tinggi	-	Sangat Tinggi	-	Sangat Tinggi
1.4	Indeks Reformasi Birokrasi General	Nilai	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi General yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	66,58	-	67,00	-	67,10	67,10
1.5	Capaian Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya	Nilai	Nilai Kualitas Layanan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya yang Diperoleh Melalui Hasil Survey Terhadap Stakeholder	-	-	-	-	85,00	-	88,00	-	90,00	90,00
1.6	Nilai Komposit Kelembagaan	Nilai	Hasil Evaluasi Kelembagaan Berdasarkan Permenpan RB Nomor 20 tahun 2018	-	-	-	-	83,00	-	84,00	-	84,00	84,00
1.7	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Kebijakan Standar Pelayanan Publik	%	(Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Kebijakan Standar Pelayanan Publik/ Jumlah Perangkat Daerah) x 100%	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
1.8	Nilai Dimensi Pelaporan Kinerja dalam Penilaian SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Dimensi Pelaporan Kinerja yang Dinilai Oleh Kemenpan-RB	-	-	-	-	10,55	-	10,58	-	10,60	10,60
1.9	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kota	Nilai	(Nilai Total IKM Pemerintah Daerah yang menerapkan Kebijakan Standar Pelayanan Publik / Jumlah Perangkat Daerah) x 100%	-	-	-	-	88,31	-	88,50	-	88,75	88,75
1.10	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron Dengan Peraturan	%	(Jumlah Produk Hukum yang Direvisi / Jumlah Produk Hukum yang harus direvisi) 100%	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100



Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD
					Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
	Perundang-undangan												
1.11	Indek Tata Kelola Barang dan Jasa	%	Hasil Evaluasi dari LKPP	-	40	40	50	-	60	-	70	-	40
1.12	Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Hukum Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Meningkat	%	Capaian IKK Bidang Hukum Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Meningkat X 100%	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100
1.13	Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik	%	Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik/ Jumlah Kecamatan dan Kelurahan x 100%	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100
1.14	Persentase Produk Hukum Daerah yang Diundangkan	%	Produk Hukum Daerah yang Diundangkan/ Jumlah Target x 100%	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100
1.15	Persentase Pemenuhan Eviden Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam SILPPD	%	(Jumlah Eviden IKK yang Terpenuhi / Jumlah Eviden IKK yang Harus Dipenuhi)X 100%	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
1.16	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan	Nilai	Hasil Penilaian Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan	-	-	-	-	45,00	-	50,00	-	55,00	55,00
1.17	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Nilai	Hasil Penilaian Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	45,00	-	50,00	-	55,00	55,00
1.18	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	Hasil Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Hukum Pemerintah Daerah dari Tim Penilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia		-	-	-	86,88	-	86,89	-	86,90	86,90
1.19	Nilai Daerah Kabupaten / Kota Peduli HAM	Nilai	Hasil Penilaian Daerah Kabupaten / Kota Peduli HAM yang Dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia		-	-	-	92,70	-	92,90	-	93,00	93,00
1.20	Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%	"Capaian IKK Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Meningkat X 100% Seluruh Jumlah IKK Bidang Perekonomian dan Pembangunan"	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100
1.21	Persentase Optimalisasi Percepatan Pembangunan Daerah	%	Perbandingan Target Pembangunan Daerah Terhadap Capaian Fsik dan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100
1.22	Indek Kematangan UKPBJ	%	Dihitung oleh LKPP		3	3	4	-	5	-	5	-	3
1.23	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Nilai	Hasil Penilaian Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	45,00	-	50,00	-	55,00	55,00



Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD
					Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1.24	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan	Nilai	Hasil Penilaian Kualitas Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	45,00	-	50,00	-	55,00	55,00
1.25	Persentase Tindak Lanjut Hasil Evluasi Pembangunan yang Ditindklanjuti	%	(Jumlah Tindak Lanjut Hasil Evluasi Pembangunan yang Dilaksanakan / Jumlah Saran Tindak Lanju) X 100%	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
1.26	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Skor	Hasil Penilaian dari LKPP		-	-	-	70,74	-	72,71	-	73,71	73,71
1.27	Persentase hasil pelaksanan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD	%	Target fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD/Realisasi fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD x 100%	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100
1.28	RB Sekretariat DPRD	Nilai	Nilai RB Sekretariat DPRD	-	-	-	-	67 (B)	-	68 (B)	-	69 (B)	69 (B)
1.29	Capaian IKM DPRD	Nilai	Nilai IKM DPRD terhadap penilaian pelayanan Sekretariat DPRD	-	-	-	-	Baik (85,00)	-	Baik (86,00)	-	Baik (87,00)	Baik (87,00)
2	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan												
1	Perencanaan Pembangunan												
1.1	Nilai Perencanaan Kinerja dalam penilaian SAKIP	Poin	Jumlah variable pada komponen perencanaan kinerja SAKIP Kota Tasikmalaya	25,17	25,20 - 25,30	23,85	25,30 - 25, 40	-	25,40 - 25,50	-	25,50 - 25,60	-	25,20 - 25,30
1.2	Nilai Pengukuran Kinerja dalam penilaian SAKIP	Poin	Jumlah variable pada komponen pengukuran kinerja SAKIP Kota Tasikmalaya	17,58	17,65 - 17, 85	19,94	17,85 - 18,00	-	18,00 - 18,15	-	18,15 - 18, 30	-	17,65 - 17, 85
1.3	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Daerah berpredikat minimal baik	%	Jumlah indicator kinerja daerah berpredikat minimal baik/jumlah indicator kinerja daerah x 100%	-	80	100	83	-	86	-	90	-	90
1.4	Nilai Pencapaian Komponen Perencanaan Kinerja dalam penilaian SAKIP Kota	Poin	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada SAKIP Kota dari Kementerian PANRB	-	-	-	-	23,95	-	24,05	-	24,15	24,15
1.5	Nilai Pencapaian Komponen Pengukuran Kinerja dalam penilaian SAKIP Kota	Poin	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada SAKIP Kota dari Kementerian PANRB	-	-	-	-	20,04	-	20,14	-	20,24	20,24
2	Keuangan												
2.1	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	OPini	Opini BPK atas atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD
					Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
2.2	Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	%	Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah/Target x 100%	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100
2.3	Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah Sesuai Standar	%	Penganggaran Keuangan Daerah Sesuai Standar/Standar x 100%	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
2.4	Persentase Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Standar	%	Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Standar/Standar x 100%	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
2.5	Persentase Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Sesuai Standar	%	Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Sesuai Standar/Standar x 100%	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
2.6	Persentase Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Standar	%	Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Standar/Standar x 100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.7	Persentase peningkatan pajak daerah	%	Capaian pajak tahun berkenaan /capaian pajak tahun lalu (n-1) x 100%	14,06	2,31	3,86	7,82	-	13,32	-	18,83	-	2,31
2.8	Persentase peningkatan PAD bukan pajak daerah	%	Capaian PAD tahun berkenaan /capaian PAD tahun lalu (n-1) x 100%	59,35	-1,24	3,98	-1,06	-	-0,85	-	-0,67	-	-1,24
2.9	Capaian Pajak Daerah	%	Capaian Pajak Daerah/target x100%	100	100	101,66	100	-	100	-	100	-	100
2.10	Capaian PAD bukan pajak daerah	%	Capaian PAD bukan Pajak Daerah/target x100%	100	100	94,12	100	-	100	-	100	-	100
2.11	Persentase Peningkatan pendapatan asli daerah	%	Penerimaan pendapatan asli daerah tahun berkenaan /penerimaan pendapatan asli daerah tahun dasar (2022) x 100%	41,68	-	-	-	3,19	-	9,50	-	14,96	14,96
2.12	Persentase Dokumen Target Pendapatan Asli Daerah yang Akurat	%	Jumlah dokumen Target PAD yang akurat / Jumlah dokumen Target PAD x 100%	-	-	--	-	100	-	100	-	100	100
2.13	Persentase penerapan kebijakan teknis	%	Jumlah kebijakan teknis yang diterapkan / Jumlah kebijakan teknis x 100%	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
2.14	Persentase pengelolaan penerimaan pajak yang sesuai standar	%	Jumlah pengelolaan penerimaan Pajak yang sesuai standar/Jumlah pengelolaan penerimaan Pajak x 100%	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD
					Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
2.15	Persentase rekomendasi hasil evaluasi pendapatan yang ditindaklanjuti	%	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi pendapatan yang ditindaklanjuti / Jumlah rekomendasi hasil evaluasi pendapatan x 100%	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
2.16	Persentase Layanan yang memanfaatkan teknologi informasi	%	Jumlah Layanan yang memanfaatkan teknologi informasi / Jumlah Layanan x 100%	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan												
3.1	Indeks Merit Sistem	Poin	Indeks Merit Sistem	120,5/ Buruk	175/ Kurang	270/ Sangat Baik	225/ Kurang	-	250/ Baik	-	275/ Baik	-	275/ Baik
3.2	Indeks Sistem Merit	Nilai (Kategori)	Penilaian Mandiri Sistem Merit yang Diverifikasi dan Ditetapkan oleh KASN	120,5 (Buruk)	-	-	-	350 (Baik)	-	360 (Baik)	-	365 (Baik)	365 (Baik)
3.3	Persentase ASN yang diangkat sesuai dengan formasi	%	ASN yang diangkat sesuai dengan formasi/Jumlah ASN x 100%	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100
3.4	Persentase capaian pelayanan kepegawaian	%	capaian pelayanan kepegawaian/jumlah layanan kepegawaian x 100%	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100
3.5	Persentase PNS yang terpetakan kompetensinya	%	PNS yang terpetakan kompetensinya/jumlah PNS x 100%	7	12	12	18	-	25	-	35	-	35
3.6	Persentase penyelesaian evaluasi kinerja dan penanganan disiplin	%	Penyelesaian evaluasi kinerja dan penanganan disiplin	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100
3.7	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi/Jumlah ASN x 100%	-	17	31,72	18	-	19	-	20	-	20
3.8	Nilai kriteria kualitas evaluasi kinerja	Nilai (Kategori)	Jumlah Nilai Kriteria Kualitas Evaluasi Kinerja yang Sudah Diverifikasi	14	56	67,5	-	67,5	-	69,5	-	69,5	69,5
3.9	Nilai kriteria kualitas pengadaan ASN	Nilai (Kategori)	Jumlah Nilai Kriteria Kualitas Pengadaan ASN yang Sudah Diverifikasi	15	30	36	-	38	-	40	-	41	41
3.10	Nilai kriteria kualitas pengelolaan promosi dan mutase	Nilai (Kategori)	Jumlah Nilai Kriteria Kualitas pengelolaan promosi dan mutasi yang Sudah Diverifikasi	11	25	32,5	-	35	-	35	-	35	35
3.11	Nilai kriteria kualitas	Nilai	Jumlah Nilai Kriteria Kualitas pengembangan karir dimensi	13	55	65	-	72,5	-	72,5	-	72,5	72,5



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD
					Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
	pengembangan karir dimensi manajemen talenta	(Kategori)	manajemen talenta yang Sudah Diverifikasi										
3.12	Nilai kriteria kualitas penggajian, penghargaan dan disiplin	Nilai (Kategori)	Jumlah Nilai Kriteria Kualitas penggajian, penghargaan dan disiplin yang Sudah Diverifikasi	11	25	35	-	35	-	35	-	35	35
3.13	Nilai kriteria kualitas perencanaan kebutuhan ASN	Nilai (Kategori)	Jumlah Nilai Kriteria Kualitas Perencanaan Kebutuhan ASN yang Sudah Diverifikasi	15	30	37,5	-	40	-	42	-	43	43
3.14	Nilai kriteria kualitas perlindungan dan pelayanan	Nilai (Kategori)	Jumlah Nilai Kriteria Kualitas Perlindungan dan Pelayanan yang Sudah Diverifikasi	13	10	12	-	12	-	14	-	15	15
3.15	Nilai kriteria kualitas sistem informasi	Nilai (Kategori)	Jumlah Nilai Kriteria Kualitas sistem informasi yang Sudah Diverifikasi	12	15	19	-	20	-	22	-	23	23
3.16	Nilai kriteria kualitas pengembangan karir dimensi pengembangan kompetensi	Nilai (Kategori)	Jumlah Nilai Kriteria Kualitas Pengembangan Karir Dimensi Pengembangan Kompetensi yang Sudah Diverifikasi	20	24	22,5	-	30	-	30	-	31	31
4	Penelitian dan Pengembangan												
4.1	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	%	Hasil kajian yang direkomendasikan/jumlah kajian yang dihasilkan dalam periode 1 tahun berjalan x 100%	80	85	100	90	-	95	-	100	-	100
4.2	Jumlah inovasi daerah yang terlaporkan dan terverifikasi dalam Inovation Government Award (IGA)	Buah	Jumlah inovasi daerah yang terlaporkan dan terverifikasi dalam Inovation Government Award (IGA)	9	10	18	11	-	12	-	13	-	13
4.3	Indeks Inovasi Daerah	Poin	Hasil Penilaian Indeks Inovasi Daerah dari Kementerian Dalam Negeri	-	-	-	-	47,20	-	53.20	-	60,20	60,20
4.4	Persentase hasil kajian yang dijadikan dasar perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	%	Jumlah Hasil Kajian yang menjadi dasar perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan terhadap Jumlah Seluruh Kajian	-	-	-	-	30	-	35	-	40	40
5	Unsur Pengawasan Pemerintahan												
5.1	Tingkat capaian kapabilitas APIP	Level	capaian kapabilitas APIP dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	-	Level 3	-	Level 3	-	Level 3
5.2	Tingkat Maturitas SPIP Kota	Level	Tingkat Maturitas SPIP dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	-	Level 3	-	Level 3	-	Level 3



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD
					Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
5.3	Pemenuhan Elemen Praktek Profesional	Level	Pemenuhan Elemen Praktek Profesional dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Level 2	Level 3	Level 2	-	level 3	-	level 3	-	Level 2
5.4	Pemenuhan Elemen Praktek Budaya dan hubungan Organisasi	Level	Pemenuhan Elemen Praktek Budaya dan hubungan Organisasi dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Level 2	Level 3	Level 2	-	level 3	-	level 3	-	Level 2
5.5	Pemenuhan Elemen Praktek Struktur Tata Kelola	Level	Pemenuhan Elemen Praktek Struktur Tata Kelola dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Level 2	Level 3	Level 2	-	level 3	-	level 3	-	Level 2
5.6	Pemenuhan Elemen Praktek Peran dan Layanan	Level	Pemenuhan Elemen Praktek Peran Dan Layanan dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Level 2	Level 3	Level 2	-	level 3	-	level 3	-	Level 2
5.7	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	%	Realisasi Penyelesaian TLHP BPK - RI	-	-	-	-	85,00	-	85,02	-	85,04	85,04
5.8	Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Level	Level Kapabilitas APIP yang telah dilakukan penilaian oleh BPKP	-	-	-	-	Level 3	-	Level 3	-	Level 3	Level 3
5.9	Hasil Survey Penilaian Integritas	Poin	Nilai Survey Penilaian Integritas yang dikeluarkan oleh KPK	-	-	-	-	74	-	74,02	-	74,04	74,04
5.10	Nilai Komponen Evaluasi Internal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi AKIP kota untuk komponen evaluasi internal yang dikeluarkan oleh tim evaluator	-	-	-	-	17,10	-	17,15	-	17,20	17,20
5.11	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Level	Indeks Perhitungan Parameter Penilaian Pengelolaan Risiko yang dikeluarkan oleh BPKP	-	-	-	-	Level 2	-	Level 3	-	Level 3	Level 3
5.12	Nilai Hasil evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tingkat Kota	Level	Penilaian Unsur dan Sub Unsur Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi oleh BPKP	-	-	-	-	Level 3	-	Level 3	-	Level 3	Level 3
5.13	Jumlah Unit kerja yang mendapatkan Predikat WBK	Unit Kerja	Hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK / WBBM yang dilaksanakan oleh Kemenpan	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1
5.14	Indek Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Indeks	Penilaian Indikator – indikator Efektifitas Pengendalian Korupsi Hasil Evaluasi BPKP	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2
5.15	Persentase kesesuaian antara Rencana Aksi RB dengan Roadmap RB tingkat Kota Tasikmalaya	%	Persentase kesesuaian antara rencana aksi reformasi birokrasi tingkat Kota Tasikmalaya dengan Roadmap RB Kota Tasikmalaya	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
5.16	Persentase TLHP yang diverifikasi	%	Realisasi TLHP APIP dan BPK RI yang berhasil divrifikasi dibandingkan dengan jumlah seluruh TLHP APIP dan BPK RI yang di susulkan untuk diverifikasi	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD
					Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
5.17	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai standar	%	(Jumlah kasus yang selesai / jumlah total kasus) x 100	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
5.18	Persentase kejadian kerugian keuangan yang diselesaikan sesuai standar	%	(jumlah laporan penanganan kehilangan BMD yang telah terbit / Jumlah total kejadian kehilangan BMD) x 100	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
5.19	Capaian penjaminan kualitas atas penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Level	Hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri Penyelenggaraan SPIP terintegrasi tingkat kota dan PD	-	-	-	-	Level 3	-	Level 3	-	Level 3	Level 3
5.20	Capaian penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Level	Hasil penilaian mandiri atass penyelenggaraan SPIP terintegrasi tingkat kota oleh Tim PM Tingak Kota	-	-	-	-	Level 3	-	Level 3	-	Level 3	Level 3
5.21	Persentase perangkat daerah yang membangun zona Integritas menuju WBK/WBBM	%	(Perangkat daerah yang diajukan untuk mendapat predikat WBK – WBBM / Jumlaah Perangkat Daerah yang mendapat pendampingan Zona Intregitas menuju WBK – WBBM) x 100	-	-	-	-	50	-	50	-	50	50
5.22	Persentase perangkat daerah yang menerapkan RADPK	%	(Jumlah perangkat daerah yang menerapkan RADPK / Jumlah Perangkat Daerah) x 100	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
5.23	Persentase ASN yang melaporkan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan)	%	(Jumlah laporan harta kekayaan yang disampaikan / Jumalh wajib lapor) x 100	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
5.24	Persentase evaluasi perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tingkat Kota	%	(Jumlah item perencanaan dan pelaksanaan yang di evaluassi / jumlah total item perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrassi) x 100	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
6.	Unsur Kewilayahan												
6.1	Tingkat Kinerja Kecamatan	Kategori	Tingkat Kinerja Kecamatan hasil penilaian Setda	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
6.2	Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum Lingkungan	%	Jumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani/jumlah gangguan x 100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.3	Persentase Kelurahan dengan kategori "Cepat Berkembang"	%	Jumlah kelurahan kategori "Cepat berkembang"/ jumlah kelurahan x 100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.4	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	%	Capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD
					Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
6.5	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	Capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.6	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	%	Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.7	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	Capaian pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7.	Urusan Pemerintahan Umum												
7.1	Persentase penyelesaian potensi konflik sosial	%	Jumlah potensi konflik social yang diselesaikan/jumlah potensi konflik x 100%	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100
7.2	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	%	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu dikeluarkan oleh KPU	-	-	-	86,50	-	-	-	-	-	-
7.3	Persentase ormas yang aktif	%	Jumlah ormas aktif/jumlah ormas x 100%	64	65	58	66	-	67	-	68	-	65
7.4	Persentase capaian pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	Jumlah peserta yang dibina/target x 100%	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100
7.5	Persentase capaian pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	%	Jumlah peserta yang dibina/target x 100%	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100
7.6	Persentase penanganan konflik sosial	%	Jumlah potensi konflik social yang ditangani/jumlah potensi konflik x 100%	63	64	100	65	-	66	-	67	-	64
7.7	Persentase parpol yang dibina	%	Jumlah parpol yang dibina/jumlah parpol x 100%	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100
7.8	Persentase ormas yang dibina	%	Jumlah ormas yang dibina/jumlah parpol x 100%	71	71	58	71	-	71	-	71	-	71
7.8	Presentase masyarakat terbina yang memiliki rencana aksi tindak lanjut di Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	Jumlah masyarakat terbina bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan / Jumlah masyarakat Kota Tasikmalaya usia produktif x 100%	-	-	-	-	1	-	0,33	-	0,1	1,43
7.9	Persentase masyarakat terbina yang memiliki rencana aksi tindak lanjut di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi	%	Jumlah masyarakat terbina di bidang Pendidikan Politik/ Jumlah masyarakat Kota Tasikmalaya usia produktif x 100%	-	-	-	-	0,55	-	0,20	-	0,30	1,05



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023		2024		2025		2026		Periode Akhir RPD
					Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik												
7.10	Persentase ormas terbina yang memiliki rencana aksi tindak lanjut Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	%	Jumlah ormas terbina / Jumlah ormas x 100%	-	58	-	-	65	-	65	-	65	65
7.11	Persentase ormas yang terkendali	%	Jumlah Ormas yang aktif / Jumlah Ormas x 100%	-	58	-	-	65	-	65	-	65	65
7.12	Persentase masyarakat terbina yang memiliki rencana aksi tindak lanjut di Bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	%	Jumlah masyarakat terbina bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya/ Jumlah masyarakat Kota Tasikmalaya usia produktif x 100%	-	-	-	-	0,48	-	0,01	-	0,05	0,54
7.13	Persentase potensi ancaman dan gangguan yang terkendali	%	Jumlah potensi konflik yang ditindaklanjuti / Jumlah potensi konflik x 100%	50	-	-	-	70-80	-	70-80	-	70-80	70-80



Tabel 8.4.
Rencana Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN N)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN- 2023		TAHUN- 2024		TAHUN- 2025		TAHUN- 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar													
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Indeks pencapaian SPM Bidang Pendidikan		Tuntas Pratama (72)		Tuntas Utama (95.80)		Tuntas Utama (96.02)		Tuntas Utama (97)		Tuntas Utama (97)		Dinas Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase capaian prestasi siswa, kualitas pendidik dan sarana prasarana SD			2.000.000.000								2.000.000.000	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase capaian prestasi siswa, kualitas pendidik dan sarana prasarana SMP												
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase capaian prestasi siswa, kualitas pendidik dan sarana prasarana PAUD												
		Angka Putus Sekolah (APS) SD					2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		6.000.000.000	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP												
		Nilai Mutu PAUDPNF												
		Nilai Mutu Sekolah Dasar												
		Nilai Mutu Sekolah Menengah Pertama												
			Jumlah		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		8.000.000.000	



Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN N)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN- 2023		TAHUN- 2024		TAHUN- 2025		TAHUN- 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Indeks pencapaian SPM Bidang Kesehatan		Tuntas Pratama (75)		Tuntas Utama (98,5)		Tuntas Paripurna (100)		Tuntas Paripurna (100)		Tuntas Paripurna (100)		Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Sesuai Standar			2.421.431.000								2.421.431.000	
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (UHC)					2.421.431.000		2.421.431.000		2.421.431.000		7.264.293.000	
		Cakupan Kinerja Layanan P2P												
		Cakupan Kinerja Pelayanan Kesehatan												
		Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat												
		Cakupan Rumah Sakit Kelas C, D dan Faskes Tk.Kota dengan ijin operasional yang masih berlaku												
		Capaian Kota Sehat												
		Capaian Penyelenggaraan Operasional Puskesmas laboratorium dan gudang farmasi												
		Indeks Pencapaian SPM kesehatan												
		Persentase Balita Stunting												



Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN N)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN- 2023		TAHUN- 2024		TAHUN- 2025		TAHUN- 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11
		Persentase Faskes dengan SIK terinterasi												
		Rasio Faskes terhadap penduduk												
		Cakupan Farmalkes yang tersedia												
		Cakupan penelitian kesehatan												
		Indeks Keluarga Sehat												
		Integrasi Pelayanan Primer												
		Persentase Kecamatan yang menyelenggaraan KKS												
		Persentase Balita Stunting yang tertangani												
		Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan lingkungan												
		Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja dan olah rag												
		Persentase SPM Kesmas												
		Persentase SPM PM dan PTM												
			Jumlah		2.421.431.000		2.421.431.000		2.421.431.000		2.421.431.000		9.685.724.000	



Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN N)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN- 2023		TAHUN- 2024		TAHUN- 2025		TAHUN- 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum	Indeks pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum		Tuntas Utama (91,07)		Tuntas Utama (98,74)		Tuntas Utama (98,30)		Tuntas Paripurna (100)		Tuntas Paripurna (100)		Dinas PUPR
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase KK/RT berakses layanan air minum			3.550.000.000								3.550.000.000	
		Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kota Tasikmalaya					5.975.000.000		8.700.000.000		9.100.000.000		23.775.000.000	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase KK yang berakses SPALD			10.445.000.000								10.445.000.000	
		IKM pelayanan pengelolaan Air limbah domestik					9.170.000.000		8.920.000.000		8.970.000.000		27.060.000.000	
		Persentase kebutuhan infrastruktur Air limbah domestik yang terpenuhi												
			Jumlah		13.995.000.000		15.145.000.000		17.620.000.000		18.070.000.000		64.830.000.000	
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat	Indeks pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat		Tuntas Paripurna (100)		Tuntas Paripurna (100)		Tuntas Paripurna (100)		Tuntas Paripurna (100)		Tuntas Paripurna (100)		Dinas Perawaskin
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana yang ditangani			880.000.000								880.000.000	



Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN N)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN- 2023		TAHUN- 2024		TAHUN- 2025		TAHUN- 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11
		Persentase rumah korban relokasi program kabupaten/kota yang ditangani												
		Persentase Rumah Korban Bencana yang Ditangani				1.080.000.000		1.080.000.000		3.880.000.000		6.040.000.000		
		Persentase Rumah Korban Relokasi Program Kab/Kota												
			Jumlah		880.000.000		1.080.000.000		1.080.000.000		3.880.000.000		6.920.000.000	
5	Urusan Pemerintahan Bidang Trantibumlinmas													
		Indeks pencapaian SPM Sub BidangTrantibum		Tuntas Paripurna (100)		Tuntas Paripurna (100)		Tuntas Paripurna (100)		Tuntas Paripurna (100)		Tuntas Paripurna (100)		Satpol PP
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang di selesaikan			327.900.000								327.900.000	
		Persentase Gangguan Trantibum yang Diselesaikan				327.900.000		327.900.000		327.900.000		983.700.000		
		Persentase Pelanggaran Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Diselesaikan												
		Indeks pencapaian SPM Sub Bidang Penanggulangan Bencana		Tuntas Utama (91)		Tuntas Utama (92)		Tuntas Utama (93)		Tuntas Utama (94)		Tuntas Utama (94)		BPBD



Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN N)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN- 2023		TAHUN- 2024		TAHUN- 2025		TAHUN- 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Masyarakat yang Memperoleh Informasi Layanan Bencana Persentase Masyarakat yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Penanganan Bencana dan warga negara korban bencana			2.240.742.200								2.240.742.200	
		Persentase Pengurangan Risiko Bencana					1.915.000.000		1.954.000.000		2.125.000.000		5.994.000.000	
		Indeks pencapaian SPM Sub Bidang Pemadam Kebakaran		Tuntas Madya (87)		Tuntas Madya (88)		Tuntas Madya (89)		Tuntas Utama (90)		Tuntas Utama (90)		BPBD
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah Wilayah Managemen Kebakaran (WMK)			620.000.000								620.000.000	
		Persentase Layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran					540.000.000		788.000.000		2.725.000.000		4.053.000.000	
			Jumlah		3.188.642.200		2.782.900.000		3.069.900.000		5.177.900.000		14.219.342.200	
6	Urusan pemerintahan bidang Sosial			Tuntas Utama (90)		Tuntas Paripurna (100)		Tuntas Utama (95,01)		Tuntas Utama (96,00)		Tuntas Utama (96,00)		Dinas Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial			3.550.000.000								3.550.000.000	



Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN N)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN- 2023		TAHUN- 2024		TAHUN- 2025		TAHUN- 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11
		Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap PPKS					4.050.000.000		4.360.000.000		4.360.000.000		12.770.000.000	
	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana Alam dan Sosial			275.000.000								275.000.000	
		Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan Sosial					275.000.000		275.000.000		425.000.000		975.000.000	
			Jumlah		3.825.000.000		4.325.000.000		4.635.000.000		4.785.000.000		17.570.000.000	



BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 merupakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus segera menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-3026.

Perubahan RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 mengacu kepada RPJPD Kota Tasikmalaya dan RTRW Kota Tasikmalaya, RPD Provinsi Jawa Barat dan RPJM Nasional dalam rangka sinkronisasi dan keselarasan pembangunan regional dan nasional.

Dengan adanya dokumen Perubahan RPD ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Perubahan RPD Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Untuk itu, seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Tasikmalaya harus menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun 2023-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
2. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Perubahan RPD Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026 merupakan sasaran dan indikator kinerja daerah/kota. Perangkat daerah sebagai organisasi pelaksana harus menjabarkannya ke dalam sasaran, program dan indikator kinerja perangkat daerah yang mempunyai hasil dan dampak untuk mendukung tercapainya sasaran dan indikator kinerja daerah/kota sesuai dengan tugas, pokok, fungsi dan prioritasnya masing-masing.
3. Perubahan RPD Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026 dijabarkan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap tahunnya, dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RPD Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pada setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perubahan RPD Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026 berlaku sampai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJMD) Kota Tasikmalaya setelah adanya Kepala Daerah hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024.



Semoga Perubahan RPD ini, dapat menjadi pedoman bagi pembangunan Kota Tasikmalaya sehingga pembangunan dapat lebih terarah dan tepat sasaran untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya.

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ASEP SUKMANA